SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud, terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2024.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; dan

c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. Narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

PERUBAHAN RKPD 2024

PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024

1

bappeda.jatengprov.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4. Maksud dan Tujuan I-6
1.5. Sistematika I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II II-1
2.1 Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama II-1
2.2 Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah II-2
2.3 Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program II-12
2.4 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah II-133
2.5 Unsur Pemerintah Umum II-134
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Dinamika Perekonomian Global III-1
3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-1
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-4
3.2.1 Arah KebijakanPendapatan Daerah III-4
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-8
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-12
3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya III-17
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV-2
4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-2
4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 ..... IV-7
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-10
4.3 Pembangunan Wilayah Jawa Tengah IV-35
4.4 Inovasi Daerah Pada Perubahan RKPD 2024 ..... IV-37
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024 ..... V-1
5.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah V-2
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah VI-1
6.3 Indikator Kinerja Program VI-7
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-1
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... II-2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan II-12
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan II-19
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. II-26
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-33
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-34
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Sosial II-36
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja..... II-42
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak II-45
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Pangan II-47
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan..... II-48
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup..... II-49
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... II-53
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.... II-54
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-56
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan..... II-57
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika II-61
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM..... II-62
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal II-64
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga..... II-65
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Urusan Statistik II-66
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Urusan Persandian II-67
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Urusan Kebudayaan II-68
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan II-69
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan II-70
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan..... II-71
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Pariwisata II-75
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pertanian..... II-77
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Kehutanan II-82
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral II-90
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan..... II-96
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian II-98
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi II-100
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah II-100
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD II-104
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Perencanaan II-105
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Keuangan II-106
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Kepegawaian II-128
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan..... II-130

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan II-131
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Penghubung II-131
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Pengawasan II-132
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum II-133
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 ... III-3
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023 ..... III-5
Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-6
Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-7
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023 ..... III-8
Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-11
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023 ..... III-12
Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-13
Tabel 3.9 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-15
Tabel 3.10 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... III-17
Tabel 3.11 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-18
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2023 dan TW.II Tahun 2024 ..... III-19
Tabel 3.13 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Triwulan II III-19
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 ..... IV-1
Tabel 4.2 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Musrenbang Provinsi Tahun 2024 ..... IV-3
Tabel 5.1 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... V-1
Tabel 5.2 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... V-2
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VI-1
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VI-2
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... VI-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen I-6
Gambar 4.1 Gambaran Keselarasan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Prioritas Daerah, dan 10 (Sepuluh) Program Prioritas Daerah Tahun 2024 ..... IV-28
Gambar 4.2 Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah..... IV-37
Gambar 4.3 Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah (PB *Backlog*)..... IV-39
Gambar 4.4 Pembangunan Baru Relokasi di Provinsi Jawa Tengah (PB Relokasi IV-40
Gambar 4.5 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah (PB Bencana) IV-41
Gambar 4.6 Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 ..... IV-43
Gambar 4.7 Perkembangan Alokasi Bantuan Keuangan Desa Wisata di Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... IV-43

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan pembangunan provinsi Jawa Tengah di tahun 2024. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026. Sehingga upaya pencapaian target atas RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 menjadi sangat penting dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 karena akan berdampak pada upaya pencapaian target pada tahapan selanjutnya. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024 telah terjadi berbagai dinamika yang berdampak pada diperlukannya penyesuaian pada RKPD Tahun 2024. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya mempertajam pencapaian target pembangunan yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Arah kebijakan pembangunan tersebut didukung dengan 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan daerah yang meliputi: 1) Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil; 2) Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan; 4) Penuntasan Kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting; 5) Penanganan dampak perubahan iklim; 6) Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi; 7) Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif; 8) Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi; 9) Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 10) Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN). Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional, maupun regional termasuk konflik geopolitik, yang menyebabkan gejolak ekonomi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Terbitnya kebijakan baru pada beberapa sektor melalui terbitnya regulasi baru, memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan kondisi dinamika diatas dan hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat tercapai. Penyesuaian terhadap perencanaan juga perlu dilakukan guna mengoptimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 pada program/kegiatan pembangunan. Oleh karena itu upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 dilakukan melalui penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut.

Dalam prosesnya, perubahan RKPD tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi perubahan beberapa hal yaitu:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKU daerah, IKU OPD, IKD, IKP); dan/atau
3. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2024.

Sedangkan proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi yaitu: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111) yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 063);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 55).

1.3. Hubungan Antardokumen

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban. Dinamika pembangunan yang terjadi baik dari sisi anggaran maupun non anggaran akan berdampak pada dibutuhkannya penyesuaian pada dokumen perencanaan, yaitu RKPD Tahun 2024. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024 perlu dilakukan upaya percepatan yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat tercapai. Berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 pada program/kegiatan pembangunan maka perlu penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dalam rangka mengakomodir penyesuaian dalam tahap perencanaan daerah. Perubahan RKPD tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). KUPA PPAS ini akan menjadi bahan pembahasan bagi penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD). RKPD Perubahan yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja). Hubungan antar dokumen – dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

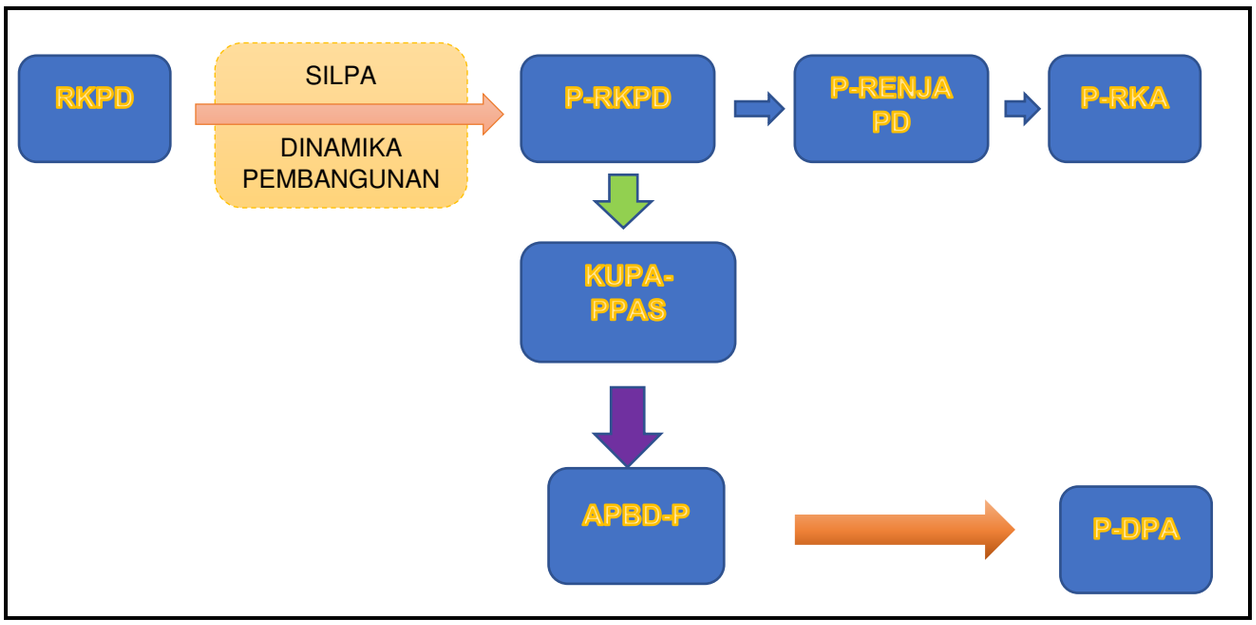

Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen

Selain itu, penyusunan dokumen Perubahan RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/sustainable development goals (SDGs), *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan stunting, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

1.5. Sistematika

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi sistematika sebagai berikut:

BUKU I, yang berisi narasi dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan; serta sistematika perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan, serta program tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024; serta arah kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan target sasaran pembangunan daerah dan fokus prioritas tahun 2024 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BUKU II, yang memuat Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi hasil triwulan II tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada tahun berjalan. Perubahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 mendasarkan pada hasil dari evaluasi hasil kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Evaluasi dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Program (IKP) dengan membandingkan target RKPD dengan realisasi sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024. Hasil dari evaluasi sampai dengan triwulan II ini yang akan menjadi dasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2024 dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Secara umum, ada beberapa kondisi evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024. Kondisi tersebut antara lain ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2024. Berikut dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Koordinator
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82	45,20	98,65	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96	10,47 (Maret 2024)	93,22	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,364	0,367 (Maret 2024)	99,18	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50	4,97 (TW I)	105,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	3,0 ± 1	2,22	74,00	Sedang	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94	4,39 (Feb 2024)	123,92	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	113,02	105,18	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Koordinator
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,39	99,95	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27	59,43	103,25	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	93,31	100,30	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20	63,07	108,37	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	68,59	101,54	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	5,52	138,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50	83,13	102,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi: 91 % ≤ 100 % Tinggi: 76 % ≤ 90% Sedang: 66 % ≤ 75 % Rendah: 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah: ≤ 50 %

Capaian kinerja Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja. Dari 14 indikator kinerja tersebut terdapat 13 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala sedang.

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82	45,20	98,65	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96	10,47 (Maret 2024)	93,22	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,364	0,367 (Maret 2024)	99,18	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50	4,97 (TW I)	105,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	3,0 ± 1	2,22	74,00	Sedang	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94	4,39 (Feb 2024)	123,92	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	113,02	105,18	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,39	99,95	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27	59,43	103,25	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	93,31	100,30	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20	63,07	108,37	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
B	**Aspek Pelayanan Umum**						
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	PENDIDIKAN						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,94	12,85	99,30	Sangat Tinggi	Disdikbud
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,08	8,01	99,13	Sangat Tinggi	Disdikbud
	KESEHATAN						
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,60	74,69	100,12	Sangat Tinggi	Dinkes
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2,00	-0,85	-42,50	Sangat Rendah	Dinkes
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	60,00	31,42	52,37	Rendah	Dinkes
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan *stunting*	%	80,00	65	81,25	Tinggi	Dinkes
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	%	78,00	42,04	53,90	Rendah	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa						
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinkes
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	49,89	49	98,22	Sangat Tinggi	Dinkes
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87,00	88,64	101,89	Sangat Tinggi	Dinkes
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90,00	90,26	100,29	Sangat Tinggi	Dinkes
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90,00	91,11	101,23	Sangat Tinggi	Dinkes
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	88,00	90,26	102,57	Sangat Tinggi	Dinkes
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98,00	98,58	100,59	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,17	97,06	98,87	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100,00	96,36	96,36	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100,00	NA	NA	NA	RSUD Kelet Donorejo
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	91,29	90,62	99,27	Sangat Tinggi	BMCK
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	44,48	46,47	104,47	Sangat Tinggi	BMCK
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	91,18	82,99	91,02	Sangat Tinggi	BMCK
4	Persentase akses air minum aman	%	40,43	38,75	95,84	Sangat Tinggi	BMCK
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	10,97	9,39	85,60	Tinggi	Pusdataru

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	49,42	18,12	36,67	Sangat Rendah	Pusdataru
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	61,78	60,4	97,77	Sangat Tinggi	Pusdataru
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	61,57	54,67	88,79	Tinggi	Pusdataru
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	14,29	28,89	202,17	Sangat Tinggi	Disperakim
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	0,04	20,07	50175,00	Sangat Tinggi	Disperakim
3	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	55,21	41,68	75,49	Tinggi	Disperakim
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82,00	NA	NA	NA	Satpol PP
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,74	0,74	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
	SOSIAL						
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	0,55	0,22	40,00	Sangat Rendah	Dinsos
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	TENAGA KERJA						
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,60	6,73	23,53	Sangat Rendah	Disnakertrans
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	62,85	17,14	27,27	Sangat Rendah	Disnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	56,00	NA	NA	NA	Disnakertrans
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	9,24	4,17	45,13	Sangat Rendah	Disnakertrans
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	45,05	64,49	143,15	Sangat Tinggi	Disnakertrans
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91,07	91,07	100,00	Sangat Tinggi	Disnakertrans
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81,53	51,18	159,30	Sangat Tinggi	Disnakertrans
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40,00	NA	NA	NA	DP3AKB
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,25	1,9	223,68	Sangat Tinggi	DP3AKB
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,00	64,99	98,47	Sangat Tinggi	DP3AKB
	PANGAN						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,00	NA	NA	NA	Dishanpan
	PERTANAHAN						
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Disperakim
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	Disperakim
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50,66	50,66	100,00	Sangat Tinggi	DISLHK
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,01	86,32	101,54	Sangat Tinggi	DISLHK

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,37	3,39	100,59	Sangat Tinggi	DISLHK
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,37	NA	NA	NA	DISLHK
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4,00	4	100,00	Sangat Tinggi	Dispermasdes dukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0,7318	0,71	97,02	Sangat Tinggi	Dispermasdes dukcapil
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13	2,04	95,77	Sangat Tinggi	DP3AKB
	PERHUBUNGAN						
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,05	5,87	97,02	Sangat Tinggi	Dishub
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,38	0,36	94,74	Sangat Tinggi	Dishub
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16,098	16,32	101,38	Sangat Tinggi	Dishub
4	*On time performance* layanan transportasi	%	83,22	76,33	91,72	Sangat Tinggi	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,07	4,26	138,76	Sangat Tinggi	Diskominfo
	KOPERASI DAN UKM						
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12,53	6,72	53,63	Rendah	Dinkop UKM
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,29	20,59	7100,00	Sangat Tinggi	Dinkop UKM
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,16	5,28	73,74	Sedang	Dinkop UKM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	PENANAMAN MODAL						
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,00	18,61	465,25	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100,00	19,59	19,59	Sangat Rendah	DPMPTSP
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,00	95,74	106,38	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,42	0,37	88,10	Tinggi	Disporapar
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	56,85	54,5	95,87	Sangat Tinggi	Disporapar
	STATISTIK						
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	32,00	NA	NA	NA	Diskominfo
	PERSANDIAN						
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	636,00	636	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
	KEBUDAYAAN						
1	Angka Melek Budaya	%	52,32	50,94	97,36	Sangat Tinggi	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	16,00	14,08	88,00	Tinggi	Disarpus
	KEARSIPAN						
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	94,00	93,99	99,99	Sangat Tinggi	Disarpus
	URUSAN PILIHAN						
	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Produksi perikanan	Ton	927.350	394914,39	42,59	Sangat Rendah	Dislutkan
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,00	100,56	95,77	Sangat Tinggi	Dislutkan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	110,00	100,79	91,63	Sangat Tinggi	Dislutkan
	PARIWISATA						
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,01	11,88	148,31	Sangat Tinggi	Disporapar
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.686.000.000.000	NA	NA	NA	Disporapar
	PERTANIAN						
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,00	3,01	100,33	Sangat Tinggi	Disnakeswan
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100,50	101,79	101,28	Sangat Tinggi	Distanbun
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,58	-8,52	-1468,97	Sangat Rendah	Distanbun
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,19	115,66	109,95	Sangat Tinggi	Distanbun
5	NTP Hortikultura	Angka	108,11	132,95	122,98	Sangat Tinggi	Distanbun
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100,59	116,32	115,64	Sangat Tinggi	Distanbun
	KEHUTANAN						
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	42,45	46,34	109,16	Sangat Tinggi	DISLHK
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	NA	NA	NA	DISLHK
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
1	Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	18,41	15,98	86,80	Tinggi	DISESDM
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	768,10	392,59	51,11	Rendah	DISESDM
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,60	3,72	103,33	Sangat Tinggi	DISESDM
4	Persentase penerapan *Good Mining Practice*	%	53,00	49,14	92,72	Sangat Tinggi	DISESDM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	PERDAGANGAN						
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,51	3,88	86,03	Tinggi	Disperindag
	PERINDUSTRIAN						
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,25	6,18	190,15	Sangat Tinggi	Disperindag
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36,10	33	91,41	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80,00	39,8	49,75	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90,00	57,34	63,71	Rendah	Sekretariat Daerah
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90,00	55,56	61,73	Rendah	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD						
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	90,00	91,23	101,37	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	75,00	NA	NA	NA	Sekretariat DPRD
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	75,00	NA	NA	NA	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN						
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100,00	50	50,00	Sangat Rendah	BAPPEDA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100,00	50	50,00	Sangat Rendah	BAPPEDA
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100,00	50	50,00	Sangat Rendah	BAPPEDA
	KEUANGAN						
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	13,09	5,63	43,01	Sangat Rendah	BAPENDA
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-7,67	-10,29	74,54	Sedang	BAPENDA
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97,75	NA	NA	NA	BPKAD
4	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	84,02	84,02	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	KEPEGAWAIAN						
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,86	0,83	96,51	Sangat Tinggi	BKD
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,07	3,3	107,49	Sangat Tinggi	BPSDMD
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	8,67	23,98	276,59	Sangat Tinggi	BPSDMD
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	BPSDMD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	72,50	NA	NA	NA	BRIDA
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85,00	86,25	101,47	Sangat Tinggi	BANHUB
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3,00	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
2	Level kapabilitas APIP	Level	3,00	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3,00	3	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,745	NA	NA	NA	BAKESBANGPOLINMAS
C	**Aspek Daya Saing**						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	68,59	101,54	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	5,52	138,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50	83,13	102,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Capaian kinerja Indikator Kinerja Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 126 indikator kinerja . Dari 126 indikator kinerja tersebut terdapat 81 indikator berskala sangat tinggi, 8 indikator berskala tinggi, 3 indikator berskala sedang, 6 indikator berskala rendah, 14 indikator berskala sangat rendah dan 14 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	65	0,00	0,00	NA	Bidang Pembinaan SMA
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	36	0,00	0,00	NA	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67,78	60,00	88,52	Tinggi	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	50	0,00	0,00	NA	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase angka putus sekolah SMA	%	2,3	2,00	86,96	Tinggi	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase angka putus sekolah SMK putus sekolah SMK	%	0,026	0,02	76,92	Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	60	4,00	6,67	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMK
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0,55	0,50	90,91	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	57,35	20,73	36,15	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	50,35	71,59	142,18	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	10,53	0,00	0,00	NA	Bidang Pembinaan Diksus
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	10	0,80	8,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	17,47	174,70	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68,18	0,00	0,00	NA	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase angka putus sekolah SLB	%	3,53	37,17	1.052,97	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	80,3	80,25	99,94	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi,	%	10	86,00	860,00	Sangat Tinggi	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	informasi dan komunikasi						Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	10	3,07	30,70	Sangat Rendah	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1,67	0,00	0,00	NA	CABDIN I
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi minimal akreditasi B CABDIN I	%	0,9	0,90	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN I
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90,54	90,54	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN II
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76,59	76,59	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN II
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1	0,00	0,00	NA	CABDIN II
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40,11	40,11	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN II
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2,87	0,00	0,00	NA	CABDIN III
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	69,8	70,41	100,87	Sangat Tinggi	CABDIN III
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	75,57	75,59	100,03	Sangat Tinggi	CABDIN III
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	25,69	73,28	285,25	Sangat Tinggi	CABDIN IV
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1,25	0,00	0,00	NA	CABDIN IV
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	69,8	76,10	109,03	Sangat Tinggi	CABDIN IV
	Persentase capaian prestasi peserta didik	%	1,92	9,88	514,58	Sangat Tinggi	CABDIN V

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	SMA, SMK dan SLB CABDIN V						
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	78,7	81,60	103,68	Sangat Tinggi	CABDIN V
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	93,71	108,48	115,76	Sangat Tinggi	CABDIN V
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	79,86	79,09	99,04	Sangat Tinggi	CABDIN VI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	90	60,00	66,67	Sedang	CABDIN VI
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	90	88,17	97,97	Sangat Tinggi	CABDIN VI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2,74	0,00	0,00	NA	CABDIN VII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85,55	93,09	108,81	Sangat Tinggi	CABDIN VII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72,83	115,26	158,26	Sangat Tinggi	CABDIN VII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77,11	78,07	101,24	Sangat Tinggi	CABDIN VIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2,2	0,00	0,00	NA	CABDIN VIII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76,12	71,33	93,71	Sangat Tinggi	CABDIN VIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3,22	6,00	186,34	Sangat Tinggi	CABDIN IX
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79	79,00	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN IX
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54,59	54,59	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN IX
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	77,81	86,65	111,36	Sangat Tinggi	CABDIN X
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	28,57	0,00	0,00	NA	CABDIN X
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	84,74	89,27	105,35	Sangat Tinggi	CABDIN X

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	87,73	89,54	102,06	Sangat Tinggi	CABDIN XI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	3,63	0,00	0,00	NA	CABDIN XI
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	44,94	75,32	167,60	Sangat Tinggi	CABDIN XI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	1,96	0,00	0,00	NA	CABDIN XII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	80	80,00	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN XII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81	82,65	102,04	Sangat Tinggi	CABDIN XII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88,25	88,00	99,72	Sangat Tinggi	CABDIN XIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2,52	0,00	0,00	NA	CABDIN XIII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79	79,00	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN XIII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89,06	89,06	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN I
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81,22	81,22	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN II
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83,27	83,88	100,73	Sangat Tinggi	CABDIN III
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	81,77	78,94	96,54	Sangat Tinggi	CABDIN IV
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88,34	72,75	82,35	Tinggi	CABDIN V
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86,49	81,89	94,68	Sangat Tinggi	CABDIN VI
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	88,83	90,17	101,51	Sangat Tinggi	CABDIN VII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89,03	88,09	98,94	Sangat Tinggi	CABDIN VIII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	85,85	85,85	100,00	Sangat Tinggi	CABDIN IX

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	82,21	70,48	85,73	Tinggi	CABDIN X
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83,27	66,02	79,28	Tinggi	CABDIN XI
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85,3	81,30	95,31	Sangat Tinggi	CABDIN XII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86,06	82,50	95,86	Sangat Tinggi	CABDIN XIII
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	76,2	75,75	99,41	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagaan Dikbud
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	15	4,00	26,67	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan SMA
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	93,93	78,57	83,65	Tinggi	Bidang Pembinaan SMK
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	0,00	0,00	NA	Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	0,00	0,00	NA	CABDIN I
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	CABDIN II
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	CABDIN III
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA,	%	10	0,00	0,00	NA	CABDIN IV

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	SMK dan SLB CABDIN IV						
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	20	3,00	15,00	Sangat Rendah	CABDIN V
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100	15,00	15,00	Sangat Rendah	CABDIN VI
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	CABDIN VII
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	0,00	0,00	NA	CABDIN VIII
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	25	0,00	0,00	NA	CABDIN IX
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	25	0,00	0,00	NA	CABDIN X
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4,76	0,00	0,00	NA	CABDIN XI
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	0,00	0,00	NA	CABDIN XII
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	CABDIN XIII

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 87 indikator kinerja . Dari 87 indikator kinerja tersebut terdapat 45 indikator berskala sangat tinggi, 7 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, 11 indikator berskala sangat rendah dan 23 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	34,28	22,85	66,66	Sedang	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	51,42	34,28	66,67	Sedang	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	60	31,42	52,37	Rendah	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	63,9	31,42	49,17	Sangat Rendah	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	63,9	23,81	37,26	Sangat Rendah	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	dan/atau berpotensi bencana skala provinsi						Pengendalian Penyakit
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	66,6	63,42	95,23	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	80	60,00	75,00	Sedang	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	80	40,00	50,00	Sangat Rendah	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,85	28,57	66,67	Sedang	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	57,14	28,56	49,98	Sangat Rendah	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	71,42	28,57	40,00	Sangat Rendah	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan	%	42,85	28,57	66,67	Sedang	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	skrining kesehatan remaja						
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	57,14	28,57	50,00	Sangat Rendah	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	28,57	14,28	49,98	Sangat Rendah	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	80	80,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	83	40,00	48,19	Sangat Rendah	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	%	83	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	35,00	35,00	Sangat Rendah	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	RSUD Kelet Donorejo
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	10,53	10,53	Sangat Rendah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	25,00	25,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	%	100	100,00	105,26	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	masyarakat RSJD Surakarta						
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	95	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata	%	100	0,00	0,00	NA	Rumah Sakit Khusus Mata
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	80	75,38	94,23	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	98	99,96	102,00	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	30	70,21	234,03	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih	%	20	0,00	0,00	NA	Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	75	40,00	53,33	Rendah	Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	82,85	80,00	96,56	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,85	28,57	66,67	Sedang	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28,57	14,28	49,98	Sangat Rendah	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,85	28,57	66,67	Sedang	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28,57	14,28	49,98	Sangat Rendah	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat						
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	RSUD Kelet Donorejo
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	25,00	25,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95	0,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata	%	50	0,00	0,00	NA	Rumah Sakit Khusus Mata

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 53 indikator kinerja. Dari 53 indikator kinerja tersebut terdapat 21 indikator berskala sangat tinggi, 7 indikator berskala sedang, 2 indikator berskala rendah , 20 indikator berskala sangat rendah dan 3 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	61,31	0	0,00	NA	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64,31	0	0,00	NA	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69,11	0	0,00	NA	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52,37	52,36	99,98	Sangat Tinggi	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62,68	62,67	99,98	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34,78	34,78	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53,26	53,26	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71,8	71,79	99,99	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	54,6	50,03	91,63	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50,04	50,01	99,94	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Bodri Kuto
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	62,85	31,5	50,12	Rendah	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	50	20	40,00	NA	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67,34	33,66	49,99	Sangat Rendah	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	77,78	38,9	50,01	Rendah	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Bengawan Solo
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	77,36	39,68	51,29	Rendah	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92,21	46	49,89	Sangat Rendah	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72,65	40	55,06	Rendah	Balai PSDA Serayu Citanduy
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76,5	40	52,29	Rendah	Balai PSDA Serayu Citanduy
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Serayu Citanduy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
	Persentase akses air minum layak	%	91,92	44,64	48,56	Sangat Rendah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	54,32	12,77	23,51	Sangat Rendah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	31,82	31,82	Sangat Rendah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
SISTEM AIR LIMBAH							
	Persentase akses air limbah domestik layak	%	93,58	92,14	98,46	Sangat Tinggi	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5,83	1,94	33,28	Sangat Rendah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,94	5,92	49,58	Sangat Rendah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
	Persentase panjang jalan yang dileger	%	75,79	67,04	88,45	Tinggi	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	47,5	47,79	100,61	Sangat Tinggi	Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	41,68	45,03	108,04	Sangat Tinggi	Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	95,52	92,56	96,90	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Tegal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	86,14	77,37	89,82	Tinggi	BPJ Wilayah Tegal
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	85,23	90,66	106,37	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,49	86,19	97,40	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	89,43	91,37	102,17	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	83,65	86,59	103,51	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	99,95	92,36	92,41	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Semarang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85,51	85,06	99,47	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Semarang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	94,17	91,24	96,89	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Magelang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	93,65	74,28	79,32	Tinggi	BPJ Wilayah Magelang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,61	91,7	100,10	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,9	91,62	96,54	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	88,12	87,42	99,21	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Pati
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	93,82	87,41	93,17	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Pati
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	86,78	88,61	102,11	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Purwodadi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	di BPJ Wilayah Purwodadi						
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,18	65,65	72,00	Sedang	BPJ Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	93,17	91,08	97,76	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Surakarta
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	94,78	91,41	96,44	Sangat Tinggi	BPJ Wilayah Surakarta
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	12,85	12,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Peralatan
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	31,88	10,14	31,81	Sangat Rendah	Balai Pengujian dan Peralatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	45,38	22,69	50,00	Sangat Rendah	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	43,49	41,63	95,72	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Peralatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	68	32	47,06	Sangat Rendah	Bidang Penataan Ruang
	Persentase tertib ruang	%	56	42,46	75,82	Tinggi	Bidang Penataan Ruang
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	60,71	55,57	91,53	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Ruang
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase pelaksanaan pemantauan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Bodri Kuto

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Target 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto						
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Balai PSDA Serayu Citanduy

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 66 indikator kinerja. Dari 66 indikator kinerja tersebut terdapat 30 indikator berskala sangat tinggi, 4 indikator bertatus tinggi, 1 indikator berskala sedang, 22 indikator berskala sangat rendah dan 4 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0,12	0,21	175,00	Sangat Tinggi	Bidang Perumahan
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	2,73	1,55	56,78	Rendah	Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	3,18	9,35	294,03	Sangat Tinggi	Bidang Kawasan Pemukiman
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	40	8	20,00	Sangat Rendah	Bidang Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	kawasan permukiman						

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala rendah dan 1 indikator berskala sangat rendah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%	29,57	34,69	117,31	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Masyarakat
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	67,15	60,58	90,22	Sangat Tinggi	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Persentase penegakan produk hukum daerah	%	80	33,33	41,66	Sangat Rendah	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	40,03	19,61	48,99	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0,12	0,11	91,67	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Persentase penanganan darurat bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penanganan Darurat
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	2	0	0,00	NA	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	%	2,86	0	0,00	NA	Bidang Logistik dan Peralatan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala rendah, 3 indikator berskala sangat rendah dan 2 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	7,7	4,92	63,90	Rendah	Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	1,92	1,92	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Mandiri
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,1	0,1	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Cepiring
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,09	0,09	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial	%	0,05	0,05	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo						Sosial Pendowo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,09	0,09	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan	%	0,12	0,12	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Dewanata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata						
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,12	0,12	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Raharjo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,03	0,03	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata						
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,03	0,03	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0,03	0,03	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,05	0,05	100,00	Sangat Tinggi	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Rehabilitasi Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	80	0	0,00	NA	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0,02	0,01	50,00	Sangat Rendah	Bidang Penanganan Fakir Miskin
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Sosial

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja. Dari 35 indikator kinerja tersebut terdapat 30 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala rendah, 3 indikator berskala sangat rendah dan 1 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	62,85	17,14	27,27	Sangat Rendah	Sekretariat
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38,14	3,93	10,30	Sangat Rendah	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,4	0,69	15,68	Sangat Rendah	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,3	1,83	79,57	Tinggi	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2,88	5,07	176,04	Sangat Tinggi	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9,45	9,11	96,40	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46,9	28,25	60,23	Rendah	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13,13	9,81	74,71	Sedang	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	45,05	66,25	147,06	Sangat Tinggi	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68,1	36,3	53,30	Rendah	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98	98,5	100,51	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,75	49,72	99,94	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	44,27	43,6	98,49	Sangat Tinggi	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,15	97,96	101,88	Sangat Tinggi	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89,58	31,39	35,04	Sangat Rendah	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,4	10,56	40,00	Sangat Rendah	Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja. Dari 16 indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi,1 indikator berskala sedang, 2 indikator berskala rendah, dan 5 indikator berskala sangat rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	60	60	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	11	28,57	259,73	Sangat Tinggi	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14,29	22,86	159,97	Sangat Tinggi	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	15	60,00	Rendah	Sekretariat
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82,85	82,85	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11,5	3,15	365,08	Sangat Tinggi	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 8 indikator berskala sangat tinggi, dan 1 indikator berskala rendah.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Urusan Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
	Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1,25	2	160,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,064	0,3	468,75	Sangat Tinggi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	0,62	0,85	137,10	Sangat Tinggi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	60	91,67	152,78	Sangat Tinggi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	0,62	0,85	137,10	Sangat Tinggi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,8	88,6	100,91	Sangat Tinggi	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87,8	88,6	100,91	Sangat Tinggi	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
	Persentase penurunan daerah	%	0,01	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Kerawanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	rawan pangan dan gizi						Pangan dan Gizi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	93,48	116,85	Sangat Tinggi	Bidang Keamanan Pangan
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan	%	80	96,97	121,21	Sangat Tinggi	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja. 9 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pertanahan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	34	34,00	Sangat Rendah	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2,85	2,85	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase pengujian kualitas air	%	100	56,91	56,91	Rendah	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	41,39	41,39	Sangat Rendah	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	26,15	26,15	Sangat Rendah	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	4,76	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	2,02	0	0,00	NA	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	2,6	1	38,46	Sangat Rendah	**Balai Kebun Raya**

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Kebun Raya Baturraden						**Baturraden Kelas B**
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	0	0,00	NA	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	34,29	68,58	Sedang	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	10,5	10,1	96,19	Sangat Tinggi	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	31,43	20,86	66,37	Sedang	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	0	0,00	NA	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
	Persentase sampah yang tertangani	%	42	39	92,86	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
							dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja. Dari 16 indikator kinerja tersebut terdapat 6 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala rendah , 4 indikator berskala sangat rendah dan 3 indikator berstatus NA dikarenakan data belum tersedia.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	97	98,1	101,13	Sangat Tinggi	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0- 17 diatas 98%	%	97	80	82,47	Tinggi	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	16,67	0	0,00	NA	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi dan 1 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)		6,85	23,97	349,93	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa		100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Penataan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa		100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah		8,96	12,27	136,94	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya		100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)		100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut seluruhnya berstatus sangat tinggi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	61,11	66,67	109,10	Sangat Tinggi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	65,58	64,75	98,73	Sangat Tinggi	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
	Unmetneed	%	10	9,66	96,60	Sangat Tinggi	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	27,36	85,50	Tinggi	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala tinggi.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,38	0,38	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Lalu Lintas
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0,981	0,98	99,90	Sangat Tinggi	Bidang Lalu Lintas
	Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0,51	0,32	62,75	Rendah	Bidang Angkutan Jalan
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	65,38	46,19	70,65	Sedang	Bidang Angkutan Jalan
	Rasio pemanfatan terminal	Angka	0,218	0,21	96,33	Sangat Tinggi	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0,5	0,48	96,00	Sangat Tinggi	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,24	0,21	87,50	Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,81	0,53	65,43	Sedang	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,01	0,01	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,81	0,62	76,54	Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,2	0,13	65,00	Rendah	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,98	0,98	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,81	0,5	61,73	Rendah	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,23	0,21	91,30	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,81	0,5	61,73	Rendah	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,17	0,17	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,98	0,98	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,81	0,5	61,73	Rendah	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,21	0,19	90,48	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,81	0,5	61,73	Rendah	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0,481	0,48	99,79	Sangat Tinggi	Balai Transportasi Jawa Tengah
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	51,72	50,69	98,01	Sangat Tinggi	Balai Transportasi Jawa Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0,31	0,28	90,32	Sangat Tinggi	Bidang Pelayaran

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0,2	0	0,00	NA	Bidang Pelayaran
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,04	0	0,00	NA	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 29 indikator kinerja. Dari 29 indikator kinerja tersebut terdapat 17 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala sedang, 6 indikator berskala rendah dan 2 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	78	89,06	114,18	Sangat Tinggi	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	31	6	19,35	Sangat Rendah	Bidang Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
APLIKASI INFORMATIKA							
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	72	68	94,44	Sangat Tinggi	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	15	8	53,33	Rendah	Bidang E-Government

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat 2 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala rendah dan 1 indikator berskala sangat rendah.

11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
	Persentase koperasi berkualitas	%	25,02	13,1	52,36	Rendah	Bidang Pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	10	16,71	167,10	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
	Persentase koperasi provinsi produktif	%	48,09	37,32	77,60	Tinggi	Bidang Kelembagaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
	Persentase usaha mikro mandiri	%	81,2	78,6	96,80	Sangat Tinggi	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	23	54,35	236,30	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
	Persentase UMKM siap bermitra	%	21,06	14,16	67,24	Sedang	Bidang Bina Usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang dan 1 indikator berskala rendah.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai beirkut.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	0	0,00	NA	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	46	26,09	56,72	Rendah	Bidang Promosi PM
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	16,67	33,34	Sangat Rendah	Bidang Promosi PM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	90	99,85	110,94	Sangat Tinggi	Bidang Pelayanan Perizinan
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	20	38,84	194,20	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	5,22	52,20	Rendah	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala rendah , 1 indikator berskala sangat rendah dan 1 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
	Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	8	2	25,00	Sangat Rendah	Bidang Kepemudaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	50	10	20,00	Sangat Rendah	Bidang Kepemudaan
	Persentase peningkatan perolehan medali	%	28,18	5	17,74	Sangat Rendah	Bidang Keolahragaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
	Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	750	100	13,33	Sangat Rendah	Bidang Keolahragaan
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	50	10	20,00	Sangat Rendah	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat rendah.

14. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 22
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
	Persentase penyusunan data prioritas	%	24	0	0,00	NA	Bidang Statistik

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	pembangunan daerah						

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja yang masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	25	25	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan skala sangat tinggi.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	19,17	18,15	94,68	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	23,76	21,21	89,27	Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	47,61	42,85	90,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
	Tingkat partisipasi seni tradisi	%	8,89	5,16	58,04	Rendah	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
	Persentase akses literasi sejarah	%	52,9	52,7	99,62	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	12,71	12,28	96,62	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	25,13	24,06	95,74	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89,85	89,84	99,99	Sangat Tinggi	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Dari 6 indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi dan 1 indikator berskala rendah.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai bertikut.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	80,56	72,22	89,65	Tinggi	Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	23,08	23,08	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	84,5	105,63	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	84,67	80	94,48	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat 3 indikator berskala sangat tinggi, dan 1 indikator masih berskala tinggi.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ ko ta dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	25,97	18,42	70,93	Sedang	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	57,11	57,11	Rendah	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	19	26	136,84	Sangat Tinggi	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	12,19	10	82,03	Tinggi	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase arsip yang diselamatkan	%	19,47	12,98	66,67	Sedang	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator. Dari 3 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala sedang dan 1 indikator berskala rendah.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
	Persentase produksi garam	%	1	0	0,00	NA	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	3,7	3,7	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	1,39	2,56	184,17	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	3,7	0,18	4,86	Sangat Rendah	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
	Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	0	0,00	Sangat Rendah	Bidang Perikanan Tangkap
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108,27	101,74	93,97	Sangat Tinggi	Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	44,44	38,89	87,51	Tinggi	Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	72	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	%	72,72	72,72	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	90,91	111,11	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	62,62	54,55	87,11	Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan	%	81	81	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	kepelabuhanan PPP Morodemak						Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	63,63	90,9	142,86	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	63	63	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	72	100,00	Sangat Tinggi	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	0	0,00	NA	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
	Produksi perikanan budidaya	Ton	600000	270253,58	45,04	Sangat Rendah	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111,27	124,96	112,30	Sangat Tinggi	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	71	101,43	Sangat Tinggi	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	30	49,18	Sangat Rendah	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	0	0,00	NA	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	61,54	100,89	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	42	68,85	Sedang	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160000	150527,91	94,08	Sangat Tinggi	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	2	50,00	Sangat Rendah	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 32 indikator. Dari 32 indikator kinerja tersebut terdapat 21 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, , 5 indikator berskala sangat rendah dan 3 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pariwisata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	13,33	0	0,00	NA	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	49985228	18188728	36,39	Sangat Rendah	Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/Kota	6	1	16,67	Sangat Rendah	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	48,98	25,25	51,55	Rendah	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator. Dari 4 indikator kinerja tersebut terdapat, 1 indikator berskala rendah, 2 indikator berskala sangat rendah dan 1 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
	Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3726434	3787556	101,64	Sangat Tinggi	Bidang Budidaya
	Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	112876	76195	67,50	Sedang	Bidang Budidaya
	Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	246615	455570	184,73	Sangat Tinggi	Bidang Budidaya
	Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	1	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Veteriner
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	2	50,00	Sangat Rendah	Bidang Veteriner
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	0,27	27,00	Sangat Rendah	Balai Inseminasi Buatan Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	0,75	75,00	Sedang	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	0,01	1,00	Sangat Rendah	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	0,55	55,00	Rendah	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2,5	1,03	41,20	Sangat Rendah	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	90	34,58	38,42	Sangat Rendah	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2,5	2,5	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	49,94	49,94	Sangat Rendah	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	1	33,33	Sangat Rendah	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Produksi kedelai	Ton	52657	83070	157,76	Sangat Tinggi	Bidang Tanaman Pangan
	Produksi jagung	Ton	3576577	2020205	56,48	Rendah	Bidang Tanaman Pangan
	Produksi padi	Ton	9594280	5325395	55,51	Rendah	Bidang Tanaman Pangan
	Produksi bawang merah	Ton	515000	264111,35	51,28	Rendah	Bidang Hortikultura
	Produksi cabai	Ton	341000	181272,91	53,16	Rendah	Bidang Hortikultura
	Produksi durian	Ton	149668	0	0,00	NA	Bidang Hortikultura
	Produksi jahe	Ton	34862	0	0,00	NA	Bidang Hortikultura
	Produksi melati	Ton	24627	0	0,00	NA	Bidang Hortikultura
	Produksi kopi	Ton	25927	11727	45,23	Sangat Rendah	Bidang Perkebunan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Produksi tebu	Ton	2554553	980815	38,39	Sangat Rendah	Bidang Perkebunan
	Produksi kelapa	Ton	166687	79098	47,45	Sangat Rendah	Bidang Perkebunan
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	1	50,00	Sangat Rendah	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	46	54,12	Rendah	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	%	85	36,48	42,92	Sangat Rendah	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	19,62	23,08	Sangat Rendah	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	0	0,00	NA	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	0	0,00	NA	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	10	5	50,00	Sangat Rendah	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	10	5	50,00	Sangat Rendah	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	10	5	50,00	Sangat Rendah	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	10	0	0,00	NA	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7420274	222608	3,00	Sangat Rendah	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah strategis	Dokumen	4	2	50,00	Sangat Rendah	Bidang Veteriner
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	3	8,06	268,67	Sangat Tinggi	Bidang Veteriner
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	2,8	70,69	2524,64	Sangat Tinggi	Bidang Veteriner
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	2	50,00	Sangat Rendah	Balai veteriner semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	2	50,00	Sangat Rendah	Balai veteriner boyolali
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	5	0	0,00	NA	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	5	33,33	Sangat Rendah	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1,02	0,45	44,12	Sangat Rendah	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3,11	1,5	48,23	Sangat Rendah	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2,27	1,05	46,26	Sangat Rendah	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2,5	1	40,00	Sangat Rendah	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	22,86	22,86	Sangat Rendah	BALAI PELATIHAN PERTANIAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 49 indikator. Dari 49 indikator kinerja tersebut terdapat 8 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala sedang, 6 indikator berskala rendah , 26 indikator berskala sangat rendah dan 7 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Kehutanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35,4	8,5	24,01	Sangat Rendah	Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,47	0,32	68,09	Sedang	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	0	0,00	NA	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0,02	0,01	50,00	Sangat Rendah	CDK 1
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	%	1,38	0	0,00	Sangat Rendah	CDK 1
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	CDK 1
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0,04	0	0,00	NA	CDK 2
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	%	100	0	0,00	NA	CDK 2
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	%	1,72	0,7	40,70	Sangat Rendah	CDK 2
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0,03	0,02	66,67	Sedang	CDK 3
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	CDK 3
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	%	1,64	1	60,98	Rendah	CDK 3
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0,03	0,02	66,67	Sedang	CDK 4

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	%	100	0	0,00	NA	CDK 4
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	%	1,46	0,62	42,47	Sangat Rendah	CDK 4
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0,04	0,03	75,00	Sedang	CDK 5
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5	%	100	1	1,00	Sangat Rendah	CDK 5
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	%	1,29	2	155,04	Sangat Tinggi	CDK 5
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0,09	0,06	66,67	Sedang	CDK 6
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	CDK 6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6	%	2,15	2,15	100,00	Sangat Tinggi	CDK 6
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	CDK 8
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	%	100	0	0,00	NA	CDK 8

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	%	1,03	0,2	19,42	Sangat Rendah	CDK 8
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0,04	0,14	350,00	Sangat Tinggi	CDK 9
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	CDK 9
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	1,46	0,46	31,51	Sangat Rendah	CDK 9
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0,03	0,01	33,33	Sangat Rendah	CDK 10
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	CDK 10
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	%	1,03	0,56	54,37	Rendah	CDK 10
	Persentase peningkatan produksi bibit	%	-40	-76,83	192,08	Sangat Tinggi	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0,03	0,06	200,00	Sangat Tinggi	CDK 11
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	%	100	45	45,00	Sangat Rendah	CDK 11

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	%	1,29	0,5	38,76	Sangat Rendah	CDK 11
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0,09	0	0,00	NA	CDK 7
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	%	100	0	0,00	NA	CDK 7
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	%	1,55	0	0,00	NA	CDK 7
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	5	50,00	Sangat Rendah	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	40	7	17,50	Sangat Rendah	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	%	5	2	40,00	Sangat Rendah	CDK 1
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	CDK 1
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2	%	5	0	0,00	NA	CDK 2

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	%	100	0	0,00	NA	CDK 2
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	%	5	2	40,00	Sangat Rendah	CDK 3
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	CDK 3
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	%	5	0	0,00	NA	CDK 4
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	%	100	25	25,00	Sangat Rendah	CDK 4
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	%	5	2	40,00	Sangat Rendah	CDK 5
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	%	100	40	40,00	Sangat Rendah	CDK 5
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6	%	5	1	20,00	Sangat Rendah	CDK 6
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	%	100	0	0,00	NA	CDK 6
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	%	5	0	0,00	NA	CDK 8
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	%	100	0	0,00	NA	CDK 8

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	%	5	2,5	50,00	Sangat Rendah	CDK 9
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	%	100	0,5	0,50	Sangat Rendah	CDK 9
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	%	5	2	40,00	Sangat Rendah	CDK 10
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	70	0	0,00	NA	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	CDK 11
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	CDK 7
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	0,4	16,00	Sangat Rendah	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0,3	0	0,00	NA	CDK 1

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0,2	1	500,00	Sangat Tinggi	CDK 2
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0,2	0	0,00	NA	CDK 3
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0,2	0	0,00	NA	CDK 4
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0,3	1	333,33	Sangat Tinggi	CDK 5
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	CDK 6
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0,2	0	0,00	NA	CDK 8
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0,2	0,13	65,00	Rendah	CDK 9
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0,2	0,12	60,00	Rendah	CDK 10
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0,2	0	0,00	NA	CDK 11
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0,3	0	0,00	NA	CDK 7
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	0	0,00	NA	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 73 indikator. Dari 73 indikator kinerja tersebut terdapat 12 indikator berskala sangat tinggi, 5 indikator berskala sedang, 4 indikator berskala rendah , 30 indikator berskala sangat rendah dan 22 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%	27,5	26,91	102,19	Sangat Tinggi	Bidang Geologi dan Air Tanah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1,6	1,45	110,34	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,4	3,12	108,97	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,7	1,64	103,66	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2,2	1,97	111,68	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4,1	3,9	105,13	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,8	1,43	125,87	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,4	2,25	106,67	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1,6	1,47	108,84	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,7	2,62	103,05	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	2,9	2,82	102,84	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,8	2,66	105,26	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,6	1,49	107,38	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	%	60	31,16	51,93	Rendah	Bidang Mineral dan Batubara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	60	32,36	53,93	Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	60	32,19	53,65	Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	60	28,7	47,83	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	60	29,45	49,08	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	60	29,65	49,42	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	31,35	52,25	Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	60	33,07	55,12	Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	60	28,15	46,92	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	60	29,45	49,08	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	60	34,11	56,85	Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	60	28,04	46,73	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	60	28,53	47,55	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN							
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	590300,5	3213	0,54	Sangat Rendah	Bidang Energi Baru Terbarukan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	39608,43	560,16	1,41	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	23599,9	74,04	0,31	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	125685,7	321,93	0,26	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	122,33	225,35	184,21	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	91,75	91,75	100,00	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	39480,03	853,11	2,16	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	78666,36	289,74	0,37	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	39363,76	193,16	0,49	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	78562,37	103,02	0,13	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	39394,34	177,06	0,45	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	86438,18	312,27	0,36	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	39287,3	96,58	0,25	Sangat Rendah	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	63,81	58,41	91,54	Sangat Tinggi	Bidang Ketenagalistrikan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49,7	49,71	100,02	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51,09	50,36	98,57	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	49,97	49,53	99,12	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	49,36	49,09	99,45	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	49,96	49,45	98,98	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	49,95	49,71	99,52	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49,66	49,27	99,21	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49,57	49,25	99,35	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49,59	49,34	99,50	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	51,86	50,73	97,82	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49,64	49,34	99,40	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	49,08	48,93	99,69	Sangat Tinggi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator. Dari 54 indikator kinerja tersebut terdapat 30 indikator berskala sangat tinggi, 6 indikator berskala rendah, dan 18 indikator berskala sangat rendah.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	0	0,00	NA	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8	7,05	88,13	Tinggi	Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	10	0	0,00	NA	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	10	8,18	81,80	Tinggi	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	65	72,22	Sedang	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	30	36,84	122,80	Sangat Tinggi	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1	0	0,00	NA	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	5	11,88	237,60	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	12,83	128,30	Sangat Tinggi	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	0	0,00	NA	Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja tersebut terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 2 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, dan 4 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2,25	7,19	319,56	Sangat Tinggi	Bidang Industri Agro
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2,25	2,13	94,67	Sangat Tinggi	Bidang Industri Non Agro
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,45	1,32	38,26	Sangat Rendah	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	99,14	116,64	Sangat Tinggi	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,38	2,21	50,46	Rendah	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	7	5	71,43	Sedang	Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	10	4	40,00	Sangat Rendah	Bidang Industri Non Agro
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1,62	18,34	1132,10	Sangat Tinggi	Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	14,21	710,50	Sangat Tinggi	Bidang Industri Non Agro

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinera. Dari 9 indikator kinerja tersebut terdapat 5 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala rendah dan 2 indikator berskala sangat rendah.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,61	0	0,00	NA	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan skala indikator NA dikarenakan data belum tersedia.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	66	33	50,00	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	85,71	42,85	49,99	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	88,1	44,05	50,00	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	60	30	50,00	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	14,29	7,14	49,97	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	64,28	32,14	50,00	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	50	25	50,00	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	88,73	44,36	49,99	Sangat Rendah	BIRO ORGANISASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	52,3	55,05	Rendah	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	50	52,63	Rendah	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	52	54,74	Rendah	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	81	40	49,38	Sangat Rendah	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	82	40	48,78	Sangat Rendah	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	54	25	46,30	Sangat Rendah	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	96	50	52,08	Rendah	BIRO HUKUM
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	75	78,13	Tinggi	BIRO HUKUM
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	49	51,04	Rendah	BIRO HUKUM
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	51	53,13	Rendah	BIRO HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	50	57,47	Rendah	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	50	58,82	Rendah	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	50	58,82	Rendah	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	83	55	66,27	Sedang	BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	78	38	48,72	Sangat Rendah	BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	85	35	41,18	Sangat Rendah	BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	81	40	49,38	Sangat Rendah	BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	35	63,64	Rendah	BIRO PEREKONOMIAN
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	90	78,71	87,46	Tinggi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	80	62,39	77,99	Tinggi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	81	38	46,91	Sangat Rendah	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
	Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,7	44,54	45,13	Sangat Rendah	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	33,75	35,34	Sangat Rendah	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	20	23,53	Sangat Rendah	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	85	83	97,65	Sangat Tinggi	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 34 indikator kinerja. Dari 34 indikator kinerja tersebut terdapat 1 indikator berskala sangat tinggi, 3 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, 10 indikator berskala rendah dan 19 indikator berskala sangat rendah.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
	Persentase layanan bagian humas	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Bagian Humas
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Bagian Persidangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Perencanaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Perekonomian
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Perekonomian
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengambangan wilayah	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut seluruhnya berskala sangat rendah.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Keuangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Anggaran
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Akuntansi
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	84,02	84,02	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Aset Daerah
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Aset Daerah
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	21	21,00	Sangat Rendah	Bidang Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	72	34,41	47,79	Sangat Rendah	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	-7,67	-10,29	74,54	Sedang	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Evaluasi dan Pembinaan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%	24,91	10,03	40,26	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	18,18	8,25	45,38	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	-21,85	-19,1	114,40	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	20,87	3,19	15,29	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	6,61	2,67	40,39	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	18,66	7,95	42,60	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	12,53	6,09	48,60	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	-17,94	-19,63	91,39	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	20,09	3,64	18,12	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	21,98	8,99	40,90	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	15,09	7,18	47,58	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	12,2	7,18	58,85	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	-17,96	-16,95	105,96	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	20,2	2,28	11,29	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	9,5	3,71	39,05	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	23,93	10,42	43,54	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	13,7	6,51	47,52	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	-20,16	-22,78	88,50	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	19,97	3,09	15,47	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	2,24	0,91	40,63	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	23,51	9,71	41,30	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	6,69	3,11	46,49	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	20,52	-30,08	-68,22	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	-25,36	4,7	-18,53	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	32,43	12,5	38,54	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	18,31	8,86	48,39	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	12,95	7,84	60,54	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	-25,77	-21,15	121,84	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	20,75	7,26	34,99	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	23,16	8,82	38,08	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	20,8	9,27	44,57	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	10,78	5,45	50,56	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	-24,27	-26,96	90,02	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	19,8	5,94	30,00	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	22,34	8,86	39,66	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	20,87	9,86	47,24	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	13,12	5,66	43,14	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	-20,94	-25,01	83,73	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	19,94	5,11	25,63	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	3,8	1,55	40,79	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	19,79	8,44	42,65	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%	6,58	3,37	51,22	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	-22,24	-27,71	80,26	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	20,21	5,93	29,34	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	24,85	9,76	39,28	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	18,99	7,58	39,92	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	13,42	4,96	36,96	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	-24,67	-31,14	79,22	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	20,93	4,49	21,45	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	19,63	7,84	39,94	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	26,51	10,69	40,32	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	8,21	2,06	25,09	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	-25,1	-29,55	84,94	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	19,89	7	35,19	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	23	9,44	41,04	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	25,8	10,08	39,07	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	1,76	0,68	38,64	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-25,99	-32,99	78,78	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	20,94	3,85	18,39	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	11,97	4,73	39,52	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20,9	8,46	40,48	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	%	12,75	4,28	33,57	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-20,99	-30,22	69,46	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20,4	5,57	27,30	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	30,62	12,97	42,36	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21,98	9,3	42,31	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9,35	4,39	46,95	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-16,8	-17,49	96,05	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21,21	5,6	26,40	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	23,05	8,95	38,83	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	19,89	8,6	43,24	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	13,03	6,43	49,35	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	-25,7	-30,28	84,87	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	20,48	4,59	22,41	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	16,61	6,82	41,06	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	15,79	6,86	43,45	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	13,58	5,29	38,95	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	-18,76	-22,52	83,30	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	19,45	5,91	30,39	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	13,4	5,25	39,18	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	19,93	8,25	41,39	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	12,4	6,12	49,35	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	-18,49	-16,68	110,85	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	20,31	5,3	26,10	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	11,59	4,41	38,05	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendara an bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	18,71	7,39	39,50	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	12,45	5,64	45,30	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	-15,14	-17,93	84,44	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	19,33	2,33	12,05	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	12,4	5,3	42,74	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	18,96	8,66	45,68	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	7,24	1,81	25,00	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	-21,23	-25,31	83,88	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	20,31	4,2	20,68	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	22,63	8,52	37,65	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	14,71	7,3	49,63	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	19	3,47	18,26	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-22,19	-37,94	58,49	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	10,98	3,5	31,88	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-25,14	-40,78	162,21	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	28,17	11,29	40,08	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	-16,7	-21,2	78,77	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	20,29	5,02	24,74	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	41,78	15,82	37,87	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	19,62	9,32	47,50	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	13,51	6,39	47,30	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-20,86	-25,23	82,68	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	20,16	6,2	30,75	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	38,33	13,97	36,45	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	15,23	7,31	48,00	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	13,44	6,58	48,96	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	-23,43	-25,83	90,71	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	20,24	5,37	26,53	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	30,76	11,5	37,39	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11,83	6,09	51,48	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11,27	6,46	57,32	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	-17,02	-20,08	84,76	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	20,84	4,35	20,87	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-25,92	-41,84	61,95	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	12,2	6,13	50,25	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	19,25	6	31,17	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	20,49	6,34	30,94	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	66,86	25,36	37,93	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	14,12	7,51	53,19	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	-25,7	-23,65	108,67	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	20,57	6,48	31,50	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	13,27	7,01	52,83	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	44	16,69	37,93	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	20,1	9,75	48,51	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	12,88	6,27	48,68	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	-22,26	-19,55	113,86	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	20,83	3,89	18,67	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	25,25	9,32	36,91	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	19,52	8,44	43,24	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	13,75	5,64	41,02	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	-25,89	-23,44	110,45	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	20,26	5,84	28,83	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	23,27	8,91	38,29	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	16,42	7,2	43,85	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	11,83	5,84	49,37	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	-13,57	-16,22	83,66	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	20,24	6,47	31,97	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	14,57	5,28	36,24	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	28,72	10,58	36,84	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	13,77	7,66	55,63	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	-15,51	-26,8	57,87	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	20,9	4,22	20,19	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	45,72	16,72	36,57	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	21,49	9,12	42,44	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	13,44	7,17	53,35	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-25,11	-26,8	93,69	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	20,31	3,12	15,36	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-53,02	-84,42	62,81	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	16,85	7,31	43,38	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	9,11	4,05	44,46	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	-13,62	-14,05	96,94	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	21,76	5,73	26,33	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	34,47	14,24	41,31	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	19,55	8,28	42,35	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	13,59	7,01	51,58	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	-25,13	-22,83	110,07	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	22,12	5,24	23,69	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	25,05	10,02	40,00	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	20,82	9,6	46,11	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	13,41	5,84	43,55	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	-18,63	-19,1	97,54	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	20,99	9,01	42,93	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	4,96	2,08	41,94	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	23,68	9,42	39,78	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	12,21	5,87	48,08	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	-12,81	-10,11	126,71	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	22,01	6,34	28,81	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	32,03	12,28	38,34	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	23,36	9,61	41,14	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	13,59	6,57	48,34	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	-20,87	-20,15	103,57	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	21,35	3,4	15,93	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	24,01	9,56	39,82	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi TW II	Tingkat Capaian (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	22,39	9,59	42,83	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13,38	6,24	46,64	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-24,77	-32,74	75,66	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	20,95	4,57	21,81	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 194 indikator kinerja. Dari 194 indikator kinerja tersebut terdapat 27 indikator berskala sangat tinggi, 15 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala sedang, 16 indikator berskala rendah , dan 134 indikator berskala sangat rendah.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Kepegawaian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perencanaan dan Pengembang an Pegawai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Informasi Kepegawaian
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	85	85	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3,5	3,55	101,43	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4138
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100	30	30,00	Sangat Rendah	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	50	50,00	Sangat Rendah	Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	45	45,00	Sangat Rendah	Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	40	40,00	Sangat Rendah	Bidang SDM IPTEk dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat rendah.

6. Penghubung

Kinerja penyelenggaran unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Penghubung

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja seluruhnya berskala sangat tinggi.

2.4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Pengawasan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	83	94	113,25	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	85	92,98	109,39	Sangat Tinggi	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	85	26,76	31,48	Sangat Rendah	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	85	75,53	88,86	Tinggi	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	85	63,41	74,60	Sedang	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	10,2	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	10,2	0	0,00	Sangat Rendah	Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Dari 7 indikator kinerja tersebut terdapat 2 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, 1 indikator berskala sangat rendah dan 2 indikator masih berstatus NA dikarenakan data belum tersedia data.

2.5. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaran unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
	Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3	0	0	NA	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian s.d TW II (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
	Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	73	0	0	NA	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N							
	Indeks kinerja ormas	Nilai	75,34	0	0	NA	Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA							
	Indeks toleransi	%	74,1	0	0	NA	Bidang Ketahanan Bangsa
	Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3	0	0	NA	Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	75	0	0	NA	Bidang Politik Dalam Negri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja:
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja seluruhnya berskala NA dikarenakan data belum tersedia.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah ditentukan melalui arah kebijakan ekonomi daerah. Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan melalui telaah terhadap dinamika ekonomi global dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global dalam satu dekade terakhir (2013-2022) hanya sebesar 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2003-2012) yang mencapai 4,2 persen. Negara Tiongkok, yang tumbuh 10,6 persen pada dekade sebelumnya, melambat signifikan pada periode 2013-2022 sebesar 6,2 persen. Penyebab pelambatan ini terutama adalah karena (1) menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, (2) periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai tanper tantrum, (3) pandemi covid-19, (4) perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan kenaikkan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta (5) dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi. (BKF, 2023).

Perekonomian global belum sepenuhnya pulih, hal ini dapat dilihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF/Dana Moneter Internasional), World Bank (Bank Dunia) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada bulan Juli 2024 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Dari capaian pertumbuhan ekonomi global Tahun 2022 yang sebesar 3,5 persen, IMF memprediksi Tahun 2024 akan tumbuh sebesar 3,2 persen, World Bank memprediksi Tahun 2024 akan tumbuh sebesar 2,7 persen, pun OECD memprediksi Tahun 2024 akan tumbuh sebesar 2,7 persen. Kemudian untuk tahun 2025, IMF memprediksi tumbuh sebesar 3,3 persen, World Bank memprediksi tumbuh sebesar 2,8 persen, OECD memprediksi tumbuh sebesar 2,9 persen. Perbedaan proyeksi pertumbuhan antar institusi tersebut menunjukkan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global saat ini. (BKF, 2024).

3.1.2 Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia tetap terjaga ditengah ketidakpastian perekonomian global. Ekonomi Indonesia yang sempat terkontraksi -2,07 persen Tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19, mampu pulih lebih cepat tahun 2021 sebesar 3,70 persen (c-to-c), dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (c-to-c). Angka capaian pertumbuhan pada 2023 melambat mencapai sebesar 5,05 persen (c-to-c). Kemudian pada Triwulan I 2024 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-o-y). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,51 persen (yoy) pada bulan Juni 2024 turun dari Bulan Mei 2024 sebesar 2,84 persen (yoy). Nilai ekspor Bulan Mei 2024 tercatat sebesar USD 22,33 miliar (tumbuh 2,9%, yoy), sementara impor mencapai sebesar

USD 19,40 miliar (terkontraksi 8,8%, yoy). Neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, meskipun menurun secara kumulatif.

Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran nasional yang sempat meningkat ke level 7,07 persen pada Agustus 2020 juga berhasil diturunkan kembali menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,36 persen pada Maret 2023 dapat diturunkan kembali menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini membaik signifikan dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,379 pada Maret 2024. Berbagai afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah sejalan dengan capaian nasional perekonomian menunjukkan perbaikan. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sempat terkontraksi sebesar -2,65 persen (c-to-c) akibat dampak pandemi covid-19, kemudian mampu pulih lebih cepat tahun 2021 sebesar 3,32 persen (c-to-c), dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (c-to-c). Tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 4,98 persen (c-to-c), kemudian pada triwulan II 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,92% (y-o-y) melambat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 4,97% (y-o-y) dan lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,05 persen (y-o-y) akan tapi sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,92 persen (y-o-y).

Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,22 persen (y-o-y) pada bulan Juni 2024 lebih baik dari capaian Bulan Mei 2024 sebesar 2,66 persen (y-o-y). Pasca panen raya bulan Mei dan Juni 2024 banyak komoditas yang harganya turun dan menjadi penyumbang deflasi seperti bawang merah, tomat dan bawang putih serta daging ayam ras dan telur ayam ras. Kemudian angka pengangguran turun dari 5,24 persen pada Februari 2023 menjadi 4,39 persen pada Februari 2024, ini disebabkan karena kondisi perekonomian Jawa Tengah yang semakin menggeliat meskipun melambat menyebabkan kondisi ketenagakerjaan semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,45 juta orang dari periode Februari 2023 sampai Februari 2024 yang menyebabkan angka pengangguran secara absolut turun 0,17 juta orang menjadi 940 ribu orang di Februari 2024. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2024 sebesar 10,47% turun 0,30% poin dibanding Maret 2023 sebesar 10,77%, rasio gini dari 0,369 Bulan Maret Tahun 2023 turun lebih baik menjadi 0,367 Bulan Maret 2024. Berdasarkan sensus penduduk (SP) pada tahun 2020 jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 36,52 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 1,17%. Jumlah penduduk meningkat pada tahun 2022 sebesar 37,03 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali dan perekonomian Jawa Tengah yang stabil dan tetap tumbuh maka PDRB Per kapita Jawa Tengah tahun 2024 ditargetkan akan tumbuh sebesar Rp45,82 juta/kapita.

Berdasarkan kondisi tersebut maka ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di tahun 2024 pada kisaran angka 4,70 – 5,50 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan, rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka, serta

meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Berikut proyeksi indikator makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Proyeksi	
			RKPD 2024	P-RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 – 5,50	4,70 – 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rp	45,82	45,82
3	Inflasi	%	3,0 ± 1	2,5 ± 1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 – 4,94	5,00 – 4,30
5	Angka Kemiskinan	%	9,76 – 8,96	9,76 – 8,96
6	Rasio Gini	Angka	0,364	0,364

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan cenderung meningkat, namun demikian menurun di tahun 2022. Kinerja pendapatan dapat terlihat pada Tabel 3.2. Selama kurun waktu tahun 2021-2023, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pajak masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Sumber pendapatan lainnya adalah retribusi yang realisasi penerimaannya di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya di tahun 2022 juga meningkat dibandingkan tahun 2021. Kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2021-2023 sebesar 95,25 persen, pendapatan transfer sebesar 100,72 % persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 119,72 % persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 91,5 % persen.

Tabel 3.2.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Uraian	Jumlah (Rp) dan Proporsi (%)						
	2021		2022		2023		Rata-Rata (%)
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENDAPATAN DAERAH	**26.633.000.085.963**	**100,00**	**24.167.935.634.127**	**100,00**	**25.369.733.556.675**	**100,00**	**100,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**14.695.474.898.162**	**55,18**	**16.264.618.583.852**	**67,29**	**17.012.509.421.006**	**67,06**	**63,18**
Pajak Daerah	11.871.378.824.580	79,74	13.484.851.151.740	82,90	13.976.642.716.351	82,16	81,60
Retribusi Daerah	91.634.269.205	0,62	115.116.614.199	0,70	139.377.038.536	0,82	0,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	508.263.876.971	3,46	546.717.113.900	3,36	638.482.406.528	3,75	3,52
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.377.197.927.406	16,18	2.117.892.583.014	13,02	2.258.007.259.591	13,27	14,16
PENDAPATAN TRANSFER	**11.871.796.336.054**	**44,58**	**7.810.882.578.787**	**32,00**	**8.278.928.086.424**	**32,63**	**36,40**
Dana Bagi Hasil Pajak	768.488.755.162	6,47	909.711.090.450	11,64	923.636.245.991	11,16	9,76
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	267.356.875.272	2.25	18.989.623.430	0,24	9.475.277.000	0,11	0,18
Dana Alokasi Umum	3.432.978.859.000	28,92	3.435.718.090.405	43,98	3.558.428.755.500	42,98	38,63
Dana Alokasi Khusus (fisik)	401.885.567.398	3,39	371.734.785.185	4,75	404.100.292.842	4,88	4,34
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.932.375.674.222	58,97	3.013.508.989.317	38,58	3.296.089.570.091	39,81	45,79
Dana Insentif Daerah	68.710.605.000	0,57	61.352.500.000	0,78	87.197.945.000	1,05	0,80
Dana Penyesuaian	-	-	-		-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-		-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**65.728.851.747**	**0,25**	**92.434.201.488**	**0,38**	**78.296.049.245**	**0,31**	**0,31**
Pendapatan Hibah	64.882.003.502	98,71	92.161.740.403	99,70	77.972.123.308	99,59	99,33
Lain lain pendapatan	846.848.245	1,29	272.461.085	0,29	323.925.937	0,41	0,66

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2023 Audited.

Dalam RKPD Tahun 2024, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diproyeksikan sebesar 27,114 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 18,50 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,59 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,75 miliar rupiah. Sementara itu dalam APBD Tahun 2024, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 26,831 triliun rupiah, dengan PAD sebesar 18,216 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,591 triliun rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,75 miliar rupiah.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar 47,15 persen. Realisasi terbesar adalah pada komponen Pendapatan Asli Daerah terealisasi 8,247 triliun rupiah atau 45,27 persen. Selanjutnya pada komponen Pendapatan Transfer terealisasi 4,404 triliun rupiah atau 51,26 persen, dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 515,903 juta rupiah atau 2,27 persen.

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Realisasi s/d Tw. II 2024	
		RKPD 2024	APBD 2024	Rp	%
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**18.500.149.320.000**	**18.216.864.276.000**	**8.247.051.293.340**	45,27
1.1.	Pajak Daerah	15.754.387.924.000	15.471.102.880.000	6.537.528.588.333	42,26
1.2.	Retribusi Daerah	1.728.627.388.000	1.687.236.270.000	1.068.991.627.692	63,70
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	687.553.929.000	687.553.929.000	456.211.256.459	66,35
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	329.580.079.000	379.971.197.000	184.319.820.856	48,51
2.	**Pendapatan Transfer**	**8.591.957.067.000**	**8.591.957.067.000**	**4.404.160.715.503**	**51,26**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000	8.591.957.067.000	4.404.160.715.503	51,26
2.2	Transfer antar daerah	**22.750.000.000**	**22.750.000.000**	-	-
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**27.114.856.387.000**	**26.831.571.343.000**	**515.903.056**	**2,27**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**18.500.149.320.000**	**18.216.864.276.000**	**12.651.727.911.899**	**47,15**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Mempertimbangkan kondisi realisasi tersebut, dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tetap sebesar 4,70 – 5,50 persen, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menjadi sebesar 27,211 triliun rupiah, dengan PAD sebesar 18,594 triliun rupiah, pendapatan transfer tetap sebesar 8,591 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan yang sah menjadi sebesar 25,593 miliar rupiah.

Secara rinci, proyeksi perubahan pendapatan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**18.500.149.320.000**	**18.216.864.276.000**	**18.594.062.625.000**
1.1.	Pajak Daerah	15.754.387.924.000	15.471.102.880.000	15.471.102.880.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.728.627.388.000	1.678.236.270.000	2.050.687.360.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	687.553.929.000	687.553.929.000	687.752.278.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	329.580.079.000	379.971.197.000	384.520.107.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**8.591.957.067.000**	**8.591.957.067.000**	**8.591.957.067.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000	8.591.957.067.000	8.591.957.067.000
2.2	Transfer antar daerah	-	-	-
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.750.000.000**	**22.750.000.000**	**25.593.372.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**27.114.856.387.000**	**26.831.571.343.000**	**27.211.613.064.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
b. Penambahan titik layanan dengan bekerjasama dengan BUMDes, BPR BKK, Mall Pelayanan Publik, dan Badan Usaha lainnya;
c. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota, desa, Kepolisian, dan dunia usaha lainnya;
d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
e. Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIIAS) 2024;
f. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan besar;
g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
h. Pemutakhiran data objek retribusi;
i. Pengembangan sistem informasi retribusi;
j. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;

k. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
l. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
m. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha; dan
n. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sejalan dengan peningkatan kinerja pendapatan yang meningkat di tahun 2023, maka realisasi belanja daerah di tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa. Selain itu, peningkatan realisasi belanja juga terjadi pada komponen bagi hasil yaitu 6,085 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi 6,264 triliun rupiah di tahun 2023, selaras dengan naiknya pendapatan daerah. Realisasi belanja bantuan keuangan juga naik dari 2,677 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi sebesar 2,852 triliun rupiah di tahun 2023. Kenaikan terjadi juga pada belanja bantuan sosial meningkat dari 78,894 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi sebesar 118,686 miliar rupiah di tahun 2023, dan belanja hibah di tahun 2022 sebesar 2,092 triliun rupiah menjadi 2,610 triliun rupiah di tahun 2023.

Penurunan terjadi pada komponen belanja tak terduga dengan realisasi sebesar 16,545 rupiah pada tahun 2022 menjadi 740 juta rupiah pada tahun 2023, dimana pada tahun 2023 penanganan dampak inflasi dan kemiskinan ekstrim sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja.

Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	**25.842.363.948.300**	**23.926.642.335.690**	**25.800.341.207.782**
BELANJA OPERASI	**16.825.242.533.039**	**13.456.887.671.949**	**14.887.780.012.763**
Belanja Pegawai	5.685.925.255.020	5.902.903.886.767	6.362.326.855.074
Belanja Barang dan Jasa	5.344.064.156.345	5.377.369.153.896	5.791.112.760.975
Belanja Subsidi	90.482.166	4.958.884.836	5.350.753.069
Belanja Hibah	5.728.982.384.318	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760
Belanja Bantuan Sosial	66.180.255.190	78.894.181.648	118.686.467.885
BELANJA MODAL	**1.447.519.464.142**	**1.713.641.630.081**	**1.794.862.778.298**
BELANJA TAK TERDUGA	**72.303.305.000**	**16.545.479.100**	**740.000.000**
BELANJA TRANSFER	**7.497.298.646.119**	**8.763.165.716.275**	**9.116.958.416.721**
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	5.735.553.033.353	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	493.309.827.766	804.934.393.793	653.134.590.053

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.268.435.785.000	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000
Bantuan Keuangan kepada Parpol	-	-	-
Bantuan Keuangan kepada Pemda Lain	-	-	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2023 (Audited).

Perubahan RKPD Tahun 2024 mengarahkan kebijakan belanja daerah diperuntukkan dalam rangka:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu:
   a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas;
   b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
   c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
   d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan implementasi kebijakan nasional terutama pada:
   a. penurunan *stunting* menjadi 14 persen;
   b. penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen;
   c. pengendalian inflasi daerah;
   d. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);
   e. implementasi Desa Anti Korupsi.
3. Dukungan 10 Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam

penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta

9. Dukungan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2024 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan dukungan pelaksanaan pilkada serentak, menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
   d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
   1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2024 terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 28,526 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 16,340 triliun rupiah, belanja modal sebesar 2,056 triliun rupiah, belanja tidak terduga sebesar 25 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 10,104 triliun rupiah. Sedangkan dalam APBD Tahun 2024 belanja daerah ditetapkan menjadi sebesar 27,849 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 16,165 triliun rupiah, belanja modal 1,703 triliun rupiah, belanja tak terduga sebesar 25,158 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 9,955 triliun rupiah. Dengan memperhatikan kebijakan untuk mengoptimalkan fiskal dan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat di tahun 2024 ini maka dalam perubahan RKPD Tahun 2024 belanja daerah dilakukan penyesuaian. Proyeksi belanja daerah dalam perubahan RKPD menjadi sebesar 28,547 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 16,512 triliun rupiah, belanja modal sebesar 1,831 triliun rupiah, belanja tak terduga sebesar 25,158 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 10,178 triliun rupiah.

Tabel 3.6.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
1.	**Belanja Operasi**	**16.340.057.242.000**	**16.165.486.886.000**	**16.512.376.827.000**
1.1.	Belanja Pegawai	7.582.510.238.000	7.573.527.979.000	7.208.434.358.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.015.482.875.000	5.765.363.499.000	6.455.885.888.000
1.3.	Belanja Subsidi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.723.004.129.000	2.788.812.408.000	2.801.213.337.000

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	18.060.000.000	36.783.000.000	45.443.244.000
2.	**Belanja Modal**	**2.056.751.662.000**	**1.703.224.650.000**	**1.831.211.861.000**
3.	**Belanja Tak Terduga**	**25.000.000.000**	**25.158.773.000**	**25.158.773.000**
4.	**Belanja Transfer**	**10.104.884.699.000**	**9.955.407.650.000**	**10.178.921.423.000**
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	7.105.634.568.000	6.907.335.038.000	7.131.173.811.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.999.250.131.000	3.048.072.612.000	3.047.747.612.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	**28.526.693.603.000**	**27.849.277.959.000**	**28.547.668.884.000**

Sumber: BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu tahun 2021-2023, penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pengembalian dana bergulir, dan penerimaan kembali piutang. Pengeluran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman kepada bank.

Tabel 3.7.

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	**646.485.090.816**	**1.909.773.865.813**	**1.330.794.071.071**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**861.485.090.816**	**1.909.773.865.813**	**1.330.794.071.071**

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	861.368.883.047	1.435.692.146.361	1.236.470.622.932
Pencairan dana Cadangan	-	-	94.130.600.000
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	116.207.769	474.081.719.452	192.848.139
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**215.000.000.000**	**891.000.000.000**	**-**
Pembentukan dana cadangan	200.000.000.000	400.000.000.000	-
Penyertaan modal	15.000.000.000	491.000.000.000	-
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	-	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2023 (Audited).

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sejalan dengan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, terdapat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi adanya penyertaan modal investasi dari Pemerintah Provinsi.

Nilai pembiayaan netto dalam RKPD Tahun 2024 sebesar 1,411 triliun rupiah sedangkan pada APBD 2024 sebesar 1,017 triliun rupiah. Dengan memperhatikan realisasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 maka perlu dilakukan penyesuaian nilai pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Dalam perubahan RKPD Tahun 2024 nilai pembiayaan netto menjadi 1,336 triliun rupiah.

Tabel 3.8.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.481.837.216.000**	**1.087.706.616.000**	**1.406.055.820.000**
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	581.837.216.000	581.837.216.000	900.186.420.000

No	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
1.2.	Penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD	900.000.000.000	505.869.400.000	505.869.400.000
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**
2.1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	
2.2.	Penyertaan modal	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	**1.411.837.216.000**	**1.017.706.616.000**	**1.336.055.820.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dari uraian tersebut diatas maka perubahan kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN RKPD 2024 (Rp)
1.	**PAD**	**18.500.149.320.000**	**18.216.864.276.000**	**18.594.062.625.000**
1.1.	Pajak Daerah	15.754.387.924.000	15.471.102.880.000	15.471.102.880.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.728.627.388.000	1.678.236.270.000	2.050.687.360.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	687.553.929.000	687.553.929.000	687.752.278.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	329.580.079.000	379.971.197.000	384.520.107.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**8.591.957.067.000**	**8.591.957.067.000**	**8.591.957.067.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000	8.591.957.067.000	8.591.957.067.000
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.750.000.000**	**22.750.000.000**	**25.593.372.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**27.114.856.387.000**	**26.831.571.343.000**	**27.211.613.064.000**
1.	**Belanja Operasi**	**16.340.057.242.000**	**16.165.486.886.000**	**16.512.376.827.000**
1.1.	Belanja Pegawai	7.582.510.238.000	7.573.527.979.000	7.208.434.358.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.015.482.875.000	5.765.363.499.000	6.455.885.888.000
1.3.	Belanja Subsidi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.723.004.129.000	2.788.812.408.000	2.801.213.337.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	18.060.000.000	36.783.000.000	45.443.244.000
2.	**Belanja Modal**	**2.056.751.662.000**	**1.703.224.650.000**	**1.831.211.861.000**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**25.000.000.000**	**25.158.773.000**	**25.158.773.000**
4.	**Belanja Transfer**	**10.104.88.699.000**	**9.955.407.650.000**	**10.178.921.423.000**
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	7.105.634.568.000	6.907.335.038.000	7.131.173.811.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	2.999.250.131.000	3.048.072.612.000	3.047.747.612.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	**28.526.693.603.000**	**27.849.277.959.000**	**28.547.668.884.000**
	Surplus (defisit)	**(1.411.837.206.000)**	**(1.017.706.616.000)**	**(1.336.055.820.000)**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.481.837.216.000**	**1.087.706.616.000**	**1.406.055.820.000**
	SiLPA	581.837.216.000	581.837.216.000	900.186.420.000
	Pencairan Dana Cadangan	900.000.000.000	505.869.400.000	505.869.400.000

NO	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN RKPD 2024 (Rp)
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
3	**Pembiayaan Daerah**	**1.411.837.216.000**	**1.017.706.616.000**	**1.336.055.820.000**
	SILPA	**0**	**0**	**0**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.10.
Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

NO	NAMA SKPD	PAGU SKPD	REALISASI 2023		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DEKONSENTRASI		**101.462.032.000**	**97.742.107.080**	**96,33**	**99,87**
1	INSPEKTORAT	287.255.000	286.090.646	99,59	100
2	BAPPEDA	1.468.254.000	1.449.948.660	97,10	100
3	DINAS ARPUS	551.296.000	548.924.820	99,57	100
4	DINAS LUTKAN	4.066.101.000	3.826.913.077	94,12	96,64
5	DINAS PORAPAR	4.416.000.000	4.297.216.850	97,31	100
6	DINAS KESEHATAN	17.448.065.000	15.409.095.416	88,31	100
7	DINAS KOPERASI UMKM	1.407.136.000	1.376.021.815	97,79	100
8	DINAS PM PTSP	544.785.000	543.581.620	99,80	100
9	DINAS PERINDAG	2.013.190.000	1.825.995.696	90,70	100
10	DINAS TANBUN	57.202.511.000	56.289.590.676	98,40	100
11	DINAS NAKERTRANS	2.664.449.000	2.615.927.310	98,18	100
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.234.297.000	8.156.518.339	99,06	100
13	SEKRETARIAT DAERAH	1.158.693.000	1.116.281.155	96,34	100
TUGAS PEMBANTUAN		**310.273.008.000**	**303.179.537.192**	**97,71**	**99,89**
1	DINAS LUTKAN	473.200.000	472.977.225	99,95	100
2	DINAS PORAPAR	1.630.000.000	1.547.027.146	94,91	100
3	DINAS PU SDA TARU	82.744.782.000	81.546.797.033	98,55	100
4	DINAS TANBUN	94.017.267.000	92.226.800.557	98,10	99,63
5	DINAS NAKESWAN	108.002.250.000	104.088.454.026	96,38	100
6	DINAS PU BMCK	19.959.583.000	19.937.469.651	99,89	100
7	DINAS NAKERTRANS	3.445.926.000	3.360.011.554	97,51	100

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 3.11.
Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
DEKONSENTRASI		**57.245.949.000**	**16.389.223.100**	**28,63**	**31,95**
	ATRUBUTIF	**2.613.640.000**	**876.303.217**	**33,53**	**42,22**
1	BAPPEDA	311.999.000	61.957.000	19,86	20,78
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN	266.932.000	95.611.190	35,82	70,00
3	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	327.892.000	15.590.000	4,75	4,75
4	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.706.817.000	703.145.027	41,20	48,99
	DELEGATIF	**54.632.309.000**	**15.512.919.883**	**28,40**	**31,45**
1	BAPPEDA	1.170.444.000	826.645.100	70,63	71,26
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	435.287.000	167.005.500	38,37	50,00
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	108.000.000	0	0,00	0,00
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.450.600.000	1.744.767.014	39,20	50,00
5	DINAS KESEHATAN	13.331.297.000	3.999.683.540	30,00	35,59
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	2.141.717.000	743.412.515	34,71	38,07
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN	611.657.000	96.397.200	15,76	15,76
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	180.581.000	25643000	14,20	19,32
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	21.537.847.000	4.139.705.919	19,22	20,28
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.528.914.000	586.673.370	38,37	42,51
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	9.135.965.000	3.182.986.725	34,84	35,01
TUGAS PEMBANTUAN		**510.280.046.000**	**70.345.122.631**	**13,79**	**16,23**
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.837.965.000	193.322.300	4,00	8,59
2	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.070.000.000	272.307.973	13,15	37,58
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RU	84.778.880.000	37.925.424.000	44,73	51,31
4	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	356.812.572.000	14.664.818.665	4,11	5,20
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20.741.357.000	12.786.606.423	61,65	64,99
6	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	36.258.696.000	3.741.753.915	10,32	13,49
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.696.976.000	541.485.255	14,65	15,42
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	1.083.600.000	219.404.100	20,25	54,96

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, per 30 Juni 2024.

Melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, utamanya dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran yang tersedia sebesar 119,556 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023, dan realisasi pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 27,384 miliar rupiah.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2023 tertinggi pada bidang pokja Kesejahteraan Sosial sebesar 27,709 miliar rupiah dan terendah pada bidang pokja energi baru terbarukan sebesar 1,504 miliar rupiah. Perusahaan dengan alokasi anggaran terbanyak pada tahun 2023 adalah Bank Jateng sebesar 18,639 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan dengan alokasi program terbanyak adalah PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap sebanyak 209 program.

Sedangkan realisasi perusahaan pada Triwulan II Tahun 2024 dengan alokasi anggaran terbanyak adalah PT Semen Gresik Tbk sebanyak 98 program dengan nilai sebesar 7,394 miliar rupiah.

Tabel 3.12.
Realisasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2023 dan TW.II Tahun 2024

No	Bidang Pokja	Realisasi 2023		TW.II Tahun 2024	
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata	455	4.204.589.950	75	413.084.700
2	Bidang Kesejahteraan Sosial	683	27.709.278.014	135	7.157.088.774
3	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	333	21.543.993.427	62	2.559.099.434
4	Bidang Pendidikan	394	11.856.902.284	103	1.568.821.409
5	Bidang Kedaruratan	198	2.487.087.653	40	400.639.060
6	Bidang Keagamaan	455	9.792.605.666	88	2.319.308.567
7	Bidang Pendampingan Umum	148	5.386.582.036	36	1.265.895.223
8	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	144	5.810.307.480	53	1.385.977.310
9	Bidang Kesehatan	363	16.119.554.793	43	758.147.580
10	Bidang Infrastruktur	289	10.907.848.796	70	9.281.817.475
11	Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	35	2.232.445.660	4	243.200.000
12	Bidang Energi Baru Terbarukan	6	1.504.857.980	1	31.910.972
TOTAL		**3503**	**119.556.053.739**	**710**	**27.384.990.504**

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 10 Juli 2024.

Tabel 3.13.
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Triwulan II

NO	Perusahaan	Jumlah Program	Anggaran
1	PT Semen Gresik Tbk	98	7.394.650.663
2	PT Tirta Investama (AQUA) Klaten	8	6.245.000.000
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8	3.844.980.000
4	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	84	2.054.715.000
5	PT Telkom Regional IV Jateng & DIY	28	1.892.300.000
6	PT Phapros Tbk	45	1.094.228.201
7	PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap	3	817.000.000
8	PT Bhimasena Power Indonesia	46	704.455.000
9	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	9	582.000.000
10	BPR BKK PURWOKERTO	68	474.906.375
11	Bank Jateng	4	445.275.000

NO	Perusahaan	Jumlah Program	Anggaran
12	BPR BKK SURYA YUDHAKENCANA	11	306.575.000
13	PT Pertamina Patra Niaga	27	266.132.890
14	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	23	249.441.577
15	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	29	243.519.500
16	Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	22	177.880.930
17	PT Kayu Lapis Indonesia – Kendal	39	151.615.000
18	BPR BKK UNGARAN	22	86.678.000
19	PT Nestle Indonesia Pabrik Bandaraya	2	70.200.000
20	PT DUA KELINCI	79	68.736.000
21	PT INDONESIA POWER SEMARANG PGU	6	57.818.000
22	BPR BKK Kendal	23	55.656.768
23	PT. Leea Footwear Indonesia	7	45.000.000
24	PT Norojono Tobacco International	3	27.281.600
25	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	7	14.895.000
26	PT Kenlee Indonesia	3	8.300.000
27	PT Dan Liris	6	5.750.000
TOTAL		**710**	**27.384.990.504**

Sumber: Forum TJSLP Provinsi Jawa Tengah, per 10 Juli 2024.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 memiliki tujuan pembangunan yaitu Mewujudkan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 adalah "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Sehingga sasaran pada Tahun 2024 meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berkarakter dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	
				RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari					
		PDRB Per kapita	Juta Rupiah	45,82	45,82
		Angka Kemiskinan	%	9,76 – 8,96	9,76 – 8,96
		Rasio Gini	Angka	0,364	0,364
	Meningkatnya perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan				
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 – 5,50	4,70 – 5,50
		Inflasi	%	3 ± 1	2,5 ± 1
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 – 4,94	5,00 – 4,30
		Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	107,45
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	
				RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
	yang berdaya saing berkarakter dan adaptif				
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,43
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27	61,13
		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	93,03
		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20	58,20
	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	67,55
		Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	4,00
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis				
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50	81,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran pada perubahan RKPD Tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Tahun 2024. Pokok – pokok pikiran tersebut ditelaah dan ditindaklanjuti dalam dalam dokumen RKPD Tahun 2024. Telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD lebih lanjut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Musrenbang Provinsi Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	Data tidak lengkap:	
1	Pada Tabel 2.96. untuk Tahun 2022 masih belum ada data Jumlah Bumdes, Pasar desa, UED-SP dan Up2K-PKK. (Bab II hal. 109)	Substasi pokok-pokok pikiran terkait kelengkapan data baik terkait data maupun penyajian dalam tabel atau grafik akan ditindaklanjuti pada Bab II RKPD Tahun 2024 sebagai bahan masukan penyempurnaan dokumen Rancangan RKPD menjadi dokumen RKPD Tahun 2024
2	Pada Tabel 2.105 dan 2.106 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi dengan data keterlibatan perempuan di parlemen serta perempuan sebagai manajer, professional, administasi dan teknis. (Bab II hal.122)	
3	Pada pembahasan olahraga, tidak dilengkapi dengan Tabel atau grafik yang menunjukkan perkembangan sport development indeks (SDI). (Bab II hal.126)	
4	Pada Tabel 2.121 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data kondisi penyakit tidak menular. (Bab II hal.139)	
5	Pada Tabel 2.147 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data pengiriman transmigran. (Bab II Hal.159)	
6	Pada Tabel 2.184 untuk Tahun 2022 masih belum dilengkapi data jumlah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian. (Bab II hal.224)	
7	Pada Tabel 2.160 luas pencurian pohon terdata Tahun 2021 seluas 14,6 ha danTahun 2022 seluas 91 ha; luas kebakaran hutan Tahun 2021 seluas 99,97 ha dan 2022 seluas 10,79. Data Tahun 2022 berubah signifikan dibanding 2021. Selain itu, pada narasi di atasnya tidak konsisten dengan data pada Tabel, dimana hanya disampaikan analisa kerusakan kawasan hutan sebagai contoh kerusakan hutan dari pencurian pohon dari Tahun 2020 ke 2021 sementara data yang disajikan dalam Tabel sampai dengan Tahun 2022. (Bab II hal.178)	Analisis dan penjelasan terkait data pada tabel yang tidak konsisten, akan diperbaiki dan memastikan kembali semua data dan penjelasannya konsisten, dan dituangkan pada Bab II RKPD Tahun 2024
8	Evaluasi terkait Pemberdayaan masyarakat dan desa sudah diusampaikan pada halaman II-109 (ada double pembahasan). (Bab II halaman 232)	Data yang disajikan berulang akan dicermati kembali secara substansi untuk memastikan bahwa data tersebut lebih tepat menjadi data dukung kondisi gambaran umum yang mana dan akan ditindaklanjuti pada Bab II RKPD Tahun 2024
9	Dalam uraian yang menjelaskan data pada Tabel 2.205, untuk pertumbuhan ekonomi masih Triwulan III Tahun 2021 (belum diupdate dengan publikasi BPS terbaru yaitu Tahun 2022). (Bab II hal.243)	Semua data yang belum diupdate sampai akhir tahun 2022 akan dicermati kembali dan akan diperbarui pada Bab II RKPD Tahun 2024
	Permasalahan:	
10	a. Permasalahan pendidikan untuk dikaitkan dengan masih tingginya anak tidak sekolah (ATS).	Permasalahan pendidikan akan dicermati kembali secara substansi berdasarkan analisis data dan informasi yang disajikan, dan akan dirumuskan lebih mendalam lagi

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	b. Selain itu disampaikan salah satu permasalahan pendidikan adalah masih kurangnya mutu pendidikan. Kondisi mutu pendidikan secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) Kualitas lulusan SMK yang dari hasil penilaian Kemendikbud, tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 92,53% pada Tahun 2022.; 2) Kualitas guru dimana kurang lebih 97% telah berkualifikasi D4/S1; 3) Kondisi sarpras yang sesuai data di Rancangan RKPD 2024 hanya terdapat 3 unit sapras SMA rusak sedang/derat dan 25 unit sarpras SLB rusak sedang/berat; 4) Biaya dengan adanya fasilitasi bantuan operasional sekolah/siswa baik negeri maupun swasta. Terkait ini seharusnya mutu pendidikan di Jawa Tengah sudah cukup baik. Untuk itu, dalam perumusan permasalahanya perlu dijabarkan hal-hal startegis yang perlu diintervensi di 2024 untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan (Bab II hal.246)	terutama pada hal-hal strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam RKPD Tahun 2024, dan akan dituangkan pada Bab II RKPD Tahun 2024
11	Permasalahan pangan masih belum diuraikan secara spesifik sebagai contoh untuk ketersediaan pangan disampaikan "namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong" dimana belum menggambarkan permasalahan sesungguh-nya yang perlu diintervensi di Tahun 2024 (Bab II hal. 248)	Permasalahan terkait pangan pada Bab II akan dirumuskan lebih lanjut agar lebih spesifik untuk dapat diintervensi melalui program kegiatan pada tahun 2024, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
12	Permasalahan Lingkungan Hidup belum menguraikan berkaitan dengan masalah sampah dimana sampah merupakan permasalahan selama manusia masih ada. Tetapi belum terlihat yang membahas permasalahan persampahan. Permasalahan sampah jangan digabung dalam permasalahan limbah, harus ada pemilahan antara limbah industri dan sampah utamanya rumah tangga (Bab II hal. 248)	Perumusan permasalahan pengelolaan sampah pada urusan lingkungan hidup akan dijabarkan lebih lanjut, dan dipilah antara permasalahan pengelolaan sampah dan limbah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
13	Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa belum secara spesifik menggambarkan permasalahan yang terjadi dan perlu mendapatkan penanganan di 2024 (Bab II hal.249)	Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa akan dirumuskan kembali lebih detail terutama pada permasalahan yang menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan pada tahun 2024, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
14	Permasalahan urusan pertanian masih belum spesifik seperti terkait kesejahteraan petani dan peternak yang menyampaikan "masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak", namun belum menjelaskan faktor yang mempengaruhi dan memerlukan penanganan di Tahun 2024. (Bab II hal. 252)	Perumusan permasalahan urusan pertanian akan lebih dijelaskan kembali terutama terkait dengan kesejahteraan petani dan peternak, yang akan dilakukan intervensi pada tahun 2024 dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
15	Konsisten dalam penyusunan target antar bab yang berhubungan. Seperti antara Bab IIIdan VII. Dimana pajak daerah pada Bab III ditargetkan naik Rp190 M atau tumbuh 1,25%, sedangkan pada Bab VII ditargetkan tumbuh 13,09%. (Bab VII hal.6)	Penyusunan target akan dicermati kembali agar lebih konsisten antar bab, terutama pada target keuangan daerah, dan akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024
16	Tahun 2024 Indeks SO2 dan NO2 ditargetkan 0,37 atau stagnan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 0,3707 (Bab VII hal.4)	Indikator indeks SO2 dan NO2 merupakan jenis indikator progres negatif, dimana target semakin kecil semakin baik. Indeks ini menggambarkan tingkat pencemaran dimana semakin sedikit nilainya berarti semakin baik tingkat pencemarannya
17	Tahun 2024 Indeks ketersediaan air tanah ditargetkan 3,60 menurun dari tahun 2022 yang sebesar 3,67 (Bab VII Hal.5)	Perhitungan indeks ketersediaan air tanah tahun 2024 menggunakan metode perhitungan dan variabel yang lebih lengkap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh terhadap penetapan target mulai tahun 2024
	Keuangan Daerah:	
18	Ada perbedaan perhitungan proporsi rincian pendapatan hibah terhadap total pendapatan daerah di Tabel 3.3 antara Tahun 2020 dan 2021 dengan Tahun 2022. Proporsi pendapatan hibah terhadap total pendapatan daerah Tahun 2020 tertulis 100%. Jika melihat pendapatan hibah Tahun 2020 sebesar Rp23,35M dan total pendapatan daerah adalah Rp25,39T seharusnya proprosinya adalah 0,09%. Demikian pula dengan Tahun 2021 dimana pendapatan hibah sebesar Rp64,88M dan total pendapatan daerah Rp26,63T sehingga proporsi terhadap total pendapatan daerah adalah 0,24%. (Bab III hal.8)	Perhitungan proporsi rincian pendapatan hibah pada Bab III akan dicermati kembali, untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, dan akan ditindaklanjuti dengan menuangkannya pada Bab III
19	1) Ketidaksinkronan target Bab III dan Bab VIII. Mendasarkan hasil perhitungan target PAD pada RKPD 2024 Bab VII, dimana pajak daerah ditargetkan tumbuh 13,09% serta retribusi dan pendapatan lain-lain ditargetkan tumbuh minus 1,2%. Proyeksi PAD Tahun 2024 mendasarkan Target Pertumbuhan Pajak, Retribusi dan pendapatan lain-lain dalam RKPD 2024: a. Pertumbuhan pajak daerah Tahun 2024 pada RKPD Bab VII ditargetkan 13,09% atau sebesar Rp17,264 b. Pertumbuhan retribusi dan pendapatan lain-lain Tahun 2024 Bab VII ditargetkan minus 1,12%. Sehingga sesuai target RKPD, pendapatan retibusi Rp136,35M dan pendapatan lain-lain Rp1,85T. Sehingga total PAD Tahun 2024 sesuai target RKPD 2024 Rp19,898T 2) Pesimis dalam menentukan PAD Bab III jika	Perhitungan pendapatan daerah akan dicermati kembali, dan akan disesuaikan jika sudah sesuai antara persentase proporsinya sehingga mendapatkan angka pendapatan absolut yang lebih tepat, dengan peningkatan yang lebih sesuai dengan kemampuan potensi yang ada. Hasil perhitungan akan dituangkan dalam Bab III, Bab VI, dan Bab VIII RKPD Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	kita bandingkan APBD untuk PAD Tahun 2023 dengan proyeksi RKPD Tahun 2024, untuk PAD hanya mengalami peningkatan 1,39% atau Rp. 249 Milyar.Kenapa hal tersebut dikatakan pesimis karena: a. Melihat trend pertumbuhan PAD Tahun 2021 – 2023 berkisar 10%. b. Mendasarkan Pendekatan Elastisitas (persentase peningkatan PAD untuk setiap 1 % pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan), yaitu: (1) Nilai elastisitas sebesar 1,85dihitung dari rata-rata elastisitas dari Tahun 2018- 2023 (2) Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah target Tahun 2024 sebesar 4,7- 5,5% (3) Hasil: a) PAD Tahun 2024 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 4,7%, maka diperoleh pertumbuhan PAD Tahun 2024 di angka 8,70% dan PAD Rp21,162T b) PAD Tahun 2024 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 5,5%, maka diperoleh pertumbuhan PAD Tahun 2024 di angka 10,18% dan PAD Rp21,742T 3) Mendasarkan dari hasil analisaperhitungan target PAD sesuai target pajak, reribusi dan pendapatan lain-lain dalam RKPD serta pendekatan elastisitas pertumbuhan ekonomi, maka proyeksiPAD Tahun 2024 berada pada kisaran Rp19,898T (terendah) sampai dengan Rp21,742T (tertinggi). (Bab III-9 dan VII-6)	
20	Dalam halaman III-9 RKPD 2024, upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah utamanya untuk retribusi adalah Penghitungan ulang terhadap struktur dan besaran tarif retribusi; Peningkatan kompetensi petugas pelayanan retribusi; Pengembangan aplikasi untuk pelayanan pembayaran retribusi; Peningkatan sarana prasarana pendukung objek retribusi. Tetapi jika membandingkan pendapatan retribusi APBD Tahun 2023 Rp137,9 Milyar dan Tahun 2024 yang sebesar Rp136,3 Milyar justru mengalami penurunan. (Bab III hal. 9)	Akan dilakukan perhitungan kembali terhadap nilai retribusi daerah dengan mempertimbangkan potensi retribusi daerah termasuk yang berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah. Hasil perhitungan akan dituangkan kembali pada Bab III dan Bab VI RKPD Tahun 2024
21	Belanja Hibah Tahun 2024 yang sebesar Rp1,41T ini menurun dari Tahun 2023 yang sebesar Rp2,23T. Perlu diingat bahwa hibah Tahun 2024 mengakomodir kebutuhan pendanaan Pilkada Serentak yang dari	Belanja hibah pada dokumen Rancangan RKPD belum mengakomodir belanja hibah untuk pilkada serentak tahun 2024. Nilai hibah akan dihitung kembali, dan akan dituangkan dalam Bab III RKPD Tahun 2024

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN	TELAAH
	pencairan dana cadangan ada dana Rp900M termasuk kebutuhan untuk fasilitasi bantuan pendidikan SMA/SMK swasta/MA dan insentif guru ngaji. (Bab III hal.13)	
22	Pada saat Musrenbangwil di disampaikan dibutuhkan dukungan DPRD untuk penanganan jalan dan sumberdaya air, yaitu kebutuhan anggaran jalan untuk managemen ruas tuntas Tahun 2024 sebesar Rp3,2 T, dari total kebutuhan Rp15 T. Sedangkan untuk kebutuhan infrastruktur sumberdaya air secara total membutuhkan Rp5,7 T. Tetapi jika melihat dari Bab III justru di belanja modal hanya Rp2 T. Untuk itu, sebenarnya bagaimana rencana dari penanganan infrastruktur untuk Tahun 2024. (Bab III hal.13)	Prioritas belanja pada tahun 2024 sebagaimana tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan mandatori kebijakan dari pemerintah pusat, diarahkan untuk fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan penyelenggaraan pilkada serentak. Sehingga berdasarkan perhitungan, untuk belanja modal di tahun 2024 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,7 triliun.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024

Tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 diarahkan pada tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode tahun 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen;
   b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0-5,7 persen;
   c. Rasio Gini sebesar 0,374-0,477;
   d. Penurunan emisi GRK sebesar 27,27 persen;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99-74,02;
   b. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen.

Selain itu aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, dengan target pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Nilai Tukar Petani sebesar 105-108;
b. Nilai Tukar Nelayan sebesar 107-110.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 yaitu 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, 2) peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, 4) penguatan daya saing usaha, 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, 7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta 8) pelaksanaan Pemilu 2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan rubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung perwujudan tema dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024, dalam RKP Tahun 2024 ditetapkan strategi pengembangan wilayah. Strategi pengembangan wilayah tahun 2024 ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Strategi pengembangan wilayah untuk Wilayah Jawa-Bali terutama untuk didorong dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah
   a. Mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI Terpadu Batang dan KEK Kendal melalui optimalisasi paket-paket fiskal dan nonfiskal yang disesuaikan dengan potensi/tema pembangunan kawasan;
   b. Mempercepat pengembangan kawasan-kawasan pariwisata unggulan berdasarkan keuntungan kompetitifnya di Kawasan Borobudur dan sekitarnya;
   c. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung pengembangan kawasan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, perbaikan kesesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi sesuai kebutuhan lapangan kerja, serta pengembangan BLK;
   d. Meningkatkan kelayakhunian dan peran WM Semarang sebagai pusat layanan pendukung sektor industri dan ekonomi kreatif;
   e. Meningkatkan konektivitas kawasan untuk memperluas jangkauan layanan dan distribusi melalui penyediaan konektivitas inter dan intrawilayah, penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan serta pengembangan sistem transportasi multimoda;
   f. Meningkatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah, pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali dalam peningkatan daya saing daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wialyah Jawa Bali;
   g. Mengedepankan pembangunan rendah karbon melalui peningkatan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
   h. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
2. Strategi pemerataan intrawilayah Jawa-Bali
   a. Meningkatkan hubungan desa-kota di Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Magelang, dan Kendal, yang bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;
   b. Mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antara Jawa bagian utara dengan Jawa bagian selatan sebagai akselerator pemerataan ekonomi;
   c. Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di daerah;
   d. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Jawa-Bali;
   e. Peningkatan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat

sasaran, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel;

f. Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;

g. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi), serta layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik menjangkau langsung masyarakat);

h. Meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

3. Strategi penguatan ketahanan bencana

a. Pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa upaya difokuskan untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor;

b. Penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara difokuskan untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah;

c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dini kebencanaan, serta pengembangan data kebencanaan;

d. Revitalisasi mekanisme kerjasama lintas daerah dan multipihak, khususnya dalam hal sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2024, Wilayah Jawa-Bali memiliki sasaran utama dengan target yang harus dicapai meliputi:

1. meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan indikator kinerja dan targetnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0-5,4 persen;
2. menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, dengan indikator kinerja dan targetnya yaitu Tingkat Kemiskinan sebesar 9,50-10,00 persen;
3. meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan indikator kinerja dan targetnya sebesar 4,26-4,96 persen.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu **Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. **PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan**

berkualitas, dengan fokus pada:

a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
   1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
   2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
   3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste);*
   4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
   5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
   6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
   7) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
   8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai *tools* untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
   1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
   2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik

kabupaten/kota;

3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesos;
4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan;

c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi, 2) inflasi, 3) tingkat pengangguran terbuka, dan 4) nilai tukar petani. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3) Program Penyelenggaraan Jalan;
4) Program Pengembangan Perumahan;
5) Program Kawasan Permukiman;
6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
7) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

9) Program Pemberdayaan Sosial;
10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
11) Program Rehabilitasi Sosial;
12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
13) Program Penanganan Bencana;
14) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
16) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
17) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
18) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
19) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
20) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat;
21) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
22) Program Pengelolaan Pelayaran;
23) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
24) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
25) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
26) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
27) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
28) Program Pengembangan UMKM;
29) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
30) Program Promosi Penanaman Modal;
31) Program Pelayanan Penanaman Modal;
32) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
33) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
34) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
35) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
36) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
37) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
38) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
39) Program Pemasaran Pariwisata;
40) Program PengembanganEkonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
41) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
42) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
43) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
44) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
45) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
46) Program Penyuluhan Pertanian;
47) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
48) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;

49) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
50) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
51) Program Pengembangan Ekspor;
52) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
53) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
54) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
55) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
56) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
57) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
58) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
59) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
60) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
61) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
62) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
63) Program Penempatan Tenaga Kerja;
64) Program Hubungan Industrial;
65) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
66) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

2. **PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**, dengan fokus pada upaya:
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan digitalisasi pendidikan; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas *stakeholder*, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
   b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan *stroke*, masalah

kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

c. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid, serta penyediaan bahan literasi;
e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelengaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks pembangunan manusia, 2) indeks pembangunan kebudayaan, 3) indeks pembangunan gender, dan 4) indeks pembangunan keluarga. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum;
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
11) Program Pengembangan Kebudayaan;
12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
13) Program Pembinaan Sejarah;
14) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
15) Program Pengelolaan Permuseuman;
16) Program Pembinaan Perpustakaan;
17) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
21) Program Perlindungan Perempuan;
22) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
23) Progam Perlindungan Khusus Anak;
24) Program Pengendalian Penduduk;
25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
26) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

3. **PD 3: Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung**, dengan fokus pada upaya:
   a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL UMKM, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan

energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;

c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks kualitas lingkungan hidup, dan 2) persentase penurunan indeks risiko bencana. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11) Program Pengelolaan Persampahan;
12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
15) Program Pengelolaan Hutan;
16) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
17) Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
18) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
19) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
20) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
21) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
22) Program Penanggulangan Bencana.

4. **PD 4: Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif**, dengan fokus pada upaya:
   a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
   b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, dengan indikator kinerjanya yaitu indeks reformasi birokrasi. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Program Penataan Bangunan;
3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
4) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
7) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
10) Program Pendaftaran Penduduk;

11) Program Pencatatan Sipil;
12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
15) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
16) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
17) Program Pengelolaan Arsip;
18) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
19) Program Penataan Organisasi;
20) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
21) Program Kesejahteraan Rakyat;
22) Program Failitasi dan Koordinasi Hukum;
23) Program Perekonomian dan Pembangunan;
24) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
25) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
26) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
27) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
28) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
29) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
31) Program Kepegawaian Daerah;
32) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
34) Program Pelayanan Penghubung;
35) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
36) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
37) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
38) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
39) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
40) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
41) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 45,82 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,76-8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70-5,50 persen;
5. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;

6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,00 – 4,30 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 61,13;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,03;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,55;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,50.

Pada perubahan RKPD Tahun 2024, target indikator kinerja utama pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 merupakan penyesuaian dari hasil evaluasi triwulan II tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa perubahan target indikator yang telah disesuaikan berdasarkan analisis hasil evaluasi triwulan II tahun 2024 meliputi:

1. Inflasi dari 3 ± 1 menjadi sebesar 2,5 ± 1 persen; dan
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan dari 60,27 menjadi sebesar 61,13.

Dalam upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian target IKU Daerah tahun 2024 tersebut didukung dengan **10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah** sebagai program unggulan daerah tahun 2024. Kesepuluh program prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Pesta demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan digelarnya Pemilu serentak tahun 2024 yang akan memilih presiden dan wakil presiden, legislatif, serta gubernur dan wakil gubernur. Seluruh lapisan masyarakat yang telah memiliki hak pilih wajib untuk mengikuti pemilu serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan sejak tahun 2023, dan akan dilanjutkan pada tahun 2024 sampai dengan pemilu berakhir. Beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Masyarakat diajak untuk secara bijaksana menyampaikan hak pilihnya serta ikut berperan serta dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama proses penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Forkompimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk bersama-sama mempersiapkan pengamanan selama proses pemilu. Selain itu juga dilakukan latihan pengamanan bersama dalam rangka memastikan kesigapan pengamanan selama proses pemilu berlangsung hingga langkah-langkah dalam menghadapi situasi aksi kegaduhan dan unjuk rasa, termasuk dengan situasi kamtibmas lainnya.

2. **Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyakarat**

Kondusivitas daerah merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung perekonomian daerah yang stabil yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan kondusivitas daerah adalah dengan menjaga stabilitas politik, sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan upaya tersebut sebagai salah satu program prioritas yang harus dilakukan, termasuk utamanya pada saat-saat menjelang pemilu serentak pada tahun 2024.

Berbagai strategi telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat di antaranya pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini; mobilisasi satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana; penegakan perda provinsi atau peraturan gubernur; pembinaan trantibum terdiri dari pembinaan pengamanan obyek vital (pam obvit) serta pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali). Selain itu juga dilaksanakan patroli pengendalian trantibum; penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; pengamanan strategis dan tingkat provinsi termasuk pemilu serentak 2024; serta operasi penertiban trantibum (pekat dan cipta kondisi).

Edukasi kepada masyarakat tentang penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, serta pentingnya menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat juga strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi agar masyarakat paham tentang arti penting kondusivitas daerah. Selain itu, dilakukan juga pembinaan kepada partai politik, pemberdayaan dan pengawasan ormas, serta koordinasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak dalam rangka pencegahan terjadinya konflik yang dapat mengganggu kondisivitas daerah.

3. **Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan**

Peningkatan inflasi yang terjadi dalam satu tahun terakhir memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat dimana terjadi peningkatan harga sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pusat menetapkan kebijakan prioritas pengendalian inflasi dan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk juga kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui perangkat daerah juga telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengendalikan inflasi Jawa Tengah dan pada tahun 2024 juga masih menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.

Upaya meningkatkan keterjangkauan akses pangan juga sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan akses pangan masyarakat di antaranya subsidi harga pangan strategis produsen dan konsumen, gelar pangan murah, fasilitasi distribusi komoditas pangan strategis, cadangan pangan pemerintah (beras, kedelai, jagung dan pangan lokal), bantuan lumbung pangan masyarakat, promosi pangan lokal, fasilitasi desa B2SA (Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), serta fasilitasi kelompok usaha pangan lokal

Di sisi lain, produksi dan produktivitas pertanian juga terus didorong agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga. Berbagai kegiatan dilakukan untuk terus menjaga ketersediaan produk pertanian (termasuk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan) antara lain peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana, penyediaan bibit dan benih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya, penyediaan asuransi petani dan nelayan, penyediaan subsidi bunga kredit bagi petani, pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi sarana penampungan air (embung).

4. **Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan *stunting***

Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan *stunting* merupakan kebijakan Nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut juga telah dan akan terus didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menjadi program prioritas pada tahun 2024. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah akan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain bantuan siswa miskin (BSM), seragam siswa miskin, jaminan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia serta anak dan penyandang disabilitas. Selain program bantuan sosial tersebut terdapat program subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan; peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar; serta pengembangan dan penjaminan keberlanjutan

usaha mikro dan kecil;

3. Penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi kebijakan, antara lain pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan infrastruktur perumahan, jambanisasi, air minum dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi utama tersebut didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Untuk pendekatan kewilayahan difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala dan cakupan lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) penanganan kemiskinan di kawasan kumuh, 2) peningkatan aksesibilitas di wilayah dengan kesulitan geografis tinggi, 3) peningkatan produktivitas pertanian, 4) pemberdayaan nelayan dan sektor perikanan, dan 5) pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Selanjutnya dalam rangka penurunan angka *stunting*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah dan akan terus melaksanakan berbagai upaya terintegrasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Berbagai kegiatan dalam bentuk aksi konvergensi *stunting* di Jawa Tengah antara lain peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat; mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai; pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita; Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi; penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi di bawah lima tahun; mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi; pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi; penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan posyandu; penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama dan sederajat; penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan; mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan; serta penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

Program lainnya yang menjadi prioritas untuk dilakukan pada tahun 2024 adalah penurunan angka pengangguran. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi dengan peningkatan sarana pratek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta optimalisasi BLK; pengembangan wirausaha baru; serta program padat karya di berbagai sektor.

5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan karhutla)

Dampak perubahan iklim semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat antara lain kekeringan, polusi, serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu penanganan dampak perubahan iklim menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah pada tahun 2024.

Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada kekeringan antara lain pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan kebun raya, pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan, pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, normalisasi/restorasi sungai, serta program konservasi kawasan lindung dan daerah resapan air melalui pengembangan komoditas perkebunan. Selanjutnya upaya mitigasi terhadap kekeringan antara lain dilaksanakan dengan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan konservasi air tanah serta implementasi nilai perolehan air di jawa tengah, pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah berupa sumur resapan dangkal dan sumur pantau, pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai, serta droping air bersih (melalui mekanisme BTT berdasarkan SK kedaruratan bencana kabupaten/kota).

Selanjutnya dalam rangka pengurangan polusi dilakukan kegiatan antara lain pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut; pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan; pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai; serta optimasi lahan dengan penggunaan pupuk organik. Sedangkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan

lahan dilakukan upaya pengendalian, pengawasan, dan perlindungan hutan, mengoptimalkan fungsi pengawas hutan dan lahan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan risiko kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau.

6. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi menjadi salah satu dari sepuluh program prioritas Jawa Tengah tahun 2024 dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan memiliki keterampilan serta kompetensi yang lebih baik. Program prioritas ini lebih diarahkan pada penguatan kualitas pendidikan SMK di Jawa Tengah dalam rangka mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pendidikan SMK antara lain sinkronisasi kurikulum pendidikan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sinkronisasi ini menjadi penting agar kurikulum pendidikan SMK sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK antara lain fasilitasi pendampingan ujian kompetensi keahlian (UKK) SMK, peningkatan sarana prasarana pendidikan SMK khususnya alat praktek, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan SMK *boarding* dan semi *boarding* Jawa Tengah, serta pemberian BOP dan BOSDA untuk SMK. Peningkatan kualitas, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja juga dilaksanakan oleh sektor lainnya antara lain melalui pelatihan khusus tenaga kerja di balai latihan kerja (BLK) dan di balai-balai industri, penyediaan sarana pelatihan di balai-balai tersebut, serta peningkatan sarana pratek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif

Salah satu sektor unggulan perekonomian daerah Jawa Tengah adalah sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor unggulan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan program pengembangan sektor pariwi sata sebagai salah satu dari sepuluh program prioritas pada tahun 2024. Pengembangan sektor pariwisata pada tahun 2024 difokuskan pada upaya peningkatan promosi pariwisata, pengembangan aplikasi layanan pariwisata dan monitoring pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai even pariwisata antara lain even *sport tourism*, kuliner festival, dan *e-sport tournament*.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan daya saing sektor UMKM berbasis ekonomi kreatif karena sektor UMKM juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah Jawa Tengah yang menopang perekonomian masyarakat Jawa Tengah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong berkembangnya UMKM berbasis ekonomi kreatif antara lain melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM, fasilitasi pengembangan pasar berbasis digital, fasilitasi pembiayaan dan modal, pendampingan berkelanjutan, fasilitasi pengembangan teknologi dan inovasi, fasilitasi

perlindungan hak atas kekayaan intelektual, serta promosi dan publikasi produk/karya kreatif dengan penyelenggaraan berbagai even festival produk/karya kreatif. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di tiap wilayah kabupaten/kota melalui perwujudan kabupaten/ kota kreatif.

8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi

Ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular bukan hanya membahas pengelolaan limbah yang lebih baik dengan lebih banyak melakukan daur ulang, namun ekonomi sirkular juga mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi, seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mulai mengembangan sistem ekonomi sirkular. Pada tahun 2024, pengembangan sistem ekonomi sirkular juga menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan sistem ekonomi sirkular di Jawa Tengah antara lain pengelolaan sampah dan limbah, pengembangan produk pangan organik, fasilitasi pengembangan industri hijau, pemulihan lahan berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang ekonomi sirkular.

Upaya lain dalam pengembangan ekonomi sirkular yang penting adalah terkait dengan pembangunan energi berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Di Jawa Tengah, bauran energi baru terbarukan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan berbagai upaya di antaranya pengembangan dan pembangunan infrastruktur EBT terutama biogas, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) *rooftop*, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pemanas air tenaga surya (PATS), dan gas rawa. Selain itu juga dilakukan upaya untuk mendorong pengembangan desa mandiri energi, dan pendampingan transisi energi kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelayanan kepada publik merupakan salah satu fungsi dan peran utama penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang dinamis. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perwujudan pelayanan publik adalah dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan

kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pengembangan pelayanan publik berbasis SPBE ini menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah pada tahun 2024. Bentuk kegiatan dari program ini antara lain pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem tata naskah dinas elektronik (*e-office*), sistem pelayanan kepegawaian terpadu, sistem pelayanan masyarakat terintegrasi, sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi. Selain itu, dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk mengembangkan satu inovasi pelayanan publik dalam satu tahun.

10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)

Salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi di Jawa Tengah adalah penerapan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabel. Untuk itu, dalam proses manajemen menjadi penting untuk dilakukan pengawasan terhadap setiap proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam bentuk reviu atau audit.

Pada tahun 2024, salah satu program prioritas daerah Jawa Tengah adalah meningkatkan pengawasan internal baik pengawasan terhadap organisasi maupun pengawasan terhadap seluruh ASN. Pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan fungsi *quality assurance*, asistensi, dan *consulting* pada proses manajemen pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta tidak menimbulkan *fraud* di kemudian hari. Berbagai upaya dilakukan untuk perwujudan pengawasan tersebut antara lain penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong penerapan manajemen risiko dalam manajemen pemerintahan, penguatan kapasitas APIP, serta penguatan saber pungli.

Selanjutnya pengawasan terhadap seluruh ASN Jawa Tengah dilakukan dalam rangka penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk aparatur yang profesional dan fungsional, integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur. Upaya yang dilakukan antara lain dengan sosialisasi dan edukasi kepada ASN dalam mewujudkan ASN Berakhlak,

penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, pelatihan teknis dan kompetensi ASN dalam rangka mewudkan ASN yang profesional dan fungsional, dan pengembangan sistem merit.

Berikut ini dapat digambarkan keselarasan dan konsistensi antara: 1) tujuan daerah, sasaran daerah, prioritas daerah, dan sepuluh program prioritas daerah tahun 2024, 2) tema pembangunan daerah dan prioritas daerah tahun 2024 dengan RPD Tahun 2024-2026, dan 3) tema pembangunan daerah dan prioritas daerah tahun 2024 dengan permasalahan daerah dan isu strategis tahun 2024.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 4.1
Gambaran Keselarasan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Prioritas Daerah, dan 10 (Sepuluh) Program Prioritas Daerah Tahun 2024

Berikut rencana program prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 4.3.
Rencana Program Prioritas Mendukung Prioritas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung**		**284.514.357.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	116.020.799.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	68.675.833.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.333.441.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.245.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	778.748.000

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.648.361.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.538.667.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	133.740.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	844.280.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.904.836.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	240.732.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.233.800.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.553.855.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	44.225.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.056.639.000
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	34.752.256.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.983.793.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	6.157.459.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	551.982.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.714.957.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	12.584.935.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	13.516.019.000
2	**Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**		**4.517.035.631.000**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.588.374.796.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	731.080.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	341.362.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	746.290.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	632.074.526.000

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	942.959.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	467.060.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.895.139.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.501.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.140.702.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	221.552.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	318.448.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	532.188.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	297.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	688.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	440.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	20.539.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	215.308.826.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.108.042.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	23.960.940.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	468.800.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	704.085.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.265.120.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	16.743.127.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	225.589.000
3	**Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas**		**11.514.067.263.000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.418.609.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.994.990.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.621.131.000

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	406.276.990.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.601.321.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.511.475.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.575.411.000
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.400.926.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	9.655.940.000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	59.703.386.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	176.704.096.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.989.918.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	359.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	276.915.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	28.064.992.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.780.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.668.287.000
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.750.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	10.207.756.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.839.965.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.507.000.000
		PROGRAM PENATAAN DESA	-
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	675.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.753.170.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.186.055.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	129.071.703.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	459.100.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.268.866.000

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.491.600.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.698.293.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.704.291.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.072.340.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.408.609.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	705.000.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.069.888.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.585.216.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.480.106.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	492.773.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	939.027.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	36.970.506.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.917.212.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.324.368.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.553.535.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	34.619.750.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	885.576.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.554.424.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	122.091.510.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.192.992.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	15.591.174.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.184.695.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	20.927.738.000
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	4.170.240.000
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	117.640.000

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	634.445.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.191.031.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.860.322.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.203.088.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.396.819.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	27.635.662.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	272.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	777.435.000
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	248.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.226.462.956.000
4	**Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif**		**12.232.051.633.000**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.370.085.972.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.204.626.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.026.749.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.273.250.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	150.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	229.800.000
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	399.289.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	240.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	220.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	240.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	26.367.273.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.502.779.000

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.257.329.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	780.793.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	100.698.000
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.710.656.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.883.050.000
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	417.266.075.000
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.772.628.000
		PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	5.112.642.000
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.605.000.000
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.850.000.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	406.941.475.000
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.009.200.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.768.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.314.433.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	45.353.093.000
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	13.400.374.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.970.755.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.050.000.000
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.962.186.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.340.262.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.168.341.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	630.239.808.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	82.431.012.000

No	Prioritas Daerah	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.031.422.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	117.428.936.000
		TOTAL	**28.547.668.884.000**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

4.3. Pembangunan Wilayah Jawa Tengah

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah memperhatikan berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2024 ini, selain memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), pengembangan wilayah juga memperhatikan 17 (tujuh belas) wilayah ekoregion yang berada di Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia.

A. 5 (lima) Ekoregion yang seluruhnya berada di wilayah Jawa Tengah
   1) Ekoregion kompleks dataran fluvial Batang – Demak – Pati – Blora. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Batang, Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Rembang, Semarang;
   2) Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Gunung Muria. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Jepara, Kudus, dan Pati;
   3) Ekoregion kompleks perbukitan vulkanik Gunung Slamet–Merapi. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud;
   4) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Gunung Beser–Wadaslintang;
   5) Ekoregion kompleks dataran fluvial Cilacap.

B. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – DIY – Jakarta – Jawa Barat - Jawa Tengah – Jawa Timur yaitu ekoregion kompleks dataran organic/ coral Jawa. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Jepara, Kendal, dan Rembang.

C. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – Jakarta – Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Ekoregion kompleks dataran fluvial Cilegon – Indramayu – Pekalongan. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, dan Batang.

D. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Banten – Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Sawal. Kabupaten di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Cilacap.

E. 1 (satu) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu ekoregion kompleks perbukitan struktural Jonggol–

Sumedang – Cilacap. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Banyumas, Cilacap, Brebes, dan Tegal.

F. 4 (empat) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Timur dengan Jawa Tengah yaitu:
   1) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Kendal – Pati – Rembang – Tuban – Gresik. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Batang, Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kendal, Pati, Semarag, Sragen, Surakarta;
   2) Ekoregion kompleks dataran struktural Rembang – Tuban. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Blora, Grobogan, Kudus, Pati, dan Rembang;
   3) Ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Lawu Utara. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri;
   4) Ekoregion kompleks perbukitan karst Pati – Rembang – Tuban. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Blora, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan.

G. 3 (tiga) Ekoregion yang wilayahnya terdapat di Jawa Timur, DI. Yogyakarta, dan Jawa Tengah
   1) Ekoregion kompleks dataran vulkanik Bantul – Nganjuk – Probolinggo. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Boyolali, Karanganyar, Klaten, dan Magelang;
   2) Ekoregion kompleks perbukitan struktural Wonosari–Trenggalek. Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri;
   3) Ekoregion kompleks perbukitan karst Gunungkidul. Kabupaten di Jawa Tengah yang berada di Ekoregion dimaksud yaitu Wonogiri.

Sementara itu, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Arah diarahkan pada sektor pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan di Jawa Tengah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi dan penanganan yang bersifat hulu-hilir. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman di Jawa Tengah terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, dalam rangka untuk pemerataan pembangunan di Jawa Tengah maka upaya pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antar wilayah maupun di dalam wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan sumberdaya manusia, pengoptimalan sektor unggulan.

S u m b e r : *Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Gambar 4.2
Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

4.4. Inovasi Daerah Pada Perubahan RKPD 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Inovasi kebijakan tersebut pada Perubahan RKPD 2024 masih tetap dilaksanakan. Inovasi kebijakan tersebut meliputi sebagai berikut.

1. **Program "Tuku Lemah Oleh Omah"**

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi tugas besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara angka ketersediaan dan kebutuhan rumah atau disebut *backlog*. Berdasarkan data dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah angka *backlog* di Jawa Tengah pada akhir tahun 2022 sebanyak 372.246 unit. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan angka *backlog* dengan beberapa program perumahan bersubsidi. Salah satunya adalah program "Tuku Lemah Oleh Omah".

Program Tuku Lemah Oleh Omah adalah program rumah subsidi dari Provinsi Jawa Tengah yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu membeli rumah sendiri. Program ini dilaksanakan melalui mekanisme pemberian bantuan sosial material bangunan. Implementasi dari program "Tuku Lemah Oleh Omah" yaitu:

a. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PB *Backlog*)

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Povinsi Jawa Tengah dalam menyediakan rumah yang layak huni adalah dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat untuk pembangunan rumah dalam rangka pemenuhan *backlog* di Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut PB *backlog*). Bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan sosial barang dengan nilai bantuan yaitu 35 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dengan sistem pembelanjaan dilakukan oleh kelompok masyarakat (swakelola) dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Bantuan yang diberikan berupa stuktur RUSPIN dan komponen arsitektur (dinding, atap, dan lainnya). Beberapa keunggulan RUSPIN yaitu waktu perakitan cepat, hanya dibutuhkan waktu 2 hari untuk merakit rumah tipe 36 (1 bulan siap ditempati), komponen ringan sehingga mudah dirakit tanpa alat bantu mekanis, mendukung konsep rumah tumbuh, dan sudah teruji tahan gempa (Puslitbang Kementerian PUPR).

Kriteria penerima bantuan adalah:

1) Masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah;
2) Tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3) Penghasilan dibawah Rp3 juta/bulan;
4) Berusia produktif;
5) Bersedia swadaya;
6) Tidak boleh disewakan/dialihkan kepemilikannya;
7) Memiliki lahan dengan kepemilikan yang sah, sesuai dengan tata ruang dan aman dari bencana. Jika belum memiliki lahan, dapat membentuk komunitas (PB Komunitas) dan membeli lahan secara bersama-sama dalam 1 hamparan untuk kemudian dipecah sesuai kavling.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 sebanyak 1.254 unit rumah PB *backlog* telah dibangun melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 4.3
Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah (PB *Backlog*)

b. Bantuan Sosial Pembangunan Baru Relokasi (PB Relokasi)

PB relokasi merupakan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana sehat kepada masyarakat miskin yang terkena relokasi program pemerintah. Sasaran dari bantuan ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di rusunawa, rumah liar, sempadan sungai, lokasi rawan bencana, lahan milik pemerintah (KAI, Pelindo, Pemakaman Umum), dimana lokasi-lokasi ini telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan relokasi dan harus mencari tempat tinggal baru.

Bantuan stimulan PB relokasi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi yaitu "fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah". Kriteria penerima bantuan PB relokasi dikhususkan bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, sedangkan kriteria lainnya sama dengan PB *backlog*. Ada 2 jenis PB relokasi:

1) Rumah Tapak (1 lantai)

Besarnya nilai bantuan yaitu 35 juta rupiah untuk bantuan pembelian material bangunan dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Untuk struktur dan komponen bangunan sama dengan PB *backlog* .

2) Rumah Vertikal/ "OPTIMIS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera)"

Besarnya nilai bantuan yaitu 50 juta rupiah untuk pembelian material dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Bantuan yang diberikan berupa struktur RUSPIN 2 lantai tipe 36 (lantai 1:18 m^2; lantai 2: 18 m^2) dan komponen arsitektur (dinding, atap, dan lainnya).

Gambar 4.4
Pembangunan Baru Relokasi di Provinsi Jawa Tengah (PB Relokasi)

c. **Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (PB Bencana)**

Bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terdampak bencana khususnya yang mengalami tingkat kerusakan berat/roboh atau berada di lokasi rawan bencana melalui bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan. Merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan SPM Perumahan yaitu "penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi". Nilai bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 1,8 juta rupiah untuk upah tenaga padat karya. Mekanime dan kriteria penerima bantuan sama dengan PB *backlog* dan PB relokasi.

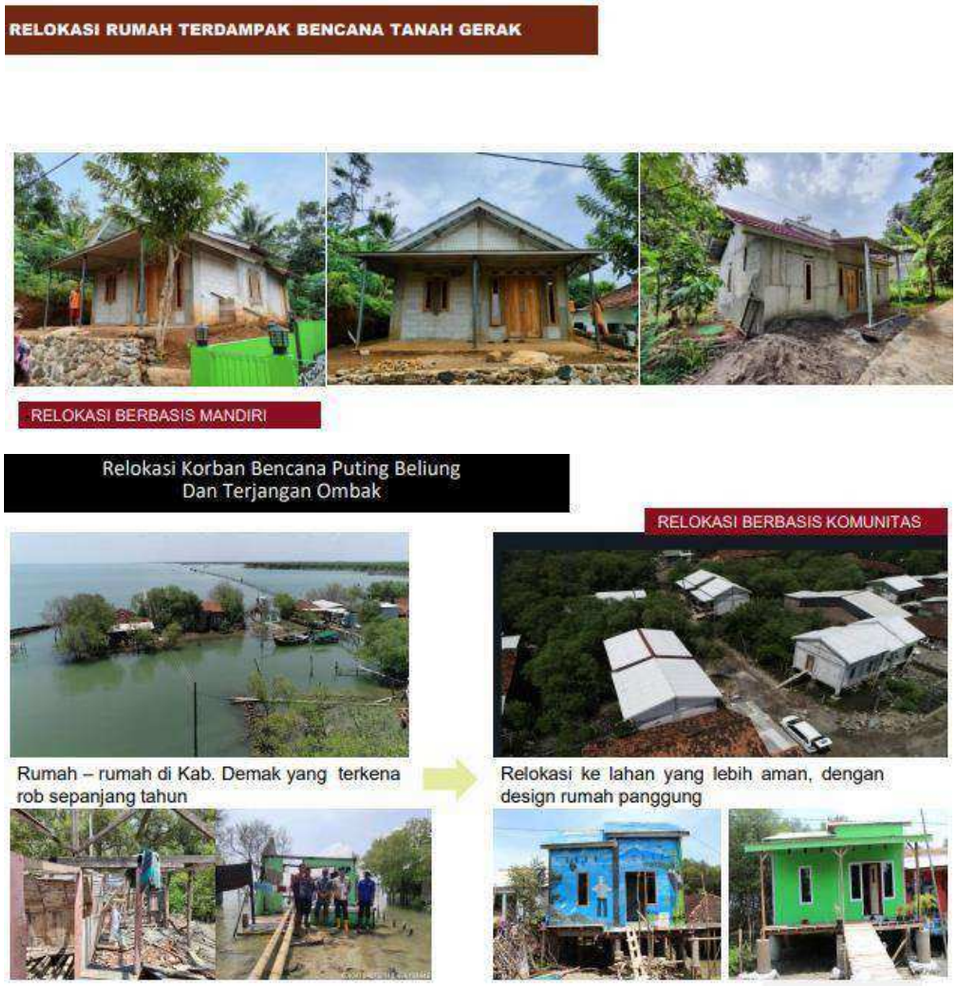

Gambar 4.5
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah (PB Bencana)

Melalui Program "Tuku Lemah Oleh Omah" ini terdapat 2 inovasi yang ditonjolkan yaitu:

1) Inovasi Struktur Bangunan
   - Teknologi unggul RUSPIN
   - Efisiensi biaya
   - Efisiensi waktu
   - Jaminan mutu
   - Mudah direplikasi
   - Dapat dikembangkan
2) Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
   - Berbasis komunitas
   - Swakelola Pokmas
   - Berbasis lingkungan
   - tata ruang yang berkelanjutan

2. Pengembangan Desa Wisata

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam mulai dari wisata alam, budaya, maupun hasil buatan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian, Jawa Tengah bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak

perekonomian daerah baik pada skala provinsi hingga skala pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Selain itu juga guna mendukung pengembangan desa wisata, saat ini Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effec*t) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik.

Harapannya dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.

Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perkembangan dari segi jumlah dari tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Gambar 4.6
Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Jumlah desa wisata terus mengalami kenaikan, namun belum ada data tentang perkembangan kenaikan kelas/perkembangan dari rintisan ke berkembang atau ke maju maupun sebaliknya.

Dalam rangka mendorong pengembangan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah guna menghidupkan perekonomian masyarakat sampai pada tingkat desa, Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Jawa Tengah dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Adapun dukungan bantuan keuangan yang sudah diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemberdayaan desa wisata adalah sebagai berikut.

Gambar 4.7
Perkembangan Alokasi Bantuan Keuangan Desa Wisata di Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Secara konsisten dari tahun 2020-2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah konsen terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa wisata melalui pemberian bankeu desa wisata. Dimana Desa wisata yang telah menerima bantuan dari tahun 2020-2023 berjumlah 604 Desa, dengan total bankeu sebesar 84,3 M.

Desa Wisata Jawa Tengah selain telah mengalami perkembangan dari segi jumlah. Kinerja Desa Wisata di Jawa Tengah juga terlihat dari prestasi di tingkat nasional dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, antara lain sebagai berikut prestasinya:

1. Tahun 2021
   - Juara 1 ADWI kategori Souvenir (Desa Wisata Sumber Bulu, Kab. Karanganyar);
   - Juara 2 ADWI Kategori Desa Wisata Rintisan (Desa Wisata Pandanrejo, Kab. Purworejo);
   - Juara 3 ADWI kategori Desa Wisata Berkembang (Desa Wisata Karanganyar, Kab. Magelang);
   - Juara 2 ADWI kategori Desa Wisata Maju (Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara);
   - Juara 3 ADWI kategori Souvenir (Desa Wisata Cikakak, Kab. Banyumas);
   - Peringkat 5 ADWI kategori Homestay (Desa Wisata Sangiran, Kab. Sragen);
   - Juara 3 kategori alam BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Nadulang, Kab. Pemalang);
   - Juara 1 kategori kreatif BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Ngrombo, Kab. Sukoharjo);
   - Juara 2 kategori kreatif BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Pagak, Kab. Banjarnegara);
   - Juara 1 kategori budaya BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Karangturi, Kab. Rembang);
   - Juara terbaik kategori digital BCA Desa Wisata Awards 2021 (Desa Wisata Kemuning, Kab. Karanganyar).
2. Tahun 2022
   - 50 Besar ADWI tahun 2022 (Desa Wisata Bugisan, Kab. Klaten dan Desa Wisata Sembungan, Kab. Wonosobo);
   - Juara 1 ADWI Desa Wisata Rintisan (Desa Sambungan);
   - Juara Harapan 2 ADWI Kategori Digital dan Kreatif (Desa Bugisan);
   - Juara 1 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 kategori Destinasi Belanja Terbaik (Desa Wisata Asap Indah, Desa Wonosari, Kabupaten Demak);
   - Juara 1 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 kategori Dataran Tinggi (Dusun Girpasang, Kabupaten Klaten);
   - Juara 3 Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2022 Kategori Wisata Olahraga dan Petualangan (Kalitalang Bike Park, Kabupaten Klaten).

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Kinerja pembangunan daerah tahun 2024 didukung dengan rencana pendanaan untuk memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun meningkat proyeksi kerangka pendanaan tahun 2024 tetap dihadapkan pada tantangan dan risiko dari faktor global, nasional, maupun regional baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang kompleks dan dinamis.

Disisi lain pelaksanaan belanja pembangunan daerah juga akan terus dioptimalkan agar semakin akuntabel dan tepat sasaran. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan juga tetap menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Dengan memperhatikan realisasi kinerja dan keuangan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, serta adanya kebijakan terkait dengan dana transfer tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian pada kerangka pendanaan tahun 2024 meliputi:

a. Pendapatan daerah dalam RKPD Tahun 2024 sebesar 27,114 triliun rupiah, pada APBD Tahun 2024 menjadi sebesar 26,831 triliun rupiah, dan pada perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar 27,211 triliun rupiah;
b. Proyeksi belanja daerah dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 28,526 triliun rupiah, APBD Tahun 2024 menjadi sebesar 27,849 triliun rupiah, dan pada rencana perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar 28,547 triliun rupiah;
c. Proyeksi pembiayaan netto daerah dalam RKPD sebesar 1,411 triliun rupiah dan APBD Tahun 2024 sebesar 1,017 triliun rupiah, dan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi sebesar 1,336 triliun rupiah.

Proyeksi kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Perubahan RKPD 2024 (Rp)
1.	**PAD**	**18.500.149.320.000**	**18.216.864.276.000**	**18.594.062.625.000**
1.1.	Pajak Daerah	15.754.387.924.000	15.471.102.880.000	15.471.102.880.000
1.2.	Retribusi Daerah	1.728.627.388.000	1.678.236.270.000	2.050.687.360.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	687.553.929.000	687.553.929.000	687.752.278.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	329.580.079.000	379.971.197.000	384.520.107.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**8.591.957.067.000**	**8.591.957.067.000**	**8.591.957.067.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.591.957.067.000	8.591.957.067.000	8.591.957.067.000
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.750.000.000**	**22.750.000.000**	**25.593.372.000**

NO	URAIAN	RKPD 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)	Perubahan RKPD 2024 (Rp)
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**27.114.856.387.000**	**26.831.571.343.000**	**27.211.613.064.000**
1.	**Belanja Operasi**	**16.340.057.242.000**	**16.165.486.886.000**	**16.512.376.827.000**
1.1.	Belanja Pegawai	7.582.510.238.000	7.573.527.979.000	7.208.434.358.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.015.482.875.000	5.765.363.499.000	6.455.885.888.000
1.3.	Belanja Subsidi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.723.004.129.000	2.788.812.408.000	2.801.213.337.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	18.060.000.000	36.783.000.000	45.443.244.000
2.	**Belanja Modal**	**2.056.751.662.000**	**1.703.224.650.000**	**1.831.211.861.000**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**25.000.000.000**	**25.158.773.000**	**25.158.773.000**
4.	**Belanja Transfer**	**10.104.88.699.000**	**9.955.407.650.000**	**10.178.921.423.000**
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	7.105.634.568.000	6.907.335.038.000	7.131.173.811.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	2.999.250.131.000	3.048.072.612.000	3.047.747.612.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	**28.526.693.603.000**	**27.849.277.959.000**	**28.547.668.884.000**
	Surplus (defisit)	**(1.411.837.206.000)**	**(1.017.706.616.000)**	**(1.336.055.820.000)**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.481.837.216.000**	**1.087.706.616.000**	**1.406.055.820.000**
	SiLPA	581.837.216.000	581.837.216.000	900.186.420.000
	Pencairan Dana Cadangan	900.000.000.000	505.869.400.000	505.869.400.000
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**	**70.000.000.000**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
3	**Pembiayaan Daerah**	**1.411.837.216.000**	**1.017.706.616.000**	**1.336.055.820.000**
	SILPA	**0**	**0**	**0**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

5.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan layanan prasarana dan sarana pendidikan berbasis pendataan; peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana terutama bagi pendidikan vokasi; peningkatan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; serta peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berorientasi *softskill* dan pendidikan karakter.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan kesehatan reproduksi melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar operasional (SOP); peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar; pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota; pengendalian vektor demam berdarah *dengue* dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi; penyusunan rencana epidemologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan; penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ); pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan *universal child immunization* (UCI) desa; fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota; cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT); pelayanan pengujian kalibrasi; serta pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat provinsi dan advokasi dukungan pemda; peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan; penyediaan logistik (obat-obatan, *reagensia*, bahan habis pakai dan makan minum) di tujuh RSUD/RSJD; pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat

(ormas, kader, dunia usaha, perguruan tinggi, mitra, dan lainnya); peningkatan cakupan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui perbaikan *baseline* data, peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi. Kegiatan-kegiatan diatas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui inisiasi penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), , serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah

serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penanganan daerah rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan *housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek

keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas risiko *stunting* dan prioritas penanggulangan kemiskinan dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste).*

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui penetapan lokasi.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada fasilitasi peksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan

lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/ DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain penyelesaian persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penysunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yange mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksankan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa – P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi berupa fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan dermaga sungai yang melayani trayek lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center,* pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website,* dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake,* serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM PPID, dan monev keterbukaan informasi badan publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province,* mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III,* layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta pemberdayaan pemuda dan kewirausahaan pemuda.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga melalui peningkatan penyadaran dan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, pemetaan potensi atlet, serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security insident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan dan pengembangan kerjasama multipihak dan lintas sektor.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid serta penyediaan bahan literasi.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah provinsi, serta lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota melalui peningkatan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar pada LKD dan perangkat daerah.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah tingkat provinsi dan arsip statis pada LKD.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budi daya; pengembangan kawasan budi daya; fasilitasi prasarana budi daya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem); dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan stategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih,

penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan Kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK); pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan perbenihan tanaman hutan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; pengolahan hayati bahan

baku hasil hutan bukan kayu, pembudidayaan HHBK dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan HHBK, rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun; penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan; penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran *(appendix*) CITES untuk kewenangan daerah provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, pengelolaan taman hutan raya (tahura) provinsi, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi, perencanaan pengelolaan tahura, pengamanan kawasan tahura provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat tahura provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan tahura provinsi, kerja sama penyelenggaraaan tahura provinsi, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tahura provinsi.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

d. Program Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada pengelolaan air tanah berbasis konservasi melalui kegiatan Kajian Konservasi pada Zona Rusak CAT di Jawa Tengah, Pemetaan Potensi Air Tanah pada Kawasan Bentang Alam Karst di Jawa Tengah, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca air tanah; penyusunan kajian studi kelayakan perizinan

air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; Kajian Penyusunan Nilai Harga Air Baku serta Bobot Nilai Air untuk Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Jawa Tengah. Program ini juga ditujukan dalam mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada tahun 2024 akan dilaksanakan jelajah Geopark/Geoheritage beserta pendampingan dalam penetapan Geoheritage. Selain itu, program ini juga ditujukan meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan akan mengurangi resiko akibat bencana geologi (*geological hazard*) termasuk di dalamnya adalah kegiatan monitoring kejadian *Land Subsidence* di pesisir Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui Penyusunan Perda Pengelolaan Pertambangan di Jawa Tengah; kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan minerba; pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; Penyusunan wilayah pertambangan rakyat di Jawa Tengah; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada Mahasiswa Kebumian dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; penyusunan statistik pertambangan; dan pelaksanaan rapat koordinasi terkait akomodasi wilayah pertambangan dalam RTRW Kab/Kota. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral beserta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; Intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan Biogas, *Biogenic shallow gas* (Gas Rawa), Pompa air tenaga surya, dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, pengembangan energi baru terbarukan melalui kajian potensi EBT di Jawa Tengah; meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi; pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK),

dan sektor Industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatan kehandalan pasokan listrik; meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita; serta pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik melalui pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan atau kebijakan Ketenagalistrikan Daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan Inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; Koordinasi K2 bersama stakeholder terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk subtitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.

b. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarpemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan, serta perencanaan dan evaluasi kinerja sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assestment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis tekonologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan

inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2.
Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**		**10.096.512.941.000**	**10.018.510.478.000**	**10.388.504.581.000**
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.096.512.941.000	10.018.510.478.000	10.388.504.581.000
01.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		**3.710.760.299.000**	**3.551.013.246.000**	**3.590.193.528.000**
01.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.708.924.637.000	3.549.177.584.000	3.588.374.796.000
01.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	751.800.000	751.800.000	731.080.000
01.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	341.362.000	341.362.000	341.362.000
01.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	742.500.000	742.500.000	746.290.000
01.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		**861.312.763.000**	**607.644.463.000**	**635.379.684.000**
01.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	857.819.545.000	604.101.245.000	632.074.526.000
01.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	937.959.000	1.087.959.000	942.959.000
01.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	667.000.000	667.000.000	467.060.000
01.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.888.259.000	1.788.259.000	1.895.139.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**555.020.617.000**	**649.140.401.000**	**641.154.559.000**
01.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	104.843.791.000	118.343.791.000	116.020.799.000
01.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	78.105.779.000	91.094.779.000	89.670.823.000
01.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.978.123.000	3.072.623.000	2.621.131.000
01.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.699.123.000	18.699.123.000	17.204.626.000
01.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	340.675.501.000	408.211.785.000	406.276.990.000
01.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.048.300.000	4.048.300.000	4.026.749.000
01.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.670.000.000	5.670.000.000	5.333.441.000
01.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**19.965.000.000**	**40.685.000.000**	**39.903.207.000**
01.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	14.917.000.000	34.917.000.000	34.601.321.000
01.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.108.000.000	3.828.000.000	3.511.475.000
01.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	1.725.000.000	1.575.411.000
01.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	215.000.000	215.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**9.516.576.000**	**9.050.926.000**	**10.069.176.000**
01.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.441.576.000	3.975.926.000	4.674.176.000
01.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.925.000.000	4.925.000.000	5.245.000.000
01.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000
01.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		**226.181.128.000**	**251.309.968.000**	**249.512.340.000**
01.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	9.479.940.000	9.579.940.000	9.655.940.000
01.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000	100.000.000	100.000.000
01.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	56.760.528.000	61.789.368.000	59.703.386.000
01.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	157.256.160.000	177.256.160.000	176.704.096.000
01.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.225.500.000	2.225.500.000	2.989.918.000
01.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	359.000.000	359.000.000	359.000.000
02.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		**39.523.117.000**	**35.521.194.000**	**35.540.194.000**
02.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	180.415.000	180.415.000	276.915.000
02.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.176.915.000	28.124.992.000	28.064.992.000
02.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.780.000.000	1.780.000.000	1.780.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.685.787.000	1.685.787.000	1.668.287.000
02.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	5.700.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000
02.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**3.693.116.000**	**3.693.116.000**	**3.943.690.000**
02.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.375.000.000	1.375.000.000	1.501.000.000
02.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.052.958.000	1.052.958.000	1.140.702.000
02.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	250.000.000	250.000.000	221.552.000
02.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	229.800.000	229.800.000	229.800.000
02.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	290.000.000	290.000.000	318.448.000
02.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	495.358.000	495.358.000	532.188.000
02.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		**16.226.435.000**	**16.226.435.000**	**16.554.721.000**
02.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	9.430.935.000	9.430.935.000	10.207.756.000
02.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.980.500.000	3.980.500.000	3.839.965.000
02.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.815.000.000	2.815.000.000	2.507.000.000
02.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		**1.590.000.000**	**1.590.000.000**	**1.589.289.000**
02.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	400.000.000	399.289.000
02.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	600.000.000	600.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	590.000.000	590.000.000
02.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		**15.958.064.000**	**12.058.064.000**	**11.323.164.000**
02.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	778.748.000	778.748.000	778.748.000
02.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8.548.361.000	4.648.361.000	4.648.361.000
02.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.538.667.000	1.538.667.000	1.538.667.000
02.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	133.740.000	133.740.000	133.740.000
02.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	844.280.000	844.280.000	844.280.000
02.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.904.836.000	1.904.836.000	1.904.836.000
02.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	240.732.000	240.732.000	240.732.000
02.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.968.700.000	1.968.700.000	1.233.800.000
02.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**700.000.000**	**700.000.000**	**700.000.000**
02.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	240.000.000	240.000.000	240.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	220.000.000	220.000.000	220.000.000
02.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	240.000.000	240.000.000	240.000.000
02.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**4.750.000.000**	**5.614.225.000**	**5.614.225.000**
02.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	-	-	-
02.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	675.000.000	675.000.000	675.000.000
02.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.625.000.000	1.753.170.000	1.753.170.000
02.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.450.000.000	3.186.055.000	3.186.055.000
02.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**1.440.000.000**	**1.440.000.000**	**1.425.000.000**
02.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	305.000.000	305.000.000	297.000.000
02.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	695.000.000	695.000.000	688.000.000
02.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	440.000.000	440.000.000	440.000.000
02.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		**129.119.076.000**	**129.119.076.000**	**130.799.669.000**
02.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	127.393.110.000	127.393.110.000	129.071.703.000
02.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	459.100.000	459.100.000	459.100.000
02.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.266.866.000	1.266.866.000	1.268.866.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**37.966.552.000**	**37.966.552.000**	**39.870.052.000**
02.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	24.523.773.000	24.523.773.000	26.367.273.000
02.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.442.779.000	13.442.779.000	13.502.779.000
02.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		**33.396.589.000**	**33.396.589.000**	**33.375.133.000**
02.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.500.000.000	2.500.000.000	2.491.600.000
02.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.513.853.000	6.698.293.000	6.698.293.000
02.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.901.787.000	8.717.347.000	8.704.291.000
02.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.072.340.000	9.072.340.000	9.072.340.000
02.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.408.609.000	6.408.609.000	6.408.609.000
02.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		**5.489.128.000**	**5.489.128.000**	**5.332.983.000**
02.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	705.000.000	705.000.000	705.000.000
02.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.100.000.000	1.100.000.000	1.069.888.000
02.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.649.910.000	1.649.910.000	1.585.216.000
02.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.510.218.000	1.510.218.000	1.480.106.000
02.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	524.000.000	524.000.000	492.773.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		**219.737.000.000**	**220.837.000.000**	**235.847.826.000**
02.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	23.675.000.000	19.039.000.000	20.539.000.000
02.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	196.062.000.000	201.798.000.000	215.308.826.000
02.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		**1.257.329.000**	**1.257.329.000**	**1.257.329.000**
02.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.257.329.000	1.257.329.000	1.257.329.000
02.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**2.100.000.000**
02.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.000.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000
02.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		**33.001.987.000**	**33.386.987.000**	**33.506.987.000**
02.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.028.042.000	6.028.042.000	6.108.042.000
02.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	23.705.940.000	24.090.940.000	23.960.940.000
02.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	298.800.000	298.800.000	468.800.000
02.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	704.085.000	704.085.000	704.085.000
02.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.265.120.000	2.265.120.000	2.265.120.000
02.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		**34.686.936.000**	**17.686.936.000**	**16.968.716.000**
02.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	34.418.638.000	17.418.638.000	16.743.127.000
02.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	268.298.000	268.298.000	225.589.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		**883.346.000**	**883.346.000**	**881.491.000**
02.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	780.346.000	780.346.000	780.793.000
02.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	103.000.000	103.000.000	100.698.000
03.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**54.607.017.000**	**58.987.017.000**	**58.805.832.000**
03.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.341.700.000	3.551.700.000	3.492.882.000
03.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	33.852.192.000	37.307.192.000	37.014.731.000
03.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13.119.461.000	13.674.461.000	13.917.212.000
03.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.963.639.000	2.040.639.000	2.056.639.000
03.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.330.025.000	2.413.025.000	2.324.368.000
03.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		**138.173.575.000**	**55.173.575.000**	**43.613.285.000**
03.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.533.575.000	4.533.575.000	4.553.535.000
03.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	123.700.000.000	46.200.000.000	34.619.750.000
03.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	825.000.000	825.000.000	885.576.000
03.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9.115.000.000	3.615.000.000	3.554.424.000
03.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		**137.269.987.000**	**168.011.958.000**	**176.988.109.000**

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	92.949.520.000	117.521.045.000	122.091.510.000
03.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.964.297.000	11.114.842.000	14.192.992.000
03.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	14.980.185.000	15.581.816.000	15.591.174.000
03.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.635.000.000	2.835.000.000	4.184.695.000
03.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	20.740.985.000	20.959.255.000	20.927.738.000
03.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**		**27.589.586.000**	**44.489.586.000**	**44.445.490.000**
03.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.758.156.000	34.789.156.000	34.752.256.000
03.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.966.293.000	2.966.293.000	2.983.793.000
03.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.313.155.000	6.182.155.000	6.157.459.000
03.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	551.982.000	551.982.000	551.982.000
03.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**		**28.203.053.000**	**33.172.553.000**	**32.986.151.000**
03.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.725.496.000	2.725.496.000	2.714.957.000
03.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	4.315.593.000	4.315.593.000	4.170.240.000
03.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	7.684.499.000	12.653.999.000	12.584.935.000
03.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	13.477.465.000	13.477.465.000	13.516.019.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		**10.982.539.000**	**12.982.539.000**	**12.403.345.000**
03.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	117.640.000	117.640.000	117.640.000
03.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	634.445.000	634.445.000	634.445.000
03.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.316.405.000	2.316.405.000	2.191.031.000
03.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.980.978.000	2.980.978.000	2.860.322.000
03.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.482.628.000	3.482.628.000	3.203.088.000
03.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.450.443.000	3.450.443.000	3.396.819.000
03.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**31.983.395.000**	**29.225.395.000**	**28.685.097.000**
03.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	30.869.870.000	28.111.870.000	27.635.662.000
03.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	290.000.000	290.000.000	272.000.000
03.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	823.525.000	823.525.000	777.435.000
03.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**		**220.000.000**	**220.000.000**	**248.000.000**
03.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	220.000.000	220.000.000	248.000.000
04.01	**SEKRETARIAT DAERAH**		**157.674.449.000**	**434.559.513.000**	**435.200.051.000**
04.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.710.656.000	1.710.656.000	1.710.656.000
04.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.783.000.000	3.783.000.000	3.883.050.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	140.639.161.000	417.524.225.000	417.266.075.000
04.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.438.990.000	2.438.990.000	2.772.628.000
04.01.06		PROGRAM PEREKONOMIANDA NPEMBANGUNAN	4.912.642.000	4.912.642.000	5.112.642.000
04.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.505.000.000	2.505.000.000	2.605.000.000
04.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.685.000.000	1.685.000.000	1.850.000.000
04.02	**SEKRETARIAT DPRD**		**390.574.350.000**	**390.574.350.000**	**406.941.475.000**
04.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	390.574.350.000	390.574.350.000	406.941.475.000
05.01	**PERENCANAAN**		**12.467.000.000**	**12.467.000.000**	**12.777.200.000**
05.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.814.000.000	5.814.000.000	6.009.200.000
05.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.653.000.000	6.653.000.000	6.768.000.000
05.02	**KEUANGAN**		**10.185.263.793.000**	**10.051.414.055.000**	**10.278.130.482.000**
05.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.146.505.350.000	10.002.087.074.000	10.226.462.956.000
05.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.114.433.000	6.114.433.000	6.314.433.000
05.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	32.644.010.000	43.212.548.000	45.353.093.000
05.03	**KEPEGAWAIAN**		**13.243.893.000**	**13.243.893.000**	**13.400.374.000**
05.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	13.243.893.000	13.243.893.000	13.400.374.000
05.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		**19.589.676.000**	**19.589.676.000**	**20.970.755.000**
05.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.589.676.000	19.589.676.000	20.970.755.000
05.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**5.050.000.000**	**5.050.000.000**	**5.050.000.000**

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD (Rp)	PAGU P-RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.050.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000
05.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**		**2.772.186.000**	**2.892.186.000**	**2.962.186.000**
05.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.772.186.000	2.892.186.000	2.962.186.000
06.01	**INSPEKTORAT DAERAH**		**8.839.949.000**	**9.348.649.000**	**9.413.989.000**
06.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.073.727.000	6.073.727.000	6.073.727.000
06.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.766.222.000	3.274.922.000	3.340.262.000
08.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**1.241.501.156.000**	**821.655.555.000**	**833.299.519.000**
08.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.168.341.000	2.168.341.000	2.168.341.000
08.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.022.991.617.000	628.861.017.000	630.239.808.000
08.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	76.846.013.000	81.881.012.000	82.431.012.000
08.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.031.422.000	1.031.422.000	1.031.422.000
08.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	138.463.763.000	107.713.763.000	117.428.936.000
Total Belanja			**28.526.693.603.000**	**27.849.277.959.000**	**28.547.668.884.000**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diukur menggunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian target beberapa indikator kinerja. Penyesuaian dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target 2024		Perangkat Daerah Koordinator
			RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82	45,82	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96	9,76-8,96	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,364	0,364	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50	4,70 - 5,50	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	3,0 ± 1	2,5 ± 1	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94	5,00 – 4,30	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	107,45	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,43	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27	61,13	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	93,03	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20	58,20	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	67,55	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	4,00	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50	81,50	Sekretariat Daerah

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Penyesuaian IKU Perangkat Daerah berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**			
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82	45,82
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96	9,76-8,96
3	Rasio Gini	Angka	0,364	0,364
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50	4,70 - 5,50
5	Inflasi	%	3,0 ± 1	2,5 ± 1
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94	5,00 – 4,30
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	107,45
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,43
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,27	61,13
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	93,03
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,20	58,20
B	**Aspek Pelayanan Umum**			
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar			
	Pendidikan			
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,94	12,94
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,08	8,08
	Kesehatan			
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,60	74,74
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2,00	2,00
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	60,00	60,00
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan *Stunting*	%	80,00	80,00
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	78,00	78,00
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	49,89	49,89
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87,00	87,00
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90,00	90,00
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90,00	91,11
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	88,00	88,00
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98,00	98,00
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,17	98,17
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr	%	100,00	98,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
	Soedjarwadi			
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100,00	0
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	91,29	91,29
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	44,48	44,48
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	91,18	83.38
4	Persentase akses air minum aman	%	40,43	40,43
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	10,97	10,97
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	49,42	49,42
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	61,78	61,78
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	61,57	61,57
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	14,29	14,29
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	0,04	0,04
3	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	55,21	55,21
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82,00	82,00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,74	0,74
	Sosial			
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	0,55	2,46
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
	Tenaga Kerja			
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,60	28,60
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	62,85	62,85
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	56,00	56,00
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	9,24	9,24
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	45,05	71,04
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91,07	91,07
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81,53	81,53
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40,00	40,00
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,25	4,25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,00	66,00
	Pangan			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,00	83,00
	Pertanahan			
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100,00	100,00
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian	%	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50,66	50,66
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,01	85,01
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,37	3,37
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,37	0,37
	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4,00	4,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0,7318	0,7318
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13	2,13
	Perhubungan			
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,05	6,05
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,38	0,38
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16,098	16,098
4	*On time performance* layanan transportasi	%	83,22	83,22
	Komunikasi dan Informatika			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,07	4,27
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12,53	12,53
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,29	0,29
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,16	7,16
	Penanaman Modal			
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,00	4,00
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100,00	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,00	90,00
	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,42	0,42
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	56,85	56,85
	Statistik			
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	32,00	32,00
	Persandian			
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	636,00	636,00
	Kebudayaan			
1	Angka Melek Budaya	%	52,32	52,32
	Perpustakaan			
1	Indeks Pembangunan Literasi	Angka	16,00	14,08

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
	Masyarakat			
	Kearsipan			
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	94,00	94,00
	Urusan Pilihan			
	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan	Ton	927.350	927.350
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105,00	105,00
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	110,00	110,00
	Pariwisata			
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,01	8,01
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.686.000.000.000	1.686.000.000.000
	Pertanian			
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,00	3,00
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100,50	100,50
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,58	0,58
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,19	105,19
5	NTP Hortikultura	Angka	108,11	108,11
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100,59	100,59
	Kehutanan			
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	42,45	42,45
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457
	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	18,41	18,41
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	768,10	768,10
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,60	3,60
4	Persentase penerapan *Good Mining Practice*	%	53,00	53,00
	Perdagangan			
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,51	4,51
	Perindustrian			
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,25	3,25
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
	Sekretariat Daerah			
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36,10	36,10
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80,00	80,00
pe	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90,00	90,00
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90,00	90,00
	Sekretariat DPRD			
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	90,00	90,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2024	
			RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	75,00	75,00
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	75,00	75,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Perencanaan			
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100,00	100,00
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100,00	100,00
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100,00	100,00
	Keuangan			
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	13,09	13,09
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-7,67	-7,67
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97,75	97,75
4	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	84,02	84,02
	Kepegawaian			
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,86	0,86
	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,07	3,07
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	8,67	8,67
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100,00	100,00
	Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	72,50	72,50
	Pengelolaan Penghubung			
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85,00	85,00
	Unsur Pengawasan Pemerintahan			
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3,00	3,00
2	Level kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3,00	3,00
	Unsur Pemerintahan Umum			
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,745	2,745
C	**Aspek Daya Saing**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	67,55
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4,00	4,00
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,50	81,50

6.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	65	65	%	
	Rasio ruang kelas: rombongan belajar SMA	36	1	Angka	
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	67,78	67,78	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	50	50	%	
	Persentase angka putus sekolah SMA	2,3	2,3	%	
	Persentase angka putus sekolah SMK	0,026	0,026	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	60	60	%	
	Rasio ruang kelas: rombongan belajar SMK	0,55	0,55	Angka	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	57,35	57,35	%	
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	50,35	50,35	%	
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	10,53	10,53	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Rasio ruang kelas: rombongan belajar SLB	10	1	Angka	
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	10	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	68,18	%	
	Persentase angka putus sekolah SLB	3,53	3,53	%	
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	80,3	80,3	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	10	10	%	
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	10	10	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	1,67	1,67	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	0,9	83,74	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,54	90,54	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,59	76,59	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	1	1	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	40,11	40,11	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	2,87	2,87	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	69,8	69,8	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	75,57	75,57	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	25,69	73,28	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,25	1,25	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	69,8	76,60	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,92	1,92	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	78,7	78,7	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	93,71	93,71	%	
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	79,86	79,86	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	90	90	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	90	90	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,74	2,74	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	85,55	85,55	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDINVII	72,83	72,83	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDINVIII	77,11	77,11	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	2,2	2,2	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,12	76,12	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	3,22	3,22	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	79	79	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDINIX	54,59	54,59	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	77,81	77,81	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	28,57	28,57	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	84,74	84,74	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDINXI	87,73	87,73	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	3,63	3,63	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	44,94	44,94	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	1,96	1,96	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	80	80	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81	83	%	
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,25	88,25	%	
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,52	2,52	%	
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	79	79	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,06	89,06	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,22	81,22	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,27	83,27	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	81,77	81,77	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,34	88,34	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,49	86,49	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	88,83	88,83	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,03	89,03	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	85,85	85,85	Angka	
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	82,21	82,21	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,27	83,27	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,3	85,3	Angka	
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,06	86,06	Angka	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	76,2	76,2	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	15	15	%	
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	93,93	87,50	%	
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3	3	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	10	10	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	20	7	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	25	25	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	25	1,96	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76	4,76	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	100	%	
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	34,28	34,28	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	51,42	51,42	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	60	60	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63,9	63,9	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	63,9	63,9	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	100	100	%	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	66,6	66,6	%	
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	80	80	%	
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	80	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarangyang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	42,85	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	57,14	57,14	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	100	100	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	100	100	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	71,42	71,42	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelangyang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85	42,85	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	57,14	57,14	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	100	100	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	28,57	28,57	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	100	100	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	28,57	28,57	%	
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	28,57	28,57	%	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	80	80	%	
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	83	83	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	100	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	100	100	%	
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	100	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	95	95	%	
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	100	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	100	%	
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	100	%	
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	100	%	
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata	40	40	%	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	80	80	%	
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	98	98	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	30	30	%	
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih	20	20	%	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					Dinas Kesehatan
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	75	75	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	82,85	82,85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	42,85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawayang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	28,57	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85	42,85	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	28,57	%	
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	28,57	28,57	%	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	100	100	%	
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	100	%	
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	95	95	%	
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata	50	50	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	61,31	61,31	%	
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	64,31	64,31	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi	69,11	69,11	Angka	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	52,37	52,37	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	62,68	62,68	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	34,78	34,78	%	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	53,26	53,26	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	71,8	71,8	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	54,6	54,6	%	
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	50,04	50,04	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	100	%	
	Indeks kinerja sistemirigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	62,85	62,85	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	50	50	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,34	67,34	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	77,78	77,78	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	100	%	
	Indeks kinerja sistemirigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	77,36	77,36	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	92,21	92,21	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	100	%	
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	72,65	72,65	Angka	
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	76,5	76,5	%	
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di	100	100	%	
	wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air minum layak	91,92	91,92	%	
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	54,32	54,32	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air limbah domestik layak	93,58	93,58	%	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83	5,83	%	
	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	11,94	11,94	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase panjang jalan yang dileger	75,79	75,79	%	
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	100	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	47,5	47,5	%	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	41,68	41,68	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	95,52	93,57	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	86,14	77,37	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	85,23	91,44	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	88,49	86,19	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	89,43	91,86	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	83,65	87,57	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	99,95	99,95	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	85,51	85,51	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	94,17	94,17	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	93,65	93,65	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	91,61	91,61	%	
	Persentase panjangjembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	94,9	94,9	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	88,12	88,12	%	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	93,82	93,82	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	86,78	86,78	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase panjangjembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	91,18	91,18	%	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	93,17	93,17	%	
	Persentase panjangjembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	94,78	94,78	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	12,85	12,85	%	
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	31,88	31,88	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	45,38	45,38	%	
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	43,49	43,49	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	68	68	%	
	Persentase tertib ruang	56	56	%	
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	60,71	60,71	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang diwilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang diwilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang diwilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang diwilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang diwilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	0,12	0,12	%	
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	2,73	2,73	%	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	3,18	3,18	%	
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	40	40	%	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM					Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	29,57	29,57	%	
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	67,15	67,15	%	
	Persentase penegakan produk hukum daerah	80	80	%	
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	40,03	40,03	%	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	100	100	%	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	0,12	0,12	%	
	Persentase penanganan darurat bencana	100	100	%	
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	2	2	%	
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	2,86	2,86	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					Dinas Sosial
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	7,7	7,7	%	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					Dinas Sosial
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	100	%	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					Dinas Sosial
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	1,92	1,92	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	0,07	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	0,07	0,07	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	0,08	0,08	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	0,1	0,1	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	0,06	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	0,06	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	0,09	0,09	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	0,05	0,05	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	0,07	0,07	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	0,09	0,09	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	0,11	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	0,08	0,08	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	0,06	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	0,12	0,12	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	0,04	0,04	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	0,12	0,12	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	0,03	0,03	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	0,11	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	0,06	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	0,11	0,11	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	0,06	0,06	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	0,11	0,11	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	0,03	0,03	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	0,03	0,03	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	0,04	0,04	%	
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	0,06	0,06	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	0,05	0,05	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					Dinas Sosial
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	100	100	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					Dinas Sosial
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	80	1,98	%	
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	0,02	0,22	%	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					Dinas Sosial
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	100	100	%	
	sesuai SPM Bidang Sosial				
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					Dinas Sosial
	Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	62,85	62,85	%	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	38,14	38,14	%	
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,4	4,4	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,3	2,3	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	2,88	2,88	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,45	9,45	%	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,9	46,9	%	
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan	13,13	13,13	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	produktivitas dan/atau kewirausahaan				
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	45,05	45,05	%	
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,1	68,1	%	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98	98	%	
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,75	49,75	%	
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	44,27	44,27	%	
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,15	96,15	%	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,58	89,58	%	
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,4	26,4	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	60	60	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	11	11	%	
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	14,29	14,29	%	
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	14,29	14,29	%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			60		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	25	25	%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,85	82,85	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,5	11,5	per 100.000 penduduk	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					Dinas Ketahanan Pangan
	Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	1,25	Angka	
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,064	0,064	Angka	
	Rasio cadangan pangan masyarakat	0,62	0,62	Angka	
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	60	60	%	
	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	0,62	0,62	Angka	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,8	87,8	kg/kapita/tahun	
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,8	87,8	kg/kapita/tahun	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01	0,01	%	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80	80	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan	80	80	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	100	100	%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	100	%	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	100	**100**	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	2,85	2,85	%	
	Persentase pengujian kualitas air	100	100	%	
	Persentase pemantauan kualitas udara	100	100	%	
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	100	100	%	
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	4,76	%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	2,02	2,02	%	
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	2,6	2,6	%	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase limbah B3 yang terkelola	80	80	%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	100	100	%	
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	50	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pelaku lingkungan hidup yangmeningkat kepeduliannya	10,5	10,5	%	
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	31,43	31,43	%	
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	25	25	%	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pengaduan yang ditangani	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase sampah yang tertangani	42	42	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	97	98	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen	97	80	%	
	akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	16,67	16,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	6,85	27,4	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	100	100	%	
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	100	100	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
					Pencatatan Sipil
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	8,96	12,27	%	
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	100	100	%	
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	61,11	61,11	%	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	65,58	65,58	%	
	Unmetneed	10	10	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32	32	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					Dinas Perhubungan
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,38	0,38	Angka	
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	0,981	0,981	Angka	
	Rasio trayek angkutan jalan	0,51	0,51	Angka	
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	65,38	65,38	%	
	Rasio pemanfatan terminal	0,218	0,218	Angka	
	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,5	0,5	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,24	0,24	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,97	0,97	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindaklanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,81	0,81	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,01	0,01	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,97	0,97	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,81	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,2	0,2	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,98	0,98	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,81	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,23	0,23	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,97	0,97	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,81	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,17	0,17	Angka	
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,98	0,98	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,81	0,81	Angka	
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,21	0,21	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,97	0,97	Angka	
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,81	0,81	Angka	
	Rasio konektivitas perkotaan	0,481	0,481	Angka	
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	51,72	51,72	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					Dinas Perhubungan
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	0,31	0,31	Angka	
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,2	0,2	Angka	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					Dinas Perhubungan
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,04	0,04	Angka	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	78	78	Angka	
	Nilai keterbukaan informasi publik	31	31	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	72	72	%	
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	15	15	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi berkualitas	25,02	25,02	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	10	10	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi provinsi produktif	48,09	48,09	%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase usaha mikro mandiri	81,2	81,2	%	
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	23	23	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase UMKM siap bermitra	21,06	21,06	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	50	50	%	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	46	46	%	
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	50	50	%	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	90	90	%	
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	%	
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	100	100	%	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	20	20	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah wirausaha muda mandiri	8	8	Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	50	50	Orang	
	Persentase peningkatan perolehan medali	28,18	28,18	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah masyarakat yang bugar	750	750	Orang	
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	50	50	Orang	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	24	24	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	25	25	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	19,17	19,17	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	23,76	23,76	%	
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	47,61	47,61	%	
	Persentase cakupan pelestarian seni	100	100	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Tingkat partisipasi seni tradisi	8,89	8,89	%	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase akses literasi sejarah	52,9	52,9	%	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional	12,71	12,71	%	
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	25,13	25,13	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	89,85	89,85	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	80,56	80,56	%	
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	23,08	23,08	%	
	Nilai survey kepuasan masyarakat	80	80	Nilai	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	84,67	84,67	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	25,97	25,97	%	
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100	100	%	
	Persentase peningkatan pengunjung arsip	19	19	%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	12,19	12,19	%	
	Persentase arsip yang diselamatkan	19,47	19,47	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi garam	1	1	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5	5	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi diwilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	3,7	3,7	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi diwilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	1,39	1,39	%	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi diwilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	3,7	3,7	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase produksi perikanan tangkap	5	5	%	
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,27	108,27	Angka	
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	44,44	44,44	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	72	72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	72,72	72,72	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	81,82	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	70	70	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	62,62	62,62	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81	81	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	100	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	63,63	63,63	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63	63	%	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72	72	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100	100	%	
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5	5	%	
	Produksi perikanan budidaya	600.000	600.000	Ton	
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,27	111,27	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70	70	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	61	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2	2	%	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61	61	%	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	2	2	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	61	61	%	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan ikan	160.000	160.000	Ton	
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	4	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	13,33	13,33	%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan	49.985.228	49.985.228	Orang	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatifyang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	6	6	Kabupaten /Kota	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	48,98	48,98	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas
					Pertanian dan Perkebunan
	Jumlah populasi ternak potong	3726434	3726434	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak perah	112876	112876	(ST)/(AU)	
	Jumlah populasi ternak petelur	246615	246615	(ST)/(AU)	
	Persentase fasilitasi obat hewan	1	1	%	
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	4	4	Dokumen	
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	1	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	1	1	%	
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	1	1	%	
	Persentase luas lahan yang dioptimasi	2,5	2,5	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	90	90	%	
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	2,5	2,5	%	
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	100	100	%	
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	3	3	%	
	Produksi kedelai	52657	52657	Ton	
	Produksi jagung	3576577	3576577	Ton	
	Produksi padi	9594280	9594280	Ton	
	Produksi bawang merah	515000	515000	Ton	
	Produksi cabai	341000	341000	Ton	
	Produksi durian	149668	149668	Ton	
	Produksi jahe	34862	34862	Ton	
	Produksi melati	24627	24627	Ton	
	Produksi kopi	25927	25927	Ton	
	Produksi tebu	2554553	2554553	Ton	
	Produksi kelapa	166687	166687	Ton	
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yangmeningkat kapasitas usahanya	2	2	%	
	Persentase layanan sertifikasi benih	100	100	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	85	85	%	
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	85	85	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	85	85	%	
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	3	3	%	
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1	1	%	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	10	10	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	10	10	%	
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	10	10	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	10	10	%	
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7420274	7420274	m	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	4	4	Dokumen	
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	3	3	%	
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	2,8	2,8	%	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	4	4	Dokumen	
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	4	4	Dokumen	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	5	5	%	
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15	15	%	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	1,02	1,02	%	
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	3,11	3,11	%	
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	2,27	2,27	%	
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	2,5	2,5	%	
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	100	100	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	35,4	35,4	%	
	Persentase lahan kritis tertangani	0,47	0,47	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	100	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	0,02	0,02	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	1,38	1,38	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1	100	100	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	0,04	0,04	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	1,72	1,72	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	0,03	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	1,64	1,64	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	0,03	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	1,46	1,46	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	0,04	0,04	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	1,29	1,29	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	0,09	0,09	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6	2,15	2,15	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	0,04	0,04	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	1,03	1,03	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	0,04	0,04	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	1,46	1,46	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	0,03	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	1,03	1,03	%	
	Persentase peningkatan produksi bibit	-40	-40	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	0,03	0,03	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	100	100	%	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	1,29	1,29	%	
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	0,09	0,09	%	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	1,55	1,55	%	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	10	10	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	40	40	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2	5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	5	5	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6	5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	5	5	%	
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	5	5	%	
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	70	70	Angka	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	100	100	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	5	5	%	
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	5	5	%	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,5	2,5	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	0,3	0,3	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	0,3	0,3	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	0,2	0,2	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	0,2	0,2	%	
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	0,3	0,3	%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	27,5	27,5	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	1,6	1,6	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,4	3,4	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,7	1,7	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	2,2	2,2	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	4,1	4,1	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	1,8	1,8	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,4	2,4	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	1,6	1,6	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,7	2,7	%	
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100	100	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	2,9	2,9	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,8	2,8	%	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,6	1,6	%	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	60	60	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	60	60	%	
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	100	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	60	60	%	
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	60	60	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	590300,484	590300,484	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	39608,43	39608,43	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	23599,9	23599,9	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	125685,73	125685,73	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	122,33	122,33	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	91,75	91,75	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	39480,034	39480,034	SBM	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	78666,36	78666,36	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	39363,76	39363,76	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	78562,37	78562,37	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	39394,34	39394,34	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	86438,18	86438,18	SBM	
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	39287,3	39287,3	SBM	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	63,81	63,81	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	49,7	49,7	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	51,09	51,09	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	49,97	49,97	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	49,36	49,36	%	
	Persentase akses listrikuntuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	49,96	49,96	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	49,95	49,95	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	49,66	49,66	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	49,57	49,57	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	49,59	49,59	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	51,86	51,86	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	49,64	49,64	%	
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	49,08	49,08	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	10	10	%	
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	8	8	%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	10	10	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/ kota	10	10	%	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	90	90	%	
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	30	30	%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	2	2	%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	1	1	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	5	5	%	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	10	10	%	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	10	10	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	2,25	2,25	%	
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	2,25	2,25	%	
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	3,45	3,45	%	
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	85	85	%	
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	4,38	4,38	%	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	7	7	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	10	10	%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	1,62	1,62	%	
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	2	2	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,61	3,61	%	
SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	66	66	%	
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	85,71	85,71	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi-kan hasil analisis jabatan secara efektif	88,1	88,1	%	
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	60	60	%	
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	14,29	14,29	%	
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	64,28	64,28	%	
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	50	50	%	
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasi kan standar pelayanan	88,73	88,73	%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					Sekretariat Daerah
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95	95	%	
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95	95	%	
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95	95	%	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					Sekretariat Daerah

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	81	81	%	
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	82	82	%	
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	54	54	%	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	96	96	%	
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	96	96	%	
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	96	%	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	96	%	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87	87	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85	85	%	
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85	85	%	
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	83	83	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	78	78	%	
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	85	85	%	
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	81	81	%	
	Persentase nilai Kemandirian BLUD	55	55	%	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/ jasa	90	90	%	
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	80	80	%	
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	81	81	%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					Sekretariat Daerah
	Persentase capaian pelaksanaan APBD	98,7	98,7	%	
	Persentase capaian pelaksanaan APBN	95,5	95,5	%	
	Persentase realisasi bantuan keuangan	85	85	%	
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	85	85	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	100	100	%	
SEKRETARIAT DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					Sekretariat DPRD
	Persentase layanan bagian humas	95	95	%	
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95	95	%	
PERENCANAAN					
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100	100	%	
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	100	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	100	%	
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	100	%	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	100	100	%	
	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	100	100	%	
KEUANGAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/ kota tepat waktu	100	100	%	
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	100	%	
	Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	100	%	
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	100	%	
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	84,02	84,02	%	
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	100	100	%	
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100	100	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	100	100	%	
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	72	72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	-7,67	-7,67	%	
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	100	100	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	24,91	24,91	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	18,18	18,18	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	-21,85	-21,85	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	20,87	20,87	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	6,61	6,61	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	18,66	18,66	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	12,53	12,53	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	-17,94	-17,94	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	20,09	20,09	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	21,98	21,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	15,09	15,09	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	12,2	12,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	-17,96	-17,96	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	20,2	20,2	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	9,5	9,5	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	23,93	23,93	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	13,7	13,7	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	-20,16	-20,16	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	19,97	19,97	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	2,24	2,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	23,51	23,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	6,69	6,69	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	20,52	20,52	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	-25,36	-25,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	32,43	32,43	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	18,31	18,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	12,95	12,95	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	-25,77	-25,77	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	20,75	20,75	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	23,16	23,16	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	20,8	20,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	10,78	10,78	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	-24,27	-24,27	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	19,8	19,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	22,34	22,34	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	20,87	20,87	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	13,12	13,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	-20,94	-20,94	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	19,94	19,94	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	3,8	3,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	19,79	19,79	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	6,58	6,58	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	-22,24	-22,24	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	20,21	20,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	24,85	24,85	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	18,99	18,99	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	13,42	13,42	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	-24,67	-24,67	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	20,93	20,93	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	19,63	19,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	26,51	26,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	8,21	8,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	-25,1	-25,1	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	19,89	19,89	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	23	23	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	25,8	25,8	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	1,76	1,76	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	-25,99	-25,99	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	20,94	20,94	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	11,97	11,97	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	20,9	20,9	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	12,75	12,75	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	-20,99	-20,99	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	20,4	20,4	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	30,62	30,62	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	21,98	21,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	9,35	9,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	-16,8	-16,8	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	21,21	21,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	23,05	23,05	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	19,89	19,89	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	13,03	13,03	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	-25,7	-25,7	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	20,48	20,48	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	16,61	16,61	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	15,79	15,79	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	13,58	13,58	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	-18,76	-18,76	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	19,45	19,45	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	13,4	13,4	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	19,93	19,93	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	12,4	12,4	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	-18,49	-18,49	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	20,31	20,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	11,59	11,59	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	18,71	18,71	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	12,45	12,45	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	-15,14	-15,14	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	19,33	19,33	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	12,4	12,4	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	18,96	18,96	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	7,24	7,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	-21,23	-21,23	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	20,31	20,31	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	22,63	22,63	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	14,71	14,71	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	19	19	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	-22,19	-22,19	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	10,98	10,98	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	-25,14	-25,14	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	28,17	28,17	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	-16,7	-16,7	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	20,29	20,29	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	41,78	41,78	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	19,62	19,62	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	13,51	13,51	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	-20,86	-20,86	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	20,16	20,16	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	38,33	38,33	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	15,23	15,23	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	13,44	13,44	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	-23,43	-23,43	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	20,24	20,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	30,76	30,76	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	11,83	11,83	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	11,27	11,27	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	-17,02	-17,02	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	20,84	20,84	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	-25,92	-25,92	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	12,2	12,2	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	19,25	19,25	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	20,49	20,49	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	66,86	66,86	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	14,12	14,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	-25,7	-25,7	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	20,57	20,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	13,27	13,27	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	44	44	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	20,1	20,1	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	12,88	12,88	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	-22,26	-22,26	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	20,83	20,83	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	25,25	25,25	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	19,52	19,52	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	13,75	13,75	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	-25,89	-25,89	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	20,26	20,26	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	23,27	23,27	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	16,42	16,42	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	11,83	11,83	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	-13,57	-13,57	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	20,24	20,24	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	14,57	14,57	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	28,72	28,72	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	13,77	13,77	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	-15,51	-15,51	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	20,9	20,9	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	45,72	45,72	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	21,49	21,49	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	13,44	13,44	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	-25,11	-25,11	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	20,31	20,31	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	-53,02	-53,02	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	16,85	16,85	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	9,11	9,11	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	-13,62	-13,62	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	21,76	21,76	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	34,47	34,47	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	19,55	19,55	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	13,59	13,59	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	-25,13	-25,13	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	22,12	22,12	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	25,05	25,05	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	20,82	20,82	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	13,41	13,41	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	-18,63	-18,63	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	20,99	20,99	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	4,96	4,96	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	23,68	23,68	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	12,21	12,21	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	-12,81	-12,81	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	22,01	22,01	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	32,03	32,03	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	23,36	23,36	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	13,59	13,59	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	-20,87	-20,87	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	21,35	21,35	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	24,01	24,01	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	22,39	22,39	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	13,38	13,38	%	
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	-24,77	-24,77	%	
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	20,95	20,95	%	
KEPEGAWAIAN					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100	100	%	
	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100	100	%	
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100	100	%	
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100	100	%	
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	100	100	%	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	100	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100	100	%	
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	85	85	%	
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,5	3,5	Angka	
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100	100	%	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	100	100	%	
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	100	100	%	
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	100	100	%	
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	100	100	%	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG					
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					Badan Penghubung
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	100	100	%	
INSPEKTORAT DAERAH					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					INSPEKTORAT

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	83	83	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	85	85	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	85	85	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	85	85	%	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	85	85	%	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					INSPEKTORAT
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	10,2	10,2	%	
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3	10,2	10,2	%	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ideologi Pancasila	3	3	Nilai	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kewaspadaan Nasional	73	73	Angka	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks kinerja ormas	75,34	75,34	Nilai	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks toleransi	74,1	74,1	%	
	Indeks penguatan dampak ekonomi	3	3	%	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	75	75	Nilai	
NON URUSAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	100	%	Seluruh Perangkat Daerah
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	100	%	

Urusan/Program	Indikator Kinerja	Target		Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6
	Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	82	82	%	RSUD Dr. Moewardi
	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	82	82	%	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	55,25	55,25	%	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
	Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	35	35	%	RSUD dr. REHATTA
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	43	43	%	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	33	33	%	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	46,5	46,5	%	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

BAB VII
PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika atas pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Perubahan terjadi pada kondisi baik dalam tataran global maupun nasional, turut memberi dampak terhadap kebijakan nasional maupun regional. Sehingga penyesuaian pada sisi kebijakan baik secara nasional maupun regional sangat diperlukan agar dapat mewujudkan kestabilan pembangunan. Hal ini berdampak pada perlunya dilakukan penyesuaian pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Sehingga perlu adanya perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain pada target kinerja. Penyesuaian pada beberapa target kinerja diharapkan dapat memperkuat beberapa hal yang menjadi daya ungkit terhadap pembangunan Jawa Tengah di tahun 2024. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga sebagai pemantapan pemulihan ekonomi atas dampak pandemi serta penanganan kemiskinan menyongsong tahun 2025 sebagai *baseline* RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Perubahan RKPD akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegatan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2024. Selanjutnya KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Dokumen perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya.

Pelaksanaan perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Kerja sama dan kolaborasi oleh semua pihak dalam pembangunan akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan pembangunan Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**5.238.338.908.000**		**5.189.710.150.000**		**4.989.893.270.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74.57		74.57		74.57		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**5.178.892.703.000**		**5.127.022.140.000**		**4.921.923.373.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.2	5.178.892.703.000	3.2	3	3.2	4.921.923.373.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.178.892.703.000		5.127.022.140.000		4.921.923.373.000		
						Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.153.572.939.000	100	5.101.702.376.000	100	4.894.827.137.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.032.592.069.000		5.032.592.069.000		4.831.197.830.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	5.032.592.069.000	12	5.032.592.069.000	12	4.831.197.830.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.029.965.692.000		5.029.965.692.000		4.828.471.453.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	32844	5.029.965.692.000	32844	5.029.965.692.000	32844	4.828.471.453.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.626.377.000		2.626.377.000		2.726.377.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.626.377.000	12	2.626.377.000	12	2.726.377.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					325.000.000		325.000.000		550.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	325.000.000	4	325.000.000	4	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		200.000.000		400.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		75.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	3	75.000.000	3	75.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					425.000.000		21.215.020.000		21.290.020.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	425.000.000	100	21.215.020.000	100	21.290.020.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						20.790.020.000		20.815.020.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			35844	20.790.020.000	35844	20.815.020.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				250.000.000		250.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	3	250.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.666.635.000		2.666.635.000		2.970.635.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.666.635.000	100	2.666.635.000	100	2.970.635.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		135.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.000.000		200.000.000		239.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	200.000.000	2	200.000.000	2	239.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				646.635.000		646.635.000		646.635.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	646.635.000	12	646.635.000	12	646.635.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.100.000.000		1.100.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	12	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				70.000.000		70.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	2	70.000.000	2	70.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					810.000.000		810.000.000		1.227.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	50	810.000.000	50	810.000.000	50	1.227.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	4		4		4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				310.000.000		310.000.000		727.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	50	310.000.000	50	310.000.000	50	727.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.899.235.000		42.238.652.000		35.561.652.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	114.899.235.000	4	42.238.652.000	4	35.561.652.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		18.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.488.592.000		2.488.592.000		2.243.592.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	2.488.592.000	12	2.488.592.000	12	2.243.592.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				112.190.643.000		39.530.060.000		33.100.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	112.190.643.000	12	39.530.060.000	12	33.100.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.855.000.000		1.855.000.000		2.030.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	100	1.855.000.000	100	1.855.000.000	100	2.030.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17	240.000.000	17	240.000.000	17	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				75.000.000		75.000.000		50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	75.000.000	3	75.000.000	3	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.000.000.000	15	1.000.000.000	15	1.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	210	300.000.000	210	300.000.000	210	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.698.000.000	100	1.698.000.000	100	1.698.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					431.650.000		431.650.000		534.750.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	431.650.000	100	431.650.000	100	534.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.650.000		29.650.000		29.650.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	29.650.000	2	29.650.000	2	29.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		7.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	7.000.000	1	7.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.000.000		65.000.000		85.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	65.000.000	4	65.000.000	4	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		265.100.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	265.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					503.000.000		503.000.000		463.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	503.000.000	12	503.000.000	12	463.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				70.000.000		70.000.000		40.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	70.000.000	2	70.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				133.000.000		133.000.000		123.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	133.000.000	8	133.000.000	8	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.250.000		436.250.000		435.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	21	436.250.000	21	436.250.000	21	435.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.050.000		179.050.000		179.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	179.050.000	12	179.050.000	12	179.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		9.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	9.000.000	1	9.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				241.200.000		241.200.000		241.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	241.200.000	4	241.200.000	4	241.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					327.100.000		327.100.000		265.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	145	327.100.000	145	327.100.000	145	265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.100.000		37.100.000		35.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	37.100.000	2	37.100.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000				
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60	20.000.000	60	20.000.000	60		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	21	40.000.000	21	40.000.000	21	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49	40.000.000	49	40.000.000	49	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000				
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.285.850.000	100	1.285.850.000	100	1.543.892.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.600.000		6.600.000		5.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.600.000	1	6.600.000	1	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.600.000		6.600.000		5.400.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.600.000	1	6.600.000	1	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					607.500.000		607.500.000		815.724.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	607.500.000	100	607.500.000	100	815.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		10.500.000		35.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				287.000.000		287.000.000		313.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	287.000.000	1	287.000.000	1	313.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		45.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	30.000.000	2	30.000.000	2	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		75.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		292.724.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	292.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.000.000		57.000.000		233.402.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	57.000.000	10	57.000.000	10	233.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.000.000		57.000.000		233.402.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	57.000.000	4	57.000.000	13	233.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					452.300.000		452.300.000		372.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	452.300.000	1	452.300.000	1	372.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		3.300.000		3.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.300.000	4	3.300.000	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				188.000.000		188.000.000		145.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	188.000.000	12	188.000.000	12	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000				
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	6.000.000	2	6.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				255.000.000		255.000.000		224.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	255.000.000	4	255.000.000	4	224.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.450.000		162.450.000		117.066.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	162.450.000	1	162.450.000	1	117.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000		45.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	45.000.000	2	45.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.300.000		3.300.000		2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	3.300.000	20	3.300.000	20	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.250.000		12.250.000		12.250.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	Unit	24	12.250.000	24	12.250.000	24	12.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				61.900.000		61.900.000		46.257.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	61.900.000	2	61.900.000	2	46.257.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		26.559.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	10	40.000.000	10	40.000.000	10	26.559.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.302.399.000	100	1.302.399.000	100	1.300.399.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		14.650.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	14.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.000.000		14.650.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	14.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					416.399.000		416.399.000		430.249.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	416.399.000	100	416.399.000	100	430.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				158.399.000		158.399.000		163.399.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	158.399.000	10	158.399.000	10	163.399.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		120.000.000		123.850.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	120.000.000	12	120.000.000	12	123.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.000.000		55.000.000		53.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	55.000.000	13	55.000.000	13	53.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	7	30.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		23.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	25.000.000	4	25.000.000	4	23.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					366.000.000		366.000.000		355.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	366.000.000	48	366.000.000	48	355.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		150.000.000		143.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	143.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		6.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.000.000		450.000.000		446.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	97	450.000.000	97	450.000.000	97	446.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		18.000.000		15.131.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	18.000.000	1	18.000.000	1	15.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				12.000.000		12.000.000				
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	22	12.000.000	22	12.000.000	22		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		51.369.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	68	40.000.000	68	40.000.000	68	51.369.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.491.900.000	100	1.491.900.000	100	1.721.900.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					245.100.000		245.100.000		245.100.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	2	245.100.000	2	245.100.000	2	245.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.300.000		97.300.000		97.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	97.300.000	12	97.300.000	12	97.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12		12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	8	9.000.000	8	9.000.000	8	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12		12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Paket	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.800.000		78.800.000		78.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Paket	12	78.800.000	12	78.800.000	12	78.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	7.500.000	10	7.500.000	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					749.300.000		749.300.000		754.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	749.300.000	4	749.300.000	4	754.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	500.000	4	500.000	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273.600.000		273.600.000		278.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	273.600.000	4	273.600.000	4	278.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				475.200.000		475.200.000		475.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	475.200.000	4	475.200.000	4	475.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.000.000		465.000.000		690.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	280	465.000.000	280	465.000.000	280	690.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	60		60		60		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		80.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	210	50.000.000	210	50.000.000	210	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				195.000.000		195.000.000		195.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	195.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				155.000.000		155.000.000		350.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	155.000.000	3	155.000.000	3	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.567.200.000	100	2.567.200.000	100	2.567.200.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					231.550.000		231.550.000		280.550.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	231.550.000	100	231.550.000	100	280.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.015.000		31.015.000		31.015.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	31.015.000	2	31.015.000	2	31.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.752.000		52.752.000		81.752.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	52.752.000	3	52.752.000	3	81.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.207.000		33.207.000		33.207.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	33.207.000	1	33.207.000	1	33.207.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.695.000		19.695.000		29.695.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	19.695.000	1	19.695.000	1	29.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.506.000		17.506.000		17.506.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	17.506.000	2	17.506.000	2	17.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.875.000		7.875.000		7.875.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	7.875.000	1	7.875.000	1	7.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.500.000		68.500.000		78.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	68.500.000	1	68.500.000	1	78.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					146.800.000		146.800.000		131.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	146.800.000	10	146.800.000	10	131.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				6.000.000		6.000.000		36.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.800.000		40.800.000		75.800.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	40.800.000	5	40.800.000	5	75.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.767.050.000		1.767.050.000		1.647.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.767.050.000	4	1.767.050.000	4	1.647.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.750.000		3.750.000		3.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.750.000	4	3.750.000	4	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				660.000.000		660.000.000		540.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	660.000.000	4	660.000.000	4	540.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.200.000		15.200.000		15.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	15.200.000	4	15.200.000	4	15.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.088.100.000		1.088.100.000		1.088.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.088.100.000	4	1.088.100.000	4	1.088.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					386.800.000		386.800.000		472.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	28	386.800.000	28	386.800.000	28	472.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		12.000.000		20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	12.000.000	3	12.000.000	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		39.800.000		59.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	39.800.000	8	39.800.000	8	59.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		12.000.000		20.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	2	12.000.000	2	12.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				203.000.000		203.000.000		203.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	203.000.000	6	203.000.000	6	203.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.141.000.000	100	1.141.000.000	100	1.139.660.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					492.000.000		492.000.000		524.230.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	492.000.000	100	492.000.000	100	524.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.000.000		33.000.000		30.720.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	33.000.000	2	33.000.000	2	30.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		4.000.000		3.510.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.000.000	12	4.000.000	12	3.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		85.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		250.000.000		300.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		50.000.000		92.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	2	92.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		92.300.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	50.000.000	4	50.000.000	4	92.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					379.000.000		379.000.000		290.780.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	379.000.000	12	379.000.000	12	290.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		49.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	100.000.000	3	100.000.000	3	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		6.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		250.000.000		230.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	250.000.000	2	250.000.000	2	230.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.000.000		190.000.000		202.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	190.000.000	27	190.000.000	27	202.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		62.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	40.000.000	3	40.000.000	3	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		350.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	10.000.000	5	10.000.000	5	350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		45.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	40.000.000	15	40.000.000	15	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.321.150.000	100	1.321.150.000	100	1.363.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					448.650.000		448.650.000		486.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	448.650.000	100	448.650.000	100	486.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.650.000		8.650.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.650.000	1	8.650.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		75.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		175.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	175.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000		80.000.000		115.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	80.000.000	6	80.000.000	6	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		35.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		60.000.000		80.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	60.000.000	5	60.000.000	5	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					358.000.000		358.000.000		329.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	358.000.000	4	358.000.000	4	329.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		150.000.000		123.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				198.000.000		198.000.000		198.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	198.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					434.500.000		434.500.000		433.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	434.500.000	1	434.500.000	1	433.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				9.500.000		9.500.000		4.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	9.500.000	12	9.500.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		34.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	30.000.000	15	30.000.000	15	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.196.500.000	100	1.196.500.000	100	1.152.060.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					388.000.000		388.000.000		435.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	388.000.000	100	388.000.000	100	435.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		65.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		31.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		18.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		120.000.000		158.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	158.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					127.500.000		127.500.000		147.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	127.500.000	20	127.500.000	20	147.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.500.000		127.500.000		147.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	127.500.000	10	127.500.000	10	147.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					426.000.000		426.000.000		324.560.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	426.000.000	1	426.000.000	1	324.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		3.560.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		200.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				216.000.000		216.000.000		216.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	216.000.000	1	216.000.000	1	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					255.000.000		255.000.000		245.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	255.000.000	15	255.000.000	15	245.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000				
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	20.000.000	12	20.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.483.150.000	100	1.483.150.000	100	1.508.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		49.780.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	49.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		49.780.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	49.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					366.000.000		366.000.000		428.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	366.000.000	100	366.000.000	100	428.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		70.000.000		71.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	70.000.000	12	70.000.000	12	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		16.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.000.000		120.000.000		146.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	22	120.000.000	22	120.000.000	22	146.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		126.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	15	100.000.000	15	100.000.000	15	126.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					483.000.000		483.000.000		436.720.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	483.000.000	48	483.000.000	48	436.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.000.000		220.000.000		180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	220.000.000	12	220.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		250.000.000		250.220.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					464.150.000		464.150.000		447.150.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	68	464.150.000	68	464.150.000	68	447.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	45	25.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				9.150.000		9.150.000		9.150.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	9.150.000	3	9.150.000	3	9.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		3.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	3	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.888.150.000	100	1.888.150.000	100	2.147.940.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		52.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	100	30.000.000	100	30.000.000	100	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		52.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					510.150.000		510.150.000		573.440.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	1	510.150.000	1	510.150.000	1	573.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		35.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	35.000.000	12	35.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		70.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	35.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		2.640.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	6.000.000	12	6.000.000	12	2.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				93.800.000		93.800.000		93.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	93.800.000	12	93.800.000	12	93.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190.350.000		190.350.000		302.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	190.350.000	12	190.350.000	12	302.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					435.000.000		435.000.000		663.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	435.000.000	10	435.000.000	10	663.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		200.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000		226.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	226.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				235.000.000		235.000.000		237.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	235.000.000	1	235.000.000	1	237.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					448.000.000		448.000.000		415.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	448.000.000	1	448.000.000	1	415.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		240.000.000		152.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				192.000.000		192.000.000		252.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	192.000.000	12	192.000.000	12	252.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.000.000		465.000.000		444.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	465.000.000	1	465.000.000	1	444.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000				
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000	20	20.000.000	20		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		45.000.000		20.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	45.000.000	20	45.000.000	20	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		202.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	5	202.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		102.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	5	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Unit	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.336.150.000	100	1.336.150.000	100	1.336.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					359.150.000		359.150.000		422.650.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	359.150.000	100	359.150.000	100	422.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		135.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	135.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		80.000.000		89.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	80.000.000	2	80.000.000	2	89.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.150.000		99.150.000		99.150.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	99.150.000	4	99.150.000	4	99.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.000.000		152.000.000		152.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	152.000.000	10	152.000.000	10	152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				132.000.000		132.000.000		132.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	132.000.000	4	132.000.000	4	132.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					445.000.000		445.000.000		394.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	445.000.000	4	445.000.000	4	394.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		180.000.000		130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	180.000.000	4	180.000.000	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000		250.000.000		254.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	1	254.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.000.000		350.000.000		337.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	20	350.000.000	20	350.000.000	20	337.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		52.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.795.365.000	100	2.795.365.000	100	3.411.485.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		43.944.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	43.944.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		45.000.000		43.944.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	43.944.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					424.354.000		424.354.000		473.747.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	424.354.000	100	424.354.000	100	473.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.990.000		45.990.000		45.990.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	45.990.000	2	45.990.000	2	45.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.909.000		56.909.000		56.909.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	56.909.000	2	56.909.000	2	56.909.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.480.000		51.480.000		51.480.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	51.480.000	2	51.480.000	2	51.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.210.000		33.210.000		56.103.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.210.000	3	33.210.000	3	56.103.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.250.000		10.250.000		11.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	10.250.000	2	10.250.000	2	11.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				57.515.000		57.515.000		57.515.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	57.515.000	4	57.515.000	4	57.515.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				169.000.000		169.000.000		194.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	169.000.000	4	169.000.000	4	194.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					196.200.000		196.200.000		196.047.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	80	196.200.000	80	196.200.000	80	196.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	3		3		3		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		69.847.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	69.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				126.200.000		126.200.000		126.200.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	23	126.200.000	23	126.200.000	23	126.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.918.500.000		1.918.500.000		1.951.085.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.918.500.000	12	1.918.500.000	12	1.951.085.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				543.600.000		543.600.000		618.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	543.600.000	4	543.600.000	4	618.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.374.900.000		1.374.900.000		1.332.485.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.374.900.000	4	1.374.900.000	4	1.332.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					211.311.000		211.311.000		746.662.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	211.311.000	21	211.311.000	21	746.662.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		55.000.000		67.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	55.000.000	7	55.000.000	7	67.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5		5		5		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				66.711.000		66.711.000		346.587.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	66.711.000	4	66.711.000	4	346.587.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				89.600.000		89.600.000		333.075.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	250	89.600.000	250	89.600.000	250	333.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.511.650.000	100	1.511.650.000	100	1.531.650.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		47.582.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	47.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		47.582.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	47.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					362.150.000		362.150.000		388.880.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	362.150.000	100	362.150.000	100	388.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.000.000		72.000.000		62.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	72.000.000	12	72.000.000	12	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.150.000		149.150.000		191.880.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	149.150.000	12	149.150.000	12	191.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					230.000.000		230.000.000		228.560.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	230.000.000	8	230.000.000	8	228.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		198.560.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	30	200.000.000	30	200.000.000	30	198.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					499.500.000		499.500.000		536.628.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	499.500.000	4	499.500.000	4	536.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				278.500.000		278.500.000		311.188.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	278.500.000	12	278.500.000	12	311.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000				
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		210.000.000		220.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	210.000.000	12	210.000.000	12	220.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					370.000.000		370.000.000		330.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	509	370.000.000	509	370.000.000	509	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	369		369		369		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	493	50.000.000	493	50.000.000	493	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		120.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.496.150.000	100	1.496.150.000	100	1.496.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2		2		2		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					377.150.000		377.150.000		401.180.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	377.150.000	100	377.150.000	100	401.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.000.000		12.000.000		17.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.550.000		99.550.000		99.550.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	99.550.000	2	99.550.000	2	99.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				179.600.000		179.600.000		198.630.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	179.600.000	1	179.600.000	1	198.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					606.000.000		606.000.000		606.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	606.000.000	10	606.000.000	10	606.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	60.000.000	7	60.000.000	7	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				546.000.000		546.000.000		546.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	546.000.000	1	546.000.000	2	546.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					394.000.000		394.000.000		369.470.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		394.000.000		394.000.000		369.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		200.000.000		175.470.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	175.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				188.000.000		188.000.000		188.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	188.000.000	2	188.000.000	2	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.000.000		119.000.000		119.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	119.000.000	5	119.000.000	5	119.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		27.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	30.000.000	3	30.000.000	3	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55	40.000.000	55	40.000.000	55	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.000.000		29.000.000		32.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	29.000.000	2	29.000.000	2	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.229.000.000	100	1.229.000.000	100	1.264.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					430.000.000		430.000.000		480.000.000		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	430.000.000	100	430.000.000	100	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		115.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		18.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000				
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		62.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		230.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	95.000.000	10	95.000.000	10	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2		2		2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					319.000.000		319.000.000		314.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	319.000.000	4	319.000.000	4	314.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					355.000.000		355.000.000		345.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	355.000.000	10	355.000.000	10	345.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		15.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	25.000.000	6	25.000.000	6	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10		10		10		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	40.000.000	24	40.000.000	24	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	3	20.000.000	3	20.000.000	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000		110.000.000		150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	110.000.000	3	110.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000				
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	40.000.000	3	40.000.000	3		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.576.150.000	100	1.576.150.000	100	1.914.600.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		2.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		2.800.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					478.950.000		478.950.000		555.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	478.950.000	100	478.950.000	100	555.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		25.000.000		33.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	25.000.000	2	25.000.000	2	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		90.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.500.000		38.500.000		38.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		4.200.000		4.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	24	4.200.000	24	4.200.000	24	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.250.000		48.250.000		60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	48.250.000	12	48.250.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				235.000.000		235.000.000		300.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	235.000.000	12	235.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650.000.000		650.000.000		650.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.200.000		335.200.000		341.100.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	335.200.000	12	335.200.000	12	341.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.600.000		108.600.000		112.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	108.600.000	12	108.600.000	12	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.000.000		14.000.000		16.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	14.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				207.600.000		207.600.000		207.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	207.600.000	12	207.600.000	12	207.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.000.000		107.000.000		365.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	107.000.000	18	107.000.000	18	365.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.000.000		22.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	22.000.000	1	22.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	18.000.000	10	18.000.000	10	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		250.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		65.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**59.446.205.000**		**62.688.010.000**		**67.969.897.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.18	59.446.205.000	3.18	3	3.18	67.969.897.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						59.446.205.000		62.688.010.000		67.969.897.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	59.446.205.000	100	62.688.010.000	100	67.969.897.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					59.446.205.000		62.688.010.000		67.969.897.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Angka	100	59.446.205.000	100	62.688.010.000	100	67.969.897.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				59.234.455.000		62.476.260.000		67.758.147.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	59.234.455.000	5	62.476.260.000	5	67.758.147.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				211.750.000		211.750.000		211.750.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	6	211.750.000	6	211.750.000	6	211.750.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif									**3.710.760.299.000**		**3.551.013.246.000**		**3.590.193.528.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
						Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.94		12.94		12.94		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.08		8.08		8.08		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan								**1.126.294.609.000**		**643.480.374.000**		**660.728.635.000**		
						APK SMA, SMK dan SLB	%	82.92	1.126.294.609.000	82.92	83	82.92	660.728.635.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1.125.210.747.000		642.396.512.000		659.640.983.000		
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90.54	620.000.000	90.54	620.000.000	90.54	620.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	76.65	400.000.000	76.65	400.000.000	76.65	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.003			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I	%	90.05	20.000.000	90.05	20.000.000	90.05	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76.59	1.300.000.000	76.59	1.300.000.000	76.59	1.899.550.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					200.000.000		200.000.000		800.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	30.228	200.000.000	30.228	200.000.000	30.228	800.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		600.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	200.000.000	4	200.000.000	4	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Ruang Laboratorium Kompuer yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								200.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					950.000.000		950.000.000		949.550.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	40.571	950.000.000	40.571	950.000.000	40.571	949.550.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		150.000.000		149.550.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	149.550.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II	%	72	150.000.000	72	150.000.000	72	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	75.57	1.050.000.000	75.57	1.050.000.000	75.57	1.050.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		500.000.000		650.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	72.39	500.000.000	72.39	500.000.000	72.39	650.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		300.000.000		450.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	3	300.000.000	5	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	90.14	400.000.000	90.14	400.000.000	90.14	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000				
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III	%	86.68	150.000.000	86.68	150.000.000	86.68		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000				
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	1	150.000.000	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	25.69	1.238.383.000	25.69	1.238.383.000	25.69	1.389.883.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					688.383.000		688.383.000		739.883.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	73.4	688.383.000	73.4	688.383.000	73.4	739.883.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								32.500.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		1	32.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				688.383.000		688.383.000		707.383.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	688.383.000	3	688.383.000	4	707.383.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					400.000.000		400.000.000		500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%		400.000.000		400.000.000		500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		100.000.000		200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	4	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV	%	84.83	150.000.000	84.83	150.000.000	84.83	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54.59	2.200.000.000	54.59	2.200.000.000	54.59	2.372.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					800.000.000		800.000.000		804.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	24.82	800.000.000	24.82	800.000.000	24.82	804.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		202.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	200.000.000	4	200.000.000	4	202.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		300.000.000		302.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	300.000.000	4	300.000.000	4	302.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.250.000.000		1.250.000.000		1.416.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	88.42	1.250.000.000	88.42	1.250.000.000	88.42	1.416.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				450.000.000		450.000.000		612.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	450.000.000	4	450.000.000	4	612.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		300.000.000		302.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	300.000.000	4	300.000.000	4	302.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		202.000.000		
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	4	200.000.000	4	200.000.000	4	202.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000		152.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX	%	83.06	150.000.000	83.06	150.000.000	83.06	152.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		152.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	4	150.000.000	4	150.000.000	4	152.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	93.71	1.150.000.000	93.71	1.150.000.000	93.71	1.432.484.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		500.000.000		662.484.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	69.33	500.000.000	69.33	500.000.000	69.33	662.484.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		350.000.000		512.484.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	350.000.000	6	350.000.000	6	512.484.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					500.000.000		500.000.000		620.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	88.08	500.000.000	88.08	500.000.000	88.08	620.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								60.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang					1	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		350.000.000		410.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	6	350.000.000	6	350.000.000	6	410.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V	%	92.5	150.000.000	92.5	150.000.000	92.5	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	79.86	1.550.000.000	79.86	1.550.000.000	79.86	1.700.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					350.000.000		350.000.000		400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	80	350.000.000	80	350.000.000	80	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.050.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	88	1.050.000.000	88	1.050.000.000	88	1.100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		200.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000		200.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI	%	87	150.000.000	87	150.000.000	87	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								50.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72.83	850.000.000	72.83	850.000.000	72.83	850.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	50.27	350.000.000	50.27	350.000.000	50.27	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		200.000.000		230.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	200.000.000	2	200.000.000	2	230.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Fisika Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Kimia Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Kompuer Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Bahasa Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		120.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	120.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	64.17	400.000.000	64.17	400.000.000	64.17	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII	%	188.16	100.000.000	188.16	100.000.000	188.16	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77.11	1.000.000.000	77.11	1.000.000.000	77.11	1.000.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					450.000.000		450.000.000		450.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	78.3	450.000.000	78.3	450.000.000	78.3	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	89.5	300.000.000	89.5	300.000.000	89.5	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	%	81.05	250.000.000	81.05	250.000.000	81.05	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	77.81	970.000.000	77.81	970.000.000	77.81	970.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					260.000.000		260.000.000		260.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	66.88	260.000.000	66.88	260.000.000	66.88	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				260.000.000		260.000.000		260.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					560.000.000		560.000.000		560.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	88.97	560.000.000	88.97	560.000.000	88.97	560.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				260.000.000		260.000.000		260.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	260.000.000	2	260.000.000	2	260.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X	%	89.97	150.000.000	89.97	150.000.000	89.97	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	87.73	1.250.000.000	87.73	1.250.000.000	87.73	1.250.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	82.39	500.000.000	82.39	500.000.000	82.39	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	84.39	300.000.000	84.39	300.000.000	84.39	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					450.000.000		450.000.000		450.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI	%	83.39	450.000.000	83.39	450.000.000	83.39	450.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81	875.000.000	81	875.000.000	81	875.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	75	500.000.000	75	500.000.000	75	500.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	91.2	300.000.000	91.2	300.000.000	91.2	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII	%	93	75.000.000	93	75.000.000	93	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88.25	650.000.000	88.25	650.000.000	88.25	650.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	75.25	300.000.000	75.25	300.000.000	75.25	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitas	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika										
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia										
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer										
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa										
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0046			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium										
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	84.76	250.000.000	84.76	250.000.000	84.76	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa										
						Jumlah unit pembangunan RPS	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium										
						Jumlah unit pembangunan Laboratorium	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah unit Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas sekolah	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0016			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah ruang guru/ kepala sekolah ruang guru/ kepala sekolah/ TU yang telah direhabilitasi	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium										
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0038			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								250.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit					1	250.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				250.000.000		250.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	250.000.000	2	250.000.000	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	%	81.11	100.000.000	81.11	100.000.000	81.11	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
						Jumlah Sarana, Parasana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Unit							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah										
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0045			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa										
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0		0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah										
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang							SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	10.53	79.403.729.000	10.53	43.250.881.000	10.53	45.217.281.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					79.403.729.000		43.250.881.000		45.217.281.000		
						Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	20	79.403.729.000	20	43.250.881.000	20	45.217.281.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				102.281.000		1.000.346.000		1.000.346.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	102.281.000	8	1.000.346.000	8	1.000.346.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0004			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				509.700.000		1.199.915.000		1.199.915.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	509.700.000	5	1.199.915.000	5	1.199.915.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0008			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				28.948.791.000		8.506.665.000		8.506.665.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	30	28.948.791.000	39	8.506.665.000	39	8.506.665.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah				40.000.000.000		24.300.000.000		24.266.400.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	493	40.000.000.000	300	24.300.000.000	300	24.266.400.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				439.422.000		1.320.000.000		3.320.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	6	439.422.000	18	1.320.000.000	18	3.320.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0067			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0069			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.160.000.000		1.160.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		8	1.160.000.000	8	1.160.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0077			Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah						326.000.000		326.000.000		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0	326.000.000	2	326.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0079			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				9.403.535.000		4.786.955.000		4.786.955.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	58	9.403.535.000	41	4.786.955.000	41	4.786.955.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						651.000.000		651.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		7	651.000.000	7	651.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	65	423.372.183.000	65	198.403.545.000	65	208.781.945.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					423.372.183.000		198.403.545.000		208.781.945.000		
						Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan	Angka	550	423.372.183.000	550	198.403.545.000	550	208.781.945.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0003			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2.277.600.000						
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	7	2.277.600.000	0		0		Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0010			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.929.795.000		909.610.000		909.610.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6	1.929.795.000	5	909.610.000	5	909.610.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0011			Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0		0		Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0014			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				21.595.968.000		6.369.910.000		6.369.910.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	75	21.595.968.000	53	6.369.910.000	53	6.369.910.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				46.248.692.000		34.352.680.000		34.352.680.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	98	46.248.692.000	189	34.352.680.000	189	34.352.680.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2.498.325.000		5.728.642.000		5.728.642.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	2.498.325.000	23	5.728.642.000	23	5.728.642.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0022			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				745.875.000		2.769.583.000		2.769.583.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	745.875.000	9	2.769.583.000	9	2.769.583.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0023			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				2.502.266.000		3.041.389.000		3.041.389.000		
						Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	2.502.266.000	10	3.041.389.000	10	3.041.389.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0024			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				726.975.000		2.201.177.000		2.201.177.000		
						Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	726.975.000	12	2.201.177.000	12	2.201.177.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0025			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				297.675.000		898.212.000		898.212.000		
						Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	297.675.000	5	898.212.000	5	898.212.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0027			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				682.500.000		248.667.000		248.667.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	682.500.000	3	248.667.000	3	248.667.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0028			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						2.642.788.000		2.642.788.000		
						Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		11	2.642.788.000	11	2.642.788.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0036			Pengadaan Mebel Sekolah				121.750.000.000		97.450.000.000		98.185.400.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	121.750.000.000	1202	97.450.000.000	1202	98.185.400.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				212.760.000.000		30.760.000.000		40.403.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	45	212.760.000.000	136	30.760.000.000	136	40.403.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0068			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				4.748.962.000		2.319.664.000		2.319.664.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	38	4.748.962.000	23	2.319.664.000	23	2.319.664.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0070			Pembangunan Ruang Laboratorium				3.404.700.000		5.385.483.000		5.385.483.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang	7	3.404.700.000	12	5.385.483.000	12	5.385.483.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0071			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				1.202.850.000		3.325.740.000		3.325.740.000		
						Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	1.202.850.000	11	3.325.740.000	11	3.325.740.000	Bidang Pembinaan SMA	
						Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	60	578.408.526.000	60	315.494.023.000	60	324.528.808.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					578.408.526.000		315.494.023.000		324.528.808.000		
						Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan	Angka	246	578.408.526.000	246	315.494.023.000	246	324.528.808.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0004			Pembangunan Ruang Praktik Siswa				41.344.526.000		18.745.500.000		18.745.500.000		
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	35	41.344.526.000	35	18.745.500.000	15	18.745.500.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0005			Pembangunan Ruang Laboratorium				13.580.880.000		7.873.300.000		7.873.300.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	40	13.580.880.000	40	7.873.300.000	21	7.873.300.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0006			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						2.203.000.000		2.203.000.000		
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0	2.203.000.000	14	2.203.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0007			Pembangunan Perpustakaan Sekolah						1.177.200.000		1.177.200.000		
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0		0	1.177.200.000	3	1.177.200.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				8.963.120.000		6.269.500.000		6.269.500.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	56	8.963.120.000	56	6.269.500.000	68	6.269.500.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0018			Rehabilitasi Ruang Laboratorium						113.400.000		113.400.000		
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0		0	113.400.000	1	113.400.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0028			Pengadaan Mebel Sekolah				81.000.000.000		81.000.000.000		80.917.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1000	81.000.000.000	1000	81.000.000.000	1000	80.917.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				411.020.000.000		193.400.000.000		202.517.785.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	45	411.020.000.000	100	193.400.000.000	100	202.517.785.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0062			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						962.120.000		962.120.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0		0	962.120.000	4	962.120.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0063			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik										
						Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				22.500.000.000		3.750.003.000		3.750.003.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	150	22.500.000.000	0	3.750.003.000	29	3.750.003.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0075			Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah										
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0		0		0		Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	10	5.706.203.000	10	17.374.496.000	10	16.511.732.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					5.706.203.000		17.374.496.000		16.511.732.000		
						Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB	Angka	10	1.421.707.000	10	13.090.000.000	10	13.090.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0070			Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.421.707.000		13.090.000.000		13.090.000.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	8	1.421.707.000	77	13.090.000.000	77	13.090.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB	Angka	3	4.284.496.000	3	4.284.496.000	3	3.421.732.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0001			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				4.284.496.000		4.284.496.000		3.421.732.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	4.284.496.000	1	4.284.496.000	1	3.421.732.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	36	15.460.850.000	36	22.416.861.000	36	18.185.518.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.460.850.000		22.416.861.000		18.185.518.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru	Angka	8	2.660.850.000	8	9.616.861.000	8	9.616.861.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0072			Pembangunan Ruang Kelas Baru				2.660.850.000		9.616.861.000		9.616.861.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	9	2.660.850.000	27	9.616.861.000	27	9.616.861.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan	Angka	306	12.800.000.000	306	12.800.000.000	306	8.568.657.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				12.800.000.000		12.800.000.000		8.568.657.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3	12.800.000.000	3	12.800.000.000	3	8.568.657.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0.55	8.155.873.000	0.55	30.753.323.000	0.55	30.356.782.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					8.155.873.000		30.753.323.000		30.356.782.000		
						Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK	Angka	20	3.459.300.000	20	25.056.750.000	20	25.056.750.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0064			Pembangunan Ruang Kelas Baru				3.459.300.000		25.056.750.000		25.056.750.000		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	20	3.459.300.000	20	25.056.750.000	20	25.056.750.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK	Angka	2	4.696.573.000	2	5.696.573.000	2	5.300.032.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				4.696.573.000		5.696.573.000		5.300.032.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	4.696.573.000	3	5.696.573.000	3	5.300.032.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						341.362.000		341.362.000		341.362.000		
						Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	76.2	341.362.000	76.2	341.362.000	76.2	341.362.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
		1.01.04.1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					341.362.000		341.362.000		341.362.000		
						Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	Orang	23659	341.362.000	23659	341.362.000	23659	341.362.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.04.1.01.0002			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				341.362.000		341.362.000		341.362.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	4	341.362.000	4	341.362.000	4	341.362.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						742.500.000		742.500.000		746.290.000		
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Dokumen	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.05.1.02.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	15	50.000.000	15	50.000.000	15	134.650.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					50.000.000		50.000.000		134.650.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen	20	50.000.000	20	50.000.000	20	134.650.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000		50.000.000		134.650.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	15	50.000.000	15	50.000.000	15	134.650.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	93.93	65.000.000	93.93	65.000.000	93.93	110.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					65.000.000		65.000.000		110.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	Dokumen	65	65.000.000	65	65.000.000	65	110.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.05.1.01.0001			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				65.000.000		65.000.000		110.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	65	65.000.000	65	65.000.000	40	110.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN I	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	40.370.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN II	Angka	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN II	Angka	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		370.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN II	Angka	1	10.000.000	1	10.000.000	1	370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		370.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN III	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN III	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN III	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	10	50.000.000	10	50.000.000	10	35.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		28.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IV	Dokumen		20.000.000		20.000.000		8.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		8.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	8.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN IV	Dokumen		20.000.000		20.000.000		20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		7.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IV	Dokumen		10.000.000		10.000.000		7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		7.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	25	50.000.000	25	50.000.000	25	45.620.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		33.550.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IX	Dokumen	66	20.000.000	66	20.000.000	66	18.350.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		18.350.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	20.000.000	3	20.000.000	3	18.350.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX	Dokumen	154	20.000.000	154	20.000.000	154	15.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		15.200.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	20.000.000	3	20.000.000	3	15.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		12.070.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IX	Dokumen	14	10.000.000	14	10.000.000	14	12.070.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		12.070.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3	10.000.000	3	10.000.000	3	12.070.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	20	45.000.000	20	45.000.000	20	40.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN V	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN V	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000				
						Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN V	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VI	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VI	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VI	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
						Persentase usulan perizinan penyelengaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	40.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		31.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VII	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VII	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	11.000.000		
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		11.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	11.000.000		
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		9.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VII	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	9.000.000		
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		9.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	9.000.000		
						Persentase usulan perizinan penyelengaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000				
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VIII	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VIII	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000				
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VIII	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	25	50.000.000	25	50.000.000	25	40.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		30.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN X	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN X	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN X	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4.76	50.000.000	4.76	50.000.000	4.76	28.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		23.150.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XI	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		7.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XI	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		16.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	16.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		5.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XI	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XII	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XII	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XII	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
		1.01.05.1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XIII	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XIII	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.05.1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XIII	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
	Meningkatnya mutu pendidikan								**2.562.723.240.000**		**2.884.957.422.000**		**2.899.315.443.000**		
						Nilai karakter siswa sekolah menengah	Angka	85.44	751.800.000	85.44	85	85.44	731.080.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						751.800.000		751.800.000		731.080.000		
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89.06	65.000.000	89.06	65.000.000	89.06	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	126	25.000.000	126	25.000.000	126	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	126	25.000.000	126	25.000.000	126	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	Angka	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81.22	65.000.000	81.22	65.000.000	81.22	50.370.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	55	25.000.000	55	25.000.000	55	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		

						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	107	25.000.000	107	25.000.000	107	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		370.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	Angka	2	15.000.000	2	15.000.000	2	370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		370.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	%	100	15.000.000	100	15.000.000	100	370.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83.27	65.000.000	83.27	65.000.000	83.27	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	24	25.000.000	24	25.000.000	24	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	Angka	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	81.77	65.000.000	81.77	65.000.000	81.77	74.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		59.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	31.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		31.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	31.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	0	25.000.000	0	25.000.000	0	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		28.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	28.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	%	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	85.85	65.000.000	85.85	65.000.000	85.85	57.690.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	66	25.000.000	66	25.000.000	66	27.380.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		27.380.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.380.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	154	25.000.000	154	25.000.000	154	22.620.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		22.620.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	22.620.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		7.690.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	Angka	14	15.000.000	14	15.000.000	14	7.690.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		7.690.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	7.690.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88.34	65.000.000	88.34	65.000.000	88.34	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Unit	108	25.000.000	108	25.000.000	108	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	108	25.000.000	108	25.000.000	108	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	Angka	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86.49	37.500.000	86.49	37.500.000	86.49	37.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	33	15.000.000	33	15.000.000	33	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	26	15.000.000	26	15.000.000	26	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejururan Yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	Angka	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	88.83	65.000.000	88.83	65.000.000	88.83	55.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		43.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	25	25.000.000	25	25.000.000	25	18.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		18.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	18.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		12.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	Angka	5	15.000.000	5	15.000.000	5	12.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		12.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	12.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89.03	47.150.000	89.03	47.150.000	89.03	47.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					32.150.000		32.150.000		32.150.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	32	16.075.000	32	16.075.000	32	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				16.075.000		16.075.000		16.075.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	16.075.000	1	16.075.000	1	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	19	16.075.000	19	16.075.000	19	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				16.075.000		16.075.000		16.075.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	16.075.000	1	16.075.000	1	16.075.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	Angka	13	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	82.21	65.000.000	82.21	65.000.000	82.21	65.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	146	25.000.000	146	25.000.000	146	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	Angka	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83.27	54.150.000	83.27	54.150.000	83.27	50.570.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					44.150.000		44.150.000		43.070.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	41	21.760.000	41	21.760.000	41	20.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				21.760.000		21.760.000		20.680.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	21.760.000	1	21.760.000	1	20.680.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	112	22.390.000	112	22.390.000	112	22.390.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				22.390.000		22.390.000		22.390.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	22.390.000	1	22.390.000	1	22.390.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					10.000.000		10.000.000		7.500.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	Angka	4	10.000.000	4	10.000.000	4	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				10.000.000		10.000.000		7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85.3	46.000.000	85.3	46.000.000	85.3	46.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					39.000.000		39.000.000		39.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	35	19.500.000	35	19.500.000	35	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				19.500.000		19.500.000		19.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	75	19.500.000	75	19.500.000	75	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				19.500.000		19.500.000		19.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	Angka	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86.06	47.000.000	86.06	47.000.000	86.06	52.800.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
		1.01.03.1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					35.200.000		35.200.000		40.000.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	55	16.600.000	55	16.600.000	55	19.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				16.600.000		16.600.000		19.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	Dokumen	1	16.600.000	1	16.600.000	1	19.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	79	18.600.000	79	18.600.000	79	21.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				18.600.000		18.600.000		21.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	Dokumen	1	18.600.000	1	18.600.000	1	21.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.03.1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					11.800.000		11.800.000		12.800.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	Angka	7	11.800.000	7	11.800.000	7	12.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				11.800.000		11.800.000		12.800.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	11.800.000	1	11.800.000	1	12.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	Angka	66.08	2.561.971.440.000	66.08	66	66.08	2.898.584.363.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						2.561.971.440.000		2.884.205.622.000		2.898.584.363.000		
						Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68.18	999.317.000	68.18	999.317.000	68.18	1.034.317.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					999.317.000		999.317.000		1.034.317.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional	Angka	15	999.317.000	15	999.317.000	15	1.034.317.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				999.317.000		999.317.000		1.034.317.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	999.317.000	15	999.317.000	15	1.034.317.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	50	1.399.983.000	50	1.399.983.000	50	1.722.517.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.399.983.000		1.399.983.000		1.722.517.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional	Angka	93	1.399.983.000	93	1.399.983.000	93	1.722.517.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.399.983.000		1.399.983.000		1.722.517.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	93	1.399.983.000	93	1.399.983.000	93	1.722.517.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1.67	275.000.000	1.67	275.000.000	1.67	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	18	100.000.000	18	100.000.000	18	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I	Angka	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1	275.000.000	1	275.000.000	1	281.250.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		100.000.000		110.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	3	100.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		110.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	132	100.000.000	132	100.000.000	132	110.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		96.250.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	100.000.000	1	100.000.000	1	96.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		96.250.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	85	100.000.000	85	100.000.000	85	96.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II	Angka	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2.87	230.000.000	2.87	230.000.000	2.87	230.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				80.000.000		80.000.000		80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III	Angka	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1.25	275.000.000	1.25	275.000.000	1.25	202.050.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		100.000.000		60.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	2	100.000.000	2	100.000.000	2	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		60.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	133	100.000.000	133	100.000.000	133	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		91.050.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa		100.000.000		100.000.000		91.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		91.050.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	86	100.000.000	86	100.000.000	86	91.050.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		51.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV	Siswa	2	75.000.000	2	75.000.000	2	51.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		51.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	27	75.000.000	27	75.000.000	27	51.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3.22	275.000.000	3.22	275.000.000	3.22	234.400.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		100.000.000		70.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	0.52	100.000.000	0.52	100.000.000	0.52	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		70.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	25	100.000.000	25	100.000.000	25	70.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	5.6	100.000.000	5.6	100.000.000	5.6	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		64.400.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX	Angka	2.8	75.000.000	2.8	75.000.000	2.8	64.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		64.400.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	10	75.000.000	10	75.000.000	10	64.400.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1.92	275.000.000	1.92	275.000.000	1.92	280.200.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		105.200.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	3	100.000.000	3	100.000.000	3	105.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		105.200.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	6	100.000.000	6	100.000.000	6	105.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V	Angka	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Unit	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	90	262.000.000	90	262.000.000	90	262.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	20	95.000.000	20	95.000.000	20	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	132	95.000.000	132	95.000.000	132	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	20	95.000.000	20	95.000.000	20	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	95.000.000	80	95.000.000	80	95.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					72.000.000		72.000.000		72.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI	Angka	5	72.000.000	5	72.000.000	5	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				72.000.000		72.000.000		72.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	30	72.000.000	30	72.000.000	30	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2.74	245.000.000	2.74	245.000.000	2.74	217.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					90.000.000		90.000.000		81.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	20	90.000.000	20	90.000.000	20	81.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				90.000.000		90.000.000		81.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	15	90.000.000	15	90.000.000	15	81.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					90.000.000		90.000.000		71.500.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	6	90.000.000	6	90.000.000	6	71.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				90.000.000		90.000.000		71.500.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	90.000.000	5	90.000.000	5	71.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII	Angka	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	65.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2.2	265.000.000	2.2	265.000.000	2.2	232.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	90.000.000	20	90.000.000	20	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		82.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	5	100.000.000	5	100.000.000	5	82.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		82.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	100.000.000	20	100.000.000	20	82.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		60.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	Angka	5	75.000.000	5	75.000.000	5	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		60.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	75.000.000	4	75.000.000	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	28.57	203.150.000	28.57	203.150.000	28.57	213.150.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					68.150.000		68.150.000		78.150.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	68.150.000	5	68.150.000	5	78.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				68.150.000		68.150.000		78.150.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	80	68.150.000	80	68.150.000	80	78.150.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	146	75.000.000	146	75.000.000	146	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X	Angka	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	3.63	275.000.000	3.63	275.000.000	3.63	258.410.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		100.000.000		99.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	5	100.000.000	5	100.000.000	5	99.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		99.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	30	100.000.000	30	100.000.000	30	99.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		91.910.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	6	100.000.000	6	100.000.000	6	91.910.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		91.910.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	40	100.000.000	40	100.000.000	40	91.910.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		67.500.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI	Angka	3	75.000.000	3	75.000.000	3	67.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		67.500.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	16	75.000.000	16	75.000.000	16	67.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	1.96	275.000.000	1.96	275.000.000	1.96	275.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA	Siswa	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII	Angka	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2.52	251.150.000	2.52	251.150.000	2.52	241.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					76.150.000		76.150.000		70.500.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	11	76.150.000	11	76.150.000	11	70.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				76.150.000		76.150.000		70.500.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	5	76.150.000	5	76.150.000	5	70.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					100.000.000		100.000.000		96.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	100.000.000	3	100.000.000	3	96.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000		100.000.000		96.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	3	100.000.000	3	100.000.000	3	96.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	Angka	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	57.35	1.690.777.000	57.35	1.670.777.000	57.35	1.587.284.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.690.777.000		1.670.777.000		1.587.284.000		
						Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional	Angka	2315	1.690.777.000	2315	1.670.777.000	2315	1.587.284.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.690.777.000		1.670.777.000		1.587.284.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	2315	1.690.777.000	2315	1.670.777.000	2315	1.587.284.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	10	460.140.000	10	460.140.000	10	635.140.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					128.180.000		128.180.000		203.180.000		
						Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	2500	128.180.000	2500	128.180.000	2500	203.180.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0051			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				128.180.000		128.180.000		203.180.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2500	128.180.000	2500	128.180.000	2500	203.180.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					236.360.000		236.360.000		336.360.000		
						Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	4500	236.360.000	4500	236.360.000	4500	336.360.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0043			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				236.360.000		236.360.000		336.360.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4500	236.360.000	4500	236.360.000	4500	336.360.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					95.600.000		95.600.000		95.600.000		
						Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	275	95.600.000	275	95.600.000	275	95.600.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0050			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				95.600.000		95.600.000		95.600.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	275	95.600.000	275	95.600.000	275	95.600.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	80.3	1.267.136.000	80.3	1.267.136.000	80.3	1.690.206.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					593.689.000		593.689.000		747.454.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi	Angka	12976	593.689.000	12976	593.689.000	12976	747.454.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
		1.01.02.1.01.0051			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				593.689.000		593.689.000		747.454.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	12976	593.689.000	12976	593.689.000	12976	747.454.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					551.002.000		551.002.000		677.545.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi	Angka	931	551.002.000	931	551.002.000	931	677.545.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0043			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				551.002.000		551.002.000		677.545.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	931	551.002.000	931	551.002.000	931	677.545.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					122.445.000		122.445.000		265.207.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi	Angka	690	122.445.000	690	122.445.000	690	265.207.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0050			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				122.445.000		122.445.000		265.207.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	690	122.445.000	690	122.445.000	690	265.207.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	%	0.9	51.220.222.000	0.9	77.561.751.000	0.9	77.858.839.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.310.125.000		30.441.344.000		30.289.441.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	44100	19.235.125.000	44100	30.366.344.000	44100	30.214.441.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.235.125.000		30.366.344.000		30.214.441.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	27	19.235.125.000	27	30.366.344.000	27	30.214.441.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	14148	75.000.000	14148	75.000.000	14148	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	98	75.000.000	98	75.000.000	98	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					30.000.778.000		43.931.831.000		44.221.379.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	68100	29.925.778.000	68100	43.856.831.000	68100	44.146.379.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				29.925.778.000		43.856.831.000		44.146.379.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	134	29.925.778.000	134	43.856.831.000	134	44.146.379.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	68100	75.000.000	68100	75.000.000	68100	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	125	75.000.000	125	75.000.000	125	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.909.319.000		3.188.576.000		3.348.019.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	Siswa	1920	1.874.319.000	1920	3.153.576.000	1920	3.313.019.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.874.319.000		3.153.576.000		3.313.019.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	25	1.874.319.000	25	3.153.576.000	25	3.313.019.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	Siswa	4694	35.000.000	4694	35.000.000	4694	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	27	35.000.000	27	35.000.000	27	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40.11	25.856.463.000	40.11	44.515.318.000	40.11	45.014.587.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.996.360.000		21.957.475.000		22.022.956.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	344	13.925.535.000	344	21.886.650.000	344	21.932.956.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.925.535.000		21.886.650.000		21.932.956.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	13.925.535.000	55	21.886.650.000	55	21.932.956.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	8932	70.825.000	8932	70.825.000	8932	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				70.825.000		70.825.000		90.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	70.825.000	1	70.825.000	1	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					10.542.432.000		20.694.867.000		20.887.665.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	456	10.471.607.000	456	20.624.042.000	456	20.797.665.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				10.471.607.000		20.624.042.000		20.797.665.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	10.471.607.000	107	20.624.042.000	107	20.797.665.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	11634	70.825.000	11634	70.825.000	11634	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				70.825.000		70.825.000		90.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	70.825.000	1	70.825.000	1	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.317.671.000		1.862.976.000		2.103.966.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	Siswa	52	1.282.671.000	52	1.827.976.000	52	2.094.966.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.282.671.000		1.827.976.000		2.094.966.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	1	1.282.671.000	2	1.827.976.000	2	2.094.966.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	Siswa	136	35.000.000	136	35.000.000	136	9.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		9.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	9.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	69.8	36.181.840.000	69.8	59.339.942.000	69.8	59.767.407.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.859.005.000		24.480.414.000		24.634.962.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	34735	15.799.005.000	34735	24.420.414.000	34735	24.574.962.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				15.799.005.000		24.420.414.000		24.574.962.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	56	15.799.005.000	61	24.420.414.000	61	24.574.962.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III	Siswa	10845	60.000.000	10845	60.000.000	10845	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.061.047.000		31.366.528.000		31.627.798.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	Siswa	53851	18.001.047.000	53851	31.306.528.000	53851	31.567.798.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.001.047.000		31.306.528.000		31.567.798.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	101	18.001.047.000	104	31.306.528.000	104	31.567.798.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	8979	60.000.000	8979	60.000.000	8979	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.261.788.000		3.493.000.000		3.504.647.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	1699	2.231.788.000	1699	3.463.000.000	1699	3.474.647.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.231.788.000		3.463.000.000		3.474.647.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	2.231.788.000	11	3.463.000.000	11	3.474.647.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Siswa	375	30.000.000	375	30.000.000	375	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	69.8	19.590.981.000	69.8	39.321.208.000	69.8	39.689.196.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.673.999.000		16.261.244.000		16.307.487.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	27157	9.598.999.000	27157	16.186.244.000	27157	16.210.737.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				9.598.999.000		16.186.244.000		16.210.737.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	58	9.598.999.000	59	16.186.244.000	59	16.210.737.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	8500	75.000.000	8500	75.000.000	8500	96.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		96.750.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	58	75.000.000	58	75.000.000	58	96.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					8.976.209.000		21.392.480.000		21.701.418.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa		8.901.209.000		21.317.480.000		21.617.468.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				8.901.209.000		21.317.480.000		21.617.468.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	9	8.901.209.000	102	21.317.480.000	102	21.617.468.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa		75.000.000		75.000.000		83.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		83.950.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	3	75.000.000	3	75.000.000	3	83.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					940.773.000		1.667.484.000		1.680.291.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	Siswa	983	905.773.000	983	1.632.484.000	983	1.645.291.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				905.773.000		1.632.484.000		1.645.291.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	11	905.773.000	11	1.632.484.000	11	1.645.291.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	Siswa	172	35.000.000	172	35.000.000	172	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	11	35.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79	58.001.687.000	79	93.123.304.000	79	93.100.985.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					21.135.417.000		33.125.658.000		33.246.233.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	13.227	21.060.417.000	13.227	33.050.658.000	13.227	33.201.533.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				21.060.417.000		33.050.658.000		33.201.533.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	21.060.417.000	4	33.050.658.000	4	33.201.533.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	13.227	75.000.000	13.227	75.000.000	13.227	44.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		44.700.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	4	75.000.000	4	44.700.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					34.979.000.000		56.859.086.000		56.725.799.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	91.092	34.904.000.000	91.092	56.784.086.000	91.092	56.650.799.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				34.904.000.000		56.784.086.000		56.650.799.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	34.904.000.000	4	56.784.086.000	4	56.650.799.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	91.092	75.000.000	91.092	75.000.000	91.092	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.887.270.000		3.138.560.000		3.128.953.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	Siswa	2.009	1.852.270.000	2.009	3.103.560.000	2.009	3.106.203.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.852.270.000		3.103.560.000		3.106.203.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	1.852.270.000	4	3.103.560.000	4	3.106.203.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	Siswa	2.009	35.000.000	2.009	35.000.000	2.009	22.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		22.750.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	4	35.000.000	4	22.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	78.7	34.124.340.000	78.7	58.058.242.000	78.7	57.823.410.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.289.680.000		25.663.580.000		25.618.490.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30217	16.214.680.000	30217	25.588.580.000	30217	25.500.580.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.214.680.000		25.588.580.000		25.500.580.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	16.214.680.000	63	25.588.580.000	63	25.500.580.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	11531	75.000.000	11531	75.000.000	11531	117.910.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		117.910.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	75.000.000	100	75.000.000	100	117.910.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					17.216.098.000		30.652.202.000		30.457.460.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	30843	17.141.098.000	30843	30.577.202.000	30843	30.387.660.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				17.141.098.000		30.577.202.000		30.387.660.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	17.141.098.000	110	30.577.202.000	110	30.387.660.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	10645	75.000.000	10645	75.000.000	10645	69.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		69.800.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	75.000.000	100	75.000.000	100	69.800.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					618.562.000		1.742.460.000		1.747.460.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	Siswa	314	583.562.000	314	1.707.460.000	314	1.707.460.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				583.562.000		1.707.460.000		1.707.460.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	583.562.000	32	1.707.460.000	32	1.707.460.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	Siswa	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		40.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	90	35.527.775.000	90	62.190.936.000	90	63.370.916.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.041.528.000		23.737.538.000		24.539.432.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	27992	14.969.528.000	27992	23.665.538.000	27992	24.467.432.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				14.969.528.000		23.665.538.000		24.467.432.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	14.969.528.000	100	23.665.538.000	100	24.467.432.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	11853	72.000.000	11853	72.000.000	11853	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				72.000.000		72.000.000		72.000.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.794.723.000		35.204.806.000		35.554.847.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	29182	18.722.723.000	29182	35.132.806.000	29182	35.482.847.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.722.723.000		35.132.806.000		35.482.847.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	18.722.723.000	132	35.132.806.000	132	35.482.847.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	22627	72.000.000	22627	72.000.000	22627	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				72.000.000		72.000.000		72.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.691.524.000		3.248.592.000		3.276.637.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	Siswa	886	1.658.524.000	886	3.215.592.000	886	3.243.637.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.658.524.000		3.215.592.000		3.243.637.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	1.658.524.000	30	3.215.592.000	30	3.243.637.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	Siswa	175	33.000.000	175	33.000.000	175	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	100	33.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85.55	20.548.779.000	85.55	37.690.390.000	85.55	37.939.701.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.773.913.000		17.040.632.000		16.874.761.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	30588	9.698.913.000	30588	16.965.632.000	30588	16.774.761.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				9.698.913.000		16.965.632.000		16.774.761.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	9.698.913.000	4	16.965.632.000	4	16.774.761.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10457	75.000.000	10457	75.000.000	10457	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		100.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	4	75.000.000	4	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					9.850.129.000		18.647.378.000		19.128.678.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	41422	9.775.129.000	41422	18.572.378.000	41422	19.035.178.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				9.775.129.000		18.572.378.000		19.035.178.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	9.775.129.000	4	18.572.378.000	4	19.035.178.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	10457	75.000.000	10457	75.000.000	10457	93.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		93.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	4	75.000.000	4	93.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					924.737.000		2.002.380.000		1.936.262.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	Siswa	498	889.737.000	498	1.967.380.000	498	1.897.262.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				889.737.000		1.967.380.000		1.897.262.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	889.737.000	4	1.967.380.000	4	1.897.262.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	Siswa	428	35.000.000	428	35.000.000	428	39.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		39.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	4	35.000.000	4	39.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76.12	30.331.942.000	76.12	55.565.348.000	76.12	58.078.890.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					17.002.857.000		27.302.566.000		28.115.821.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Siswa	36375	16.927.857.000	36375	27.227.566.000	36375	28.025.821.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.927.857.000		27.227.566.000		28.025.821.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	16.927.857.000	4	27.227.566.000	4	28.025.821.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	11517	75.000.000	11517	75.000.000	11517	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		90.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	4	75.000.000	4	90.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.486.459.000		26.614.958.000		28.231.929.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	60850	12.411.459.000	60850	26.539.958.000	60850	28.138.929.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				12.411.459.000		26.539.958.000		28.138.929.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	12.411.459.000	4	26.539.958.000	4	28.138.929.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	19625	75.000.000	19625	75.000.000	19625	93.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		93.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	75.000.000	4	75.000.000	4	93.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					842.626.000		1.647.824.000		1.731.140.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	Siswa	1490	807.626.000	1490	1.612.824.000	1490	1.681.140.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				807.626.000		1.612.824.000		1.681.140.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	807.626.000	4	1.612.824.000	4	1.681.140.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	Siswa	445	35.000.000	445	35.000.000	445	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		50.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	4	35.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	84.74	33.424.059.000	84.74	64.471.684.000	84.74	65.454.555.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					18.494.384.000		29.222.824.000		30.102.667.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	39572	18.424.384.000	39572	29.152.824.000	39572	30.002.667.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				18.424.384.000		29.152.824.000		30.002.667.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	79	18.424.384.000	79	29.152.824.000	79	30.002.667.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	40292	70.000.000	40292	70.000.000	40292	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				70.000.000		70.000.000		100.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	79	70.000.000	79	70.000.000	79	100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.130.557.000		33.570.160.000		33.601.379.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	90337	14.057.557.000	90337	33.497.160.000	90337	33.528.379.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				14.057.557.000		33.497.160.000		33.528.379.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	14.057.557.000	146	33.497.160.000	146	33.528.379.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	91489	73.000.000	91489	73.000.000	91489	73.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				73.000.000		73.000.000		73.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	73.000.000	146	73.000.000	146	73.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					799.118.000		1.678.700.000		1.750.509.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	Siswa	1622	766.118.000	1622	1.645.700.000	1622	1.717.509.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				766.118.000		1.645.700.000		1.717.509.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	8	766.118.000	8	1.645.700.000	8	1.717.509.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	Siswa	1698	33.000.000	1698	33.000.000	1698	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	8	33.000.000	8	33.000.000	8	33.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	44.94	18.261.166.000	44.94	37.187.730.000	44.94	38.004.677.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					11.240.033.000		17.831.520.000		18.084.174.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	27922	11.190.033.000	27922	17.781.520.000	27922	18.037.534.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				11.190.033.000		17.781.520.000		18.037.534.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	41	11.190.033.000	41	17.781.520.000	41	18.037.534.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	8715	50.000.000	8715	50.000.000	8715	46.640.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		46.640.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	41	50.000.000	41	50.000.000	41	46.640.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					6.267.687.000		18.178.246.000		18.652.797.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	52588	6.217.687.000	52588	18.128.246.000	52588	18.602.797.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				6.217.687.000		18.128.246.000		18.602.797.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	112	6.217.687.000	112	18.128.246.000	112	18.602.797.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	15625	50.000.000	15625	50.000.000	15625	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	112	50.000.000	112	50.000.000	112	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					753.446.000		1.177.964.000		1.267.706.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	Siswa	636	718.446.000	636	1.142.964.000	636	1.232.706.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				718.446.000		1.142.964.000		1.232.706.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	4	718.446.000	4	1.142.964.000	4	1.232.706.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	Siswa	126	35.000.000	126	35.000.000	126	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	80	30.462.565.000	80	62.678.982.000	80	63.055.741.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.373.696.000		25.868.536.000		25.807.797.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	34737	16.308.946.000	34737	25.803.786.000	34737	25.743.047.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.308.946.000		25.803.786.000		25.743.047.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	65	16.308.946.000	65	25.803.786.000	65	25.743.047.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	11579	64.750.000	11579	64.750.000	11579	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				64.750.000		64.750.000		64.750.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	65	64.750.000	65	64.750.000	65	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.485.195.000		34.324.774.000		34.712.478.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	92662	12.420.445.000	92662	34.260.024.000	92662	34.647.728.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				12.420.445.000		34.260.024.000		34.647.728.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	146	12.420.445.000	146	34.260.024.000	146	34.647.728.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	30888	64.750.000	30888	64.750.000	30888	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				64.750.000		64.750.000		64.750.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	146	64.750.000	146	64.750.000	146	64.750.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.603.674.000		2.485.672.000		2.535.466.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	Siswa	1651	1.588.674.000	1651	2.470.672.000	1651	2.520.466.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.588.674.000		2.470.672.000		2.520.466.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	5	1.588.674.000	5	2.470.672.000	5	2.520.466.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	Siswa	550	15.000.000	550	15.000.000	550	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79	26.065.345.000	79	46.807.276.000	79	46.961.197.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.522.411.000		21.179.250.000		21.253.829.000		
						Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	24700	13.447.411.000	24700	21.104.250.000	24700	21.173.829.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.447.411.000		21.104.250.000		21.173.829.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	57	13.447.411.000	57	21.104.250.000	57	21.173.829.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	8030	75.000.000	8030	75.000.000	8030	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		80.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	57	75.000.000	57	75.000.000	57	80.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					11.318.002.000		23.527.082.000		23.598.396.000		
						Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	46645	11.243.002.000	46645	23.452.082.000	46645	23.523.396.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				11.243.002.000		23.452.082.000		23.523.396.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	89	11.243.002.000	89	23.452.082.000	89	23.523.396.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	14904	75.000.000	14904	75.000.000	14904	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	89	75.000.000	89	75.000.000	89	75.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.224.932.000		2.100.944.000		2.108.972.000		
						Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	Siswa	1401	1.189.932.000	1401	2.065.944.000	1401	2.074.472.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.189.932.000		2.065.944.000		2.074.472.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	9	1.189.932.000	9	2.065.944.000	9	2.074.472.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	Siswa	320	35.000.000	320	35.000.000	320	34.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				35.000.000		35.000.000		34.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	57	35.000.000	57	35.000.000	57	34.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	10	327.910.000	10	327.910.000	10	327.910.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					109.920.000		109.920.000		109.920.000		
						Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	40	109.920.000	40	109.920.000	40	109.920.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				109.920.000		109.920.000		109.920.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Unit	4	109.920.000	4	109.920.000	4	109.920.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					122.910.000		122.910.000		122.910.000		
						Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	60	122.910.000	60	122.910.000	60	122.910.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				122.910.000		122.910.000		122.910.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	6	122.910.000	6	122.910.000	6	122.910.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					95.080.000		95.080.000		95.080.000		
						Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	Angka	30	95.080.000	30	95.080.000	30	95.080.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				95.080.000		95.080.000		95.080.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Unit	4	95.080.000	4	95.080.000	4	95.080.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	84.146.475.000	10	85.431.030.000	10	85.564.477.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					84.146.475.000		85.431.030.000		85.564.477.000		
						Jumlah siswa penerima dana BOS SLB	Angka	21100	83.429.585.000	21100	83.429.585.000	21100	83.478.032.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0052			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				83.429.585.000		83.429.585.000		83.478.032.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Siswa	21100	83.429.585.000	21100	83.429.585.000	21100	83.478.032.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	5	716.890.000	5	2.001.445.000	5	2.086.445.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				656.708.000		1.941.263.000		2.026.263.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	20	656.708.000	20	1.941.263.000	20	2.026.263.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0071			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				60.182.000		60.182.000		60.182.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	190	60.182.000	190	60.182.000	190	60.182.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67.78	713.149.986.000	67.78	713.657.613.000	67.78	716.277.603.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					713.149.986.000		713.657.613.000		716.277.603.000		
						Jumlah siswa penerima dana BOS SMA	Siswa	426370	706.100.384.000	426370	706.100.384.000	426370	708.666.573.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0053			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				706.100.384.000		706.100.384.000		708.666.573.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Siswa	426370	706.100.384.000	426370	706.100.384.000	426370	708.666.573.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi	Angka	1	7.049.602.000	1	7.557.229.000	1	7.611.030.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				6.939.648.000		7.447.275.000		7.463.200.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	876	6.939.648.000	876	7.447.275.000	876	7.463.200.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0078			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				109.954.000		109.954.000		147.830.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	3	109.954.000	3	109.954.000	3	147.830.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	50.35	1.335.551.252.000	50.35	1.337.098.305.000	50.35	1.340.422.348.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.335.551.252.000		1.337.098.305.000		1.340.422.348.000		
						Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK	Siswa	1274225	1.318.196.111.000	1274225	1.318.196.111.000	1274225	1.321.485.154.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0046			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.318.196.111.000		1.318.196.111.000		1.321.485.154.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Unit	1274225	1.318.196.111.000	1274225	1.318.196.111.000	1593	1.321.485.154.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	Angka	2	17.355.141.000	2	18.902.194.000	2	18.937.194.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				17.325.141.000		18.852.194.000		18.887.194.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Unit	7200	17.325.141.000	7200	18.852.194.000	7200	18.887.194.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0072			Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik				30.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Unit	1593	30.000.000	1593	50.000.000	1593	50.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun								**21.742.450.000**		**22.575.450.000**		**30.149.450.000**		
						Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	Angka	70.93	21.742.450.000	70.93	71	70.93	30.149.450.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						21.742.450.000		22.575.450.000		30.149.450.000		
						Persentase angka putus sekolah SLB	%	3.53	1.237.500.000	3.53	1.238.500.000	3.53	2.338.500.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.237.500.000		1.238.500.000		2.338.500.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa		900.000.000		901.000.000		2.001.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0044			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				900.000.000		901.000.000		2.001.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	2000	900.000.000	901	901.000.000	2001	2.001.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
						Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	4363	337.500.000	4363	337.500.000	4363	337.500.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0038			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				337.500.000		337.500.000		337.500.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2250	337.500.000	2250	337.500.000	2250	337.500.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMA	%	2.3	9.967.000.000	2.3	10.475.000.000	2.3	13.049.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.967.000.000		10.475.000.000		13.049.000.000		
						Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin	Siswa	39100	9.967.000.000	39100	10.475.000.000	39100	13.049.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0039			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				4.947.000.000		4.947.000.000		4.947.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	32980	4.947.000.000	32980	4.947.000.000	32980	4.947.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				5.020.000.000		5.528.000.000		8.102.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	6000	5.020.000.000	3008	5.528.000.000	3008	8.102.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase angka putus sekolah SMK	%	0.026	10.537.950.000	0.026	10.861.950.000	0.026	14.761.950.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					10.537.950.000		10.861.950.000		14.761.950.000		
						Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin	Angka	51000	10.537.950.000	51000	10.861.950.000	51000	14.761.950.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0031			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				7.537.950.000		7.537.950.000		7.537.950.000		
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	50253	7.537.950.000	50253	7.537.950.000	50253	7.537.950.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				3.000.000.000		3.324.000.000		7.224.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Siswa	7000	3.000.000.000	3324	3.324.000.000	7224	7.224.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat									**33.001.987.000**		**33.386.987.000**		**33.506.987.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
						Angka Melek Budaya	%	52.32		52.32		52.32		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan								**23.895.790.000**		**24.280.790.000**		**24.100.790.000**		
						Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	28.23	23.895.790.000	28.23	28	28.23	24.100.790.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						189.850.000		189.850.000		139.850.000		
						Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	47.61	189.850.000	47.61	189.850.000	47.61	139.850.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					189.850.000		189.850.000		139.850.000		
						Persentase SDM Kebudayaan berkompeten	%	5.22	189.850.000	5.22	189.850.000	5.22	139.850.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				189.850.000		189.850.000		139.850.000		
						Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	1726	189.850.000	1726	189.850.000	1726	139.850.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						23.705.940.000		24.090.940.000		23.960.940.000		
						Tingkat partisipasi seni tradisi	%	8.89	23.705.940.000	8.89	24.090.940.000	8.89	23.960.940.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.03.1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					23.705.940.000		24.090.940.000		23.960.940.000		
						Persentase Lembaga Seni aktif berkarya	%	21.16	23.705.940.000	21.16	24.090.940.000	21.16	23.960.940.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.03.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				23.705.940.000		24.090.940.000		23.960.940.000		
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	652	23.705.940.000	652	24.090.940.000	652	23.960.940.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
	Meningkatnya pelestarian budaya								**6.513.676.000**		**6.513.676.000**		**6.497.356.000**		
						Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	15.89	6.513.676.000	15.89	16	15.89	6.497.356.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						3.729.072.000		3.729.072.000		3.712.752.000		
						Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	2.603.640.000	100	2.603.640.000	100	2.603.640.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
		2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					2.603.640.000		2.603.640.000		2.603.640.000		
						Jumlah kelompok seni yang difasilitasi	Kelompok	220	2.603.640.000	220	2.603.640.000	220	2.603.640.000		
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				2.603.640.000		2.603.640.000		2.603.640.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jenis	25	2.603.640.000	25	2.603.640.000	25	2.603.640.000		OPD Provinsi
						Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	19.17	1.125.432.000	19.17	1.125.432.000	19.17	1.109.112.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					1.125.432.000		1.125.432.000		1.109.112.000		
						Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional	%	61.9	1.125.432.000	61.9	1.125.432.000	61.9	1.109.112.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1.125.432.000		1.125.432.000		1.109.112.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan	Buah	26	1.125.432.000	26	1.125.432.000	26	1.109.112.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						519.484.000		519.484.000		519.484.000		
						Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	12.71	519.484.000	12.71	519.484.000	12.71	519.484.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.05.1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					261.040.000		261.040.000		261.040.000		
						Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi	%	7.89	261.040.000	7.89	261.040.000	7.89	261.040.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.01.0002			Penetapan Cagar Budaya				261.040.000		261.040.000		261.040.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Buah	242	261.040.000	242	261.040.000	242	261.040.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					258.444.000		258.444.000		258.444.000		
						Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya	%	88.37	258.444.000	88.37	258.444.000	88.37	258.444.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.02.0003			Pemanfaatan Cagar Budaya				258.444.000		258.444.000		258.444.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	Buah	22	258.444.000	22	258.444.000	22	258.444.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi; PROVINSI LAIN; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						2.265.120.000		2.265.120.000		2.265.120.000		
						Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89.85	2.265.120.000	89.85	2.265.120.000	89.85	2.265.120.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
		2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi					2.265.120.000		2.265.120.000		2.265.120.000		
						Jumlah pengunjung museum	Orang	55000	2.265.120.000	55000	2.265.120.000	55000	2.265.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.06.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				625.000.000		625.000.000		625.000.000		
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Buah	1950	625.000.000	1950	625.000.000	1950	625.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0003			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.220.120.000		1.220.120.000		1.220.120.000		
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Kegiatan	7	1.220.120.000	7	1.220.120.000	7	1.220.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.22.06.1.01.0004			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				420.000.000		420.000.000		420.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	4	420.000.000	4	420.000.000	4	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan								**2.592.521.000**		**2.592.521.000**		**2.908.841.000**		
						Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	22.44	2.592.521.000	22.44	22	22.44	2.908.841.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.109.120.000		2.109.120.000		2.255.440.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	23.76	2.109.120.000	23.76	2.109.120.000	23.76	2.255.440.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.109.120.000		2.109.120.000		2.255.440.000		
						Persentase OPK yang Berdaya	%	22.97	2.109.120.000	22.97	2.109.120.000	22.97	2.255.440.000	SEKSI KESENIAN	
		2.22.02.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				2.109.120.000		2.109.120.000		2.255.440.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Buah	144	2.109.120.000	144	2.109.120.000	144	2.255.440.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						298.800.000		298.800.000		468.800.000		
						Persentase akses literasi sejarah	%	52.9	298.800.000	52.9	298.800.000	52.9	468.800.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.04.1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					298.800.000		298.800.000		468.800.000		
						Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia)	%	52.9	298.800.000	52.9	298.800.000	52.9	468.800.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
		2.22.04.1.01.0003			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				197.920.000		197.920.000		197.920.000		
						Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat	Dokumen	538	197.920.000	538	197.920.000	538	197.920.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.04.1.01.0004			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				100.880.000		100.880.000		270.880.000		
						Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	171	100.880.000	171	100.880.000	171	270.880.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						184.601.000		184.601.000		184.601.000		
						Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	25.13	184.601.000	25.13	184.601.000	25.13	184.601.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
		2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					184.601.000		184.601.000		184.601.000		
						Persentase cagar budaya layak uji peringkat	%	6.95	184.601.000	6.95	184.601.000	6.95	184.601.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
		2.22.05.1.02.000			Pelindungan Cagar Budaya				103.551.000		103.551.000		103.551.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Buah	271	103.551.000	271	103.551.000	271	103.551.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.22.05.1.02.0002			Pengembangan Cagar Budaya				81.050.000		81.050.000		81.050.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Buah	9	81.050.000	9	81.050.000	9	81.050.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
JUMLAH									**8.982.101.194.000**		**8.774.110.383.000**		**8.613.593.785.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**488.278.268.000**		**447.571.968.000**		**448.150.650.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN.								**480.253.689.000**		**439.547.389.000**		**440.354.547.000**		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	49.89	480.253.689.000	49.89	50	49.89	440.354.547.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						478.933.730.000		437.827.430.000		439.084.528.000		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	66.6	433.950.926.000	66.6	358.176.626.000	66.6	359.630.173.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase RS yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	%	100		100		0		SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit										
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0		0		0		SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					433.084.689.000		357.310.389.000		358.827.553.000		
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar	%	98.88	432.049.926.000	98.88	356.275.626.000	98.88	357.792.790.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.0016			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				432.049.926.000		356.275.626.000		357.792.790.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20	432.049.926.000	20	356.275.626.000	20	357.792.790.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan	%	66.48	541.000.000	66.48	541.000.000	66.48	541.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				83.000.000		83.000.000		83.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	10	83.000.000	10	83.000.000	10	83.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0020			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				458.000.000		458.000.000		458.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	25	458.000.000	25	458.000.000	25	458.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan	%	66.6	493.763.000	66.6	493.763.000	66.6	493.763.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.02.0023			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				493.763.000		493.763.000		493.763.000		
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	20	493.763.000	20	493.763.000	20	493.763.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					566.237.000		566.237.000		502.620.000		
						Prosentase RS kelas B dan faslitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar	%	100	566.237.000	100	566.237.000	100	502.620.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.04.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				166.237.000		166.237.000		166.237.000		
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	20	166.237.000	20	166.237.000	20	166.237.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				400.000.000		400.000.000		336.383.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	167	400.000.000	167	400.000.000	167	336.383.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	80	36.655.801.000	80	54.209.801.000	80	54.409.741.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP					36.655.801.000		54.209.801.000		54.409.741.000		

				Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin	%	80	36.655.801.000	80	54.209.801.000	80	54.409.741.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.0025			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						130.000.000		219.940.000		
						Jumlah dokumen distribusi alkes, obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	Dokumen			2	130.000.000	2	219.940.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				36.655.801.000		54.079.801.000		54.189.801.000		
						Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan	Paket	8	36.655.801.000	8	54.079.801.000	8	54.189.801.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	963.900.000	100	963.900.000	100	987.700.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					963.900.000		963.900.000		987.700.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	963.900.000	100	963.900.000	100	987.700.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	2		2		2		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				938.900.000		938.900.000		962.700.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	938.900.000	3	938.900.000	3	962.700.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	1.221.028.000	100	1.221.028.000	100	1.120.618.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					624.618.000		624.618.000		524.618.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	624.618.000	100	624.618.000	100	524.618.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	0		0		0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				62.400.000		62.400.000		67.400.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	62.400.000	2	62.400.000	2	67.400.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				562.218.000		562.218.000		457.218.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	562.218.000	4	562.218.000	4	457.218.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					596.410.000		596.410.000		596.000.000		
						Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas	Angka	86.5	596.410.000	86.5	596.410.000	87	596.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				596.410.000		596.410.000		596.000.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	596.410.000	2	596.410.000	4	596.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	1.431.740.000	100	1.431.740.000	100	1.200.193.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					990.740.000		990.740.000		749.800.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di	%	100	990.740.000	100	990.740.000	100	749.800.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	

						Balkesmas									
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Unit	0		0		0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				40.000.000		40.000.000		48.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	40.000.000	2	40.000.000	2	48.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				950.740.000		950.740.000		701.800.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	950.740.000	4	950.740.000	4	701.800.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					441.000.000		441.000.000		450.393.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	87	441.000.000	87	441.000.000	87	450.393.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				441.000.000		441.000.000		450.393.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	441.000.000	2	441.000.000	2	450.393.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	1.047.000.000	100	1.047.000.000	100	1.077.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					819.000.000		819.000.000		726.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	819.000.000	100	819.000.000	100	726.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				57.000.000		57.000.000		194.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	4	57.000.000	4	57.000.000	4	194.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				762.000.000		762.000.000		532.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	762.000.000	4	762.000.000	4	532.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					228.000.000		228.000.000		351.000.000		
						Angka Kepuasan Pasien di balkesmas	Angka	84	228.000.000	84	228.000.000	84	351.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				228.000.000		228.000.000		351.000.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	228.000.000	2	228.000.000	2	351.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	856.325.000	100	856.325.000	100	421.250.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					765.200.000		765.200.000		322.005.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	%	100	765.200.000	100	765.200.000	100	322.005.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Paket	2		2		0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				65.000.000		65.000.000		227.005.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	4	65.000.000	4	65.000.000	4	227.005.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				700.200.000		700.200.000		95.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	7	700.200.000	7	700.200.000	2	95.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					91.125.000		91.125.000		99.245.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	87.7	91.125.000	87.7	91.125.000	87.7	99.245.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				91.125.000		91.125.000		99.245.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	2	91.125.000	2	91.125.000	2	99.245.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	80	1.071.000.000	80	18.335.000.000	80	18.207.365.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.056.300.000		18.120.300.000		18.160.615.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM	%	80	1.056.300.000	80	18.120.300.000	80	18.160.615.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						17.000.000.000		17.000.000.000		
						Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit			1	17.000.000.000	1	17.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	Paket	10		10		10		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.000.000		20.000.000		75.315.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	75.315.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.036.300.000		1.100.300.000		1.085.300.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	1.036.300.000	6	1.100.300.000	6	1.085.300.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					7.700.000		107.700.000		17.950.000		
						Persentase Pelayanan Kesehatan di BKIM Provinsi Jawa Tengah sesuai standar	%	95	7.700.000	95	107.700.000	95	17.950.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						100.000.000		10.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4		4	100.000.000	1	10.250.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7.700.000		7.700.000		7.700.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular	Dokumen	4	7.700.000	4	7.700.000	4	7.700.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					7.000.000		107.000.000		28.800.000		
						Angka kepuasan pelanggan di BKIM	%	85	7.000.000	85	107.000.000	85	28.800.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				7.000.000		107.000.000		28.800.000		
						Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM	Angka	2	7.000.000	2	107.000.000	2	28.800.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	83	1.286.010.000	83	1.136.010.000	83	1.599.825.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					819.740.000		819.740.000		1.290.770.000		
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi	%	100	819.740.000	100	819.740.000	100	1.290.770.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
						Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	0		0		0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	0		0		0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										
						Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara	Unit	0		0		0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				819.740.000		819.740.000		1.290.770.000		
						Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	17	819.740.000	17	819.740.000	17	1.290.770.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase kab/kota yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan PAK sesuai standar pelayanan yang berlaku	%	62.8		62.8		0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promkes	Dokumen	0		0		0		SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					466.270.000		316.270.000		309.055.000		
						angka kepuasan pelanggan	Angka		466.270.000		316.270.000	90.5	309.055.000		
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				466.270.000		316.270.000		309.055.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	3	466.270.000	3	316.270.000	3	309.055.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	80	450.000.000	80	450.000.000	80	430.663.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					450.000.000		450.000.000		430.663.000		
						Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	%	88	450.000.000	88	450.000.000	88	430.663.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	
		1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				450.000.000		450.000.000		430.663.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	6	450.000.000	6	450.000.000	6	430.663.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						652.959.000		1.052.959.000		802.959.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan advokasi, bimbingan teknis dan evaluasi menjadi labkesmas	Kabupaten/Kota				150.000.000	5	150.000.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Labkesda Kab/Kota yang dikembangkan mutu dan ditingkatkan kompetensi SDM Kesehatannya	Kabupaten/Kota				150.000.000	5	150.000.000		
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						150.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan di Balabkes	Dokumen			1	150.000.000	1	150.000.000		
						Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Persentase SDMK yang kompeten dan bermutu	%	90	500.000.000	90	500.000.000	90	500.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMK	Dokumen	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	OPD Provinsi
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih	%				250.000.000			Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							250.000.000				
						Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi tersertifikasi	Orang			0	250.000.000	0			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						250.000.000				
						Jumlah SDM Kesehatan yang kompetensi dan kualitasnya meningkat	Orang			22	250.000.000	22			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	98	152.959.000	98	152.959.000	98	152.959.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					152.959.000		152.959.000		152.959.000		
						Persentase pelatihan yang sesuai standart	%	98	152.959.000	98	152.959.000	98	152.959.000	SEKSI PELATIHAN	
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				152.959.000		152.959.000		152.959.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	30	152.959.000	30	152.959.000	670	152.959.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						667.000.000		667.000.000		467.060.000		
						Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	75	667.000.000	75	667.000.000	75	467.060.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		1.02.04.1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					667.000.000		667.000.000		467.060.000		
						Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK	%	80	667.000.000	80	667.000.000	80	467.060.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				667.000.000		667.000.000		467.060.000		
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Angka	90	667.000.000	90	667.000.000	90	467.060.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
	MENINGKATNYA KESEHATAN KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP								**2.888.637.000**		**2.888.637.000**		**2.881.517.000**		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelengggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	60	100.000.000	60	60	60	100.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						100.000.000		100.000.000		100.000.000		

						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70%	%	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2.788.637.000	2	2	2	2.781.517.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.765.378.000		1.765.378.000		1.762.378.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	34.28	1.765.378.000	34.28	1.765.378.000	34.28	1.762.378.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.765.378.000		1.765.378.000		1.762.378.000		
						Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik	%	51.43	200.000.000	51.43	200.000.000	51.43	200.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase kab kota dengan kesling yang baik	%	57.14	550.000.000	57.14	550.000.000	57.14	550.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				550.000.000		550.000.000		550.000.000		
						Jumlah dokumen has?i pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	4	550.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70%	%	54.28	100.000.000	54.28	100.000.000	54.28	97.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				100.000.000		100.000.000		97.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	97.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70%	%	62.85	915.378.000	62.85	915.378.000	62.85	915.378.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				915.378.000		915.378.000		915.378.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	915.378.000	4	915.378.000	4	915.378.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.023.259.000		1.023.259.000		1.019.139.000		
						Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	82.85	850.000.000	82.85	850.000.000	82.85	845.880.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					582.000.000		582.000.000		578.280.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas	%	82.85	582.000.000	82.85	582.000.000	82.85	578.280.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				582.000.000		582.000.000		578.280.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	582.000.000	4	582.000.000	4	578.280.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					268.000.000		268.000.000		267.600.000		
						Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah	%	22.85	268.000.000	22.85	268.000.000	22.85	267.600.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				268.000.000		268.000.000		267.600.000		
						Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Dokumen	12	268.000.000	12	268.000.000	12	267.600.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28.57	27.500.000	28.57	27.500.000	28.57	27.500.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					27.500.000		27.500.000		27.500.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	Kabupaten/ Kota	2	27.500.000	2	27.500.000	2	27.500.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				27.500.000		27.500.000		27.500.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	2	27.500.000	2	27.500.000	2	27.500.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28.57	19.200.000	28.57	19.200.000	57.14	19.200.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					19.200.000		19.200.000		19.200.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	28.57	19.200.000	28.57	19.200.000	57.14	19.200.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				19.200.000		19.200.000		19.200.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	19.200.000	4	19.200.000	4	19.200.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.85	59.599.000	42.85	59.599.000	42.85	59.599.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					59.599.000		59.599.000		59.599.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	5	59.599.000	5	59.599.000	5	59.599.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				59.599.000		59.599.000		59.599.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	59.599.000	4	59.599.000	2	59.599.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28.57	29.440.000	28.57	29.440.000	28.57	29.440.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					29.440.000		29.440.000		29.440.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	28.57	29.440.000	28.57	29.440.000	28.57	29.440.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				29.440.000		29.440.000		29.440.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	29.440.000	4	29.440.000	4	29.440.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42.85	37.520.000	42.85	37.520.000	42.85	37.520.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					37.520.000		37.520.000		37.520.000		
						Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	%	28.57	37.520.000	28.57	37.520.000	28.57	37.520.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				37.520.000		37.520.000		37.520.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen	4	37.520.000	4	37.520.000	4	37.520.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA								**4.373.430.000**		**4.373.430.000**		**4.198.760.000**		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	1.475.716.000	100	100	100	1.580.716.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.475.716.000		1.580.716.000		1.580.716.000		
						Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	1.475.716.000	100	1.580.716.000	100	1.580.716.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.475.716.000		1.580.716.000		1.580.716.000		
						Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap	%	98.9	975.000.000	98.9	1.080.000.000	98.9	1.084.950.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				975.000.000		1.080.000.000		1.084.950.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	4	975.000.000	4	1.080.000.000	4	1.084.950.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan	%	100	500.716.000	100	500.716.000	100	495.766.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				250.716.000		250.716.000		170.766.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar	Orang	25000	250.716.000	25000	250.716.000	25000	170.766.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				250.000.000		250.000.000		325.000.000		
						Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar	Orang	1968	250.000.000	1968	250.000.000	1968	325.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0018			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota										
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasai penerapan SPM bidang kesehatan lintas Kab/Kota	Dokumen	0		0		0		SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	78	2.897.714.000	78	78	78	2.618.044.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.897.714.000		2.792.714.000		2.618.044.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	63.9	700.000.000	63.9	595.000.000	63.9	595.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000		595.000.000		595.000.000		
						Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB	%	34.3	700.000.000	34.3	595.000.000	34.3	595.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				700.000.000		595.000.000		595.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	9	700.000.000	9	595.000.000	9	595.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	63.9	650.000.000	63.9	650.000.000	63.9	650.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					650.000.000		650.000.000		650.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa	%	71.4	650.000.000	71.4	650.000.000	71.4	650.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	71.42	698.160.000	71.42	698.160.000	71.42	604.910.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					276.960.000		276.960.000		257.510.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	276.960.000	100	276.960.000	100	257.510.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	8000		8000		8000		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				276.960.000		276.960.000		257.510.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	276.960.000	4	276.960.000	4	257.510.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					421.200.000		421.200.000		347.400.000		
						Angka Kepuasan Pasien	Angka	85.5	421.200.000	85.5	421.200.000	85.5	347.400.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				421.200.000		421.200.000		347.400.000		
						Jumlah standar pelayanan sesuai INM	Angka	86	421.200.000	86	421.200.000	86	347.400.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	28.57	187.661.000	28.57	187.661.000	28.57	154.161.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					187.661.000		187.661.000		154.161.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	187.661.000	100	187.661.000	100	154.161.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	8000		8000		0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				187.661.000		187.661.000		154.161.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	187.661.000	4	187.661.000	4	154.161.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	57.14	255.661.000	57.14	255.661.000	57.14	255.661.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					255.661.000		255.661.000		255.661.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	255.661.000	100	255.661.000	100	255.661.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	8000	35.000.000	8000	35.000.000	8000	35.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				220.661.000		220.661.000		220.661.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	220.661.000	2	220.661.000	2	220.661.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	28.57	165.661.000	28.57	165.661.000	28.57	134.661.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					165.661.000		165.661.000		134.661.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	165.661.000	100	165.661.000	100	134.661.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	8000		8000		0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				165.661.000		165.661.000		134.661.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	165.661.000	4	165.661.000	4	134.661.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	57.14	240.571.000	57.14	240.571.000	57.14	223.651.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					240.571.000		240.571.000		223.651.000		
						Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	%	100	240.571.000	100	240.571.000	100	223.651.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				43.810.000		43.810.000		43.810.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	Orang	8000	43.810.000	8000	43.810.000	8000	43.810.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				196.761.000		196.761.000		179.841.000		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4	196.761.000	4	196.761.000	4	179.841.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
	MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI								**762.512.000**		**762.512.000**		**715.826.000**		
						Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	80	762.512.000	80	80	80	715.826.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						762.512.000		762.512.000		715.826.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	51.42	656.622.000	51.42	656.622.000	51.42	609.936.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					656.622.000		656.622.000		609.936.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30%	%	57.14	656.622.000	57.14	656.622.000	57.14	609.936.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				656.622.000		656.622.000		609.936.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	656.622.000	2	656.622.000	2	609.936.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28.57		28.57		28.57		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	2		2		2		SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4		4		4		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28.57		28.57				Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/Kota	2		2		0		SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4		4		0		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.85	50.000.000	42.85	50.000.000	42.85	50.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	7	50.000.000	7	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28.57	25.000.000	28.57	25.000.000	28.57	25.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	Kabupaten/Kota	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	Dokumen	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42.85	30.890.000	42.85	30.890.000	42.85	30.890.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.890.000		30.890.000		30.890.000		
						Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	Kabupaten/Kota	2	30.890.000	2	30.890.000	2	30.890.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				30.890.000		30.890.000		30.890.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	30.890.000	4	30.890.000	4	30.890.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**155.224.127.000**		**149.306.953.000**		**132.918.626.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**154.774.127.000**		**148.856.953.000**		**132.494.889.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	154.774.127.000	90	90	90	132.494.889.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						154.774.127.000		148.856.953.000		132.494.889.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.911.000.000	100	8.023.000.000	100	5.383.656.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.544.000.000		2.544.000.000		2.555.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2.544.000.000	4	2.544.000.000	4	2.555.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.544.000.000		2.544.000.000		2.555.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	2.544.000.000	4	2.544.000.000	4	2.555.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.240.000		169.240.000		230.843.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	169.240.000	100	169.240.000	100	230.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		6.250.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	6.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		24.553.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	24.553.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	2.000.000	4	2.000.000	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		29.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		24.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.200.000		32.200.000		40.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	32.200.000	4	32.200.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.040.000		100.040.000		100.040.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	100.040.000	4	100.040.000	4	100.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		3.122.000.000				
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan	Unit	4	10.000.000	4	3.122.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		290.000.000				
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	5.000.000	4	290.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud						300.000.000				
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0	300.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		2.532.000.000				
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	5.000.000	4	2.532.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.997.343.000		1.997.343.000		2.350.366.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.997.343.000	4	1.997.343.000	4	2.350.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				680.000.000		680.000.000		973.553.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	680.000.000	4	680.000.000	4	973.553.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000				
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.296.343.000		1.296.343.000		1.374.813.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.296.343.000	4	1.296.343.000	4	1.374.813.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.417.000		190.417.000		247.447.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	190.417.000	4	190.417.000	4	247.447.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		70.000.000		51.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	70.000.000	10	70.000.000	10	51.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		30.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	30.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		10.000.000		75.000.000		
						JUmlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000				
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	10.000.000	4	10.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.417.000		60.417.000		90.447.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.417.000	4	60.417.000	4	90.447.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.419.300.000	100	2.419.300.000	100	2.724.132.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.000.000		179.000.000		219.832.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	179.000.000	100	179.000.000	100	219.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.990.000		49.990.000		49.990.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	49.990.000	4	49.990.000	4	49.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.010.000		20.010.000		20.010.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.010.000	4	20.010.000	4	20.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.000.000		64.000.000		104.832.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	64.000.000	12	64.000.000	12	104.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.500.000		27.500.000		27.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	46	27.500.000	46	27.500.000	2	27.500.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1		1		0		SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		1		0		SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		27.500.000		27.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	27.500.000	3	27.500.000	2	27.500.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.057.000.000		2.057.000.000		2.057.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.057.000.000	4	2.057.000.000	4	2.057.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.353.000.000		1.353.000.000		1.353.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.353.000.000	4	1.353.000.000	4	1.353.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.800.000		155.800.000		419.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	155.800.000	48	155.800.000	48	419.800.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.800.000		28.800.000		28.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	28.800.000	2	28.800.000	2	28.800.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				36.000.000		36.000.000		100.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	36.000.000	1	36.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		280.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	280.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.735.059.000	100	2.735.059.000	100	2.917.059.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.050.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.050.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					348.909.000		348.909.000		353.909.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	348.909.000	100	348.909.000	100	353.909.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.995.000		14.995.000		14.995.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	14.995.000	4	14.995.000	4	14.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.765.000		49.765.000		49.765.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	49.765.000	4	49.765.000	4	49.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.685.000		14.685.000		14.685.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	14.685.000	4	14.685.000	4	14.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.110.000		35.110.000		35.110.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	35.110.000	4	35.110.000	4	35.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.000.000		23.000.000		28.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	23.000.000	4	23.000.000	4	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				199.354.000		199.354.000		199.354.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	199.354.000	12	199.354.000	12	199.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2		2		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					989.150.000		989.150.000		1.024.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	989.150.000	4	989.150.000	4	1.024.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000		750.000		750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	750.000	4	750.000	4	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				279.900.000		279.900.000		319.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	279.900.000	4	279.900.000	4	319.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				708.500.000		708.500.000		703.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	708.500.000	4	708.500.000	4	703.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					397.000.000		397.000.000		489.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	397.000.000	4	397.000.000	4	489.000.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.000.000		110.000.000		140.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	110.000.000	10	110.000.000	10	140.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.000.000		77.000.000		77.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	77.000.000	80	77.000.000	80	77.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		90.000.000		142.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	90.000.000	4	90.000.000	4	142.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		70.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.134.201.000	100	2.134.201.000	100	2.043.111.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					840.000.000		840.000.000		640.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	840.000.000	4	840.000.000	4	640.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				840.000.000		840.000.000		640.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	840.000.000	4	840.000.000	4	640.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					168.093.000		168.093.000		225.093.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	168.093.000	100	168.093.000	100	225.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		8.780.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000		8.000.000		13.720.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	8.000.000	4	8.000.000	4	13.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		21.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.093.000		113.093.000		164.593.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	113.093.000	12	113.093.000	12	164.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									66.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		4		4	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								66.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4		4		1	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	2		2		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2		2		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.046.108.000		1.046.108.000		950.108.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.046.108.000	4	1.046.108.000	4	950.108.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				262.200.000		262.200.000		262.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	262.200.000	12	262.200.000	12	262.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				782.708.000		782.708.000		686.708.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	782.708.000	12	782.708.000	12	686.708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.000.000		80.000.000		161.910.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	80.000.000	4	80.000.000	4	161.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		25.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	20.000.000	11	20.000.000	11	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.000.000		26.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	60	15.000.000	60	15.000.000	60	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		74.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	25.000.000	4	25.000.000	4	74.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		21.410.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	5.000.000	4	5.000.000	4	21.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.975.000.000	100	1.975.000.000	100	2.056.547.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					970.000.000		970.000.000		870.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	970.000.000	4	970.000.000	4	870.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				970.000.000		970.000.000		870.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	970.000.000	4	970.000.000	4	870.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.000.000		160.000.000		255.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	160.000.000	100	160.000.000	100	255.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		1		0	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		22.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		28.450.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	28.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu								16.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1		1		1	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		125.000.000		143.725.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	125.000.000	4	125.000.000	4	143.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								24.475.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1		1		1	24.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3		3		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; ACEH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					755.000.000		755.000.000		754.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	755.000.000	4	755.000.000	4	754.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				255.000.000		255.000.000		284.000.000		
						Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun	Laporan	4	255.000.000	4	255.000.000	4	284.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.000.000		500.000.000		470.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	500.000.000	4	500.000.000	5	470.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		90.000.000		177.097.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	90.000.000	5	90.000.000	5	177.097.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		60.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	50.000.000	11	50.000.000	11	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	10.000.000	15	10.000.000	15	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		31.097.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	31.097.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		71.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	3	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.926.440.000	100	2.926.440.000	100	2.945.890.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.452.000.000		1.452.000.000		1.452.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.452.000.000	4	1.452.000.000	4	1.452.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.452.000.000		1.452.000.000		1.452.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.452.000.000	4	1.452.000.000	4	1.452.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					253.990.000		253.990.000		257.590.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	253.990.000	100	253.990.000	100	257.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.730.000		15.730.000		15.730.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	15.730.000	4	15.730.000	4	15.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.675.000		29.675.000		24.805.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	29.675.000	4	29.675.000	4	24.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.875.000		31.875.000		54.045.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	31.875.000	4	31.875.000	4	54.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.350.000		25.350.000		25.350.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	25.350.000	4	25.350.000	4	25.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.750.000		8.750.000		10.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	8.750.000	4	8.750.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.610.000		142.610.000		127.660.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	142.610.000	4	142.610.000	4	127.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> DESA BEJALEN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2		2		2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3		3		3		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2		2		2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.031.150.000		1.031.150.000		1.062.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.031.150.000	4	1.031.150.000	4	1.062.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				750.000		750.000		250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	750.000	4	750.000	4	250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		322.380.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	300.000.000	4	300.000.000	4	322.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		34.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	35.000.000	4	35.000.000	4	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				695.400.000		695.400.000		705.370.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	695.400.000	4	695.400.000	4	705.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					189.300.000		189.300.000		174.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	189.300.000	4	189.300.000	4	174.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.000.000		72.000.000		56.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	72.000.000	11	72.000.000	11	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.800.000		29.800.000		28.300.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	160	29.800.000	160	29.800.000	160	28.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0	30.000.000	0	30.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	14.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.500.000		43.500.000		46.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	43.500.000	4	43.500.000	4	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.620.094.000	100	2.620.094.000	100	3.127.739.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.400.000.000		1.400.000.000		1.230.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	4	1.230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.400.000.000		1.400.000.000		1.230.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Dokumen	4	1.400.000.000	4	1.400.000.000	4	1.230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.824.000		60.824.000		278.424.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.824.000	100	60.824.000	100	278.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4		4		1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4		4		1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4		4		4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								30.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4		4		1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu								4.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4		4		2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.824.000		60.824.000		139.424.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.824.000	12	60.824.000	12	139.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2		2		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.101.270.000		1.101.270.000		1.346.894.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.101.270.000	4	1.101.270.000	4	1.346.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				870.000		870.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	870.000	12	870.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				357.600.000		357.600.000		398.756.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	357.600.000	12	357.600.000	12	398.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				742.800.000		742.800.000		947.138.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	742.800.000	12	742.800.000	12	947.138.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.000.000		58.000.000		272.421.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	58.000.000	4	58.000.000	4	272.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.000.000		58.000.000		75.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	58.000.000	8	58.000.000	8	75.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								5.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4		4		4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								20.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	2		2		2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								97.671.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		4		1	97.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								73.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4		4		4	73.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	130.739.043.000	100	121.709.869.000	100	106.148.100.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					120.690.967.000		111.479.753.000		94.829.767.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	120.690.967.000	1	111.479.753.000	1	94.829.767.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				119.840.967.000		110.629.753.000		93.273.196.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	540	119.840.967.000	540	110.629.753.000	540	93.273.196.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				700.000.000		700.000.000		1.400.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	700.000.000	1	700.000.000	1	1.400.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		59.110.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	59.110.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.000.000		100.000.000		97.461.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	5	100.000.000	5	100.000.000	5	97.461.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					606.769.000		606.769.000		468.791.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	606.769.000	4	606.769.000	4	468.791.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		75.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	75.000.000	2	75.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				531.769.000		531.769.000		368.791.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	4	531.769.000	4	531.769.000	4	368.791.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					120.960.000		433.000.000		391.220.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	120.960.000	100	433.000.000	100	391.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						312.040.000		324.220.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			0	312.040.000	1	324.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				70.960.000		70.960.000		42.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	70.960.000	4	70.960.000	4	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		25.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	50.000.000	25	50.000.000	25	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.265.213.000		1.265.213.000		2.513.082.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.265.213.000	100	1.265.213.000	100	2.513.082.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				53.500.000		53.500.000		53.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	53.500.000	4	53.500.000	4	53.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				246.283.000		246.283.000		258.833.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	246.283.000	4	246.283.000	4	258.833.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.088.000		13.088.000		25.600.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	13.088.000	4	13.088.000	4	25.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		75.000.000		82.873.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	75.000.000	4	75.000.000	4	82.873.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		117.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	117.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.699.000		49.699.000		66.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	49.699.000	4	49.699.000	4	66.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				456.013.000		456.013.000		1.639.253.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	456.013.000	4	456.013.000	4	1.639.253.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				271.630.000		271.630.000		268.673.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	3	271.630.000	3	271.630.000	3	268.673.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									38.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		4		4	38.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2		2		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		1		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								38.200.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2		2		5	38.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.774.934.000		6.644.934.000		6.505.015.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	6.774.934.000	4	6.644.934.000	4	6.505.015.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.128.000.000		2.128.000.000		2.014.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	2.128.000.000	4	2.128.000.000	4	2.014.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.700.000		91.700.000		91.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	91.700.000	4	91.700.000	4	91.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.535.234.000		4.405.234.000		4.379.315.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	4.535.234.000	4	4.405.234.000	4	4.379.315.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.280.200.000		1.280.200.000		1.402.025.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	1.280.200.000	4	1.280.200.000	7	1.402.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				517.000.000		517.000.000		452.475.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	517.000.000	4	517.000.000	4	452.475.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.700.000		100.700.000		124.050.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	100.700.000	4	100.700.000	4	124.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				492.500.000		492.500.000		550.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	492.500.000	4	492.500.000	4	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		170.000.000		275.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	170.000.000	4	170.000.000	4	275.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.313.990.000	100	4.313.990.000	100	5.148.655.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.273.000.000		2.273.000.000		2.673.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2.273.000.000	4	2.273.000.000	4	2.673.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.273.000.000		2.273.000.000		2.673.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	2.273.000.000	4	2.273.000.000	4	2.673.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					171.000.000		171.000.000		215.045.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	171.000.000	100	171.000.000	100	215.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		28.000.000		52.645.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	28.000.000	1	28.000.000	1	52.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		19.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	19.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.000.000		7.000.000		9.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.000.000		117.000.000		121.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	117.000.000	2	117.000.000	2	121.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		30.000.000		29.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	30.000.000	4	30.000.000	4	29.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		29.600.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4	30.000.000	4	30.000.000	4	29.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.655.500.000		1.655.500.000		1.947.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.655.500.000	4	1.655.500.000	4	1.947.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				65.000.000		65.000.000		99.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	65.000.000	1	65.000.000	1	99.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				738.400.000		738.400.000		903.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	738.400.000	1	738.400.000	1	903.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.200.000		31.200.000		24.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	31.200.000	1	31.200.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				820.900.000		820.900.000		920.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	820.900.000	1	820.900.000	1	920.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					184.490.000		184.490.000		283.660.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	184.490.000	4	184.490.000	4	283.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.500.000		65.500.000		62.000.000		
						Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	Unit	5	65.500.000	5	65.500.000	5	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.990.000		40.990.000		80.960.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	40.990.000	50	40.990.000	50	80.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		61.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	35.000.000	4	35.000.000	4	61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.000.000		43.000.000		79.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	43.000.000	4	43.000.000	4	79.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**450.000.000**		**450.000.000**		**423.737.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9	450.000.000	2.9	3	2.9	423.737.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						450.000.000		450.000.000		423.737.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	62.5	450.000.000	62.5	450.000.000	62.5	423.737.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					450.000.000		450.000.000		423.737.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	90	450.000.000	90	450.000.000	90	423.737.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		296.754.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	250.000.000	10	250.000.000	10	296.754.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		126.983.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	126.983.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									**643.502.395.000**		**596.878.921.000**		**581.069.276.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**94.564.509.000**		**19.564.509.000**		**19.564.509.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD DR MOEWARDI								**94.564.509.000**		**19.564.509.000**		**19.564.509.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87	94.564.509.000	87	87	87	19.564.509.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						94.564.509.000		19.564.509.000		19.564.509.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	%	100	94.564.509.000	100	19.564.509.000	100	19.564.509.000	RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					94.564.509.000		19.564.509.000		19.564.509.000		
						Persentase pemenuhan alat kedokteran/kesehatan pelayanan	%	85	94.564.509.000	85	19.564.509.000	85	19.564.509.000		
		1.02.02.1.01.001 0			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				94.564.509.000		19.564.509.000		19.564.509.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	94.564.509.000	1	19.564.509.000	30	19.564.509.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan alat kedokteran	%	100		100		100			
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit										
						Jumlah Prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		1		1			
						Jumlah Sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		1		1			
						Persentase penyediaan telemedicine RS	%	60		60		60			
		1.02.02.1.01.002 0			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase pelaksanaan pelaporan indikator mutu RS sebagai pendukung dokumen perijinan & akreditasi RS	%	90		90		90			
		1.02.02.1.04.000 3			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	7		7		7			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Dr. Moewardi	%	30		30		30		RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	2		2		2			
		1.02.03.1.02.000 1			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	700		700		700			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Dr. Moewardi	%	90		90		90		RSUD Dr. Moewardi	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi											

						Persentase pelaksanaan advokasi pemberdayaan, kemitraan peningkatan peran serta masyarakat & lintas sektor	Kegiatan	3		3		3			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan,Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor TingkatDaerah Provinsi	Dokumen	3		3		3			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**1.120.346.298.000**		**1.121.171.058.000**		**1.402.770.725.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**1.120.346.298.000**		**1.121.171.058.000**		**1.402.770.725.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	1.120.346.298.000	90	90	90	1.402.770.725.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.120.346.298.000		1.121.171.058.000		1.402.770.725.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	962.500.000.000	82	962.500.000.000	82	1.262.593.729.000	RSUD Dr. Moewardi	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					962.500.000.000		962.500.000.000		1.262.593.729.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	100	962.500.000.000	100	962.500.000.000	100	1.262.593.729.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				962.500.000.000		962.500.000.000		1.262.593.729.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	962.500.000.000	1	962.500.000.000	1	1.262.593.729.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	157.846.298.000	100	158.671.058.000	100	140.176.996.000	RSUD Dr. Moewardi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					157.846.298.000		157.846.298.000		139.352.236.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	157.846.298.000	24	157.846.298.000	24	139.352.236.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				157.846.298.000		157.846.298.000		139.352.236.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	1300	157.846.298.000	1300	157.846.298.000	1300	139.352.236.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							824.760.000		824.760.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		100	824.760.000	100	824.760.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						824.760.000		824.760.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2		0	824.760.000	0	824.760.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian										
						Jumlah pemutakhiran dokumen pada sistem informasi kepegawaian	Dokumen	12		12		12			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah														
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9		2.9	3	2.9		Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		RSUD Dr. Moewardi	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2		2		2			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									**1.214.910.807.000**		**1.140.735.567.000**		**1.422.335.234.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**79.141.157.000**		**24.141.157.000**		**37.929.061.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO								**79.141.157.000**		**24.141.157.000**		**37.929.061.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	79.141.157.000	90	90	90	37.929.061.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						79.141.157.000		24.141.157.000		37.929.061.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	79.141.157.000	100	24.141.157.000	100	37.929.061.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					79.141.157.000		24.141.157.000		37.929.061.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	79.141.157.000	100	24.141.157.000	100	37.929.061.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				79.141.157.000		24.141.157.000		37.929.061.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan	Paket	1	79.141.157.000	1	24.141.157.000	1	37.929.061.000		OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Ketersediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1		1		1			OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit										
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	10		10		10			OPD Provinsi
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		1		1			OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		1		1			
		1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100		100		100			
		1.02.02.1.04.0002			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit										
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan RS kelas B	%	100		100		100			OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
						Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	20		20		20		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5		5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	360		360		360			OPD Provinsi
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100		100		100		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	Kegiatan	3		3		3			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektoral Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3		3		3			OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**605.409.567.000**		**605.929.247.000**		**869.950.535.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**605.409.567.000**		**605.929.247.000**		**869.950.535.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	605.409.567.000	90	90	90	869.950.535.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						605.409.567.000		605.929.247.000		869.950.535.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	82	508.000.000.000	82	508.000.000.000	82	785.720.093.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					508.000.000.000		508.000.000.000		785.720.093.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	%	96	508.000.000.000	96	508.000.000.000	96	785.720.093.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				508.000.000.000		508.000.000.000		785.720.093.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	508.000.000.000	1	508.000.000.000	1	785.720.093.000		OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	97.409.567.000	100	97.929.247.000	100	84.230.442.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					97.409.567.000		97.409.567.000		83.710.762.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	97.409.567.000	12	97.409.567.000	12	83.710.762.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				97.409.567.000		97.409.567.000		83.710.762.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	823	97.409.567.000	823	97.409.567.000	823	83.710.762.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							519.680.000		519.680.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		100	519.680.000	100	519.680.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						519.680.000		519.680.000		
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Paket			1	519.680.000	1	519.680.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
						Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12		12		12			OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		1			
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit Kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	1		1		1			OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah														
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9		2.9	3	2.9		Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2		2		2			OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		4		4			
JUMLAH									**684.550.724.000**		**630.070.404.000**		**907.879.596.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**26.680.000.000**		**9.480.000.000**		**9.423.635.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. SOEDJARWADI								**26.680.000.000**		**9.480.000.000**		**9.423.635.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100	26.680.000.000	100	100	98	9.423.635.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						26.480.000.000		9.280.000.000		9.223.635.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.298.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					4.500.000.000		4.500.000.000		4.298.000.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100		100			
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.298.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				4.500.000.000		4.500.000.000		4.298.000.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.407.100.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	890.900.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	480.000.000	100	480.000.000	100	140.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					480.000.000		480.000.000		140.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	480.000.000	100	480.000.000	100	140.000.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				480.000.000		480.000.000		140.000.000		
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	480.000.000	12	480.000.000	4	140.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	21.500.000.000	100	4.300.000.000	100	4.785.635.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.500.000.000		4.300.000.000		4.785.635.000		
						Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	21.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				21.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	9	21.500.000.000	9	1.500.000.000	15	1.500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100	2.800.000.000	100	3.285.635.000		
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										
						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,						2.800.000.000		3.285.635.000		

					Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3		3	2.800.000.000	3	3.285.635.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100		100			
		1.02.02.1.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA										
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	11		11		35			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100		100			
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	12		12		12			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	30	35.000.000	30	35.000.000	50	35.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Administrasi Dasar	Kegiatan	3		3		2			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	10		10		7			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium	Kegiatan	4	35.000.000	4	35.000.000	6	35.000.000		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	138	35.000.000	138	35.000.000	200	35.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						165.000.000		165.000.000		165.000.000		
						Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100		100		100		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	2		2		2			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2		2		2			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					165.000.000		165.000.000		165.000.000		
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	7	165.000.000	7	165.000.000	7	165.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				165.000.000		165.000.000		165.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	7	165.000.000	7	165.000.000	7	165.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**100.339.294.000**		**100.532.434.000**		**111.928.186.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**100.339.294.000**		**100.532.434.000**		**111.928.186.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	100.339.294.000	90	90	90	111.928.186.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100.339.294.000		100.532.434.000		111.928.186.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	46.5	49.300.000.000	46.5	49.300.000.000	46.5	60.993.163.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					49.300.000.000		49.300.000.000		60.993.163.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95	49.300.000.000	95	49.300.000.000	95	60.993.163.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				49.300.000.000		49.300.000.000		60.993.163.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	49.300.000.000	1	49.300.000.000	1	60.993.163.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	51.039.294.000	100	51.232.434.000	100	50.935.023.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					51.039.294.000		51.039.294.000		50.741.883.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	51.039.294.000	12	51.039.294.000	12	50.741.883.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				51.039.294.000		51.039.294.000		50.741.883.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	331	51.039.294.000	331	51.039.294.000	330	50.741.883.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							193.140.000		193.140.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%			0	193.140.000	100	193.140.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						193.140.000		193.140.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			1	193.140.000	1	193.140.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah														
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9		2.9	3	2.9		Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10		10		10			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		3		3			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan keuangan)	Laporan	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KLATEN
JUMLAH									**127.019.294.000**		**110.012.434.000**		**121.351.821.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**36.575.729.000**		**26.575.729.000**		**26.575.729.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA								**36.575.729.000**		**26.575.729.000**		**26.575.729.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98.17	36.575.729.000	98.17	98	96.58	26.575.729.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						36.375.729.000		26.375.729.000		26.375.729.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95		95		95		RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95		95		95			
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95		95		95			
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit										
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					470.000.000		470.000.000		470.000.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				470.000.000		470.000.000		470.000.000		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	470.000.000	12	470.000.000	12	470.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	35.905.729.000	95	25.905.729.000	100	25.905.729.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					35.905.729.000		25.905.729.000		25.905.729.000		
						Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95	35.905.729.000	95	25.905.729.000	95	25.905.729.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	20.000.000.000	47	7.000.000.000	47	7.000.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										
						Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				15.905.729.000		18.905.729.000		18.905.729.000		
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	15.905.729.000	1	18.905.729.000	1	18.905.729.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	3		3		3			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	2		2		2			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100		100			
		1.02.02.1.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA										
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang	60		60		60			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100		100			
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Dokumen	12		12		12			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	%	100		100		100			
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Surakarta	%	35		35		35		RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5		5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	208		208		208			
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95	200.000.000	95	200.000.000	100	200.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase capaian kegiatan promosi di tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95		95		95		RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah kegiatan Advokasi, Kemitraan, dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	2		2		2			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2		2		2			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**116.528.737.000**		**116.782.197.000**		**134.493.181.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**116.528.737.000**		**116.782.197.000**		**134.493.181.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	116.528.737.000	90	90	90	134.493.181.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						116.528.737.000		116.782.197.000		134.493.181.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	48.000.000.000	33	48.000.000.000	33	66.198.441.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					48.000.000.000		48.000.000.000		66.198.441.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95		95		95			
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Cost Recovery Rate Parsial	%	95	48.000.000.000	95	48.000.000.000	95	66.198.441.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				48.000.000.000		48.000.000.000		66.198.441.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	48.000.000.000	1	48.000.000.000	1	66.198.441.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	68.528.737.000	100	68.782.197.000	100	68.294.740.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.528.737.000		68.528.737.000		68.041.280.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	68.528.737.000	12	68.528.737.000	12	68.041.280.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				68.528.737.000		68.528.737.000		68.041.280.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	493	68.528.737.000	493	68.528.737.000	493	68.041.280.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							253.460.000		253.460.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		100	253.460.000	100	253.460.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						253.460.000		253.460.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			0	253.460.000	0	253.460.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12		12		12			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah														
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9		2.9	3	2.9		Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90		90		90		RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10		10		10			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	7		7		7			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									**153.104.466.000**		**143.357.926.000**		**161.068.910.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**42.071.656.000**		**23.071.656.000**		**23.071.656.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO								**42.071.656.000**		**23.071.656.000**		**23.071.656.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	42.071.656.000	98	98	98	23.071.656.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						41.871.656.000		22.871.656.000		22.871.656.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	21.371.656.000	100	20.471.656.000	100	20.471.656.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.000.000.000		20.100.000.000		20.100.000.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitasi Digitalisasi Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100		0			
		1.02.02.1.01.002 0			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1		1		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	21.000.000.000	100	20.100.000.000	100	20.100.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				21.000.000.000		20.100.000.000		20.100.000.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	4		4		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	21.000.000.000	1	20.100.000.000	1	20.100.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					371.656.000		371.656.000		371.656.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	371.656.000	100	371.656.000	100	371.656.000		
		1.02.02.1.02.002 2			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				371.656.000		371.656.000		371.656.000		
						Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Dokumen	12	371.656.000	12	371.656.000	12	371.656.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	20.500.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.500.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Bahan Habis Pakai Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100		100		0			
		1.02.02.1.01.002 7			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Bahan Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		1		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	20.500.000.000	100	2.400.000.000	100	2.400.000.000		
		1.02.02.1.01.001 0			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.500.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	12	20.500.000.000	38	2.400.000.000	38	2.400.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.001 3			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										
						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	1		1		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Obat di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		1		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	%	100		100		100			
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Dokumen	12		12		12			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Pengelolaan Layanan Kesehatan Orang dengan Penyalahguna NAPZA	%	100		100		100			
		1.02.02.1.02.0014			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA										
						Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	Orang	10		10		10			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	20		20		20		RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	3		3		3			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	10		10		10			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium	Kegiatan	5		5		5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	110		110		110			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan bakti sosial	Kegiatan	1	7.875.000	1	7.875.000	1	7.875.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				7.875.000		7.875.000		7.875.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	7.875.000	4	7.875.000	2	7.875.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping	Kegiatan	3	99.930.000	3	99.930.000	3	99.930.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				99.930.000		99.930.000		99.930.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	99.930.000	4	99.930.000	4	99.930.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD	Kegiatan	1	92.195.000	1	92.195.000	1	92.195.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				92.195.000		92.195.000		92.195.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	4	92.195.000	4	92.195.000	4	92.195.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**129.537.748.000**		**129.798.748.000**		**148.871.473.000**	**Dinas Kesehatan**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**129.537.748.000**		**129.798.748.000**		**148.871.473.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	129.537.748.000	90	90	90	148.871.473.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						129.537.748.000		129.798.748.000		148.871.473.000		
						Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	43	59.000.000.000	43	59.000.000.000	43	78.680.487.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					59.000.000.000		59.000.000.000		78.680.487.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	58.940.000.000	89	58.940.000.000	89	78.620.487.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				58.940.000.000		58.940.000.000		78.620.487.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	58.865.000.000	1	58.865.000.000	1	78.545.487.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Cost Recovery Rate Parsial	%	89	60.000.000	89	60.000.000	89	60.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	70.537.748.000	100	70.798.748.000	100	70.190.986.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.537.748.000		70.537.748.000		69.929.986.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	70.537.748.000	12	70.537.748.000	12	69.929.986.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				70.537.748.000		70.537.748.000		69.929.986.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	457	70.537.748.000	457	70.537.748.000	457	69.929.986.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							261.000.000		261.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%			0	261.000.000	0	261.000.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						261.000.000		261.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			1	261.000.000	1	261.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah														
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9		2.9	3	2.9		Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100		100		100		RSJD Dr. Amino Gondohutomo	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12		12		12			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3		3		3			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**171.609.404.000**		**152.870.404.000**		**171.943.129.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD dr. REHATTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**52.600.000.000**		**55.376.000.000**		**55.376.000.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO								**52.600.000.000**		**55.376.000.000**		**55.376.000.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	88	52.600.000.000	88	88	88	55.376.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						52.400.000.000		55.176.000.000		54.960.000.000		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	52.400.000.000	100	55.176.000.000	100	54.960.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					51.000.000.000		53.776.000.000		53.776.000.000		
						Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	51.000.000.000	100	53.776.000.000	100	53.776.000.000		
		1.02.02.1.01.001 0			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.000.000.000				1.886.215.000		
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	17	20.000.000.000	0		3	1.886.215.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.002 0			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				31.000.000.000		53.776.000.000		51.889.785.000		
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	50		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	31.000.000.000	1	53.776.000.000	1	51.889.785.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.002 7			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah obat serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	Paket	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.400.000.000		1.400.000.000		1.184.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.184.000.000		
		1.02.02.1.02.001 1			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	4		4		4			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.02.002 2			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1.400.000.000		1.400.000.000		1.184.000.000		
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	12	1.184.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										105.000.000		
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	%	30		30		30	105.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									105.000.000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5		5	105.000.000		
		1.02.03.1.02.000 1			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								105.000.000		
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	100		100		100	105.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200.000.000		200.000.000		311.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	311.000.000	RSUD dr. REHATTA	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		311.000.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	3	200.000.000	3	200.000.000	12	311.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				200.000.000		200.000.000		311.000.000		
						Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	3	200.000.000	3	200.000.000	4	311.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**95.285.271.000**		**95.451.731.000**		**105.948.793.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**95.285.271.000**		**95.285.271.000**		**105.782.333.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	95.285.271.000	90	90	90	105.782.333.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						95.285.271.000		95.285.271.000		105.782.333.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	%	35	54.700.000.000	35	54.700.000.000	35	65.803.982.000	RSUD dr. REHATTA	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					54.700.000.000		54.700.000.000		65.803.982.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	88	54.700.000.000	88	54.700.000.000	88	65.803.982.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				54.700.000.000		54.700.000.000		65.803.982.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	4	54.700.000.000	4	54.700.000.000	4	65.803.982.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.585.271.000	100	40.585.271.000	100	39.978.351.000	RSUD dr. REHATTA	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.585.271.000		40.585.271.000		39.978.351.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	40.585.271.000	14	40.585.271.000	14	39.978.351.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				40.585.271.000		40.585.271.000		39.978.351.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	291	40.585.271.000	291	40.585.271.000	283	39.978.351.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah										**166.460.000**		**166.460.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9		2.9	3	2.9	166.460.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								166.460.000		166.460.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100		100	166.460.000	100	166.460.000	RSUD dr. REHATTA	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11		11		11			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	9		9		9			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							166.460.000		166.460.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%			0	166.460.000	100	166.460.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						166.460.000		166.460.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			0	166.460.000	1	166.460.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
JUMLAH									**147.885.271.000**		**150.827.731.000**		**161.324.793.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT									**21.863.444.000**		**1.863.444.000**		**15.288.444.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.6		74.6		74.74		Dinas Kesehatan	
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD TUGUREJO								**21.863.444.000**		**1.863.444.000**		**15.288.444.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	21.863.444.000	90	90	91.11	15.288.444.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						21.863.444.000		1.863.444.000		15.288.444.000		
						Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	363.444.000	100	363.444.000	100	363.444.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100		100		100			
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit										
						Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					363.444.000		363.444.000		363.444.000		
						Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	363.444.000	100	363.444.000	100	363.444.000		
		1.02.02.1.02.0022			Operasional Pelayanan Rumah Sakit				363.444.000		363.444.000		363.444.000		
						Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	Dokumen	12	363.444.000	12	363.444.000	12	363.444.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	21.500.000.000	100	1.500.000.000	100	14.925.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.500.000.000		1.500.000.000		14.925.000.000		
						Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100	21.500.000.000	100	1.500.000.000	100	14.925.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				21.500.000.000		1.500.000.000		14.925.000.000		
						Jumlah alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1	21.500.000.000	1	1.500.000.000	104	14.925.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0020			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100		100		100			
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										
						Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	Unit	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan penunjang layanan keperawatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1		1		1			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
						Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Tugurejo	%	33		33		33		RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5		5			
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Orang	400		400		400			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
						Persentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Tugurejo	%	100		100		100		RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3		3		3			
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
						Jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3		3		3			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**300.265.481.000**		**300.705.121.000**		**356.376.137.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	85		85		85		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**300.265.481.000**		**300.705.121.000**		**356.376.137.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	300.265.481.000	90	90	90	356.376.137.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						300.265.481.000		300.705.121.000		356.376.137.000		
						Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	%	55.25	211.000.000.000	55.25	211.000.000.000	47.09	261.676.252.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		X.XX.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					211.000.000.000		211.000.000.000		261.676.252.000		
						Cost Recovery Rate Parsial	%	83.41	211.000.000.000	83.41	211.000.000.000	66.88	261.676.252.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				211.000.000.000		211.000.000.000		261.676.252.000		
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	6	211.000.000.000	6	211.000.000.000	6	261.676.252.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	89.265.481.000	100	89.705.121.000	100	94.699.885.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					89.265.481.000		89.265.481.000		94.260.245.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	89.265.481.000	1	89.265.481.000	1	94.260.245.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				89.265.481.000		89.265.481.000		94.260.245.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	765	89.265.481.000	765	89.265.481.000	832	94.260.245.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	2		2		2			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							439.640.000		439.640.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%				439.640.000	100	439.640.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						439.640.000		439.640.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			1	439.640.000	1	439.640.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	4500		4500		4500			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.9		2.9	3	2.9		Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90		90		91.11		RSUD dr. ADHYATMA, MPH	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100		100			
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11		11		11			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3		3		6			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**322.128.925.000**		**302.568.565.000**		**371.664.581.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi									**340.675.501.000**		**408.211.785.000**		**406.276.990.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap	%	67.88		67.88		67.88		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor								**172.116.330.000**		**226.712.114.000**		**227.147.904.000**		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	44.48	172.116.330.000	44.48	44	44.48	227.147.904.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						172.116.330.000		226.712.114.000		227.147.904.000		
						Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	6.212.367.000	100	6.212.367.000	100	5.371.297.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.212.367.000		6.212.367.000		5.371.297.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	8	6.212.367.000	8	6.212.367.000	9	5.371.297.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.0041			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.652.062.000		2.652.062.000		2.163.560.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	Dokumen	4	2.652.062.000	6	2.652.062.000	5	2.163.560.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				3.560.305.000		3.560.305.000		3.207.737.000		
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	4	3.560.305.000	4	3.560.305.000	4	3.207.737.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	41.68	59.161.042.000	41.68	81.796.042.000	41.68	80.848.748.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					59.161.042.000		81.796.042.000		80.848.748.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	Km	3.49	59.161.042.000	3.49	81.796.042.000	7.14	80.848.748.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Rehabilitasi Jalan										
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat	Km							SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Rekonstruksi Jalan										
						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat	Km							SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.03.10.1.01.003			Pembangunan Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Barat	m							SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Penggantian Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat	m							SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.003			Pemeliharaan Berkala Jalan										
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Barat	Km							SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				59.161.042.000		81.796.042.000		80.848.748.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat	Km	3.49	59.161.042.000	7.09	81.796.042.000	7.14	80.848.748.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		1.03.10.1.01.004			Pembangunan Jalan										
						Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Barat	Km	0		0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	47.5	68.135.780.000	47.5	92.955.780.000	47.5	93.237.360.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					68.135.780.000		92.955.780.000		93.237.360.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	Km	1	68.135.780.000	1	92.955.780.000	5.2	93.237.360.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.003			Rehabilitasi Jalan										
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Timur	Km							SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.003			Rekonstruksi Jalan										
						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur	Km							SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.003			Pembangunan Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dibangun di Wilayah Timur	m	0		0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.003			Penggantian Jembatan				58.090.000.000		46.190.000.000		44.810.242.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Timur	m	37.2	58.090.000.000	100	46.190.000.000	100	44.810.242.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.003			Pemeliharaan Berkala Jalan										
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala di Wilayah Timur	Km							SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				10.045.780.000		46.765.780.000		48.427.118.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur	Km	1	10.045.780.000	5	46.765.780.000	5.2	48.427.118.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.004			Pembangunan Jalan										
						Panjang Jalan yang Dibangun di Wilayah Timur	Km							SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
						Persentase panjang jalan yang dileger	%	75.79	583.380.000	75.79	583.380.000	75.79	495.651.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					583.380.000		583.380.000		495.651.000		
						Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N	Km	1386.03	583.380.000	1386.03	583.380.000	1386.03	495.651.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.004			Pengelolaan Leger Jalan				583.380.000		583.380.000		495.651.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	8	583.380.000	8	583.380.000	8	495.651.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	12.85	7.866.953.000	12.85	7.866.953.000	12.85	7.455.505.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					7.866.953.000		7.866.953.000		7.455.505.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	Unit	53	7.866.953.000	53	7.866.953.000	32	7.455.505.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.866.953.000		7.866.953.000		7.455.505.000		
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	1	425.000.000	1	425.000.000	1	374.123.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	31	2.366.953.000	31	2.366.953.000	31	2.367.661.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	Unit	5575	5.075.000.000	5575	5.075.000.000	5695	4.713.721.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	0		0		0		SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	24.301.808.000	100	31.307.592.000	100	33.898.493.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					24.301.808.000		31.307.592.000		33.898.493.000		
						Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	Dokumen	10	5.621.795.000	10	8.734.399.000	10	11.732.482.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan				1.000.000.000		4.112.604.000		3.096.055.000		
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan jembatan	m2	1000	1.000.000.000	3528	4.112.604.000	1765	3.096.055.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.0040			Pelebaran Jalan Menuju Standar				4.621.795.000		4.621.795.000		8.636.427.000		
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	1690	4.621.795.000	1690	4.621.795.000	4968.72	8.636.427.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
						Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan	Dokumen	13	18.680.013.000	13	22.573.193.000	13	22.166.011.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
		1.03.10.1.01.0024			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				7.434.889.000		11.185.089.000		10.492.907.000		
						Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	Dokumen	32	7.434.889.000	36	11.185.089.000	36	10.492.907.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.401.136.000		3.401.136.000		3.537.551.000		
						Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	m	0.05	3.401.136.000	0.05	3.401.136.000	50	3.537.551.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.843.988.000		7.986.968.000		8.135.553.000		
						Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Km	0.45	7.843.988.000	0.45	7.986.968.000	0.45	8.135.553.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	31.88	5.855.000.000	31.88	5.990.000.000	31.88	5.840.850.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.855.000.000		5.990.000.000		5.840.850.000		
						Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	Sertifikat	1100	5.855.000.000	1100	5.990.000.000	1100	5.840.850.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
		1.03.10.1.01.0028			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				5.855.000.000		5.990.000.000		5.840.850.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	0		0		0		SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	2	354.000.000	2	354.000.000	2	354.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah pemeliharaan alat uji	Unit	60	204.000.000	60	204.000.000	60	329.600.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah penambahan alat uji	Unit	6	4.068.000.000	6	4.068.000.000	6	4.043.850.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	60	789.000.000	60	924.000.000	60	692.300.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Sertifikat	1100	440.000.000	1100	440.000.000	1100	421.100.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap								**168.559.171.000**		**181.499.671.000**		**179.129.086.000**		
						Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	91.18	20.468.795.000	91.18	91	83.38	21.137.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						20.468.795.000		20.898.795.000		21.137.500.000		
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	83.65	1.435.910.000	83.65	1.435.910.000	87.57	1.640.035.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.435.910.000		1.435.910.000		1.640.035.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	m	2871.82	1.435.910.000	2871.82	1.435.910.000	2871.82	1.640.035.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.002			Rehabilitasi Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Cilacap	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.002 6			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.435.910.000		1.435.910.000		1.640.035.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap	m	2871.82	1.435.910.000	2871.82	1.435.910.000	2871.82	1.640.035.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.03.10.1.01.002			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Cilacap	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	93.65	1.082.400.000	93.65	1.082.400.000	71.44	1.075.509.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.082.400.000		1.082.400.000		1.075.509.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	m	2164.8	1.082.400.000	2164.8	1.082.400.000	2164.8	1.075.509.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.002			Rehabilitasi Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Magelang	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.002 6			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.082.400.000		1.082.400.000		1.075.509.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang	m	2164.8	1.082.400.000	2164.8	1.082.400.000	2164.8	1.075.509.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.002			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Magelang	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	93.82	3.365.975.000	93.82	3.365.975.000	87.66	3.326.977.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.365.975.000		3.365.975.000		3.326.977.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	m	2482.95	3.365.975.000	2482.95	3.365.975.000	2482.95	3.326.977.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.002			Rehabilitasi Jembatan				2.128.000.000		2.128.000.000		2.101.229.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pati	m	7	2.128.000.000	7	2.128.000.000	7	2.101.229.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.002 6			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.237.975.000		1.237.975.000		1.225.748.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati	m	2475.95	1.237.975.000	2475.95	1.237.975.000	2475.95	1.225.748.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pati	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	88.49	1.452.510.000	88.49	1.452.510.000	86.19	1.813.154.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.452.510.000		1.452.510.000		1.813.154.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan	m	2905.02	1.452.510.000	2905.02	1.452.510.000	2905.02	1.813.154.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pekalongan	m	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.452.510.000		1.452.510.000		1.813.154.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan	m	2905.02	1.452.510.000	2905.02	1.452.510.000	2905.02	1.813.154.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Pekalongan	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	91.18	3.838.590.000	91.18	3.838.590.000	67.34	3.757.544.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.838.590.000		3.838.590.000		3.757.544.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	m	3682.18	3.838.590.000	3682.18	3.838.590.000	3682.18	3.757.544.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				2.028.000.000		2.028.000.000		1.959.188.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi	m	61	2.028.000.000	61	2.028.000.000	61	1.959.188.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.810.590.000		1.810.590.000		1.798.356.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi	m	3621.18	1.810.590.000	3621.18	1.810.590.000	3621.18	1.798.356.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Purwodadi	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85.51	2.213.975.000	85.51	2.643.975.000	85.47	2.620.089.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.213.975.000		2.643.975.000		2.620.089.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	m	1781.95	2.213.975.000	1781.95	2.643.975.000	1781.95	2.620.089.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				1.328.000.000		1.758.000.000		1.736.554.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Semarang	m	10	1.328.000.000	10	1.758.000.000	10	1.736.554.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				885.975.000		885.975.000		883.535.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang	m	1771.95	885.975.000	1771.95	885.975.000	1771.95	883.535.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Semarang	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	94.78	4.397.800.000	94.78	4.397.800.000	91.47	4.319.919.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.397.800.000		4.397.800.000		4.319.919.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	m	4942.6	4.397.800.000	4942.6	4.397.800.000	4942.6	4.319.919.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				1.928.000.000		1.928.000.000		1.885.699.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Surakarta	m	3	1.928.000.000	3	1.928.000.000	3	1.885.699.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.469.800.000		2.469.800.000		2.434.220.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta	m	4939.6	2.469.800.000	4939.6	2.469.800.000	4939.6	2.434.220.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Surakarta	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	86.14	1.018.500.000	86.14	1.018.500.000	77.37	952.262.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.018.500.000		1.018.500.000		952.262.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal	m	2037	1.018.500.000	2037	1.018.500.000	2037	952.262.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Tegal	m	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.018.500.000		1.018.500.000		952.262.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal	m	2037	1.018.500.000	2037	1.018.500.000	2037	952.262.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	94.9	1.663.135.000	94.9	1.663.135.000	92.66	1.632.011.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.663.135.000		1.663.135.000		1.632.011.000		
						Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	m	2092.57	1.663.135.000	2092.57	1.663.135.000	2092.57	1.632.011.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0025			Rehabilitasi Jembatan				628.000.000		628.000.000		615.761.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo	m	22.3	628.000.000	22.3	628.000.000	22.3	615.761.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0026			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.035.135.000		1.035.135.000		1.016.250.000		
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo	m	2070.27	1.035.135.000	2070.27	1.035.135.000	2070.27	1.016.250.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0029			Pelebaran Jembatan										
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran di Wilayah Tegal Wonosobo	m							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaaan mantap	%	91.29	148.090.376.000	91.29	91	91.29	157.991.586.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						148.090.376.000		160.600.876.000		157.991.586.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	89.43	10.129.976.000	89.43	11.952.476.000	91.86	11.618.125.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.129.976.000		11.952.476.000		11.618.125.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Km	206.24	10.129.976.000	206.24	11.952.476.000	206.24	11.618.125.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.234.000.000		3.746.000.000		3.736.635.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km	1.34	2.234.000.000	2.34	3.746.000.000	2.34	3.736.635.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.895.976.000		8.206.476.000		7.881.490.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	Km	204.9	7.895.976.000	203.9	8.206.476.000	203.9	7.881.490.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	94.17	10.748.200.000	94.17	15.468.200.000	92.01	15.361.052.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.748.200.000		15.468.200.000		15.361.052.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	261.08	10.748.200.000	261.08	15.468.200.000	261.08	15.361.052.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				1.674.000.000		6.286.000.000		6.229.172.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	Km	1.1	1.674.000.000	3.5	6.286.000.000	3.5	6.229.172.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.074.200.000		9.182.200.000		9.131.880.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	Km	259.98	9.074.200.000	257.58	9.182.200.000	257.58	9.131.880.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	88.12	10.821.800.000	88.12	14.373.800.000	88.03	14.216.839.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.821.800.000		14.373.800.000		14.216.839.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	249.26	10.821.800.000	249.26	14.373.800.000	249.26	14.216.839.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				1.524.000.000		4.536.000.000		4.462.409.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km	1	1.524.000.000	1.4	4.536.000.000	1.4	4.462.409.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.297.800.000		9.837.800.000		9.754.430.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	Km	248.26	9.297.800.000	246.86	9.837.800.000	246.86	9.754.430.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	85.23	14.704.200.000	85.23	14.484.200.000	91.44	13.930.553.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.704.200.000		14.484.200.000		13.930.553.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	254.16	14.704.200.000	254.16	14.484.200.000	254.16	13.930.553.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				4.036.000.000		3.411.000.000		3.373.960.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km	2	4.036.000.000	2	3.411.000.000	2	3.373.960.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				10.668.200.000		11.073.200.000		10.556.593.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan	Km	252.16	10.668.200.000	251.16	11.073.200.000	251.16	10.556.593.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	86.78	21.848.200.000	86.78	22.010.200.000	89.13	22.133.758.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					21.848.200.000		22.010.200.000		22.133.758.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	379.69	21.848.200.000	379.69	22.010.200.000	379.69	22.133.758.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				4.024.000.000		4.024.000.000		3.973.885.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km	0.6	4.024.000.000	0.6	4.024.000.000	0.6	3.973.885.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				17.824.200.000		17.986.200.000		18.159.873.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	379.09	17.824.200.000	378.09	17.986.200.000	378.09	18.159.873.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	99.95	14.858.450.000	99.95	15.225.450.000	93.29	14.867.071.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.858.450.000		15.225.450.000		14.867.071.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	220.38	14.858.450.000	220.38	15.225.450.000	223.18	14.867.071.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				5.966.000.000		5.536.000.000		5.409.832.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang	Km	1.65	5.966.000.000	31.1	5.536.000.000	3.1	5.409.832.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Semarang	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.892.450.000		9.689.450.000		9.457.239.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	Km	218.68	8.892.450.000	220.08	9.689.450.000	220.08	9.457.239.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	93.17	32.673.250.000	93.17	33.294.250.000	91.56	32.467.296.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					32.673.250.000		33.294.250.000		32.467.296.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	414.11	32.673.250.000	414.11	33.294.250.000	413.11	32.467.296.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				19.314.000.000		19.314.000.000		18.717.837.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km	11.6	19.314.000.000	11.6	19.314.000.000	11.6	18.717.837.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				13.359.250.000		13.980.250.000		13.749.459.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	Km	402.51	13.359.250.000	401.51	13.980.250.000	401.51	13.749.459.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	95.52	15.153.700.000	95.52	16.464.200.000	93.57	16.409.733.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.153.700.000		16.464.200.000		16.409.733.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	201.84	15.153.700.000	201.84	16.464.200.000	199.7	16.409.733.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				8.047.000.000		9.047.000.000		8.942.733.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	Km	0.1	3.000.000.000	0.1	4.000.000.000	0.1	3.896.479.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	Km	2	5.047.000.000	2	5.047.000.000	1	5.046.254.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	Km							SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.106.700.000		7.417.200.000		7.467.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	Km	199.84	7.106.700.000	198.7	7.417.200.000	198.7	7.467.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	91.61	17.152.600.000	91.61	17.328.100.000	92.51	16.987.159.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
		1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi					17.152.600.000		17.328.100.000		16.987.159.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	248.56	17.152.600.000	248.56	17.328.100.000	246.21	16.987.159.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				7.558.000.000		7.558.000.000		7.316.382.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	5	7.558.000.000	5	7.558.000.000	5	7.316.382.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	Km	0		0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0033			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.594.600.000		9.770.100.000		9.670.777.000		
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	243.56	9.594.600.000	241.21	9.770.100.000	241.21	9.670.777.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**116.428.954.000**		**116.705.614.000**		**109.807.055.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	60		60		60		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**115.688.954.000**		**115.965.614.000**		**109.067.055.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95.8	115.688.954.000	95.8	96	92.25	109.067.055.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						115.688.954.000		115.965.614.000		109.067.055.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.679.091.000	100	1.679.091.000	100	1.661.218.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					263.010.000		263.010.000		263.010.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	263.010.000	100	263.010.000	100	263.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.500.000		9.500.000		9.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	42.500.000	1	42.500.000	1	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.550.000		7.550.000		7.550.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	7.550.000	1	7.550.000	1	7.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.960.000		29.960.000		29.960.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	29.960.000	2	29.960.000	2	29.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	3.500.000	672	3.500.000	672	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		170.000.000		170.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					547.371.000		547.371.000		529.498.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	547.371.000	26	547.371.000	26	529.498.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.500.000		121.500.000		121.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	121.500.000	12	121.500.000	12	121.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				421.871.000		421.871.000		403.998.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	421.871.000	2	421.871.000	2	403.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					868.710.000		868.710.000		868.710.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	65	868.710.000	65	868.710.000	65	868.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.710.000		144.710.000		144.710.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	144.710.000	6	144.710.000	6	144.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	600.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				124.000.000		124.000.000		124.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	51	124.000.000	51	124.000.000	51	124.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	96.916.364.000	100	97.193.024.000	100	90.515.008.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					81.419.826.000		81.419.826.000		74.567.193.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	45	81.419.826.000	45	81.419.826.000	45	74.567.193.000	SUBBAG KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				78.965.506.000		78.965.506.000		72.112.873.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	477	78.965.506.000	477	78.965.506.000	477	72.112.873.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.014.320.000		2.014.320.000		2.014.320.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.014.320.000	12	2.014.320.000	12	2.014.320.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				440.000.000		440.000.000		440.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	19	440.000.000	19	440.000.000	19	440.000.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					558.000.000		558.000.000		314.576.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13	558.000.000	13	558.000.000	13	314.576.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				558.000.000		558.000.000		314.576.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	13	558.000.000	13	558.000.000	13	314.576.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					657.250.000		933.910.000		933.910.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	657.250.000	100	933.910.000	100	933.910.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						276.660.000		276.660.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		477	276.660.000	477	276.660.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				657.250.000		657.250.000		657.250.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	590	657.250.000	590	657.250.000	590	657.250.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.588.750.000		2.588.750.000		3.087.069.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.588.750.000	100	2.588.750.000	100	3.087.069.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.360.000		116.360.000		122.360.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	116.360.000	1	116.360.000	1	122.360.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				455.140.000		455.140.000		455.140.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	455.140.000	1	455.140.000	1	455.140.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				84.000.000		84.000.000		84.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				21.000.000		21.000.000		21.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2172	21.000.000	2172	21.000.000	2172	21.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.737.350.000		1.737.350.000		2.229.669.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.737.350.000	12	1.737.350.000	12	2.229.669.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				85.900.000		85.900.000		85.900.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	85.900.000	1	85.900.000	1	85.900.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				69.000.000		69.000.000		69.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	69.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.399.660.000		4.399.660.000		5.006.920.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	565	4.399.660.000	565	4.399.660.000	586	5.006.920.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.303.500.000		1.303.500.000		1.303.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	438	1.303.500.000	438	1.303.500.000	438	1.303.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.096.160.000		3.096.160.000		3.703.420.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	127	3.096.160.000	127	3.096.160.000	148	3.703.420.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.609.278.000		4.609.278.000		3.881.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	50	4.609.278.000	50	4.609.278.000	50	3.881.740.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.750.000.000		1.750.000.000		1.580.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.750.000.000	12	1.750.000.000	12	1.580.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.835.278.000		2.835.278.000		2.277.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	26	2.835.278.000	26	2.835.278.000	26	2.277.740.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.683.600.000		2.683.600.000		2.723.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	438	2.683.600.000	438	2.683.600.000	442	2.723.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.233.600.000		1.233.600.000		1.263.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	1.233.600.000	30	1.233.600.000	30	1.263.600.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800.000.000		800.000.000		800.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				650.000.000		650.000.000		660.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	405	650.000.000	405	650.000.000	410	660.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.160.950.000	100	1.160.950.000	100	1.156.106.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					292.500.000		292.500.000		311.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	292.500.000	100	292.500.000	100	311.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.000.000		39.000.000		39.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	39.000.000	2	39.000.000	2	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	336	2.500.000	336	2.500.000	336	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		175.000.000		194.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	175.000.000	12	175.000.000	12	194.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					476.244.000		476.244.000		472.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	476.244.000	26	476.244.000	26	472.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		8.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	8.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				93.000.000		93.000.000		88.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	93.000.000	12	93.000.000	12	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				377.244.000		377.244.000		376.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	377.244.000	2	377.244.000	2	376.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					392.206.000		392.206.000		372.356.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	392.206.000	33	392.206.000	33	372.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.206.000		127.206.000		125.356.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	127.206.000	7	127.206.000	7	125.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000		230.000.000		226.200.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	230.000.000	2	230.000.000	2	226.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		20.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	24	35.000.000	24	35.000.000	24	20.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.901.355.000	100	1.901.355.000	100	1.900.148.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.388.000		254.388.000		254.388.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	254.388.000	100	254.388.000	100	254.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.128.000		7.128.000		7.128.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.128.000	1	7.128.000	1	7.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.480.000		33.480.000		33.480.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	33.480.000	1	33.480.000	1	33.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		10.800.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.800.000	1	10.800.000	1	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.480.000		33.480.000		33.480.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	33.480.000	2	33.480.000	2	33.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167.000.000		167.000.000		167.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	167.000.000	12	167.000.000	12	167.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					558.087.000		558.087.000		556.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	558.087.000	26	558.087.000	26	556.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		5.400.000		5.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.400.000	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	105.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				447.687.000		447.687.000		446.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	447.687.000	2	447.687.000	2	446.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.088.880.000		1.088.880.000		1.088.880.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	93	1.088.880.000	93	1.088.880.000	93	1.088.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.600.000		129.600.000		129.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	129.600.000	6	129.600.000	6	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				900.000.000		900.000.000		900.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				59.280.000		59.280.000		59.280.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	85	59.280.000	85	59.280.000	85	59.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.325.778.000	100	2.325.778.000	100	2.296.885.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					344.000.000		344.000.000		344.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	344.000.000	100	344.000.000	100	344.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.500.000		12.500.000		12.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.000.000		52.000.000		52.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.500.000		43.500.000		43.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	43.500.000	2	43.500.000	2	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	6.000.000	672	6.000.000	672	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				216.000.000		216.000.000		216.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	216.000.000	12	216.000.000	12	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.105.258.000		1.105.258.000		1.088.956.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.105.258.000	26	1.105.258.000	26	1.088.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.000.000		181.000.000		181.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	181.000.000	12	181.000.000	12	181.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				918.258.000		918.258.000		901.956.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	918.258.000	2	918.258.000	2	901.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					876.520.000		876.520.000		863.929.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	76	876.520.000	76	876.520.000	76	863.929.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.660.000		152.660.000		152.660.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	152.660.000	10	152.660.000	10	152.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				650.000.000		650.000.000		637.409.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	650.000.000	6	650.000.000	6	637.409.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				73.860.000		73.860.000		73.860.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	60	73.860.000	60	73.860.000	60	73.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.985.207.000	100	1.985.207.000	100	1.973.372.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					217.300.000		217.300.000		217.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	217.300.000	100	217.300.000	100	217.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.800.000		8.800.000		8.800.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.800.000	1	8.800.000	1	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.500.000		60.500.000		60.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	60.500.000	1	60.500.000	1	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.500.000		16.500.000		16.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.500.000		27.500.000		27.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	27.500.000	2	27.500.000	2	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	384	4.000.000	384	4.000.000	384	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					670.602.000		670.602.000		655.044.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	670.602.000	26	670.602.000	26	655.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		170.000.000		155.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	170.000.000	12	170.000.000	12	155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				492.602.000		492.602.000		492.044.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	492.602.000	2	492.602.000	2	492.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.097.305.000		1.097.305.000		1.101.028.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	58	1.097.305.000	58	1.097.305.000	58	1.101.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.805.000		150.805.000		165.805.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	150.805.000	8	150.805.000	8	165.805.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				900.000.000		900.000.000		888.723.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	900.000.000	4	900.000.000	4	888.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.500.000		46.500.000		46.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	46	46.500.000	46	46.500.000	46	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.891.093.000	100	1.891.093.000	100	1.868.620.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					315.000.000		315.000.000		296.640.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	315.000.000	100	315.000.000	100	296.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	702	8.000.000	702	8.000.000	702	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		181.640.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	181.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					624.093.000		624.093.000		619.980.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	624.093.000	26	624.093.000	26	619.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				520.593.000		520.593.000		516.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	520.593.000	2	520.593.000	2	516.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					952.000.000		952.000.000		952.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	77	952.000.000	77	952.000.000	77	952.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.000.000		107.000.000		107.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	107.000.000	12	107.000.000	12	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				750.000.000		750.000.000		750.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	55	95.000.000	55	95.000.000	55	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.243.632.000	100	1.243.632.000	100	1.241.458.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					226.500.000		226.500.000		237.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	226.500.000	100	226.500.000	100	237.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.500.000		14.500.000		14.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	14.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.500.000		34.500.000		34.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	34.500.000	1	34.500.000	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	33.000.000	2	33.000.000	2	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		130.000.000		141.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	130.000.000	12	130.000.000	12	141.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					441.532.000		441.532.000		432.958.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	441.532.000	26	441.532.000	26	432.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.200.000		65.200.000		58.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	65.200.000	12	65.200.000	12	58.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				373.832.000		373.832.000		371.658.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	373.832.000	2	373.832.000	2	371.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					575.600.000		575.600.000		570.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	575.600.000	41	575.600.000	41	570.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.600.000		150.600.000		145.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	150.600.000	8	150.600.000	8	145.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				380.000.000		380.000.000		380.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	380.000.000	3	380.000.000	3	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	45.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.665.051.000	100	1.665.051.000	100	1.619.198.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					314.800.000		314.800.000		314.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	314.800.000	100	314.800.000	100	314.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.000.000		26.000.000		26.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	720	3.500.000	720	3.500.000	720	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181.300.000		181.300.000		181.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	181.300.000	12	181.300.000	12	181.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					760.251.000		760.251.000		722.488.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	760.251.000	26	760.251.000	26	722.488.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.600.000		114.600.000		114.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	114.600.000	12	114.600.000	12	114.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				638.651.000		638.651.000		600.888.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	638.651.000	2	638.651.000	2	600.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					590.000.000		590.000.000		581.910.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	590.000.000	56	590.000.000	56	581.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		140.000.000		140.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	140.000.000	6	140.000.000	6	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000		391.910.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	400.000.000	2	400.000.000	2	391.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.361.518.000	100	2.361.518.000	100	2.349.545.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					321.000.000		321.000.000		321.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	321.000.000	100	321.000.000	100	321.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.000.000		13.000.000		13.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.000.000		16.000.000		16.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	336	2.000.000	336	2.000.000	336	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190.000.000		190.000.000		190.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.187.658.000		1.187.658.000		1.181.685.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.187.658.000	26	1.187.658.000	26	1.181.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				962.658.000		962.658.000		956.685.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	962.658.000	2	962.658.000	2	956.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					852.860.000		852.860.000		846.860.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	852.860.000	47	852.860.000	47	846.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.300.000		125.300.000		125.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	125.300.000	7	125.300.000	7	125.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				660.000.000		660.000.000		654.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	660.000.000	2	660.000.000	2	654.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.560.000		67.560.000		67.560.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	36	67.560.000	36	67.560.000	36	67.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.718.698.000	100	1.718.698.000	100	1.681.690.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					207.500.000		207.500.000		228.240.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	207.500.000	100	207.500.000	100	228.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	2.500.000	672	2.500.000	672	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		120.740.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	120.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.220.098.000		1.220.098.000		1.128.402.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.220.098.000	26	1.220.098.000	26	1.128.402.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.750.000		2.750.000		750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.750.000	12	2.750.000	12	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				238.800.000		238.800.000		183.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	238.800.000	12	238.800.000	12	183.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				978.548.000		978.548.000		944.352.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	978.548.000	2	978.548.000	2	944.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.100.000		291.100.000		325.048.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	61	291.100.000	61	291.100.000	61	325.048.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.300.000		133.300.000		134.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	133.300.000	11	133.300.000	11	134.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		132.948.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	132.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.800.000		57.800.000		57.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	49	57.800.000	49	57.800.000	49	57.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	840.217.000	100	840.217.000	100	803.807.000	Balai Jasa Konstruksi	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					139.500.000		139.500.000		139.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	139.500.000	100	139.500.000	100	139.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.400.000		8.400.000		8.400.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.400.000		8.400.000		8.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.600.000		2.600.000		2.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	672	3.500.000	672	3.500.000	672	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.600.000		81.600.000		81.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	81.600.000	12	81.600.000	12	81.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					525.717.000		525.717.000		491.086.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	525.717.000	26	525.717.000	26	491.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		1.600.000		1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.200.000		85.200.000		85.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	85.200.000	12	85.200.000	12	85.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				438.917.000		438.917.000		404.286.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	438.917.000	2	438.917.000	2	404.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					175.000.000		175.000.000		173.221.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	43	175.000.000	43	175.000.000	43	173.221.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		98.221.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	98.221.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	38	25.000.000	38	25.000.000	38	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**740.000.000**		**740.000.000**		**740.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.1	740.000.000	3.1	3	3.1	740.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						740.000.000		740.000.000		740.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	740.000.000	100	740.000.000	100	740.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					740.000.000		740.000.000		740.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	740.000.000	100	740.000.000	100	740.000.000	SUBBAG PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				420.000.000		420.000.000		420.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	21	420.000.000	21	420.000.000	21	420.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000		320.000.000		320.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	45	320.000.000	45	320.000.000	45	320.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (IRB)									**22.747.423.000**		**22.747.423.000**		**21.231.375.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	33.6		33.6		33.6		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah								**22.747.423.000**		**22.747.423.000**		**21.231.375.000**		
						Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	49.42	22.747.423.000	49.42	49	49.42	21.231.375.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						18.699.123.000		18.699.123.000		17.204.626.000		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5.83	18.195.000.000	5.83	18.195.000.000	5.83	16.738.438.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
		1.03.08.1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					18.195.000.000		18.195.000.000		16.738.438.000		
						Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N	Lokasi	60	18.195.000.000	60	18.195.000.000	60	16.738.438.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.08.1.01.0012			Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				150.000.000		150.000.000		133.682.000		
						Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat	Orang	160	100.000.000	160	100.000.000	160	89.600.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara	Orang	80	50.000.000	80	50.000.000	80	44.082.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.0018			Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				180.000.000		180.000.000		192.000.000		
						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	60	180.000.000	60	180.000.000	60	192.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				17.865.000.000		17.865.000.000		16.412.756.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	2	17.865.000.000	2	17.865.000.000	7	16.412.756.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi
						Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11.94	504.123.000	11.94	504.123.000	11.94	466.188.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
		1.03.08.1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					504.123.000		504.123.000		466.188.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n	Lokasi	123	504.123.000	123	504.123.000	123	466.188.000		
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				504.123.000		504.123.000		466.188.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n	Dokumen	1	504.123.000	1	504.123.000	1	466.188.000		OPD Provinsi
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						4.048.300.000		4.048.300.000		4.026.749.000		
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	45.38	200.000.000	45.38	200.000.000	45.38	182.654.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
		1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					200.000.000		200.000.000		182.654.000		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	182.654.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.11.1.01.0012			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200.000.000		200.000.000		182.654.000		
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	320	200.000.000	320	200.000.000	320	182.654.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	43.49	3.848.300.000	43.49	3.848.300.000	43.49	3.844.095.000	Balai Jasa Konstruksi	
		1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					2.635.445.000		2.635.445.000		2.635.445.000		
						Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	Orang	10579	2.635.445.000	10579	2.635.445.000	10579	2.635.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.01.0011			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.467.445.000		1.467.445.000		1.467.445.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Orang	1600	1.467.445.000	1600	1.467.445.000	1600	1.467.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.11.1.01.0014			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				1.168.000.000		1.168.000.000		1.168.000.000		
						Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	800	1.168.000.000	800	1.168.000.000	800	1.168.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					750.000.000		750.000.000		745.795.000		
						Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Kegiatan	5	750.000.000	5	750.000.000	5	745.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.03.11.1.02.0008			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				650.000.000		650.000.000		645.795.000		
						Jumlah Data Dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	2	218.900.000	2	218.900.000	2	217.021.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Buah	125	25.000.000	125	25.000.000	125	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Kegiatan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	47.674.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	Unit	4	356.100.000	4	356.100.000	4	356.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					462.855.000		462.855.000		462.855.000		
						Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Dokumen	1	462.855.000	1	462.855.000	1	462.855.000		
		1.03.11.1.03.0006			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				462.855.000		462.855.000		462.855.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	4	462.855.000	4	462.855.000	4	462.855.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (LH)									**63.844.279.000**		**69.173.279.000**		**68.675.833.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	33.6		33.6		33.6		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								**63.844.279.000**		**69.173.279.000**		**68.675.833.000**		
						Persentase akses air minum aman	%	40.43	63.844.279.000	40.43	40	40.43	68.675.833.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						63.844.279.000		69.173.279.000		68.675.833.000		
						Persentase akses air minum layak	%	91.92	3.844.274.000	91.92	4.033.274.000	91.92	3.863.084.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
		1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					3.844.274.000		4.033.274.000		3.863.084.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	Orang	33760434	3.844.274.000	33760434	4.033.274.000	33760434	3.863.084.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0015			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2.386.184.000		2.386.184.000		2.256.494.000		
						Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	Dokumen	4	2.386.184.000	4	2.386.184.000	4	2.256.494.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.03.1.01.0016			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1.458.090.000		1.647.090.000		1.606.590.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota	29	1.458.090.000	29	1.647.090.000	35	1.606.590.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	60.000.005.000	100	65.140.005.000	100	64.812.749.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
		1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					60.000.005.000		65.140.005.000		64.812.749.000		
						Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	Liter	20	60.000.005.000	20	65.140.005.000	125	64.812.749.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				60.000.005.000		65.140.005.000		64.812.749.000		
						Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter	120	60.000.005.000	125	65.140.005.000	125	64.812.749.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik)	Liter	0		0		0		SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (PE)									**17.239.623.000**		**24.994.123.000**		**23.616.121.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	33.6		33.6		33.6		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman								**2.978.123.000**		**3.072.623.000**		**2.621.131.000**		
						Persentase akses air limbah domestik aman	%	10.97	2.978.123.000	10.97	11	10.97	2.621.131.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.978.123.000		3.072.623.000		2.621.131.000		
						Persentase akses air limbah domestik layak	%	93.58	2.978.123.000	93.58	3.072.623.000	93.58	2.621.131.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
		1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					2.978.123.000		3.072.623.000		2.621.131.000		
						Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N	Orang	34724662	2.978.123.000	34724662	3.072.623.000	34724662	2.621.131.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
		1.03.05.1.01.001 3			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				2.024.000.000		2.024.000.000		1.660.853.000		
						Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	RT/KK	0		0		0		SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi
						Kapasitas pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (m3)	m3	35	2.024.000.000	35	2.024.000.000	35	1.660.853.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	m2							SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	
		1.03.05.1.01.001 4			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				954.123.000		1.048.623.000		960.278.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)	Kabupaten/ Kota	18	954.123.000	16	1.048.623.000	16	960.278.000	SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.05.1.01.001 5			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										
						Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen	0		0		0		SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Akses Air Minum Aman								**14.261.500.000**		**21.921.500.000**		**20.994.990.000**		
						Persentase akses air minum aman	%	40.43	14.261.500.000	40.43	40	40.43	20.994.990.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						14.261.500.000		21.921.500.000		20.994.990.000		
						Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	54.32	14.261.500.000	54.32	21.921.500.000	54.32	20.994.990.000	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	
		1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					14.261.500.000		21.921.500.000		20.994.990.000		
						Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	Orang	19950683	14.261.500.000	19950683	21.921.500.000	19950683	20.994.990.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.001 7			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				14.261.500.000		21.921.500.000		20.994.990.000		
						Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa	Lokasi	25	14.261.500.000	40	21.921.500.000	40	20.994.990.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi
JUMLAH									**560.935.780.000**		**641.832.224.000**		**629.607.374.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**94.856.617.000**		**95.143.717.000**		**91.731.208.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	31.45		31.45		31.45		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								**93.756.617.000**		**94.043.717.000**		**90.686.208.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	93.756.617.000	85	85	85	90.686.208.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						93.756.617.000		94.043.717.000		90.686.208.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	674.142.000	100	674.142.000	100	674.142.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.698.000		70.698.000		70.698.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.698.000	100	70.698.000	100	70.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.514.000		23.514.000		23.514.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	23.514.000	4	23.514.000	4	23.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.584.000		1.584.000		1.584.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	1.584.000	12	1.584.000	12	1.584.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.600.000		6.600.000		6.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	7	6.600.000	7	6.600.000	7	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					307.849.000		307.849.000		307.849.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	307.849.000	26	307.849.000	26	307.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				849.000		849.000		849.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	849.000	2	849.000	2	849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.000.000		199.000.000		199.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	199.000.000	12	199.000.000	12	199.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108.000.000		108.000.000		108.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	108.000.000	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					295.595.000		295.595.000		295.595.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	295.595.000	37	295.595.000	37	295.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.752.000		142.752.000		142.752.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	24	142.752.000	24	142.752.000	24	142.752.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106.493.000		106.493.000		106.493.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	106.493.000	3	106.493.000	3	106.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.350.000		46.350.000		46.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	46.350.000	10	46.350.000	10	46.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	739.202.000	100	739.202.000	100	773.202.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					68.150.000		68.150.000		76.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	68.150.000	100	68.150.000	100	76.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.128.000		19.128.000		19.128.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	19.128.000	4	19.128.000	4	19.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.041.000		15.041.000		15.041.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	15.041.000	12	15.041.000	12	15.041.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.061.000		3.061.000		3.061.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.061.000	12	3.061.000	12	3.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.130.000		11.130.000		11.130.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	6	11.130.000	6	11.130.000	6	11.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.790.000		19.790.000		27.790.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	24	19.790.000	24	19.790.000	24	27.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.220.000		290.220.000		282.220.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	290.220.000	27	290.220.000	27	282.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				912.000		912.000		912.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	912.000	3	912.000	3	912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.980.000		202.980.000		194.980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	202.980.000	12	202.980.000	12	194.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.328.000		86.328.000		86.328.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	86.328.000	12	86.328.000	12	86.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					380.832.000		380.832.000		414.832.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	90	380.832.000	90	380.832.000	90	414.832.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.200.000		146.200.000		180.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	146.200.000	21	146.200.000	21	180.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				127.250.000		127.250.000		127.250.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	127.250.000	3	127.250.000	1	127.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				107.382.000		107.382.000		107.382.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	67	107.382.000	67	107.382.000	67	107.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	469.653.000	100	469.653.000	100	469.653.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.266.000		77.266.000		93.266.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.266.000	100	77.266.000	100	93.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.575.000		17.575.000		23.575.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	17.575.000	2	17.575.000	2	23.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.825.000		13.825.000		13.825.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	14	13.825.000	14	13.825.000	14	13.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.200.000		2.200.000		2.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.200.000	12	2.200.000	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.353.000		6.353.000		6.353.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3	6.353.000	3	6.353.000	3	6.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.313.000		37.313.000		47.313.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	37.313.000	12	37.313.000	12	47.313.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					187.588.000		187.588.000		169.588.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	15	187.588.000	15	187.588.000	15	169.588.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				838.000		838.000		838.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	838.000	2	838.000	2	838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.100.000		122.100.000		104.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	122.100.000	12	122.100.000	12	104.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				64.650.000		64.650.000		64.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	64.650.000	1	64.650.000	1	64.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					204.799.000		204.799.000		206.799.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	32	204.799.000	32	204.799.000	32	206.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.450.000		86.450.000		88.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	86.450.000	20	86.450.000	20	88.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.349.000		48.349.000		48.349.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	48.349.000	9	48.349.000	9	48.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	798.698.000	100	798.698.000	100	798.698.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.672.000		72.672.000		72.672.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	72.672.000	100	72.672.000	100	72.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.500.000		22.500.000		22.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.392.000		4.392.000		4.392.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.392.000	12	4.392.000	12	4.392.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.780.000		8.780.000		8.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	10	8.780.000	10	8.780.000	10	8.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.000.000		17.000.000		17.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					246.179.000		246.179.000		226.633.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	25	246.179.000	25	246.179.000	25	226.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.179.000		1.179.000		1.179.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.179.000	1	1.179.000	1	1.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.000.000		185.000.000		185.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				60.000.000		60.000.000		40.454.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	40.454.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					479.847.000		479.847.000		499.393.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	479.847.000	60	479.847.000	60	499.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.000.000		165.000.000		165.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	165.000.000	27	165.000.000	27	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				260.637.000		260.637.000		280.183.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	260.637.000	2	260.637.000	2	280.183.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.210.000		54.210.000		54.210.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	31	54.210.000	31	54.210.000	31	54.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	581.883.000	100	581.883.000	100	587.883.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					106.361.000		106.361.000		106.361.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	106.361.000	100	106.361.000	100	106.361.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.672.000		19.672.000		19.672.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	19.672.000	1	19.672.000	1	19.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.809.000		15.809.000		15.809.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.809.000	1	15.809.000	1	15.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.380.000		8.380.000		8.380.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	8.380.000	1	8.380.000	1	8.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					218.458.000		218.458.000		219.958.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	218.458.000	3	218.458.000	3	219.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				958.000		958.000		958.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	958.000	1	958.000	1	958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		120.000.000		121.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	121.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				97.500.000		97.500.000		97.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	97.500.000	1	97.500.000	1	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					257.064.000		257.064.000		261.564.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	49	257.064.000	49	257.064.000	49	261.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.580.000		117.580.000		117.580.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	117.580.000	30	117.580.000	30	117.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.768.000		68.768.000		68.268.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	68.768.000	1	68.768.000	1	68.268.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.716.000		70.716.000		75.716.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	70.716.000	25	70.716.000	25	75.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal	%	100	997.495.000	100	997.495.000	100	968.705.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.900.000		104.900.000		104.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	104.900.000	100	104.900.000	100	104.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.000.000		38.000.000		38.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	24	3.000.000	24	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.900.000		34.900.000		34.900.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	34.900.000	36	34.900.000	36	34.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.200.000		430.200.000		412.240.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	430.200.000	1	430.200.000	1	412.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.000.000		254.000.000		236.040.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	254.000.000	12	254.000.000	12	236.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					462.395.000		462.395.000		451.565.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	462.395.000	33	462.395.000	33	451.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				280.000.000		280.000.000		269.170.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	280.000.000	29	280.000.000	29	269.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.395.000		62.395.000		62.395.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	46	62.395.000	46	62.395.000	46	62.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	89.495.544.000	100	89.782.644.000	100	86.413.925.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.913.659.000		78.913.659.000		74.128.794.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	78.913.659.000	12	78.913.659.000	12	74.128.794.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				77.413.659.000		77.413.659.000		72.656.366.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	500	77.413.659.000	500	77.413.659.000	500	72.656.366.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.500.000.000		1.500.000.000		1.472.428.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.472.428.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					267.784.000		267.784.000		267.784.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	267.784.000	2	267.784.000	2	267.784.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				267.784.000		267.784.000		267.784.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	267.784.000	1	267.784.000	1	267.784.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					275.000.000		562.100.000		563.524.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	275.000.000	100	562.100.000	100	563.524.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						287.100.000		287.100.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		495	287.100.000	495	287.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		25.000.000		5.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	25.000.000	20	25.000.000	20	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	480	150.000.000	480	150.000.000	480	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000		100.000.000		121.424.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000	100	121.424.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.978.665.000		1.978.665.000		3.390.566.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	77	1.978.665.000	77	1.978.665.000	77	3.390.566.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.186.335.000		1.186.335.000		2.591.676.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	1.186.335.000	12	1.186.335.000	12	2.591.676.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		156.560.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	200.000.000	12	200.000.000	12	156.560.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				47.350.000		47.350.000		47.350.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	47.350.000	12	47.350.000	12	47.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				42.400.000		42.400.000		42.400.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	42.400.000	12	42.400.000	12	42.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				184.080.000		184.080.000		184.080.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Dokumen	12	184.080.000	12	184.080.000	12	184.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250.000.000		250.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	3	250.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					770.000.000		770.000.000		710.221.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	29	770.000.000	29	770.000.000	29	710.221.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				630.000.000		630.000.000		555.121.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	630.000.000	1	630.000.000	1	555.121.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar										
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				140.000.000		140.000.000		155.100.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	28	140.000.000	28	140.000.000	28	155.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.697.644.000		3.697.644.000		3.711.944.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	3.697.644.000	48	3.697.644.000	48	3.711.944.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				68.874.000		68.874.000		68.874.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	68.874.000	12	68.874.000	12	68.874.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				683.980.000		683.980.000		698.280.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	683.980.000	12	683.980.000	12	698.280.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				444.790.000		444.790.000		444.790.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	444.790.000	12	444.790.000	12	444.790.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.592.792.000		3.592.792.000		3.641.092.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	410	3.592.792.000	410	3.592.792.000	410	3.641.092.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.353.000.000		1.353.000.000		1.309.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	50	1.353.000.000	50	1.353.000.000	50	1.309.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.491.882.000		1.491.882.000		1.691.882.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.491.882.000	1	1.491.882.000	1	1.691.882.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				747.910.000		747.910.000		639.610.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	285	747.910.000	285	747.910.000	285	639.610.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								**1.100.000.000**		**1.100.000.000**		**1.045.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Angka	3.15	1.100.000.000	3.15	3	3.15	1.045.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.100.000.000		1.100.000.000		1.045.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.045.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.100.000.000		1.100.000.000		1.045.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.045.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000		500.000.000		445.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	500.000.000	4	500.000.000	4	445.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah									**110.513.791.000**		**124.013.791.000**		**121.354.240.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	
						Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang	Angka	61.67		61.67		61.67		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang								**5.670.000.000**		**5.670.000.000**		**5.333.441.000**		
						Persentase keterwujudan penataan ruang	%	61.57	5.670.000.000	61.57	62	61.57	5.333.441.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						5.670.000.000		5.670.000.000		5.333.441.000		
						Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	68	1.000.000.000	68	1.000.000.000	68	950.000.000	Bidang Penataan Ruang	
		1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					1.000.000.000		1.000.000.000		950.000.000		
						Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	Dokumen	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	950.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.0004			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				700.000.000		700.000.000		650.000.000		
						Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	4	700.000.000	4	700.000.000	4	650.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.0006			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	60.71	1.970.000.000	60.71	1.970.000.000	60.71	1.803.441.000	Bidang Penataan Ruang	
		1.03.12.1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					1.190.000.000		1.190.000.000		1.023.441.000		
						Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	3	1.190.000.000	3	1.190.000.000	3	1.023.441.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.000			Penetapan RTRW Provinsi				990.000.000		990.000.000		919.150.000		
						Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	Dokumen	1	720.000.000	1	720.000.000	1	664.150.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
						Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen	1	270.000.000	1	270.000.000	1	255.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.0009			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang				200.000.000		200.000.000		104.291.000		
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	300	200.000.000	300	200.000.000	300	104.291.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.12.1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					780.000.000		780.000.000		780.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	11	780.000.000	11	780.000.000	11	780.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.0008			Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota				630.000.000		630.000.000		630.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	10	630.000.000	10	630.000.000	10	630.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.0013			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72.097.000	100	72.097.000	100	72.097.000	Balai PSDA Bengawan Solo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					72.097.000		72.097.000		72.097.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	72.097.000	1	72.097.000	1	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.097.000		72.097.000		72.097.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Dokumen	1	72.097.000	1	72.097.000	1	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96.321.000	100	96.321.000	100	96.321.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					96.321.000		96.321.000		96.321.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	96.321.000	1	96.321.000	1	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				96.321.000		96.321.000		96.321.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	1	96.321.000	1	96.321.000	1	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	97.638.000	100	97.638.000	100	97.638.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					97.638.000		97.638.000		97.638.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	1	97.638.000	1	97.638.000	1	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				97.638.000		97.638.000		97.638.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	97.638.000	1	97.638.000	1	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	72.961.000	100	72.961.000	100	72.961.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					72.961.000		72.961.000		72.961.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	72.961.000	1	72.961.000	1	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.961.000		72.961.000		72.961.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	1	72.961.000	1	72.961.000	1	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	76.171.000	100	76.171.000	100	76.171.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					76.171.000		76.171.000		76.171.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	76.171.000	1	76.171.000	1	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				76.171.000		76.171.000		76.171.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	1	76.171.000	1	76.171.000	1	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	67.200.000	100	67.200.000	100	67.200.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					67.200.000		67.200.000		67.200.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Dokumen	1	67.200.000	1	67.200.000	1	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				67.200.000		67.200.000		67.200.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	67.200.000	1	67.200.000	1	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tertib ruang	%	56	2.217.612.000	56	2.217.612.000	56	2.097.612.000	Bidang Penataan Ruang	
		1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					2.217.612.000		2.217.612.000		2.097.612.000		
						Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Dokumen	2	450.919.000	2	450.919.000	2	393.835.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0006			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				275.428.000		275.428.000		243.028.000		
						Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	275.428.000	1	275.428.000	1	243.028.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0007			Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				175.491.000		175.491.000		150.807.000		
						Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	1	175.491.000	1	175.491.000	1	150.807.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
						Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	5	1.766.693.000	5	1.766.693.000	5	1.703.777.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1.766.693.000		1.766.693.000		1.703.777.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	5	1.766.693.000	5	1.766.693.000	5	1.703.777.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air								**104.843.791.000**		**118.343.791.000**		**116.020.799.000**		
						Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	61.78	104.843.791.000	61.78	62	61.78	116.020.799.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						104.843.791.000		118.343.791.000		116.020.799.000		
						Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69.11	5.549.732.000	69.11	13.763.732.000	69.11	13.432.074.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada											

		1.03.02.1.02		Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.549.732.000		13.763.732.000		13.432.074.000		
						Jumlah DI yang direhab	Unit	5	4.749.732.000	5	12.963.732.000	23	12.632.074.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.02.0014			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				4.749.732.000		12.963.732.000		12.632.074.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	1	4.749.732.000	2.65	12.963.732.000	2.65	12.632.074.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Dokumen	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0037			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi				800.000.000		800.000.000		800.000.000		
						Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Unit	3	530.675.000	3	503.995.000	3	521.295.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	269.325.000	1	296.005.000	1	278.705.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67.34	8.492.841.000	67.34	8.492.841.000	67.34	8.492.841.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.492.841.000		8.492.841.000		8.492.841.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	72.99	8.492.841.000	72.99	8.492.841.000	72.99	8.492.841.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				8.492.841.000		8.492.841.000		8.492.841.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo	Km	6.58	8.492.841.000	6.58	8.492.841.000	6.58	8.492.841.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71.8	6.812.193.000	71.8	6.812.193.000	71.8	6.731.928.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.812.193.000		6.812.193.000		6.731.928.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	70.24	6.812.193.000	70.24	6.812.193.000	70.24	6.731.928.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.812.193.000		6.812.193.000		6.731.928.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	15.55	6.812.193.000	15.55	6.812.193.000	15.55	6.731.928.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62.68	7.779.399.000	62.68	7.779.399.000	62.68	7.652.999.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					7.779.399.000		7.779.399.000		7.652.999.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	60.33	7.779.399.000	60.33	7.779.399.000	60.33	7.652.999.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				7.779.399.000		7.779.399.000		7.652.999.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Km	202.39	7.779.399.000	202.39	7.779.399.000	202.39	7.652.999.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	77.36	4.382.586.000	77.36	4.382.586.000	77.36	4.354.586.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.382.586.000		4.382.586.000		4.354.586.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	63	4.382.586.000	63	4.382.586.000	63	4.354.586.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.382.586.000		4.382.586.000		4.354.586.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Km	134.51	4.382.586.000	134.51	4.382.586.000	134.51	4.354.586.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	62.85	4.627.878.000	62.85	4.627.878.000	62.85	4.434.878.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.627.878.000		4.627.878.000		4.434.878.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	%	59.13	4.627.878.000	59.13	4.627.878.000	59.13	4.434.878.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.627.878.000		4.627.878.000		4.434.878.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Km	156.787	4.627.878.000	156.787	4.627.878.000	156.787	4.434.878.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72.65	5.455.543.000	72.65	5.455.543.000	72.65	5.455.543.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.455.543.000		5.455.543.000		5.455.543.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	%	72.65	5.455.543.000	72.65	5.455.543.000	72.65	5.455.543.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				5.455.543.000		5.455.543.000		5.455.543.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy.	Km	191.8	5.455.543.000	191.8	5.455.543.000	191.8	5.455.543.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64.31	2.810.081.000	64.31	2.810.081.000	64.31	2.748.289.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.810.081.000		2.810.081.000		2.748.289.000		
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	Dokumen	2	134.241.000	2	134.241.000	2	134.241.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				134.241.000		134.241.000		134.241.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	1	134.241.000	1	134.241.000	1	134.241.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Dokumen	4	1.700.000.000	4	1.700.000.000	4	1.700.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	
		1.03.02.1.01.0075			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	700.000.000	2	700.000.000	2	660.395.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Laporan	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.039.605.000	SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	Unit	92	975.840.000	92	975.840.000	93	914.048.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0078			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				975.840.000		975.840.000		914.048.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	1	975.840.000	1	975.840.000	1	914.048.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0120			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya										
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	2.704.500.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000		3.000.000.000		2.704.500.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	2.704.500.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				3.000.000.000		3.000.000.000		2.704.500.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo	Dokumen	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	2.704.500.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	2.444.996.000	100	2.444.996.000	100	2.391.996.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.444.996.000		2.444.996.000		2.391.996.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.444.996.000	5	2.444.996.000	5	2.391.996.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.444.996.000		2.444.996.000		2.391.996.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Dokumen	5	2.444.996.000	5	2.444.996.000	5	2.391.996.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	3.847.324.000	100	3.847.324.000	100	3.766.324.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.847.324.000		3.847.324.000		3.766.324.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	3.847.324.000	5	3.847.324.000	5	3.766.324.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				3.847.324.000		3.847.324.000		3.766.324.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Dokumen	5	3.847.324.000	5	3.847.324.000	5	3.766.324.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	1.847.037.000	100	1.847.037.000	100	1.847.037.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.847.037.000		1.847.037.000		1.847.037.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.847.037.000		1.847.037.000		1.847.037.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Dokumen	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	5	1.847.037.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	2.761.321.000	100	2.761.321.000	100	2.710.496.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.761.321.000		2.761.321.000		2.710.496.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.761.321.000	5	2.761.321.000	5	2.710.496.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.761.321.000		2.761.321.000		2.710.496.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	Dokumen	5	2.761.321.000	5	2.761.321.000	5	2.710.496.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	2.928.844.000	100	2.928.844.000	100	2.873.344.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.928.844.000		2.928.844.000		2.873.344.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	2.928.844.000	5	2.928.844.000	5	2.873.344.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2.928.844.000		2.928.844.000		2.873.344.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy	Dokumen	5	2.928.844.000	5	2.928.844.000	5	2.873.344.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	77.78	1.474.912.000	77.78	1.474.912.000	77.78	1.474.912.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.474.912.000		1.474.912.000		1.474.912.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	33.33	1.474.912.000	33.33	1.474.912.000	33.33	1.474.912.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.474.912.000		1.474.912.000		1.474.912.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Unit	10	1.474.912.000	10	1.474.912.000	10	1.474.912.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	54.6	726.958.000	54.6	726.958.000	54.6	726.958.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					726.958.000		726.958.000		726.958.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	9.09	726.958.000	9.09	726.958.000	9.09	726.958.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				726.958.000		726.958.000		726.958.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Unit	8	726.958.000	8	726.958.000	8	726.958.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34.78	1.612.694.000	34.78	1.612.694.000	34.78	1.640.694.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.612.694.000		1.612.694.000		1.640.694.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	1.612.694.000	100	1.612.694.000	100	1.640.694.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.612.694.000		1.612.694.000		1.640.694.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Unit	8	1.612.694.000	8	1.612.694.000	8	1.640.694.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92.21	332.993.000	92.21	332.993.000	92.21	332.993.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					332.993.000		332.993.000		332.993.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	332.993.000	100	332.993.000	100	332.993.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				332.993.000		332.993.000		332.993.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Unit	2	332.993.000	2	332.993.000	2	332.993.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	50	1.454.872.000	50	1.454.872.000	50	1.454.872.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.454.872.000		1.454.872.000		1.454.872.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	15	1.454.872.000	15	1.454.872.000	15	1.454.872.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				1.454.872.000		1.454.872.000		1.454.872.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Unit	5	1.454.872.000	5	1.454.872.000	5	1.454.872.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76.5	605.321.000	76.5	605.321.000	76.5	605.321.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					605.321.000		605.321.000		605.321.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	10	605.321.000	10	605.321.000	10	605.321.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0105			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				605.321.000		605.321.000		605.321.000		
						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Unit	2	605.321.000	2	605.321.000	2	605.321.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52.37	16.170.547.000	52.37	21.456.547.000	52.37	20.933.457.000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					16.170.547.000		21.456.547.000		20.933.457.000		
						akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	Km	2	7.960.000.000	2	13.246.000.000	2	12.722.910.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.0079			Normalisasi/Restorasi Sungai				800.000.000		800.000.000		800.000.000		
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Km	1.5	800.000.000	1.5	800.000.000	1.5	800.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0096			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya										
						Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Km	0		0		0		SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0102			Pembangunan Check Dam										
						Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit	0		0		0		SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0118			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				7.160.000.000		12.446.000.000		11.922.910.000		
						Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	0.5	7.160.000.000	0.7	12.446.000.000	0.7	11.922.910.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kegiatan	1	742.510.000	1	742.510.000	1	742.510.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				742.510.000		742.510.000		742.510.000		
						Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Unit	4	742.510.000	4	742.510.000	4	742.510.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Km	2	7.468.037.000	2	7.468.037.000	2	7.468.037.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				7.468.037.000		7.468.037.000		7.468.037.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	2	7.468.037.000	2	7.468.037.000	2	7.468.037.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50.04	3.866.137.000	50.04	3.866.137.000	50.04	3.833.402.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.866.137.000		3.866.137.000		3.833.402.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	3.866.137.000	100	3.866.137.000	100	3.833.402.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				3.866.137.000		3.866.137.000		3.833.402.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Km	3.53	3.866.137.000	3.53	3.866.137.000	3.53	3.833.402.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53.26	6.996.727.000	53.26	6.996.727.000	53.26	6.996.727.000	Balai PSDA Pemali Comal	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.996.727.000		6.996.727.000		6.996.727.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	6.996.727.000	100	6.996.727.000	100	6.996.727.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				6.996.727.000		6.996.727.000		6.996.727.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	6.45	6.996.727.000	6.45	6.996.727.000	6.45	6.996.727.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	61.31	8.862.855.000	61.31	8.862.855.000	61.31	8.424.628.000	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	
		1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.143.355.000		8.143.355.000		7.794.475.000		
						Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	6	1.624.274.000	6	1.624.274.000	6	1.624.274.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	
		1.03.02.1.01.0103			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.174.274.000		1.174.274.000		1.174.274.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	1.174.274.000	3	1.174.274.000	3	1.174.274.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0104			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				450.000.000		450.000.000		450.000.000		
						Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Dokumen	14	1.979.574.000	14	1.979.574.000	14	1.873.913.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.0087			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				638.574.000		638.574.000		638.574.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	11	638.574.000	11	638.574.000	11	638.574.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.03.02.1.01.0117			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				1.341.000.000		1.341.000.000		1.235.339.000		
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	3	1.341.000.000	3	1.341.000.000	3	1.235.339.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	5	4.539.507.000	5	4.539.507.000	5	4.296.288.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.01.0121			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				2.933.000.000		2.388.000.000		2.261.686.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	2	2.933.000.000	2	2.388.000.000	2	2.261.686.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.0122			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				1.606.507.000		2.151.507.000		2.034.602.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen	2	1.606.507.000	2	2.151.507.000	2	2.034.602.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					719.500.000		719.500.000		630.153.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Dokumen	1	719.500.000	1	719.500.000	1	630.153.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.02.0032			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				719.500.000		719.500.000		630.153.000		
						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	1	719.500.000	1	719.500.000	1	630.153.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**205.370.408.000**		**219.157.508.000**		**213.085.448.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat									**19.965.000.000**		**40.685.000.000**		**39.903.207.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	44.79		44.79		58.32		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	%	69.02		69.02		72.67		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat								**15.132.000.000**		**35.132.000.000**		**34.816.321.000**		
						Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	14.29	6.830.000.000	14.29	14	29.69	8.564.376.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						6.830.000.000		8.780.000.000		8.564.376.000		
						Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	2.73	6.830.000.000	2.73	8.780.000.000	4.2	8.564.376.000	Bidang Perumahan	
		1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.001 1			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.000 1			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	250	100.000.000	250	100.000.000	260	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.180.000.000		6.430.000.000		6.048.006.000		
						Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Unit	160	5.180.000.000	160	6.430.000.000	210	6.048.006.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.000 1			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				3.080.000.000		4.330.000.000		4.013.453.000		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit	125	3.080.000.000	175	4.330.000.000	175	4.013.453.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03.000 4			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				2.100.000.000		2.100.000.000		2.034.553.000		
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit	35	2.100.000.000	35	2.100.000.000	35	2.034.553.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					1.450.000.000		2.150.000.000		2.316.370.000		
						Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit	11225	1.450.000.000	11225	2.150.000.000	17325	2.316.370.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1.04.02.1.04.000 6			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				1.450.000.000		2.150.000.000		2.316.370.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan	1	1.450.000.000	1	2.150.000.000	1	2.316.370.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	0.04	8.302.000.000	0.04	0	20.14	26.251.945.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						8.087.000.000		26.137.000.000		26.036.945.000		
						Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0.12	8.087.000.000	0.12	26.137.000.000	0.48	26.036.945.000	Bidang Perumahan	
		1.04.02.1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					325.000.000		325.000.000		293.655.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2	325.000.000	2	325.000.000	2	293.655.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.001 0			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				325.000.000		325.000.000		293.655.000		
						Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	2	325.000.000	2	325.000.000	2	293.655.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.000 9			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	100	80.000.000	100	80.000.000	140	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					7.682.000.000		25.732.000.000		25.663.290.000		
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	150	7.682.000.000	150	25.732.000.000	581	25.663.290.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				7.682.000.000		25.732.000.000		25.663.290.000		
						Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	Unit	50	2.648.000.000	300	13.898.000.000	328	14.279.784.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	Unit	100	5.034.000.000	250	11.834.000.000	253	11.383.506.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						215.000.000		215.000.000		215.000.000		
						Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.06.1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					215.000.000		215.000.000		215.000.000		
						Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	Dokumen	1	215.000.000	1	215.000.000	1	215.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				215.000.000		215.000.000		215.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1	215.000.000	1	215.000.000	1	215.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman								**4.833.000.000**		**5.553.000.000**		**5.086.886.000**		
						Persentase penurunan kawasan kumuh	%	55.21	4.833.000.000	55.21	55	41.68	5.086.886.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						3.108.000.000		3.828.000.000		3.511.475.000		
						Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	885.000.000	100	885.000.000	100	855.146.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					885.000.000		885.000.000		855.146.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	395.000.000	2	395.000.000	2	395.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	
		1.04.03.1.01.0008			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				215.000.000		215.000.000		215.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	1	215.000.000	1	215.000.000	1	215.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	Dokumen	2	310.000.000	2	310.000.000	2	280.146.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				310.000.000		310.000.000		280.146.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	Laporan	2	310.000.000	2	310.000.000	2	280.146.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	3.18	2.223.000.000	3.18	2.943.000.000	3.18	2.656.329.000	Bidang Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	85.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0018			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	3	85.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					2.138.000.000		2.858.000.000		2.571.329.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	Laporan	3	270.000.000	3	270.000.000	3	269.718.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			270.000.000		270.000.000		269.718.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	3	270.000.000	3	270.000.000	3	269.718.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	Ha	35	1.868.000.000	35	2.588.000.000	100	2.301.611.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.02.0003			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	563	100.000.000	563	100.000.000	843	100.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02.0014			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.768.000.000		2.488.000.000		2.201.611.000		
						Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	35	1.768.000.000	35	2.488.000.000	100	2.201.611.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.725.000.000		1.725.000.000		1.575.411.000		
						Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	40	1.725.000.000	40	1.725.000.000	40	1.575.411.000	Bidang Kawasan Permukiman	
		1.04.05.1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					1.725.000.000		1.725.000.000		1.575.411.000		
						Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	2	1.725.000.000	2	1.725.000.000	2	1.575.411.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.1.01.0002			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				1.620.000.000		1.620.000.000		1.470.411.000		
						Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	2	1.620.000.000	2	1.620.000.000	2	1.470.411.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.04.05.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	2	105.000.000	2	105.000.000	2	105.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**21.926.113.000**		**21.971.353.000**		**21.861.134.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	76		76		76		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**20.892.113.000**		**20.937.353.000**		**20.748.177.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	20.892.113.000	82	82	82	20.748.177.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.892.113.000		20.937.353.000		20.748.177.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	20.892.113.000	100	20.937.353.000	100	20.748.177.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.970.338.000		14.970.338.000		14.438.571.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	14.970.338.000	6	14.970.338.000	6	14.438.571.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.274.338.000		14.274.338.000		13.816.631.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	79	14.274.338.000	79	14.274.338.000	79	13.816.631.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				605.300.000		605.300.000		531.240.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	605.300.000	12	605.300.000	12	531.240.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.700.000		25.700.000		25.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	25.700.000	12	25.700.000	12	25.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				155.000.000		155.000.000		155.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	155.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					140.000.000		185.240.000		185.240.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	140.000.000	100	185.240.000	100	185.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						45.240.000		45.240.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		78	45.240.000	78	45.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	50.000.000	50	50.000.000	170	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.990.000.000		1.990.000.000		2.363.949.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.990.000.000	100	1.990.000.000	100	2.363.949.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		20.000.000		19.449.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	19.449.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.070.000.000		1.070.000.000		1.145.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.070.000.000	12	1.070.000.000	12	1.145.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		100.000.000		99.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	99.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				300.000.000		300.000.000		600.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.152.000.000		1.152.000.000		1.142.036.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	80	1.152.000.000	80	1.152.000.000	100	1.142.036.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				165.000.000		165.000.000		163.936.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	20	165.000.000	20	165.000.000	36	163.936.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				987.000.000		987.000.000		978.100.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	60	987.000.000	60	987.000.000	64	978.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.709.775.000		1.709.775.000		1.709.381.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.709.775.000	36	1.709.775.000	36	1.709.381.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				185.000.000		185.000.000		185.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				574.775.000		574.775.000		574.775.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	574.775.000	12	574.775.000	12	574.775.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				950.000.000		950.000.000		949.606.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	950.000.000	12	950.000.000	12	949.606.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					750.000.000		750.000.000		729.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	252	750.000.000	252	750.000.000	252	729.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				260.000.000		260.000.000		239.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	260.000.000	30	260.000.000	30	239.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	130	70.000.000	130	70.000.000	130	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	70	350.000.000	70	350.000.000	70	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**1.034.000.000**		**1.034.000.000**		**1.112.957.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.45	1.034.000.000	2.45	2	2.45	1.112.957.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.034.000.000		1.034.000.000		1.112.957.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.034.000.000	100	1.034.000.000	100	1.112.957.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.034.000.000		1.034.000.000		1.112.957.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.034.000.000	100	1.034.000.000	100	1.112.957.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				600.000.000		600.000.000		642.957.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	600.000.000	9	600.000.000	9	642.957.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				434.000.000		434.000.000		470.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	11	434.000.000	11	434.000.000	11	470.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan									**1.590.000.000**		**1.590.000.000**		**1.589.289.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
						Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	%	100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase reforma agraria yang difasilitasi	%	100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum								**400.000.000**		**400.000.000**		**399.289.000**		
						Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	400.000.000	100	100	100	399.289.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						400.000.000		400.000.000		399.289.000		
						Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	399.289.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.03.1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					400.000.000		400.000.000		399.289.000		
						Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	399.289.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
		2.10.03.1.01.0001			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				400.000.000		400.000.000		399.289.000		
						Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	5	400.000.000	5	400.000.000	5	399.289.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
	Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah								**1.190.000.000**		**1.190.000.000**		**1.190.000.000**		
						Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	1.190.000.000	100	100	100	1.190.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.04.1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	Dokumen	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
		2.10.04.1.01.0001			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	98.200.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	151.800.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.10.04.1.01.0002			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						590.000.000		590.000.000		590.000.000		
						Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	590.000.000	100	590.000.000	100	590.000.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.06.1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					590.000.000		590.000.000		590.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Lokasi	10	590.000.000	10	590.000.000	10	590.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
		2.10.06.1.01.0002			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				163.460.000		163.460.000		150.330.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	22	163.460.000	22	163.460.000	22	150.330.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah				426.540.000		426.540.000		439.670.000		
						Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	Dokumen	7	421.540.000	7	421.540.000	7	434.670.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**43.481.113.000**		**64.246.353.000**		**63.353.630.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (PE)									**2.666.576.000**		**2.200.926.000**		**2.400.926.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82		82		82		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah								**2.666.576.000**		**2.200.926.000**		**2.400.926.000**		
						Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Angka	6.1	2.666.576.000	6.1	6	6.1	2.400.926.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.666.576.000		2.200.926.000		2.400.926.000		
						Persentase penegakan produk hukum daerah	%	80	2.666.576.000	80	2.200.926.000	80	2.400.926.000	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
		1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					250.000		250.000		250.000		
						Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas	%	100	250.000	100	250.000	100	250.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.01.0015			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				250.000		250.000		250.000		
						Persentase warga negara yang menperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	250.000	100	250.000	100	250.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					2.566.326.000		2.100.676.000		2.300.676.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi	Orang	300	180.000.000	300	180.000.000	300	174.791.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		1.05.02.1.02.0002			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah pelanggar yang diawasi	Orang	200	65.000.000	200	65.000.000	200	65.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.0003			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				115.000.000		115.000.000		109.791.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina	Orang	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	44.791.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
						Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani	%	100	2.386.326.000	100	1.920.676.000	100	2.125.885.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.02.0001			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				435.650.000						
						jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	Orang	372	435.650.000	0		0		SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.0003			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1.950.676.000		1.920.676.000		2.125.885.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak	Orang	100	1.950.676.000	100	1.920.676.000	100	2.125.885.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (RB)									**1.925.000.000**		**1.925.000.000**		**2.423.250.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82		82		82		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat								**1.925.000.000**		**1.925.000.000**		**2.423.250.000**		
						Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas)	Angka	12.4	1.925.000.000	12.4	12	12.4	2.423.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.775.000.000		1.775.000.000		2.273.250.000		
						Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%	29.57	725.000.000	29.57	725.000.000	29.57	725.000.000	Bidang Pembinaan Masyarakat	
		1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					725.000.000		725.000.000		725.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan	Kelompok	170	163.290.000	170	163.290.000	170	163.290.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				163.290.000		163.290.000		163.290.000		
						Jumlah Mitra trantib yang dibina	Kelompok	35	21.438.000	35	21.438.000	35	21.438.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina	Kelompok	135	141.852.000	135	141.852.000	135	141.852.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum	Kabupaten/Kota	35	561.710.000	35	561.710.000	35	561.710.000	SEKSI KEWASPADAAN	
		1.05.02.1.01.0014			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				425.000.000		425.000.000		425.000.000		
						Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum	Orang	140	425.000.000	140	425.000.000	140	425.000.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				136.710.000		136.710.000		136.710.000		
						Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib	Dokumen	1	66.145.000	1	66.145.000	1	66.145.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini	Kasus	10	70.565.000	10	70.565.000	10	70.565.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	67.15	600.000.000	67.15	600.000.000	97.08	953.250.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
		1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					600.000.000		600.000.000		953.250.000		
						Jumlah penanganan gangguan tramtibum	Kegiatan	74	420.000.000	74	420.000.000	115	773.250.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				238.060.000		238.060.000		591.310.000		
						Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi	Kegiatan	25	89.300.000	25	89.300.000	25	89.300.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP	Kegiatan	15	54.910.000	15	54.910.000	15	54.910.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah patroli pengendalian tramtibum	Kegiatan	24	93.850.000	24	93.850.000	65	447.100.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0019			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				181.940.000		181.940.000		181.940.000		
						Jumlah operasi penertiban trantibum (pekat, lintas katkota, cipta kondisi, perbatasan prov.)	Kegiatan	10	148.890.000	10	148.890.000	10	148.890.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unjuk rasa yang tertangani	%	100	33.050.000	100	33.050.000	100	33.050.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	Kegiatan	18	180.000.000	18	180.000.000	18	180.000.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
		1.05.02.1.01.0017			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				132.900.000		132.900.000		132.900.000		
						Jumlah kawasan tertib yang dibina	Lokasi	8	79.365.000	8	79.365.000	8	79.365.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan trantibum	Orang	120	53.535.000	120	53.535.000	120	53.535.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.0019			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				47.100.000		47.100.000		47.100.000		
						Jumlah penertiban PNS	Kegiatan	10	47.100.000	10	47.100.000	10	47.100.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	40.03	450.000.000	40.03	450.000.000	40.03	595.000.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
		1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					450.000.000		450.000.000		595.000.000		
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan	Kelompok	245	125.000.000	245	125.000.000	245	125.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.0016			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jml mobilisasi Satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana	Kegiatan	0		0		0		SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas	Dokumen	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya	Kelompok	245	325.000.000	245	325.000.000	245	470.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.0018			Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				325.000.000		325.000.000		470.000.000		
						Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	400	325.000.000	400	325.000.000	1000	470.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
		1.05.04.1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	Kabupaten/Kota	35	150.000.000	35	150.000.000	35	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.04.1.01.0022			Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**19.290.855.000**		**19.333.195.000**		**18.585.704.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72		72		72		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**19.063.760.000**		**19.106.100.000**		**18.412.682.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	19.063.760.000	80	80	80	18.412.682.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.063.760.000		19.106.100.000		18.412.682.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	19.063.760.000	100	19.106.100.000	100	18.412.682.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.800.594.000		12.800.594.000		12.062.080.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13	12.800.594.000	13	12.800.594.000	13	12.062.080.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.459.594.000		12.459.594.000		11.754.145.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	80	12.459.594.000	80	12.459.594.000	73	11.754.145.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				303.000.000		303.000.000		303.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	303.000.000	12	303.000.000	12	303.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				38.000.000		38.000.000		4.935.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	38.000.000	1	38.000.000	1	4.935.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					729.200.000		771.540.000		768.540.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	729.200.000	100	771.540.000	100	768.540.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				140.000.000		182.340.000		182.340.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	140.000.000	2	182.340.000	2	182.340.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				44.200.000		44.200.000		44.200.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	8	44.200.000	8	44.200.000	8	44.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				545.000.000		545.000.000		542.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	1740	545.000.000	1740	545.000.000	1140	542.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					995.806.000		995.806.000		1.068.871.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	995.806.000	100	995.806.000	100	1.068.871.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				64.556.000		64.556.000		64.556.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	64.556.000	1	64.556.000	1	64.556.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				76.250.000		76.250.000		66.250.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	76.250.000	1	76.250.000	1	66.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				125.000.000		125.000.000		132.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	125.000.000	1	125.000.000	1	132.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		500.000.000		571.065.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	571.065.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		20.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.000.000		57.000.000		57.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	21	57.000.000	21	57.000.000	21	57.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.000.000		57.000.000		57.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	20	57.000.000	20	57.000.000	20	57.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.662.439.000		2.662.439.000		2.603.189.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.662.439.000	3	2.662.439.000	3	2.603.189.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		3.400.000		3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				380.000.000		380.000.000		350.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	380.000.000	1	380.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.279.039.000		2.279.039.000		2.249.789.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.279.039.000	1	2.279.039.000	1	2.249.789.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.693.721.000		1.693.721.000		1.728.002.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	1.693.721.000	75	1.693.721.000	75	1.728.002.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000.000		450.000.000		508.323.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	450.000.000	20	450.000.000	20	508.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				188.721.000		188.721.000		188.721.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	52	188.721.000	52	188.721.000	52	188.721.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.040.000.000		1.040.000.000		1.015.958.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.040.000.000	1	1.040.000.000	1	1.015.958.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**227.095.000**		**227.095.000**		**173.022.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	227.095.000	3	3	3	173.022.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						227.095.000		227.095.000		173.022.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	227.095.000	100	227.095.000	100	173.022.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					227.095.000		227.095.000		173.022.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	227.095.000	100	227.095.000	100	173.022.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				117.500.000		117.500.000		91.675.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	117.500.000	8	117.500.000	8	91.675.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				109.595.000		109.595.000		81.347.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	109.595.000	4	109.595.000	4	81.347.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									**23.882.431.000**		**23.459.121.000**		**23.409.880.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana									**4.925.000.000**		**4.925.000.000**		**5.245.000.000**	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
						Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.74		0.74		0.74		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan								**1.500.000.000**		**1.500.000.000**		**2.000.000.000**		
						Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	Angka	0.57	1.500.000.000	0.57	1	0.57	2.000.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.500.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	%	2.86	1.100.000.000	2.86	1.100.000.000	2.86	1.600.000.000	Bidang Logistik dan Peralatan	
		1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase sarpras PB yang terpenuhi	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERALATAN	
		1.05.03.1.02.0014			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PERALATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.000.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		
						Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	SEKSI LOGISTIK	
		1.05.03.1.03.0004			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.000.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5000	1.000.000.000	5000	1.000.000.000	5000	1.500.000.000	SEKSI LOGISTIK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan darurat bencana	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Bidang Penanganan Darurat	
		1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya	%	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	
		1.05.03.1.02.0015			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	200	125.000.000	200	125.000.000	200	125.000.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
		1.05.03.1.03.0002			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.03.0003			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03.0005			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
		1.05.03.1.03.0002			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.03.0003			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.03.0005			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	
		1.05.03.1.04.0017			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan								**3.200.000.000**		**3.200.000.000**		**3.025.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	4.47	3.200.000.000	4.47	4	4.47	3.025.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						3.200.000.000		3.200.000.000		3.025.000.000		
						Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0.12	3.200.000.000	0.12	3.200.000.000	0.12	3.025.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					1.200.000.000		1.200.000.000		1.115.000.000		
						Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.01	1.200.000.000	0.01	1.200.000.000	0.01	1.115.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.01.0002			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				1.100.000.000		1.100.000.000		1.020.000.000		
						Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	3000	1.100.000.000	3000	1.100.000.000	3000	1.020.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.01.0003			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi				100.000.000		100.000.000		95.000.000		
						Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	95.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					2.000.000.000		2.000.000.000		1.910.000.000		
						Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0.33	650.000.000	0.33	650.000.000	0.33	585.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	
		1.05.03.1.02.0013			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				500.000.000		500.000.000		435.000.000		
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Desa	25	500.000.000	25	500.000.000	25	435.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0016			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	200	150.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	SEKSI PENCEGAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	7	1.350.000.000	7	1.350.000.000	7	1.325.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	
		1.05.03.1.02.0012			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah				100.000.000		100.000.000		95.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	95.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0017			Penyusunan Rencana Kontijensi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0018			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana										
						Jumlah Dokumen Rencana PenanggulanganKedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0		0		0		SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.05.03.1.02.0019			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.02.0021			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				1.050.000.000		1.050.000.000		1.030.000.000		
						Jumlah Peralatan Pelindung Diri TerhadapBencana	Unit	119	1.050.000.000	119	1.050.000.000	119	1.030.000.000	SEKSI KESIAPSIAGAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana								**225.000.000**		**225.000.000**		**220.000.000**		
						Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%	100	225.000.000	100	100	100	220.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						225.000.000		225.000.000		220.000.000		
						Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	2	225.000.000	2	225.000.000	2	220.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					225.000.000		225.000.000		220.000.000		
						Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	SEKSI REHABILITASI	
		1.05.03.1.04.0019			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana	%	100	175.000.000	100	175.000.000	100	170.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	
		1.05.03.1.04.0007			Penanganan Pasca Bencana Provinsi				100.000.000		100.000.000		95.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	95.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.05.03.1.04.0020			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI REKONSTRUKSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**12.931.963.000**		**12.953.423.000**		**13.133.423.000**	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	77		77		77		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**12.706.963.000**		**12.728.423.000**		**12.908.423.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	12.706.963.000	90	90	90	12.908.423.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12.706.963.000		12.728.423.000		12.908.423.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	12.706.963.000	100	12.728.423.000	100	12.908.423.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.526.631.000		7.526.631.000		7.526.631.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	7.526.631.000	1	7.526.631.000	1	7.526.631.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.226.631.000		7.226.631.000		7.226.631.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	40	7.226.631.000	37	7.226.631.000	37	7.226.631.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		26.460.000		26.460.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	26.460.000	100	26.460.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						21.460.000		21.460.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			0	21.460.000	37	21.460.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	2.000.000	37	2.000.000	37	2.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	40	3.000.000	37	3.000.000	37	3.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.127.000.000		1.127.000.000		1.027.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.127.000.000	100	1.127.000.000	100	1.027.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		1.000.000.000		900.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	900.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		15.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		200.000.000		240.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	2	240.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								40.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		5	40.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		1		BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.963.332.000		2.963.332.000		2.948.332.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.963.332.000	3	2.963.332.000	3	2.948.332.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	500.000	1	500.000	1	500.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				480.000.000		480.000.000		465.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	480.000.000	1	480.000.000	1	465.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.482.832.000		2.482.832.000		2.482.832.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.482.832.000	1	2.482.832.000	1	2.482.832.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					785.000.000		785.000.000		1.040.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	139	785.000.000	139	785.000.000	139	1.040.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000.000		500.000.000		695.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	56	500.000.000	56	500.000.000	56	695.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		130.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	5	130.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		160.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	200.000.000	3	200.000.000	3	160.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		55.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75	35.000.000	75	35.000.000	75	55.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.12	225.000.000	3.12	3	3.12	225.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						225.000.000		225.000.000		225.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					225.000.000		225.000.000		225.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**17.856.963.000**		**17.878.423.000**		**18.378.423.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									**226.181.128.000**		**251.309.968.000**		**249.512.340.000**	**Dinas Sosial**	
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	0.55		0.55		2.46		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan								**3.550.000.000**		**23.550.000.000**		**23.550.000.000**		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial	%	0.02	3.550.000.000	0.02	0	0.22	23.550.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						3.550.000.000		23.550.000.000		23.550.000.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0.02	3.550.000.000	0.02	23.550.000.000	0.22	23.550.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
		1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					3.550.000.000		23.550.000.000		23.550.000.000		
						Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian	Orang	200	1.250.000.000	200	1.250.000.000	200	1.250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.0002			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	200	1.250.000.000	200	1.250.000.000	200	1.250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1)	Orang	400	1.150.000.000	400	11.150.000.000	5000	11.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				1.150.000.000		11.150.000.000		11.150.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.150.000.000	5000	11.150.000.000	5000	11.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2)	Orang	400	1.150.000.000	400	11.150.000.000	5000	11.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				1.150.000.000		11.150.000.000		11.150.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	400	1.150.000.000	5000	11.150.000.000	5000	11.150.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial								**9.838.940.000**		**9.938.940.000**		**10.014.940.000**		
						Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	7.7	9.838.940.000	7.7	8	7.7	10.014.940.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						9.479.940.000		9.579.940.000		9.655.940.000		
						Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	7.7	9.479.940.000	7.7	9.579.940.000	7.7	9.655.940.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
		1.06.02.1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Dokumen	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					9.329.940.000		9.429.940.000		9.505.940.000		
						Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	1076	8.392.000.000	1076	8.492.000.000	1076	8.568.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0001			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				150.000.000		150.000.000		170.380.000		
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	100	150.000.000	100	150.000.000	100	170.380.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				7.112.000.000		7.112.000.000		7.060.780.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	576	7.112.000.000	576	7.112.000.000	576	7.060.780.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				1.130.000.000		1.230.000.000		1.336.840.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.130.000.000	100	1.230.000.000	400	1.336.840.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
						Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	Orang	1000	937.940.000	1000	937.940.000	1000	937.940.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				937.940.000		937.940.000		937.940.000		
						Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	1000	937.940.000	1000	937.940.000	1000	937.940.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						359.000.000		359.000.000		359.000.000		
						Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	359.000.000	100	359.000.000	100	359.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
		1.06.07.1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					359.000.000		359.000.000		359.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola	Unit	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran								**153.556.160.000**		**153.556.160.000**		**152.960.440.000**		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	80	153.556.160.000	80	80	1.98	152.960.440.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						153.556.160.000		153.556.160.000		152.960.440.000		
						Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	80	153.556.160.000	80	153.556.160.000	1.98	152.960.440.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.05.1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					153.556.160.000		153.556.160.000		152.960.440.000		
						Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Orang	12764	153.556.160.000	12764	153.556.160.000	90.764	152.960.440.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.0001			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				153.556.160.000		153.556.160.000		152.960.440.000		
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	12764	153.556.160.000	90764	153.556.160.000	90764	152.960.440.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial								**2.325.500.000**		**2.325.500.000**		**3.089.918.000**		
						Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.06	2.325.500.000	0.06	0	0.05	3.089.918.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1.06.03.1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.0001			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						2.225.500.000		2.225.500.000		2.989.918.000		
						Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	2.225.500.000	100	2.225.500.000	100	2.989.918.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.06.1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					2.225.500.000		2.225.500.000		2.989.918.000		
						Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	1500	1.509.000.000	1500	1.509.000.000	1000	2.021.543.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				649.000.000		649.000.000		984.271.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1500	649.000.000	1500	649.000.000	1000	984.271.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				225.000.000		225.000.000		316.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1500	225.000.000	1500	225.000.000	1000	316.600.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				100.000.000		100.000.000		185.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	1500	100.000.000	1500	100.000.000	1000	185.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				385.000.000		385.000.000		385.672.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	1000	385.000.000	1000	385.000.000	1000	385.672.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1000	150.000.000	1000	150.000.000	1000	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	1450	716.500.000	1450	716.500.000	1450	968.375.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				141.500.000		141.500.000		280.500.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	250	141.500.000	250	141.500.000	250	280.500.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0002			Penyediaan Sandang				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	250	75.000.000	250	75.000.000	250	75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0003			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				375.000.000		375.000.000		462.875.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	1450	375.000.000	1200	375.000.000	1200	462.875.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				75.000.000		75.000.000		100.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	250	75.000.000	250	75.000.000	250	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial								**56.910.528.000**		**61.939.368.000**		**59.897.042.000**		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	%	0.2	56.910.528.000	0.2	0	0.2	59.897.042.000	Dinas Sosial	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						56.760.528.000		61.789.368.000		59.703.386.000		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	1.92	4.696.250.000	1.92	4.696.250.000	1.92	4.652.594.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.157.500.000		2.157.500.000		2.157.500.000		
						Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	2100	2.157.500.000	2100	2.157.500.000	2100	2.157.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Permakanan				1.907.500.000		1.907.500.000		1.876.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2100	1.907.500.000	2100	1.907.500.000	2100	1.876.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.000			Penyediaan Alat Bantu				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.001 2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				150.000.000		150.000.000		181.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	150.000.000	4	150.000.000	4	181.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.677.500.000		1.677.500.000		1.644.924.000		
						Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	1700	1.677.500.000	1700	1.677.500.000	1700	1.644.924.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.000			Penyediaan Makanan				1.502.500.000		1.502.500.000		1.476.974.000		
						Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1700	1.502.500.000	1700	1.502.500.000	1700	1.476.974.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.001 3			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				175.000.000		175.000.000		167.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	175.000.000	4	175.000.000	4	167.950.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					380.000.000		380.000.000		368.920.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	400	380.000.000	400	380.000.000	400	368.920.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				380.000.000		380.000.000		368.920.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	380.000.000	400	380.000.000	400	368.920.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					481.250.000		481.250.000		481.250.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	250	481.250.000	250	481.250.000	250	481.250.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				306.250.000		306.250.000		302.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	306.250.000	250	306.250.000	250	302.500.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				175.000.000		175.000.000		178.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Dokumen	4	175.000.000	4	175.000.000	4	178.750.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0.06	1.644.055.000	0.06	1.808.755.000	0.06	1.811.805.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.102.100.000		1.211.900.000		1.211.900.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	99.425.000	100	99.425.000	100	99.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				34.000.000		34.000.000		34.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.425.000		25.425.000		25.425.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	25.425.000	100	25.425.000	100	25.425.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	100	1.002.675.000	100	1.112.475.000	100	1.112.475.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				795.875.000		905.675.000		918.175.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	795.875.000	100	905.675.000	100	918.175.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				182.800.000		182.800.000		170.300.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	182.800.000	100	182.800.000	100	170.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					541.955.000		596.855.000		599.905.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	50	79.050.000	50	79.050.000	50	79.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				53.000.000		53.000.000		53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	50	53.000.000	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.050.000		6.050.000		6.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.050.000	50	6.050.000	50	6.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	50	462.905.000	50	517.805.000	50	520.855.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		448.275.000		457.575.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	50	448.275.000	50	457.575.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				62.330.000		62.330.000		56.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	62.330.000	50	62.330.000	50	56.080.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0.06	1.653.075.000	0.06	1.817.775.000	0.06	1.811.745.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.208.951.000		1.329.731.000		1.327.688.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	110	106.008.000	110	106.008.000	110	123.008.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.008.000		27.008.000		26.008.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.008.000	100	27.008.000	100	26.008.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				33.000.000		33.000.000		51.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	33.000.000	20	33.000.000	20	51.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	110	1.102.943.000	110	1.223.723.000	110	1.204.680.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				875.463.000		996.243.000		996.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	875.463.000	100	996.243.000	100	996.450.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				201.080.000		201.080.000		181.830.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	201.080.000	100	201.080.000	100	181.830.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				26.400.000		26.400.000		26.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	26.400.000	100	26.400.000	100	26.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					444.124.000		488.044.000		484.057.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	40	73.800.000	40	73.800.000	40	64.713.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.000.000		52.000.000		52.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	40	52.000.000	40	52.000.000	40	52.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5.800.000		5.800.000		5.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	5.800.000	40	5.800.000	40	5.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				12.000.000		12.000.000		1.100.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	40	12.000.000	40	12.000.000	40	1.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				4.000.000		4.000.000		5.813.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	4.000.000	4	4.000.000	4	5.813.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Orang	40	370.324.000	40	414.244.000	40	419.344.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				314.700.000		358.620.000		363.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	40	314.700.000	40	358.620.000	40	363.720.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				49.864.000		49.864.000		49.864.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	40	49.864.000	40	49.864.000	40	49.864.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				5.760.000		5.760.000		5.760.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	40	5.760.000	40	5.760.000	40	5.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0.11	2.689.741.000	0.11	2.958.751.000	0.11	2.815.271.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					562.965.000		617.865.000		549.630.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	79.300.000	50	79.300.000	50	77.650.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.000.000		53.000.000		53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	50	53.000.000	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.800.000		11.800.000		11.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.800.000	50	11.800.000	50	11.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.500.000		9.500.000		9.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	9.500.000	0	9.500.000	50	9.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		5.000.000		3.350.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	4	5.000.000	4	5.000.000	4	3.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	483.665.000	50	538.565.000	50	471.980.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		448.275.000		381.690.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	50	448.275.000	50	381.690.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				83.090.000		83.090.000		83.090.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	83.090.000	50	83.090.000	50	83.090.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.126.776.000		2.340.886.000		2.265.641.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	195	171.559.000	195	171.559.000	195	164.509.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				43.500.000		43.500.000		43.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	195	43.500.000	195	43.500.000	195	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				50.059.000		50.059.000		50.059.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	195	50.059.000	195	50.059.000	195	50.059.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				19.500.000		19.500.000		12.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	195	19.500.000	195	19.500.000	195	12.450.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				58.500.000		58.500.000		58.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	39	58.500.000	39	58.500.000	39	58.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	195	1.955.217.000	195	2.169.327.000	195	2.101.132.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.551.957.000		1.766.067.000		1.697.872.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.551.957.000	195	1.766.067.000	195	1.697.872.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				356.460.000		356.460.000		356.460.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	185	356.460.000	185	356.460.000	185	356.460.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				46.800.000		46.800.000		46.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	195	46.800.000	195	46.800.000	195	46.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0.06	1.539.100.000	0.06	1.692.820.000	0.06	1.682.876.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.539.100.000		1.692.820.000		1.682.876.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	140	135.355.000	140	135.355.000	140	121.455.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				38.000.000		38.000.000		38.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	38.000.000	140	38.000.000	140	38.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				41.355.000		41.355.000		41.355.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	41.355.000	140	41.355.000	140	41.355.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.000.000		14.000.000		12.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	14.000.000	140	14.000.000	140	12.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				42.000.000		42.000.000		30.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	7	42.000.000	7	42.000.000	7	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring	Orang	140	1.403.745.000	140	1.557.465.000	140	1.561.421.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.114.225.000		1.267.945.000		1.271.901.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.114.225.000	140	1.267.945.000	140	1.271.901.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				255.920.000		255.920.000		255.920.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	255.920.000	140	255.920.000	140	255.920.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				33.600.000		33.600.000		33.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	33.600.000	140	33.600.000	140	33.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0.12	3.040.564.000	0.12	2.751.149.000	0.12	2.715.085.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.396.509.000		1.539.249.000		1.552.884.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	130	126.500.000	130	126.500.000	130	124.475.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang							SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				61.000.000		61.000.000		58.975.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130	61.000.000	130	61.000.000	130	58.975.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.800.000		27.800.000		27.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130	27.800.000	130	27.800.000	130	27.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				24.700.000		24.700.000		24.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	24.700.000	0	24.700.000	130	24.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	130	1.270.009.000	130	1.412.749.000	130	1.428.409.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.022.775.000		1.165.515.000		1.186.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.022.775.000	130	1.165.515.000	130	1.186.350.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				216.034.000		216.034.000		210.859.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130	216.034.000	130	216.034.000	130	210.859.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				31.200.000		31.200.000		31.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	130	31.200.000	130	31.200.000	130	31.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.102.100.000		1.211.900.000		1.162.201.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	100	99.425.000	100	99.425.000	100	95.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				34.000.000		34.000.000		34.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.425.000		25.425.000		28.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	25.425.000	100	25.425.000	100	28.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				30.000.000		30.000.000		22.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20	30.000.000	20	30.000.000	20	22.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	100	1.002.675.000	100	1.112.475.000	100	1.067.201.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				795.875.000		905.675.000		863.401.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	795.875.000	100	905.675.000	100	863.401.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				182.800.000		182.800.000		179.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	182.800.000	100	182.800.000	100	179.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					541.955.000						
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	50	79.050.000	50		50		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				53.000.000						
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.050.000						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.050.000	0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				15.000.000						
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	50	15.000.000	0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				5.000.000						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	5.000.000	0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	50	462.905.000	50		50		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000						
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	0		0		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				62.330.000						
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	62.330.000	0		0		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				7.200.000						
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	0		0		SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0.08	2.133.920.000	0.08	2.326.070.000	0.08	2.340.904.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					460.932.000		504.852.000		511.900.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	74.000.000	50	74.000.000	50	64.110.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				52.000.000		52.000.000		52.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	52.000.000	50	52.000.000	50	52.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.400.000		10.400.000		7.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	10.400.000	50	10.400.000	50	7.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.600.000		7.600.000		990.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	7.600.000	0	7.600.000	0	990.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				4.000.000		4.000.000		3.720.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.720.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	386.932.000	50	430.852.000	50	447.790.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				314.700.000		358.620.000		365.370.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	314.700.000	50	358.620.000	50	365.370.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				66.472.000		66.472.000		76.660.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	66.472.000	50	66.472.000	50	76.660.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				5.760.000		5.760.000		5.760.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.760.000	50	5.760.000	50	5.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					998.288.000		1.080.638.000		1.081.099.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	75	253.575.000	75	253.575.000	75	184.560.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		21.900.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	24.000.000	75	24.000.000	75	21.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				214.575.000		214.575.000		155.810.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	214.575.000	75	214.575.000	75	155.810.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.500.000		7.500.000		1.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.500.000	75	7.500.000	75	1.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		7.500.000		5.100.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.500.000	4	7.500.000	4	5.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	75	744.713.000	75	827.063.000	75	896.539.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				590.063.000		672.413.000		640.564.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	590.063.000	75	672.413.000	75	640.564.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				141.150.000		141.150.000		171.225.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	141.150.000	75	141.150.000	75	171.225.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		84.750.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	13.500.000	75	13.500.000	75	84.750.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					674.700.000		740.580.000		747.905.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	60	73.095.000	60	73.095.000	60	67.095.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				19.095.000		19.095.000		19.095.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	19.095.000	60	19.095.000	60	19.095.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.000.000		6.000.000				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	6.000.000	120	6.000.000	120		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	60	18.000.000	60	18.000.000	60	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	60	601.605.000	60	667.485.000	60	680.810.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				477.525.000		543.405.000		543.330.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	477.525.000	60	543.405.000	60	543.330.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				109.680.000		109.680.000		114.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	109.680.000	60	109.680.000	60	114.080.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				14.400.000		14.400.000		23.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	14.400.000	60	14.400.000	60	23.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0.03	1.071.400.000	0.03	1.159.240.000	0.03	1.204.176.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.071.400.000		1.159.240.000		1.204.176.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	80	268.880.000	80	268.880.000	80	241.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		21.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	24.000.000	80	24.000.000	80	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				228.880.000		228.880.000		214.080.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	228.880.000	80	228.880.000	80	214.080.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		8.000.000				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	8.000.000	80	8.000.000	80		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.000.000		8.000.000		5.720.000		

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	8.000.000	4	8.000.000	4	5.720.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	80	802.520.000	80	890.360.000	80	962.776.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				629.400.000		717.240.000		721.656.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	629.400.000	80	717.240.000	80	721.656.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				158.720.000		158.720.000		158.720.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	158.720.000	80	158.720.000	80	158.720.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				14.400.000		14.400.000		82.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	14.400.000	80	14.400.000	80	82.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0.05	1.576.740.000	0.05	1.708.500.000	0.05	1.752.441.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.576.740.000		1.708.500.000		1.752.441.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	120	391.320.000	120	391.320.000	120	379.320.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	24.000.000	120	24.000.000	120	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				343.320.000		343.320.000		343.320.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	343.320.000	120	343.320.000	120	343.320.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.000.000		12.000.000				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	12.000.000	120	12.000.000	120		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	120	1.185.420.000	120	1.317.180.000	120	1.373.121.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				944.100.000		1.075.860.000		1.075.801.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	944.100.000	120	1.075.860.000	120	1.075.801.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				219.720.000		219.720.000		219.720.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	219.720.000	120	219.720.000	120	219.720.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		77.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	21.600.000	120	21.600.000	120	77.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0.07	1.929.325.000	0.07	2.115.985.000	0.07	1.933.566.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					613.525.000		668.425.000		548.334.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	50	122.150.000	50	122.150.000	50	119.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	24.000.000	50	24.000.000	50	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				88.150.000		88.150.000		85.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	88.150.000	50	88.150.000	50	85.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	50	491.375.000	50	546.275.000	50	429.184.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				393.375.000		448.275.000		331.184.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	50	448.275.000	50	331.184.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				89.000.000		89.000.000		89.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	89.000.000	50	89.000.000	50	89.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	9.000.000	50	9.000.000	50	9.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.315.800.000		1.447.560.000		1.385.232.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	120	112.590.000	120	112.590.000	120	132.090.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	36.000.000	120	36.000.000	120	36.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				28.590.000		28.590.000		28.590.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	28.590.000	120	28.590.000	120	28.590.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	12.000.000	120	12.000.000	120	12.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		36.000.000		55.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	24	36.000.000	24	36.000.000	24	55.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	Orang	120	1.203.210.000	120	1.334.970.000	120	1.253.142.000		
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				955.050.000		1.086.810.000		1.012.478.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	955.050.000	120	1.086.810.000	120	1.012.478.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				219.360.000		219.360.000		211.864.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	219.360.000	120	219.360.000	120	211.864.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				28.800.000		28.800.000		28.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	28.800.000	120	28.800.000	120	28.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0.07	1.703.306.000	0.07	1.878.986.000	0.07	1.689.429.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					567.765.000		622.665.000		566.237.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	50	79.300.000	50	79.300.000	50	74.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.000.000		53.000.000		53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	50	53.000.000	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.800.000		11.800.000		11.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.800.000	50	11.800.000	50	11.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.500.000		9.500.000		740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	9.500.000	0	9.500.000	50	740.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		5.000.000		8.760.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	8.760.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	50	488.465.000	50	543.365.000	50	491.937.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		448.275.000		396.847.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	50	448.275.000	50	396.847.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				83.090.000		83.090.000		83.090.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	83.090.000	50	83.090.000	50	83.090.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.135.541.000		1.256.321.000		1.123.192.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	110	117.150.000	110	117.150.000	110	96.015.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				59.000.000		59.000.000		59.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	110	59.000.000	110	59.000.000	110	59.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				14.150.000		14.150.000		14.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	110	14.150.000	110	14.150.000	110	14.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				33.000.000		33.000.000		6.625.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	110	33.000.000	110	33.000.000	110	6.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				11.000.000		11.000.000		16.240.000		

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	11.000.000	4	11.000.000	4	16.240.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	110	1.018.391.000	110	1.139.171.000	110	1.027.177.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				865.425.000		986.205.000		871.711.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	110	865.425.000	110	986.205.000	110	871.711.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				137.126.000		137.126.000		137.126.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	110	137.126.000	110	137.126.000	110	137.126.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				15.840.000		15.840.000		18.340.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	110	15.840.000	110	15.840.000	110	18.340.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0.11	2.618.668.000	0.11	2.898.658.000	0.11	2.929.474.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					928.241.000		1.021.571.000		981.803.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo	Orang	85	97.850.000	85	97.850.000	85	90.760.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang							SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				56.500.000		56.500.000		56.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	56.500.000	85	56.500.000	85	56.200.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				16.700.000		16.700.000		16.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	16.700.000	85	16.700.000	85	16.700.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				16.150.000		16.150.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	16.150.000	85	16.150.000	85	12.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				8.500.000		8.500.000		5.860.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	8.500.000	4	8.500.000	4	5.860.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	85	830.391.000	85	923.721.000	85	891.043.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				668.738.000		762.068.000		769.165.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	668.738.000	85	762.068.000	85	769.165.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				141.253.000		141.253.000		101.478.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	141.253.000	85	141.253.000	85	101.478.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.400.000		20.400.000		20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	20.400.000	85	20.400.000	85	20.400.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.690.427.000		1.877.087.000		1.947.671.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	116.550.000	170	116.550.000	170	92.650.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				65.000.000		65.000.000		51.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	65.000.000	170	65.000.000	170	51.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.050.000		9.050.000		9.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	9.050.000	170	9.050.000	170	9.050.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				25.500.000		25.500.000		15.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	170	25.500.000	170	25.500.000	170	15.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				17.000.000		17.000.000		17.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	1.573.877.000	170	1.760.537.000	170	1.855.021.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.337.475.000		1.524.135.000		1.620.949.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	1.337.475.000	170	1.524.135.000	170	1.620.949.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				211.922.000		211.922.000		209.592.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	211.922.000	170	211.922.000	170	209.592.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				24.480.000		24.480.000		24.480.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	24.480.000	170	24.480.000	170	24.480.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0.1	2.529.433.000	0.1	2.792.953.000	0.1	2.741.593.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.529.433.000		2.792.953.000		2.741.593.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	240	184.800.000	240	184.800.000	240	161.342.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang							SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				72.000.000		72.000.000		72.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	240	72.000.000	240	72.000.000	240	72.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				43.200.000		43.200.000		43.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	240	43.200.000	240	43.200.000	240	43.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				45.600.000		45.600.000		29.130.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	45.600.000	240	45.600.000	240	29.130.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				24.000.000		24.000.000		17.012.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	24.000.000	4	24.000.000	4	17.012.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	240	2.344.633.000	240	2.608.153.000	240	2.580.251.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.888.200.000		2.151.720.000		2.148.868.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	240	1.888.200.000	240	2.151.720.000	240	2.148.868.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				398.833.000		398.833.000		373.783.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	240	398.833.000	240	398.833.000	240	373.783.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				57.600.000		57.600.000		57.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	240	57.600.000	240	57.600.000	240	57.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0.03	1.055.080.000	0.03	1.142.920.000	0.03	1.207.330.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.055.080.000		1.142.920.000		1.207.330.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	80	268.880.000	80	268.880.000	80	258.790.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	24.000.000	80	24.000.000	80	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				228.880.000		228.880.000		218.880.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	228.880.000	80	228.880.000	80	218.880.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		8.000.000		740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	8.000.000	80	8.000.000	80	740.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.000.000		8.000.000		15.170.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	8.000.000	4	8.000.000	4	15.170.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	80	786.200.000	80	874.040.000	80	948.540.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				629.400.000		717.240.000		720.740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	629.400.000	80	717.240.000	80	720.740.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				142.400.000		142.400.000		142.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	142.400.000	80	142.400.000	80	142.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				14.400.000		14.400.000		85.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	14.400.000	80	14.400.000	80	85.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0.09	2.117.461.000	0.09	2.337.061.000	0.09	2.287.291.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.117.461.000		2.337.061.000		2.287.291.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	163.601.000	200	163.601.000	200	163.601.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang							SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				68.000.000		68.000.000		68.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	68.000.000	200	68.000.000	200	68.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				37.601.000		37.601.000		37.601.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	37.601.000	200	37.601.000	200	37.601.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				38.000.000		38.000.000		38.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	38.000.000	200	38.000.000	200	38.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	1.953.860.000	200	2.173.460.000	200	2.123.690.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.573.500.000		1.793.100.000		1.793.330.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.573.500.000	200	1.793.100.000	200	1.793.330.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				332.360.000		332.360.000		282.360.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	332.360.000	200	332.360.000	200	282.360.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	48.000.000	200	48.000.000	200	48.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0.05	1.388.213.000	0.05	1.525.463.000	0.05	1.345.311.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.388.213.000		1.525.463.000		1.345.311.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	125	171.850.000	125	171.850.000	125	158.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				108.500.000		108.500.000		111.050.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	125	108.500.000	125	108.500.000	125	111.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.100.000		27.100.000		27.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	125	27.100.000	125	27.100.000	125	27.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				23.750.000		23.750.000		7.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	23.750.000	0	23.750.000	125	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.500.000		12.500.000		12.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	125	1.216.363.000	125	1.353.613.000	125	1.187.161.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				983.438.000		1.120.688.000		970.061.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	125	983.438.000	125	1.120.688.000	125	970.061.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				207.725.000		207.725.000		192.100.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	125	207.725.000	125	207.725.000	125	192.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				25.200.000		25.200.000		25.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	125	25.200.000	125	25.200.000	125	25.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0.06	1.758.523.000	0.06	2.514.588.000	0.06	2.443.174.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					818.048.000		900.398.000		800.782.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	75	92.550.000	75	92.550.000	75	93.205.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	55.500.000	75	55.500.000	75	55.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.300.000		15.300.000		17.135.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	70	15.300.000	70	15.300.000	70	17.135.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.250.000		14.250.000		10.950.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	14.250.000	0	14.250.000	75	10.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.500.000		7.500.000		9.620.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	7.500.000	4	7.500.000	4	9.620.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	75	725.498.000	75	807.848.000	75	707.577.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				590.063.000		672.413.000		572.797.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	590.063.000	75	672.413.000	75	572.797.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				124.635.000		124.635.000		117.980.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	Orang	75	124.635.000	75	124.635.000	75	117.980.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				10.800.000		10.800.000		16.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	70	10.800.000	70	10.800.000	70	16.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					940.475.000		1.017.335.000		1.042.612.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	70	238.270.000	70	238.270.000	70	239.932.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		25.562.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	70	24.000.000	70	24.000.000	70	25.562.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				200.270.000		200.270.000		200.270.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	70	200.270.000	70	200.270.000	70	200.270.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.000.000		7.000.000		6.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	7.000.000	70	7.000.000	70	6.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.000.000		7.000.000		7.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang	70	702.205.000	70	779.065.000	70	802.680.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				550.725.000		627.585.000		596.862.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	70	550.725.000	70	627.585.000	70	596.862.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				138.880.000		138.880.000		137.218.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	70	138.880.000	70	138.880.000	70	137.218.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				12.600.000		12.600.000		68.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	70	12.600.000	70	12.600.000	70	68.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti							596.855.000		599.780.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi	Orang				79.050.000		79.050.000		
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						53.000.000		53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang			50	53.000.000	50	53.000.000		
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						6.050.000		7.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang			50	6.050.000	50	7.600.000		
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal						15.000.000		13.450.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang			10	15.000.000	10	13.450.000		
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA						5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen			4	5.000.000	4	5.000.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	Orang				517.805.000		520.730.000		
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan						448.275.000		451.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang			50	448.275.000	50	451.200.000		
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang						62.330.000		62.330.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang			50	62.330.000	50	62.330.000		
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses						7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang			50	7.200.000	50	7.200.000		
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0.07	1.870.067.000	0.07	2.056.727.000	0.07	2.078.980.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					928.241.000		1.021.571.000		1.058.293.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	928.241.000	85	1.021.571.000	85	1.058.293.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				668.738.000		762.068.000		798.320.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	668.738.000	85	762.068.000	85	798.320.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				141.253.000		141.253.000		137.853.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	141.253.000	85	141.253.000	85	137.853.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.400.000		20.400.000		20.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	20.400.000	85	20.400.000	85	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang							SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				56.500.000		56.500.000		56.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	56.500.000	85	56.500.000	85	56.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				16.700.000		16.700.000		16.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	16.700.000	85	16.700.000	85	16.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				16.150.000		16.150.000		18.120.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	16.150.000	0	16.150.000	85	18.120.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				8.500.000		8.500.000		10.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	8.500.000	4	8.500.000	4	10.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					941.826.000		1.035.156.000		1.020.687.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	89.552.000	85	89.552.000	85	83.952.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				32.500.000		32.500.000		32.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	32.500.000	85	32.500.000	85	32.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				23.052.000		23.052.000		23.052.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	23.052.000	85	23.052.000	85	23.052.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.500.000		8.500.000		10.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	8.500.000	85	8.500.000	85	10.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				25.500.000		25.500.000		18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	17	25.500.000	17	25.500.000	17	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	852.274.000	85	945.604.000	85	936.735.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				676.494.000		769.824.000		764.355.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	676.494.000	85	769.824.000	85	764.355.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				155.380.000		155.380.000		151.980.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	155.380.000	85	155.380.000	85	151.980.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				20.400.000		20.400.000		20.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	20.400.000	85	20.400.000	85	20.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0.12	3.390.403.000	0.12	3.708.823.000	0.12	3.472.418.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.499.502.000		1.653.222.000		1.551.727.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	140	131.800.000	140	131.800.000	140	124.444.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				62.000.000		62.000.000		65.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	62.000.000	140	62.000.000	140	65.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				29.200.000		29.200.000		32.114.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	29.200.000	140	29.200.000	140	32.114.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				26.600.000		26.600.000		12.380.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	26.600.000	0	26.600.000	140	12.380.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	140	1.367.702.000	140	1.521.422.000	140	1.427.283.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.101.450.000		1.255.170.000		1.161.031.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.101.450.000	140	1.255.170.000	140	1.161.031.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				232.652.000		232.652.000		232.652.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	232.652.000	140	232.652.000	140	232.652.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				33.600.000		33.600.000		33.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	33.600.000	140	33.600.000	140	33.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.323.050.000		1.432.850.000		1.310.005.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	330.100.000	100	330.100.000	100	320.806.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				286.100.000		286.100.000		281.431.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	286.100.000	100	286.100.000	100	281.431.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		10.000.000		5.375.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	992.950.000	100	1.102.750.000	100	989.199.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				786.750.000		896.550.000		782.999.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	786.750.000	100	896.550.000	100	782.999.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				188.200.000		188.200.000		188.200.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	188.200.000	100	188.200.000	100	188.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					567.851.000		622.751.000		610.686.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	66.513.000	50	66.513.000	50	69.513.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				29.000.000		29.000.000		29.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	29.000.000	50	29.000.000	50	29.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.513.000		17.513.000		17.513.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	17.513.000	50	17.513.000	50	17.513.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				15.000.000		15.000.000		18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	10	15.000.000	10	15.000.000	10	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	501.338.000	50	556.238.000	50	541.173.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				397.938.000		452.838.000		437.773.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	397.938.000	50	452.838.000	50	437.773.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				91.400.000		91.400.000		91.400.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	91.400.000	50	91.400.000	50	91.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0.11	2.893.978.000	0.11	3.179.458.000	0.11	3.210.368.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.220.453.000		2.451.033.000		2.457.993.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	210	168.900.000	210	168.900.000	210	167.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				69.000.000		69.000.000		69.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	210	69.000.000	210	69.000.000	210	69.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				39.000.000		39.000.000		39.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	210	39.000.000	210	39.000.000	210	39.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				39.900.000		39.900.000		33.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	39.900.000	0	39.900.000	210	33.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				21.000.000		21.000.000		25.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	21.000.000	4	21.000.000	4	25.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	210	2.051.553.000	210	2.282.133.000	210	2.290.943.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.652.175.000		1.882.755.000		1.891.565.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	210	1.652.175.000	210	1.882.755.000	210	1.891.565.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				348.978.000		348.978.000		348.978.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	210	348.978.000	210	348.978.000	210	348.978.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				50.400.000		50.400.000		50.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Unit	210	50.400.000	210	50.400.000	210	50.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					673.525.000		728.425.000		752.375.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	50	177.050.000	50	177.050.000	50	156.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	24.000.000	50	24.000.000	50	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				143.050.000		143.050.000		125.050.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	143.050.000	50	143.050.000	50	125.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		5.000.000				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.000.000	50	5.000.000	50		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.000.000		5.000.000		7.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	7.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	50	496.475.000	50	551.375.000	50	596.325.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				393.375.000		448.275.000		450.725.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	50	448.275.000	50	450.725.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				94.100.000		94.100.000		94.100.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	94.100.000	50	94.100.000	50	94.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				9.000.000		9.000.000		51.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	9.000.000	50	9.000.000	50	51.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0.04	995.251.000	0.04	1.094.071.000	0.04	1.092.438.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					995.251.000		1.094.071.000		1.092.438.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	90	92.843.000	90	92.843.000	90	92.843.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	33.000.000	90	33.000.000	90	33.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				23.843.000		23.843.000		23.843.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	23.843.000	90	23.843.000	90	23.843.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	9.000.000	90	9.000.000	90	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	18	27.000.000	18	27.000.000	18	27.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Orang	90	902.408.000	90	1.001.228.000	90	999.595.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				716.288.000		815.108.000		813.475.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	716.288.000	90	815.108.000	90	813.475.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				164.520.000		164.520.000		164.520.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	164.520.000	90	164.520.000	90	164.520.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	21.600.000	90	21.600.000	90	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0.04	1.202.325.000	0.04	1.301.145.000	0.04	1.403.538.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.202.325.000		1.301.145.000		1.403.538.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	90	299.490.000	90	299.490.000	90	307.812.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	24.000.000	90	24.000.000	90	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				257.490.000		257.490.000		274.812.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	257.490.000	90	257.490.000	90	274.812.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		9.000.000				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	9.000.000	90	9.000.000	90		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	90	902.835.000	90	1.001.655.000	90	1.095.726.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				708.075.000		806.895.000		818.503.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	708.075.000	90	806.895.000	90	818.503.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				178.560.000		178.560.000		183.930.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	178.560.000	90	178.560.000	90	183.930.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				16.200.000		16.200.000		93.293.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	Orang	90	16.200.000	90	16.200.000	90	93.293.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0.11	2.739.619.000	0.11	3.019.609.000	0.11	2.733.428.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.859.979.000		2.052.129.000		2.107.966.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	175	150.351.000	175	150.351.000	175	118.891.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang							SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				65.500.000		65.500.000		65.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	175	65.500.000	175	65.500.000	175	65.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				34.101.000		34.101.000		23.701.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	175	34.101.000	175	34.101.000	175	23.701.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				33.250.000		33.250.000		17.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	33.250.000	0	33.250.000	175	17.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				17.500.000		17.500.000		12.690.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	Dokumen	4	17.500.000	4	17.500.000	4	12.690.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha	Orang	175	1.709.628.000	175	1.901.778.000	175	1.989.075.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.376.813.000		1.568.963.000		1.645.760.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	175	1.376.813.000	175	1.568.963.000	175	1.645.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				290.815.000		290.815.000		301.315.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	175	290.815.000	175	290.815.000	175	301.315.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	175	42.000.000	175	42.000.000	175	42.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					879.640.000		967.480.000		625.462.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	85.280.000	80	85.280.000	80	115.290.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				60.000.000		60.000.000		90.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	60.000.000	80	60.000.000	80	90.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.280.000		9.280.000		7.280.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	9.280.000	80	9.280.000	80	7.280.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		8.000.000		3.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	8.000.000	80	8.000.000	80	3.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8.000.000		8.000.000		14.610.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	8.000.000	4	8.000.000	4	14.610.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	794.360.000	80	882.200.000	80	510.172.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				629.400.000		717.240.000		369.595.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	629.400.000	80	717.240.000	80	369.595.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				150.560.000		150.560.000		97.417.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	150.560.000	80	150.560.000	80	97.417.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				14.400.000		14.400.000		43.160.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	14.400.000	80	14.400.000	80	43.160.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0.03	990.638.000	0.03	1.072.988.000	0.03	1.142.723.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					990.638.000		1.072.988.000		1.142.723.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	75	253.575.000	75	253.575.000	75	268.188.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	24.000.000	75	24.000.000	75	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				214.575.000		214.575.000		230.748.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	214.575.000	75	214.575.000	75	230.748.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.500.000	75	7.500.000	75	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.500.000		7.500.000		5.940.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.500.000	4	7.500.000	4	5.940.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Orang	75	737.063.000	75	819.413.000	75	874.535.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				590.063.000		672.413.000		666.535.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	590.063.000	75	672.413.000	75	666.535.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				133.500.000		133.500.000		133.500.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	133.500.000	75	133.500.000	75	133.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		74.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	13.500.000	75	13.500.000	75	74.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0.06	1.592.526.000	0.06	1.751.736.000	0.06	1.751.736.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.592.526.000		1.751.736.000		1.751.736.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	138.647.000	145	138.647.000	145	138.647.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				38.500.000		38.500.000		38.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provins	Orang	145	38.500.000	145	38.500.000	145	38.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				42.147.000		42.147.000		42.147.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	145	42.147.000	145	42.147.000	145	42.147.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				14.500.000		14.500.000		14.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	14.500.000	145	14.500.000	145	14.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				43.500.000		43.500.000		43.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	28	43.500.000	28	43.500.000	28	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	1.453.879.000	145	1.613.089.000	145	1.613.089.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.154.019.000		1.313.229.000		1.313.229.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.154.019.000	145	1.313.229.000	145	1.313.229.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				265.060.000		265.060.000		265.060.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	145	265.060.000	145	265.060.000	145	265.060.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				34.800.000		34.800.000		34.800.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	145	34.800.000	145	34.800.000	145	34.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0.09	2.079.091.000	0.09	2.298.691.000	0.09	1.651.031.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
		1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					562.966.000		617.866.000		587.212.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	79.301.000	50	79.301.000	50	79.301.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				53.000.000		53.000.000		53.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	53.000.000	50	53.000.000	50	53.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.801.000		11.801.000		11.801.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.801.000	50	11.801.000	50	11.801.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.500.000		9.500.000		7.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	9.500.000	0	9.500.000	50	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.0012			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		5.000.000		7.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	7.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	483.665.000	50	538.565.000	50	507.911.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				393.375.000		448.275.000		423.021.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	393.375.000	50	448.275.000	50	423.021.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				83.090.000		83.090.000		77.690.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	83.090.000	50	83.090.000	50	77.690.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.200.000	50	7.200.000	50	7.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.516.125.000		1.680.825.000		1.063.819.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	150	109.050.000	150	109.050.000	150	109.050.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				63.000.000		63.000.000		68.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	63.000.000	150	63.000.000	150	68.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				8.550.000		8.550.000		8.550.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	8.550.000	150	8.550.000	150	8.550.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				22.500.000		22.500.000		17.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	150	22.500.000	150	22.500.000	150	17.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	150	1.407.075.000	150	1.571.775.000	150	954.769.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.180.125.000		1.344.825.000		753.319.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	1.180.125.000	150	1.344.825.000	150	753.319.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				205.350.000		205.350.000		179.850.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	205.350.000	150	205.350.000	150	179.850.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	21.600.000	150	21.600.000	150	21.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0.08	2.155.641.000	0.08	2.331.321.000	0.08	1.885.068.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.160.390.000		1.237.250.000		777.635.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	100	94.600.000	100	94.600.000	100	110.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				63.000.000		63.000.000		67.950.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	63.000.000	100	63.000.000	100	67.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.600.000		11.600.000		11.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	11.600.000	100	11.600.000	100	11.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		21.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	21.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	100	1.065.790.000	100	1.142.650.000	100	666.685.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				841.650.000		918.510.000		487.355.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	841.650.000	100	918.510.000	100	487.355.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				206.140.000		206.140.000		161.330.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	206.140.000	100	206.140.000	100	161.330.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					995.251.000		1.094.071.000		1.107.433.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya	Orang	90	92.843.000	90	92.843.000	90	93.743.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	33.000.000	90	33.000.000	90	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0009			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				23.843.000		23.843.000		24.743.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	23.843.000	90	23.843.000	90	24.743.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	9.000.000	90	9.000.000	90	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	18	27.000.000	18	27.000.000	18	27.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Orang	90	902.408.000	90	1.001.228.000	90	1.013.690.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				716.288.000		815.108.000		812.570.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	716.288.000	90	815.108.000	90	812.570.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				164.520.000		164.520.000		164.520.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	164.520.000	90	164.520.000	90	164.520.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		36.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	21.600.000	90	21.600.000	90	36.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0.06	1.706.135.000	0.06	1.848.875.000	0.06	1.917.593.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.706.135.000		1.848.875.000		1.917.593.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	130	421.930.000	130	421.930.000	130	460.870.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.000.000		24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130	24.000.000	130	24.000.000	130	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				371.930.000		371.930.000		410.870.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130	371.930.000	130	371.930.000	130	410.870.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	13.000.000	130	13.000.000	130	13.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	Orang	130	1.284.205.000	130	1.426.945.000	130	1.456.723.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.0002			Penyediaan Makanan				1.022.775.000		1.165.515.000		1.124.558.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.022.775.000	130	1.165.515.000	130	1.124.558.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				238.030.000		238.030.000		216.765.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130	238.030.000	130	238.030.000	130	216.765.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				23.400.000		23.400.000		115.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	130	23.400.000	130	23.400.000	130	115.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						150.000.000		150.000.000		193.656.000		
						Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	193.656.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1.06.05.1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					150.000.000		150.000.000		193.656.000		
						Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Dokumen	200	150.000.000	200	150.000.000	200	193.656.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI				150.000.000		150.000.000		193.656.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	200	150.000.000	200	150.000.000	200	193.656.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**137.357.093.000**		**137.984.683.000**		**133.667.160.000**	**Dinas Sosial**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	94.1		94.1		82.18		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**136.357.093.000**		**136.984.683.000**		**132.667.160.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.5	136.357.093.000	87.5	88	89	132.667.160.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						136.357.093.000		136.984.683.000		132.667.160.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	267.300.000	100	267.300.000	100	334.546.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.300.000		80.300.000		85.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	100	80.300.000	100	80.300.000	100	85.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.500.000		17.500.000		22.500.000		
						umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	17.500.000	4	17.500.000	4	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.400.000		127.400.000		146.396.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Laporan	4	127.400.000	4	127.400.000	4	146.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		1.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	1.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.400.000		125.400.000		145.296.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	125.400.000	4	125.400.000	4	145.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.600.000		59.600.000		102.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	Unit	4	59.600.000	4	59.600.000	4	102.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.600.000		12.600.000		35.850.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	12.600.000	2	12.600.000	2	35.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	365.800.000	100	365.800.000	100	389.360.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					107.300.000		107.300.000		116.310.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	107.300.000	100	107.300.000	100	116.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		11.650.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	7.500.000	2	7.500.000	2	11.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		2.400.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.500.000	0	1.500.000	2	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		9.000.000		10.460.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	2	9.000.000	2	10.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		40.800.000		42.600.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	4	40.800.000	4	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		5.400.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	10.500.000	2	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.500.000		27.500.000		28.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	27.500.000	4	27.500.000	4	28.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.800.000		165.800.000		163.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Laporan	4	165.800.000	4	165.800.000	4	163.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.800.000		162.800.000		162.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	162.800.000	4	162.800.000	4	162.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92.700.000		92.700.000		109.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Unit	6	92.700.000	6	92.700.000	6	109.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.200.000		22.200.000		23.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	22.200.000	2	22.200.000	2	23.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	220.200.000	100	220.200.000	100	246.560.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.800.000		87.800.000		98.795.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	87.800.000	100	87.800.000	100	98.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		35.995.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	35.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									6.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	0		0		0	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								6.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.600.000		74.600.000		66.965.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Laporan	4	74.600.000	4	74.600.000	4	66.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.600.000		72.600.000		64.965.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	72.600.000	4	72.600.000	4	64.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.800.000		57.800.000		74.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Unit	4	57.800.000	4	57.800.000	4	74.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.800.000		10.800.000		10.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		57.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	227.300.000	100	227.300.000	100	246.200.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.300.000		85.300.000		98.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	100	85.300.000	100	85.300.000	100	98.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		3.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.500.000		22.500.000		33.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	22.500.000	4	22.500.000	4	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					81.200.000		81.200.000		79.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	81.200.000	4	81.200.000	4	79.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.200.000		79.200.000		79.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	79.200.000	4	79.200.000	4	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.800.000		60.800.000		67.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	Unit	4	60.800.000	4	60.800.000	4	67.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.800.000		13.800.000		12.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.800.000	2	13.800.000	2	12.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		2.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		3.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	269.500.000	100	269.500.000	100	274.500.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100.300.000		100.300.000		97.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	100.300.000	100	100.300.000	100	97.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		28.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	28.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.500.000		37.500.000		42.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	37.500.000	4	37.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.000.000		112.000.000		112.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Laporan	4	112.000.000	4	112.000.000	4	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.200.000		57.200.000		65.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	4	57.200.000	4	57.200.000	4	65.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.200.000		10.200.000		10.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.200.000	2	10.200.000	2	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	275.000.000	100	275.000.000	100	330.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					102.800.000		102.800.000		105.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	102.800.000	100	102.800.000	100	105.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		22.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.000.000		112.000.000		103.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Laporan	4	112.000.000	4	112.000.000	4	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		110.000.000		101.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	110.000.000	4	110.000.000	4	101.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.200.000		60.200.000		121.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit	4	60.200.000	4	60.200.000	4	121.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		13.200.000		13.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	2	13.200.000	2	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		101.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	101.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	214.200.000	100	214.200.000	100	248.725.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					90.300.000		90.300.000		111.275.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	90.300.000	100	90.300.000	100	111.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.500.000		27.500.000		48.475.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	27.500.000	4	27.500.000	4	48.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.500.000		62.500.000		61.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Laporan	4	62.500.000	4	62.500.000	4	61.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.500.000		60.500.000		60.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	60.500.000	4	60.500.000	4	60.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.400.000		61.400.000		76.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	4	61.400.000	4	61.400.000	4	76.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.400.000		14.400.000		14.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	14.400.000	2	14.400.000	2	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		53.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		5.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	5.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	221.100.000	100	221.100.000	100	229.100.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.300.000		92.300.000		96.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	92.300.000	100	92.300.000	100	96.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.800.000		38.800.000		32.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	38.800.000	4	38.800.000	4	32.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.500.000		27.500.000		36.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	27.500.000	4	27.500.000	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.600.000		74.600.000		77.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Laporan	4	74.600.000	4	74.600.000	4	77.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.600.000		72.600.000		75.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	72.600.000	4	72.600.000	4	75.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.200.000		54.200.000		55.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit	4	54.200.000	4	54.200.000	4	55.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.900.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	246.100.000	100	246.100.000	100	346.625.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.800.000		87.800.000		120.810.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	87.800.000	100	87.800.000	100	120.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		34.010.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	34.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									25.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	0		0		0	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								25.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99.900.000		99.900.000		109.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Laporan	4	99.900.000	4	99.900.000	4	109.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.900.000		97.900.000		107.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	97.900.000	4	97.900.000	4	107.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.400.000		58.400.000		90.915.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit	4	58.400.000	4	58.400.000	4	90.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		11.400.000		19.290.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	11.400.000	2	11.400.000	2	19.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		64.625.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	64.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	339.900.000	100	339.900.000	100	360.683.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.800.000		119.800.000		139.260.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	119.800.000	100	119.800.000	100	139.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		40.800.000		40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	4	40.800.000	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.500.000	2	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		59.460.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	59.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.200.000		126.200.000		127.570.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Laporan	4	126.200.000	4	126.200.000	4	127.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		770.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				123.200.000		123.200.000		126.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	123.200.000	4	123.200.000	4	126.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.900.000		93.900.000		93.853.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Unit	6	93.900.000	6	93.900.000	6	93.853.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.400.000		23.400.000		23.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	23.400.000	2	23.400.000	2	23.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		59.953.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	59.953.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	341.100.000	100	341.100.000	100	366.565.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.800.000		119.800.000		130.315.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	119.800.000	100	119.800.000	100	130.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		9.000.000		9.515.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.515.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		40.800.000		40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	4	40.800.000	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.500.000	2	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000				
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		54.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	54.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					139.400.000		139.400.000		160.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Laporan	4	139.400.000	4	139.400.000	4	160.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.400.000		136.400.000		159.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	136.400.000	4	136.400.000	4	159.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					81.900.000		81.900.000		76.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	6	81.900.000	6	81.900.000	6	76.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		11.400.000		10.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannnya	Unit	2	11.400.000	2	11.400.000	2	10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		4.500.000		4.350.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		1.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	4	6.000.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	301.300.000	100	301.300.000	100	321.300.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.800.000		119.800.000		126.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	119.800.000	100	119.800.000	100	126.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		40.800.000		40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	4	40.800.000	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	10.500.000	2	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		46.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.000.000		102.000.000		100.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Laporan	4	102.000.000	4	102.000.000	4	100.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.000.000		99.000.000		99.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	99.000.000	4	99.000.000	4	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.500.000		79.500.000		94.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	4	79.500.000	4	79.500.000	4	94.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	384.400.000	100	320.400.000	100	325.400.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.300.000		134.800.000		139.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	154.300.000	100	134.800.000	100	139.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	1.500.000	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	12.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.800.000		40.800.000		40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	44.800.000	4	40.800.000	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.000.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah paket bahan material yg disediakan	Paket	2	14.000.000	2	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.500.000		55.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	57.500.000	4	55.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.100.000		94.100.000		92.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Laporan	4	115.100.000	4	94.100.000	4	92.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.100.000		91.100.000		89.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	111.100.000	4	91.100.000	4	89.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.000.000		91.500.000		92.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	4	115.000.000	4	91.500.000	4	92.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.000.000		21.000.000		22.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	21.000.000	2	21.000.000	2	22.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	6.000.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	80.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	166.000.000	100	166.000.000	100	168.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.200.000		70.200.000		72.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	100	70.200.000	100	70.200.000	100	72.700.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	2	500.000	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		17.200.000		17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	4	17.200.000	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		42.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	4	42.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.300.000		37.300.000		44.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Laporan	4	37.300.000	4	37.300.000	4	44.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.300.000		36.300.000		43.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	36.300.000	4	36.300.000	4	43.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.500.000		58.500.000		51.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	Unit	2	58.500.000	2	58.500.000	2	51.800.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		18.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	25.000.000	4	25.000.000	4	18.300.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	377.300.000	100	377.300.000	100	438.550.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					134.300.000		134.300.000		159.550.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	134.300.000	100	134.300.000	100	159.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	2.000.000	0	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.800.000		44.800.000		44.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	44.800.000	4	44.800.000	4	44.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				14.000.000		14.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	14.000.000	2	14.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.500.000		37.500.000		51.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	37.500.000	4	37.500.000	4	51.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.600.000		131.600.000		125.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Laporan	4	131.600.000	4	131.600.000	4	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.600.000		127.600.000		121.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	127.600.000	4	127.600.000	4	121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.400.000		111.400.000		154.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	8	111.400.000	8	111.400.000	8	154.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.400.000		17.400.000		17.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.400.000	2	17.400.000	2	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		122.600.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	80.000.000	4	80.000.000	4	122.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	160.500.000	100	160.500.000	100	150.450.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.200.000		60.200.000		59.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	100	60.200.000	100	60.200.000	100	59.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	500.000	0	500.000	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		17.200.000		17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	4	17.200.000	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		29.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	4	29.600.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.000.000		56.000.000		51.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Laporan	4	56.000.000	4	56.000.000	4	51.950.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.000.000		55.000.000		50.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	55.000.000	4	55.000.000	4	50.950.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.300.000		44.300.000		38.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	Unit	2	44.300.000	2	44.300.000	2	38.700.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.800.000		7.800.000		7.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.800.000	2	7.800.000	2	7.800.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		9.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	4	15.000.000	4	9.400.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	332.100.000	100	332.100.000	100	379.550.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.800.000		114.800.000		141.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	114.800.000	100	114.800.000	100	141.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		12.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	7.500.000	4	7.500.000	4	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.500.000	0	1.500.000	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		40.800.000		40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	4	40.800.000	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.500.000		10.500.000		15.000.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	10.500.000	2	10.500.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		35.000.000		52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	35.000.000	4	35.000.000	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.600.000		130.600.000		130.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Laporan	4	130.600.000	4	130.600.000	4	130.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.600.000		127.600.000		127.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	127.600.000	4	127.600.000	4	127.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.700.000		86.700.000		107.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	4	86.700.000	4	86.700.000	4	107.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.200.000		16.200.000		16.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	16.200.000	2	16.200.000	2	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000		4.500.000		2.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4.500.000	4	4.500.000	4	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		85.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	4	60.000.000	4	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		3.600.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	6.000.000	4	6.000.000	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	243.400.000	100	243.400.000	100	252.900.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					95.300.000		95.300.000		107.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	100	95.300.000	100	95.300.000	100	107.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.000.000	0	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000		32.500.000		45.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	32.500.000	4	32.500.000	4	45.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.300.000		93.300.000		93.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Laporan	4	93.300.000	4	93.300.000	4	93.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.300.000		91.300.000		91.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	91.300.000	4	91.300.000	4	91.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.800.000		54.800.000		52.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	Unit	4	54.800.000	4	54.800.000	4	52.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.800.000		7.800.000		7.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	7.800.000	2	7.800.000	2	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		6.600.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	279.000.000	100	279.000.000	100	307.700.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.800.000		101.800.000		106.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	101.800.000	100	101.800.000	100	106.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	1.000.000	0	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.800.000		40.800.000		40.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	40.800.000	4	40.800.000	4	40.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		35.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	35.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					116.400.000		116.400.000		125.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Laporan	4	116.400.000	4	116.400.000	4	125.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.400.000		114.400.000		123.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	114.400.000	4	114.400.000	4	123.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.800.000		60.800.000		75.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	4	60.800.000	4	60.800.000	4	75.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.800.000		13.800.000		13.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.800.000	2	13.800.000	2	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		55.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	261.000.000	100	325.000.000	100	330.000.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.800.000		112.300.000		114.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	92.800.000	100	112.300.000	100	114.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.500.000	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		40.800.000		38.850.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	40.800.000	4	38.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		4.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	4.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		32.500.000		39.450.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	4	32.500.000	4	39.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.800.000		130.800.000		133.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	109.800.000	4	130.800.000	4	133.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.800.000		127.800.000		130.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	107.800.000	4	127.800.000	4	130.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.400.000		81.900.000		81.900.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Unit	4	58.400.000	4	81.900.000	4	81.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		11.400.000		11.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	11.400.000	2	11.400.000	2	11.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	3.000.000	2	4.500.000	2	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	219.800.000	100	219.800.000	100	307.408.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.800.000		82.800.000		124.793.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	82.800.000	100	82.800.000	100	124.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.795.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		56.998.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	56.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									41.775.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	0		0		0	41.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								41.775.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0	41.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					76.800.000		76.800.000		76.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Laporan	4	76.800.000	4	76.800.000	4	76.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				74.800.000		74.800.000		74.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	74.800.000	4	74.800.000	4	74.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.200.000		60.200.000		64.040.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	4	60.200.000	4	60.200.000	4	64.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.200.000		13.200.000		12.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	13.200.000	2	13.200.000	2	12.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		7.840.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	7.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	131.700.000	100	131.700.000	100	157.264.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		50.200.000		76.589.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	50.200.000	100	50.200.000	100	76.589.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		6.400.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	4	2.500.000	4	6.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	2	500.000	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		8.489.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	2	8.489.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		17.200.000		13.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	4	17.200.000	4	13.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		3.500.000		9.600.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	2	3.500.000	2	9.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.500.000				
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		36.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	36.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.800.000		53.800.000		52.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Laporan	4	53.800.000	4	53.800.000	4	52.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.800.000		52.800.000		51.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	52.800.000	4	52.800.000	4	51.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					27.700.000		27.700.000		28.375.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	2	27.700.000	2	27.700.000	2	28.375.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.200.000		4.200.000		6.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	4.200.000	2	4.200.000	2	6.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.000.000		375.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2.000.000	4	2.000.000	4	375.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	165.000.000	100	165.000.000	100	171.090.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.200.000		55.200.000		68.790.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	100	55.200.000	100	55.200.000	100	68.790.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		500.000		750.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	2	500.000	2	750.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		6.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	2	6.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		17.200.000		20.950.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	4	17.200.000	4	20.950.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		3.500.000		7.100.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	2	3.500.000	2	7.100.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		27.490.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	27.490.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.300.000		70.300.000		58.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Laporan	4	70.300.000	4	70.300.000	4	58.300.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				69.300.000		69.300.000		57.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	69.300.000	4	69.300.000	4	57.300.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.500.000		39.500.000		44.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	Unit	2	39.500.000	2	39.500.000	2	44.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000		3.000.000		7.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	3.000.000	2	3.000.000	2	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	157.600.000	100	157.600.000	100	160.100.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.200.000		60.200.000		69.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.200.000	100	60.200.000	100	69.400.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	2	500.000	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		17.200.000		13.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	4	17.200.000	4	13.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		43.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	4	43.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.900.000		54.900.000		53.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	54.900.000	4	54.900.000	4	53.350.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.900.000		53.900.000		52.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	53.900.000	4	53.900.000	4	52.350.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.500.000		42.500.000		37.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	42.500.000	2	42.500.000	2	37.350.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6.000.000		6.000.000		9.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	6.000.000	2	6.000.000	2	9.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		1.500.000		3.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	4	1.500.000	4	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		4.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	4	15.000.000	4	4.350.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	138.900.000	100	138.900.000	100	140.900.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		50.200.000		52.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	50.200.000	100	50.200.000	100	52.700.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	2	500.000	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		17.200.000		17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	4	17.200.000	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		3.500.000		3.500.000		
						Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		22.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	22.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.400.000		60.400.000		59.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	60.400.000	4	60.400.000	4	59.900.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.400.000		59.400.000		58.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	59.400.000	4	59.400.000	4	58.900.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.300.000		28.300.000		28.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	28.300.000	2	28.300.000	2	28.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.800.000		4.800.000		4.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	4.800.000	2	4.800.000	2	4.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	272.600.000	100	272.600.000	100	301.235.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.800.000		82.800.000		99.435.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	82.800.000	100	82.800.000	100	99.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		7.175.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	5.000.000	4	5.000.000	4	7.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.800.000		36.800.000		36.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	36.800.000	4	36.800.000	4	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				7.000.000		7.000.000		12.700.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	2	7.000.000	2	7.000.000	2	12.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		28.760.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	28.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.000.000		123.000.000		123.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Laporan	4	123.000.000	4	123.000.000	4	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.000.000		121.000.000		121.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	121.000.000	4	121.000.000	4	121.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.800.000		66.800.000		78.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Unit	4	66.800.000	4	66.800.000	4	78.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.800.000		19.800.000		19.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	19.800.000	2	19.800.000	2	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		52.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	4	40.000.000	4	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	191.000.000	100	191.000.000	100	205.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.200.000		60.200.000		71.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.200.000	100	60.200.000	100	71.700.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	500.000	2	500.000	2	500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.200.000		17.200.000		17.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	17.200.000	4	17.200.000	4	17.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4		4		4		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				3.500.000		3.500.000		5.756.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	3.500.000	2	3.500.000	2	5.756.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		39.244.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	4	39.244.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.500.000		83.500.000		76.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	83.500.000	4	83.500.000	4	76.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.500.000		82.500.000		75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	82.500.000	4	82.500.000	4	75.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.300.000		47.300.000		57.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		47.300.000		47.300.000		57.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.800.000		10.800.000		10.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.800.000	2	10.800.000	2	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	4	20.000.000	4	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	129.587.993.000	100	130.215.583.000	100	125.176.949.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					105.409.013.000		105.409.013.000		98.493.862.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	105.409.013.000	5	105.409.013.000	5	98.493.862.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				103.759.013.000		103.759.013.000		96.843.862.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	599	103.759.013.000	599	103.759.013.000	599	96.843.862.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				145.000.000		145.000.000		145.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.000.000		520.680.000		520.680.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	175.000.000	100	520.680.000	100	520.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						345.680.000		345.680.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		1	345.680.000	1	345.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				125.000.000		125.000.000		159.150.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	125.000.000	4	125.000.000	4	159.150.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		15.850.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	50.000.000	10	50.000.000	10	15.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.291.000.000		2.291.000.000		2.430.050.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.291.000.000	100	2.291.000.000	100	2.430.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		16.800.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	20.000.000	4	20.000.000	4	16.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				420.000.000		420.000.000		292.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	420.000.000	4	420.000.000	4	292.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		108.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.330.000.000		1.330.000.000		1.576.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	1.330.000.000	4	1.330.000.000	4	1.576.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000		30.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					275.780.000		275.780.000		1.213.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	275.780.000	5	275.780.000	5	1.213.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel								43.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0	43.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.780.000		105.780.000		1.000.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	105.780.000	8	105.780.000	8	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		170.000.000		170.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.082.200.000		18.082.200.000		17.456.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	18.082.200.000	4	18.082.200.000	4	17.456.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				713.000.000		713.000.000		645.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	713.000.000	4	713.000.000	4	645.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.119.200.000		17.119.200.000		16.661.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	17.119.200.000	4	17.119.200.000	4	16.661.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.205.000.000		3.486.910.000		4.912.057.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	3.205.000.000	5	3.486.910.000	5	4.912.057.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				160.000.000		160.000.000		190.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	160.000.000	6	160.000.000	6	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				340.000.000		340.000.000		390.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	340.000.000	20	340.000.000	20	390.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		85.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	75.000.000	10	75.000.000	10	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.380.000.000		2.661.910.000		3.965.707.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	2.380.000.000	10	2.661.910.000	10	3.965.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		281.350.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	250.000.000	12	250.000.000	12	281.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	79.8	1.000.000.000	79.8	80	2.7	1.000.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									**363.538.221.000**		**389.294.651.000**		**383.179.500.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**89.193.895.000**		**87.379.610.000**		**85.247.772.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	90		90		72		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**87.838.589.000**		**86.024.304.000**		**84.188.966.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.1	87.838.589.000	85.1	85	85.1	84.188.966.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						87.838.589.000		86.024.304.000		84.188.966.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	900.000.000	100	1.200.000.000	100	1.260.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Penyediaan Bahan/Material										
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					838.000.000		838.000.000		898.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	838.000.000	1	838.000.000	1	898.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				218.352.000		218.352.000		278.352.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	218.352.000	1	218.352.000	1	278.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				619.648.000		619.648.000		619.648.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	619.648.000	1	619.648.000	1	619.648.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.000.000		302.000.000		302.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	2.000.000	4	302.000.000	4	302.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.000			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000		300.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	664.213.000	100	664.213.000	100	664.213.000	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.800.000		34.800.000		34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.800.000	12	34.800.000	12	34.800.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		34.800.000		34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	34.800.000	1	34.800.000	1	34.800.000		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.000.000		9.000.000		6.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	6.500.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.000.000		9.000.000		6.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	6.500.000		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.931.000		78.931.000		78.931.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	78.931.000	100	78.931.000	100	78.931.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		0		0			
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.101.000		1.101.000		1.101.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	1.101.000	0	1.101.000	1	1.101.000		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen								
		X.XX.01.1.06.000			Penyediaan Bahan/Material				11.700.000		11.700.000		11.700.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	11.700.000	1	11.700.000	1	11.700.000		
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.300.000		5.300.000		5.300.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	5.300.000	1	5.300.000	1	5.300.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.830.000		42.830.000		42.830.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	42.830.000	1	42.830.000	1	42.830.000		
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit								
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					469.450.000		469.450.000		471.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	469.450.000	1	469.450.000	1	471.950.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	500.000	1	500.000	12	3.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				68.000.000		68.000.000		68.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	68.000.000	1	68.000.000	1	68.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.950.000		400.950.000		400.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	400.950.000	1	400.950.000	1	400.950.000		
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.032.000		72.032.000		72.032.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	72.032.000	1	72.032.000	1	72.032.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.032.000		37.032.000		37.032.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	37.032.000	1	37.032.000	1	37.032.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.200.000		43.200.000		34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	43.200.000	1	43.200.000	1	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.200.000		43.200.000		34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	43.200.000	1	43.200.000	1	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.965.000		80.965.000		98.365.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	80.965.000	100	80.965.000	100	98.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		14.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.010.000		5.010.000		5.010.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.010.000	1	5.010.000	1	5.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				9.990.000		9.990.000		9.990.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	9.990.000	1	9.990.000	1	9.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.965.000		48.965.000		57.365.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	48.965.000	1	48.965.000	1	57.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					729.700.000		729.700.000		689.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	729.700.000	27	729.700.000	27	689.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				319.200.000		319.200.000		279.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	319.200.000	1	319.200.000	1	279.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				408.500.000		408.500.000		408.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	408.500.000	1	408.500.000	1	408.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.135.000		46.135.000		77.135.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	46.135.000	10	46.135.000	10	77.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.760.000		27.760.000		27.760.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7	27.760.000	7	27.760.000	7	27.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000		14.000.000		45.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	14.000.000	1	14.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.375.000		4.375.000		4.375.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	27	4.375.000	27	4.375.000	27	4.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	77.651.291.000	100	77.860.091.000	100	75.992.753.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.400.261.000		69.400.261.000		67.315.423.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	69.400.261.000	1	69.400.261.000	1	67.315.423.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				68.591.333.000		68.591.333.000		66.506.495.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	420	68.591.333.000	420	68.591.333.000	420	66.506.495.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				606.246.000		606.246.000		578.646.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	606.246.000	1	606.246.000	1	578.646.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				142.152.000		142.152.000		156.552.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	142.152.000	1	142.152.000	1	156.552.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60.530.000		60.530.000		73.730.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	60.530.000	1	60.530.000	1	73.730.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					49.680.000		49.680.000		49.680.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	49.680.000	1	49.680.000	1	49.680.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				49.680.000		49.680.000		49.680.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	49.680.000	1	49.680.000	1	49.680.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					102.220.000		311.020.000		287.100.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	102.220.000	100	311.020.000	100	287.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						208.800.000		208.800.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		1	208.800.000	1	208.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				36.300.000		36.300.000		36.300.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	36.300.000	1	36.300.000	1	36.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22.000.000		22.000.000		32.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	22.000.000	20	22.000.000	20	32.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				33.920.000		33.920.000				
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	33.920.000	10	33.920.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.296.142.000		2.296.142.000		2.541.647.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.296.142.000	100	2.296.142.000	100	2.541.647.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		52.295.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.295.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				133.460.000		133.460.000		156.885.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	133.460.000	1	133.460.000	1	156.885.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		122.457.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	122.457.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		150.000.000		180.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85.445.000		85.445.000		76.010.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	85.445.000	1	85.445.000	1	76.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				82.212.000		82.212.000		75.462.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	82.212.000	1	82.212.000	1	75.462.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				990.025.000		990.025.000		1.252.075.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	990.025.000	1	990.025.000	1	1.252.075.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		100.000.000		6.463.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	3	100.000.000	3	100.000.000	3	6.463.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				600.000.000		600.000.000		615.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	600.000.000	1	600.000.000	1	615.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					315.400.000		315.400.000		417.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	315.400.000	6	315.400.000	6	417.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.400.000		215.400.000		417.300.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	215.400.000	3	215.400.000	3	417.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000				
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.205.088.000		4.205.088.000		4.127.513.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.205.088.000	1	4.205.088.000	1	4.127.513.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.765.000		21.765.000		12.690.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	21.765.000	1	21.765.000	1	12.690.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.238.323.000		1.238.323.000		1.080.323.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.238.323.000	1	1.238.323.000	1	1.080.323.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		130.000.000		117.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	1	130.000.000	1	117.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.815.000.000		2.815.000.000		2.917.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.815.000.000	1	2.815.000.000	1	2.917.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.232.500.000		1.232.500.000		1.204.090.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.232.500.000	1	1.232.500.000	1	1.204.090.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				205.000.000		205.000.000		346.000.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	5	205.000.000	5	205.000.000	5	346.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				42.000.000		42.000.000		34.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	42.000.000	10	42.000.000	10	34.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				122.600.000		122.600.000		112.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	122.600.000	5	122.600.000	5	112.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	2		2		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				130.000.000		130.000.000		110.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	130.000.000	3	130.000.000	3	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				583.200.000		583.200.000		468.200.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	583.200.000	5	583.200.000	5	468.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				82.650.000		82.650.000		88.740.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	82.650.000	3	82.650.000	3	88.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.050.000		67.050.000		44.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.050.000	1	67.050.000	1	44.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.623.085.000	100	1.900.000.000	100	1.872.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.200.000		40.200.000		40.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	40.200.000	1	40.200.000	1	40.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.200.000		40.200.000		40.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	40.200.000	12	40.200.000	12	40.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.119.000		155.119.000		109.119.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	155.119.000	100	155.119.000	100	109.119.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	3.000.000	0	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				119.000		119.000		119.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	119.000	1	119.000	1	119.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	1.000.000	0	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material										
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0	5.000.000	0	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				146.000.000		146.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	146.000.000	1	146.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.242.500.000				25.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.242.500.000	1		1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar										
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				264.000.000						
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	264.000.000	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				978.500.000				25.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	978.500.000	0		1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					902.681.000		902.681.000		895.681.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	902.681.000	1	902.681.000	1	895.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	2.000.000	0	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		130.000.000		123.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	1	130.000.000	12	123.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				770.681.000		770.681.000		770.681.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	770.681.000	1	770.681.000	1	770.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.282.585.000		802.000.000		802.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	3.282.585.000	5	802.000.000	5	802.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	12.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.230.585.000		750.000.000		750.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	3.230.585.000	2	750.000.000	2	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.200.000.000	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		54.000.000		49.800.000		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	54.000.000	1	54.000.000	1	49.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		54.000.000		49.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	54.000.000	1	54.000.000	1	49.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen								
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.650.000		132.650.000		191.850.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	132.650.000	100	132.650.000	100	191.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.750.000		19.750.000		19.750.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	19.750.000	0	19.750.000	1	19.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.650.000		6.650.000		6.650.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	6.650.000	0	6.650.000	1	6.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.360.000		13.360.000		24.360.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	13.360.000	0	13.360.000	4	24.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.312.000		10.312.000		10.312.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	0	10.312.000	0	10.312.000	1	10.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.578.000		82.578.000		130.778.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	0	82.578.000	0	82.578.000	12	130.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar										
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					973.100.000		973.100.000		914.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	973.100.000	1	973.100.000	1	914.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		1.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	2.000.000	0	2.000.000	1	1.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.000.000		198.000.000		152.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	198.000.000	1	198.000.000	12	152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				773.100.000		773.100.000		760.220.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	773.100.000	1	773.100.000	12	760.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.250.000		1.440.250.000		1.444.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	40.250.000	1	1.440.250.000	1	1.444.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.250.000		26.250.000		30.250.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	26.250.000	0	26.250.000	1	30.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.400.000.000		1.400.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		3	1.400.000.000	4	1.400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	14.000.000	0	14.000.000	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					38.600.000		38.600.000		40.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	38.600.000	24	38.600.000	24	40.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.280.000		37.280.000		37.280.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	37.280.000	12	37.280.000	12	37.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.320.000		1.320.000		2.970.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	1.320.000	12	1.320.000	12	2.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					17.799.000		17.799.000		17.799.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	17.799.000	1	17.799.000	1	17.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				17.799.000		17.799.000		17.799.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	17.799.000	1	17.799.000	1	17.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.211.000		86.211.000		106.149.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	86.211.000	100	86.211.000	100	106.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.568.000		6.568.000		10.812.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	6.568.000	12	6.568.000	12	10.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.750.000		3.750.000		3.750.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	3.750.000	12	3.750.000	12	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.903.000		12.903.000		12.903.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12.903.000	12	12.903.000	12	12.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.450.000		6.450.000		6.450.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	6.450.000	12	6.450.000	12	6.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.540.000		46.540.000		62.234.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	46.540.000	12	46.540.000	12	62.234.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					620.640.000		620.640.000		578.702.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	620.640.000	36	620.640.000	36	578.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.178.000		5.178.000		5.178.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.178.000	12	5.178.000	12	5.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				229.500.000		229.500.000		201.840.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	229.500.000	12	229.500.000	12	201.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				385.962.000		385.962.000		371.684.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	385.962.000	12	385.962.000	12	371.684.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					136.750.000		136.750.000		157.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	136.750.000	10	136.750.000	10	157.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.750.000		88.750.000		92.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	88.750.000	5	88.750.000	5	92.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.000.000		48.000.000		64.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	48.000.000	3	48.000.000	3	64.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**1.355.306.000**		**1.355.306.000**		**1.058.806.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.01	1.355.306.000	3.01	3	3.01	1.058.806.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.355.306.000		1.355.306.000		1.058.806.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	0	1.355.306.000	0	1.355.306.000	100	1.058.806.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.355.306.000		1.355.306.000		1.058.806.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	5	1.355.306.000	5	1.355.306.000	100	1.058.806.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				867.058.000		867.058.000		580.558.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	867.058.000	7	867.058.000	7	580.558.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				488.248.000		488.248.000		478.248.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	488.248.000	5	488.248.000	5	478.248.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pengurangan Pengangguran									**39.743.117.000**		**35.741.194.000**		**35.788.194.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28.6		28.6		28.6		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)								**5.700.000.000**		**3.750.000.000**		**3.750.000.000**		
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81.53	5.700.000.000	81.53	82	81.53	3.750.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						5.700.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26.4	3.500.000.000	26.4	1.550.000.000	26.4	1.550.000.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					3.500.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	60.16	3.500.000.000	60.16	1.550.000.000	60.16	1.550.000.000		
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				3.500.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		
						Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	90	3.500.000.000	90	1.550.000.000	90	1.550.000.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89.58	2.200.000.000	89.58	2.200.000.000	89.58	2.200.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
		2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	55.17	381.335.000	55.17	381.335.000	55.17	381.335.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				381.335.000		381.335.000		381.335.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	130	381.335.000	130	381.335.000	130	381.335.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	29.41	550.991.000	29.41	550.991.000	29.41	550.991.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				550.991.000		550.991.000		550.991.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Unit	155	550.991.000	155	550.991.000	276	550.991.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62.08	1.267.674.000	62.08	1.267.674.000	62.08	1.267.674.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				1.267.674.000		1.267.674.000		1.267.674.000		
						Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan	Orang	30	313.490.000	30	313.490.000	30	301.500.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan	Unit	30	60.423.000	30	60.423.000	30	55.820.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja	Unit	925	678.091.000	925	678.091.000	925	733.604.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja	Unit	30	46.470.000	30	46.470.000	30	39.500.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan	Unit	40	60.200.000	40	60.200.000	40	60.200.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti FGD optimalisasi pengawasan norma ketenagakerjaan	Orang	50	30.000.000	50	30.000.000	50	24.500.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan	Orang	160	79.000.000	160	79.000.000	160	52.550.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja								**30.176.915.000**		**28.124.992.000**		**28.064.992.000**		
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	9.24	23.476.915.000	9.24	9	9.24	23.015.254.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						23.476.915.000		23.075.254.000		23.015.254.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38.14	394.183.000	38.14	394.183.000	38.14	394.183.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	%	30.77	250.000.000	30.77	250.000.000	30.77	250.000.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				197.044.000		197.044.000		197.044.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Orang	40	197.044.000	40	197.044.000	40	197.044.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				52.956.000		52.956.000		52.956.000		
						Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	Unit	3	52.956.000	3	52.956.000	3	52.956.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					144.183.000		144.183.000		144.183.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	29.09	144.183.000	29.09	144.183.000	29.09	144.183.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				144.183.000		144.183.000		144.183.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Unit	20	144.183.000	20	144.183.000	20	144.183.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2.88	12.500.000.000	2.88	8.730.000.000	2.88	8.730.000.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					12.500.000.000		8.730.000.000		8.730.000.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	100		100		100		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	%	20		20		20		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	12.61	1.100.000.000	12.61	3.830.000.000	12.61	3.830.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.100.000.000		3.830.000.000		3.830.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri pada Tahun n	Orang	240	1.100.000.000	800	3.830.000.000	800	3.830.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau)	%	24.94	1.500.000.000	24.94	1.500.000.000	24.94	1.500.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan basis kompetensi di tahun n (DBHCHT)	Orang	260	1.500.000.000	260	1.500.000.000	260	1.500.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	0	9.900.000.000	0	3.400.000.000	100	3.400.000.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				9.900.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	13	9.900.000.000	7	3.400.000.000	476	3.400.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46.9	5.500.000.000	46.9	5.597.739.000	46.9	5.537.739.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					5.500.000.000		5.597.739.000		5.537.739.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	33.33		33.33		33.33		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	%	1.33	350.000.000	1.33	1.947.739.000	1.33	1.887.739.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				350.000.000		1.947.739.000		1.887.739.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	52	350.000.000	332	1.947.739.000	332	1.887.739.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT	%	2.4	2.000.000.000	2.4	2.000.000.000	2.4	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (DBHCHT/Cukai) - (DBHCHT)	Orang	372	2.000.000.000	208	2.000.000.000	208	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	%	25		25		25		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	2		2		0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	0	3.150.000.000	0	1.650.000.000	100	1.650.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				3.150.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	12	3.150.000.000	551	1.650.000.000	551	1.650.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9.45	4.526.915.000	9.45	7.797.515.000	9.45	7.797.515.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					4.526.915.000		7.797.515.000		7.797.515.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	66.67		66.67		66.67		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment)	Dokumen	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	%	40		40		40		SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	0		0		0		SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau)	%	6.4	2.000.000.000	6.4	2.000.000.000	6.4	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n (DBHCHT)	Orang	452	2.000.000.000	452	2.000.000.000	452	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	64	649.715.000	64	3.797.515.000	64	3.797.515.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				649.715.000		3.797.515.000		3.797.515.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n	Orang	220	649.715.000	920	3.797.515.000	920	3.797.515.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	1.877.200.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				1.877.200.000		2.000.000.000		2.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	670	1.877.200.000	638	2.000.000.000	638	2.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2.3	555.817.000	2.3	555.817.000	2.3	555.817.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					555.817.000		555.817.000		555.817.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	%	75	555.817.000	75	555.817.000	75	555.817.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				555.817.000		555.817.000		555.817.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi	Orang	113	555.817.000	113	555.817.000	137	555.817.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rupiah	56	6.700.000.000	56	56	56	5.049.738.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						6.700.000.000		5.049.738.000		5.049.738.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4.4	700.000.000	4.4	700.000.000	4.4	700.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					700.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	21	700.000.000	21	700.000.000	21	700.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				700.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas	Unit	275	700.000.000	275	700.000.000	275	700.000.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13.13	6.000.000.000	13.13	4.349.738.000	13.13	4.349.738.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
						Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	Unit	19		19		19			
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	0		0		0			
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	%	71	1.000.000.000	71	1.000.000.000	71	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT)	Orang	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	4.77	560.000.000	4.77	1.399.738.000	4.77	1.399.738.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				560.000.000		1.399.738.000		1.399.738.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	55	560.000.000	825	1.399.738.000	825	1.399.738.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	0	4.440.000.000	0	1.950.000.000	100	1.950.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				4.440.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	4.440.000.000	8	1.950.000.000	8	1.950.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					6.000.000.000		4.349.738.000		4.349.738.000		
						Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	Unit	19		19		19			
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja										
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	0		0		0			
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	%	71	1.000.000.000	71	1.000.000.000	71	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT)	Orang	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	4.77	560.000.000	4.77	1.399.738.000	4.77	1.399.738.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				560.000.000		1.399.738.000		1.399.738.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	55	560.000.000	825	1.399.738.000	825	1.399.738.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	0	4.440.000.000	0	1.950.000.000	100	1.950.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				4.440.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	4.440.000.000	8	1.950.000.000	8	1.950.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah											
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%							SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah										
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Unit	0		0		0		SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%							SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	0		0		0		SEKSI PELATIHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah								**180.415.000**		**180.415.000**		**276.915.000**		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	62.85	180.415.000	62.85	63	62.85	276.915.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						180.415.000		180.415.000		276.915.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	62.85	180.415.000	62.85	180.415.000	62.85	276.915.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					180.415.000		180.415.000		276.915.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	28.57	180.415.000	28.57	180.415.000	28.57	276.915.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				99.415.000		99.415.000		203.115.000		
						Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi	Dokumen	1	82.540.000	1	82.540.000	1	82.540.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro	Kabupaten/ Kota	15	16.875.000	15	16.875.000	15	120.575.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				81.000.000		81.000.000		73.800.000		
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Kabupaten/ Kota	15	36.000.000	15	36.000.000	15	28.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro	Unit	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja								**2.000.000.000**		**2.000.000.000**		**2.028.000.000**		
						Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	45.05	2.000.000.000	45.05	45	71.04	2.028.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.780.000.000		1.780.000.000		1.780.000.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	45.05	66.500.000	45.05	66.500.000	66.25	70.660.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
		2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					66.500.000		66.500.000		70.660.000		
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19.37	66.500.000	19.37	66.500.000	19.37	70.660.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.0002			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				66.500.000		66.500.000		70.660.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	200	66.500.000	200	66.500.000	200	70.660.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68.1	1.713.500.000	68.1	1.713.500.000	68.1	1.709.340.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
		2.07.04.1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.435.883.000		1.435.883.000		1.416.803.000		
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	60	795.921.000	60	795.921.000	60	776.841.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				159.581.000		159.581.000		155.462.000		
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	159.581.000	100	159.581.000	100	155.462.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.000			Pelayanan Antar Kerja				542.020.000		542.020.000		542.020.000		
						Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja	Orang	500	498.090.000	500	498.090.000	500	496.180.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	Unit	8	15.280.000	8	15.280.000	8	17.190.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	75	28.650.000	75	28.650.000	75	28.650.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				19.310.000		19.310.000		19.029.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	19.310.000	100	19.310.000	100	19.029.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				75.010.000		75.010.000		60.330.000		
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja	Unit	50	75.010.000	50	75.010.000	50	60.330.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase pengangguran diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	51.85	639.962.000	51.85	639.962.000	51.85	639.962.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja				639.962.000		639.962.000		639.962.000		
						Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya	Orang	30	186.220.000	30	186.220.000	30	186.220.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan	Orang	35	2.394.000	35	2.394.000	35	2.394.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	200	413.602.000	200	413.602.000	200	413.602.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course	Orang	20	37.746.000	20	37.746.000	20	37.746.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					264.577.000		264.577.000		279.779.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	75	187.097.000	75	187.097.000	75	187.097.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				187.097.000		187.097.000		187.097.000		
						Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	20	38.526.000	20	38.526.000	20	38.526.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	60	115.622.000	60	115.622.000	60	115.622.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif	Unit	75	32.949.000	75	32.949.000	75	32.949.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	2.83	77.480.000	2.83	77.480.000	2.83	92.682.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				74.480.000		74.480.000		90.882.000		
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	50	21.580.000	50	21.580.000	50	21.382.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam pelindungan PMI	Unit	30	52.900.000	30	52.900.000	30	69.500.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				3.000.000		3.000.000		1.800.000		
						Jumlah Layanan Terpadu Penempatan PMI yang terkoordinasi	Unit	9	3.000.000	9	3.000.000	9	1.800.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					13.040.000		13.040.000		12.758.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	%	100	13.040.000	100	13.040.000	100	12.758.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				13.040.000		13.040.000		12.758.000		
						Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA	Dokumen	15	9.040.000	15	9.040.000	15	8.958.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA	Unit	60	4.000.000	60	4.000.000	60	3.800.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						220.000.000		220.000.000		248.000.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3.61		3.61		3.61	28.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									28.000.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	80		80		80	28.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi								28.000.000		
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	0		0		16	28.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3.61	220.000.000	3.61	220.000.000	3.61	220.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
		3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	220.000.000	5	220.000.000	5	220.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial								**1.685.787.000**		**1.685.787.000**		**1.668.287.000**		
						Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91.07	1.685.787.000	91.07	91	91.07	1.668.287.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.685.787.000		1.685.787.000		1.668.287.000		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98	289.609.000	98	289.609.000	98	272.109.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
		2.07.05.1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					289.609.000		289.609.000		272.109.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	26.87	289.609.000	26.87	289.609.000	26.87	272.109.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				113.982.000		113.982.000		113.982.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Unit	105	113.982.000	105	113.982.000	105	113.982.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				26.256.000		26.256.000		26.256.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Unit	105	26.256.000	105	26.256.000	105	26.256.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				149.371.000		149.371.000		131.871.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	70	149.371.000	70	149.371.000	70	131.871.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.75	745.626.000	49.75	745.626.000	49.75	745.626.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					745.626.000		745.626.000		745.626.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.74	471.007.000	49.74	471.007.000	49.74	471.007.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				216.683.000		216.683.000		238.083.000		
						Jumlah LKS yang terbentuk untuk mencegah perselisihan hubungan industrial	Unit	20	216.683.000	20	216.683.000	20	238.083.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				24.512.000		24.512.000		24.512.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang DiverifikasI	Unit	1000	24.512.000	1000	24.512.000	1000	24.512.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				229.812.000		229.812.000		208.412.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Unit	1	229.812.000	1	229.812.000	1	208.412.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	80	274.619.000	80	274.619.000	80	274.619.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				274.619.000		274.619.000		274.619.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Unit	75	274.619.000	75	274.619.000	75	274.619.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96.15	235.787.000	96.15	235.787.000	96.15	235.787.000	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A	
		2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					235.787.000		235.787.000		235.787.000		
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%	96.15	74.677.000	96.15	74.677.000	96.15	74.677.000		
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				74.677.000		74.677.000		74.677.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kasus	125	74.677.000	125	74.677.000	125	74.677.000		
						Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	%	36.7	161.110.000	36.7	161.110.000	36.7	161.110.000		
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				161.110.000		161.110.000		161.110.000		
						Jumlah perselisihan yang dicegah	Kasus	222	161.110.000	222	161.110.000	222	161.110.000		
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	44.27	414.765.000	44.27	414.765.000	44.27	414.765.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
		2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum					414.765.000		414.765.000		414.765.000		

				Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)											
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	2.28	414.765.000	2.28	414.765.000	2.28	414.765.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				252.778.000		252.778.000		252.778.000		
						Jumlah Penetapan UMP	Laporan	1	252.778.000	1	252.778.000	1	252.778.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				49.356.000		49.356.000		49.356.000		
						Jumlah penetapan UMK	Laporan	1	49.356.000	1	49.356.000	1	49.356.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				112.631.000		112.631.000		112.631.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	75	112.631.000	75	112.631.000	75	112.631.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
JUMLAH									**128.937.012.000**		**123.120.804.000**		**121.035.966.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Keluarga Berkualitas									**1.440.000.000**		**1.440.000.000**		**1.425.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2		2		2		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								**440.000.000**		**440.000.000**		**440.000.000**		
						Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100	440.000.000	100	100	100	440.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						440.000.000		440.000.000		440.000.000		
						Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	440.000.000	32	440.000.000	28	440.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					130.000.000		130.000.000		130.000.000		
						ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	19	130.000.000	19	130.000.000	19	130.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.01.0008			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kelompok	5	50.000.000	5	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.01.0020			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Kabupaten/ Kota	2	80.000.000	2	80.000.000	3	80.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					310.000.000		310.000.000		310.000.000		
						Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30	310.000.000	30	310.000.000	30	310.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	
		2.14.04.1.02.0006			Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/ Kota	1	50.000.000	1	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02.0007			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02.0008			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok	3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	SEKSI KELUARGA SEJAHTERA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	0		0		0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
		2.14.04.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											
						Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
					Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui											

		2.14.04.1.02.0008			Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga										
						Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pembangunan ketahanan keluarga	Kelompok	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terkendalinya Jumlah Penduduk								**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**985.000.000**		
						Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.13	1.000.000.000	2.13	2	2.13	985.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						305.000.000		305.000.000		297.000.000		
						Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	0		0		0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
		2.14.02.1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi											
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	0		0		0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	
		2.14.02.1.02.0008			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)										
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	0		0		0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	61.11	305.000.000	61.11	305.000.000	61.11	297.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
		2.14.02.1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					300.000.000		300.000.000		292.000.000		
						Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kabupaten/ Kota	18	300.000.000	18	300.000.000	18	292.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.0002			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0007			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0015			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				20.000.000		20.000.000		19.730.000		
						Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kabupaten/ Kota	2	20.000.000	2	20.000.000	2	19.730.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0017			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				130.000.000		130.000.000		122.270.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	4	130.000.000	4	130.000.000	4	122.270.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.02.0008			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						695.000.000		695.000.000		688.000.000		
						Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	65.58	595.000.000	65.58	595.000.000	65.58	588.000.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
		2.14.03.1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					595.000.000		595.000.000		588.000.000		
						Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	30.5	595.000.000	30.5	595.000.000	27	588.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.01.0007			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				325.000.000		325.000.000		325.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	40	325.000.000	40	325.000.000	40	325.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.0012			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				270.000.000		270.000.000		263.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kabupaten/Kota	18	270.000.000	18	270.000.000	18	263.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Unmetneed	%	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	
		2.14.03.1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.1.02.0002			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kelompok	6	100.000.000	6	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI KELUARGA BERENCANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan									**1.475.000.000**		**1.475.000.000**		**1.601.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	10100		10100		10100		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan								**1.475.000.000**		**1.475.000.000**		**1.601.000.000**		
						Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	1.475.000.000	40	40	40	1.601.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						1.375.000.000		1.375.000.000		1.501.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	60	1.375.000.000	60	1.375.000.000	60	1.501.000.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.02.1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					180.465.000		180.465.000		229.700.000		
						Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	10	180.465.000	10	180.465.000	10	229.700.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.0005			Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi										
						Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Dokumen	0		0		0		SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.02.1.01.0006			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				48.430.000		48.430.000		47.330.000		
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	4	48.430.000	4	48.430.000	3	47.330.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0007			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				82.640.000		82.640.000		62.840.000		
						Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	80	82.640.000	80	82.640.000	80	62.840.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0008			Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				49.395.000		49.395.000		119.530.000		
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	55	49.395.000	55	49.395.000	55	119.530.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi					1.194.535.000		1.194.535.000		1.271.300.000		
						Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	70	1.194.535.000	70	1.194.535.000	70	1.271.300.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.08.02.1.02.0003			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				1.149.535.000		1.149.535.000		1.198.300.000		
						Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	290	1.149.535.000	290	1.149.535.000	1106	1.198.300.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0004			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				45.000.000		45.000.000		73.000.000		
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kelompok	6	45.000.000	6	45.000.000	6	73.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14.29	100.000.000	14.29	100.000.000	14.29	100.000.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.04.1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
		2.08.04.1.01.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												
						Persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi	%	0		0		0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
		2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi											
						Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	0		0		0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi										
						Jumlah ketersediaan dokumen data gender dan anak	Dokumen	0		0		0		SEKSI DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**17.435.284.000**		**17.470.664.000**		**17.257.735.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73.5		73.5		73.5		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**17.175.284.000**		**17.210.664.000**		**16.990.735.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.9	17.175.284.000	87.9	88	87.9	16.990.735.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.945.484.000		16.980.864.000		16.760.935.000		
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	831.000.000	25	851.000.000	25	1.325.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					831.000.000		851.000.000		1.325.750.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	831.000.000	90	851.000.000	90	1.325.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000		300.000.000		597.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	300.000.000	3	300.000.000	5	597.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		134.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	134.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	10.000.000	5	10.000.000	5	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				68.000.000		68.000.000		68.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	68.000.000	3	68.000.000	3	68.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.000.000		230.000.000		275.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	230.000.000	1	230.000.000	1	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000		7.000.000		11.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				97.000.000		117.000.000		167.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	97.000.000	2	117.000.000	2	167.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	831.000.000	25	851.000.000	25	1.325.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					229.800.000		229.800.000		229.800.000		
						Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	9	229.800.000	9	229.800.000	9	229.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi				229.800.000		229.800.000		229.800.000		
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	6	229.800.000	6	229.800.000	6	229.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	959.759.000	90	959.759.000	90	732.196.000	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					336.264.000		336.264.000		227.520.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	336.264.000	100	336.264.000	100	227.520.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				336.264.000		336.264.000		227.520.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	336.264.000	1	336.264.000	1	227.520.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	1.000.000	90	1.000.000	90	1.000.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	10	1.000.000	10	1.000.000	5	1.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.695.000		1.695.000		1.695.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	1.695.000	5	1.695.000	1	1.695.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				1.695.000		1.695.000		1.695.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	1.695.000	2	1.695.000	1	1.695.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000		170.000.000		103.170.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	170.000.000	1	170.000.000	1	103.170.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				130.000.000		130.000.000		63.170.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	1	130.000.000	1	63.170.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.800.000		450.800.000		398.811.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		450.800.000		450.800.000	5	398.811.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	3	3.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				445.800.000		445.800.000		393.811.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	445.800.000	0	445.800.000	1	393.811.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	15.154.725.000	90	15.170.105.000	90	14.702.989.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.913.925.000		11.913.925.000		11.810.559.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	11.913.925.000	1	11.913.925.000	1	11.810.559.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.518.925.000		11.518.925.000		11.415.559.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	60	11.518.925.000	60	11.518.925.000	60	11.415.559.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				320.000.000		320.000.000		318.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	320.000.000	1	320.000.000	1	318.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		51.800.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	51.800.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					112.000.000		112.000.000		117.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	112.000.000	1	112.000.000	1	117.000.000		
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	7.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					266.000.000		301.380.000		188.045.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	266.000.000	90	301.380.000	90	188.045.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						35.380.000		35.380.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		61	35.380.000	61	35.380.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				200.000.000		200.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60.000.000		60.000.000		46.665.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	60.000.000	50	60.000.000	50	46.665.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.000.000		155.000.000		154.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	155.000.000	5	155.000.000	5	154.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				150.000.000		150.000.000		149.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	150.000.000	5	150.000.000	5	149.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	5.000.000	5	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.151.600.000		2.131.600.000		1.850.210.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.151.600.000	1	2.131.600.000	1	1.850.210.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		650.000.000		458.550.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	650.000.000	1	650.000.000	1	458.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000		8.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	8.000.000	1	8.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.492.600.000		1.472.600.000		1.378.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.492.600.000	1	1.472.600.000	1	1.378.660.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					556.200.000		556.200.000		582.675.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	556.200.000	4	556.200.000	4	582.675.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				185.000.000		185.000.000		230.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	185.000.000	24	185.000.000	23	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				254.200.000		254.200.000		222.570.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	254.200.000	5	254.200.000	2	222.570.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				116.000.000		116.000.000		129.105.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	116.000.000	5	116.000.000	8	129.105.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						229.800.000		229.800.000		229.800.000		
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	229.800.000	25	229.800.000	25	229.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					831.000.000		851.000.000		1.325.750.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	831.000.000	90	851.000.000	90	1.325.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000		300.000.000		597.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	300.000.000	3	300.000.000	5	597.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		134.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	134.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	10.000.000	5	10.000.000	5	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				68.000.000		68.000.000		68.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	68.000.000	3	68.000.000	3	68.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.000.000		230.000.000		275.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	230.000.000	1	230.000.000	1	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000		7.000.000		11.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				97.000.000		117.000.000		167.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	2	97.000.000	2	117.000.000	2	167.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	229.800.000	25	229.800.000	25	229.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.05.1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					229.800.000		229.800.000		229.800.000		
						Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	9	229.800.000	9	229.800.000	9	229.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.08.05.1.01.0001			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi				229.800.000		229.800.000		229.800.000		
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	6	229.800.000	6	229.800.000	6	229.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**260.000.000**		**260.000.000**		**267.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.75	260.000.000	2.75	3	2.75	267.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						260.000.000		260.000.000		267.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	45	260.000.000	45	260.000.000	45	267.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					260.000.000		260.000.000		267.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	40	260.000.000	40	260.000.000	40	267.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				140.000.000		121.000.000		127.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	140.000.000	1	121.000.000	1	127.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000		139.000.000		140.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	120.000.000	1	139.000.000	1	140.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak									**935.358.000**		**935.358.000**		**972.188.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66		66		66		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak								**440.000.000**		**440.000.000**		**440.000.000**		
						Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	70	440.000.000	70	70	70	440.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						150.000.000		150.000.000		121.552.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14.29	150.000.000	14.29	150.000.000	14.29	121.552.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		150.000.000		121.552.000		
						Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	121.552.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.04.1.03.0001			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		121.552.000		
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	150.000.000	20	150.000.000	20	121.552.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						290.000.000		290.000.000		318.448.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82.85	290.000.000	82.85	290.000.000	82.85	318.448.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.06.1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					240.000.000		240.000.000		268.448.000		
						Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kabupaten/ Kota	4	240.000.000	4	240.000.000	4	268.448.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	
		2.08.06.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.01.0003			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				150.000.000		150.000.000		178.448.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	OPD	20	150.000.000	20	150.000.000	20	178.448.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				17.000.000		17.000.000		17.000.000		
						Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	0		0		0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
		2.08.06.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi											
						Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.06.1.02.0005			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota										
						Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	Kelompok	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak										
						Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak								**495.358.000**		**495.358.000**		**532.188.000**		
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	75	495.358.000	75	75	75	532.188.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						495.358.000		495.358.000		532.188.000		
						Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%							Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi										
						Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Kegiatan	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	194.608.000	100	194.608.000	100	231.438.000	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					194.608.000		194.608.000		231.438.000		
						Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	194.608.000	100	194.608.000	100	231.438.000		
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				76.868.000		76.868.000		113.698.000		
						Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Orang	1100	76.868.000	1100	76.868.000	110	113.698.000		
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi				117.740.000		117.740.000		117.740.000		
						Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	35	117.740.000	35	117.740.000	35	117.740.000		
						Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11.5	300.750.000	11.5	300.750.000	11.5	300.750.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
		2.08.07.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					166.240.000		166.240.000		166.240.000		
						Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	31.4	166.240.000	31.4	166.240.000	31.4	166.240.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				50.750.000		50.750.000		50.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	50.750.000	1	50.750.000	1	50.750.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0005			Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				115.490.000		115.490.000		115.490.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	15	115.490.000	15	115.490.000	15	115.490.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi											
						Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100		100		100		SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.02.0005			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi										
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0006			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi										
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					134.510.000		134.510.000		134.510.000		
						Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	134.510.000	15	134.510.000	15	134.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0004			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0006			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.07.1.03.0007			Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0008			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan				69.510.000		69.510.000		69.510.000		
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	150	69.510.000	150	69.510.000	150	69.510.000	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan									**1.052.958.000**		**1.052.958.000**		**1.140.702.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	
						Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5.4		5.4		5.4		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan								**1.052.958.000**		**1.052.958.000**		**1.140.702.000**		
						Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4.25	1.052.958.000	4.25	4	4.25	1.140.702.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						1.052.958.000		1.052.958.000		1.140.702.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	11	858.350.000	11	858.350.000	11	946.094.000	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
		2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					125.750.000		125.750.000		125.750.000		
						Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	43	125.750.000	43	125.750.000	43	125.750.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				50.750.000		50.750.000		50.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	50.750.000	2	50.750.000	2	50.750.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

		2.08.03.1.01.0002			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	OPD	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
						Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100		100		100		SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	0		0		0		SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi										
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	0		0		0		SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					732.600.000		732.600.000		820.344.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	10	732.600.000	10	732.600.000	10	820.344.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		2.08.03.1.03.0001			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0002			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				100.000.000		100.000.000		103.000.000		
						Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	100.000.000	10	100.000.000	10	103.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0003			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	100	30.000.000	100	30.000.000	70	30.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				552.600.000		552.600.000		637.344.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	552.600.000	4	552.600.000	4	637.344.000	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	0		0		0		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat	
		2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi											
						Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.08.03.1.03.0004			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Orang	0		0		0		SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	194.608.000	100	194.608.000	100	194.608.000	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					194.608.000		194.608.000		194.608.000		
						Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100	194.608.000	100	194.608.000	100	194.608.000		
		2.08.03.1.02.0001			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				76.868.000		76.868.000		76.868.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	95	76.868.000	95	76.868.000	95	76.868.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				117.740.000		117.740.000		117.740.000		
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Orang	5	117.740.000	5	117.740.000	5	117.740.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**22.338.600.000**		**22.373.980.000**		**22.396.625.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**24.142.048.000**		**24.194.828.000**		**23.226.620.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		82		82		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**23.338.048.000**		**23.390.828.000**		**22.591.870.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	23.338.048.000	82	82	82	22.591.870.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						23.338.048.000		23.390.828.000		22.591.870.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	22.126.048.000	100	22.178.828.000	100	21.228.570.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.314.697.000		17.314.697.000		15.854.910.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	17.314.697.000	3	17.314.697.000	3	15.854.910.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.544.697.000		16.544.697.000		15.113.910.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	93	16.544.697.000	93	16.544.697.000	93	15.113.910.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				370.000.000		370.000.000		370.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	370.000.000	12	370.000.000	12	370.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				400.000.000		400.000.000		371.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	400.000.000	12	400.000.000	12	371.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					140.000.000		140.000.000		45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	140.000.000	2	140.000.000	2	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120.000.000		120.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	120.000.000	2	120.000.000	2	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0005			Pengolahan Data Retribusi Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					240.000.000		292.780.000		292.780.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	240.000.000	100	292.780.000	100	292.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						52.780.000		52.780.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			1	52.780.000	1	52.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				240.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	240.000.000	12	240.000.000	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.251.851.000		1.251.851.000		1.218.651.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.251.851.000	100	1.251.851.000	100	1.218.651.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				104.351.000		104.351.000		117.151.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	104.351.000	12	104.351.000	12	117.151.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.500.000		112.500.000		84.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	112.500.000	12	112.500.000	12	84.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				620.000.000		620.000.000		620.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	620.000.000	12	620.000.000	12	620.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		20.000.000		15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				195.000.000		195.000.000		182.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	195.000.000	12	195.000.000	12	182.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					263.500.000		263.500.000		761.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	263.500.000	20	263.500.000	70	761.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				263.500.000		263.500.000		761.850.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	20	263.500.000	20	263.500.000	70	761.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.076.000.000		1.076.000.000		1.142.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.076.000.000	36	1.076.000.000	36	1.142.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		370.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	370.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				770.000.000		770.000.000		766.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	770.000.000	12	770.000.000	12	766.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.830.000.000		1.830.000.000		1.902.879.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	76	1.830.000.000	76	1.830.000.000	66	1.902.879.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	250.000.000	24	250.000.000	24	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.500.000.000		1.500.000.000		1.554.879.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.554.879.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		98.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	40	80.000.000	40	80.000.000	40	98.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	1.212.000.000	100	1.212.000.000	100	1.363.300.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					196.000.000		196.000.000		196.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	%	100	196.000.000	100	196.000.000	100	196.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.000.000		101.000.000		101.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	101.000.000	12	101.000.000	12	101.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					290.000.000		290.000.000		441.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Unit	5	290.000.000	5	290.000.000	20	441.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				290.000.000		290.000.000		441.300.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	290.000.000	5	290.000.000	20	441.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					330.000.000		330.000.000		330.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Laporan	36	330.000.000	36	330.000.000	24	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					356.000.000		356.000.000		356.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Unit	12	356.000.000	12	356.000.000	12	356.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				306.000.000		306.000.000		306.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	306.000.000	1	306.000.000	1	306.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**804.000.000**		**804.000.000**		**634.750.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	5	804.000.000	5	5	2.95	634.750.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						804.000.000		804.000.000		634.750.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	804.000.000	100	804.000.000	100	634.750.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					804.000.000		804.000.000		634.750.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	804.000.000	100	804.000.000	100	634.750.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				420.000.000		420.000.000		341.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	420.000.000	8	420.000.000	8	341.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				384.000.000		384.000.000		293.750.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	384.000.000	18	384.000.000	18	293.750.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)									**6.093.935.000**		**6.093.935.000**		**7.264.365.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83		83		83		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								**4.070.000.000**		**4.070.000.000**		**4.395.000.000**		
						Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	10	4.070.000.000	10	10	9.4	4.395.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						4.070.000.000		4.070.000.000		4.395.000.000		
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	60	4.070.000.000	60	4.070.000.000	60	4.395.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					4.070.000.000		4.070.000.000		4.395.000.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT	%	20	420.000.000	20	420.000.000	0	173.146.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				420.000.000		420.000.000		173.146.000		
						LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	Kelompok	10	420.000.000	10	420.000.000	10	173.146.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	%	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.696.854.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2.500.000.000		2.500.000.000		2.696.854.000		
						JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	Dokumen	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	13	1.346.854.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	550	1.000.000.000	550	1.000.000.000	950	1.350.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
						PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP	%	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.525.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				1.150.000.000		1.150.000.000		1.525.000.000		
						JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	125.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
						JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN	Paket	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.400.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan								**2.023.935.000**		**2.023.935.000**		**2.869.365.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/ha	3797	2.023.935.000	3797	3.797	3797	2.869.365.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						2.023.935.000		2.023.935.000		2.869.365.000		
						Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	0.62	307.150.000	0.62	307.150.000	0	72.710.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					307.150.000		307.150.000		72.710.000		
						PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	%	20	307.150.000	20	307.150.000	0	72.710.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				307.150.000		307.150.000		72.710.000		
						LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	10	307.150.000	10	307.150.000	100	72.710.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0.064	1.516.785.000	0.064	1.516.785.000	0.5	2.596.655.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					1.516.785.000		1.516.785.000		2.596.655.000		
						PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	%	3	1.516.785.000	3	1.516.785.000	5	2.596.655.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.516.785.000		1.516.785.000		2.596.655.000		
						JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	Ton	85	1.516.785.000	85	1.516.785.000	520	2.596.655.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1.25	200.000.000	1.25	200.000.000	1.25	200.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN	Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)									**10.132.500.000**		**10.132.500.000**		**9.290.356.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83		83		83		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan								**5.217.500.000**		**5.217.500.000**		**4.763.569.000**		
						Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%	5	5.217.500.000	5	5	5	4.763.569.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.237.000.000		1.237.000.000		923.604.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87.8	900.000.000	87.8	900.000.000	87.8	852.034.000	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
		2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					900.000.000		900.000.000		852.034.000		
						PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Angka	33	900.000.000	33	900.000.000	33	852.034.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				900.000.000		900.000.000		852.034.000		
						JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	Desa	12	900.000.000	12	900.000.000	12	852.034.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
						Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	0.62	337.000.000	0.62	337.000.000	0	71.570.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					337.000.000		337.000.000		71.570.000		
						PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)	%	20	337.000.000	20	337.000.000	0	71.570.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				337.000.000		337.000.000		71.570.000		
						LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	10	337.000.000	10	337.000.000	100	71.570.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						3.980.500.000		3.980.500.000		3.839.965.000		
						Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0.01	3.980.500.000	0.01	3.980.500.000	0.01	3.839.965.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
		2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					3.980.500.000		3.980.500.000		3.839.965.000		
						PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	5	3.980.500.000	5	3.980.500.000	2.5	3.839.965.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				3.980.500.000		3.980.500.000		3.839.965.000		
						JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	Desa	22	2.467.500.000	22	2.467.500.000	22	2.391.640.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI	Desa	15	750.000.000	15	750.000.000	15	739.445.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	33.500.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	10.825.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE	Dokumen	1	421.000.000	1	421.000.000	1	406.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
						TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	Dokumen	1	262.000.000	1	262.000.000	1	258.555.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan								**4.915.000.000**		**4.915.000.000**		**4.526.787.000**		
						Skor PPH provinsi	Skor	94.5	4.915.000.000	94.5	95	94.5	4.526.787.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						2.100.000.000		2.100.000.000		2.019.787.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87.8	2.100.000.000	87.8	2.100.000.000	87.8	2.019.787.000	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.000.000.000		1.000.000.000		950.000.000		
						REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	Dokumen	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	950.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
		2.09.03.1.01.0002			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.000.000.000		1.000.000.000		950.000.000		
						JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	25	950.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
		2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					1.100.000.000		1.100.000.000		1.069.787.000		
						PPH Kab / Kota > 87	Angka	33	1.100.000.000	33	1.100.000.000	33	1.069.787.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				800.000.000		800.000.000		770.000.000		
						Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	10	450.000.000	10	450.000.000	10	418.875.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	2500	350.000.000	2500	350.000.000	2250	351.125.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				300.000.000		300.000.000		299.787.000		
						JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI	Desa	3	250.000.000	3	250.000.000	3	249.787.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						2.815.000.000		2.815.000.000		2.507.000.000		
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	1.365.000.000	80	1.365.000.000	80	1.242.000.000	Bidang Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.365.000.000		1.365.000.000		1.242.000.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	Dokumen	1	325.000.000	1	325.000.000	1	305.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				325.000.000		325.000.000		305.000.000		
						JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Orang	200	325.000.000	200	325.000.000	300	305.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	395.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				400.000.000		400.000.000		395.000.000		
						JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	sampel	200	400.000.000	200	400.000.000	300	395.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	65	75.000.000	65	75.000.000	65	64.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				75.000.000		75.000.000		64.000.000		
						JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR	Lokasi	40	75.000.000	40	75.000.000	40	64.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
						PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	%	15	565.000.000	15	565.000.000	15	478.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				565.000.000		565.000.000		478.000.000		
						Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	7	265.000.000	7	275.200.000	7	249.400.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	Kelompok	18	300.000.000	18	289.800.000	18	228.600.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dlterbitkan	%	80	1.450.000.000	80	1.450.000.000	80	1.265.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.450.000.000		1.450.000.000		1.265.000.000		
						Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	2	1.450.000.000	2	1.450.000.000	2	1.265.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0006			Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				800.000.000		800.000.000		615.000.000		
						Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	35	800.000.000	35	800.000.000	55	615.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				650.000.000		650.000.000		650.000.000		
						Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	sampel	100	650.000.000	100	650.000.000	150	650.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	
JUMLAH									**40.368.483.000**		**40.421.263.000**		**39.781.341.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas air									**7.830.876.000**		**3.930.876.000**		**3.586.936.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Air	Angka	50.66		50.66		50.66		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran air permukaan								**7.830.876.000**		**3.930.876.000**		**3.586.936.000**		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.37	7.830.876.000	3.37	3	3.37	3.586.936.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						778.748.000		778.748.000		778.748.000		
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	778.748.000	100	778.748.000	100	778.748.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					444.398.000		444.398.000		444.398.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	6	444.398.000	6	444.398.000	4	444.398.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.0002			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				444.398.000		444.398.000		444.398.000		
						Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	6	444.398.000	6	444.398.000	4	444.398.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					334.350.000		334.350.000		334.350.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Dokumen	45	334.350.000	45	334.350.000	45	334.350.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.02.0005			Pembinaan Penyelenggaraan KLHS				334.350.000		334.350.000		334.350.000		
						Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	45	334.350.000	45	334.350.000	45	334.350.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						5.833.376.000		1.933.376.000		1.589.436.000		
						Persentase pengujian kualitas air	%	100	723.376.000	100	723.376.000	100	785.436.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					723.376.000		723.376.000		785.436.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air	Dokumen	1	723.376.000	1	723.376.000	1	785.436.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				723.376.000		723.376.000		785.436.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas air	sampel	550	723.376.000	550	723.376.000	550	785.436.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4.76	5.110.000.000	4.76	1.210.000.000	4.76	804.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					5.110.000.000		1.210.000.000		804.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Unit	100	5.110.000.000	100	1.210.000.000	100	804.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5.110.000.000		1.210.000.000		804.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air	Unit	135	5.110.000.000	135	1.210.000.000	135	804.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						133.740.000		133.740.000		133.740.000		
						Persentase limbah B3 yang terkelola	%	80	133.740.000	80	133.740.000	80	133.740.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.05.1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					133.740.000		133.740.000		133.740.000		
						Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Ton	1476440	133.740.000	1476440	133.740.000	1476440	133.740.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.05.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				133.740.000		133.740.000		133.740.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 denganPemerintah dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	133.740.000	1	133.740.000	1	133.740.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						844.280.000		844.280.000		844.280.000		

						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	287.541.000	50	287.541.000	50	287.541.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
		2.11.06.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					287.541.000		287.541.000		287.541.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Unit	20	287.541.000	20	287.541.000	20	287.541.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.0006			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				287.541.000		287.541.000		287.541.000		
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kegiatan	35	287.541.000	35	287.541.000	35	287.541.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	556.739.000	100	556.739.000	100	556.739.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					556.739.000		556.739.000		556.739.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Dokumen	10	556.739.000	10	556.739.000	100	556.739.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.06.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				556.739.000		556.739.000		556.739.000		
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi	Dokumen	10	556.739.000	10	556.739.000	100	556.739.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						240.732.000		240.732.000		240.732.000		
						Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	240.732.000	100	240.732.000	100	240.732.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
		2.11.10.1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					240.732.000		240.732.000		240.732.000		
						Jumlah laporan aduan yang ditangani	Laporan	15	240.732.000	15	240.732.000	15	240.732.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01.0007			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				240.732.000		240.732.000		240.732.000		
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Laporan	15	240.732.000	15	240.732.000	15	240.732.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**144.518.678.000**		**144.898.578.000**		**139.950.954.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		70		70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**143.732.127.000**		**144.112.027.000**		**139.070.923.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	143.732.127.000	85	85	85	139.070.923.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						143.732.127.000		144.112.027.000		139.070.923.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	132.060.493.000	100	132.440.393.000	100	127.257.803.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					126.657.549.000		126.657.549.000		120.635.929.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	126.657.549.000	1	126.657.549.000	1	120.635.929.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				126.507.809.000		126.507.809.000		120.461.189.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	677	126.507.809.000	677	126.507.809.000	677	120.461.189.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				68.602.000		68.602.000		73.040.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	1	68.602.000	1	68.602.000	1	73.040.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				81.138.000		81.138.000		101.700.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	81.138.000	12	81.138.000	12	101.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					145.000.000		145.000.000		145.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				145.000.000		145.000.000		145.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					383.272.000		763.172.000		751.372.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	383.272.000	100	763.172.000	100	751.372.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						379.900.000		379.900.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		1	379.900.000	1	379.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				51.272.000		51.272.000		51.272.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	51.272.000	1	51.272.000	1	51.272.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				332.000.000		332.000.000		320.200.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	332.000.000	40	332.000.000	40	320.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					863.608.000		863.608.000		1.006.438.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	863.608.000	100	863.608.000	100	1.006.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.440.000		80.440.000		51.370.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.440.000	1	80.440.000	1	51.370.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.000.000		51.000.000		60.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	51.000.000	1	51.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.300.000		77.300.000		72.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	77.300.000	1	77.300.000	1	72.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				73.500.000		73.500.000		76.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	73.500.000	1	73.500.000	1	76.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.668.000		5.668.000		5.668.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	1	5.668.000	1	5.668.000	1	5.668.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				125.700.000		125.700.000		157.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	125.700.000	1	125.700.000	1	157.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		400.000.000		563.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	400.000.000	1	400.000.000	1	563.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					947.839.000		947.839.000		1.460.339.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	947.839.000	1	947.839.000	1	1.460.339.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				609.124.000		609.124.000		929.124.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	609.124.000	1	609.124.000	1	929.124.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel								20.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				318.715.000		318.715.000		511.215.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	318.715.000	1	318.715.000	1	511.215.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000				
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.292.896.000		2.292.896.000		2.368.396.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.292.896.000	1	2.292.896.000	1	2.368.396.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		12.000.000		18.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		600.000.000		636.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	600.000.000	1	600.000.000	1	636.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		130.000.000		130.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.550.896.000		1.550.896.000		1.584.096.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.550.896.000	1	1.550.896.000	1	1.584.096.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					770.329.000		770.329.000		890.329.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	770.329.000	5	770.329.000	5	890.329.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				378.570.000		378.570.000		475.570.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	19	378.570.000	19	378.570.000	19	475.570.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				124.000.000		124.000.000		125.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	124.000.000	4	124.000.000	4	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				217.759.000		217.759.000		217.759.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	217.759.000	2	217.759.000	2	217.759.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		27.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	15.000.000	3	15.000.000	3	27.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	1.277.458.000	100	1.277.458.000	100	1.322.458.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					37.700.000		37.700.000		37.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden	Dokumen	1	37.700.000	1	37.700.000	1	37.700.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37.700.000		37.700.000		37.700.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	37.700.000	1	37.700.000	1	37.700.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					199.737.000		199.737.000		199.737.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden	%	100	199.737.000	100	199.737.000	100	199.737.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.615.000		4.615.000		4.615.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	4.615.000	1	4.615.000	1	4.615.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.897.000		14.897.000		14.897.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	14.897.000	1	14.897.000	1	14.897.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.147.000		42.147.000		42.147.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	42.147.000	1	42.147.000	1	42.147.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.945.000		16.945.000		16.945.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	1	16.945.000	1	16.945.000	1	16.945.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				26.400.000		26.400.000		26.400.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	Paket	1	26.400.000	1	26.400.000	1	26.400.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.200.000		3.200.000		3.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Dokumen	1	3.200.000	1	3.200.000	1	3.200.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.533.000		56.533.000		56.533.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	56.533.000	1	56.533.000	1	56.533.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.500.000		152.500.000		161.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada KR Baturraden	Unit	1	152.500.000	1	152.500.000	1	161.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Paket	0		0		0		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.500.000		17.500.000		26.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	5	17.500.000	5	17.500.000	5	26.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	0		0		0		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	0		0		0		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				135.000.000		135.000.000		135.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	135.000.000	1	135.000.000	1	135.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					374.500.000		374.500.000		385.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden	Laporan	1	374.500.000	1	374.500.000	1	385.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.500.000		63.500.000		88.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden	Laporan	1	63.500.000	1	63.500.000	1	88.500.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		300.000.000		286.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	Laporan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	286.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					513.021.000		513.021.000		538.021.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden	Unit	1	513.021.000	1	513.021.000	1	538.021.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				66.870.000		66.870.000		66.870.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	2	66.870.000	2	66.870.000	2	66.870.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.345.000		3.345.000		3.345.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	1	3.345.000	1	3.345.000	1	3.345.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.806.000		45.806.000		45.806.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	17	45.806.000	17	45.806.000	17	45.806.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				147.000.000		147.000.000		172.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden	Unit	5	147.000.000	5	147.000.000	5	172.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura	%	100	1.484.601.000	100	1.484.601.000	100	1.484.601.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.281.000		220.281.000		220.281.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA	%	100	220.281.000	100	220.281.000	100	220.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.450.000		12.450.000		12.450.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	12.450.000	1	12.450.000	1	12.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.668.000		14.668.000		14.668.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura	Paket	1	14.668.000	1	14.668.000	1	14.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.328.000		29.328.000		29.328.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	29.328.000	1	29.328.000	1	29.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		13.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.800.000		20.800.000		20.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura	Paket	1	20.800.000	1	20.800.000	1	20.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		2.160.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Balai Tahura	Dokumen	1	2.160.000	1	2.160.000	1	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.375.000		17.375.000		17.375.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura	Laporan	1	17.375.000	1	17.375.000	1	17.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura	Laporan	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.394.000		90.394.000		90.394.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada TAHURA	Unit		90.394.000		90.394.000		90.394.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan Balai Tahura	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.894.000		57.894.000		57.894.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	5	57.894.000	5	57.894.000	5	57.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.500.000		32.500.000		32.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Balai Tahura	Unit	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.277.000		436.277.000		445.077.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA	Laporan		436.277.000		436.277.000		445.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				74.500.000		74.500.000		74.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	74.500.000	1	74.500.000	1	74.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.625.000		6.625.000		6.625.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	6.625.000	1	6.625.000	1	6.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				353.652.000		353.652.000		362.452.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura	Laporan	1	353.652.000	1	353.652.000	1	362.452.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					692.649.000		692.649.000		683.849.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA	Unit		692.649.000		692.649.000	6	683.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				178.000.000		178.000.000		178.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura	Unit	3	178.000.000	3	178.000.000	3	178.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara Balai Tahura	Unit	6	7.500.000	6	7.500.000	6	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.500.000		33.500.000		24.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura	Unit	7	33.500.000	7	33.500.000	7	24.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				278.212.000		278.212.000		278.212.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	4	278.212.000	4	278.212.000	4	278.212.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				128.687.000		128.687.000		128.687.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	2	128.687.000	2	128.687.000	2	128.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.750.000		66.750.000		66.750.000		

						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	Unit	3	66.750.000	3	66.750.000	3	66.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H	%	100	735.147.000	100	735.147.000	100	735.147.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					242.897.000		242.897.000		257.397.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	242.897.000	100	242.897.000	100	257.397.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.850.000		9.850.000		9.850.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	9.850.000	1	9.850.000	1	9.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H	Paket	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPL2H	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		4.000.000		18.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BPL2H	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H	Laporan	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				147.047.000		147.047.000		147.047.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BPL2H	Laporan	1	147.047.000	1	147.047.000	1	147.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.470.000		120.470.000		95.470.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	120.470.000	1	120.470.000	1	95.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan BPL2H	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.470.000		110.470.000		85.470.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	6	110.470.000	6	110.470.000	6	85.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BPL2H	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.830.000		170.830.000		175.830.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	170.830.000	1	170.830.000	1	175.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.350.000		5.350.000		5.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H	Laporan	1	5.350.000	1	5.350.000	1	5.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H	Laporan	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				110.480.000		110.480.000		115.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H	Laporan	1	110.480.000	1	110.480.000	1	115.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					175.950.000		175.950.000		181.450.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	175.950.000	1	175.950.000	1	181.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				83.950.000		83.950.000		89.450.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H	Unit	3	83.950.000	3	83.950.000	3	89.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara BPL2H	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.000.000		32.000.000		32.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H	Unit	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH	%	100	988.037.000	100	988.037.000	100	988.037.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BSPTH	Dokumen	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BSPTH	Dokumen	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					134.922.000		134.922.000		146.922.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH	%	100	134.922.000	100	134.922.000	100	146.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.950.000		3.950.000		3.950.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	3.950.000	1	3.950.000	1	3.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.747.000		29.747.000		29.747.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	29.747.000	1	29.747.000	1	29.747.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.120.000		7.120.000		7.120.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH	Paket	1	7.120.000	1	7.120.000	1	7.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH	Paket	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.475.000		4.475.000		4.475.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BSPTH	Dokumen	1	4.475.000	1	4.475.000	1	4.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan BSPTH	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.500.000		7.500.000		18.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH	Laporan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.630.000		71.630.000		73.130.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH	Laporan	1	71.630.000	1	71.630.000	1	73.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					33.375.000		33.375.000		41.342.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BSPTH	Unit	1	33.375.000	1	33.375.000	1	41.342.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan BSPTH	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.375.000		33.375.000		41.342.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	10	33.375.000	10	33.375.000	10	41.342.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan BSPTH	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					547.640.000		547.640.000		529.173.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH	Laporan	1	547.640.000	1	547.640.000	1	529.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.740.000		1.740.000		1.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BSPTH	Laporan	1	1.740.000	1	1.740.000	1	1.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.600.000		129.600.000		129.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH	Laporan	1	129.600.000	1	129.600.000	1	129.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				416.300.000		416.300.000		397.833.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH	Laporan	1	416.300.000	1	416.300.000	1	397.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.100.000		260.100.000		258.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH	Unit	1	260.100.000	1	260.100.000	1	258.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.800.000		90.800.000		89.300.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH	Unit	3	90.800.000	3	90.800.000	3	89.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara BSPTH	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.300.000		14.300.000		14.300.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH	Unit	12	14.300.000	12	14.300.000	12	14.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	Unit	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1	%		728.032.000		728.032.000	100	728.032.000	CDK 1	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1	Dokumen	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					200.032.000		200.032.000		200.032.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1	%	100	200.032.000	100	200.032.000	100	200.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.032.000		25.032.000		25.032.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1	Paket	1	25.032.000	1	25.032.000	1	25.032.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 1	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 1	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1	Laporan	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan CDK 1	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 1	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 1	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					352.000.000		352.000.000		343.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1	Laporan	1	352.000.000	1	352.000.000	1	343.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				87.000.000		87.000.000		80.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1	Laporan	1	87.000.000	1	87.000.000	1	80.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				260.000.000		260.000.000		257.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1	Laporan	1	260.000.000	1	260.000.000	1	257.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.000.000		166.000.000		175.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1	Unit	1	166.000.000	1	166.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				106.000.000		106.000.000		115.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 1	Unit	3	106.000.000	3	106.000.000	3	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 1	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 1	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10	%	100	689.845.000	100	689.845.000	100	709.845.000	CDK 10	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.300.000		11.300.000		11.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10	Dokumen	1	11.300.000	1	11.300.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.300.000		11.300.000		11.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10	Dokumen	1	11.300.000	1	11.300.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.845.000		140.845.000		140.845.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10	%	100	140.845.000	100	140.845.000	100	140.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.010.000		4.010.000		4.010.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	4.010.000	1	4.010.000	1	4.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.564.000		9.564.000		9.564.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	9.564.000	1	9.564.000	1	9.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.325.000		4.325.000		4.325.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10	Paket	1	4.325.000	1	4.325.000	1	4.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.076.000		16.076.000		16.076.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10	Paket	1	16.076.000	1	16.076.000	1	16.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.652.000		4.652.000		4.652.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 10	Paket	1	4.652.000	1	4.652.000	1	4.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 10	Dokumen	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73.618.000		73.618.000		73.618.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10	Laporan	1	73.618.000	1	73.618.000	1	73.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					74.500.000		74.500.000		64.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 10	Unit	1	74.500.000	1	74.500.000	1	64.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 10	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.500.000		44.500.000		34.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	12	44.500.000	12	44.500.000	12	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 10	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.800.000		275.800.000		290.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10	Laporan	1	275.800.000	1	275.800.000	1	290.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		1.600.000		1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10	Laporan	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.000.000		111.000.000		106.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10	Laporan	1	111.000.000	1	111.000.000	1	106.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				163.200.000		163.200.000		182.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10	Laporan	1	163.200.000	1	163.200.000	1	182.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					187.400.000		187.400.000		202.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10	Unit	1	187.400.000	1	187.400.000	1	202.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				82.750.000		82.750.000		101.100.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10	Unit	2	82.750.000	2	82.750.000	2	101.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		2.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 10	Unit	2	5.000.000	2	5.000.000	2	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.650.000		17.650.000		17.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10	Unit	38	17.650.000	38	17.650.000	38	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.000.000		82.000.000		82.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	Unit	1	82.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11	%		777.735.000		777.735.000	100	777.735.000	CDK 11	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					197.000.000		197.000.000		191.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11	%	100	197.000.000	100	197.000.000	100	191.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		4.600.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 11	Dokumen	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 11	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					128.000.000		128.000.000		128.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 11	Unit	1	128.000.000	1	128.000.000	1	128.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 11	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 11	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					251.482.000		251.482.000		227.682.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11	Laporan	1	251.482.000	1	251.482.000	1	227.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		36.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11	Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	36.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.482.000		190.482.000		190.482.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11	Laporan	1	190.482.000	1	190.482.000	1	190.482.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.253.000		156.253.000		185.453.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11	Unit	1	156.253.000	1	156.253.000	1	185.453.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		50.000.000		75.700.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	2	75.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.253.000		2.253.000		1.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 11	Unit	20	2.253.000	20	2.253.000	20	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				79.000.000		79.000.000		83.753.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	0	79.000.000	0	79.000.000	0	83.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2	%	100	617.079.000	100	617.079.000	100	617.079.000	CDK 2	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2	Dokumen	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2	Dokumen	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					118.229.000		118.229.000		125.479.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2	%	100	118.229.000	100	118.229.000	100	125.479.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.680.000		3.680.000		3.680.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	3.680.000	1	3.680.000	1	3.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.541.000		4.541.000		4.541.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	4.541.000	1	4.541.000	1	4.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.338.000		7.338.000		7.338.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2	Paket	1	7.338.000	1	7.338.000	1	7.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.840.000		6.840.000		6.840.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2	Paket	1	6.840.000	1	6.840.000	1	6.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.630.000		3.630.000		3.630.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 2	Paket	1	3.630.000	1	3.630.000	1	3.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 2	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.250.000		8.250.000		15.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 2	Laporan	1	8.250.000	1	8.250.000	1	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.450.000		82.450.000		82.450.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2	Laporan	1	82.450.000	1	82.450.000	1	82.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					82.500.000		82.500.000		81.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 2	Unit	1	82.500.000	1	82.500.000	1	81.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				13.500.000		13.500.000		13.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 2	Paket	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.000.000		63.000.000		62.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	8	63.000.000	8	63.000.000	8	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 2	Unit	3	6.000.000	3	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					279.650.000		279.650.000		265.780.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2	Laporan	1	279.650.000	1	279.650.000	1	265.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.050.000		1.050.000		1.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2	Laporan	1	1.050.000	1	1.050.000	1	1.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		50.000.000		52.540.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.600.000		228.600.000		212.190.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2	Laporan	1	228.600.000	1	228.600.000	1	212.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.700.000		125.700.000		133.320.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2	Unit	1	125.700.000	1	125.700.000	1	133.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				66.600.000		66.600.000		74.220.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2	Unit	2	66.600.000	2	66.600.000	2	74.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 2	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.100.000		14.100.000		14.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2	Unit	37	14.100.000	37	14.100.000	20	14.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3	%	100	743.774.000	100	743.774.000	100	743.774.000	CDK 3	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.300.000		3.300.000		3.300.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3	Dokumen	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.300.000		3.300.000		3.300.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3	Dokumen	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.872.000		125.872.000		136.472.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3	%	100	125.872.000	100	125.872.000	100	136.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.895.000		15.895.000		15.895.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	15.895.000	1	15.895.000	1	15.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3	Paket	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.797.000		4.797.000		4.797.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 3	Paket	1	4.797.000	1	4.797.000	1	4.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 3	Dokumen	1	1.200.000	1	1.200.000	1	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.780.000		75.780.000		75.780.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3	Laporan	1	75.780.000	1	75.780.000	1	75.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					64.000.000		64.000.000		67.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 3	Unit	1	64.000.000	1	64.000.000	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 3	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		43.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	13	40.000.000	13	40.000.000	13	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 3	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.732.000		326.732.000		293.844.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3	Laporan	1	326.732.000	1	326.732.000	1	293.844.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.600.000		66.600.000		61.524.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3	Laporan	1	66.600.000	1	66.600.000	1	61.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				259.132.000		259.132.000		231.320.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3	Laporan	1	259.132.000	1	259.132.000	1	231.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.870.000		223.870.000		242.658.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3	Unit	1	223.870.000	1	223.870.000	1	242.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				68.410.000		68.410.000		70.198.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3	Unit	2	68.410.000	2	68.410.000	2	70.198.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 3	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.460.000		20.460.000		20.460.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3	Unit	40	20.460.000	40	20.460.000	40	20.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		57.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	2	40.000.000	2	40.000.000	2	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4	%	100	669.430.000	100	669.430.000	100	669.430.000	CDK 4	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					194.990.000		194.990.000		194.990.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4	%	100	194.990.000	100	194.990.000	100	194.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.615.000		14.615.000		14.615.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	14.615.000	1	14.615.000	1	14.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.170.000		9.170.000		9.170.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4	Paket	1	9.170.000	1	9.170.000	1	9.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.125.000		10.125.000		10.125.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 4	Paket	1	10.125.000	1	10.125.000	1	10.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		4.200.000		4.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 4	Dokumen	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.000.000		29.000.000		29.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 4	Laporan	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.880.000		115.880.000		115.880.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4	Laporan	1	115.880.000	1	115.880.000	1	115.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		30.000.000		19.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 4	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				11.000.000		11.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 4	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000		19.000.000		14.500.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	10	19.000.000	10	19.000.000	1	14.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 4	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331.740.000		331.740.000		318.940.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4	Laporan	1	331.740.000	1	331.740.000	1	318.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		78.000.000		64.050.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4	Laporan	1	78.000.000	1	78.000.000	1	64.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	0	3.000.000	0	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				249.240.000		249.240.000		250.390.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4	Laporan	1	249.240.000	1	249.240.000	1	250.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.700.000		103.700.000		127.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4	Unit	1	103.700.000	1	103.700.000	1	127.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				73.200.000		73.200.000		94.400.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4	Unit	2	73.200.000	2	73.200.000	2	94.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 4	Unit	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		12.000.000		14.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	14.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.500.000		6.500.000		6.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	Unit	3	6.500.000	3	6.500.000	3	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5	%		635.447.000		635.447.000	100	676.511.000	CDK 5	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.374.000		13.374.000		13.374.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5	Dokumen	1	13.374.000	1	13.374.000	1	13.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.374.000		13.374.000		13.374.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5	Dokumen	1	13.374.000	1	13.374.000	1	13.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.605.000		104.605.000		107.297.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5	%	100	104.605.000	100	104.605.000	100	107.297.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.350.000		3.350.000		3.350.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	3.350.000	1	3.350.000	1	3.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.687.000		6.687.000		6.687.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	6.687.000	1	6.687.000	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.693.000		8.693.000		8.693.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5	Paket	1	8.693.000	1	8.693.000	1	8.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.687.000		6.687.000		6.687.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 5	Paket	1	6.687.000	1	6.687.000	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		2.400.000				
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 5	Dokumen	1	2.400.000	1	2.400.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.788.000		61.788.000		66.880.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5	Laporan	1	61.788.000	1	61.788.000	1	66.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					192.478.000		192.478.000		191.518.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 5	Unit	1	192.478.000	1	192.478.000	1	191.518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				14.917.000		14.917.000		14.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 5	Paket	1	14.917.000	1	14.917.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.061.000		20.061.000		21.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 5	Unit	5	20.061.000	5	20.061.000	5	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				157.500.000		157.500.000		156.518.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5	Unit	1	157.500.000	1	157.500.000	1	156.518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 5	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261.990.000		261.990.000		293.898.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5	Laporan	1	261.990.000	1	261.990.000	1	293.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		2.250.000		2.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5	Laporan	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.200.000		70.200.000		70.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5	Laporan	1	70.200.000	1	70.200.000	1	70.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				189.540.000		189.540.000		221.448.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5	Laporan	1	189.540.000	1	189.540.000	1	221.448.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					63.000.000		63.000.000		70.424.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5	Unit	1	63.000.000	1	63.000.000	1	70.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		50.000.000		54.924.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	2	54.924.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 5	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000		13.000.000		15.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5	Unit	12	13.000.000	12	13.000.000	12	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK5	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6	%	100	549.095.000	100	549.095.000	100	569.095.000	CDK 6	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					167.595.000		167.595.000		167.595.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6	%	100	167.595.000	100	167.595.000	100	167.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 6	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 6	Dokumen	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.795.000		99.795.000		99.795.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6	Laporan	1	99.795.000	1	99.795.000	1	99.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 6	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					267.500.000		267.500.000		287.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6	Laporan	1	267.500.000	1	267.500.000	1	287.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		50.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		210.000.000		210.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6	Laporan	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.000.000		114.000.000		114.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6	Unit	1	114.000.000	1	114.000.000	1	114.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				103.000.000		103.000.000		103.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6	Unit	2	103.000.000	2	103.000.000	2	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 6	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7	%	100	515.927.000	100	515.927.000	100	528.849.000	CDK 7	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 7	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.503.000		101.503.000		102.661.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 7	%	100	101.503.000	100	101.503.000	100	102.661.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.813.000		9.813.000		9.813.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	9.813.000	1	9.813.000	1	9.813.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7	Paket	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		2.000.000		3.158.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.360.000		3.360.000		3.360.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 7	Paket	1	3.360.000	1	3.360.000	1	3.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.980.000		1.980.000		1.980.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 7	Dokumen	1	1.980.000	1	1.980.000	1	1.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.750.000		13.750.000		13.750.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7	Laporan	1	13.750.000	1	13.750.000	1	13.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66.600.000		66.600.000		66.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7	Laporan	1	66.600.000	1	66.600.000	1	66.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					71.400.000		71.400.000		71.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 7	Unit	1	71.400.000	1	71.400.000	1	71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.400.000		25.400.000		25.400.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 7	Paket	1	25.400.000	1	25.400.000	1	25.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.000.000		46.000.000		46.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	4	46.000.000	4	46.000.000	4	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 7	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.524.000		137.524.000		150.788.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7	Laporan	1	137.524.000	1	137.524.000	1	150.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7	Laporan	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.524.000		100.524.000		113.788.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7	Laporan	1	100.524.000	1	100.524.000	1	113.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.500.000		202.500.000		201.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7	Unit	1	202.500.000	1	202.500.000	1	201.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				56.000.000		56.000.000		54.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7	Unit	2	56.000.000	2	56.000.000	2	54.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 7	Unit	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7	Unit	18	8.000.000	18	8.000.000	18	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.000.000		137.000.000		137.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	1	137.000.000	1	137.000.000	1	137.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8	%	100	605.175.000	100	605.175.000	100	605.175.000	CDK 8	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.687.000		6.687.000		6.687.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8	Dokumen	1	6.687.000	1	6.687.000	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.687.000		6.687.000		6.687.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8	Dokumen	1	6.687.000	1	6.687.000	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.944.000		112.944.000		113.944.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8	%	100	112.944.000	100	112.944.000	100	113.944.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.012.000		4.012.000		4.012.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.031.000		10.031.000		10.031.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	10.031.000	1	10.031.000	1	10.031.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.548.000		8.548.000		8.548.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8	Paket	1	8.548.000	1	8.548.000	1	8.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.672.000		4.672.000		4.672.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.672.000	1	4.672.000	1	4.672.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.012.000		4.012.000		4.012.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8	Paket	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.408.000		1.408.000		1.408.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 8	Dokumen	1	1.408.000	1	1.408.000	1	1.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.370.000		13.370.000		19.370.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8	Laporan	1	13.370.000	1	13.370.000	1	19.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66.891.000		66.891.000		61.891.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8	Laporan	1	66.891.000	1	66.891.000	1	61.891.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					74.000.000		74.000.000		74.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 8	Unit	1	74.000.000	1	74.000.000	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 8	Paket	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.000.000		61.000.000		61.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	4	61.000.000	4	61.000.000	4	61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 8	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.660.000		232.660.000		237.738.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8	Laporan	1	232.660.000	1	232.660.000	1	237.738.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.900.000		36.900.000		41.978.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8	Laporan	1	36.900.000	1	36.900.000	1	41.978.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				185.260.000		185.260.000		185.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8	Laporan	1	185.260.000	1	185.260.000	1	185.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					178.884.000		178.884.000		172.806.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8	Unit	1	178.884.000	1	178.884.000	1	172.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.153.000		50.153.000		50.153.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8	Unit	2	50.153.000	2	50.153.000	2	50.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.009.000		3.009.000		3.009.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 8	Unit	30	3.009.000	30	3.009.000	30	3.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.061.000		20.061.000		13.983.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8	Unit	40	20.061.000	40	20.061.000	40	13.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.600.000		75.600.000		75.600.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	75.600.000	1	75.600.000	1	75.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.061.000		20.061.000		20.061.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	20.061.000	1	20.061.000	1	20.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9	%	100	654.852.000	100	654.852.000	100	657.352.000	CDK 9	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.012.000		4.012.000		4.012.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9	Dokumen	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4.012.000		4.012.000		4.012.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9	Dokumen	1	4.012.000	1	4.012.000	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.129.000		172.129.000		184.629.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9	%	100	172.129.000	100	172.129.000	100	184.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.687.000		6.687.000		6.687.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	6.687.000	1	6.687.000	1	6.687.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.627.000		34.627.000		34.627.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	34.627.000	1	34.627.000	1	34.627.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.405.000		23.405.000		23.405.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9	Paket	1	23.405.000	1	23.405.000	1	23.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.062.000		20.062.000		20.062.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9	Paket	1	20.062.000	1	20.062.000	1	20.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.356.000		11.356.000		11.356.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 9	Paket	1	11.356.000	1	11.356.000	1	11.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan CDK 9	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.400.000		20.400.000		32.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9	Laporan	1	20.400.000	1	20.400.000	1	32.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.592.000		52.592.000		52.592.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9	Laporan	1	52.592.000	1	52.592.000	1	52.592.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.821.000		90.821.000		90.821.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada CDK 9	Unit	1	90.821.000	1	90.821.000	1	90.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan CDK 9	Paket	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.821.000		50.821.000		50.821.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	10	50.821.000	10	50.821.000	10	50.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan CDK 9	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					195.000.000		195.000.000		195.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9	Laporan	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 9	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.900.000		45.900.000		50.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9	Laporan	1	45.900.000	1	45.900.000	1	50.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				147.100.000		147.100.000		142.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9	Laporan	1	147.100.000	1	147.100.000	1	142.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					192.890.000		192.890.000		182.890.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9	Unit	1	192.890.000	1	192.890.000	1	182.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				76.500.000		76.500.000		76.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9	Unit	2	76.500.000	2	76.500.000	2	76.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara CDK 9	Unit	20	500.000	20	500.000	20	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.581.000		37.581.000		27.581.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 9	Unit	20	37.581.000	20	37.581.000	20	27.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				46.809.000		46.809.000		46.809.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	46.809.000	1	46.809.000	1	46.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.500.000		26.500.000		26.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	26.500.000	1	26.500.000	1	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**786.551.000**		**786.551.000**		**880.031.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	786.551.000	3	3	3	880.031.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						786.551.000		786.551.000		880.031.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	786.551.000	100	786.551.000	100	880.031.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					786.551.000		786.551.000		880.031.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	786.551.000	100	786.551.000	100	880.031.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				399.520.000		399.520.000		399.520.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	399.520.000	9	399.520.000	9	399.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				387.031.000		387.031.000		480.511.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	387.031.000	5	387.031.000	5	480.511.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tutupan lahan									**27.589.586.000**		**44.489.586.000**		**44.445.490.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	42.45		42.45		42.45		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya luasan tutupan lahan								**27.589.586.000**		**44.489.586.000**		**44.445.490.000**		
						Luas tutupan lahan	Ha	1022457	27.589.586.000	1022457	1.022.457	1022457	44.445.490.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						18.758.156.000		34.789.156.000		34.752.256.000		
						Persentase lahan kritis tertangani	%	0.47	120.366.000	0.47	120.366.000	0.86	120.366.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					120.366.000		120.366.000		120.366.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Ha	1776	120.366.000	1776	120.366.000	1776	120.366.000		
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				44.486.000		44.486.000		44.486.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	Dokumen	1	44.486.000	1	44.486.000	1	44.486.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				75.880.000		75.880.000		75.880.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Dokumen	3	75.880.000	3	75.880.000	3	75.880.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0.02	1.087.854.000	0.02	2.194.854.000	0.02	2.168.854.000	CDK 1	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.087.854.000		2.194.854.000		2.168.854.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1	Ha	66	1.087.854.000	66	2.194.854.000	69	2.168.854.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				23.924.000		23.924.000		23.924.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 1	Dokumen	1	23.924.000	1	23.924.000	1	23.924.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				209.385.000		209.385.000		209.385.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	40	209.385.000	40	209.385.000	40	209.385.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				292.894.000		442.894.000		416.894.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	Ha	25	292.894.000	28	442.894.000	28	416.894.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				466.472.000		1.423.472.000		1.423.472.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK1	Unit	29	466.472.000	118	1.423.472.000	118	1.423.472.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				24.300.000		24.300.000		24.300.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 1	Laporan	1	24.300.000	1	24.300.000	1	24.300.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				70.879.000		70.879.000		70.879.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 1	Ha	1	70.879.000	1	70.879.000	1	70.879.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0.03	1.089.640.000	0.03	2.516.640.000	0.07	2.561.640.000	CDK 10	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.089.640.000		2.516.640.000		2.561.640.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10	Ha	100	1.089.640.000	100	2.516.640.000	234	2.561.640.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				30.175.000		30.175.000		30.175.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 10	Dokumen	1	30.175.000	1	30.175.000	1	30.175.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				319.874.000		969.874.000		969.874.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	50	319.874.000	199	969.874.000	180	969.874.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				387.550.000		387.550.000		432.550.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	Ha	50	387.550.000	54	387.550.000	54	432.550.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				274.956.000		1.051.956.000		1.051.956.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 10	Unit	4	274.956.000	70	1.051.956.000	70	1.051.956.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				77.085.000		77.085.000		77.085.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 10	Dokumen	1	77.085.000	1	77.085.000	1	77.085.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0.03	1.001.937.000	0.03	2.326.937.000	0.06	2.326.937.000	CDK 11	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.001.937.000		2.326.937.000		2.326.937.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11	Ha	130	1.001.937.000	130	2.326.937.000	215	2.326.937.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.405.000		33.405.000		33.405.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 11	Dokumen	1	33.405.000	1	33.405.000	1	33.405.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				236.000.000		578.150.000		578.150.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	78	236.000.000	83	578.150.000	83	578.150.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				391.495.000		699.345.000		699.345.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	Ha	52	391.495.000	131	699.345.000	131	699.345.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				320.976.000		995.976.000		995.976.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 11	Unit	16	320.976.000	35	995.976.000	35	995.976.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				20.061.000		20.061.000		20.061.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 11	Dokumen	1	20.061.000	1	20.061.000	1	20.061.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0.04	1.129.723.000	0.04	2.556.723.000	0.08	2.556.723.000	CDK 2	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.129.723.000		2.556.723.000		2.556.723.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2	Ha	137	1.129.723.000	137	2.556.723.000	287	2.556.723.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				28.426.000		28.426.000		28.426.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 2	Dokumen	1	28.426.000	1	28.426.000	1	28.426.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				411.212.000		791.612.000		791.612.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	90	411.212.000	180	791.612.000	180	791.612.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				120.093.000		389.693.000		389.693.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	Ha	30	120.093.000	90	389.693.000	90	389.693.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				387.534.000		1.164.534.000		1.164.534.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 2	Unit	55	387.534.000	137	1.164.534.000	137	1.164.534.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				23.600.000		23.600.000		23.600.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 2	Laporan	1	23.600.000	1	23.600.000	1	23.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				158.858.000		158.858.000		158.858.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 2	Ha	17	158.858.000	17	158.858.000	17	158.858.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0.03	1.274.159.000	0.03	3.201.159.000	0.08	3.216.159.000	CDK 3	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.274.159.000		3.201.159.000		3.216.159.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3	Ha	114	1.274.159.000	114	3.201.159.000	317	3.216.159.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				16.290.000		16.290.000		16.290.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 3	Dokumen	1	16.290.000	1	16.290.000	1	16.290.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				356.047.000		909.037.000		934.737.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	62	356.047.000	157	909.037.000	157	934.737.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				397.729.000		984.389.000		974.689.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	Ha	51	397.729.000	159	984.389.000	159	974.689.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				443.909.000		1.231.259.000		1.230.259.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 3	Unit	58	443.909.000	107	1.231.259.000	107	1.230.259.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				30.092.000		30.092.000		30.092.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 3	Dokumen	1	30.092.000	1	30.092.000	1	30.092.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				30.092.000		30.092.000		30.092.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 3	Ha	1	30.092.000	1	30.092.000	1	30.092.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0.03	1.082.500.000	0.03	2.509.500.000	0.04	2.509.500.000	CDK 4	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.082.500.000		2.509.500.000		2.509.500.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4	Ha	120	1.082.500.000	120	2.509.500.000	161	2.509.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 4	Ha	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				400.000.000		594.850.000		594.850.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	100	400.000.000	100	594.850.000	100	594.850.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		605.150.000		605.150.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	Ha	15	150.000.000	56	605.150.000	56	605.150.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				410.000.000		1.187.000.000		1.187.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 4	Unit	12	410.000.000	59	1.187.000.000	59	1.187.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 4	Dokumen	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				92.000.000		92.000.000		92.000.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 4	Ha	10	92.000.000	5	92.000.000	5	92.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0.04	1.297.588.000	0.04	2.724.588.000	0.04	2.703.024.000	CDK 5	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.297.588.000		2.724.588.000		2.703.024.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5	Ha	140	1.297.588.000	140	2.724.588.000	201	2.703.024.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.435.000		33.435.000		33.435.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 5	Dokumen	1	33.435.000	1	33.435.000	1	33.435.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				480.762.000		480.762.000		478.615.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	105	480.762.000	105	480.762.000	105	478.615.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				172.700.000		822.700.000		803.283.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	Ha	20	172.700.000	45	822.700.000	81	803.283.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				399.700.000		1.176.700.000		1.176.700.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 5	Unit	14	399.700.000	99	1.176.700.000	101	1.176.700.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				25.411.000		25.411.000		25.411.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 5	Dokumen	1	25.411.000	1	25.411.000	1	25.411.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				185.580.000		185.580.000		185.580.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 5	Ha	25	185.580.000	15	185.580.000	15	185.580.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0.09	1.377.789.000	0.09	2.804.789.000	0.15	2.782.889.000	CDK 6	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.377.789.000		2.804.789.000		2.782.889.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6	Ha	330	1.377.789.000	330	2.804.789.000	558	2.782.889.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.435.000		33.435.000		33.435.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 6	Dokumen	1	33.435.000	1	33.435.000	1	33.435.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				325.119.000		560.119.000		560.119.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	150	325.119.000	250	560.119.000	250	560.119.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				328.870.000		743.870.000		721.970.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	Ha	175	328.870.000	302.5	743.870.000	302.5	721.970.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				483.068.000		1.260.068.000		1.260.068.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 6	Unit	32	483.068.000	118	1.260.068.000	118	1.260.068.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				66.870.000		66.870.000		66.870.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 6	Dokumen	1	66.870.000	1	66.870.000	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				140.427.000		140.427.000		140.427.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 6	Ha	5	140.427.000	5	140.427.000	5	140.427.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0.09	1.224.454.000	0.09	2.651.454.000	0.16	2.645.004.000	CDK 7	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.224.454.000		2.651.454.000		2.645.004.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7	Ha	350	1.224.454.000	350	2.651.454.000	580	2.645.004.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.435.000		33.435.000		33.435.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 7	Dokumen	1	33.435.000	1	33.435.000	1	33.435.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				438.627.000		1.017.775.000		1.017.775.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	250	438.627.000	450	1.017.775.000	450	1.017.775.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				236.311.000		307.163.000		307.163.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	Ha	100	236.311.000	150	307.163.000	130	307.163.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				463.919.000		1.240.919.000		1.234.919.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 7	Unit	26	463.919.000	79	1.240.919.000	79	1.234.919.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				52.162.000		52.162.000		51.712.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK	Laporan	1	52.162.000	1	52.162.000	1	51.712.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0.04	966.058.000	0.04	2.393.058.000	0.07	2.423.058.000	CDK 8	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					966.058.000		2.393.058.000		2.423.058.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8	Ha	145	966.058.000	145	2.393.058.000	271	2.423.058.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				6.687.000		6.687.000		6.687.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 8	Dokumen	1	6.687.000	1	6.687.000	1	6.687.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				246.299.000		896.299.000		896.299.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	90	246.299.000	215	896.299.000	215	896.299.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				201.420.000		201.420.000		231.420.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	Ha	52.5	201.420.000	52.5	201.420.000	52.5	231.420.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				369.338.000		1.146.338.000		1.146.338.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 8	Unit	16	369.338.000	65	1.146.338.000	65	1.146.338.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				50.153.000		50.153.000		50.153.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 8	Dokumen	1	50.153.000	1	50.153.000	1	50.153.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				92.161.000		92.161.000		92.161.000		
						Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 8	Ha	3	92.161.000	3	92.161.000	3	92.161.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0.04	921.323.000	0.04	2.604.323.000	0.09	2.604.323.000	CDK 9	
		3.28.03.1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					921.323.000		2.604.323.000		2.604.323.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9	Ha	139	921.323.000	139	2.604.323.000	349	2.604.323.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				56.103.000		56.103.000		56.103.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) CDK 9	Dokumen	1	56.103.000	1	56.103.000	1	56.103.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				354.248.000		1.096.568.000		1.096.568.000		
						Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	85	354.248.000	275	1.096.568.000	275	1.096.568.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				215.510.000		373.190.000		373.190.000		
						Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	Ha	54	215.510.000	74	373.190.000	74	373.190.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0005			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				255.340.000		1.038.340.000		1.038.340.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di wilayah CDK 9	Unit	11	255.340.000	45	1.038.340.000	45	1.038.340.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				40.122.000		40.122.000		40.122.000		
						Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan di wilayah CDK 9	Dokumen	1	40.122.000	1	40.122.000	1	40.122.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	247.419.000	100	247.419.000	100	247.419.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					247.419.000		247.419.000		247.419.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Dokumen	1	247.419.000	1	247.419.000	1	247.419.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				247.419.000		247.419.000		247.419.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Dokumen	1	247.419.000	1	247.419.000	1	247.419.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1	%	100	79.244.000	100	79.244.000	100	79.244.000	CDK 1	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					79.244.000		79.244.000		79.244.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK1	Dokumen	1	79.244.000	1	79.244.000	1	79.244.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				79.244.000		79.244.000		79.244.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 1	Dokumen	1	79.244.000	1	79.244.000	1	79.244.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10	%	100	53.400.000	100	53.400.000	100	53.400.000	CDK 10	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					53.400.000		53.400.000		53.400.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 10	Dokumen	1	53.400.000	1	53.400.000	1	53.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				53.400.000		53.400.000		53.400.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 10	Laporan	1	53.400.000	1	53.400.000	1	53.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	%	100	25.518.000	100	25.518.000	100	25.518.000	CDK 11	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					25.518.000		25.518.000		25.518.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 11	Dokumen	1	25.518.000	1	25.518.000	1	25.518.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				25.518.000		25.518.000		25.518.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 11	Dokumen	1	25.518.000	1	25.518.000	1	25.518.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	%	100	26.109.000	100	26.109.000	100	26.109.000	CDK 2	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					26.109.000		26.109.000		26.109.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK2	Dokumen	1	26.109.000	1	26.109.000	1	26.109.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				26.109.000		26.109.000		26.109.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 2	Dokumen	1	26.109.000	1	26.109.000	1	26.109.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	%	100	53.496.000	100	53.496.000	100	53.496.000	CDK 3	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					53.496.000		53.496.000		53.496.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK3	Dokumen	1	53.496.000	1	53.496.000	1	53.496.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				53.496.000		53.496.000		53.496.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 3	Laporan	1	53.496.000	1	53.496.000	1	53.496.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	%	100	37.400.000	100	37.400.000	100	37.400.000	CDK 4	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					37.400.000		37.400.000		37.400.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK4	Dokumen	1	37.400.000	1	37.400.000	1	37.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				37.400.000		37.400.000		37.400.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 4	Dokumen	1	37.400.000	1	37.400.000	1	37.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	49.000.000	CDK 5	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		50.000.000		49.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 5	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	49.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		50.000.000		49.000.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 5	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	49.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	%	100	91.931.000	100	91.931.000	100	91.931.000	CDK 6	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					91.931.000		91.931.000		91.931.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 6	Dokumen	1	91.931.000	1	91.931.000	1	91.931.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				91.931.000		91.931.000		91.931.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 6	Dokumen	1	91.931.000	1	91.931.000	1	91.931.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	%	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	CDK 7	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					57.000.000		57.000.000		57.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 7	Dokumen	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				57.000.000		57.000.000		57.000.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 7	Dokumen	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	%	100	50.153.000	100	50.153.000	100	50.153.000	CDK 8	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.153.000		50.153.000		50.153.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 8	Dokumen	1	50.153.000	1	50.153.000	1	50.153.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.153.000		50.153.000		50.153.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 8	Dokumen	1	50.153.000	1	50.153.000	1	50.153.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	%	100	47.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	CDK 9	
		3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					47.000.000		47.000.000		47.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan di wilayah CDK 9	Dokumen	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				47.000.000		47.000.000		47.000.000		
						Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah CDK 9	Dokumen	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan produksi bibit	%	-40	1.705.114.000	-40	1.705.114.000	-40	1.705.114.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
		3.28.03.1.09		Perbenihan Tanaman Hutan					1.705.114.000		1.705.114.000		1.705.114.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	Bibit	600000	1.496.053.000	600000	1.496.053.000	600000	1.496.053.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
		3.28.03.1.09.0006			Pembangunan Sumber Benih				1.496.053.000		1.496.053.000		1.496.053.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi	Bibit	600000	1.207.323.000	500000	1.207.323.000	500000	1.207.323.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Luas sumber benih yang dibangun	Ha	0.5	288.730.000	0.5	288.730.000	0.5	288.730.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Sertifikat	75	209.061.000	75	209.061.000	75	209.061.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	
		3.28.03.1.09.0001			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar				18.055.000		18.055.000		18.055.000		
						Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Dokumen	12	18.055.000	12	18.055.000	12	18.055.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0002			Sertifikasi Sumber Benih				14.715.000		14.715.000		14.715.000		
						Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan	Sertifikat	5	14.715.000	5	14.715.000	5	14.715.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0003			Sertifikasi Mutu Benih				23.405.000		23.405.000		23.405.000		
						Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan	Sertifikat	10	23.405.000	10	23.405.000	10	23.405.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0004			Sertifikasi Mutu Bibit				66.610.000		66.610.000		66.610.000		
						Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan	Sertifikat	60	66.610.000	60	66.610.000	60	66.610.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				86.276.000		86.276.000		86.276.000		
						Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar	Dokumen	2	86.276.000	2	86.276.000	2	86.276.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35.4	969.687.000	35.4	969.687.000	35.4	911.141.000	Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.03.1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					404.563.000		404.563.000		346.017.000		
						Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan	Unit	70	404.563.000	70	404.563.000	70	346.017.000		
		3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				153.801.000		153.801.000		124.528.000		
						Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	Dokumen	4	153.801.000	4	153.801.000	4	124.528.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				250.762.000		250.762.000		221.489.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	Dokumen	12	250.762.000	12	250.762.000	12	221.489.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					230.774.000		230.774.000		230.774.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	6	230.774.000	6	230.774.000	6	230.774.000		
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				150.530.000		150.530.000		150.530.000		
						Jumlah unit managemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	Unit	6	150.530.000	6	150.530.000	6	150.530.000		
		3.28.03.1.06.0004			Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu				80.244.000		80.244.000		80.244.000		
						Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib	Unit	2	80.244.000	2	80.244.000	2	80.244.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					334.350.000		334.350.000		334.350.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	149	334.350.000	149	334.350.000	149	334.350.000		
		3.28.03.1.07.0001			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				133.740.000		133.740.000		133.740.000		
						Jumlah unit managemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah	Unit	12	133.740.000	12	133.740.000	12	133.740.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				147.114.000		147.114.000		147.114.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun	Unit	12	147.114.000	12	147.114.000	12	147.114.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.0003			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				53.496.000		53.496.000		53.496.000		
						Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit	12	53.496.000	12	53.496.000	12	53.496.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	%	1.38	398.034.000	1.38	398.034.000	1.38	398.034.000	CDK 1	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					300.939.000		300.939.000		300.939.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK1	Unit	5	300.939.000	5	300.939.000	5	300.939.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				300.939.000		300.939.000		300.939.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di wilayah CDK 1	Unit	5	300.939.000	5	300.939.000	5	300.939.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					97.095.000		97.095.000		97.095.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK1	Unit	11	97.095.000	11	97.095.000	11	97.095.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				97.095.000		97.095.000		97.095.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 1	Unit	11	97.095.000	11	97.095.000	11	97.095.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	%	1.03	147.267.000	1.03	147.267.000	1.03	147.267.000	CDK 10	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					107.050.000		107.050.000		107.050.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 10	Unit	3	107.050.000	3	107.050.000	3	107.050.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				107.050.000		107.050.000		107.050.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 10	Unit	3	107.050.000	3	107.050.000	3	107.050.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					40.217.000		40.217.000		40.217.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 10	Unit	9	40.217.000	9	40.217.000	9	40.217.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				40.217.000		40.217.000		40.217.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 10	Unit	9	40.217.000	9	40.217.000	9	40.217.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	%	1.29	349.730.000	1.29	349.730.000	1.29	349.730.000	CDK 11	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					273.730.000		273.730.000		273.730.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 11	Unit	3	273.730.000	3	273.730.000	3	273.730.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				273.730.000		273.730.000		273.730.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 11	Unit	3	273.730.000	3	273.730.000	3	273.730.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					76.000.000		76.000.000		76.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 11	Unit	12	76.000.000	12	76.000.000	12	76.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				76.000.000		76.000.000		76.000.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 11	Unit	12	76.000.000	12	76.000.000	12	76.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	%	1.72	564.437.000	1.72	564.437.000	1.72	564.437.000	CDK 2	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					521.621.000		521.621.000		521.621.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 2	Unit	4	521.621.000	4	521.621.000	4	521.621.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				521.621.000		521.621.000		521.621.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 2	Unit	4	521.621.000	4	521.621.000	4	521.621.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					42.816.000		42.816.000		42.816.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 2	Unit	16	42.816.000	16	42.816.000	16	42.816.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				42.816.000		42.816.000		42.816.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 2	Unit	16	42.816.000	16	42.816.000	16	42.816.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	%	1.64	185.752.000	1.64	185.752.000	1.64	185.752.000	CDK 3	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					135.569.000		135.569.000		135.569.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK3	Unit	6	135.569.000	6	135.569.000	6	135.569.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				135.569.000		135.569.000		135.569.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 3	Unit	6	135.569.000	6	135.569.000	6	135.569.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					50.183.000		50.183.000		50.183.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK3	Unit	13	50.183.000	13	50.183.000	13	50.183.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				50.183.000		50.183.000		50.183.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 3	Unit	13	50.183.000	13	50.183.000	13	50.183.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	%	1.46	139.900.000	1.46	139.900.000	1.46	139.900.000	CDK 4	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					101.450.000		101.450.000		101.450.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK4	Unit	3	101.450.000	3	101.450.000	3	101.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				101.450.000		101.450.000		101.450.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 4	Unit	3	101.450.000	3	101.450.000	3	101.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					38.450.000		38.450.000		38.450.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK4	Unit	14	38.450.000	14	38.450.000	14	38.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				38.450.000		38.450.000		38.450.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 4	Unit	14	38.450.000	14	38.450.000	14	38.450.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	%	1.29	160.000.000	1.29	160.000.000	1.29	150.500.000	CDK 5	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					100.000.000		100.000.000		95.500.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 5	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	3	95.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.000.000		100.000.000		95.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 5	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	3	95.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					60.000.000		60.000.000		55.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 5	Unit	12	60.000.000	12	60.000.000	12	55.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				60.000.000		60.000.000		55.000.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 5	Unit	12	60.000.000	12	60.000.000	12	55.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6	%	2.15	134.489.000	2.15	134.489.000	2.15	134.489.000	CDK 6	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					75.320.000		75.320.000		75.320.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 6	Unit	9	75.320.000	9	75.320.000	9	75.320.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				75.320.000		75.320.000		75.320.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 6	Unit	9	75.320.000	9	75.320.000	9	75.320.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					59.169.000		59.169.000		59.169.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 6	Unit	16	59.169.000	16	59.169.000	16	59.169.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				59.169.000		59.169.000		59.169.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 6	Unit	16	59.169.000	16	59.169.000	16	59.169.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	%	1.55	281.408.000	1.55	281.408.000	1.55	299.468.000	CDK 7	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					263.108.000		263.108.000		281.168.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 7	Unit	3	263.108.000	3	263.108.000	3	281.168.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				263.108.000		263.108.000		281.168.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 7	Unit	3	263.108.000	3	263.108.000	3	281.168.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					18.300.000		18.300.000		18.300.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 7	Unit	15	18.300.000	15	18.300.000	15	18.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				18.300.000		18.300.000		18.300.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 7	Unit	15	18.300.000	15	18.300.000	15	18.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	%	1.03	133.740.000	1.03	133.740.000	1.03	133.740.000	CDK 8	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					100.305.000		100.305.000		100.305.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 8	Unit	3	100.305.000	3	100.305.000	3	100.305.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.305.000		100.305.000		100.305.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi CDK 8	Unit	3	100.305.000	3	100.305.000	3	100.305.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					33.435.000		33.435.000		33.435.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 8	Unit	9	33.435.000	9	33.435.000	9	33.435.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				33.435.000		33.435.000		33.435.000		
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 8	Unit	9	33.435.000	9	33.435.000	9	33.435.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	1.46	196.537.000	1.46	196.537.000	1.46	196.537.000	CDK 9	
		3.28.03.1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					128.960.000		128.960.000		128.960.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9	Unit	4	128.960.000	4	128.960.000	4	128.960.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.0003			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				128.960.000		128.960.000		128.960.000		
						Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 9	Unit	4	128.960.000	4	128.960.000	4	128.960.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					67.577.000		67.577.000		67.577.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di wilayah CDK 9	Unit	13	67.577.000	13	67.577.000	13	67.577.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.0002			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				67.577.000		67.577.000		67.577.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit PBPHH berkapasitas produksi <2.000 m3/tahun yang dibina, dikendalikan dan diawasi di wilayah CDK 9	Unit	13	67.577.000	13	67.577.000	13	67.577.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						2.966.293.000		2.966.293.000		2.983.793.000		
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	70	1.473.793.000	70	1.473.793.000	70	1.473.793.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
		3.28.04.1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					1.473.793.000		1.473.793.000		1.473.793.000		
						Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Dokumen	2	804.259.000	2	804.259.000	2	804.259.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	
		3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				86.931.000		86.931.000		86.931.000		
						Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti	Dokumen	50	86.931.000	50	86.931.000	50	86.931.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi				96.962.000		96.962.000		96.962.000		
						Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan	Dokumen	2	96.962.000	2	96.962.000	2	96.962.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0008			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi				120.366.000		120.366.000		120.366.000		
						Jumlah kelompok masyarakat sekitar tahura yang ditingkatkan / diberdayakan	Kelompok	1	120.366.000	1	120.366.000	1	120.366.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan	Dokumen	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	669.534.000	231.3	669.534.000	231.3	669.534.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.0002			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				338.364.000		338.364.000		314.524.000		
						Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi	Bulan	12	338.364.000	12	338.364.000	12	314.524.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0003			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi				134.170.000		134.170.000		156.070.000		
						Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	20	134.170.000	20	134.170.000	20	156.070.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.0005			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi				197.000.000		197.000.000		198.940.000		
						Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha	10	197.000.000	10	197.000.000	10	198.940.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	86.931.000	10	86.931.000	10	86.931.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					86.931.000		86.931.000		86.931.000		
						Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Dokumen	4	86.931.000	4	86.931.000	4	86.931.000		
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				86.931.000		86.931.000		86.931.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Laporan	4	86.931.000	4	86.931.000	4	86.931.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	%	5	32.101.000	5	32.101.000	5	32.101.000	CDK 1	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					32.101.000		32.101.000		32.101.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK1	Jenis	2	32.101.000	2	32.101.000	2	32.101.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				32.101.000		32.101.000		32.101.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 1	Dokumen	1	32.101.000	1	32.101.000	1	32.101.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	%	5	25.800.000	5	25.800.000	5	25.800.000	CDK 10	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					25.800.000		25.800.000		25.800.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 10	Jenis	2	25.800.000	2	25.800.000	2	25.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				25.800.000		25.800.000		25.800.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 10	Dokumen	1	25.800.000	1	25.800.000	1	25.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	%	5	53.496.000	5	53.496.000	5	73.496.000	CDK 11	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					53.496.000		53.496.000		73.496.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 11	Jenis	2	53.496.000	2	53.496.000	2	73.496.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				53.496.000		53.496.000		73.496.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 11	Dokumen	1	53.496.000	1	53.496.000	1	73.496.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2	%	5	24.247.000	5	24.247.000	5	24.247.000	CDK 2	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					24.247.000		24.247.000		24.247.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK2	Jenis	2	24.247.000	2	24.247.000	2	24.247.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				24.247.000		24.247.000		24.247.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 2	Dokumen	1	24.247.000	1	24.247.000	1	24.247.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	%	5	66.870.000	5	66.870.000	5	66.870.000	CDK 3	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					66.870.000		66.870.000		66.870.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK3	Jenis	2	66.870.000	2	66.870.000	2	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				66.870.000		66.870.000		66.870.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 3	Dokumen	1	66.870.000	1	66.870.000	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	%	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	CDK 4	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK4	Jenis	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 4	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	%	5	26.748.000	5	26.748.000	5	26.748.000	CDK 5	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					26.748.000		26.748.000		26.748.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 5	Jenis	2	26.748.000	2	26.748.000	2	26.748.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				26.748.000		26.748.000		26.748.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 5	Dokumen	1	26.748.000	1	26.748.000	1	26.748.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6	%	5	93.618.000	5	93.618.000	5	93.618.000	CDK 6	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah					93.618.000		93.618.000		93.618.000		

				Provinsi											
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 6	Jenis	2	93.618.000	2	93.618.000	2	93.618.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				93.618.000		93.618.000		93.618.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 6	Dokumen	1	93.618.000	1	93.618.000	1	93.618.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	%	5	15.485.000	5	15.485.000	5	15.485.000	CDK 7	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					15.485.000		15.485.000		15.485.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 7	Jenis	2	15.485.000	2	15.485.000	2	15.485.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				15.485.000		15.485.000		15.485.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 7	Dokumen	1	15.485.000	1	15.485.000	1	15.485.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	%	5	16.718.000	5	16.718.000	5	16.718.000	CDK 8	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					16.718.000		16.718.000		16.718.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 8	Jenis	2	16.718.000	2	16.718.000	2	16.718.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				16.718.000		16.718.000		16.718.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 8	Dokumen	1	16.718.000	1	16.718.000	1	16.718.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	%	5	101.560.000	5	101.560.000	5	101.560.000	CDK 9	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					101.560.000		101.560.000		101.560.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di wilayah CDK 9	Jenis	2	101.560.000	2	101.560.000	2	101.560.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				101.560.000		101.560.000		101.560.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES di wilayah CDK 9	Dokumen	1	101.560.000	1	101.560.000	1	101.560.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	40	364.533.000	40	364.533.000	40	364.533.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					364.533.000		364.533.000		364.533.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem	Dokumen	7	364.533.000	7	364.533.000	7	364.533.000		
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				364.533.000		364.533.000		364.533.000		
						Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dokumen	7	364.533.000	7	364.533.000	7	364.533.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	%	100	19.545.000	100	19.545.000	100	19.545.000	CDK 1	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					19.545.000		19.545.000		19.545.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK1	Unit	1	19.545.000	1	19.545.000	1	19.545.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				19.545.000		19.545.000		19.545.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 1	Kelompok	1	19.545.000	1	19.545.000	1	19.545.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10	%	0		0		0		CDK 10	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 10	Unit	0		0		0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi										
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 10	Kelompok	0		0		0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	%	100	29.223.000	100	29.223.000	100	29.223.000	CDK 2	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					29.223.000		29.223.000		29.223.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK2	Unit	1	29.223.000	1	29.223.000	1	29.223.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				29.223.000		29.223.000		29.223.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 2	Kelompok	1	29.223.000	1	29.223.000	1	29.223.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	%	100	68.104.000	100	68.104.000	100	68.104.000	CDK 3	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					68.104.000		68.104.000		68.104.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK3	Unit	1	68.104.000	1	68.104.000	1	68.104.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				68.104.000		68.104.000		68.104.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 3	Kelompok	2	68.104.000	2	68.104.000	2	68.104.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	%	100	81.882.000	100	81.882.000	100	81.882.000	CDK 4	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					81.882.000		81.882.000		81.882.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK4	Unit	1	81.882.000	1	81.882.000	1	81.882.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				81.882.000		81.882.000		81.882.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 4	Kelompok	2	81.882.000	2	81.882.000	2	81.882.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	%	100	31.429.000	100	31.429.000	100	31.429.000	CDK 5	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					31.429.000		31.429.000		31.429.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 5	Unit	1	31.429.000	1	31.429.000	1	31.429.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				31.429.000		31.429.000		31.429.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 5	Kelompok	2	31.429.000	2	31.429.000	2	31.429.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	%	100	66.870.000	100	66.870.000	100	66.870.000	CDK 6	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					66.870.000		66.870.000		66.870.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 6	Unit	1	66.870.000	1	66.870.000	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				66.870.000		66.870.000		66.870.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 6	Kelompok	1	66.870.000	1	66.870.000	1	66.870.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	%	100	14.795.000	100	14.795.000	100	14.795.000	CDK 8	
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					14.795.000		14.795.000		14.795.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 8	Unit	1	14.795.000	1	14.795.000	1	14.795.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				14.795.000		14.795.000		14.795.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 8	Kelompok	1	14.795.000	1	14.795.000	1	14.795.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	%	100	20.625.000	100	20.625.000	100	18.125.000	CDK 9	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.04.1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					20.625.000		20.625.000		18.125.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di wilayah CDK 9	Unit	1	20.625.000	1	20.625.000	1	18.125.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				20.625.000		20.625.000		18.125.000		
						Jumlah kelompok / masyarakat yang diberdayakan di wilayah CDK 9	Kelompok	1	20.625.000	1	20.625.000	1	18.125.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	226.920.000	100	226.920.000	100	226.920.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					226.920.000		226.920.000		226.920.000		
						Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	Jenis	705	226.920.000	705	226.920.000	705	226.920.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				226.920.000		226.920.000		226.920.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Dokumen	1	226.920.000	1	226.920.000	1	226.920.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						5.313.155.000		6.182.155.000		6.157.459.000		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2.5	533.894.000	2.5	533.894.000	2.5	533.894.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					533.894.000		533.894.000		533.894.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	533.894.000	25	533.894.000	25	533.894.000	SEKSI PENYULUHAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				113.794.000		113.794.000		113.794.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	Orang	90	113.794.000	90	113.794.000	90	113.794.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				296.390.000		296.390.000		296.390.000		
						Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi	Dokumen	2	296.390.000	2	296.390.000	2	296.390.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				123.710.000		123.710.000		123.710.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial	Dokumen	2	123.710.000	2	123.710.000	2	123.710.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0.3	472.308.000	0.3	551.308.000	0.3	551.308.000	CDK 1	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					472.308.000		551.308.000		551.308.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1	Kelompok	3	472.308.000	3	551.308.000	3	551.308.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				74.049.000		74.049.000		74.049.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 1	Orang	60	74.049.000	60	74.049.000	60	74.049.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				268.785.000		347.785.000		347.785.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1	Kelompok	130	268.785.000	130	347.785.000	130	347.785.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				129.474.000		129.474.000		129.474.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 1	Unit	5	129.474.000	5	129.474.000	5	129.474.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0.2	372.271.000	0.2	451.271.000	0.2	451.271.000	CDK 10	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					372.271.000		451.271.000		451.271.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10	Kelompok	2	372.271.000	2	451.271.000	2	451.271.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				133.491.000		133.491.000		133.491.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10	Orang	60	133.491.000	60	133.491.000	60	133.491.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				182.505.000		261.505.000		261.505.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10	Kelompok	105	182.505.000	105	261.505.000	105	261.505.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				56.275.000		56.275.000		56.275.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 10	Unit	5	56.275.000	5	56.275.000	5	56.275.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0.2	146.149.000	0.2	225.149.000	0.2	225.149.000	CDK 11	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					146.149.000		225.149.000		225.149.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11	Kelompok	2	146.149.000	2	225.149.000	2	225.149.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				43.466.000		43.466.000		43.466.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11	Orang	60	43.466.000	60	43.466.000	60	43.466.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				38.488.000		117.488.000		117.488.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11	Kelompok	57	38.488.000	57	117.488.000	57	117.488.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				64.195.000		64.195.000		64.195.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 11	Unit	5	64.195.000	5	64.195.000	5	64.195.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0.2	379.732.000	0.2	458.732.000	0.2	458.732.000	CDK 2	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					379.732.000		458.732.000		458.732.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2	Kelompok	2	379.732.000	2	458.732.000	2	458.732.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				53.890.000		53.890.000		53.890.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 2	Orang	60	53.890.000	60	53.890.000	60	53.890.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				181.950.000		260.950.000		260.950.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2	Kelompok	101	181.950.000	101	260.950.000	101	260.950.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				143.892.000		143.892.000		143.892.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 2	Kelompok	5	143.892.000	5	143.892.000	5	143.892.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0.2	453.044.000	0.2	532.044.000	0.2	532.044.000	CDK 3	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					453.044.000		532.044.000		532.044.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3	Kelompok	2	453.044.000	2	532.044.000	2	532.044.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				51.398.000		51.398.000		51.398.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 3	Orang	60	51.398.000	60	51.398.000	60	51.398.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				231.723.000		310.723.000		310.723.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3	Kelompok	109	231.723.000	109	310.723.000	109	310.723.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				169.923.000		169.923.000		169.923.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3	Unit	5	169.923.000	5	169.923.000	5	169.923.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0.2	605.295.000	0.2	684.295.000	0.2	684.295.000	CDK 4	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					605.295.000		684.295.000		684.295.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4	Kelompok	2	605.295.000	2	684.295.000	2	684.295.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				116.445.000		116.445.000		116.445.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 4	Orang	60	116.445.000	60	116.445.000	60	116.445.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				298.970.000		377.970.000		377.970.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4	Kelompok	54	298.970.000	54	377.970.000	54	377.970.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				189.880.000		189.880.000		189.880.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 4	Unit	5	189.880.000	5	189.880.000	5	189.880.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0.3	540.231.000	0.3	619.231.000	0.3	610.231.000	CDK 5	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					540.231.000		619.231.000		610.231.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5	Kelompok	3	540.231.000	3	619.231.000	3	610.231.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				78.907.000		78.907.000		74.907.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 5	Orang	60	78.907.000	60	78.907.000	60	74.907.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				227.279.000		306.279.000		303.279.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5	Kelompok	75	227.279.000	75	306.279.000	75	303.279.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				234.045.000		234.045.000		232.045.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 5	Unit	5	234.045.000	5	234.045.000	5	232.045.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0.2	422.146.000	0.2	501.146.000	0.2	501.146.000	CDK 6	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					422.146.000		501.146.000		501.146.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6	Kelompok	2	422.146.000	2	501.146.000	2	501.146.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				53.496.000		53.496.000		53.496.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 6	Orang	60	53.496.000	60	53.496.000	60	53.496.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				198.040.000		277.040.000		277.040.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6	Kelompok	107	198.040.000	107	277.040.000	107	277.040.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				170.610.000		170.610.000		170.610.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 6	Unit	5	170.610.000	5	170.610.000	5	170.610.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0.3	537.804.000	0.3	616.804.000	0.3	601.108.000	CDK 7	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					537.804.000		616.804.000		601.108.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7	Kelompok	3	537.804.000	3	616.804.000	3	601.108.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				60.183.000		60.183.000		60.183.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 7	Orang	60	60.183.000	60	60.183.000	60	60.183.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				390.690.000		469.690.000		438.984.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7	Kelompok	121	390.690.000	121	469.690.000	121	438.984.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				86.931.000		86.931.000		101.941.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 7	Unit	5	86.931.000	5	86.931.000	5	101.941.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0.2	525.082.000	0.2	604.082.000	0.2	604.082.000	CDK 8	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					525.082.000		604.082.000		604.082.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8	Kelompok	2	525.082.000	2	604.082.000	2	604.082.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				73.557.000		73.557.000		73.557.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 8	Orang	60	73.557.000	60	73.557.000	60	73.557.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				384.655.000		463.655.000		463.655.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8	Kelompok	72	384.655.000	72	463.655.000	72	463.655.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				66.870.000		66.870.000		66.870.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 8	Unit	5	66.870.000	5	66.870.000	5	66.870.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0.2	325.199.000	0.2	404.199.000	0.2	404.199.000	CDK 9	
		3.28.05.1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					325.199.000		404.199.000		404.199.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9	Kelompok	2	325.199.000	2	404.199.000	2	404.199.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0001			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				103.649.000		103.649.000		103.649.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 9	Orang	60	103.649.000	60	103.649.000	60	103.649.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				184.616.000		263.616.000		263.616.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9	Kelompok	69	184.616.000	69	263.616.000	69	263.616.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.28.05.1.01.0003			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				36.934.000		36.934.000		36.934.000		
						Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 9	Unit	5	36.934.000	5	36.934.000	5	36.934.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						551.982.000		551.982.000		551.982.000		
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	551.982.000	10	551.982.000	10	551.982.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.06.1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					551.982.000		551.982.000		551.982.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	5	418.242.000	5	418.242.000	5	427.242.000		
		3.28.06.1.01.0002			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS				150.610.000		150.610.000		159.610.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	10	150.610.000	10	150.610.000	10	159.610.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				267.632.000		267.632.000		267.632.000		
						Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS	Kelompok	5	267.632.000	5	267.632.000	5	267.632.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS	Dokumen	2	133.740.000	2	133.740.000	2	124.740.000		
		3.28.06.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS				66.870.000		66.870.000		62.870.000		
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	1	66.870.000	1	66.870.000	1	62.870.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				66.870.000		66.870.000		61.870.000		
						Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Unit	8	66.870.000	8	66.870.000	8	61.870.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas udara									**8.127.188.000**		**8.127.188.000**		**7.736.228.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Udara	Angka	85.01		85.01		85.01		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran udara								**8.127.188.000**		**8.127.188.000**		**7.736.228.000**		
						Indeks SO2 dan NO2	Angka	0.3698	8.127.188.000	0.3698	0	0.3698	7.736.228.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						2.714.985.000		2.714.985.000		3.058.925.000		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2.85	1.197.361.000	2.85	1.197.361.000	2.85	1.603.361.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					1.197.361.000		1.197.361.000		1.603.361.000		
						Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak	tCO2e	20000	1.107.361.000	20000	1.107.361.000	20000	1.366.361.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1.107.361.000		1.107.361.000		1.366.361.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	126.439.000	1	126.439.000	1	89.494.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	Lokasi	100	980.922.000	100	980.922.000	100	1.276.867.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi	Unit	100	90.000.000	100	90.000.000	100	237.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				90.000.000		90.000.000		237.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara	Unit	135	90.000.000	135	90.000.000	135	237.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	784.554.000	100	784.554.000	100	722.494.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					784.554.000		784.554.000		722.494.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara	Dokumen	1	784.554.000	1	784.554.000	1	722.494.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				784.554.000		784.554.000		722.494.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas udara	sampel	1150	784.554.000	1150	784.554.000	900	722.494.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	733.070.000	100	733.070.000	100	733.070.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
		2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					733.070.000		733.070.000		733.070.000		
						Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	1	733.070.000	1	733.070.000	1	733.070.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.0015			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				733.070.000		733.070.000		733.070.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	72	356.070.000	72	356.070.000	72	356.070.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi	Unit	70	377.000.000	70	377.000.000	70	377.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1.538.667.000		1.538.667.000		1.538.667.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	2.02	798.752.000	2.02	798.752.000	2.02	798.752.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.04.1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					798.752.000		798.752.000		798.752.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	50	798.752.000	50	798.752.000	50	798.752.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.04.1.01.0001			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				94.153.000		94.153.000		112.800.000		
						Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun / ditetapkan / dievaluasi	Dokumen	1	94.153.000	1	94.153.000	1	112.800.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0004			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				554.483.000		554.483.000		615.836.000		
						Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	50	554.483.000	50	554.483.000	50	615.836.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.0006			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				150.116.000		150.116.000		70.116.000		
						Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati	Orang	60	150.116.000	60	150.116.000	60	70.116.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	2.6	739.915.000	2.6	739.915.000	2.6	739.915.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					739.915.000		739.915.000		739.915.000		
						Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Unit	2	739.915.000	2	739.915.000	2	739.915.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.0003			Pengelolaan Kebun Raya				739.915.000		739.915.000		739.915.000		
						Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	143.5	739.915.000	143.5	739.915.000	143.5	739.915.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						1.904.836.000		1.904.836.000		1.904.836.000		
						Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	31.43	664.471.000	31.43	664.471.000	31.43	664.471.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					664.471.000		664.471.000		664.471.000		
						Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah	Kabupaten/Kota	1	664.471.000	1	664.471.000	1	664.471.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				664.471.000		664.471.000		664.471.000		
						Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait pengurangan sampah	Kelompok	1	664.471.000	1	664.471.000	1	664.471.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
						Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	206.925.000	25	206.925.000	25	206.925.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
		2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					206.925.000		206.925.000		206.925.000		
						Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok)	Unit	2	206.925.000	2	206.925.000	2	206.925.000	SEKSI PENYULUHAN	
		2.11.08.1.01.0003			Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				206.925.000		206.925.000		206.925.000		
						Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Orang	400	206.925.000	400	206.925.000	400	206.925.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	10.5	1.033.440.000	10.5	1.033.440.000	10.5	1.033.440.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					1.033.440.000		1.033.440.000		1.033.440.000		
						Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya	Unit	158	1.033.440.000	158	1.033.440.000	103	1.033.440.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.0002			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				599.150.000		599.150.000		599.150.000		
						Jumlah sekolah peduli lingkungan	Unit	155	599.150.000	155	599.150.000	100	599.150.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				434.290.000		434.290.000		434.290.000		
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Unit	3	434.290.000	3	434.290.000	3	434.290.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.968.700.000		1.968.700.000		1.233.800.000		
						Persentase sampah yang tertangani	%	42	1.968.700.000	42	1.968.700.000	42	1.233.800.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.11.1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					1.968.700.000		1.968.700.000		1.233.800.000		
						Jumlah sampah tertangani	Ton	3388861	1.968.700.000	3388861	1.968.700.000	3388861	1.233.800.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.11.1.01.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional										
						Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	0		0		0		SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.11.11.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				1.968.700.000		1.968.700.000		1.233.800.000		

						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan	Dokumen	1	1.968.700.000	1	1.968.700.000	1	1.233.800.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**188.066.328.000**		**201.446.228.000**		**195.719.608.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Desa Mandiri									**4.750.000.000**		**5.614.225.000**		**5.614.225.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0.7318		0.7318		0.754		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah								**4.750.000.000**		**5.614.225.000**		**5.614.225.000**		
						Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah	%	6.16	4.750.000.000	6.16	6	6.16	5.614.225.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA												
						Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%	100		100		0		Bidang Penataan Desa	
		2.13.02.1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat											
						Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa	Desa	0		0		0		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.02.1.01.0003			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa										
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1		1		0		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						675.000.000		675.000.000		675.000.000		
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	6.85	675.000.000	6.85	675.000.000	27.4	675.000.000	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	
		2.13.03.1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					675.000.000		675.000.000		675.000.000		
						Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	Buah	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	
		2.13.03.1.01.0002			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi
						Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kws	1	475.000.000	1	475.000.000	2	475.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	
		2.13.03.1.01.0003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				475.000.000		475.000.000		475.000.000		
						jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	OPD Provinsi
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.625.000.000		1.753.170.000		1.753.170.000		
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	600.000.000	100	728.170.000	100	728.170.000	Bidang Penataan Desa	
		2.13.04.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					600.000.000		728.170.000		728.170.000		
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kabupaten/ Kota	35	220.000.000	35	348.170.000	35	348.170.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0007			Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa										
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dokumen	1		1		1		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.0008			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				220.000.000		348.170.000		348.170.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	220.000.000	1	348.170.000	1	348.170.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa	Desa	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.0016			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa yang termonitor dalam penyusunan produk hukum desa	Desa	0		0		0		SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa										
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1		1		1		SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi
						Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan	Dokumen	50	330.000.000	50	330.000.000	85	330.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				330.000.000		330.000.000		330.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	Dokumen	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
		2.13.04.1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					1.025.000.000		1.025.000.000		1.025.000.000		
						Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi	Dokumen	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0006			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				250.000.000		250.000.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah anggota BPD yang dilatih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Orang	0		0		0		SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0011			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD										
						Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas anggota BPD dalam manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	0		0		0		SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih dalam penguatan manajemen Pemerintahan Desa	Orang	29	25.000.000	29	25.000.000	29	25.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0002			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa	Orang	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	
		2.13.04.1.01.0005			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa	Kabupaten/Kota	29	500.000.000	29	500.000.000	29	500.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.0012			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa	Dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik	Desa	10	200.000.000	10	200.000.000	24	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	
		2.13.04.1.01.0018			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	OPD Provinsi
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.450.000.000		3.186.055.000		3.186.055.000		
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	8.96	525.000.000	8.96	525.000.000	12.27	525.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				525.000.000		525.000.000		525.000.000		
						Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya	Unit	270	525.000.000	270	525.000.000	360	525.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				525.000.000		525.000.000		525.000.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa	Dokumen	1	525.000.000	1	525.000.000	1	525.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	1.775.000.000	100	2.375.000.000	100	2.375.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.775.000.000		2.375.000.000		2.375.000.000		
						Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat	Orang	150	225.000.000	150	225.000.000	150	225.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				225.000.000		225.000.000		225.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Dokumen	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas	Orang	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		

					Hukum Adat										
						Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah Lembaga Adat/Satgas Pelestari Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	0		0		0		SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0001			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat										
						Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Dokumen	1		1		1		SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	35	1.500.000.000	35	2.100.000.000	35	2.100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.500.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	1.500.000.000	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%	100	150.000.000	100	286.055.000	100	286.055.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		286.055.000		286.055.000		
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah	Kali	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah	Unit	0	50.000.000	0	186.055.000	0	186.055.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				50.000.000		186.055.000		186.055.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Dokumen	1	50.000.000	1	186.055.000	1	186.055.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**18.535.714.000**		**18.198.079.000**		**18.691.199.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		70		70		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah								**18.105.714.000**		**17.768.079.000**		**18.261.199.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades	Angka	84.75	18.105.714.000	84.75	85	84.75	18.261.199.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.105.714.000		17.768.079.000		18.261.199.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.105.714.000	100	17.768.079.000	100	18.261.199.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.547.776.000		13.883.551.000		14.166.151.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	14.547.776.000	12	13.883.551.000	12	14.166.151.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.172.776.000		13.508.551.000		13.791.151.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	80	14.172.776.000	80	13.508.551.000	80	13.791.151.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				375.000.000		375.000.000		375.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen							SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PD	Bulan	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							45.240.000		45.240.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	0		0	45.240.000	0	45.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						45.240.000		45.240.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		78	45.240.000	78	45.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		0		78		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					745.438.000		745.438.000		745.438.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	745.438.000	100	745.438.000	100	745.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.438.000		10.438.000		10.438.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	10.438.000	12	10.438.000	12	10.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							281.350.000		259.480.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0	281.350.000	41	259.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						281.350.000		259.480.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0	281.350.000	41	259.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	4		4		4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.152.500.000		2.152.500.000		2.327.890.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.152.500.000	12	2.152.500.000	12	2.327.890.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12		12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				547.500.000		547.500.000		653.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	547.500.000	12	547.500.000	12	653.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.575.000.000		1.575.000.000		1.644.290.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.575.000.000	12	1.575.000.000	12	1.644.290.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					560.000.000		560.000.000		617.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	560.000.000	12	560.000.000	12	617.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				185.000.000		185.000.000		242.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	185.000.000	20	185.000.000	25	242.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10		10		10		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah								**430.000.000**		**430.000.000**		**430.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko Dispermades	Nilai	3	430.000.000	3	3	3	430.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						430.000.000		430.000.000		430.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					430.000.000		430.000.000		430.000.000		
						Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun	%	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000		130.000.000		130.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun	Dokumen	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									**700.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4		4		4		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan								**700.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**		
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah	%	76	700.000.000	76	76	89	700.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						240.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	97	240.000.000	97	240.000.000	98	240.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
		2.12.02.1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					240.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	%	98	240.000.000	98	240.000.000	98	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.02.1.01.0003			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				240.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi	Dokumen	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%	97	220.000.000	97	220.000.000	80	220.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
		2.12.03.1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil					220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran	%	97	220.000.000	97	220.000.000	98	220.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	
		2.12.03.1.01.0002			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	OPD Provinsi
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						240.000.000		240.000.000		240.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	16.67	240.000.000	16.67	240.000.000	16.67	240.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
		2.12.04.1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					240.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.04.1.03.0001			Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				240.000.000		240.000.000		240.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	Dokumen	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi
JUMLAH									**23.985.714.000**		**24.512.304.000**		**25.005.424.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**63.544.745.000**		**63.712.365.000**		**62.197.038.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78.28		78.28		78.28		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**63.198.145.000**		**63.365.765.000**		**61.850.438.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80.25	63.198.145.000	80.25	80	80.25	61.850.438.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						63.198.145.000		63.365.765.000		61.850.438.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	%	100	200.200.000	100	200.200.000	100	237.600.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		140.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	100	105.000.000	100	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.500.000		44.500.000		44.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	44.500.000	1	44.500.000	1	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000		17.000.000		52.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	17.000.000	1	17.000.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.200.000		43.200.000		45.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	43.200.000	12	43.200.000	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.200.000		43.200.000		45.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	43.200.000	12	43.200.000	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	45.000.000	21	45.000.000	21	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	%	100	112.112.000	100	112.112.000	100	114.112.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.112.000		62.112.000		64.112.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	62.112.000	100	62.112.000	100	64.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000		35.500.000		35.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.500.000	1	35.500.000	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.612.000		5.612.000		7.612.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.612.000	1	5.612.000	1	7.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	2	36.000.000	2	36.000.000	2	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	%	100	138.840.000	100	138.840.000	100	147.960.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.840.000		72.840.000		81.960.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	72.840.000	100	72.840.000	100	81.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		37.500.000		37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	1	37.500.000	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.840.000		9.840.000		18.960.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	9.840.000	1	9.840.000	1	18.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	20.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		39.000.000		39.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	39.000.000	11	39.000.000	11	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	%	100	148.200.000	100	148.200.000	100	155.176.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.200.000		77.200.000		84.176.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.200.000	100	77.200.000	100	84.176.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		37.500.000		37.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	1	37.500.000	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.200.000		14.200.000		21.176.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.200.000	1	14.200.000	1	21.176.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		39.000.000		39.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8	39.000.000	8	39.000.000	8	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	4.000.000	7	4.000.000	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	%	100	161.900.000	100	161.900.000	100	161.900.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.500.000		88.500.000		88.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	88.500.000	100	88.500.000	100	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		38.500.000		38.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.400.000		26.400.000		26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	26.400.000	24	26.400.000	24	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		26.400.000		26.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	26.400.000	12	26.400.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	16	40.000.000	16	40.000.000	16	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	%	100	134.000.000	100	134.000.000	100	161.725.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.000.000		74.000.000		98.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.000.000	100	74.000.000	100	98.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.500.000		36.500.000		56.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	36.500.000	1	36.500.000	1	56.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		14.000.000		18.650.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	14.000.000	1	14.000.000	1	18.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.000.000		15.000.000		18.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	15.000.000	24	15.000.000	24	18.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000		10.000.000		13.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	13.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.000.000		38.000.000		38.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	38.000.000	9	38.000.000	9	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	306.000.000	100	306.000.000	100	304.630.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.500.000		41.500.000		41.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.500.000	100	41.500.000	100	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.500.000		252.500.000		251.130.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	252.500.000	7	252.500.000	7	251.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		200.000.000		198.630.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	198.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	%	100	61.996.893.000	100	62.164.513.000	100	60.567.335.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					46.370.662.000		46.370.662.000		45.032.514.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	46.370.662.000	2	46.370.662.000	2	45.032.514.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				45.580.462.000		45.580.462.000		44.287.314.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	300	45.580.462.000	300	45.580.462.000	300	44.287.314.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				720.200.000		720.200.000		675.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	720.200.000	12	720.200.000	12	675.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.155.000.000		1.155.000.000		1.020.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.020.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.155.000.000		1.155.000.000		1.020.400.000		
						Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	1.155.000.000	1	1.155.000.000	1	1.020.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					125.000.000		292.620.000		262.170.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	125.000.000	100	292.620.000	100	262.170.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						167.620.000		167.620.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		1	167.620.000	1	167.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				105.000.000		105.000.000		74.550.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	150	105.000.000	150	105.000.000	150	74.550.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.145.900.000		2.145.900.000		2.113.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.145.900.000	100	2.145.900.000	100	2.113.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				112.500.000		112.500.000		80.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	112.500.000	1	112.500.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.590.400.000		1.590.400.000		1.590.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.590.400.000	12	1.590.400.000	12	1.590.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									220.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8		8		16	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								220.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		16	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.062.931.000		11.062.931.000		10.443.651.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	11.062.931.000	36	11.062.931.000	36	10.443.651.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.589.225.000		1.589.225.000		1.539.225.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.589.225.000	12	1.589.225.000	12	1.539.225.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.469.706.000		9.469.706.000		8.900.426.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	9.469.706.000	12	9.469.706.000	12	8.900.426.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.137.400.000		1.137.400.000		1.475.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	283	1.137.400.000	283	1.137.400.000	285	1.475.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				687.400.000		687.400.000		675.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	73	687.400.000	73	687.400.000	73	675.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		500.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	3	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	92	100.000.000	92	100.000.000	92	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	93	150.000.000	93	150.000.000	93	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**346.600.000**		**346.600.000**		**346.600.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.2	346.600.000	3.2	3	3.2	346.600.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						346.600.000		346.600.000		346.600.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	346.600.000	100	346.600.000	100	346.600.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					346.600.000		346.600.000		346.600.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	346.600.000	100	346.600.000	100	346.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				261.600.000		261.600.000		261.600.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	261.600.000	9	261.600.000	9	261.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi									**129.119.076.000**		**129.119.076.000**		**130.799.669.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6.053		6.053		6.053		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah								**6.574.474.000**		**6.574.474.000**		**7.344.294.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16.098	6.574.474.000	16.098	16	16.098	7.344.294.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						5.267.608.000		5.267.608.000		6.035.428.000		
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.81	404.650.000	0.81	404.650.000	0.81	404.650.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					404.650.000		404.650.000		404.650.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	21596	404.650.000	21596	404.650.000	21596	404.650.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				363.800.000		363.800.000		363.800.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	363.800.000	36	363.800.000	36	363.800.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				40.850.000		40.850.000		40.850.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	40.850.000	2	40.850.000	2	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.81	115.950.000	0.81	115.950.000	0.81	115.950.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					115.950.000		115.950.000		115.950.000		
						Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Unit	989	115.950.000	989	115.950.000	989	115.950.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				95.950.000		95.950.000		95.950.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	95.950.000	36	95.950.000	36	95.950.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.81	210.625.000	0.81	210.625.000	0.81	210.625.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					210.625.000		210.625.000		210.625.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2229	210.625.000	2229	210.625.000	2229	210.625.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				185.625.000		185.625.000		185.625.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	185.625.000	36	185.625.000	36	185.625.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.81	197.800.000	0.81	197.800.000	0.81	197.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					197.800.000		197.800.000		197.800.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	6734	197.800.000	6734	197.800.000	6734	197.800.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				167.800.000		167.800.000		167.800.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	167.800.000	36	167.800.000	36	167.800.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.81	251.990.000	0.81	251.990.000	0.81	251.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					251.990.000		251.990.000		251.990.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3485	251.990.000	3485	251.990.000	3485	251.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				221.990.000		221.990.000		221.990.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	221.990.000	36	221.990.000	36	221.990.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.81	195.500.000	0.81	195.500.000	0.81	195.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					195.500.000		195.500.000		195.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Unit	3998	195.500.000	3998	195.500.000	3998	195.500.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				165.500.000		165.500.000		165.500.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	165.500.000	36	165.500.000	36	165.500.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.98	433.440.000	0.98	433.440.000	0.98	431.440.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					433.440.000		433.440.000		431.440.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.22	433.440.000	0.22	433.440.000	0.22	431.440.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				198.480.000		198.480.000		198.480.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	198.480.000	78	198.480.000	78	198.480.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				234.960.000		234.960.000		232.960.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	2	234.960.000	2	234.960.000	2	232.960.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.97	330.300.000	0.97	330.300.000	0.97	551.100.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					330.300.000		330.300.000		551.100.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.13	330.300.000	0.13	330.300.000	0.13	551.100.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				121.680.000		121.680.000		121.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	46	121.680.000	46	121.680.000	46	121.680.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				208.620.000		208.620.000		429.420.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	2	208.620.000	2	208.620.000	3	429.420.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.97	332.253.000	0.97	332.253.000	0.97	330.753.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					332.253.000		332.253.000		330.753.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.06	332.253.000	0.06	332.253.000	0.06	330.753.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				145.680.000		145.680.000		145.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				186.573.000		186.573.000		185.073.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	186.573.000	1	186.573.000	1	185.073.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.97	466.840.000	0.97	466.840.000	0.97	630.075.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					466.840.000		466.840.000		630.075.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.07	466.840.000	0.07	466.840.000	0.07	630.075.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				145.680.000		145.680.000		145.680.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	145.680.000	56	145.680.000	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				321.160.000		321.160.000		484.395.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	321.160.000	1	321.160.000	3	484.395.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.97	399.040.000	0.97	399.040.000	0.97	537.040.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					399.040.000		399.040.000		537.040.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.2	399.040.000	0.2	399.040.000	0.2	537.040.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				136.080.000		136.080.000		136.080.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	52	136.080.000	52	136.080.000	52	136.080.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				262.960.000		262.960.000		400.960.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	5	262.960.000	5	262.960.000	5	400.960.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.98	335.700.000	0.98	335.700.000	0.98	603.685.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					335.700.000		335.700.000		603.685.000		
						Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.25	335.700.000	0.25	335.700.000	0.25	603.685.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				150.480.000		150.480.000		150.480.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	58	150.480.000	58	150.480.000	58	150.480.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				185.220.000		185.220.000		453.205.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1	185.220.000	1	185.220.000	2	453.205.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0.981	235.000.000	0.981	235.000.000	0.981	235.000.000	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					235.000.000		235.000.000		235.000.000		
						Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	438363	235.000.000	438363	235.000.000	438363	235.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.0004			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	135	200.000.000	135	200.000.000	135	200.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	66	35.000.000	66	35.000.000	66	35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0.38	1.358.520.000	0.38	1.358.520.000	0.38	1.339.820.000	Bidang Lalu Lintas	
		2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.167.200.000		1.167.200.000		1.148.500.000		
						Rasio perlengkapan jalan terpasang	Angka	0.63	1.167.200.000	0.63	1.167.200.000	0.63	1.148.500.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				1.167.200.000		1.167.200.000		1.148.500.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	154	1.167.200.000	154	1.167.200.000	154	1.148.500.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					116.320.000		116.320.000		116.320.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten/Kota	15	46.320.000	15	46.320.000	15	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.05.0003			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				46.320.000		46.320.000		46.320.000		
						Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	30	46.320.000	30	46.320.000	30	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokumen	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	70.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi	Dokumen	329	75.000.000	329	75.000.000	329	75.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.02.1.06.0006			Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	58	75.000.000	58	75.000.000	58	75.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0.2	40.000.000	0.2	40.000.000	0.2	40.000.000	Bidang Pelayaran	
		2.15.03.1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	Angka	0.11	40.000.000	0.11	40.000.000	0.11	40.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.0009			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi	Unit	28	40.000.000	28	40.000.000	28	40.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.266.866.000		1.266.866.000		1.268.866.000		
						Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0.04	1.266.866.000	0.04	1.266.866.000	0.04	1.268.866.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		2.15.05.1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.266.866.000		1.266.866.000		1.268.866.000		
						Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Angka	0.341	1.266.866.000	0.341	1.266.866.000	0.341	1.268.866.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian										
						Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	0		0		0		SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi
		2.15.05.1.01.0003			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.266.866.000		1.266.866.000		1.268.866.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	3	1.266.866.000	3	1.266.866.000	3	1.268.866.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya konektivitas provinsi								**7.039.578.000**		**7.039.578.000**		**7.831.746.000**		
						Rasio konektivitas provinsi	Angka	0.38	7.039.578.000	0.38	0	0.38	7.831.746.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						6.620.478.000		6.620.478.000		7.412.646.000		
						Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0.5	80.000.000	0.5	80.000.000	0.5	80.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		2.15.02.1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ	Angka	0.47	80.000.000	0.47	80.000.000	0.47	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	
		2.15.02.1.01.0007			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.2	160.000.000	0.2	160.000.000	0.2	570.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					160.000.000		160.000.000		570.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0.25	160.000.000	0.25	160.000.000	0.29	570.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				160.000.000		160.000.000		570.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	160.000.000	1	160.000.000	3	570.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.01	50.000.000	0.01	50.000.000	0.01	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0.25	50.000.000	0.25	50.000.000	0.25	50.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.24	100.000.000	0.24	100.000.000	0.24	508.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					100.000.000		100.000.000		508.400.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0.25	100.000.000	0.25	100.000.000	0.36	508.400.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				100.000.000		100.000.000		508.400.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	2	508.400.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.23	50.000.000	0.23	50.000.000	0.23	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0.25	50.000.000	0.25	50.000.000	0.25	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.21	160.000.000	0.21	160.000.000	0.21	160.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0.25	160.000.000	0.25	160.000.000	0.25	160.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.17	50.000.000	0.17	50.000.000	0.17	50.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0.25	50.000.000	0.25	50.000.000	0.25	50.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0.481	874.690.000	0.481	874.690.000	0.481	871.560.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
		2.15.02.1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					874.690.000		874.690.000		871.560.000		
						Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Angka	0.61	874.690.000	0.61	874.690.000	0.61	871.560.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				874.690.000		874.690.000		871.560.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6	874.690.000	6	874.690.000	6	871.560.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Rasio pemanfatan terminal	Angka	0.218	4.605.000.000	0.218	4.605.000.000	0.218	4.581.898.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					4.605.000.000		4.605.000.000		4.581.898.000		
						Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik	Angka	0.37	4.605.000.000	0.37	4.605.000.000	0.37	4.581.898.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.03.0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				105.000.000		105.000.000		175.000.000		
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	105.000.000	1	105.000.000	2	175.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		2.15.02.1.03.0007			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.000.000.000		1.000.000.000		991.398.000		
						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	991.398.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		2.15.02.1.03.0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				3.500.000.000		3.500.000.000		3.415.500.000		
						Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.415.500.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi; PURWOREJO --> KUTOARJO --> KELURAHAN KUTOARJO
						Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0.51	490.788.000	0.51	490.788.000	0.51	490.788.000	Bidang Angkutan Jalan	
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Rasio angkutan barang yang berijin	Angka	0.3	40.000.000	0.3	40.000.000	0.3	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi D	Unit	216	40.000.000	216	40.000.000	216	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					160.788.000		160.788.000		160.788.000		
						Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Angka	0.71	160.788.000	0.71	160.788.000	0.71	160.788.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.09.0001			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				90.500.000		90.500.000		90.500.000		
						Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	1	90.500.000	1	90.500.000	1	90.500.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.09.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				70.288.000		70.288.000		70.288.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	7	70.288.000	7	70.288.000	7	70.288.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.02.1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					115.000.000		115.000.000		115.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Angka	0.04	115.000.000	0.04	115.000.000	0.04	115.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.11.0001			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi D	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		2.15.02.1.11.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Angka	0.55	100.000.000	0.55	100.000.000	0.55	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.13.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Rasio angkutan taksi terpenuhi	Angka	0.43	35.000.000	0.43	35.000.000	0.43	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.14.0004			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	76	35.000.000	76	35.000.000	76	35.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.02.1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif	Angka	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.15.0003			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						419.100.000		419.100.000		419.100.000		
						Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0.31	419.100.000	0.31	419.100.000	0.31	419.100.000	Bidang Pelayaran	
		2.15.03.1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya	Angka	0.2	60.000.000	0.2	60.000.000	0.2	60.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.03.1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Angka	0.12	70.000.000	0.12	70.000.000	0.12	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.15.03.1.06.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO :	Dokumen	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.03.1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					79.100.000		79.100.000		79.100.000		
						Berth occupancy ratio	Angka	0.44	79.100.000	0.44	79.100.000	0.44	79.100.000	SEKSI KEPELABUHANAN	
		2.15.03.1.09.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				79.100.000		79.100.000		79.100.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan	Unit	8	79.100.000	8	79.100.000	8	79.100.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.15.03.1.09.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional										
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	0		0		0		SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi
		2.15.03.1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					210.000.000		210.000.000		210.000.000		
						Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Angka	0.48	210.000.000	0.48	210.000.000	0.48	210.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				210.000.000		210.000.000		210.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.03.1.10.0002			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	0		0		0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi
		2.15.03.1.10.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaanara	Unit	0		0		0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum								**115.505.024.000**		**115.505.024.000**		**115.623.629.000**		
						On Time Performance layanan transportasi	%	83.22	115.505.024.000	83.22	83	83.22	115.623.629.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						115.505.024.000		115.505.024.000		115.623.629.000		
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	65.38	924.955.000	65.38	924.955.000	65.38	934.955.000	Bidang Angkutan Jalan	
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					924.955.000		924.955.000		934.955.000		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	27014404	924.955.000	27014404	924.955.000	27014404	934.955.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				924.955.000		924.955.000		934.955.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	924.955.000	3	924.955.000	3	934.955.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	51.72	114.580.069.000	51.72	114.580.069.000	51.72	114.688.674.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah					114.580.069.000		114.580.069.000		114.688.674.000		

				Provinsi											
						Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	6810676	114.580.069.000	6810676	114.580.069.000	6810676	114.688.674.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				114.580.069.000		114.580.069.000		114.688.674.000		
						Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	115	114.580.069.000	115	114.580.069.000	115	114.688.674.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**192.663.821.000**		**192.831.441.000**		**192.996.707.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan									**41.223.881.000**		**41.223.881.000**		**43.227.381.000**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3.07		3.07		4.27		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah								**2.000.000.000**		**2.000.000.000**		**2.100.000.000**		
						Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	636	2.000.000.000	636	636	639	2.100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						2.000.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		
						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	25	2.000.000.000	25	2.000.000.000	40	2.100.000.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
		2.21.02.1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					1.040.000.000		1.040.000.000		1.140.000.000		
						Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	%	20	1.040.000.000	20	1.040.000.000	40	1.140.000.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.0001			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				221.200.000		221.200.000		321.200.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	221.200.000	1	221.200.000	2	321.200.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.0002			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				283.500.000		283.500.000		283.500.000		
						Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	283.500.000	100	283.500.000	170	283.500.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.0003			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				169.900.000		169.900.000		169.900.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Laporan	20	169.900.000	20	169.900.000	20	169.900.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.01.0004			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				365.400.000		365.400.000		365.400.000		
						80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	20	365.400.000	20	365.400.000	40	365.400.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi
		2.21.02.1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					960.000.000		960.000.000		960.000.000		
						Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi	%	25	960.000.000	25	960.000.000	25	960.000.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
		2.21.02.1.02.0001			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				960.000.000		960.000.000		960.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi	%	30	960.000.000	30	960.000.000	30	960.000.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	OPD Provinsi
	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah								**37.966.552.000**		**37.966.552.000**		**39.870.052.000**		
						Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	3.62	9.252.779.000	3.62	4	3.62	9.312.779.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						9.252.779.000		9.252.779.000		9.312.779.000		
						Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	72	9.252.779.000	72	9.252.779.000	72	9.312.779.000	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		2.16.03.1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					5.490.000.000		5.490.000.000		5.515.000.000		
						Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif	Angka	1	5.490.000.000	1	5.490.000.000	1	5.515.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.0001			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Buah	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.01.0002			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				75.000.000		75.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.01.0003			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				5.400.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000		
						Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps)	Angka	10000	5.400.000.000	10000	5.400.000.000	10000	5.400.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					3.762.779.000		3.762.779.000		3.797.779.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data	OPD	41	3.273.279.000	41	3.273.279.000	41	3.220.279.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.0003			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				3.273.279.000		3.273.279.000		3.220.279.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	Buah	24	3.273.279.000	24	3.273.279.000	24	3.220.279.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.02.0008			Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah										
						Jumlah VPS atau Cloud Server yang terintegrasi dengan Pusat Data	Buah	135		135		135		SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK	Dokumen	1	489.500.000	1	489.500.000	1	577.500.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03.1.02.0006			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				289.500.000		289.500.000		377.500.000		
						Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan	Dokumen	1	289.500.000	1	289.500.000	1	377.500.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.16.03.1.02.0010			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK	Orang	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2.8	4.190.000.000	2.8	3	2.8	4.190.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						4.190.000.000		4.190.000.000		4.190.000.000		
						Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	15	4.190.000.000	15	4.190.000.000	15	4.190.000.000	Bidang E-Government	
		2.16.03.1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					4.190.000.000		4.190.000.000		4.190.000.000		
						Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola	%	24	3.190.000.000	24	3.190.000.000	24	3.264.621.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
		2.16.03.1.02.0007			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				3.190.000.000		3.190.000.000		3.264.621.000		
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola	Angka	10	3.190.000.000	10	3.190.000.000	10	3.264.621.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
						Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan	%	30	700.000.000	30	700.000.000	30	625.379.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.0001			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				700.000.000		700.000.000		625.379.000		
						Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan	Angka	5	700.000.000	5	700.000.000	5	625.379.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
						Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi	%	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.0009			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas	Angka	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
						Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	%	100	24.523.773.000	100	100	100	26.367.273.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						24.523.773.000		24.523.773.000		26.367.273.000		
						Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	31	2.383.000.000	31	2.383.000.000	31	2.529.000.000	Bidang Statistik	
		2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					2.383.000.000		2.383.000.000		2.529.000.000		
						Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	%	76	2.383.000.000	76	2.383.000.000	76	2.529.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0006			Pelayanan Informasi Publik				583.000.000		583.000.000		729.000.000		
						Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik	Dokumen	82	583.000.000	82	583.000.000	82	729.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.16.02.1.01.0011			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		
						Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	%	86	1.800.000.000	86	1.800.000.000	86	1.800.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	78	22.140.773.000	78	22.140.773.000	78	23.838.273.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
		2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					22.140.773.000		22.140.773.000		23.838.273.000		
						Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	60	6.100.000.000	60	6.100.000.000	60	6.100.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0010			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Kelompok	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0012			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				5.750.000.000		5.750.000.000		5.750.000.000		
						Jumlah komunitas yang dikoordinasikan	Kelompok	40	5.750.000.000	40	5.750.000.000	40	5.750.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	170	10.120.000.000	170	10.120.000.000	170	11.715.000.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0004			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2.015.500.000		2.015.500.000		1.888.039.000		
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	25	2.015.500.000	25	2.015.500.000	25	1.888.039.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0005			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4.696.600.000		4.696.600.000		5.810.920.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	Konten	65	4.696.600.000	65	4.696.600.000	65	5.810.920.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0007			Layanan Hubungan Media				823.910.000		823.910.000		868.230.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	Konten	40	823.910.000	40	823.910.000	40	868.230.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0008			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2.583.990.000		2.583.990.000		3.147.811.000		
						Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	Konten	40	2.583.990.000	40	2.583.990.000	40	3.147.811.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Dokumen	173	5.920.773.000	173	5.920.773.000	173	6.023.273.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0002			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				751.327.000		751.327.000		751.327.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum	Dokumen	80	751.327.000	80	751.327.000	80	751.327.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0003			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1.283.816.000		1.283.816.000		1.283.816.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	Dokumen	90	1.283.816.000	90	1.283.816.000	90	1.283.816.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.0009			Manajemen Komunikasi Krisis				3.885.630.000		3.885.630.000		3.988.130.000		
						Jumlah rekomendasi analisis agenda publik	Dokumen	3	3.885.630.000	3	3.885.630.000	3	3.988.130.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial								**1.257.329.000**		**1.257.329.000**		**1.257.329.000**		
						Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	32	1.257.329.000	32	32	32	1.257.329.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						1.257.329.000		1.257.329.000		1.257.329.000		
						Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	24	1.257.329.000	24	1.257.329.000	24	1.257.329.000	Bidang Statistik	
		2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					1.257.329.000		1.257.329.000		1.257.329.000		
						Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi	%	30	502.000.000	30	502.000.000	30	502.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01.0002			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				502.000.000		502.000.000		502.000.000		
						Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	190	502.000.000	190	502.000.000	190	502.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi
		2.20.02.1.01.000			Pengembangan Infrastruktur										
						Jumlah Infrastruktur Statistikyang Disediakan/Dikembangkan	Angka	0		0		0		SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	%	24	755.329.000	24	755.329.000	24	755.329.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				197.500.000		197.500.000		197.500.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data	Angka	50	197.500.000	50	197.500.000	50	197.500.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0003			Membangun Metadata Statistik Sektoral				253.000.000		253.000.000		253.000.000		
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun	Angka	40	253.000.000	40	253.000.000	40	253.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.20.02.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral										
						Jumlah PD yang terlibat dalam pengukuran pembangunanstatistik (IPS)	OPD	0		0		0		SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi
		2.20.02.1.01.0006			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				304.829.000		304.829.000		304.829.000		
						Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial	Angka	4	304.829.000	4	304.829.000	4	304.829.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**27.186.611.000**		**27.250.991.000**		**26.942.178.000**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	68		68		68.0004		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**26.536.611.000**		**26.600.991.000**		**26.292.178.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78	26.536.611.000	78	78	78	26.292.178.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						26.536.611.000		26.600.991.000		26.292.178.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	26.536.611.000	100	26.600.991.000	100	26.292.178.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.486.611.000		20.486.611.000		19.823.798.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	20.486.611.000	1	20.486.611.000	1	19.823.798.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.004.611.000		20.004.611.000		19.341.798.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	115	20.004.611.000	115	20.004.611.000	115	19.341.798.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				362.000.000		362.000.000		362.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	362.000.000	12	362.000.000	12	362.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	Dokumen	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	18	40.000.000	18	40.000.000	18	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					215.000.000		215.000.000		215.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	215.000.000	3	215.000.000	3	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				185.000.000		185.000.000		185.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					110.000.000		174.380.000		211.230.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	110.000.000	100	174.380.000	100	211.230.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						64.380.000		64.380.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		0	64.380.000	0	64.380.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000		20.000.000		56.850.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	4	56.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					891.200.000		891.200.000		1.003.950.000		
						Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	891.200.000	100	891.200.000	100	1.003.950.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		80.000.000		121.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	80.000.000	4	80.000.000	1	121.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	452	40.000.000	452	40.000.000	452	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	40.000.000	2	40.000.000	3	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.830.000		4.830.000		4.830.000		
						jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	20	4.830.000	20	4.830.000	20	4.830.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.500.000		99.500.000		118.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	75	99.500.000	75	99.500.000	75	118.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				511.870.000		511.870.000		564.870.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	100	511.870.000	100	511.870.000	110	564.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.930.800.000		3.930.800.000		4.005.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	Laporan	4	3.930.800.000	4	3.930.800.000	4	4.005.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.261.000.000		1.261.000.000		1.361.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.261.000.000	1	1.261.000.000	1	1.361.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.800.000		19.800.000		19.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.640.000.000		2.640.000.000		2.614.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	5	2.640.000.000	5	2.640.000.000	5	2.614.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					873.000.000		873.000.000		1.003.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran	Unit	239	873.000.000	239	873.000.000	239	1.003.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				320.000.000		320.000.000		420.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	320.000.000	20	320.000.000	21.9999	420.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				410.000.000		410.000.000		410.000.000		
						umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	410.000.000	2	410.000.000	3	410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		130.000.000		160.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	130.000.000	2	130.000.000	2	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**650.000.000**		**650.000.000**		**650.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	650.000.000	3	3	3	650.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						650.000.000		650.000.000		650.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	3	650.000.000	3	650.000.000	3	650.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					650.000.000		650.000.000		650.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				450.000.000		450.000.000		450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**68.410.492.000**		**68.474.872.000**		**70.169.559.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB									**33.396.589.000**		**33.396.589.000**		**33.375.133.000**	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12.53		12.53		12.53		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Koperasi Sehat Jawa Tengah								**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**2.491.600.000**		
						Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0.29	2.500.000.000	0.29	0	0.29	2.491.600.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						2.500.000.000		2.500.000.000		2.491.600.000		
						Persentase koperasi berkualitas	%	25.02	2.500.000.000	25.02	2.500.000.000	25.02	2.491.600.000	Bidang Pengawasan	
		2.17.03.1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.350.000.000		1.350.000.000		1.341.600.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.341.600.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.01.0003			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				1.350.000.000		1.350.000.000		1.341.600.000		
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit	140	1.350.000.000	140	1.350.000.000	140	1.341.600.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.03.1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		
						Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa	%	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	
		2.17.03.1.02.0002			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		
						Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit	400	1.150.000.000	400	1.150.000.000	400	1.150.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah								**30.896.589.000**		**30.896.589.000**		**30.883.533.000**		
						Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7.16	30.896.589.000	7.16	7	7.16	30.883.533.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						6.513.853.000		6.698.293.000		6.698.293.000		
						Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	10	6.513.853.000	10	6.698.293.000	10	6.698.293.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
		2.17.05.1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					6.513.853.000		6.698.293.000		6.698.293.000		
						Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	%	89	6.513.853.000	89	6.698.293.000	89	6.698.293.000	SEKSI PENYELENGGARA	
		2.17.05.1.01.0001			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				6.513.853.000		6.698.293.000		6.698.293.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	1350	6.513.853.000	1675	6.698.293.000	1700	6.698.293.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						8.901.787.000		8.717.347.000		8.704.291.000		
						Persentase koperasi provinsi produktif	%	48.09	8.901.787.000	48.09	8.717.347.000	48.09	8.704.291.000	Bidang Kelembagaan	
		2.17.06.1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					8.901.787.000		8.717.347.000		8.704.291.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya	%	36	2.166.901.000	36	2.166.901.000	36	2.166.901.000	SEKSI TATALAKSANA	
		2.17.06.1.01.0002			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				1.933.550.000		1.933.550.000		1.988.985.000		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit	249	1.933.550.000	249	1.933.550.000	269	1.988.985.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.06.1.01.0006			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				233.351.000		233.351.000		177.916.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit	10	233.351.000	10	233.351.000	10	177.916.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.06.1.01.0008			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit							SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya	%	26.5	6.734.886.000	26.5	6.550.446.000	26.5	6.537.390.000	SEKSI ORGANISASI	
		2.17.06.1.01.0004			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				494.405.000		494.405.000		494.405.000		
						Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok	10	494.405.000	10	494.405.000	10	494.405.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.06.1.01.0007			Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				444.788.000		444.788.000		531.548.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit	100	444.788.000	100	444.788.000	100	531.548.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.06.1.01.0009			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				5.795.693.000		5.611.253.000		5.511.437.000		
						Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit	150	5.795.693.000	150	5.611.253.000	150	5.511.437.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						9.072.340.000		9.072.340.000		9.072.340.000		
						Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	23	1.350.000.000	23	1.350.000.000	23	1.350.000.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		
						Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya	%	95.41	1.350.000.000	95.41	1.350.000.000	95.41	1.350.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
		2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	1050	1.350.000.000	1050	1.350.000.000	1050	1.350.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase usaha mikro mandiri	%	81.2	7.722.340.000	81.2	7.722.340.000	81.2	7.722.340.000	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
		2.17.07.1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					7.722.340.000		7.722.340.000		7.722.340.000		
						Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya	%	93.22	6.060.520.000	93.22	6.060.520.000	93.22	6.060.520.000		
		2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				1.058.940.000		1.058.940.000		1.113.340.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit	240	1.058.940.000	240	1.058.940.000	330	1.113.340.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		2.17.07.1.01.0010			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				149.791.000		149.791.000		149.791.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit	30	149.791.000	30	149.791.000	30	149.791.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.07.1.01.0011			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				3.252.295.000		3.252.295.000		3.252.295.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit	500	3.252.295.000	500	3.252.295.000	500	3.252.295.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.17.07.1.01.0012			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil				1.599.494.000		1.599.494.000		1.545.094.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	730	1.599.494.000	730	1.599.494.000	1875	1.545.094.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya	%	93.81	1.661.820.000	93.81	1.661.820.000	93.81	1.661.820.000		
		2.17.07.1.01.0007			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				1.661.820.000		1.661.820.000		1.661.820.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	660	1.661.820.000	660	1.661.820.000	660	1.661.820.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						6.408.609.000		6.408.609.000		6.408.609.000		
						Persentase UMKM siap bermitra	%	21.06	6.408.609.000	21.06	6.408.609.000	21.06	6.408.609.000	Bidang Bina Usaha	
		2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					543.760.000		543.760.000		604.273.000		
						Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya	%		543.760.000		543.760.000		604.273.000		
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				543.760.000		543.760.000		604.273.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	Orang	70	543.760.000	70	543.760.000	70	604.273.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya	%	25	5.864.849.000	25	5.864.849.000	25	5.804.336.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				3.068.704.000		3.068.704.000		3.008.191.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi	Unit	385	3.068.704.000	385	3.068.704.000	385	3.008.191.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				234.859.000		234.859.000		234.859.000		
						Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	200	234.859.000	200	234.859.000	200	234.859.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0003			Pengembangan Usaha Kecil				2.561.286.000		2.561.286.000		2.561.286.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	150	2.561.286.000	150	2.561.286.000	150	2.561.286.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					5.864.849.000		5.864.849.000		5.804.336.000		
						Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya	%		543.760.000		543.760.000		604.273.000		
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				543.760.000		543.760.000		604.273.000		
						Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	Orang	70	543.760.000	70	543.760.000	70	604.273.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya	%	25	5.864.849.000	25	5.864.849.000	25	5.804.336.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.17.08.1.01.0001			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				3.068.704.000		3.068.704.000		3.008.191.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi	Unit	385	3.068.704.000	385	3.068.704.000	385	3.008.191.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				234.859.000		234.859.000		234.859.000		
						Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	200	234.859.000	200	234.859.000	200	234.859.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.0003			Pengembangan Usaha Kecil				2.561.286.000		2.561.286.000		2.561.286.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit	150	2.561.286.000	150	2.561.286.000	150	2.561.286.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**29.442.181.000**		**29.493.221.000**		**29.059.318.000**	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83		83		83		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**28.442.181.000**		**28.493.221.000**		**28.065.318.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89	28.442.181.000	89	89	89	28.065.318.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						28.442.181.000		28.493.221.000		28.065.318.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	23.864.901.000	100	23.915.941.000	100	23.375.038.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.154.447.000		17.154.447.000		16.633.544.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	38	17.154.447.000	38	17.154.447.000	38	16.633.544.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.289.447.000		16.289.447.000		15.768.544.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	7	16.289.447.000	7	16.289.447.000	7	15.768.544.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				495.000.000		495.000.000		495.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	495.000.000	12	495.000.000	12	495.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				155.000.000		155.000.000		155.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	155.000.000	12	155.000.000	12	155.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					110.000.000		110.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000	12	110.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		110.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000	12	110.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12		12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					158.070.000		209.110.000		189.110.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	158.070.000	100	209.110.000	100	189.110.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						51.040.000		51.040.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			88	51.040.000	88	51.040.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		35.000.000		15.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	35.000.000	50	35.000.000	50	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				73.070.000		73.070.000		73.070.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Paket	3	73.070.000	3	73.070.000	3	73.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.496.240.000		2.496.240.000		2.496.240.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.496.240.000	100	2.496.240.000	100	2.496.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				82.000.000		82.000.000		82.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	82.000.000	4	82.000.000	4	82.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				230.000.000		230.000.000		230.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				54.000.000		54.000.000		54.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.708.240.000		1.708.240.000		1.708.240.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.708.240.000	12	1.708.240.000	12	1.708.240.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					435.000.000		435.000.000		631.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	39	435.000.000	39	435.000.000	39	631.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				341.000.000		341.000.000		448.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	30	341.000.000	30	341.000.000	36	448.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				69.000.000		69.000.000		158.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	69.000.000	1	69.000.000	33	158.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.892.144.000		2.892.144.000		2.763.644.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	2.892.144.000	48	2.892.144.000	48	2.763.644.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		50.000.000		22.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		617.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	700.000.000	12	700.000.000	12	617.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.067.144.000		2.067.144.000		2.049.144.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.067.144.000	12	2.067.144.000	12	2.049.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					619.000.000		619.000.000		651.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	133	619.000.000	133	619.000.000	133	651.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.000.000		55.000.000		17.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	55.000.000	25	55.000.000	25	17.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		300.000.000		360.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	300.000.000	25	300.000.000	25	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		60.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	50.000.000	50	50.000.000	25	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				94.000.000		94.000.000		94.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	94.000.000	3	94.000.000	3	94.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.577.280.000	100	4.577.280.000	100	4.690.280.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					440.000.000		440.000.000		440.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145.000.000		145.000.000		145.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	145.000.000	4	145.000.000	4	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	46	80.000.000	46	80.000.000	46	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.587.180.000		3.587.180.000		3.534.636.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	3.587.180.000	48	3.587.180.000	48	3.534.636.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				883.100.000		883.100.000		883.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	883.100.000	12	883.100.000	12	883.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.657.580.000		2.657.580.000		2.605.036.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.657.580.000	12	2.657.580.000	12	2.605.036.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					470.100.000		470.100.000		635.644.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	81	470.100.000	81	470.100.000	81	635.644.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		35.000.000		43.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	35.000.000	4	35.000.000	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				302.100.000		302.100.000		459.644.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	302.100.000	4	302.100.000	4	459.644.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**994.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	80	1.000.000.000	80	80	3	994.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.000.000.000		1.000.000.000		994.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%		1.000.000.000		1.000.000.000		994.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		994.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	994.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				540.000.000		540.000.000		534.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	540.000.000	3	540.000.000	3	534.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				460.000.000		460.000.000		460.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	460.000.000	4	460.000.000	4	460.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**62.838.770.000**		**62.889.810.000**		**62.434.451.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah									**18.793.728.000**		**18.840.128.000**		**18.418.609.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83		83		83		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								**18.489.381.000**		**18.535.781.000**		**18.142.553.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80	18.489.381.000	80	80	80	18.142.553.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.489.381.000		18.535.781.000		18.142.553.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	18.489.381.000	100	18.535.781.000	100	18.142.553.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.271.246.000		15.271.246.000		14.667.821.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	15.271.246.000	1	15.271.246.000	1	14.667.821.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.922.706.000		14.922.706.000		14.372.621.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	86	14.922.706.000	86	14.922.706.000	86	14.372.621.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				348.540.000		348.540.000		295.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	348.540.000	12	348.540.000	12	295.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					85.000.000		85.000.000		77.420.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	85.000.000	1	85.000.000	1	77.420.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				85.000.000		85.000.000		77.420.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	85.000.000	1	85.000.000	1	77.420.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					85.500.000		131.900.000		106.420.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	85.500.000	100	131.900.000	100	106.420.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				49.500.000		95.900.000		56.360.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	49.500.000	1	95.900.000	1	56.360.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6.000.000		6.000.000		24.800.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	6.000.000	2	6.000.000	2	24.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		25.260.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	30.000.000	50	30.000.000	50	25.260.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					750.951.000		750.951.000		779.087.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	750.951.000	100	750.951.000	100	779.087.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.131.000		45.131.000		45.131.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	45.131.000	1	45.131.000	1	45.131.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.000.000		110.000.000		111.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	110.000.000	1	110.000.000	1	111.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				71.000.000		71.000.000		76.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	71.000.000	1	71.000.000	1	76.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.000.000		8.000.000		9.750.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	8.000.000	12	8.000.000	12	9.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		70.000.000		72.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	70.000.000	12	70.000.000	12	72.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				279.820.000		279.820.000		297.206.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	279.820.000	12	279.820.000	12	297.206.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.000.000		12.000.000		12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		10.500.000		72.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	10.500.000	2	10.500.000	12	72.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.500.000		10.500.000		72.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	10.500.000	6	10.500.000	12	72.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.021.184.000		2.021.184.000		1.886.105.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.021.184.000	12	2.021.184.000	12	1.886.105.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		15.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				642.500.000		642.500.000		581.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	642.500.000	12	642.500.000	12	581.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		34.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	34.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.323.684.000		1.323.684.000		1.264.565.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.323.684.000	12	1.323.684.000	12	1.264.565.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					265.000.000		265.000.000		553.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	205	265.000.000	205	265.000.000	205	553.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.000.000		95.000.000		135.350.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	28	95.000.000	28	95.000.000	28	135.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		101.850.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	135	80.000.000	135	80.000.000	135	101.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		306.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	80.000.000	2	80.000.000	2	306.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah								**304.347.000**		**304.347.000**		**276.056.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	304.347.000	3	3	3	276.056.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						304.347.000		304.347.000		276.056.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	304.347.000	100	304.347.000	100	276.056.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					304.347.000		304.347.000		276.056.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	304.347.000	100	304.347.000	100	276.056.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				158.000.000		158.000.000		127.888.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	158.000.000	4	158.000.000	4	127.888.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				146.347.000		146.347.000		148.168.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	146.347.000	4	146.347.000	4	148.168.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal									**5.489.128.000**		**5.489.128.000**		**5.332.983.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4		4		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan								**2.173.910.000**		**2.173.910.000**		**2.077.989.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	2.173.910.000	90	90	90	2.077.989.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.649.910.000		1.649.910.000		1.585.216.000		
						Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	397.140.000	100	397.140.000	100	391.434.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
		2.18.04.1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					397.140.000		397.140.000		391.434.000		
						Persentase standar pelayanan sesuai ISO	%	80	163.101.000	80	163.101.000	80	166.395.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				163.101.000		163.101.000		166.395.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	123.101.000	1	123.101.000	1	127.101.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	39.294.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan	%	100	234.039.000	100	234.039.000	100	225.039.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				234.039.000		234.039.000		225.039.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun	Orang	1	204.039.000	1	204.039.000	1	200.039.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur pelayanan	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
						Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	376.032.000	100	376.032.000	100	381.032.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
		2.18.04.1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					376.032.000		376.032.000		381.032.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	376.032.000	100	376.032.000	100	381.032.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				376.032.000		376.032.000		381.032.000		
						Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan	Kali	60	55.120.000	60	55.120.000	60	75.794.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat	Kali	550	320.912.000	550	320.912.000	550	305.238.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	90	876.738.000	90	876.738.000	90	812.750.000	Bidang Pelayanan Perizinan	
		2.18.04.1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					876.738.000		876.738.000		812.750.000		
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Dokumen	1000	294.060.000	1000	294.060.000	950	263.948.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				263.380.000		263.380.000		234.518.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Unit	700	263.380.000	700	263.380.000	900	234.518.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				30.680.000		30.680.000		29.430.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	Kali	2	30.680.000	2	30.680.000	2	29.430.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Dokumen	1000	385.940.000	1000	385.940.000	1200	352.064.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				358.378.000		358.378.000		325.163.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Unit	700	358.378.000	700	358.378.000	900	325.163.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				27.562.000		27.562.000		26.901.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	Kali	2	27.562.000	2	27.562.000	2	26.901.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Dokumen	1000	196.738.000	1000	196.738.000	500	196.738.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				170.378.000		170.378.000		172.568.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	Unit	650	170.378.000	650	170.378.000	900	172.568.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				26.360.000		26.360.000		24.170.000		
						Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian	Kali	2	26.360.000	2	26.360.000	2	24.170.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						524.000.000		524.000.000		492.773.000		
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	524.000.000	10	524.000.000	10	492.773.000	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
		2.18.06.1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					524.000.000		524.000.000		492.773.000		
						Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Unit	1	355.000.000	1	355.000.000	1	323.773.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				355.000.000		355.000.000		323.773.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	1	355.000.000	1	355.000.000	1	323.773.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
						Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	%	100	169.000.000	100	169.000.000	100	169.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				169.000.000		169.000.000		169.000.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal	Dokumen	4	169.000.000	4	169.000.000	4	169.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN								**3.315.218.000**		**3.315.218.000**		**3.254.994.000**		
						Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	3.315.218.000	100	100	100	3.254.994.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						705.000.000		705.000.000		705.000.000		
						Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	705.000.000	50	705.000.000	50	705.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		2.18.02.1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					310.640.000		310.640.000		310.640.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	310.640.000	1	310.640.000	1	310.640.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.01.0001			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				310.640.000		310.640.000		310.640.000		
						Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	310.640.000	1	310.640.000	1	310.640.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					394.360.000		394.360.000		394.360.000		
						Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang dipromosikan	Dokumen	1	394.360.000	1	394.360.000	1	394.360.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.02.1.02.0005			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				394.360.000		394.360.000		394.360.000		
						Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	394.360.000	1	394.360.000	1	394.360.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.100.000.000		1.100.000.000		1.069.888.000		
						Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	180.000.000	50	180.000.000	50	180.000.000	Bidang Promosi PM	
		2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan	Dokumen	6	180.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah fasilitasi kemitraan usaha	Kali	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
						Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	46	920.000.000	46	920.000.000	46	889.888.000	Bidang Promosi PM	
		2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					920.000.000		920.000.000		889.888.000		
						Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan	Dokumen	30	765.000.000	30	765.000.000	30	734.888.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				707.500.000		707.500.000		707.500.000		
						Jumlah promosi penanaman modal	Kali	1	707.500.000	1	707.500.000	1	707.500.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				57.500.000		57.500.000		27.388.000		
						Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	Dokumen	1	57.500.000	1	57.500.000	1	27.388.000	SEKSI PROMOSI	
						Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan	Dokumen	30	155.000.000	30	155.000.000	30	155.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				155.000.000		155.000.000		155.000.000		
						Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN	Kali	24	155.000.000	24	155.000.000	24	155.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						1.510.218.000		1.510.218.000		1.480.106.000		
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	20	1.510.218.000	20	1.510.218.000	20	1.480.106.000	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.510.218.000		1.510.218.000		1.480.106.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui	Unit	20000	161.470.000	20000	161.470.000	20000	161.470.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
		2.18.05.1.01.0005			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				161.470.000		161.470.000		161.470.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal	Unit	2000	161.470.000	2000	161.470.000	2000	161.470.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
						Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal	Orang	500	728.637.000	500	728.637.000	500	698.525.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				728.637.000		728.637.000		698.525.000		
						Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	10	728.637.000	10	728.637.000	10	698.525.000	SEKSI PENGENDALIAN	
						Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Unit	150	450.000.000	150	450.000.000	150	450.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.18.05.1.01.0004			Pengawasan Penanaman Modal				450.000.000		450.000.000		450.000.000		
						Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal	Kali	75	450.000.000	75	450.000.000	75	450.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
						Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi	%	75	170.111.000	75	170.111.000	75	170.111.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				170.111.000		170.111.000		170.111.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Dokumen	10	170.111.000	10	170.111.000	10	170.111.000	SEKSI PENGENDALIAN	
JUMLAH									**24.282.856.000**		**24.329.256.000**		**23.751.592.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**48.708.773.000**		**45.699.253.000**		**46.535.673.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	79.31		79.31		79.31		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**47.796.524.000**		**44.937.004.000**		**45.773.424.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	47.796.524.000	75	75	75	45.773.424.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						47.796.524.000		44.937.004.000		45.773.424.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	42.190.568.000	100	40.111.404.000	100	38.991.466.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.628.568.000		27.606.528.000		25.382.590.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	27.628.568.000	1	27.606.528.000	1	25.382.590.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.578.568.000		26.578.568.000		24.632.590.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	170	26.578.568.000	170	26.578.568.000	170	24.632.590.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.050.000.000		1.027.960.000		750.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1.050.000.000	1	1.027.960.000	1	750.000.000		
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					350.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	350.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				350.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	350.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					130.000.000		180.480.000		180.480.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	130.000.000	100	180.480.000	100	180.480.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						90.480.000		90.480.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		156	90.480.000	156	90.480.000		
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0		0		0			
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70	50.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000		
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				50.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	30	50.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.957.000.000		1.515.000.000		1.621.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.957.000.000	100	1.515.000.000	100	1.621.000.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000						
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	100.000.000	0		0			
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		150.000.000		175.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	100.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	12.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		175.000.000		215.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	200.000.000	1	175.000.000	1	215.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000						
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	1		0			
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				125.000.000				41.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	1	125.000.000	1		1	41.000.000		
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000				50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	50.000.000	1		1	50.000.000		
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000						
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2	50.000.000	0		0			
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								50.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		1	50.000.000		
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.020.000.000		9.702.040.000		10.462.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	10.020.000.000	1	9.702.040.000	1	10.462.040.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	20.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.600.000.000		8.322.040.000		9.082.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	8.600.000.000	12	8.322.040.000	12	9.082.040.000		
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.055.000.000		807.356.000		995.356.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	2.055.000.000	1	807.356.000	1	995.356.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				120.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	120.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	250.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				35.000.000						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	35.000.000	0		0			
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000		80.000.000		135.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	12	100.000.000	12	80.000.000	12	135.000.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.300.000.000		302.356.000		435.356.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	1.300.000.000	12	302.356.000	12	435.356.000		
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000						
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	100.000.000	0		0			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%		5.605.956.000		4.825.600.000	85	6.781.958.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		125.000.000		124.884.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		125.000.000		125.000.000	1	124.884.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				125.000.000		125.000.000		124.884.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	1	124.884.000		
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					190.956.000		177.000.000		287.184.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		190.956.000		177.000.000	100	287.184.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		30.000.000		29.984.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000	1	30.000.000	1	29.984.000		
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.912.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.912.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.444.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.444.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.600.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	15.600.000	1	13.000.000	1	13.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		85.000.000		195.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	85.000.000	1	85.000.000	1	195.200.000		
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000				2.000.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit		300.000.000			1	2.000.000.000		
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	150.000.000	0		0			
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				150.000.000						
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	2	150.000.000	1		0			
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								2.000.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		1	2.000.000.000		
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.298.600.000		3.298.600.000		3.231.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan		3.298.600.000		3.298.600.000	1	3.231.900.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.100.000.000		2.100.000.000		1.990.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	1	1.990.800.000		
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.138.600.000		1.138.600.000		1.181.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.138.600.000	1	1.138.600.000	1	1.181.100.000		
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.691.400.000		1.225.000.000		1.137.990.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		1.691.400.000		1.225.000.000	1	1.137.990.000		
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000						
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	0		0			
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		111.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	111.500.000		
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit								
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.561.400.000		1.125.000.000		1.026.490.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.561.400.000	1	1.125.000.000	1	1.026.490.000		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**912.249.000**		**762.249.000**		**762.249.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.01	912.249.000	3.01	3	3.01	762.249.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						912.249.000		762.249.000		762.249.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	912.249.000	100	762.249.000	100	762.249.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					912.249.000		762.249.000		762.249.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	912.249.000	100	762.249.000	100	762.249.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				650.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	650.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000		
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				262.249.000		262.249.000		262.249.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	262.249.000	2	262.249.000	2	262.249.000		
Meningkatkan Pembangunan Olahraga									**196.062.000.000**		**201.798.000.000**		**215.308.826.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Sport Development Index (SDI)	%	0.42		0.42		0.42		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent								**194.462.000.000**		**200.198.000.000**		**213.708.826.000**		
						Peringkat nasional pada kejuaraan multievent	Peringkat	4	194.462.000.000	4	4	4	213.708.826.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						194.462.000.000		200.198.000.000		213.708.826.000		
						Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	50	14.950.000.000	50	14.950.000.000	50	16.731.698.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
		2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi									1.410.000.000		
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Orang	50		50		50	1.410.000.000		
		2.19.03.1.01.0004			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi								1.410.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Orang	0		0		1	1.410.000.000		
		2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					750.000.000		750.000.000		835.000.000		
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	150	750.000.000	150	750.000.000	150	835.000.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000		
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				250.000.000		250.000.000		335.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	1	335.000.000		
		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					14.200.000.000		14.200.000.000		14.486.698.000		
						Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	Orang		14.200.000.000		14.200.000.000	50	14.486.698.000		
		2.19.03.1.03.000			Seleksi Atlet Daerah				350.000.000		350.000.000		329.455.000		
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	500	350.000.000	350	350.000.000	350	329.455.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				13.850.000.000		13.850.000.000		14.157.243.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	280	13.850.000.000	275	13.850.000.000	275	14.157.243.000		
						Persentase peningkatan perolehan medali	%	28.18	179.512.000.000	28.18	185.248.000.000	28.18	196.977.128.000	Bidang Keolahragaan	
		2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Peningkatan jumlah medali yang diperoleh pada jenjang pendidikan	Unit	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000		
		2.19.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
		2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					53.250.000.000		59.163.000.000		57.532.600.000		
						Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	Orang	500	53.250.000.000	500	59.163.000.000	500	57.532.600.000		
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	150		150		0			
		2.19.03.1.02.0005			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				51.400.000.000		57.313.000.000		55.682.600.000		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	12	51.400.000.000	14	57.313.000.000	13	55.682.600.000		
		2.19.03.1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					126.062.000.000		125.885.000.000		139.244.528.000		
						Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	Orang	120	126.062.000.000	120	125.885.000.000	120	139.244.528.000		
		2.19.03.1.03.0006			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				1.525.000.000		1.525.000.000		1.525.000.000		
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	30	1.525.000.000	30	1.525.000.000	30	1.525.000.000		
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	6000	1.000.000.000	6000	1.000.000.000	6000	1.000.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	125	350.000.000	125	350.000.000	125	350.000.000		
		2.19.03.1.03.0008			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
		2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				122.937.000.000		122.760.000.000		136.119.528.000		
						Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	700	122.937.000.000	700	122.760.000.000	700	136.119.528.000		
	Meningkatnya Tingkat kebugaran masyarakat								**1.600.000.000**		**1.600.000.000**		**1.600.000.000**		
						Persentase tingkat kebugaran masyarakat	%	0.183	1.600.000.000	0.183	0	0.183	1.600.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		
						Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	750	1.600.000.000	750	1.600.000.000	750	1.600.000.000	Bidang Keolahragaan	
		2.19.03.1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		
						Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	Unit	2	1.600.000.000	2	1.600.000.000	2	1.600.000.000		
		2.19.03.1.04.0003			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
		2.19.03.1.04.0005			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	4	1.450.000.000	4	1.450.000.000	4	1.450.000.000		
Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									**138.173.575.000**		**55.173.575.000**		**43.613.285.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1686000000000		1686000000000		1686000000000		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8.01		8.01		8.01		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif								**825.000.000**		**825.000.000**		**885.576.000**		
						Jumlah kabupaten/kota kreatif	Kabupaten/ Kota	1	825.000.000	1	1	1	885.576.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						825.000.000		825.000.000		885.576.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/ Kota	6	825.000.000	6	825.000.000	6	885.576.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					625.000.000		625.000.000		625.000.000		
						Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	Kabupaten/	2	625.000.000	2	625.000.000	2	625.000.000		
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				625.000.000		625.000.000		625.000.000		
						Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif	Unit	10	625.000.000	10	625.000.000	10	625.000.000		
		3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					200.000.000		200.000.000		260.576.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	Orang	80	200.000.000	80	200.000.000	80	260.576.000		
		3.26.04.1.02.0008			Perlindungan Hasil Kreativitas				200.000.000		200.000.000		260.576.000		
						Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Dokumen	80	200.000.000	80	200.000.000	120	260.576.000		
	Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan								**137.348.575.000**		**54.348.575.000**		**42.727.709.000**		
						Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah	Rupiah	14054297	137.348.575.000	14054297	14.054.297	14054297	42.727.709.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.533.575.000		4.533.575.000		4.553.535.000		
						Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	13.33	4.533.575.000	13.33	4.533.575.000	13.33	4.553.535.000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
		3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					1.200.000.000		1.200.000.000		1.219.960.000		
						Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	5	1.200.000.000	5	1.200.000.000	5	1.219.960.000		
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				1.200.000.000		1.200.000.000		1.219.960.000		
						Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5	1.200.000.000	5	1.200.000.000	5	1.219.960.000		
		3.26.02.1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					2.833.575.000		2.833.575.000		2.833.575.000		
						Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola	Lokasi	1	2.833.575.000	1	2.833.575.000	1	2.833.575.000		
		3.26.02.1.02.0007			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2.308.575.000		2.308.575.000		2.308.575.000		
						Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi yang dikembangkan	Orang	100	2.308.575.000	100	2.308.575.000	100	2.308.575.000		
		3.26.02.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				525.000.000		525.000.000		525.000.000		
						Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan	Lokasi	1	525.000.000	1	525.000.000	1	525.000.000		
		3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	Dokumen	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000		
		3.26.02.1.04.0010			Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi										
						Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	0		0		0			
		3.26.02.1.04.0013			Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Unit	350	500.000.000	350	500.000.000	350	500.000.000		
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						123.700.000.000		46.200.000.000		34.619.750.000		
						Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	49985228	123.700.000.000	49985228	46.200.000.000	49985228	34.619.750.000	Bidang Pemasaran Pariwisata	
		3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					123.700.000.000		46.200.000.000		34.619.750.000		
						Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	Orang	400000	122.150.000.000	400000	45.400.000.000	400000	33.819.750.000		
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				117.225.000.000		44.300.000.000		32.719.750.000		
						Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	117.225.000.000	2	44.300.000.000	2	32.719.750.000		
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4.925.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	30	4.925.000.000	30	1.100.000.000	30	1.100.000.000		
						Tujuan Pasar Wisata Potensial	Lokasi	3	1.550.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000		
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.550.000.000		800.000.000		800.000.000		
						Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	10	1.550.000.000	6	800.000.000	6	800.000.000		
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						9.115.000.000		3.615.000.000		3.554.424.000		
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	48.98	9.115.000.000	48.98	3.615.000.000	48.98	3.554.424.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					8.415.000.000		2.915.000.000		2.887.850.000		
						Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	550	8.415.000.000	550	2.915.000.000	550	2.887.850.000		
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				5.800.000.000		300.000.000		272.850.000		
						Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	5.800.000.000	1	300.000.000	1	272.850.000		
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				1.665.000.000		1.665.000.000		1.665.000.000		
						orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	300	1.665.000.000	300	1.665.000.000	300	1.665.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				950.000.000		950.000.000		950.000.000		
						SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	Orang	250	950.000.000	250	950.000.000	250	950.000.000		
		3.26.05.1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					700.000.000		700.000.000		666.574.000		
						Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	Orang	240	700.000.000	240	700.000.000	240	666.574.000		
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				225.000.000		225.000.000		173.374.000		
						Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan	Orang	80	225.000.000	80	225.000.000	80	173.374.000		
		3.26.05.1.02.0003			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif				475.000.000		475.000.000		493.200.000		
						SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	160	475.000.000	160	475.000.000	190	493.200.000		
Meningkatkan Pembangunan Pemuda									**23.675.000.000**		**19.039.000.000**		**20.539.000.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	56.85		56.85		56.85		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda								**13.775.000.000**		**12.739.000.000**		**12.739.000.000**		
						Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda	%	11.05	13.775.000.000	11.05	11	11.05	12.739.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						13.775.000.000		12.739.000.000		12.739.000.000		
						Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	8	13.775.000.000	8	12.739.000.000	8	12.739.000.000	Bidang Kepemudaan	
		2.19.02.1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					13.775.000.000		12.739.000.000		12.739.000.000		
						Jumlah wirausaha muda	Orang	100	3.150.000.000	100	1.650.000.000	100	1.650.000.000		
		2.19.02.1.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				3.150.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		
						Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1000	3.150.000.000	400	1.650.000.000	400	1.650.000.000		
						Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda	Lokasi	100	7.280.000.000	100	7.280.000.000	100	7.280.000.000		
		2.19.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				3.155.000.000		3.155.000.000		3.155.000.000		
						Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	8000	3.155.000.000	8000	3.155.000.000	4250	3.155.000.000		
		2.19.02.1.01.0012			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi				4.125.000.000		4.125.000.000		4.125.000.000		
						Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota	Orang	120	4.125.000.000	120	4.125.000.000	120	4.125.000.000		
		2.19.02.1.01.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi										
						Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0		0		0			
						Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	Dokumen	3	3.345.000.000	3	3.809.000.000	3	3.809.000.000		
		2.19.02.1.01.0010			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				275.000.000		275.000.000		275.000.000		
						Jumlah dokumen penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Dokumen	2	275.000.000	2	275.000.000	2	275.000.000		
		2.19.02.1.01.0011			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				720.000.000		1.184.000.000		1.184.000.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi sinergis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	2	720.000.000	3	1.184.000.000	3	1.184.000.000		
		2.19.02.1.01.0014			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi				2.350.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	1500	2.350.000.000	1500	2.350.000.000	1500	2.350.000.000		
	Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda								**9.900.000.000**		**6.300.000.000**		**7.800.000.000**		
						Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	37.25	9.900.000.000	37.25	37	37.25	7.800.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						9.900.000.000		6.300.000.000		7.800.000.000		
						Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	50	9.900.000.000	50	6.300.000.000	50	7.800.000.000	Bidang Kepemudaan	
		2.19.02.1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					9.900.000.000		6.300.000.000		7.800.000.000		
						Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	Orang	125	9.900.000.000	125	6.300.000.000	125	7.800.000.000		
		2.19.02.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Orang	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000		
		2.19.02.1.02.0004			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				9.700.000.000		6.100.000.000		7.600.000.000		
						Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	Dokumen	3	9.700.000.000	3	6.100.000.000	3	7.600.000.000		
JUMLAH									**406.619.348.000**		**321.709.828.000**		**325.996.784.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**34.501.051.000**		**34.592.691.000**		**32.737.822.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73		73		73		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**34.330.051.000**		**34.421.691.000**		**32.571.774.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	34.330.051.000	80	34.421.691.000	80	32.571.774.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						34.330.051.000		34.421.691.000		32.571.774.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	34.330.051.000	100	34.421.691.000	100	32.571.774.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.418.240.000		29.418.240.000		27.443.857.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	29.418.240.000	1	29.418.240.000	1	27.443.857.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.176.560.000		29.176.560.000		27.202.177.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	155	29.176.560.000	155	29.176.560.000	155	27.202.177.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				241.680.000		241.680.000		241.680.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	241.680.000	1	241.680.000	1	241.680.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					95.720.000		95.720.000		83.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	95.720.000	1	95.720.000	1	83.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				90.720.000		90.720.000		78.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	90.720.000	1	90.720.000	1	78.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		106.640.000		101.420.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	15.000.000	100	106.640.000	100	101.420.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						91.640.000		86.420.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		1	91.640.000	1	86.420.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		0		5		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					799.135.000		799.135.000		897.137.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	799.135.000	100	799.135.000	100	897.137.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.135.000		45.135.000		34.957.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	45.135.000	1	45.135.000	1	34.957.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.000.000		155.000.000		155.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	155.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000			Penyediaan Bahan/Material				90.000.000		90.000.000		78.000.000		
						jumlah paket bahan/material	Paket	1	90.000.000	1	90.000.000	1	78.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.000.000		240.000.000		355.180.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	240.000.000	1	240.000.000	1	355.180.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					253.616.000		253.616.000		308.075.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	2	253.616.000	2	253.616.000	2	308.075.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	10.000.000	0	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				243.616.000		243.616.000		298.075.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	243.616.000	2	243.616.000	8	298.075.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.325.260.000		3.325.260.000		3.170.460.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	8	3.325.260.000	8	3.325.260.000	8	3.170.460.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.309.400.000		1.309.400.000		1.157.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	1.309.400.000	3	1.309.400.000	3	1.157.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.999.860.000		1.999.860.000		1.999.860.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	1.999.860.000	3	1.999.860.000	3	1.999.860.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					423.080.000		423.080.000		567.325.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	423.080.000	4	423.080.000	135	567.325.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000		35.000.000		55.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	35.000.000	2	35.000.000	2	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		75.000.000		99.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	75.000.000	15	75.000.000	15	99.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		86.245.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	16	86.245.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				102.754.000		102.754.000		139.754.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	102.754.000	4	102.754.000	4	139.754.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				160.326.000		160.326.000		187.326.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	160.326.000	0	160.326.000	100	187.326.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**171.000.000**		**171.000.000**		**166.048.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.85	171.000.000	2.85	3	2.85	166.048.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						171.000.000		171.000.000		166.048.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	171.000.000	100	171.000.000	100	166.048.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					171.000.000		171.000.000		166.048.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	171.000.000	100	171.000.000	100	166.048.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				135.000.000		135.000.000		126.440.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	135.000.000	3	135.000.000	3	126.440.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.000.000		36.000.000		39.608.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	36.000.000	5	36.000.000	5	39.608.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan									**883.346.000**		**883.346.000**		**881.491.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	94		94		94		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi								**883.346.000**		**883.346.000**		**881.491.000**		
						Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi	Nilai	95.32	883.346.000	95.32	95	95.32	881.491.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						780.346.000		780.346.000		780.793.000		
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	25.97	240.973.000	25.97	240.973.000	25.97	237.549.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					125.200.000		125.200.000		127.468.000		
						Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	Unit	20	125.200.000	20	125.200.000	20	127.468.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.01.0003			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				125.200.000		125.200.000		127.468.000		
						Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan provinsi	Laporan	76	125.200.000	76	125.200.000	76	127.468.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					115.773.000		115.773.000		110.081.000		
						Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	%	71.42	115.773.000	71.42	115.773.000	71.42	110.081.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				115.773.000		115.773.000		110.081.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	42	115.773.000	42	115.773.000	42	110.081.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
						Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	302.775.000	100	302.775.000	100	290.693.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					25.000.000		25.000.000		24.690.000		
						Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	Arsip	1000	25.000.000	1000	25.000.000	1000	24.690.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.02.1.01.000			Penyusutan Arsip Dinamis				25.000.000		25.000.000		24.690.000		
						Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	Arsip	1000	25.000.000	1000	25.000.000	1000	24.690.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.02.1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					277.775.000		277.775.000		266.003.000		
						Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	Dokumen	10500	277.775.000	10500	277.775.000	10500	266.003.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
		2.24.02.1.02.000			Akuisisi Arsip Statis				277.775.000		277.775.000		266.003.000		
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1100	87.262.000	1100	87.262.000	1500	80.807.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	10000	106.427.000	10000	106.427.000	10000	101.912.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	500	84.086.000	500	84.086.000	500	83.284.000	SEKSI PENGOLAHAN ARSIP	
						Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	19	236.598.000	19	236.598.000	19	252.551.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
		2.24.02.1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					236.598.000		236.598.000		252.551.000		
						Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	800	60.398.000	800	60.398.000	800	56.924.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				60.398.000		60.398.000		56.924.000		
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	1 petak /tahun	3000	60.398.000	3000	60.398.000	3000	56.924.000	SEKSI LAYANAN ARSIP	
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	176.200.000	41	176.200.000	41	195.627.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				176.200.000		176.200.000		195.627.000		
						Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	Laporan	2	176.200.000	2	176.200.000	4	195.627.000	SEKSI PEMANFAATAN ARSIP	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						103.000.000		103.000.000		100.698.000		
						Persentase arsip yang diselamatkan	%	19.47	53.000.000	19.47	53.000.000	19.47	51.202.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					30.000.000		30.000.000		29.419.000		
						Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	Arsip	150	30.000.000	150	30.000.000	150	29.419.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				30.000.000		30.000.000		29.419.000		
						Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	150	30.000.000	150	30.000.000	400	29.419.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.03.1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					23.000.000		23.000.000		21.783.000		
						Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	Arsip	256500	23.000.000	256500	23.000.000	256500	21.783.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				23.000.000		23.000.000		21.783.000		
						Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Arsip	6500	23.000.000	6500	23.000.000	10000	21.783.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
						Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	12.19	50.000.000	12.19	50.000.000	12.19	49.496.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					50.000.000		50.000.000		49.496.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	OPD	5	50.000.000	5	50.000.000	5	49.496.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
		2.24.03.1.01.0001			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				50.000.000		50.000.000		49.496.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun	Arsip	3000	50.000.000	3000	50.000.000	10000	49.496.000	SEKSI AKUISISI ARSIP	
Meningkatkan Literasi Masyarakat									**34.686.936.000**		**17.686.936.000**		**16.968.716.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	16		16		14.08		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat								**34.686.936.000**		**17.686.936.000**		**16.968.716.000**		
						Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	73	34.686.936.000	73	73	73	16.968.716.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						34.418.638.000		17.418.638.000		16.743.127.000		
						Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	7.682.654.000	80	7.682.654.000	80	7.423.709.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					923.969.000		923.969.000		922.146.000		
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Jenis	6	139.969.000	6	139.969.000	6	148.619.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0007			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				39.969.000		39.969.000		39.619.000		
						Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jenis	5	39.969.000	5	39.969.000	5	39.619.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.0015			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				100.000.000		100.000.000		109.000.000		
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	109.000.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	4.9	784.000.000	4.9	784.000.000	4.9	773.527.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0009			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				784.000.000		784.000.000		773.527.000		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eks	9470	784.000.000	9470	784.000.000	9470	773.527.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					6.758.685.000		6.758.685.000		6.501.563.000		
						Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	Orang	20	29.360.000	20	29.360.000	20	29.360.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0004			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				29.360.000		29.360.000		29.360.000		
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	Unit	1	29.360.000	1	29.360.000	1	29.360.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	Orang	2657000	6.729.325.000	2657000	6.729.325.000	2657000	6.472.203.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.02.0002			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				6.729.325.000		6.729.325.000		6.472.203.000		
						Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Unit	7	6.729.325.000	7	6.729.325.000	7	6.472.203.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
						Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	80.56	26.605.584.000	80.56	9.605.584.000	80.56	9.190.036.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					26.605.584.000		9.605.584.000		9.190.036.000		
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Unit	5	26.500.584.000	5	9.500.584.000	5	9.089.954.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0002			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				26.465.584.000		9.465.584.000		9.055.088.000		
						Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Unit	3	26.465.584.000	3	9.465.584.000	3	9.055.088.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0016			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				35.000.000		35.000.000		34.866.000		
						Jumlah data dan informasi perpustakaan	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	34.866.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
						Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	Orang	10	105.000.000	10	105.000.000	10	100.082.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				30.000.000		30.000.000		29.726.000		
						Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	5	29.726.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				75.000.000		75.000.000		70.356.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	Orang	15	75.000.000	15	75.000.000	15	70.356.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
						Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	23.08	130.400.000	23.08	130.400.000	23.08	129.382.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
		2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					130.400.000		130.400.000		129.382.000		
						Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	Kegiatan	2	130.400.000	2	130.400.000	2	129.382.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				62.800.000		62.800.000		62.221.000		
						Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus	Lokasi	3	62.800.000	3	62.800.000	3	62.221.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				27.600.000		27.600.000		27.593.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Orang	8	27.600.000	8	27.600.000	8	27.593.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				40.000.000		40.000.000		39.568.000		
						Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	40.000.000	1	40.000.000	1	39.568.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						268.298.000		268.298.000		225.589.000		
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	84.67	268.298.000	84.67	268.298.000	84.67	225.589.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
		2.23.03.1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					99.970.000		99.970.000		98.467.000		
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	Unit	184	99.970.000	184	99.970.000	184	98.467.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				23.470.000		23.470.000		22.817.000		
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eks	2600	23.470.000	2600	23.470.000	2600	22.817.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				76.500.000		76.500.000		75.650.000		
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Unit	3	76.500.000	3	76.500.000	3	75.650.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					51.000.000		51.000.000		50.114.000		
						Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	51.000.000	2	51.000.000	2	50.114.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah				39.200.000		39.200.000		38.344.000		
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	Dokumen	4350	39.200.000	4350	39.200.000	4350	38.344.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah				11.800.000		11.800.000		11.770.000		
						Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	1	11.800.000	1	11.800.000	1	11.770.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					42.328.000		42.328.000		41.533.000		
						Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan	Eks	25	42.328.000	25	42.328.000	25	41.533.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.03.0002			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				42.328.000		42.328.000		41.533.000		
						Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eks	5	42.328.000	5	42.328.000	5	41.533.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					75.000.000		75.000.000		35.475.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	Eks	367	75.000.000	367	75.000.000	367	35.475.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				40.000.000		40.000.000		23.473.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	2	40.000.000	2	40.000.000	2	23.473.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				35.000.000		35.000.000		12.002.000		
						Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	167	35.000.000	167	35.000.000	167	12.002.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
JUMLAH									**70.071.333.000**		**53.162.973.000**		**50.588.029.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan									**3.536.710.000**		**3.619.710.000**		**3.518.117.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	107.78		107.78		107.78		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)								**2.330.025.000**		**2.413.025.000**		**2.324.368.000**		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ta	40.12	2.330.025.000	40.12	40	40.12	2.324.368.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						2.330.025.000		2.413.025.000		2.324.368.000		
						Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160000	1.162.075.000	160000	1.245.075.000	160000	1.271.075.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		3.25.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					111.000.000		111.000.000		111.000.000		
						Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	20	111.000.000	20	111.000.000	20	111.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.0001			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan	Orang	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				91.000.000		91.000.000		91.000.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data	Kabupaten/ Kota	35	91.000.000	35	91.000.000	35	91.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.031.075.000		1.114.075.000		1.140.075.000		
						Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	Jenis	2	292.360.000	2	292.360.000	2	307.560.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				292.360.000		292.360.000		307.560.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilannya	Orang	300	292.360.000	100	292.360.000	100	307.560.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya	Unit	5	206.670.000	5	289.670.000	5	291.670.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				206.670.000		289.670.000		291.670.000		
						Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan	Orang	90	19.470.000	30	19.470.000	30	21.470.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	Paket	10	187.200.000	5	270.200.000	5	270.200.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	Unit	35	532.045.000	35	532.045.000	35	540.845.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				532.045.000		532.045.000		540.845.000		
						Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	2000	462.045.000	2000	462.045.000	2000	465.845.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	Orang	120	70.000.000	70	70.000.000	70	75.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.03.0001			Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina	Orang	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	1.167.950.000	4	1.167.950.000	4	1.053.293.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
		3.25.06.1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan					1.167.950.000		1.167.950.000		1.053.293.000		

				Pemasaran Skala Menengah dan Besar											
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Sertifikat	400	993.163.000	400	993.163.000	400	893.575.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				993.163.000		993.163.000		893.575.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17025:2017	Dokumen	1	864.473.000	1	864.473.000	1	737.885.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memadai	Paket	2	118.690.000	2	118.690.000	2	118.690.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai	Unit	2	10.000.000	2	10.000.000	2	37.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	Sertifikat	100	63.745.000	100	63.745.000	100	63.745.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0001			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				63.745.000		63.745.000		63.745.000		
						Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar	Unit	80	63.745.000	80	63.745.000	80	63.745.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	Dokumen	1	111.042.000	1	111.042.000	1	95.973.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0001			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				111.042.000		111.042.000		95.973.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015	Dokumen	2	73.337.000	2	73.337.000	2	73.333.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						JUmlah DOkumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifiasi	Dokumen	5	14.885.000	5	14.885.000	5	14.885.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	Orang	20	22.820.000	20	22.820.000	20	7.755.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan								**1.137.715.000**		**1.137.715.000**		**1.137.715.000**		
						Nilai Tukar Nelayan	Angka	105	1.137.715.000	105	105	105	1.137.715.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						1.137.715.000		1.137.715.000		1.137.715.000		
						Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108.27	1.137.715.000	108.27	1.137.715.000	108.27	1.137.715.000	Bidang Perikanan Tangkap	
		3.25.03.1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					1.137.715.000		1.137.715.000		1.137.715.000		
						Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	10100	1.137.715.000	10100	1.137.715.000	10100	1.137.715.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				1.137.715.000		1.137.715.000		1.137.715.000		
						Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	Dokumen	1	6.935.000	-1	6.935.000	-1	6.935.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi	Orang	10000	1.087.855.000	10000	1.087.855.000	10000	1.087.855.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan	Orang	100	32.670.000	50	32.670.000	50	32.670.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya	Kelompok	1	10.255.000	1	10.255.000	1	10.255.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.03.1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
						Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi	Orang	60		60		60		SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap										
						Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	60		0		0		SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan								**68.970.000**		**68.970.000**		**56.034.000**		
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110	68.970.000	110	110	110	56.034.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						68.970.000		68.970.000		56.034.000		
						Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111.27	68.970.000	111.27	68.970.000	111.27	56.034.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					68.970.000		68.970.000		56.034.000		
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya	Orang	60	68.970.000	60	68.970.000	60	56.034.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				68.970.000		68.970.000		56.034.000		
						Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan	Kelompok	1	17.360.000	1	17.360.000	1	12.904.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
						Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	Orang	50	51.610.000	40	51.610.000	40	43.130.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan									**4.589.319.000**		**4.666.319.000**		**4.654.719.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0.75		0.75		0.75		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif								**4.589.319.000**		**4.666.319.000**		**4.654.719.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	62	4.589.319.000	62	62	62	4.654.719.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						2.581.455.000		2.581.455.000		2.553.855.000		
						Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	715.287.000	5	715.287.000	5	687.687.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					715.287.000		715.287.000		687.687.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	404.715.000	1	404.715.000	1	377.115.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				404.715.000		404.715.000		377.115.000		
						Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi	Dokumen	1	404.715.000	1	404.715.000	1	377.115.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	Orang	5	310.572.000	5	310.572.000	5	310.572.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				310.572.000		310.572.000		310.572.000		
						Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Dokumen	5		0		0		SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang melaporkan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Unit	20		0		0		SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan	Orang	200	179.955.000	200	179.955.000	200	179.955.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan	Lokasi	10	130.617.000	5	130.617.000	5	130.617.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	3.7	773.390.000	3.7	773.390.000	3.7	773.390.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					748.540.000		748.540.000		748.540.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	342.248.000	2	342.248.000	2	342.248.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				342.248.000		342.248.000		342.248.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	62.740.000	2	62.740.000	2	62.740.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	218.000.000	2	218.000.000	2	218.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	61.508.000	60	61.508.000	60	61.508.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Ha	2	406.292.000	2	406.292.000	2	406.292.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				406.292.000		406.292.000		406.292.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	291.292.000	20000	291.292.000	20000	291.292.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	5	115.000.000	5	115.000.000	5	115.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.02.1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					24.850.000		24.850.000		24.850.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	24.850.000	100	24.850.000	100	24.850.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0003			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				24.850.000		24.850.000		24.850.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	24.850.000	100	24.850.000	100	24.850.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	1.39	300.554.000	1.39	300.554.000	1.39	300.554.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					273.679.000		273.679.000		273.679.000		
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2	273.679.000	2	273.679.000	2	273.679.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				273.679.000		273.679.000		273.679.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	273.679.000	20000	273.679.000	20000	273.679.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.02.1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					26.875.000		26.875.000		26.875.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	26.875.000	100	26.875.000	100	26.875.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0003			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				26.875.000		26.875.000		26.875.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	26.875.000	100	26.875.000	100	26.875.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	3.7	792.224.000	3.7	792.224.000	3.7	792.224.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					758.999.000		758.999.000		758.999.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	424.557.000	2	424.557.000	2	424.557.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				424.557.000		424.557.000		424.557.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	80.800.000	2	80.800.000	2	80.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	318.897.000	2	318.897.000	2	318.897.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	24.860.000	60	24.860.000	60	24.860.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2	334.442.000	2	334.442.000	2	334.442.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				334.442.000		334.442.000		334.442.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	223.274.000	20000	223.274.000	20000	223.274.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	5	111.168.000	4	111.168.000	4	111.168.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.02.1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					33.225.000		33.225.000		33.225.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	33.225.000	100	33.225.000	100	33.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0003			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				33.225.000		33.225.000		33.225.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	33.225.000	100	33.225.000	100	33.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						44.225.000		44.225.000		44.225.000		
						Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	44.44	44.225.000	44.44	44.225.000	44.44	44.225.000	Bidang Perikanan Tangkap	
		3.25.03.1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					44.225.000		44.225.000		44.225.000		
						Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Lokasi	1	44.225.000	1	44.225.000	1	44.225.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				44.225.000		44.225.000		44.225.000		
						Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	Orang	100	44.225.000	0	44.225.000	0	44.225.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.963.639.000		2.040.639.000		2.056.639.000		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	106.809.000	61	106.809.000	61	106.809.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					106.809.000		106.809.000		106.809.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Kali	10	106.809.000	10	106.809.000	10	106.809.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				106.809.000		106.809.000		106.809.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	30	106.809.000	23	106.809.000	23	106.809.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	155.143.000	61	155.143.000	61	155.143.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					155.143.000		155.143.000		155.143.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Kali	10	155.143.000	10	155.143.000	10	155.143.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				155.143.000		155.143.000		155.143.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	155.143.000	20	155.143.000	20	155.143.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	236.050.000	61	236.050.000	61	236.050.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					236.050.000		236.050.000		236.050.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Kali	10	236.050.000	10	236.050.000	10	236.050.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				236.050.000		236.050.000		236.050.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	30	236.050.000	20	236.050.000	20	236.050.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	664.642.000	70	741.642.000	70	757.642.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					575.604.000		652.604.000		668.604.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35	87.900.000	35	164.900.000	35	164.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0004			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				87.900.000		164.900.000		164.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana	Kelompok	5	87.900.000	5	164.900.000	5	164.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	18	54.040.000	18	54.040.000	18	54.040.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				22.220.000		22.220.000		22.220.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	22.220.000	60	22.220.000	60	22.220.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				17.270.000		17.270.000		17.270.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	17.270.000	30	17.270.000	30	17.270.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				14.550.000		14.550.000		14.550.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	14.550.000	60	14.550.000	60	14.550.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	100	433.664.000	100	433.664.000	100	449.664.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				15.830.000		15.830.000		15.830.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	%	100	15.830.000	100	15.830.000	100	15.830.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				311.519.000		311.519.000		327.519.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	%	100	311.519.000	100	311.519.000	100	327.519.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				106.315.000		106.315.000		106.315.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	%	100	106.315.000	100	106.315.000	100	106.315.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					89.038.000		89.038.000		89.038.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	180	14.870.000	180	14.870.000	180	14.870.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				14.870.000		14.870.000		14.870.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	14.870.000	30	14.870.000	30	14.870.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya										
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60		0		0		SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60		0		0		SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	100	74.168.000	100	74.168.000	100	74.168.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas				13.693.000		13.693.000		13.693.000		

					Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya										
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	13.693.000	100	13.693.000	100	13.693.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				26.425.000		26.425.000		26.425.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	26.425.000	100	26.425.000	100	26.425.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				34.050.000		34.050.000		34.050.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	34.050.000	100	34.050.000	100	34.050.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	298.765.000	2	298.765.000	2	298.765.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					250.820.000		250.820.000		250.820.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	250.820.000	100	250.820.000	100	250.820.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				28.261.000		28.261.000		28.261.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	24	28.261.000	6	28.261.000	6	28.261.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				215.099.000		215.099.000		215.099.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	56	215.099.000	30	215.099.000	30	215.099.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				7.460.000		7.460.000		7.460.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	24	7.460.000	10	7.460.000	10	7.460.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					47.945.000		47.945.000		47.945.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	47.945.000	100	47.945.000	100	47.945.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				21.235.000		21.235.000		21.235.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	21.235.000	20	21.235.000	20	21.235.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				9.420.000		9.420.000		9.420.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	30	9.420.000	15	9.420.000	15	9.420.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				17.290.000		17.290.000		17.290.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	30	17.290.000	15	17.290.000	15	17.290.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	252.836.000	2	252.836.000	2	252.836.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					78.573.000		78.573.000		78.573.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	78.573.000	100	78.573.000	100	78.573.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				55.950.000		55.950.000		55.950.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	15	55.950.000	15	55.950.000	15	55.950.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				11.656.000		11.656.000		11.656.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	30	11.656.000	30	11.656.000	30	11.656.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10.967.000		10.967.000		10.967.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	10.967.000	14	10.967.000	14	10.967.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					174.263.000		174.263.000		174.263.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	174.263.000	100	174.263.000	100	174.263.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				63.900.000		63.900.000		63.900.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	63.900.000	15	63.900.000	15	63.900.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				53.140.000		53.140.000		53.140.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	53.140.000	15	53.140.000	15	53.140.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.223.000		57.223.000		57.223.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Orang	30	57.223.000	30	57.223.000	30	57.223.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	249.394.000	2	249.394.000	2	249.394.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		3.25.05.1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					116.275.000		116.275.000		116.275.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	116.275.000	100	116.275.000	100	116.275.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0001			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				54.115.000		54.115.000		54.115.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	30	54.115.000	30	54.115.000	30	54.115.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				6.620.000		6.620.000		6.620.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	30	6.620.000	30	6.620.000	30	6.620.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.05.1.01.0003			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				55.540.000		55.540.000		55.540.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	30	55.540.000	30	55.540.000	30	55.540.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					133.119.000		133.119.000		133.119.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	133.119.000	100	133.119.000	100	133.119.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0001			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				41.815.000		41.815.000		41.815.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	41.815.000	18	41.815.000	18	41.815.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0002			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				42.470.000		42.470.000		42.470.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	42.470.000	18	42.470.000	18	42.470.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				48.834.000		48.834.000		48.834.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	30	48.834.000	30	48.834.000	30	48.834.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**55.485.767.000**		**55.631.927.000**		**54.090.388.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82		82		82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**54.684.089.000**		**54.830.249.000**		**53.277.356.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	54.684.089.000	83	83	83	53.277.356.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						54.684.089.000		54.830.249.000		53.277.356.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	898.000.000	100	898.000.000	100	898.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					867.200.000		867.200.000		862.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	867.200.000	1	867.200.000	1	862.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				865.200.000		865.200.000		860.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	865.200.000	12	865.200.000	12	860.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.800.000		19.800.000		24.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	19.800.000	1	19.800.000	1	24.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	6	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.800.000		1.800.000		6.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.800.000	1	1.800.000	7	6.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	172.000.000	100	172.000.000	100	172.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.500.000		16.500.000		16.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	16.500.000	100	16.500.000	100	16.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.800.000		119.800.000		119.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	119.800.000	1	119.800.000	1	119.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.800.000		117.800.000		117.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	117.800.000	12	117.800.000	12	117.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.700.000		35.700.000		35.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	35.700.000	1	35.700.000	1	35.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		5.700.000		5.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	131.200.000	100	131.200.000	100	133.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					23.200.000		23.200.000		23.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	23.200.000	100	23.200.000	100	23.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.200.000		3.200.000		3.200.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.200.000	1	3.200.000	1	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.000.000		58.000.000		59.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	58.000.000	1	58.000.000	1	59.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				56.000.000		56.000.000		57.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	56.000.000	12	56.000.000	12	57.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	276.500.000	100	276.500.000	100	276.500.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.500.000		22.500.000		27.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	22.500.000	100	22.500.000	100	27.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		7.700.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000		101.000.000		95.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	101.000.000	1	101.000.000	1	95.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		94.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	94.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.000.000		153.000.000		153.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	153.000.000	1	153.000.000	1	153.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.000.000		136.000.000		136.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	136.000.000	1	136.000.000	1	136.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	608.000.000	100	608.000.000	100	608.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					33.000.000		33.000.000		33.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	33.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					458.000.000		458.000.000		458.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	458.000.000	1	458.000.000	1	458.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				453.000.000		453.000.000		453.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	453.000.000	12	453.000.000	12	453.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					117.000.000		117.000.000		117.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	117.000.000	1	117.000.000	1	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	161.000.000	100	161.000.000	100	160.272.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.700.000		92.700.000		92.872.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	92.700.000	100	92.700.000	100	92.872.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		5.500.000		5.672.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.672.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					29.500.000		29.500.000		28.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	29.500.000	1	29.500.000	1	28.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		1.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	1.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	27.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.800.000		38.800.000		38.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	38.800.000	1	38.800.000	1	38.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.800.000		19.800.000		19.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	138.280.000	100	138.280.000	100	138.280.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.665.000		19.665.000		19.665.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	19.665.000	100	19.665.000	100	19.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				600.000		600.000		600.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	600.000	1	600.000	1	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.355.000		2.355.000		2.355.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	2.355.000	1	2.355.000	1	2.355.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.710.000		16.710.000		16.710.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.710.000	12	16.710.000	12	16.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.150.000		45.150.000		45.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	45.150.000	1	45.150.000	1	45.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.950.000		1.950.000		1.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.950.000	12	1.950.000	12	1.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.200.000		43.200.000		43.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	43.200.000	12	43.200.000	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.465.000		73.465.000		73.465.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	73.465.000	1	73.465.000	1	73.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.765.000		15.765.000		15.765.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	15.765.000	1	15.765.000	1	15.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.700.000		7.700.000		7.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.700.000	1	7.700.000	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	77.000.000	100	77.000.000	100	78.100.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					15.260.000		15.260.000		15.260.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	15.260.000	100	15.260.000	100	15.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.100.000		9.100.000		9.100.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.100.000	1	9.100.000	1	9.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.160.000		5.160.000		5.160.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.160.000	12	5.160.000	12	5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.500.000		30.500.000		31.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	30.500.000	1	30.500.000	1	31.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	500.000	12	500.000	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		30.000.000		31.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	31.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.240.000		31.240.000		31.240.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	31.240.000	1	31.240.000	1	31.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.240.000		16.240.000		16.240.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	16.240.000	1	16.240.000	1	16.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	94.000.000	100	94.000.000	100	94.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.240.000		24.240.000		24.240.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	24.240.000	100	24.240.000	100	24.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				420.000		420.000		420.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	420.000	1	420.000	1	420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.270.000		7.270.000		7.270.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.270.000	1	7.270.000	1	7.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.550.000		16.550.000		16.550.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.550.000	12	16.550.000	12	16.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.300.000		39.300.000		39.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	39.300.000	1	39.300.000	1	39.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		300.000		300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	300.000	12	300.000	12	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.000.000		39.000.000		39.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	39.000.000	12	39.000.000	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.460.000		30.460.000		30.460.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.460.000	1	30.460.000	1	30.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.510.000		14.510.000		14.510.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.510.000	1	14.510.000	1	14.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.950.000		5.950.000		5.950.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.950.000	1	5.950.000	1	5.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	253.000.000	100	253.000.000	100	252.263.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		19.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203.000.000		203.000.000		203.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	203.000.000	1	203.000.000	1	203.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		25.000.000		30.263.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		12.349.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		7.914.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.914.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	90.000.000	100	90.000.000	100	91.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.640.000		14.640.000		14.640.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	14.640.000	100	14.640.000	100	14.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.640.000		5.640.000		5.640.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.640.000	12	5.640.000	12	5.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.360.000		45.360.000		45.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	45.360.000	1	45.360.000	1	45.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.360.000		39.360.000		39.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	39.360.000	12	39.360.000	12	39.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		30.000.000		31.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	168.000.000	100	168.000.000	100	168.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000		78.000.000		78.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	78.000.000	1	78.000.000	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.500.000		15.500.000		15.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				57.500.000		57.500.000		57.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	57.500.000	1	57.500.000	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		1.850.000		1.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.850.000	1	1.850.000	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.500.000		9.500.000		9.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.500.000	2	9.500.000	4	9.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		8.650.000		8.650.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.650.000	12	8.650.000	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.000.000		33.000.000		31.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	33.000.000	1	33.000.000	1	31.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.000.000		32.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	32.000.000	12	32.000.000	12	30.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					47.000.000		47.000.000		49.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	47.000.000	1	47.000.000	1	49.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.000.000		17.000.000		19.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	17.000.000	5	17.000.000	5	19.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	106.000.000	100	106.000.000	100	105.496.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		19.270.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	20.000.000	100	20.000.000	100	19.270.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.000.000		8.000.000		8.270.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.000.000	4	8.000.000	4	8.270.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.000.000		42.000.000		41.496.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	42.000.000	1	42.000.000	1	41.496.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		39.496.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	39.496.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.000.000		44.000.000		44.730.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.730.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.730.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	3	5.000.000	3	5.730.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	342.100.000	100	342.100.000	100	318.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.500.000		82.500.000		82.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	82.500.000	100	82.500.000	100	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.500.000		22.500.000		22.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	22.500.000	12	22.500.000	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					189.600.000		189.600.000		165.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	189.600.000	1	189.600.000	1	165.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.600.000		186.600.000		162.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	186.600.000	12	186.600.000	12	162.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	50.599.009.000	100	50.745.169.000	100	49.208.345.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.906.850.000		45.906.850.000		43.754.126.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	45.906.850.000	1	45.906.850.000	1	43.754.126.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				44.832.270.000		44.832.270.000		42.659.546.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	327	44.832.270.000	327	44.832.270.000	260	42.659.546.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				917.580.000		917.580.000		917.580.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	917.580.000	12	917.580.000	12	917.580.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				157.000.000		157.000.000		177.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	157.000.000	1	157.000.000	1	177.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					315.000.000		461.160.000		563.160.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	315.000.000	100	461.160.000	100	563.160.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						146.160.000		146.160.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			252	146.160.000	252	146.160.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		17.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000		150.000.000		170.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		150.000.000		230.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	150.000.000	30	150.000.000	30	230.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.121.546.000		1.121.546.000		1.151.546.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.121.546.000	100	1.121.546.000	100	1.151.546.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				215.125.000		215.125.000		235.125.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	215.125.000	1	215.125.000	1	235.125.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				77.870.000		77.870.000		87.870.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	77.870.000	1	77.870.000	1	87.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				631.551.000		631.551.000		631.551.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	631.551.000	12	631.551.000	12	631.551.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.067.613.000		1.067.613.000		1.191.613.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.067.613.000	1	1.067.613.000	1	1.191.613.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar										
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				507.613.000		507.613.000		631.613.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	507.613.000	1	507.613.000	1	631.613.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				260.000.000		260.000.000		260.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	260.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.438.000.000		1.438.000.000		1.539.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.438.000.000	1	1.438.000.000	1	1.539.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				430.000.000		430.000.000		519.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	430.000.000	12	430.000.000	12	519.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.000.000.000		1.000.000.000		1.012.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.012.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					650.000.000		650.000.000		908.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	650.000.000	1	650.000.000	1	908.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				280.000.000		280.000.000		405.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	280.000.000	1	280.000.000	1	405.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				240.000.000		240.000.000		373.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	240.000.000	1	240.000.000	1	373.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	154.000.000	100	154.000.000	100	160.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000		53.000.000		59.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	53.000.000	1	53.000.000	1	59.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		50.000.000		56.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					71.000.000		71.000.000		71.000.000		
						Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Unit	1	71.000.000	1	71.000.000	1	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	316.000.000	100	316.000.000	100	316.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					224.000.000		224.000.000		224.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	224.000.000	100	224.000.000	100	224.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				216.500.000		216.500.000		216.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	216.500.000	1	216.500.000	1	216.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.500.000		55.500.000		55.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	55.500.000	1	55.500.000	1	55.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.000.000		53.000.000		53.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	53.000.000	12	53.000.000	12	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.500.000		36.500.000		36.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.500.000		21.500.000		21.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	21.500.000	1	21.500.000	1	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**801.678.000**		**801.678.000**		**813.032.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	82	801.678.000	82	82	82	813.032.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						801.678.000		801.678.000		813.032.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	801.678.000	100	801.678.000	100	813.032.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					801.678.000		801.678.000		813.032.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	801.678.000	100	801.678.000	100	813.032.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				399.178.000		399.178.000		418.310.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	399.178.000	5	399.178.000	5	418.310.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				402.500.000		402.500.000		394.722.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	402.500.000	1	402.500.000	1	394.722.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan									**46.480.988.000**		**50.700.988.000**		**50.632.996.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	1		1		1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Garam								**760.245.000**		**970.245.000**		**939.027.000**		
						Produksi garam	Ton	133320	760.245.000	133320	133.320	133320	939.027.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						760.245.000		970.245.000		939.027.000		
						Persentase produksi garam	%	1	760.245.000	1	970.245.000	1	939.027.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
		3.25.02.1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					760.245.000		970.245.000		939.027.000		
						Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	25	63.700.000	25	52.805.000	25	50.605.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				63.700.000		52.805.000		50.605.000		
						Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina	Orang	125	63.700.000	150	52.805.000	150	50.605.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	4	89.140.000	4	89.750.000	4	78.758.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				89.140.000		89.750.000		78.758.000		
						Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	Orang	100	89.140.000	90	89.750.000	90	78.758.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	5	594.605.000	5	814.890.000	5	798.564.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				594.605.000		814.890.000		798.564.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	Jenis	2	307.880.000	1	526.100.000	1	537.092.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	Ha	20	286.725.000	15	288.790.000	15	261.472.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Lokasi	5	12.800.000	5	12.800.000	5	11.100.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				12.800.000		12.800.000		11.100.000		
						Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam	Kabupaten/Kota	9	12.800.000	9	12.800.000	9	11.100.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Produksi Perikanan								**45.720.743.000**		**49.730.743.000**		**49.693.969.000**		
						Produksi perikanan	Ton	927350	45.720.743.000	927350	927.350	927350	49.693.969.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						32.670.252.000		36.125.252.000		35.832.791.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	%	72.72	733.964.000	72.72	733.964.000	72.72	734.468.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					733.964.000		733.964.000		734.468.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	301.660.000	5	301.660.000	5	301.660.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				301.660.000		301.660.000		301.660.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	80	68.000.000	5	68.000.000	5	68.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	65	14.800.000	30	14.800.000	30	14.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.860.000	12	18.860.000	12	18.860.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	36.500.000	5	36.500.000	5	36.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				36.500.000		36.500.000		36.500.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	40	11.500.000	30	11.500.000	30	11.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	70	25.000.000	70	25.000.000	70	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	14	54.404.000	14	54.404.000	14	54.404.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				54.404.000		54.404.000		54.404.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	54.404.000	1	54.404.000	1	54.404.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	40		40		40		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan										
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1		1		1		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	5		5		5		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan										
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	15		0		0		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	20	341.400.000	20	341.400.000	20	341.904.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				341.400.000		341.400.000		341.904.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	341.400.000	4	341.400.000	4	341.904.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	481.375.000	100	631.375.000	100	703.775.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					481.375.000		631.375.000		703.775.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	358.710.000	9	508.710.000	9	481.110.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				358.710.000		508.710.000		481.110.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2700	284.392.000	2700	284.392.000	2700	256.792.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PATI
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	50.368.000	100	200.368.000	100	200.368.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH –> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	300	7.950.000	30	7.950.000	30	7.950.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	19.425.000	7	19.425.000	7	19.425.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				19.425.000		19.425.000		19.425.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2700	1.550.000	2700	1.550.000	2700	1.550.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	17.875.000	100	17.875.000	100	17.875.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	29	94.340.000	29	94.340.000	29	194.340.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				94.340.000		94.340.000		194.340.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	94.340.000	1	94.340.000	1	194.340.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	65	1.440.000	65	1.440.000	65	1.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				1.440.000		1.440.000		1.440.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	1.440.000	0	1.440.000	0	1.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	85	6.660.000	85	6.660.000	85	6.660.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				6.660.000		6.660.000		6.660.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30000	6.660.000	30000	6.660.000	30000	6.660.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	6	800.000	6	800.000	6	800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				800.000		800.000		800.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	800.000	1	800.000	1	800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	63.63	587.181.000	63.63	587.181.000	63.63	559.581.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					587.181.000		587.181.000		559.581.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	31.215.000	5	31.215.000	5	31.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				31.215.000		31.215.000		31.215.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	60	16.600.000	60	16.600.000	60	16.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	45	6.555.000	45	6.555.000	45	6.555.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	4.060.000	12	4.060.000	12	4.060.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	45	4.000.000	45	4.000.000	45	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	3	26.791.000	3	26.791.000	3	19.591.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				26.791.000		26.791.000		19.591.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	50	12.025.000	50	12.025.000	50	6.025.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	60	14.766.000	60	14.766.000	60	13.566.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	40	40.000.000	40	40.000.000	40	46.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		40.000.000		46.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	40.000.000	3	40.000.000	3	46.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	107.975.000	50	107.975.000	50	107.975.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				107.975.000		107.975.000		107.975.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	107.975.000	2	107.975.000	2	107.975.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	65	331.200.000	65	331.200.000	65	304.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				331.200.000		331.200.000		304.800.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	50	331.200.000	50	331.200.000	10	304.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	1.105.369.000	70	1.255.369.000	70	1.255.369.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.105.369.000		1.255.369.000		1.255.369.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	69.350.000	9	219.350.000	9	219.350.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				69.350.000		219.350.000		219.350.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2700	10.000.000	4500	10.000.000	4500	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	1000	20.000.000	1000	170.000.000	1000	170.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	19.700.000	12	19.700.000	12	19.700.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	19.650.000	100	19.650.000	100	19.650.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	34.290.000	6	34.290.000	6	34.290.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				34.290.000		34.290.000		34.290.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1000	16.740.000	1000	16.740.000	1000	16.740.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	2	17.550.000	2	17.550.000	2	17.550.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	458.710.000	50	458.710.000	50	458.722.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				458.710.000		458.710.000		458.722.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	458.710.000	1	458.710.000	1	458.722.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3000	20.000.000	3000	20.000.000	3000	20.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	5	503.019.000	5	503.019.000	5	503.007.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				503.019.000		503.019.000		503.007.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	503.019.000	1	503.019.000	1	503.007.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	581.985.000	72	581.985.000	72	582.713.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					581.985.000		581.985.000		582.713.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	65.295.000	5	65.295.000	5	65.282.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				65.295.000		65.295.000		65.282.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	128	30.220.000	140	30.220.000	140	38.424.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	10	17.725.000	10	17.725.000	10	16.158.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	9.350.000	30	9.350.000	30	2.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	3	25.005.000	3	25.005.000	3	22.305.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				25.005.000		25.005.000		22.305.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	110	18.545.000	110	18.545.000	110	15.845.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	42	6.460.000	41	6.460.000	41	6.460.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	18.805.000	20	18.805.000	20	21.490.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				18.805.000		18.805.000		21.490.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	18.805.000	1	18.805.000	1	21.490.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	7	11.880.000	7	11.880.000	7	12.636.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				11.880.000		11.880.000		12.636.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10	11.880.000	10	11.880.000	10	12.636.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	261.000.000	30	261.000.000	30	261.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				261.000.000		261.000.000		261.000.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	261.000.000	3	261.000.000	3	261.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	63	4.746.790.000	63	4.746.790.000	63	4.744.990.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					4.746.790.000		4.746.790.000		4.744.990.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	120.068.000	5	120.068.000	5	119.768.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				120.068.000		120.068.000		119.768.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	30	73.860.000	23	73.860.000	23	91.560.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	108	21.233.000	108	21.233.000	108	12.233.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	9.575.000	12	9.575.000	12	9.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	90	15.400.000	40	15.400.000	40	6.400.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	351.868.000	7	351.868.000	7	350.368.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				351.868.000		351.868.000		350.368.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	165	341.868.000	165	341.868.000	165	340.368.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	30		30		30		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan										
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1		1		1		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	54	4.272.854.000	54	4.272.854.000	54	4.272.854.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				4.272.854.000		4.272.854.000		4.272.854.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	4.272.854.000	1	4.272.854.000	1	4.272.854.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	50	2.000.000	50	2.000.000	50	2.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	80	2.000.000	80	2.000.000	80	2.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	20		20		20		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan										
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	2		1		1		SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	905.895.000	81	1.805.895.000	81	1.882.295.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					905.895.000		1.805.895.000		1.882.295.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	312.285.000	6	1.177.385.000	6	1.092.185.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				312.285.000		1.177.385.000		1.092.185.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	232.095.000	300	1.097.195.000	300	996.570.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	50	10.440.000	50	10.440.000	50	10.440.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	61.250.000	12	61.250.000	12	76.675.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	8.500.000	40	8.500.000	40	8.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4	23.275.000	4	23.275.000	4	23.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				23.275.000		23.275.000		23.275.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	13.275.000	100	13.275.000	100	13.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	42	8.775.000	42	8.775.000	42	13.975.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				8.775.000		8.775.000		13.975.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	8.775.000	1	8.775.000	1	13.975.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	55	175.100.000	55	210.000.000	55	394.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				175.100.000		210.000.000		394.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	175.100.000	1	210.000.000	1	394.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	20		20		20		SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan										
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	100		50		50		SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	7	386.460.000	7	386.460.000	7	358.860.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				386.460.000		386.460.000		358.860.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	2	386.460.000	1	386.460.000	1	358.860.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	1.120.316.000	100	1.270.316.000	100	1.322.604.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.120.316.000		1.270.316.000		1.322.604.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	113.011.000	6	113.011.000	6	123.409.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				113.011.000		113.011.000		123.409.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	3500	9.825.000	3500	9.825.000	5500	4.223.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	3000	40.000.000	3000	40.000.000	5500	57.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	30.186.000	12	30.186.000	12	30.186.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	80	33.000.000	0	33.000.000	0	32.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	123.269.000	5	123.269.000	5	116.769.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				123.269.000		123.269.000		116.769.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	3000	79.200.000	3000	79.200.000	750	74.700.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	10	44.069.000	10	44.069.000	60	42.069.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	42.86	60.960.000	42.86	60.960.000	42.86	174.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				60.960.000		60.960.000		174.960.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	60.960.000	1	60.960.000	1	174.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	100	74.600.000	100	74.600.000	100	74.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.600.000		74.600.000		74.600.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	74.600.000	1	74.600.000	1	74.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	25	33.876.000	25	183.876.000	25	180.966.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				33.876.000		183.876.000		180.966.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3000	33.876.000	3000	183.876.000	15000	180.966.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	3.7	714.600.000	3.7	714.600.000	3.7	651.900.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				714.600.000		714.600.000		651.900.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	714.600.000	1	714.600.000	1	651.900.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	62.62	886.910.000	62.62	886.910.000	62.62	845.216.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					886.910.000		886.910.000		845.216.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	75.940.000	6	75.940.000	6	75.940.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				75.940.000		75.940.000		75.940.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	100	13.435.000	50	13.435.000	50	13.435.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	10	14.865.000	5	14.865.000	5	14.865.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	17.640.000	12	17.640.000	12	17.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	3500	20.000.000	2000	20.000.000	2000	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	43	20.000.000	43	20.000.000	43	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	74.990.000	20	74.990.000	20	74.990.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.990.000		74.990.000		74.990.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	74.990.000	1	74.990.000	1	74.990.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	46	325.570.000	46	325.570.000	46	283.876.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				325.570.000		325.570.000		283.876.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	325.570.000	1	325.570.000	1	283.876.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	6	11.910.000	6	11.910.000	6	11.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				11.910.000		11.910.000		11.910.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	60	11.910.000	60	11.910.000	60	11.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	18	358.500.000	18	358.500.000	18	358.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				358.500.000		358.500.000		358.500.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	2	358.500.000	1	358.500.000	1	358.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	1.216.749.000	72	1.366.749.000	72	1.335.549.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.216.749.000		1.366.749.000		1.335.549.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	824.845.000	9	974.845.000	9	974.845.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				824.845.000		974.845.000		974.845.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2500	657.408.000	2000	657.408.000	2000	657.408.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	108.650.000	100	258.650.000	5000	258.650.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	44.577.000	12	44.577.000	12	44.577.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	300	14.210.000	60	14.210.000	60	14.210.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	66.682.000	7	66.682.000	7	90.522.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				66.682.000		66.682.000		90.522.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1100	5.400.000	1100	5.400.000	1100	5.400.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	61.282.000	100	61.282.000	100	85.122.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	16	7.200.000	16	7.200.000	16	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	203.250.000	60	203.250.000	60	203.250.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				203.250.000		203.250.000		203.250.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	203.250.000	1	203.250.000	1	203.250.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	85	32.212.000	85	32.212.000	85	32.212.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				32.212.000		32.212.000		32.212.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	7000	32.212.000	15000	32.212.000	15000	32.212.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	15	82.560.000	15	82.560.000	15	27.520.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				82.560.000		82.560.000		27.520.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	82.560.000	1	82.560.000	1	27.520.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81.82	534.952.000	81.82	2.334.952.000	81.82	2.334.952.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					534.952.000		2.334.952.000		2.334.952.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	21.200.000	7	21.200.000	7	21.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				21.200.000		21.200.000		21.200.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	900	2.500.000	850	2.500.000	950	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	70	7.000.000	60	7.000.000	60	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	9.200.000	40	9.200.000	40	9.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4		4		4		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan										
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	40		0		0		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	70		0		0		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	14	70.000.000	14	70.000.000	14	70.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	39	433.352.000	39	2.233.352.000	39	2.233.352.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				433.352.000		2.233.352.000		2.233.352.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	433.352.000	1	2.233.352.000	3	2.233.352.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	5	3.900.000	5	3.900.000	5	3.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				3.900.000		3.900.000		3.900.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10	3.900.000	10	3.900.000	65	3.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	%	9	6.500.000	9	6.500.000	9	6.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				6.500.000		6.500.000		6.500.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	6.500.000	1	6.500.000	5	6.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	19.768.766.000	5	19.923.766.000	5	19.531.279.000	Bidang Perikanan Tangkap	
		3.25.03.1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					17.617.430.000		17.617.430.000		17.307.767.000		
						Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	17.491.025.000	3	17.491.025.000	3	17.246.262.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				17.491.025.000		17.491.025.000		17.246.262.000		
						Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya	Kelompok	2	20.285.000	2	20.285.000	2	20.285.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya	Lokasi	1	17.470.740.000	1	17.470.740.000	1	17.225.977.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	327350	126.405.000	327350	126.405.000	327350	61.505.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				126.405.000		126.405.000		61.505.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data	Kabupaten/Kota	34	126.405.000	34	126.405.000	34	61.505.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.03.1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.151.336.000		2.306.336.000		2.223.512.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	240	1.046.336.000	240	1.221.336.000	240	1.138.512.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.046.336.000		1.221.336.000		1.138.512.000		
						Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	Unit	160	245.436.000	160	245.436.000	160	275.961.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	Unit	40	800.900.000	40	975.900.000	40	862.551.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	%	0.25	1.105.000.000	0.25	1.085.000.000	0.25	1.085.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.105.000.000		1.085.000.000		1.085.000.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	50	1.105.000.000	50	1.085.000.000	50	1.085.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	Lokasi	1		0		0		SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						13.050.491.000		13.605.491.000		13.861.178.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	853.195.000	100	853.195.000	100	825.007.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
		3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					853.195.000		853.195.000		825.007.000		
						Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	350	447.150.000	350	447.150.000	350	418.962.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
		3.25.04.1.05.0006			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				447.150.000		447.150.000		418.962.000		
						Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan	Kabupaten/Kota	35	45.070.000	35	45.070.000	35	43.282.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Lokasi	35	389.480.000	35	389.480.000	35	363.080.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingungan	Orang	350	12.600.000	350	12.600.000	350	12.600.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	20	391.045.000	20	391.045.000	20	391.045.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				391.045.000		391.045.000		391.045.000		
						Jumlah Parameter Pengujian	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	400	59.337.000	400	59.337.000	400	59.337.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat)	Sertifikat	2	181.708.000	2	181.708.000	2	181.708.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkat Kompetensinya	%	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas	Jenis	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	9.976.701.000	5	9.976.701.000	5	10.247.640.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
		3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					2.173.755.000		2.173.755.000		2.173.755.000		
						Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkat Keterampilannya	Orang	10	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	2.153.755.000	1	2.153.755.000	1	2.153.755.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.582.400.000		1.582.400.000		1.582.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangung	Unit	5	1.582.400.000	1	1.582.400.000	1	1.582.400.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				571.355.000		571.355.000		571.355.000		
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	11500	571.355.000	1500	571.355.000	1500	571.355.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					7.802.946.000		7.802.946.000		8.073.885.000		
						Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Lokasi	9	7.802.946.000	9	7.802.946.000	9	8.073.885.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		3.25.04.1.06.0002			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.802.946.000		7.802.946.000		8.073.885.000		
						Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi	Ekor	100000	41.000.000	100000	41.000.000	100000	41.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi	Unit	9	2.490.905.000	5	2.490.905.000	5	2.967.840.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Produksi Benih Unggul	Ekor	30000000	345.000.000	30000000	345.000.000	30000000	345.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu	Ekor	5000	2.767.380.000	5000	2.767.380.000	5000	2.677.640.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	10000	2.158.661.000	10000	2.158.661.000	10000	2.042.405.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Produksi perikanan budidaya	Ton	600000	2.220.595.000	600000	2.775.595.000	600000	2.788.531.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)					249.650.000		249.650.000		260.965.000		

				Daerah Provinsi											
						Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	117	249.650.000	117	249.650.000	117	260.965.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.01.0002			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				170.670.000		170.670.000		174.545.000		
						Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	Unit	5	115.730.000	5	115.730.000	5	118.090.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	Unit	10	43.520.000	10	43.520.000	10	45.905.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	Unit	1	11.420.000	1	11.420.000	1	10.550.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				78.980.000		78.980.000		86.420.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data	Kabupaten/Ko	35	78.980.000	35	78.980.000	35	86.420.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					1.970.945.000		2.525.945.000		2.527.566.000		
						Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	2	1.970.945.000	2	2.525.945.000	2	2.527.566.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.970.945.000		2.525.945.000		2.527.566.000		
						Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	30	1.970.945.000	15	2.525.945.000	15	2.527.566.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**110.092.784.000**		**114.618.944.000**		**112.896.220.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kesejahteraan peternak									**648.150.000**		**948.150.000**		**948.150.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100.5		100.5		100.5		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya nilai tambah produk hasil ternak								**648.150.000**		**948.150.000**		**948.150.000**		
						Persentase nilai tambah produk hasil ternak	%	4.5	648.150.000	4.5	5	4.5	948.150.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						400.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	10	400.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian					400.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	Unit	11	400.000.000	11	700.000.000	11	700.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.03.1.01.0019			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				400.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar	Kelompok	5	97.945.000	5	122.945.000	5	135.961.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan	Kelompok	1	44.450.000	1	64.450.000	1	49.450.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & pemasaran	Kelompok	10	183.350.000	10	436.350.000	10	422.930.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran	Orang	100	74.255.000	100	76.255.000	100	91.659.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						248.150.000		248.150.000		248.150.000		
						Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	2.8	248.150.000	2.8	248.150.000	2.8	248.150.000	Bidang Veteriner	
		3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					248.150.000		248.150.000		248.150.000		
						Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV	Buah	12	248.150.000	12	248.150.000	12	248.150.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				248.150.000		248.150.000		248.150.000		
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV	Unit	35	59.800.000	35	59.800.000	35	59.800.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
						jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi	Unit	10	188.350.000	10	188.350.000	10	188.350.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**52.410.203.000**		**53.643.102.000**		**50.078.839.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		70		70		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**51.966.013.000**		**53.073.912.000**		**49.509.649.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	51.966.013.000	81	81	81	49.509.649.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						51.966.013.000		53.073.912.000		49.509.649.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.902.565.000	100	4.244.565.000	100	4.296.005.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					826.225.000		886.005.000		942.061.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	826.225.000	100	886.005.000	100	942.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.000.000		31.000.000		31.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				53.950.000		53.950.000		53.950.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	53.950.000	1	53.950.000	1	53.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				265.450.000		265.450.000		265.450.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	265.450.000	1	265.450.000	1	265.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.600.000		18.600.000		18.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	18.600.000	1	18.600.000	1	18.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				142.675.000		142.675.000		154.310.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	142.675.000	1	142.675.000	1	154.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				293.500.000		353.280.000		397.701.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	293.500.000	12	353.280.000	12	397.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.050.000		1.050.000		1.050.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	1.050.000	12	1.050.000	12	1.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					428.886.000		428.886.000		302.389.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	428.886.000	1	428.886.000	1	302.389.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				285.000.000		285.000.000		100.058.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	285.000.000	1	285.000.000	1	100.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		55.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				132.386.000		132.386.000		145.831.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	132.386.000	1	132.386.000	1	145.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.444.480.000		1.444.480.000		1.453.980.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.444.480.000	1	1.444.480.000	1	1.453.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.480.000		11.480.000		7.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	11.480.000	12	11.480.000	12	7.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000		260.000.000		271.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	260.000.000	12	260.000.000	12	271.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.160.000.000		1.160.000.000		1.162.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.160.000.000	12	1.160.000.000	12	1.162.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.202.974.000		1.485.194.000		1.597.575.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.202.974.000	1	1.485.194.000	1	1.597.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				167.794.000		167.794.000		167.254.000		
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	167.794.000	1	167.794.000	1	167.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				283.180.000		311.400.000		311.400.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	283.180.000	1	311.400.000	1	311.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				336.000.000		590.000.000		703.046.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	336.000.000	1	590.000.000	1	703.046.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000		399.875.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	400.000.000	1	400.000.000	1	399.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.568.500.000	100	3.914.810.000	100	3.914.060.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					458.050.000		540.110.000		588.960.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	458.050.000	100	540.110.000	100	588.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.300.000		19.999.000		19.999.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.300.000	1	19.999.000	1	19.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.000.000		28.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		1	28.000.000	1	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				117.135.000		137.256.000		166.506.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	117.135.000	1	137.256.000	1	166.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								5.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1		0		0	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.615.000		50.615.000		50.615.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	50.615.000	1	50.615.000	1	50.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				260.000.000		284.240.000		298.240.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	260.000.000	12	284.240.000	12	298.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.952.950.000		3.007.200.000		2.957.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.952.950.000	1	3.007.200.000	1	2.957.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				285.000.000		310.000.000		343.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	285.000.000	12	310.000.000	12	343.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.667.950.000		2.697.200.000		2.614.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.667.950.000	12	2.697.200.000	12	2.614.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.500.000		367.500.000		367.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	157.500.000	1	367.500.000	1	367.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		86.000.000		86.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	50.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				96.000.000		119.500.000		119.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	96.000.000	1	119.500.000	1	119.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						150.000.000		150.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.500.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	11.500.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.900.000.000	100	2.023.369.000	100	1.986.829.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					230.500.000		268.869.000		319.962.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	230.500.000	100	268.869.000	100	319.962.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		0		0		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000		148.019.000		141.112.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	130.000.000	1	148.019.000	1	141.112.000	Balai veteriner semarang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		51.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	51.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		65.350.000		106.850.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	45.000.000	12	65.350.000	12	106.850.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500.000		500.000		500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	500.000	12	500.000	12	500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									23.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		1		1	23.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1		0		0		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1		0		0		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		0		0		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								23.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		0		0	23.500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.529.500.000		1.564.500.000		1.493.367.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.529.500.000	1	1.564.500.000	1	1.493.367.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	500.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		200.000.000		215.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	215.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		75.000.000		72.167.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	40.000.000	1	75.000.000	1	72.167.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.287.500.000		1.287.500.000		1.205.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.287.500.000	12	1.287.500.000	12	1.205.700.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.000.000		190.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	140.000.000	1	190.000.000	1	150.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		0		0		Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		100.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	100.000.000	1	60.000.000	Balai veteriner semarang	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Balai veteriner semarang	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	1.898.927.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					432.790.000		432.790.000		432.790.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	432.790.000	100	432.790.000	100	432.790.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.500.000		28.500.000		28.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	28.500.000	1	28.500.000	1	28.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.250.000		11.250.000		11.250.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	11.250.000	1	11.250.000	1	11.250.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.820.000		21.820.000		21.820.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	21.820.000	1	21.820.000	1	21.820.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.140.000		100.140.000		100.140.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	100.140.000	1	100.140.000	1	100.140.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				46.500.000		46.500.000		46.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	46.500.000	1	46.500.000	1	46.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.020.000		24.020.000		24.020.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	24.020.000	1	24.020.000	1	24.020.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				192.060.000		192.060.000		192.060.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	192.060.000	12	192.060.000	12	192.060.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					106.210.000		106.210.000		106.210.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	106.210.000	1	106.210.000	1	106.210.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				57.210.000		57.210.000		57.210.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	57.210.000	1	57.210.000	1	57.210.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.128.500.000		1.128.500.000		1.127.427.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.128.500.000	1	1.128.500.000	1	1.127.427.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		2.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	2.750.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		240.000.000		290.177.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	290.177.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.000.000		28.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	28.000.000	1	28.000.000	1	20.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				855.500.000		855.500.000		814.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	855.500.000	12	855.500.000	12	814.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.500.000		232.500.000		232.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	232.500.000	1	232.500.000	1	232.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				44.000.000		44.000.000		44.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.000.000		52.000.000		52.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	52.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.500.000		52.500.000		52.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	52.500.000	1	52.500.000	1	52.500.000	Balai veteriner boyolali	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.000.000		23.000.000		23.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	Balai veteriner boyolali	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.694.948.000	100	40.991.168.000	100	37.413.828.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.240.648.000		35.265.648.000		31.719.087.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	35.240.648.000	1	35.265.648.000	1	31.719.087.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				34.954.948.000		34.954.948.000		31.408.387.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	205	34.954.948.000	205	34.954.948.000	205	31.408.387.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				266.400.000		266.400.000		266.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	266.400.000	12	266.400.000	12	266.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				16.000.000		41.000.000		41.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	16.000.000	1	41.000.000	1	41.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				900.000		900.000		900.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	900.000	12	900.000	12	900.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				900.000		900.000		900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	900.000	1	900.000	1	900.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					204.300.000		229.300.000		211.469.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	204.300.000	1	229.300.000	1	211.469.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		225.000.000		207.169.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	1	225.000.000	1	207.169.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				700.000		700.000		700.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	700.000	1	700.000	1	700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				600.000		600.000		600.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	600.000	1	600.000	1	600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					34.300.000		34.300.000		34.300.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	34.300.000	1	34.300.000	1	34.300.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				600.000		600.000		600.000		
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	1	600.000	1	600.000	1	600.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				33.700.000		33.700.000		33.700.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1	33.700.000	1	33.700.000	1	33.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					47.684.000		168.904.000		168.904.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	47.684.000	100	168.904.000	100	168.904.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						121.220.000		121.220.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			209	121.220.000	209	121.220.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.074.000		5.074.000		5.074.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	5.074.000	1	5.074.000	1	5.074.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.110.000		35.110.000		35.110.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	35.110.000	20	35.110.000	20	35.110.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					482.562.000		556.062.000		556.062.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	482.562.000	100	556.062.000	100	556.062.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.484.000		32.484.000		32.484.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	32.484.000	1	32.484.000	1	32.484.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.341.000		55.341.000		55.341.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	55.341.000	1	55.341.000	1	55.341.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.698.000		18.698.000		18.698.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.698.000	1	18.698.000	1	18.698.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				41.300.000		41.300.000		41.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	41.300.000	1	41.300.000	1	41.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.050.000		45.050.000		45.050.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	45.050.000	1	45.050.000	1	45.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				188.164.000		241.664.000		241.664.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	188.164.000	12	241.664.000	12	241.664.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.275.000		10.275.000		10.275.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	10.275.000	12	10.275.000	12	10.275.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.250.000		6.250.000		6.250.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.250.000	1	6.250.000	1	6.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					98.250.000		98.250.000		98.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	98.250.000	1	98.250.000	1	98.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.250.000		40.250.000		40.250.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	40.250.000	1	40.250.000	1	40.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.121.604.000		4.121.604.000		4.075.304.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.121.604.000	1	4.121.604.000	1	4.075.304.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		800.000		800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	800.000	12	800.000	12	800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		650.000.000		615.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	650.000.000	12	650.000.000	12	615.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.464.804.000		3.464.804.000		3.453.504.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3.464.804.000	12	3.464.804.000	12	3.453.504.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.600.000		517.100.000		550.452.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	465.600.000	1	517.100.000	1	550.452.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				197.500.000		224.000.000		224.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	197.500.000	1	224.000.000	1	224.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				500.000		500.000		500.000		

						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	1	500.000	1	500.000	1	500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				145.600.000		145.600.000		165.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	145.600.000	1	145.600.000	1	165.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		55.000.000		70.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		48.352.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	48.352.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**444.190.000**		**569.190.000**		**569.190.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.2	444.190.000	3.2	3	3.2	569.190.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						444.190.000		569.190.000		569.190.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	444.190.000	100	569.190.000	100	569.190.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					444.190.000		569.190.000		569.190.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	444.190.000	100	569.190.000	100	569.190.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				222.095.000		297.895.000		297.895.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	222.095.000	5	297.895.000	5	297.895.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				222.095.000		271.295.000		271.295.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	222.095.000	1	271.295.000	1	271.295.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan									**57.508.598.000**		**65.697.919.000**		**65.552.923.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3		3		3		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Tercapainya Produksi Daging								**53.614.080.000**		**59.415.046.000**		**59.195.112.000**		
						Produksi daging	Kg	457685292	53.614.080.000	457685292	457.685.292	457685292	59.195.112.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						26.857.861.000		29.298.196.000		29.152.604.000		
						Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	11.222.610.000	4	11.228.210.000	4	11.228.210.000	Bidang Veteriner	
		3.27.02.1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					11.222.610.000		11.228.210.000		11.228.210.000		
						Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	Laporan	4	11.222.610.000	4	11.228.210.000	4	11.228.210.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				11.222.610.000		11.228.210.000		11.228.210.000		
						Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi	Unit	3	189.535.000	3	195.135.000	3	195.135.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan	Unit	12	11.033.075.000	12	11.033.075.000	12	11.033.075.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3726434	9.204.580.000	3726434	11.137.730.000	3726434	11.080.844.000	Bidang Budidaya	
		3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					28.480.000		918.650.000		858.880.000		
						Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	10	20.000.000	10	884.045.000	10	825.810.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				20.000.000		884.045.000		825.810.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	5	20.000.000	5	884.045.000	5	825.810.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	2	8.480.000	2	34.605.000	2	33.070.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				8.480.000		34.605.000		33.070.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	2		2	12.720.000	2	10.985.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong	Orang	50	8.480.000	50	21.885.000	50	22.085.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					9.176.100.000		10.219.080.000		10.221.964.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	2	3.598.060.000	2	3.822.140.000	2	3.816.124.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3.598.060.000		3.822.140.000		3.816.124.000		
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong	Orang	50	14.310.000	50	16.810.000	50	16.810.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong	Unit	4	3.583.750.000	4	3.805.330.000	4	3.799.314.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong	Buah	1	5.578.040.000	1	6.396.940.000	1	6.405.840.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				5.578.040.000		6.396.940.000		6.405.840.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	2	44.670.000	2	84.670.000	2	77.670.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong	Orang	50	39.310.000	50	30.910.000	50	30.910.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong	Unit	4	5.494.060.000	4	6.281.360.000	4	6.297.260.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	102.390.000	1	271.790.000	1	262.170.000	Bidang Veteriner	
		3.27.02.1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					102.390.000		271.790.000		262.170.000		
						Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan	Ekor	10000	102.390.000	10000	271.790.000	10000	262.170.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				102.390.000		271.790.000		262.170.000		
						Jumlah obat hewan yang di fasilitasi	Unit	10000	102.390.000	10000	271.790.000	10000	262.170.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	3.180.846.000	1	3.355.031.000	1	3.328.285.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					3.180.846.000		3.355.031.000		3.328.285.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	513.125.000	1	553.385.000	1	553.385.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				513.125.000		553.385.000		553.385.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia potong	Ekor	20013	513.125.000	28934	553.385.000	28934	553.385.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging	%	1	2.667.721.000	1	2.801.646.000	1	2.774.900.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.667.721.000		2.801.646.000		2.774.900.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB	Ekor	60	989.550.000	51	1.022.950.000	51	1.019.350.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Jumlah produksi ternak ruminansia potong	Ekor	143	1.678.171.000	120	1.778.696.000	120	1.755.550.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	3.147.435.000	1	3.305.435.000	1	3.253.095.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					3.147.435.000		3.305.435.000		3.253.095.000		
						Jumlah Produksi semen segar	Angka	26250	2.038.500.000	26250	2.168.500.000	26250	2.116.160.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.038.500.000		2.168.500.000		2.116.160.000		
						Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya	Ekor	26	2.038.500.000	21	2.168.500.000	21	2.116.160.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
						Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi	%	80	1.108.935.000	80	1.136.935.000	80	1.136.935.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.108.935.000		1.136.935.000		1.136.935.000		
						Jumlah semen beku yang terdistribusi	Dosis	420000	1.108.935.000	390000	1.136.935.000	390000	1.136.935.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						333.410.000		2.727.410.000		2.643.710.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	10	333.410.000	10	2.727.410.000	10	2.643.710.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian					333.410.000		2.727.410.000		2.643.710.000		
						Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong	Kelompok	3	2.820.000	3	146.820.000	3	146.520.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2.820.000		146.820.000		146.520.000		
						Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	Kelompok	3	2.820.000	3	146.820.000	3	146.520.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong	Unit	1	6.480.000	1	6.480.000	1	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				6.480.000		6.480.000		6.480.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong	Orang	30	6.480.000	30	6.480.000	30	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong	Kelompok	4	324.110.000	4	2.574.110.000	4	2.490.710.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				324.110.000		2.574.110.000		2.490.710.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong	Unit	4	324.110.000	4	2.574.110.000	4	2.490.710.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						14.732.035.000		15.333.666.000		15.343.024.000		
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	Dokumen	4	10.968.185.000	4	11.093.185.000	4	11.093.185.000	Bidang Veteriner	
		3.27.04.1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					10.968.185.000		11.093.185.000		11.093.185.000		
						Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS)	Laporan	4	10.968.185.000	4	11.093.185.000	4	11.093.185.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.1.01.0007			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				10.968.185.000		11.093.185.000		11.093.185.000		
						Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS	Ekor	2000	10.783.185.000	2000	10.854.435.000	2000	10.834.955.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
						Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi	Ekor	100000	185.000.000	100000	238.750.000	100000	258.230.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	800.000.000	4	1.050.000.000	4	1.050.000.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					800.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	589.275.000	4	822.213.000	4	822.213.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				589.275.000		822.213.000		822.213.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan	sampel	25700	589.275.000	15000	822.213.000	15000	822.213.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	124.692.000	4	124.692.000	4	124.692.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				124.692.000		124.692.000		124.692.000		
						Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan	Ekor	1650000	124.692.000	1650000	124.692.000	1650000	124.692.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	86.033.000	4	103.095.000	4	103.095.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				86.033.000		103.095.000		103.095.000		
						Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan	Ekor	13850	86.033.000	5000	103.095.000	5000	103.095.000	Balai veteriner boyolali	
						Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	800.000.000	4	926.631.000	4	935.989.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					800.000.000		926.631.000		935.989.000		
						Jumlah laporan hasil pengujian sampel	Laporan	4	593.283.000	4	658.283.000	4	676.641.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				593.283.000		658.283.000		676.641.000		
						Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara	sampel	25000	593.283.000	25000	658.283.000	25000	676.641.000	Balai veteriner semarang	
						Jumlah laporan lalu lintas ternak	Laporan	4	87.300.000	4	87.300.000	4	78.300.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				87.300.000		87.300.000		78.300.000		
						Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah jateng Utara	Ekor	1700000	87.300.000	1700000	87.300.000	1700000	78.300.000	Balai veteriner semarang	
						Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	Laporan	4	119.417.000	4	181.048.000	4	181.048.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.0004			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				119.417.000		181.048.000		181.048.000		
						Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara	Ekor	14250	119.417.000	14250	181.048.000	14250	181.048.000	Balai veteriner semarang	
						Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	3	2.163.850.000	3	2.263.850.000	3	2.263.850.000	Bidang Veteriner	
		3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					2.163.850.000		2.263.850.000		2.263.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif	Unit	3	2.163.850.000	3	2.263.850.000	3	2.263.850.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.0001			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				2.163.850.000		2.263.850.000		2.263.850.000		
						Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif	Unit	5	2.163.850.000	5	2.263.850.000	5	2.263.850.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						11.690.774.000		12.055.774.000		12.055.774.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1.02	11.690.774.000	1.02	12.055.774.000	1.02	12.055.774.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
		3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					11.690.774.000		12.055.774.000		12.055.774.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk	Kelompok	10	11.690.774.000	10	12.055.774.000	10	12.055.774.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				11.690.774.000		12.055.774.000		12.055.774.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong	Kelompok	34	11.433.338.000	17	11.798.338.000	17	11.793.318.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong	Orang	1920	257.436.000	580	257.436.000	580	262.456.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
	Tercapainya Produksi Susu								**825.289.000**		**1.969.774.000**		**2.069.396.000**		
						Produksi susu	Kg	93864946	825.289.000	93864946	93.864.946	93864946	2.069.396.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						616.309.000		1.700.794.000		1.727.516.000		
						Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	112876	118.890.000	112876	1.187.300.000	112876	1.250.721.000	Bidang Budidaya	
		3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi							599.770.000		664.915.000		
						Jumlah kelompok peternak perah yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	6		6	563.500.000	6	634.280.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan						563.500.000		634.280.000		
						Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	5		5	563.500.000	5	634.280.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	2		2	36.270.000	2	30.635.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan						36.270.000		30.635.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	2		2	12.720.000	2	10.985.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah	Orang	50		50	23.550.000	50	19.650.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					118.890.000		587.530.000		585.806.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	2	33.420.000	2	107.360.000	2	109.836.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				33.420.000		107.360.000		109.836.000		
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah	Orang	50	14.310.000	50	16.810.000	50	16.810.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah	Unit	4	19.110.000	4	90.550.000	4	93.026.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah	Buah	1	85.470.000	1	480.170.000	1	475.970.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				85.470.000		480.170.000		475.970.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	29.650.000	1	39.650.000	1	35.450.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah	Orang	50	55.820.000	50	50.520.000	50	50.520.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak perah	Unit	2		2	390.000.000	2	390.000.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	497.419.000	1	513.494.000	1	476.795.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					497.419.000		513.494.000		476.795.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu	%	1	497.419.000	1	513.494.000	1	476.795.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				497.419.000		513.494.000		476.795.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB	Ekor	2	159.940.000	1	164.015.000	1	162.575.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
						Jumlah produksi ternak ruminansia perah	Ekor	9	337.479.000	8	349.479.000	8	314.220.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						60.110.000		120.110.000		193.010.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	10	60.110.000	10	120.110.000	10	193.010.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian					60.110.000		120.110.000		193.010.000		
						Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah	Kelompok	1	49.700.000	1	49.700.000	1	124.700.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				49.700.000		49.700.000		124.700.000		
						Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	Kelompok	1	49.700.000	1	49.700.000	1	124.700.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah	Unit	1	10.410.000	1	10.410.000	1	10.410.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				10.410.000		10.410.000		10.410.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak perah	Orang	20	10.410.000	20	10.410.000	20	10.410.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah	Kelompok	2		2	60.000.000	2	57.900.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						60.000.000		57.900.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah	Unit	2		2	60.000.000	2	57.900.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						148.870.000		148.870.000		148.870.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3.11	148.870.000	3.11	148.870.000	3.11	148.870.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
		3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					148.870.000		148.870.000		148.870.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk	Unit	2	148.870.000	2	148.870.000	2	148.870.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				148.870.000		148.870.000		148.870.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah	Kelompok	14	90.060.000	4	90.060.000	4	90.060.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah	Orang	360	58.810.000	120	58.810.000	120	58.810.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
	Tercapainya Produksi Telur								**3.069.229.000**		**4.313.099.000**		**4.288.415.000**		
						Produksi telur	Kg	344872727	3.069.229.000	344872727	344.872.727	344872727	4.288.415.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2.384.765.000		2.888.635.000		2.863.951.000		
						Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	246615	481.530.000	246615	875.660.000	246615	850.976.000	Bidang Budidaya	
		3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					371.520.000		531.150.000		509.750.000		
						Jumlah kelompok peternak petelur yang meningkat skala usaha nya	Kelompok	4	284.450.000	4	444.080.000	4	443.130.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				284.450.000		444.080.000		443.130.000		
						Jumlah kelompok ternak petelur yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	Kelompok	5	284.450.000	5	444.080.000	5	443.130.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak petelur	Buah	1	87.070.000	1	87.070.000	1	66.620.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				87.070.000		87.070.000		66.620.000		
						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	Unit	1	43.630.000	1	43.630.000	1	38.830.000	SEKSI PRODUKSI	
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak petelur	Orang	30	43.440.000	30	43.440.000	30	27.790.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					110.010.000		344.510.000		341.226.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	2	58.520.000	2	111.020.000	2	114.560.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				58.520.000		111.020.000		114.560.000		
						Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak petelur	Orang	30	13.310.000	30	15.810.000	30	14.910.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur	Unit	4	45.210.000	4	95.210.000	4	99.650.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak petelur	Buah	1	51.490.000	1	233.490.000	1	226.666.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				51.490.000		233.490.000		226.666.000		

						Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	Unit	1	31.150.000	1	41.150.000	1	35.450.000	SEKSI PERBIBITAN	
						jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak petelur	Orang	30	20.340.000	30	20.340.000	30	20.340.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak petelur	Unit	4		4	172.000.000	4	170.876.000	SEKSI PERBIBITAN	
						Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	1.903.235.000	1	2.012.975.000	1	2.012.975.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
		3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					1.903.235.000		2.012.975.000		2.012.975.000		
						Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur	%	1	1.903.235.000	1	2.012.975.000	1	2.012.975.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.903.235.000		2.012.975.000		2.012.975.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur	Ekor	26530	1.903.235.000	17600	2.012.975.000	17600	2.012.975.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						606.480.000		1.346.480.000		1.346.480.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	10	606.480.000	10	1.346.480.000	10	1.346.480.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian					606.480.000		1.346.480.000		1.346.480.000		
						Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur	Unit	1	6.480.000	1	6.480.000	1	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				6.480.000		6.480.000		6.480.000		
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak petelur	Orang	30	6.480.000	30	6.480.000	30	6.480.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur	Kelompok	2	600.000.000	2	1.340.000.000	2	1.340.000.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				600.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000		
						Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur	Unit	2	600.000.000	2	1.340.000.000	2	1.340.000.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						77.984.000		77.984.000		77.984.000		
						Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2.27	77.984.000	2.27	77.984.000	2.27	77.984.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
		3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					77.984.000		77.984.000		77.984.000		
						Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk	Kelompok	1	77.984.000	1	77.984.000	1	77.984.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				77.984.000		77.984.000		77.984.000		
						Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur	Kelompok	4	45.420.000	2	45.420.000	2	45.420.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
						Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur	Orang	200	32.564.000	60	32.564.000	60	32.564.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
JUMLAH									**110.566.951.000**		**120.289.171.000**		**116.579.912.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah									**79.113.239.000**		**101.365.889.000**		**110.487.036.000**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	
						Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0.58		0.58		0.58		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura								**1.278.433.000**		**3.741.818.000**		**3.503.214.000**		
						Persentase peningkatan produksi bawang merah	%	2.5	240.800.000	2.5	3	2.5	644.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						240.800.000		644.000.000		644.000.000		
						Produksi bawang merah	Ton	515000	240.800.000	515000	644.000.000	515000	644.000.000	Bidang Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					240.800.000		644.000.000		644.000.000		
						Jumlah Luas Panen Bawang Merah	Ha	51500	240.800.000	51500	644.000.000	51500	644.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				240.800.000		644.000.000		644.000.000		
						Jumlah Luas Tanam Bawang Merah	Ha	8	240.800.000	20	644.000.000	20	644.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi cabe	%	1.5	318.081.000	1.5	2	1.5	946.245.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						318.081.000		997.331.000		946.245.000		
						Produksi cabai	Ton	341000	318.081.000	341000	997.331.000	341000	946.245.000	Bidang Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					318.081.000		997.331.000		946.245.000		
						Jumlah Luas Panen Cabai	Ha	43718	318.081.000	43718	997.331.000	43718	946.245.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				318.081.000		997.331.000		946.245.000		
						Jumlah Luas Tanam Cabai	Ha	15	318.081.000	25	997.331.000	25	946.245.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi durian	%	2.5	437.276.000	2.5	3	2.5	1.074.750.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						437.276.000		1.204.776.000		1.074.750.000		
						Produksi durian	Ton	149668	437.276.000	149668	1.204.776.000	149668	1.074.750.000	Bidang Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					437.276.000		1.204.776.000		1.074.750.000		
						Jumlah Luas Panen Alpukat	Ha	13773	80.000.000	13773	537.500.000	13773	435.250.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				80.000.000		537.500.000		435.250.000		
						Jumlah Luas Tanam Alpukat	Ha	4	80.000.000	65	537.500.000	65	435.250.000	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Provinsi
						Jumlah Luas Panen Durian	Ha	11973	357.276.000	11973	667.276.000	11973	639.500.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				357.276.000		667.276.000		639.500.000		
						Jumlah Luas Tanam Durian	Ha	4	357.276.000	30	667.276.000	30	639.500.000	SEKSI TANAMAN BUAH	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi jahe	%	3	237.276.000	3	3	3	642.014.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						237.276.000		697.276.000		642.014.000		
						Produksi jahe	Ton	34862	237.276.000	34862	697.276.000	34862	642.014.000	Bidang Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					237.276.000		697.276.000		642.014.000		
						Jumlah Luas Panen Jahe	Ha	1599	237.276.000	1599	697.276.000	1599	642.014.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				237.276.000		697.276.000		642.014.000		
						Jumlah Luas Tanam Jahe	Ha	1	202.276.000	8	537.276.000	8	482.014.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
						Jumlah Luas Tanam Kencur	Ha	1	35.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi melati	%	2	45.000.000	2	2	2	196.205.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						45.000.000		198.435.000		196.205.000		
						Produksi melati	Ton	24627	45.000.000	24627	198.435.000	24627	196.205.000	Bidang Hortikultura	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					45.000.000		198.435.000		196.205.000		
						Jumlah Luas Panen Melati	Ha	1.099	45.000.000	1.099	198.435.000	1.099	196.205.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				45.000.000		198.435.000		196.205.000		
						Jumlah Luas Tanam Melati	Ha	1	45.000.000	2	198.435.000	3	196.205.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	OPD Provinsi
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan								**51.902.680.000**		**63.155.760.000**		**72.651.051.000**		
						Persentase peningkatan produksi jagung	%	0.2	319.086.000	0.2	0	0.2	845.478.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						319.086.000		877.018.000		845.478.000		
						Produksi jagung	Ton	3576577	319.086.000	3576577	877.018.000	3576577	845.478.000	Bidang Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					319.086.000		877.018.000		845.478.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung)	Ha	583385	319.086.000	583385	877.018.000	583385	845.478.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				319.086.000		877.018.000		845.478.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya	Ha	200	319.086.000	726	877.018.000	726	845.478.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi kedelai	%	0.2	166.358.000	0.2	0	0.2	480.974.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						166.358.000		601.358.000		480.974.000		
						Produksi kedelai	Ton	52657	166.358.000	52657	601.358.000	52657	480.974.000	Bidang Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					166.358.000		601.358.000		480.974.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai)	Ha	31241	166.358.000	31241	601.358.000	31241	480.974.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				166.358.000		601.358.000		480.974.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih kedelai	Ha	50	166.358.000	400	601.358.000	400	480.974.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi padi	%	0.2	51.417.236.000	0.2	0	0.2	71.324.599.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						35.394.582.000		43.944.915.000		49.185.002.000		
						Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	16.700.000.000	3	18.889.650.000	3	21.102.798.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					16.700.000.000		18.889.650.000		21.102.798.000		
						Jumlah kelembagaan pengelola alsintan	Unit	580	16.700.000.000	580	18.889.650.000	580	21.102.798.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				16.700.000.000		18.889.650.000		21.102.798.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan	Kelompok	580	16.700.000.000	660	18.889.650.000	660	21.102.798.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	OPD Provinsi
						Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	5.745.643.000	2	7.312.558.000	2	10.607.183.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					5.745.643.000		7.312.558.000		10.607.183.000		
						Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan	Komoditi	3	55.773.000	3	55.773.000	3	29.773.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				55.773.000		55.773.000		29.773.000		
						Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar	Kabupaten/Kota	34	55.773.000	34	55.773.000	35	29.773.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	Kelompok	105	5.370.196.000	105	6.738.926.000	105	10.065.337.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				5.370.196.000		6.738.926.000		10.065.337.000		
						Angka persentase susut hasil padi	%	10.15	12.330.000	10.15	12.330.000	10.15	12.330.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	Unit	105	5.357.866.000	111	6.726.596.000	129	10.053.007.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	Kelompok	4	319.674.000	4	517.859.000	4	512.073.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				319.674.000		517.859.000		512.073.000		
						Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	Paket	35	319.674.000	39	517.859.000	8	512.073.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	%	85	2.426.960.000	85	2.426.960.000	85	2.354.862.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.426.960.000		2.426.960.000		2.354.862.000		
						Jumlah produksi benih Buah	Batang	10000	797.464.000	10000	797.464.000	10000	781.879.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				797.464.000		797.464.000		781.879.000		
						Jumlah Produksi benih Tanaman Buah	Batang	10000	797.464.000	10000	797.464.000	10000	781.879.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Kedelai	Ton	0.8	19.447.000	0.8	19.447.000	0.8	15.891.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				19.447.000		19.447.000		15.891.000		
						Jumlah Produksi benih Palawija	Ton	0.8	19.447.000	0.8	19.447.000	0.8	15.891.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Kentang	Ton	8	355.712.000	8	355.712.000	8	345.828.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				355.712.000		355.712.000		345.828.000		
						Jumlah Produksi benih Sayur	Ton	8	355.712.000	8	355.712.000	8	345.828.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih Padi	Ton	84	1.156.351.000	84	1.156.351.000	84	1.113.428.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.156.351.000		1.156.351.000		1.113.428.000		
						Jumlah Produksi benih Padi	Ton	84	1.156.351.000	84	1.156.351.000	84	1.113.428.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih Planlet	Batang	12000	97.986.000	12000	97.986.000	12000	97.836.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				97.986.000		97.986.000		97.836.000		
						Jumlah Produksi Planlet benih	Batang	12000	97.986.000	12000	97.986.000	12000	97.836.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	2.024.498.000	85	2.024.498.000	85	1.930.745.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.024.498.000		2.024.498.000		1.930.745.000		
						Jumlah pengembangan tanaman hias	Batang	12000	192.965.000	12000	192.965.000	12000	190.405.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				192.965.000		192.965.000		190.405.000		
						Jumlah pengembangan Tanaman Hias	Batang	12000	192.965.000	12000	192.965.000	12000	190.405.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih bawang merah	Ton	3	72.375.000	3	72.375.000	3	72.375.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				72.375.000		72.375.000		72.375.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Merah	Ha	0.5	72.375.000	0.5	72.375.000	0.5	72.375.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	92.5	1.003.279.000	92.5	1.003.279.000	92.5	938.086.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.003.279.000		1.003.279.000		938.086.000		
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Padi	Ha	25	1.003.279.000	25	1.003.279.000	25	938.086.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	0.425	7.910.000	0.425	7.910.000	0.425	7.910.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				7.910.000		7.910.000		7.910.000		
						Jumlah luas Perbanyakan Benih Palawija	Ha	0.5	7.910.000	0.5	7.910.000	0.5	7.910.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah Produksi benih tanaman buah	Batang	1000	747.969.000	1000	747.969.000	1000	721.969.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				747.969.000		747.969.000		721.969.000		
						Jumlah perbanyakan benih Tanaman Buah	Batang	1000	747.969.000	1000	747.969.000	1000	721.969.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	2.443.280.000	85	2.443.280.000	85	2.403.048.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.443.280.000		2.443.280.000		2.403.048.000		
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	Batang	2000	539.802.000	2000	539.802.000	2000	539.684.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				539.802.000		539.802.000		539.684.000		
						Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	Batang	2000	539.802.000	2000	539.802.000	2000	539.684.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih padi	Ton	181.3	1.878.478.000	181.3	1.878.478.000	181.3	1.838.364.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.878.478.000		1.878.478.000		1.838.364.000		
						Luas perbanyakan benih padi	Ha	49	1.878.478.000	49	1.878.478.000	49	1.838.364.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	0		0		0		SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan										
						Luas perbanyakan benih palawija	Ha	0		0		0		SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	0.2	25.000.000	0.2	25.000.000	0.2	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Luas perbanyakan benih sayuran	Ha	0.2	25.000.000	0.2	25.000.000	0.2	25.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi sayuran	Ton	0		0		0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan										
						Luas pengembangan sayuran	Ha	0		0		0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi tanaman hias	Batang	0		0		0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan										
						Jumlah pengembangan tanaman hias	Batang	0		0		0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	697.966.000	100	697.966.000	100	697.551.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					697.966.000		697.966.000		697.551.000		
						Pengawasan peredaran benih perkebunan	Bulan	12	34.065.000	12	34.065.000	12	34.065.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				34.065.000		34.065.000		34.065.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar	Bulan	12	34.065.000	12	34.065.000	12	34.065.000		
						Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan	Bulan	12	174.568.000	12	174.568.000	12	174.292.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				174.568.000		174.568.000		174.292.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar	Bulan	12	174.568.000	12	174.568.000	12	174.292.000		
						Pengujian laboratorium hortikultura	Lembar	100	22.210.000	100	22.210.000	100	22.210.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				22.210.000		22.210.000		22.210.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura	Lembar	100	22.210.000	100	22.210.000	100	22.210.000		
						Pengujian laboratorium tanaman pangan	Lembar	900	33.870.000	900	33.870.000	900	33.862.000		
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				33.870.000		33.870.000		33.862.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan	Lembar	900	33.870.000	900	33.870.000	900	33.862.000		
						Sertifikasi benih hortikultura buah	Batang	300000	47.640.000	300000	47.640.000	300000	47.640.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				47.640.000		47.640.000		47.640.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat	Batang	300000	47.640.000	300000	47.640.000	300000	47.640.000		
						Sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ha	100	76.700.000	100	76.700.000	100	76.569.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				76.700.000		76.700.000		76.569.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar	Bulan	12	59.100.000	12	59.100.000	12	58.969.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran	Ton	1200	17.600.000	1200	17.600.000	1200	17.600.000		
						Sertifikasi benih padi	Ha	3200	265.568.000	3200	265.568.000	3200	265.568.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				265.568.000		265.568.000		265.568.000		
						Tersedianya benih padi bersertifikat	Ton	12800	265.568.000	12800	265.568.000	12800	265.568.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Sertifikasi benih palawija	Ha	600	25.050.000	600	25.050.000	600	25.050.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				25.050.000		25.050.000		25.050.000		
						Tersedianya benih palawija bersertifikat	Ton	720	25.050.000	720	25.050.000	720	25.050.000		
						Sertifikasi benih tanaman perkebunan	Batang	500000	18.295.000	500000	18.295.000	500000	18.295.000		
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				18.295.000		18.295.000		18.295.000		
						Tersedianya benih tanaman perkebunan	Batang	500000	18.295.000	500000	18.295.000	500000	18.295.000		
						Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	75.000.000	100	338.000.000	100	338.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					75.000.000		338.000.000		338.000.000		
						jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	Unit	100	75.000.000	100	338.000.000	100	338.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				75.000.000		338.000.000		338.000.000		
						Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan	Orang	100	75.000.000	500	338.000.000	500	338.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2.5	416.326.000	2.5	817.788.000	2.5	817.788.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					416.326.000		817.788.000		817.788.000		
						luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani	Ha	0	416.326.000	0	817.788.000	15000	817.788.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				416.326.000		817.788.000		817.788.000		
						Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi	Ha	0	416.326.000	15000	817.788.000	15000	817.788.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
						Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2.5	151.065.000	2.5	392.405.000	2.5	387.276.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					151.065.000		392.405.000		387.276.000		
						jumlah luasan lahan yang dioptimasi	Ha	20	151.065.000	20	392.405.000	20	387.276.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				151.065.000		392.405.000		387.276.000		
						jumlah benih mendukung optimasi lahan	Kg	250	4.000.000	250	34.000.000	250	29.600.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
						jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan	Ton	10	147.065.000	10	358.405.000	10	357.676.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
						Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	90	2.808.312.000	90	5.955.150.000	90	5.929.150.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					2.808.312.000		5.955.150.000		5.929.150.000		
						jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi	Kabupaten/Kota	35	2.808.312.000	35	5.955.150.000	35	5.929.150.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				2.808.312.000		5.955.150.000		5.929.150.000		
						Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk	Orang	100	2.808.312.000	250	5.955.150.000	250	5.929.150.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	OPD Provinsi
						Produksi padi	Ton	9594280	1.905.532.000	9594280	2.646.660.000	9594280	2.616.601.000	Bidang Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.905.532.000		2.646.660.000		2.616.601.000		
						Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (padi)	Ha	1686165	1.905.532.000	1686165	2.646.660.000	1686165	2.616.601.000	SEKSI PADI	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.905.532.000		2.646.660.000		2.616.601.000		
						Capaian luas tanam bantuan benih Padi	Ha	825	1.905.532.000	2850	2.646.660.000	2850	2.616.601.000	SEKSI PADI	OPD Provinsi
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.564.297.000		6.220.842.000		9.309.792.000		
						Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7420274	4.564.297.000	7420274	6.220.842.000	7420274	9.309.792.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian					4.564.297.000		6.220.842.000		9.309.792.000		
						Persentase Jaringan irigasi alternatif	%	5	4.070.000.000	5	5.070.000.000	5	8.158.950.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				4.070.000.000		5.070.000.000		8.158.950.000		
						Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit)	Unit	176	4.070.000.000	176	5.070.000.000	176	8.158.950.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
						Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	%	1.88	494.297.000	1.88	1.150.842.000	1.88	1.150.842.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.0001			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				494.297.000		1.150.842.000		1.150.842.000		
						jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m)	m	225	494.297.000	350	1.150.842.000	350	1.150.842.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	OPD Provinsi
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						2.635.000.000		2.835.000.000		4.184.695.000		
						Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani	%	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang tertangani	Ha	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	2.585.000.000	15	2.785.000.000	15	4.134.695.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
		3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					2.585.000.000		2.785.000.000		4.134.695.000		
						Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman	%	15	2.585.000.000	15	2.785.000.000	15	4.134.695.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				2.585.000.000		2.785.000.000		4.134.695.000		
						Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Liter	400	29.173.000	1500	56.502.000	1500	56.502.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe)	Ha	20	39.370.000	60	119.030.000	60	113.765.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman pangan (padi, jagung kedelai)	Ha	40	232.362.000	120	325.373.000	120	325.373.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
						Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi)	Ha	20	2.284.095.000	645	2.284.095.000	645	3.639.055.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	OPD Provinsi
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						8.823.357.000		8.676.627.000		8.645.110.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	5.463.357.000	2.5	5.316.627.000	2.5	5.285.110.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
		3.27.07.1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					270.000.000		270.000.000		238.483.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	270.000.000	2.5	270.000.000	2.5	238.483.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.01.0004			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				270.000.000		270.000.000		238.483.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	270.000.000	100	270.000.000	237	238.483.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					5.088.130.000		4.501.400.000		4.501.400.000		
						Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	%	0.2	5.088.130.000	0.2	4.501.400.000	0.2	4.501.400.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				5.088.130.000		4.501.400.000		4.501.400.000		
						Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran	Kelompok	30	79.000.000	30	79.000.000	60	79.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
						Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	30	5.009.130.000	30	4.422.400.000	127	4.422.400.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					105.227.000		545.227.000		545.227.000		
						Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	%	20	105.227.000	20	545.227.000	20	545.227.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.0006			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				105.227.000		545.227.000		545.227.000		
						Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	Unit	1	105.227.000	5	545.227.000	5	545.227.000	SEKSI BINA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	3.360.000.000	100	3.360.000.000	100	3.360.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
		3.27.07.1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					3.360.000.000		3.360.000.000		3.360.000.000		
						Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	Orang	2100	3.360.000.000	2100	3.360.000.000	2100	3.360.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.0001			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2.040.000.000		2.040.000.000		2.040.000.000		
						Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian	Orang	1200	2.040.000.000	1200	2.040.000.000	1200	2.040.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				1.320.000.000		1.320.000.000		1.320.000.000		
						Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian	Orang	900	1.320.000.000	900	1.320.000.000	900	1.320.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan								**25.932.126.000**		**34.468.311.000**		**34.332.771.000**		
						Persentase peningkatan produksi kelapa	%	0.009	1.318.078.000	0.009	0	0.01	1.692.688.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.318.078.000		1.708.078.000		1.692.688.000		
						Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	1.148.078.000	1	1.148.078.000	1	1.148.078.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.148.078.000		1.148.078.000		1.148.078.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar	%	1	440.883.000	1	440.883.000	1	440.883.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				440.883.000		440.883.000		440.883.000		
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	35000	302.245.000	35000	302.245.000	21633	302.235.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi tanaman rempah dan penyegar	Kg	55000	138.638.000	55000	138.638.000	46229	138.648.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim	%	1	520.926.000	1	520.926.000	1	520.926.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				520.926.000		520.926.000		520.926.000		
						Produksi tanaman semusim	Ton	1200	520.926.000	1200	520.926.000	927.9	520.926.000	SEKSI PRODUKSI	
						Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan	%	1	186.269.000	1	186.269.000	1	186.269.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				186.269.000		186.269.000		186.269.000		
						Produksi tanaman tahunan	Butir	35000	186.269.000	35000	186.269.000	35000	186.269.000	SEKSI PRODUKSI	
						Produksi kelapa	Ton	166687	170.000.000	166687	560.000.000	166687	544.610.000	Bidang Perkebunan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					170.000.000		560.000.000		544.610.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa	Ha	50	170.000.000	50	560.000.000	60	544.610.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				170.000.000		560.000.000		544.610.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	1000	130.000.000	6000	450.000.000	6000	434.800.000		OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman tahunan lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	1500	40.000.000	4500	110.000.000	4500	109.810.000		OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi kopi	%	0.009	280.000.000	0.009	0	0.01	808.947.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						280.000.000		810.000.000		808.947.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Produksi kopi	Ton	25927	280.000.000	25927	810.000.000	25927	808.947.000	Bidang Perkebunan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					280.000.000		810.000.000		808.947.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi	Ha	40	280.000.000	40	810.000.000	70	808.947.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				280.000.000		810.000.000		808.947.000		
						Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	12500	260.000.000	43250	790.000.000	43250	789.453.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	800	20.000.000	800	20.000.000	800	19.494.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	OPD Provinsi
						Persentase peningkatan produksi tebu	%	0.009	24.334.048.000	0.009	0	0.01	31.831.136.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						24.334.048.000		31.950.233.000		31.831.136.000		
						Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	2.172.440.000	3	2.172.440.000	3	2.079.478.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
		3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.172.440.000		2.172.440.000		2.079.478.000		
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur	%	3	242.472.000	3	242.472.000	3	232.506.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				242.472.000		242.472.000		232.506.000		
						Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam	Batang	10000	242.472.000	10000	242.472.000	10000	232.506.000	SEKSI BENIH	
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur	%	3	1.823.334.000	3	1.823.334.000	3	1.743.580.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.823.334.000		1.823.334.000		1.743.580.000		
						Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam	Batang	34500	1.823.334.000	34500	1.823.334.000	34500	1.743.580.000	SEKSI BENIH	
						Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur	%	4	106.634.000	4	106.634.000	4	103.392.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.0005			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				106.634.000		106.634.000		103.392.000		
						Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam	Batang	1500	106.634.000	1500	106.634.000	1500	103.392.000	SEKSI BENIH	
						Produksi tebu	Ton	2554553	22.161.608.000	2554553	29.777.793.000	2554553	29.751.658.000	Bidang Perkebunan	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					22.161.608.000		29.777.793.000		29.751.658.000		
						Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu	Ha	300	22.161.608.000	300	29.777.793.000	293	29.751.658.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				22.161.608.000		29.777.793.000		29.751.658.000		
						Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Kg	1798800	20.561.608.000	2256080	27.211.608.000	2335625	27.211.608.000		OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Batang	43200	1.500.000.000	2000	1.900.000.000	1810	1.899.865.000		OPD Provinsi
						Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	Kg	1500	100.000.000	81550	666.185.000	81550	640.185.000		OPD Provinsi
Meningkatkan Kesejahteraan Petani														**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	
						NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Angka	108.56		108.56		108.56		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya NTP Hortikultura														
						NTP Hortikultura	Angka	108.11		108.11	108	108.11		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
						Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	%	1.5		1.5		1.5		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian											
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	5		5		5			
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian										
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	5		6		5			
	Meningkatnya NTP Perkebunan														
						NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100.59		100.59	101	100.59		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
						Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	%	1.5		1.5		1.5		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian											
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2		2		2			
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	2		4		2			
	Meningkatnya NTP Tanaman Pangan														
						NTP Tanaman Pangan	Angka	105.19		105.19	105	105.19		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
						Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	%	1.5		1.5	1.5	1.5		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
		3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian											
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	3		3		6			
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian										
						jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	Kelompok	3		5		3			
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**145.411.699.000**		**145.747.519.000**		**136.170.027.000**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	100		100		100		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**144.726.699.000**		**145.062.519.000**		**135.437.673.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	144.726.699.000	80	80	80	135.437.673.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						144.726.699.000		145.062.519.000		135.437.673.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	9.769.445.000	100	9.769.445.000	100	9.768.850.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		4.906.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.906.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		4.906.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.906.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.695.000		114.695.000		114.194.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	114.695.000	100	114.695.000	100	114.194.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.155.000		26.155.000		25.654.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	26.155.000	1	26.155.000	1	25.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.540.000		43.540.000		43.540.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	43.540.000	1	43.540.000	1	43.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.029.750.000		5.029.750.000		5.029.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.029.750.000	1	5.029.750.000	1	5.029.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	10		10		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.029.750.000		5.029.750.000		5.029.750.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	5.029.750.000	6	5.029.750.000	9	5.029.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					351.800.000		351.800.000		351.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	351.800.000	1	351.800.000	1	351.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.268.200.000		4.268.200.000		4.268.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	4.268.200.000	1	4.268.200.000	1	4.268.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.200.000		56.200.000		56.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	56.200.000	1	56.200.000	1	56.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.427.000.000		2.427.000.000		2.427.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	2.427.000.000	9	2.427.000.000	5	2.427.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.720.000.000		1.720.000.000		1.720.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.720.000.000	6	1.720.000.000	6	1.720.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	945.000.000	100	945.000.000	100	945.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.000.000		77.000.000		77.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.000.000	100	77.000.000	100	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		130.000.000		130.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					432.000.000		432.000.000		432.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	432.000.000	1	432.000.000	1	432.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					256.000.000		256.000.000		256.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	256.000.000	1	256.000.000	1	256.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				76.000.000		76.000.000		76.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	76.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.942.704.000	100	3.942.704.000	100	3.942.665.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					16.000.000		16.000.000		16.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16.000.000		16.000.000		16.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.400.000		86.400.000		86.361.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	86.400.000	100	86.400.000	100	86.361.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		9.989.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.989.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		1		0			OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		9.975.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	10.000.000	1	10.000.000	1	9.975.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		9.997.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.997.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					0			OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.400.000		46.400.000		46.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	46.400.000	1	46.400.000	1	46.400.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8		8		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					344.600.000		344.600.000		344.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	344.600.000	1	344.600.000	1	344.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.200.000		135.200.000		135.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	135.200.000	1	135.200.000	1	135.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				194.400.000		194.400.000		194.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	194.400.000	1	194.400.000	1	194.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.495.704.000		3.495.704.000		3.495.704.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	3.495.704.000	1	3.495.704.000	1	3.495.704.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				107.400.000		107.400.000		107.400.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	107.400.000	1	107.400.000	1	107.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.033.304.000		1.033.304.000		1.033.304.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	49	1.033.304.000	49	1.033.304.000	49	1.033.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.355.000.000		2.355.000.000		2.355.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.355.000.000	1	2.355.000.000	1	2.355.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	15.091.030.000	100	15.091.030.000	100	15.091.030.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.914.110.000		4.678.910.000		4.678.910.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	3.914.110.000	1	4.678.910.000	1	4.678.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.914.110.000		4.678.910.000		4.678.910.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	16	3.914.110.000	16	4.678.910.000	16	4.678.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.000.000		235.000.000		235.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	235.000.000	1	235.000.000	1	235.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.836.920.000		10.072.120.000		10.072.120.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	10.836.920.000	1	10.072.120.000	1	10.072.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.720.000		36.720.000		36.720.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	36.720.000	1	36.720.000	1	36.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.090.900.000		6.547.700.000		6.547.700.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	9	7.090.900.000	9	6.547.700.000	9	6.547.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.669.300.000		3.447.700.000		3.447.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	3.669.300.000	10	3.447.700.000	10	3.447.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	754.450.000	100	754.450.000	100	754.450.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.680.000		70.680.000		70.680.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	70.680.000	100	70.680.000	100	70.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.900.000		4.900.000		4.900.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.280.000		10.280.000		10.280.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.280.000	1	10.280.000	1	10.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	200.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		3		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	200.000.000	7	180.000.000	3	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.400.000		391.400.000		391.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	371.400.000	1	391.400.000	1	391.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.400.000		176.352.000		176.352.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	179.400.000	1	176.352.000	1	176.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.000.000		213.048.000		213.048.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	190.000.000	1	213.048.000	1	213.048.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.370.000		70.370.000		70.370.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	70.370.000	1	70.370.000	1	70.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.620.000		42.620.000		42.620.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	42.620.000	1	42.620.000	1	42.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.750.000		27.750.000		27.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	27.750.000	1	27.750.000	1	27.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	11.087.000.000	100	11.087.000.000	100	11.113.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.310.417.000		3.276.300.000		3.302.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	3.310.417.000	100	3.276.300.000	100	3.302.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.238.417.000		3.204.300.000		3.204.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.238.417.000	1	3.204.300.000	1	3.204.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000		52.000.000		52.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	10	52.000.000	10	52.000.000	10	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.000.000		315.000.000		315.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	315.000.000	1	315.000.000	1	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				130.000.000		130.000.000		130.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.459.083.000		7.493.200.000		7.493.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	7.459.083.000	1	7.493.200.000	1	7.493.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.386.583.000		7.420.700.000		7.420.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	7.386.583.000	10	7.420.700.000	10	7.420.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	102.412.070.000	100	102.747.890.000	100	93.072.185.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					96.377.408.000		96.377.408.000		86.664.703.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	96.377.408.000	4	96.377.408.000	4	86.664.703.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				92.016.449.000		92.016.449.000		82.305.744.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	618	92.016.449.000	618	92.016.449.000	618	82.305.744.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.360.959.000		4.360.959.000		4.358.959.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	4.360.959.000	12	4.360.959.000	12	4.358.959.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					230.000.000		230.000.000		182.900.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	230.000.000	1	230.000.000	1	182.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		50.000.000		2.900.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	2	50.000.000	2	50.000.000	2	2.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000		410.820.000		405.920.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	75.000.000	100	410.820.000	100	405.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						335.820.000		335.820.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		0	335.820.000	579	335.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		45.000.000		40.100.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	45.000.000	50	45.000.000	50	40.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					915.000.000		915.000.000		1.083.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	915.000.000	100	915.000.000	100	1.083.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		70.000.000		68.900.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	5	70.000.000	5	70.000.000	5	68.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000		45.000.000		60.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	45.000.000	5	45.000.000	5	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		104.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	104.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		750.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	20	600.000.000	20	600.000.000	20	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					484.300.000		484.300.000		620.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	484.300.000	13	484.300.000	13	620.380.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	2		2		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel								46.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	3		3		0	46.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				289.300.000		289.300.000		280.980.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	289.300.000	10	289.300.000	10	280.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3		3		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195.000.000		195.000.000		293.400.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	195.000.000	3	195.000.000	3	293.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.182.000.000		2.197.000.000		2.052.431.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.182.000.000	1	2.197.000.000	1	2.052.431.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.100.000.000		1.100.000.000		965.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	12	965.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.000.000		150.000.000		140.431.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	135.000.000	2	150.000.000	2	140.431.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				935.000.000		935.000.000		935.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	935.000.000	12	935.000.000	12	935.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.148.362.000		2.133.362.000		2.062.051.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	2.148.362.000	25	2.133.362.000	25	2.062.051.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				750.000.000		789.500.000		593.116.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	750.000.000	17	789.500.000	17	593.116.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				389.000.000		389.000.000		372.073.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	389.000.000	15	389.000.000	15	372.073.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				227.788.000		173.288.000		173.288.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	227.788.000	2	173.288.000	2	173.288.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				336.574.000		336.574.000		336.574.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	336.574.000	3	336.574.000	3	336.574.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				445.000.000		445.000.000		587.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	445.000.000	3	445.000.000	3	587.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	725.000.000	100	725.000.000	100	750.493.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		19.493.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	19.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		19.493.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	19.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		131.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	100	105.000.000	100	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		46.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		35.000.000		35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					435.000.000		435.000.000		435.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	435.000.000	1	435.000.000	1	435.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.000.000		225.000.000		225.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan					0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.000.000		165.000.000		165.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**685.000.000**		**685.000.000**		**732.354.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	100	685.000.000	100	100	2.85	732.354.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						685.000.000		685.000.000		732.354.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	685.000.000	100	685.000.000	100	732.354.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					685.000.000		685.000.000		732.354.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	685.000.000	100	685.000.000	100	732.354.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				450.000.000		450.000.000		497.354.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	450.000.000	10	450.000.000	10	497.354.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				235.000.000		235.000.000		235.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	235.000.000	21	235.000.000	21	235.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									**224.524.938.000**		**247.113.408.000**		**246.657.063.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan ketahanan energi									**21.161.964.000**		**26.131.464.000**		**26.100.954.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Ketahanan Energi	Angka	4.5		4.5		4.5		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi								**7.684.499.000**		**12.653.999.000**		**12.584.935.000**		
						Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	18.41	7.684.499.000	18.41	18	18.41	12.584.935.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						7.684.499.000		12.653.999.000		12.584.935.000		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	590300.484	1.461.221.000	590300.484	1.461.221.000	1013545.58	1.456.068.000	Bidang Energi Baru Terbarukan	
		3.29.05.1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi					1.461.221.000		1.461.221.000		1.456.068.000		
						Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah	%	28.72	1.461.221.000	28.72	1.461.221.000	28.72	1.456.068.000		
		3.29.05.1.10.0002			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1.461.221.000		1.461.221.000		1.456.068.000		
						Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah	Dokumen	5	423.286.000	5	660.287.000	5	655.134.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Orang	2534	1.037.935.000	2534	800.934.000	2534	800.934.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	23599.9	216.000.000	23599.9	511.500.000	90393.28	507.700.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					216.000.000		511.500.000		507.700.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Orang	203	216.000.000	203	511.500.000	336	507.700.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				216.000.000		511.500.000		507.700.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria	Unit	7	216.000.000	9	511.500.000	9	507.700.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	78666.36	655.000.000	78666.36	1.125.500.000	182071.71	1.187.452.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					655.000.000		1.125.500.000		1.187.452.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Orang	240	655.000.000	240	1.125.500.000	500	1.187.452.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				655.000.000		1.125.500.000		1.187.452.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan	Unit	7	655.000.000	12	1.125.500.000	13.0002	1.187.452.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	86438.18	538.500.000	86438.18	946.000.000	91206.48	969.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					538.500.000		946.000.000		969.000.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Orang	495	538.500.000	495	946.000.000	634	969.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				538.500.000		946.000.000		969.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi	Unit	10	538.500.000	19	946.000.000	19	969.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	39394.34	482.878.000	39394.34	543.378.000	41516.02	627.835.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					482.878.000		543.378.000		627.835.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak	Orang	204	482.878.000	204	543.378.000	222	627.835.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				482.878.000		543.378.000		627.835.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak	Unit	17	482.878.000	18	543.378.000	20	627.835.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	122.33	274.500.000	122.33	605.000.000	289.74	603.438.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					274.500.000		605.000.000		603.438.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Orang	60	274.500.000	60	605.000.000	180	603.438.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				274.500.000		605.000.000		603.438.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan	Unit	4	274.500.000	9	605.000.000	9	603.438.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	39287.3	282.000.000	39287.3	427.500.000	41403.35	427.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					282.000.000		427.500.000		427.500.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Orang	177	282.000.000	177	427.500.000	222	427.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				282.000.000		427.500.000		427.500.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah	Unit	4	282.000.000	7	427.500.000	7	427.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	125685.73	705.500.000	125685.73	1.119.000.000	132503.59	1.109.217.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					705.500.000		1.119.000.000		1.109.217.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Orang	375	705.500.000	375	1.119.000.000	472	1.109.217.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				705.500.000		1.119.000.000		1.109.217.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara	Unit	11	705.500.000	25	1.119.000.000	27	1.109.217.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	39363.76	418.500.000	39363.76	699.000.000	41499.93	744.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					418.500.000		699.000.000		744.000.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu	Orang	150	418.500.000	150	699.000.000	270	744.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				418.500.000		699.000.000		744.000.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu	Unit	5	418.500.000	8	699.000.000	9	744.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	78562.37	695.000.000	78562.37	754.000.000	151285.79	881.244.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					695.000.000		754.000.000		881.244.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Orang	96	695.000.000	96	754.000.000	226	881.244.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				695.000.000		754.000.000		881.244.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan	Unit	5	695.000.000	7	754.000.000	9	881.244.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	91.75	207.000.000	91.75	717.500.000	91068.05	708.081.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					207.000.000		717.500.000		708.081.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Orang	45	207.000.000	45	717.500.000	270	708.081.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				207.000.000		717.500.000		708.081.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara	Unit	3	207.000.000	8	717.500.000	8	708.081.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	39608.43	934.400.000	39608.43	1.293.900.000	41915.22	1.030.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					934.400.000		1.293.900.000		1.030.520.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Orang	270	934.400.000	270	1.293.900.000	418	1.030.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				934.400.000		1.293.900.000		1.030.520.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo	Unit	41	934.400.000	59	1.293.900.000	62	1.030.520.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	39480.034	814.000.000	39480.034	2.450.500.000	108392.42	2.332.880.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
		3.29.05.1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					814.000.000		2.450.500.000		2.332.880.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	Orang	219	814.000.000	219	2.450.500.000	925	2.332.880.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				814.000.000		2.450.500.000		2.332.880.000		
						Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo	Unit	25	814.000.000	104	2.450.500.000	104	2.332.880.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat								**13.477.465.000**		**13.477.465.000**		**13.516.019.000**		
						Tingkat konsumsi tenaga listrik	KWh/Kapita	768.1	13.477.465.000	768.1	768	768.1	13.516.019.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						13.477.465.000		13.477.465.000		13.516.019.000		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	63.81	1.101.207.000	63.81	1.101.207.000	63.84	1.101.207.000	Bidang Ketenagalistrikan	
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					1.101.207.000		1.101.207.000		1.101.207.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	30.19	1.101.207.000	30.19	1.101.207.000	30.19	1.101.207.000		
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1.101.207.000		1.101.207.000		1.101.207.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah	Laporan	28	1.101.207.000	28	1.101.207.000	28	1.101.207.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51.09	490.200.000	51.09	490.200.000	51.09	490.200.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					58.350.000		58.350.000		58.350.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria	%	100	58.350.000	100	58.350.000	100	58.350.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				58.350.000		58.350.000		58.350.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	35	58.350.000	35	58.350.000	35	58.350.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					86.700.000		86.700.000		86.700.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	4.78	86.700.000	4.78	86.700.000	4.78	86.700.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				86.700.000		86.700.000		86.700.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	50	86.700.000	50	86.700.000	50	86.700.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					345.150.000		345.150.000		345.150.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	%	97.39	345.150.000	97.39	345.150.000	97.39	345.150.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				45.250.000		45.250.000		45.250.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria	Dokumen	1	45.250.000	1	45.250.000	1	45.250.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				299.900.000		299.900.000		299.900.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria	RT/KK	200	299.900.000	200	299.900.000	247	299.900.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49.66	1.615.558.000	49.66	1.615.558.000	49.66	1.615.558.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					55.000.000		55.000.000		55.000.000		

						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan	%	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	20	55.000.000	20	55.000.000	20	55.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					166.780.000		166.780.000		166.780.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	1.93	166.780.000	1.93	166.780.000	1.93	166.780.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				166.780.000		166.780.000		166.780.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	55	166.780.000	55	166.780.000	55	166.780.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.393.778.000		1.393.778.000		1.393.778.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	%	97.39	1.393.778.000	97.39	1.393.778.000	97.4	1.393.778.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				86.728.000		86.728.000		86.728.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	1	86.728.000	1	86.728.000	1	86.728.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.307.050.000		1.307.050.000		1.307.050.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan	RT/KK	950	1.307.050.000	950	1.307.050.000	1175	1.307.050.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49.64	1.026.240.000	49.64	1.026.240.000	49.64	1.026.240.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					67.350.000		67.350.000		67.350.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi	%	100	67.350.000	100	67.350.000	100	67.350.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				67.350.000		67.350.000		67.350.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi	Dokumen	35	67.350.000	35	67.350.000	35	67.350.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					82.200.000		82.200.000		82.200.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	1.89	82.200.000	1.89	82.200.000	1.89	82.200.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				82.200.000		82.200.000		82.200.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	35	82.200.000	35	82.200.000	35	82.200.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					876.690.000		876.690.000		876.690.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	%	97.39	876.690.000	97.39	876.690.000	97.39	876.690.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				75.750.000		75.750.000		75.750.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi	Dokumen	1	75.750.000	1	75.750.000	1	75.750.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				800.940.000		800.940.000		800.940.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi	RT/KK	550	800.940.000	550	800.940.000	680	800.940.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	51.86	731.050.000	51.86	731.050.000	51.86	731.050.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak	Dokumen	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	6.34	95.000.000	6.34	95.000.000	6.34	95.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	50	95.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					536.050.000		536.050.000		536.050.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak	%	97.39	536.050.000	97.39	536.050.000	97.39	536.050.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak	Dokumen	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				500.050.000		500.050.000		500.050.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak	RT/KK	350	500.050.000	350	500.050.000	433	500.050.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	49.36	1.253.615.000	49.36	1.253.615.000	49.37	1.241.394.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					39.650.000		39.650.000		39.650.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan	%	100	39.650.000	100	39.650.000	100	39.650.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				39.650.000		39.650.000		39.650.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	20	39.650.000	20	39.650.000	20	39.650.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					51.975.000		51.975.000		51.975.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	1.34	51.975.000	1.34	51.975.000	1.34	51.975.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				51.975.000		51.975.000		51.975.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	25	51.975.000	25	51.975.000	25	51.975.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.161.990.000		1.161.990.000		1.149.769.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	%	97.39	1.161.990.000	97.39	1.161.990.000	97.4	1.149.769.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				38.400.000		38.400.000		38.400.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan	Dokumen	1	38.400.000	1	38.400.000	1	38.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.123.590.000		1.123.590.000		1.111.369.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan	RT/KK	800	1.123.590.000	800	1.123.590.000	989	1.111.369.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	49.08	1.470.690.000	49.08	1.470.690.000	49.08	1.470.690.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah	%	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	20	55.000.000	20	55.000.000	20	55.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					87.500.000		87.500.000		87.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	0.78	87.500.000	0.78	87.500.000	0.78	87.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				87.500.000		87.500.000		87.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	25	87.500.000	25	87.500.000	25	87.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.328.190.000		1.328.190.000		1.328.190.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	%	97.39	1.328.190.000	97.39	1.328.190.000	97.4	1.328.190.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				76.400.000		76.400.000		76.400.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah	Dokumen	1	76.400.000	1	76.400.000	1	76.400.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.251.790.000		1.251.790.000		1.251.790.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah	RT/KK	900	1.251.790.000	900	1.251.790.000	1113	1.251.790.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	49.97	513.790.000	49.97	513.790.000	49.97	586.290.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara	%	100	48.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara	Dokumen	25	48.000.000	25	48.000.000	25	48.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					103.500.000		103.500.000		103.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	2.56	103.500.000	2.56	103.500.000	2.56	103.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				103.500.000		103.500.000		103.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	55	103.500.000	55	103.500.000	61	103.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					362.290.000		362.290.000		434.790.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	%	97.39	362.290.000	97.39	362.290.000	97.39	434.790.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				34.300.000		34.300.000		34.300.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara	Dokumen	1	34.300.000	1	34.300.000	1	34.300.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				327.990.000		327.990.000		400.490.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara	RT/KK	200	327.990.000	200	327.990.000	320	400.490.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49.57	1.061.465.000	49.57	1.061.465.000	49.57	1.061.465.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				47.150.000		47.150.000		47.150.000			
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu	%	100	47.150.000	100	47.150.000	100	47.150.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				47.150.000		47.150.000		47.150.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	25	47.150.000	25	47.150.000	25	47.150.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					51.975.000		51.975.000		51.975.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	1.74	51.975.000	1.74	51.975.000	1.74	51.975.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				51.975.000		51.975.000		51.975.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	25	51.975.000	25	51.975.000	25	51.975.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					962.340.000		962.340.000		962.340.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu	%	97.39	962.340.000	97.39	962.340.000	97.39	962.340.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				33.200.000		33.200.000		33.200.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu	Dokumen	1	33.200.000	1	33.200.000	1	33.200.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				929.140.000		929.140.000		929.140.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu	RT/KK	650	929.140.000	650	929.140.000	804	929.140.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49.59	1.479.790.000	49.59	1.479.790.000	49.59	1.479.790.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					52.500.000		52.500.000		52.500.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan	%	100	52.500.000	100	52.500.000	100	52.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					52.500.000		52.500.000		52.500.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	35	52.500.000	35	52.500.000	35	52.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					73.680.000		73.680.000		73.680.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	1.78	73.680.000	1.78	73.680.000	1.78	73.680.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				73.680.000		73.680.000		73.680.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	45	73.680.000	45	73.680.000	45	73.680.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.353.610.000		1.353.610.000		1.353.610.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	%	97.39	1.353.610.000	97.39	1.353.610.000	97.4	1.353.610.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				57.960.000		57.960.000		57.960.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan	Dokumen	1	57.960.000	1	57.960.000	1	57.960.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.295.650.000		1.295.650.000		1.295.650.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan	RT/KK	950	1.295.650.000	950	1.295.650.000	1175	1.295.650.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	49.96	1.515.450.000	49.96	1.515.450.000	49.96	1.515.450.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					52.500.000		52.500.000		52.500.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara	%	100	52.500.000	100	52.500.000	100	52.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					52.500.000		52.500.000		52.500.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara	Dokumen	20	52.500.000	20	52.500.000	20	52.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					97.500.000		97.500.000		97.500.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	2.52	97.500.000	2.52	97.500.000	2.52	97.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				97.500.000		97.500.000		97.500.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	35	97.500.000	35	97.500.000	35	97.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.365.450.000		1.365.450.000		1.365.450.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	%	97.39	1.365.450.000	97.39	1.365.450.000	97.4	1.365.450.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				64.100.000		64.100.000		64.100.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara	Dokumen	1	64.100.000	1	64.100.000	1	64.100.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.301.350.000		1.301.350.000		1.301.350.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara	RT/KK	950	1.301.350.000	950	1.301.350.000	1175	1.301.350.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49.7	800.010.000	49.7	800.010.000	49.7	800.010.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					49.470.000		49.470.000		49.470.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo	%	100	49.470.000	100	49.470.000	100	49.470.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				49.470.000		49.470.000		49.470.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo	Dokumen	25	49.470.000	25	49.470.000	25	49.470.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					87.040.000		87.040.000		87.040.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	2	87.040.000	2	87.040.000	2	87.040.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				87.040.000		87.040.000		87.040.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo	Laporan	45	87.040.000	45	87.040.000	45	87.040.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					663.500.000		663.500.000		663.500.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	%	97.39	663.500.000	97.39	663.500.000	97.39	663.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				61.910.000		61.910.000		61.910.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo	Dokumen	1	61.910.000	1	61.910.000	1	61.910.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				601.590.000		601.590.000		601.590.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo	RT/KK	400	601.590.000	400	601.590.000	494	601.590.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	49.95	418.400.000	49.95	418.400.000	49.95	396.675.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
		3.29.06.1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					92.500.000		92.500.000		92.500.000		
						Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	92.500.000	100	92.500.000	100	92.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				92.500.000		92.500.000		92.500.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	45	92.500.000	45	92.500.000	45	92.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

						pada Wilayah Ungaran Telomoyo									
		3.29.06.1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	2.52	125.000.000	2.52	125.000.000	2.52	125.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	50	125.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.06.1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					200.900.000		200.900.000		179.175.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	97.39	200.900.000	97.39	200.900.000	97.39	179.175.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				45.600.000		45.600.000		23.875.000		
						Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	1	45.600.000	1	45.600.000	1	23.875.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.06.1.06.0002			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				155.300.000		155.300.000		155.300.000		
						Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo	RT/KK	100	155.300.000	100	155.300.000	123	155.300.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB									**4.315.593.000**		**4.315.593.000**		**4.170.240.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2.13		2.13		2.13		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan								**4.315.593.000**		**4.315.593.000**		**4.170.240.000**		
						Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	53	4.315.593.000	53	53	53	4.170.240.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						4.315.593.000		4.315.593.000		4.170.240.000		
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	362.380.000	100	362.380.000	100	362.380.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		3.29.03.1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					362.380.000		362.380.000		362.380.000		
						Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	362.380.000	100	362.380.000	100	362.380.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.01.0006			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut				362.380.000		362.380.000		362.380.000		
						Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah	Laporan	240	362.380.000	240	362.380.000	240	362.380.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	%	60	1.969.170.000	60	1.969.170.000	60	1.846.037.000	Bidang Mineral dan Batubara	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					1.720.770.000		1.720.770.000		1.597.637.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	60	1.720.770.000	60	1.720.770.000	60	1.597.637.000		
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1.720.770.000		1.720.770.000		1.597.637.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Jawa Tengah	Laporan	4	1.720.770.000	4	1.720.770.000	4	1.597.637.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.03.1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					248.400.000		248.400.000		248.400.000		
						Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	10	248.400.000	10	248.400.000	10	248.400.000		
		3.29.03.1.07.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				248.400.000		248.400.000		248.400.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam	Laporan	1	248.400.000	2	248.400.000	2	248.400.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	60	143.400.000	60	143.400.000	60	143.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					143.400.000		143.400.000		143.400.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	60	143.400.000	60	143.400.000	60	143.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				30.700.000		30.700.000		30.700.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	15	30.700.000	15	30.700.000	15	30.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				112.700.000		112.700.000		112.700.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	30	112.700.000	30	112.700.000	30	112.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	60	196.650.000	60	196.650.000	60	196.650.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					196.650.000		196.650.000		196.650.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	60	196.650.000	60	196.650.000	60	196.650.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				52.725.000		52.725.000		52.725.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	29	52.725.000	29	52.725.000	29	52.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				143.925.000		143.925.000		143.925.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	55	143.925.000	55	143.925.000	55	143.925.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG

						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	60	232.500.000	60	232.500.000	60	232.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					232.500.000		232.500.000		232.500.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	60	232.500.000	60	232.500.000	60	232.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Dokumen	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					157.500.000		157.500.000		157.500.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	Laporan	45	157.500.000	45	157.500.000	45	157.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	60	170.000.000	60	170.000.000	60	170.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					170.000.000		170.000.000		170.000.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	60	170.000.000	60	170.000.000	60	170.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					59.000.000		59.000.000		59.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	30	59.000.000	30	59.000.000	30	59.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					111.000.000		111.000.000		111.000.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	Laporan	40	111.000.000	40	111.000.000	40	111.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	60	132.140.000	60	132.140.000	60	132.140.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					132.140.000		132.140.000		132.140.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	60	132.140.000	60	132.140.000	60	132.140.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				32.400.000		32.400.000		32.400.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	10	32.400.000	10	32.400.000	10	32.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				99.740.000		99.740.000		99.740.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	40	99.740.000	40	99.740.000	40	99.740.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	60	100.975.000	60	100.975.000	60	100.975.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100.975.000		100.975.000		100.975.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	60	100.975.000	60	100.975.000	60	100.975.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				20.725.000		20.725.000		20.725.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	10	20.725.000	10	20.725.000	10	20.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				80.250.000		80.250.000		80.250.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	24	80.250.000	24	80.250.000	24	80.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	60	142.400.000	60	142.400.000	60	142.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				142.400.000		142.400.000		142.400.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	60	142.400.000	60	142.400.000	60	142.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				37.400.000		37.400.000		37.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	20	37.400.000	20	37.400.000	20	37.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	Laporan	30	105.000.000	30	105.000.000	30	105.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	60	133.820.000	60	133.820.000	60	133.820.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				133.820.000		133.820.000		133.820.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	%	60	133.820.000	60	133.820.000	60	133.820.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			47.500.000		47.500.000		47.500.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	25	47.500.000	25	47.500.000	25	47.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			86.320.000		86.320.000		86.320.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	30	86.320.000	30	86.320.000	30	86.320.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	60	253.508.000	60	253.508.000	60	243.308.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				253.508.000		253.508.000		243.308.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	60	253.508.000	60	253.508.000	60	243.308.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			53.670.000		53.670.000		53.670.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	21	53.670.000	21	53.670.000	21	53.670.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha				199.838.000		199.838.000		189.638.000		

					Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	45	199.838.000	45	199.838.000	45	189.638.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	60	199.500.000	60	199.500.000	60	190.900.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					199.500.000		199.500.000		190.900.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	60	199.500.000	60	199.500.000	60	190.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				62.500.000		62.500.000		62.500.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	35	62.500.000	35	62.500.000	35	62.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				137.000.000		137.000.000		128.400.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	Laporan	60	137.000.000	60	137.000.000	60	128.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	60	197.900.000	60	197.900.000	60	197.900.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.03.1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					197.900.000		197.900.000		197.900.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	60	197.900.000	60	197.900.000	60	197.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				82.400.000		82.400.000		82.400.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Dokumen	50	82.400.000	50	82.400.000	50	82.400.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				115.500.000		115.500.000		115.500.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	Laporan	35	115.500.000	35	115.500.000	35	115.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	81.250.000	60	81.250.000	60	77.830.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka											

		3.29.03.1.03		Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					81.250.000		81.250.000		77.830.000		
						Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	81.250.000	60	81.250.000	60	77.830.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				22.500.000		22.500.000		26.580.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	15	22.500.000	15	22.500.000	15	26.580.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				58.750.000		58.750.000		51.250.000		
						Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	20	58.750.000	20	58.750.000	20	51.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**54.876.920.000**		**55.014.140.000**		**53.988.516.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71		71		71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**53.908.232.000**		**54.014.952.000**		**52.996.786.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90.25	53.908.232.000	90.25	90	90.25	52.996.786.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.908.232.000		54.014.952.000		52.996.786.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	914.131.000	100	914.131.000	100	939.311.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.116.000		294.116.000		271.796.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	294.116.000	100	294.116.000	100	271.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				123.596.000		123.596.000		101.276.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	123.596.000	2	123.596.000	2	101.276.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.895.000		15.895.000		15.895.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	15.895.000	2	15.895.000	2	15.895.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.750.000		24.750.000		24.750.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	24.750.000	4	24.750.000	4	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.625.000		8.625.000		8.625.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.625.000	1	8.625.000	1	8.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				97.750.000		97.750.000		97.750.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	97.750.000	12	97.750.000	12	97.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.250.000		36.250.000		36.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	37	36.250.000	37	36.250.000	37	36.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.250.000		36.250.000		36.250.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	37	36.250.000	37	36.250.000	37	36.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					442.915.000		442.915.000		449.415.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	442.915.000	12	442.915.000	12	449.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		85.000.000		97.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	85.000.000	12	85.000.000	12	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.915.000		352.915.000		346.915.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	352.915.000	12	352.915.000	12	346.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					76.650.000		76.650.000		117.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	25	76.650.000	25	76.650.000	25	117.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.650.000		23.650.000		40.650.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	23.650.000	3	23.650.000	3	40.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.500.000		6.500.000		6.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		54.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		16.500.000		16.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	20	16.500.000	20	16.500.000	20	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.600.858.000	100	40.707.578.000	100	39.868.317.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.854.878.000		34.854.878.000		33.845.672.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.854.878.000	12	34.854.878.000	12	33.845.672.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				34.062.298.000		34.062.298.000		33.027.892.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	190	34.062.298.000	190	34.062.298.000	190	33.027.892.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				395.340.000		395.340.000		393.540.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	395.340.000	12	395.340.000	12	393.540.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				135.000.000		135.000.000		147.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	135.000.000	12	135.000.000	12	147.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				217.240.000		217.240.000		232.240.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	217.240.000	12	217.240.000	12	232.240.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					345.000.000		345.000.000		345.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	345.000.000	12	345.000.000	12	345.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					188.600.000		295.320.000		285.320.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	188.600.000	100	295.320.000	100	285.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						106.720.000		106.720.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			184	106.720.000	184	106.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	36	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				13.600.000		13.600.000		13.600.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	72	13.600.000	72	13.600.000	72	13.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				35.000.000		35.000.000		25.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	35.000.000	10	35.000.000	10	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.381.104.000		1.381.104.000		1.371.104.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.381.104.000	100	1.381.104.000	100	1.371.104.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				202.354.000		202.354.000		227.354.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	202.354.000	2	202.354.000	2	227.354.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		180.000.000		170.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	180.000.000	5	180.000.000	5	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				58.750.000		58.750.000		58.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	58.750.000	1	58.750.000	1	58.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		50.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					722.000.000		722.000.000		722.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	722.000.000	6	722.000.000	6	722.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				690.000.000		690.000.000		690.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4	690.000.000	2	690.000.000	2	690.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.519.026.000		2.519.026.000		2.708.971.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.519.026.000	12	2.519.026.000	12	2.708.971.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.250.000		21.250.000		21.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	21.250.000	12	21.250.000	12	21.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.600.000		16.600.000		16.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	16.600.000	12	16.600.000	12	16.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.881.176.000		1.881.176.000		2.071.121.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.881.176.000	12	1.881.176.000	12	2.071.121.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					590.250.000		590.250.000		590.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	590.250.000	72	590.250.000	72	590.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		25.000.000		15.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	25.000.000	4	25.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.000.000		210.000.000		220.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17	210.000.000	17	210.000.000	17	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.250.000		5.250.000		5.250.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	5.250.000	5	5.250.000	5	5.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.120.672.000	100	1.120.672.000	100	1.120.672.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					414.158.000		414.158.000		414.158.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	414.158.000	100	414.158.000	100	414.158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.400.000		8.400.000		8.400.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				225.500.000		225.500.000		225.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	225.500.000	2	225.500.000	2	225.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.400.000		17.400.000		17.400.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	17.400.000	3	17.400.000	3	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.858.000		33.858.000		33.858.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.858.000	3	33.858.000	3	33.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		102.000.000		102.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	12	102.000.000	12	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.143.000		100.143.000		100.143.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	40	100.143.000	40	100.143.000	40	100.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				57.000.000		57.000.000		57.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	57.000.000	1	57.000.000	1	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.143.000		43.143.000		43.143.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	43.143.000	6	43.143.000	6	43.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					302.571.000		302.571.000		311.071.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	302.571.000	12	302.571.000	12	311.071.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.200.000		64.200.000		72.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	64.200.000	12	64.200.000	12	72.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				233.371.000		233.371.000		233.371.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	233.371.000	12	233.371.000	12	233.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					239.600.000		239.600.000		231.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	20	239.600.000	20	239.600.000	20	231.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.300.000		36.300.000		27.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	36.300.000	3	36.300.000	3	27.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.700.000		19.700.000		19.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	19.700.000	10	19.700.000	10	19.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	777.279.000	100	777.279.000	100	751.442.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					219.400.000		219.400.000		237.100.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	219.400.000	100	219.400.000	100	237.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.800.000		8.800.000		8.800.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.800.000	1	8.800.000	1	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.500.000		45.500.000		56.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	45.500.000	2	45.500.000	2	56.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		12.500.000		12.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.300.000		33.300.000		33.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.300.000	3	33.300.000	3	33.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.800.000		8.800.000		8.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.800.000	1	8.800.000	1	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.500.000		93.500.000		100.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	93.500.000	12	93.500.000	12	100.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.679.000		403.679.000		360.142.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	403.679.000	12	403.679.000	12	360.142.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.600.000		60.600.000		60.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	60.600.000	12	60.600.000	12	60.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				338.079.000		338.079.000		294.542.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	338.079.000	12	338.079.000	12	294.542.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	90.000.000	19	90.000.000	19	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.000.000		38.000.000		38.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	38.000.000	3	38.000.000	3	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	27.000.000	15	27.000.000	15	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	936.664.000	100	936.664.000	100	936.664.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					279.429.000		279.429.000		269.429.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	279.429.000	100	279.429.000	100	269.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		12.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.379.000		125.379.000		122.879.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	125.379.000	2	125.379.000	2	122.879.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.500.000		26.500.000		16.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	26.500.000	4	26.500.000	4	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.800.000		19.800.000		19.800.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	19.800.000	5	19.800.000	5	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.250.000		72.250.000		72.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	72.250.000	12	72.250.000	12	72.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8.300.000		8.300.000		8.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	11	8.300.000	11	8.300.000	11	8.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				3.300.000		3.300.000		3.300.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					465.012.000		465.012.000		479.012.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	465.012.000	12	465.012.000	12	479.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.000.000		83.000.000		95.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	83.000.000	12	83.000.000	12	95.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				377.012.000		377.012.000		378.512.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	377.012.000	12	377.012.000	12	378.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.723.000		119.723.000		115.723.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	38	119.723.000	38	119.723.000	38	115.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.923.000		38.923.000		24.923.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	38.923.000	2	38.923.000	2	24.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.300.000		3.300.000		13.300.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	8	3.300.000	8	3.300.000	8	13.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		27.500.000		27.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	27	27.500.000	27	27.500.000	27	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.021.000.000	100	2.021.000.000	100	1.776.663.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					285.625.000		285.625.000		301.957.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	285.625.000	100	285.625.000	100	301.957.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				107.675.000		107.675.000		130.772.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	107.675.000	2	107.675.000	2	130.772.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.200.000		16.200.000		16.200.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	16.200.000	1	16.200.000	1	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.500.000		33.500.000		33.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	33.500.000	1	33.500.000	1	33.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128.250.000		128.250.000		121.485.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	128.250.000	12	128.250.000	12	121.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					758.150.000		758.150.000		902.846.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	50	758.150.000	50	758.150.000	50	902.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				758.150.000		758.150.000		902.846.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	50	758.150.000	50	758.150.000	50	902.846.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					439.100.000		439.100.000		276.290.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	439.100.000	12	439.100.000	12	276.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				434.100.000		434.100.000		271.290.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	434.100.000	12	434.100.000	12	271.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					473.925.000		473.925.000		231.370.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	209	473.925.000	209	473.925.000	209	231.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				461.925.000		461.925.000		219.370.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	208	461.925.000	208	461.925.000	208	219.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.002.502.000	100	1.002.502.000	100	1.004.602.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					305.900.000		305.900.000		305.900.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	305.900.000	100	305.900.000	100	305.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.000.000		98.000.000		98.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	98.000.000	2	98.000.000	2	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.500.000		20.500.000		20.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	20.500.000	3	20.500.000	3	20.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.400.000		32.400.000		32.400.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	32.400.000	3	32.400.000	3	32.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.000.000		13.000.000		13.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.000.000		119.000.000		119.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	119.000.000	12	119.000.000	12	119.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					103.825.000		103.825.000		100.925.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	18	103.825.000	18	103.825.000	18	100.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				48.000.000		48.000.000		45.100.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	48.000.000	1	48.000.000	1	45.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.825.000		55.825.000		55.825.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	55.825.000	7	55.825.000	7	55.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					358.577.000		358.577.000		358.577.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	358.577.000	12	358.577.000	12	358.577.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.750.000		88.750.000		88.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	88.750.000	12	88.750.000	12	88.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				264.827.000		264.827.000		264.827.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	264.827.000	12	264.827.000	12	264.827.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000		170.000.000		175.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	38	170.000.000	38	170.000.000	38	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		70.000.000		75.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	70.000.000	3	70.000.000	3	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.000.000		65.000.000		65.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	823.018.000	100	823.018.000	100	823.018.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					239.713.000		239.713.000		249.463.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	239.713.000	100	239.713.000	100	249.463.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.300.000		60.300.000		60.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	60.300.000	2	60.300.000	2	60.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.102.000		35.102.000		36.102.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	35.102.000	5	35.102.000	5	36.102.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		7.545.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.811.000		106.811.000		118.016.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	106.811.000	12	106.811.000	12	118.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					67.000.000		67.000.000		67.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	35	67.000.000	35	67.000.000	35	67.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				67.000.000		67.000.000		67.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	67.000.000	1	67.000.000	1	67.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.755.000		368.755.000		372.255.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	368.755.000	12	368.755.000	12	372.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				73.716.000		73.716.000		77.916.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	73.716.000	12	73.716.000	12	77.916.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.039.000		290.039.000		290.339.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	290.039.000	12	290.039.000	12	290.339.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					83.350.000		83.350.000		70.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	83.350.000	48	83.350.000	48	70.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.100.000		23.100.000		22.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	23.100.000	3	23.100.000	3	22.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.250.000		35.250.000		23.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	44	35.250.000	44	35.250.000	44	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	934.640.000	100	934.640.000	100	928.592.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		58.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	58.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		58.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	58.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					396.940.000		396.940.000		400.840.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	396.940.000	100	396.940.000	100	400.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.500.000		220.500.000		219.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	220.500.000	2	220.500.000	2	219.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		12.500.000		12.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.440.000		28.440.000		28.440.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	28.440.000	2	28.440.000	2	28.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		9.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	9.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		102.000.000		108.200.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	12	102.000.000	12	108.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				11.000.000		11.000.000		11.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					376.500.000		376.500.000		371.952.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	376.500.000	12	376.500.000	12	371.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				71.500.000		71.500.000		71.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	71.500.000	12	71.500.000	12	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		300.000.000		295.452.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	295.452.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.000.000		86.000.000		86.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	86.000.000	19	86.000.000	19	86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.500.000		38.500.000		38.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	38.500.000	3	38.500.000	3	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.000.000		28.000.000		28.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	28.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		16.500.000		16.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	16.500.000	7	16.500.000	7	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	867.500.000	100	867.500.000	100	895.611.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		58.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	58.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		58.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	58.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.000.000		254.000.000		246.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	254.000.000	100	254.000.000	100	246.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				103.000.000		103.000.000		83.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	103.000.000	2	103.000.000	2	83.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		32.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	30.000.000	3	30.000.000	3	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76.500.000		76.500.000		86.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	76.500.000	12	76.500.000	12	86.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000		60.000.000		77.325.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	51	60.000.000	51	60.000.000	51	77.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		62.325.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	7	45.000.000	7	45.000.000	7	62.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.300.000		387.300.000		393.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	387.300.000	12	387.300.000	12	393.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.000.000		64.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	64.000.000	12	64.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.300.000		318.300.000		318.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	318.300.000	12	318.300.000	12	318.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.000.000		102.000.000		120.386.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	102.000.000	18	102.000.000	18	120.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.000.000		17.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	17.000.000	2	17.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		58.886.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	58.886.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		26.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14	20.000.000	14	20.000.000	14	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	988.187.000	100	988.187.000	100	988.187.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		62.875.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	62.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		62.875.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	62.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					337.810.000		337.810.000		317.873.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	337.810.000	100	337.810.000	100	317.873.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				143.100.000		143.100.000		118.700.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	143.100.000	2	143.100.000	2	118.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		13.500.000		13.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.116.000		33.116.000		33.116.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	33.116.000	3	33.116.000	3	33.116.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.594.000		7.594.000		7.594.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.594.000	1	7.594.000	1	7.594.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.000.000		119.000.000		123.463.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	119.000.000	12	119.000.000	12	123.463.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					52.250.000		52.250.000		52.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	39	52.250.000	39	52.250.000	39	52.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.250.000		46.250.000		46.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	38	46.250.000	38	46.250.000	38	46.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					421.427.000		421.427.000		412.598.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	421.427.000	12	421.427.000	12	412.598.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.910.000		3.910.000		4.910.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.910.000	12	3.910.000	12	4.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.817.000		83.817.000		73.868.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	83.817.000	12	83.817.000	12	73.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				333.700.000		333.700.000		333.820.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	333.700.000	12	333.700.000	12	333.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.500.000		112.500.000		142.591.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	112.500.000	12	112.500.000	12	142.591.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.500.000		45.500.000		45.591.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	45.500.000	3	45.500.000	3	45.591.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		65.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.092.831.000	100	1.092.831.000	100	1.105.052.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					465.280.000		465.280.000		482.381.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	465.280.000	100	465.280.000	100	482.381.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				265.450.000		265.450.000		265.450.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	265.450.000	2	265.450.000	2	265.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.500.000		15.500.000		15.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	15.500.000	4	15.500.000	4	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.330.000		30.330.000		30.730.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5	30.330.000	5	30.330.000	5	30.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		7.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		1.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.000.000	12	3.000.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.000.000		119.000.000		139.701.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	119.000.000	12	119.000.000	12	139.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.650.000		1.650.000		1.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.650.000		1.650.000		1.650.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1.650.000	1	1.650.000	1	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					416.701.000		416.701.000		416.821.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	416.701.000	12	416.701.000	12	416.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.500.000		82.500.000		82.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	82.500.000	12	82.500.000	12	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				329.201.000		329.201.000		329.321.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	329.201.000	12	329.201.000	12	329.321.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.000.000		145.000.000		140.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	145.000.000	33	145.000.000	33	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		30.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	40.000.000	3	40.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	27	25.000.000	27	25.000.000	27	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	894.615.000	100	894.615.000	100	891.115.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					214.665.000		214.665.000		214.665.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	214.665.000	100	214.665.000	100	214.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.850.000		35.850.000		35.850.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	35.850.000	2	35.850.000	2	35.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.500.000		22.500.000		22.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	22.500.000	3	22.500.000	3	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.815.000		3.815.000		3.815.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3.815.000	12	3.815.000	12	3.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.500.000		8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		102.000.000		102.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	12	102.000.000	12	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000		35.000.000		31.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	50	35.000.000	50	35.000.000	50	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				35.000.000		35.000.000		31.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	1	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					424.500.000		424.500.000		424.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	424.500.000	12	424.500.000	12	424.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.000.000		88.000.000		88.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	88.000.000	12	88.000.000	12	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				331.500.000		331.500.000		331.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	331.500.000	12	331.500.000	12	331.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.250.000		156.250.000		156.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	43	156.250.000	43	156.250.000	43	156.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.000.000		47.000.000		47.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	47.000.000	3	47.000.000	3	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				8.250.000		8.250.000		8.250.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	8.250.000	2	8.250.000	2	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.000.000		26.000.000		26.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	37	26.000.000	37	26.000.000	37	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	934.335.000	100	934.335.000	100	967.540.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.200.000		64.200.000		64.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	64.200.000	12	64.200.000	12	64.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					325.043.000		325.043.000		322.043.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	325.043.000	100	325.043.000	100	322.043.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				137.020.000		137.020.000		134.020.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	137.020.000	2	137.020.000	2	134.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.023.000		36.023.000		36.023.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	36.023.000	3	36.023.000	3	36.023.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102.000.000		102.000.000		102.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	102.000.000	12	102.000.000	12	102.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.000.000		27.000.000		27.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.592.000		410.592.000		402.626.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	410.592.000	12	410.592.000	12	402.626.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				87.400.000		87.400.000		79.434.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	87.400.000	12	87.400.000	12	79.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.192.000		318.192.000		318.192.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	318.192.000	12	318.192.000	12	318.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.500.000		107.500.000		151.671.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	107.500.000	47	107.500.000	47	151.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		40.000.000		34.171.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	40.000.000	3	40.000.000	3	34.171.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.500.000		32.500.000		82.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	42	32.500.000	42	32.500.000	42	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**968.688.000**		**999.188.000**		**991.730.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	968.688.000	3	3	3	991.730.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						968.688.000		999.188.000		991.730.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	968.688.000	100	999.188.000	100	991.730.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					968.688.000		999.188.000		991.730.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	968.688.000	100	999.188.000	100	991.730.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				603.520.000		634.020.000		634.020.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	603.520.000	10	634.020.000	10	634.020.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				365.168.000		365.168.000		357.710.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	365.168.000	18	365.168.000	18	357.710.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan									**2.725.496.000**		**2.725.496.000**		**2.714.957.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	301		301		301		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya konservasi air tanah								**2.725.496.000**		**2.725.496.000**		**2.714.957.000**		
						Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3.6	2.725.496.000	3.6	4	3.6	2.714.957.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						2.725.496.000		2.725.496.000		2.714.957.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	984.900.000	100	984.900.000	100	974.792.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					984.900.000		984.900.000		974.792.000		
						Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	984.900.000	100	984.900.000	100	974.792.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		3.29.02.1.03.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				984.900.000		984.900.000		974.792.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah	Dokumen	1450	984.900.000	1450	984.900.000	1450	974.792.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	%	27.5	709.346.000	27.5	709.346.000	27.5	704.395.000	Bidang Geologi dan Air Tanah	
		3.29.02.1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					409.946.000		409.946.000		406.904.000		
						Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah	Kabupaten/ Kota	35	409.946.000	35	409.946.000	35	406.904.000		
		3.29.02.1.01.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				409.946.000		409.946.000		406.904.000		
						Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah	Dokumen	2	409.946.000	2	409.946.000	2	406.904.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					299.400.000		299.400.000		297.491.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	%	100	299.400.000	100	299.400.000	100	297.491.000		
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				299.400.000		299.400.000		297.491.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah	Laporan	4	299.400.000	4	299.400.000	4	297.491.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3.4	63.700.000	3.4	63.700.000	3.4	63.700.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					63.700.000		63.700.000		63.700.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria	%	100	63.700.000	100	63.700.000	100	63.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				63.700.000		63.700.000		63.700.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria	Laporan	25	63.700.000	25	63.700.000	25	63.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2.4	46.900.000	2.4	46.900.000	2.4	46.900.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					46.900.000		46.900.000		46.900.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	46.900.000	100	46.900.000	100	46.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				46.900.000		46.900.000		46.900.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	Laporan	20	46.900.000	20	46.900.000	20	46.900.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2.8	58.500.000	2.8	58.500.000	2.8	58.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					58.500.000		58.500.000		58.500.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	%	100	58.500.000	100	58.500.000	100	58.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				58.500.000		58.500.000		58.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi	Laporan	25	58.500.000	25	58.500.000	25	58.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	2.9	148.000.000	2.9	148.000.000	2.9	148.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					148.000.000		148.000.000		148.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak	%	100	89.000.000	100	89.000.000	100	89.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				89.000.000		89.000.000		89.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak	Laporan	45	89.000.000	45	89.000.000	45	89.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak	%	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				59.000.000		59.000.000		59.000.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	30	59.000.000	30	59.000.000	30	59.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2.2	47.700.000	2.2	47.700.000	2.2	47.700.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					47.700.000		47.700.000		47.700.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	%	100	47.700.000	100	47.700.000	100	47.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				47.700.000		47.700.000		47.700.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan	Laporan	20	47.700.000	20	47.700.000	20	47.700.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1.6	53.725.000	1.6	53.725.000	1.6	53.725.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					53.725.000		53.725.000		53.725.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah	%	100	53.725.000	100	53.725.000	100	53.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				53.725.000		53.725.000		53.725.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah	Laporan	20	53.725.000	20	53.725.000	20	53.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1.7	154.800.000	1.7	154.800.000	1.7	154.800.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					154.800.000		154.800.000		154.800.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	%	100	92.800.000	100	92.800.000	100	92.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				92.800.000		92.800.000		92.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara	Laporan	50	92.800.000	50	92.800.000	50	92.800.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara	%	100	62.000.000	100	62.000.000	100	62.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				62.000.000		62.000.000		62.000.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	30	62.000.000	30	62.000.000	30	62.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1.6	79.500.000	1.6	79.500.000	1.6	79.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					79.500.000		79.500.000		79.500.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu	%	100	79.500.000	100	79.500.000	100	79.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				79.500.000		79.500.000		79.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu	Laporan	25	79.500.000	25	79.500.000	25	79.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2.7	84.750.000	2.7	84.750.000	2.7	84.750.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					84.750.000		84.750.000		84.750.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	%	100	84.750.000	100	84.750.000	100	84.750.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				84.750.000		84.750.000		84.750.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan	Laporan	25	84.750.000	25	84.750.000	38	84.750.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4.1	183.000.000	4.1	183.000.000	4.1	191.600.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					183.000.000		183.000.000		191.600.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	%	100	108.000.000	100	108.000.000	100	116.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				108.000.000		108.000.000		116.600.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara	Laporan	50	108.000.000	50	108.000.000	50	116.600.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara	%	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1.6	63.250.000	1.6	63.250.000	1.6	63.250.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					63.250.000		63.250.000		63.250.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	%	100	63.250.000	100	63.250.000	100	63.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				63.250.000		63.250.000		63.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo	Laporan	30	63.250.000	30	63.250.000	30	63.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1.8	47.425.000	1.8	47.425.000	1.8	43.345.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
		3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					47.425.000		47.425.000		43.345.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	47.425.000	100	47.425.000	100	43.345.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				47.425.000		47.425.000		43.345.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	Laporan	25	47.425.000	25	47.425.000	25	43.345.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
JUMLAH									**83.079.973.000**		**88.186.693.000**		**86.974.667.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**61.668.339.000**		**54.533.059.000**		**54.431.470.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		80		76.5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**60.106.395.000**		**53.151.115.000**		**53.229.011.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86.1	60.106.395.000	86.1	86	86.1	53.229.011.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						60.106.395.000		53.151.115.000		53.229.011.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.220.745.000	100	1.220.745.000	100	1.321.982.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.080.000		76.080.000		76.080.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	76.080.000	1	76.080.000	4	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				76.080.000		76.080.000		76.080.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	76.080.000	1	76.080.000	4	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.366.000		9.366.000		9.366.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.366.000	1	9.366.000	1	9.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.366.000		9.366.000		9.366.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	9.366.000	1	9.366.000	1	9.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					274.695.000		274.695.000		292.932.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	274.695.000	100	274.695.000	100	292.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		48.000.000		56.237.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	48.000.000	2	48.000.000	4	56.237.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.000.000		37.000.000		47.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	37.000.000	1	37.000.000	4	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.695.000		45.695.000		45.695.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	45.695.000	3	45.695.000	4	45.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000		17.000.000		17.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	17.000.000	4	17.000.000	4	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	10.500.000	8	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.500.000		10.500.000		10.500.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.500.000	1	10.500.000	2	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					614.800.000		614.800.000		657.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	614.800.000	3	614.800.000	3	657.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.000.000		145.000.000		188.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	145.000.000	4	145.000.000	4	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				466.800.000		466.800.000		466.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	466.800.000	4	466.800.000	4	466.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.304.000		235.304.000		275.304.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	235.304.000	41	235.304.000	32	275.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66.304.000		66.304.000		78.304.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	66.304.000	5	66.304.000	7	78.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				89.000.000		89.000.000		104.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	89.000.000	1	89.000.000	2	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		23.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	10	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	0	43.347.390.000	0	43.334.110.000	100	42.611.826.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.385.190.000		34.385.190.000		32.326.079.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	34.385.190.000	5	34.385.190.000	5	32.326.079.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				33.264.030.000		33.264.030.000		31.442.949.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	204	33.264.030.000	204	33.264.030.000	204	31.442.949.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.009.760.000		1.009.760.000		716.230.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.009.760.000	12	1.009.760.000	12	716.230.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.575.000		21.575.000		77.075.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	21.575.000	12	21.575.000	12	77.075.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9.825.000		9.825.000		9.825.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	9.825.000	12	9.825.000	12	9.825.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					175.000.000		175.000.000		172.300.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	175.000.000	2	175.000.000	2	172.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		75.000.000		72.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	72.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					92.850.000		92.850.000		157.850.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	92.850.000	2	92.850.000	2	157.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0002			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				65.000.000		65.000.000		130.000.000		
						Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	2	65.000.000	2	65.000.000	2	130.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				27.850.000		27.850.000		27.850.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	27.850.000	2	27.850.000	2	27.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.295.000.000		1.401.720.000		1.971.720.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	3	1.295.000.000	3	1.401.720.000	3	1.971.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						106.720.000		106.720.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			184	106.720.000	184	106.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000		150.000.000		135.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		75.000.000		60.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	75.000.000	20	75.000.000	20	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1.070.000.000		1.070.000.000		1.670.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	800	1.070.000.000	800	1.070.000.000	800	1.670.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.498.250.000		1.498.250.000		1.673.850.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.498.250.000	100	1.498.250.000	100	1.673.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		40.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.500.000		111.500.000		111.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	111.500.000	10	111.500.000	10	111.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				160.000.000		160.000.000		140.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	160.000.000	1	160.000.000	1	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				115.000.000		115.000.000		110.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	115.000.000	1	115.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		60.005.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.005.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		146.295.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	146.295.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				813.000.000		813.000.000		964.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	813.000.000	12	813.000.000	12	964.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.000.000		40.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				48.750.000		48.750.000		51.450.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	48.750.000	4	48.750.000	4	51.450.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					316.600.000		306.600.000		571.827.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	33	316.600.000	33	306.600.000	33	571.827.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		122.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	24	25.000.000	24	25.000.000	74	122.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				197.850.000		197.850.000		365.577.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	22	197.850.000	22	197.850.000	32	365.577.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.750.000		83.750.000		83.750.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	2	93.750.000	2	83.750.000	2	83.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.099.500.000		4.099.500.000		3.998.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	4.099.500.000	2	4.099.500.000	2	3.998.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.675.000.000		1.675.000.000		1.628.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1.675.000.000	12	1.675.000.000	12	1.628.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.414.500.000		2.414.500.000		2.359.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	2.414.500.000	2	2.414.500.000	2	2.359.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.485.000.000		1.375.000.000		1.740.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	1.485.000.000	56	1.375.000.000	56	1.740.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				198.000.000		198.000.000		148.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	198.000.000	25	198.000.000	25	148.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				355.000.000		355.000.000		705.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	355.000.000	1	355.000.000	1	705.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000						
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	40	110.000.000	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				487.000.000		487.000.000		552.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	487.000.000	10	487.000.000	10	552.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	6.310.070.000	100	2.368.070.000	100	2.537.276.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					82.320.000		82.320.000		82.320.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	82.320.000	12	82.320.000	12	82.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				82.320.000		82.320.000		82.320.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	82.320.000	12	82.320.000	12	82.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		100		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					236.570.000		236.570.000		296.070.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	236.570.000	100	236.570.000	100	296.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				84.070.000		84.070.000		91.570.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	84.070.000	1	84.070.000	1	91.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.500.000		37.500.000		43.500.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	37.500.000	1	37.500.000	1	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								6.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48	35.000.000	48	35.000.000	48	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		90.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	48	50.000.000	48	50.000.000	48	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.122.000.000						
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	9	4.122.000.000	9		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.122.000.000						
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	4.122.000.000	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.234.180.000		1.234.180.000		1.234.180.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.234.180.000	3	1.234.180.000	2	1.234.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				355.780.000		355.780.000		355.780.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	355.780.000	12	355.780.000	12	355.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				878.400.000		878.400.000		878.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	878.400.000	2	878.400.000	2	878.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600.000.000		780.000.000		889.706.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	600.000.000	30	780.000.000	10	889.706.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	80.000.000	2	80.000.000	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		330.000.000		440.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	6	150.000.000	6	330.000.000	6	440.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				370.000.000		370.000.000		369.206.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	370.000.000	2	370.000.000	2	369.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.300.650.000	100	2.300.650.000	100	2.415.159.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					88.680.000		88.680.000		88.680.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	88.680.000	3	88.680.000	2	88.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				88.680.000		88.680.000		88.680.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	88.680.000	12	88.680.000	12	88.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	45.000.000	12	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					522.370.000		522.370.000		644.548.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	522.370.000	100	522.370.000	100	644.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	20.000.000	3	20.000.000	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.970.000		34.970.000		34.970.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	34.970.000	12	34.970.000	1	34.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				139.400.000		139.400.000		260.853.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	139.400.000	1	139.400.000	6	260.853.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.725.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	20.000.000	0	20.000.000	1	20.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				223.000.000		223.000.000		223.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	223.000.000	2	223.000.000	1	223.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					471.000.000		471.000.000		479.547.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	16	471.000.000	16	471.000.000	10	479.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				471.000.000		471.000.000		479.547.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	471.000.000	0	471.000.000	10	479.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					772.000.000		772.000.000		756.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	772.000.000	12	772.000.000	3	756.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				285.000.000		285.000.000		285.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	285.000.000	3	285.000.000	1	285.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				487.000.000		487.000.000		471.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	2	487.000.000	2	487.000.000	2	471.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					401.600.000		401.600.000		401.109.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	41	401.600.000	41	401.600.000	56	401.109.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.000.000		26.000.000		26.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.100.000		30.100.000		30.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	30.100.000	1	30.100.000	2	30.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	5.000.000	5	5.000.000	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.000.000		57.000.000		57.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	57.000.000	3	57.000.000	3	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				45.000.000		45.000.000		45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	45.000.000	0	45.000.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0	50.000.000	0	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				134.000.000		134.000.000		133.509.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	134.000.000	1	134.000.000	1	133.509.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.500.000		29.500.000		29.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	29.500.000	10	29.500.000	10	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	25.000.000	10	25.000.000	25	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.233.040.000	100	1.233.040.000	100	1.433.040.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					86.280.000		86.280.000		60.960.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	86.280.000	5	86.280.000	5	60.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				86.280.000		86.280.000		60.960.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	5	86.280.000	5	86.280.000	5	60.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					307.260.000		307.260.000		349.380.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	307.260.000	100	307.260.000	100	349.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.260.000		112.260.000		112.260.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	8	112.260.000	8	112.260.000	5	112.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	15.000.000	3	15.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2	35.000.000	2	35.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		75.000.000		117.120.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	75.000.000	2	75.000.000	1	117.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.000.000		120.000.000		320.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	9	120.000.000	9	120.000.000	9	320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	50.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	9		9		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		250.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	7	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					516.000.000		516.000.000		499.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	516.000.000	3	516.000.000	3	499.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				176.000.000		176.000.000		159.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	176.000.000	4	176.000.000	4	159.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				340.000.000		340.000.000		340.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	340.000.000	3	340.000.000	7	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					178.500.000		178.500.000		178.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	19	178.500.000	19	178.500.000	54	178.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.500.000		66.500.000		66.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	66.500.000	5	66.500.000	7	66.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	70.000.000	0	70.000.000	14	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	30	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.694.500.000	100	2.694.500.000	100	2.909.728.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					93.480.000		93.480.000		93.480.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	93.480.000	12	93.480.000	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				93.480.000		93.480.000		93.480.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	93.480.000	12	93.480.000	12	93.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	40.000.000	12	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	40.000.000	12	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					318.179.000		318.179.000		318.614.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	318.179.000	100	318.179.000	100	318.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	55.000.000	12	55.000.000	11	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				84.050.000		84.050.000		84.050.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	11	84.050.000	11	84.050.000	11	84.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.800.000		19.800.000		20.235.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	19.800.000	12	19.800.000	12	20.235.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.365.000		4.365.000		4.365.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	4.365.000	12	4.365.000	12	4.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.964.000		49.964.000		49.964.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	49.964.000	12	49.964.000	12	49.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.040.000.000		40.000.000		265.960.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	129	3.040.000.000	129	40.000.000	1	265.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel								113.960.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket					80	113.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.040.000.000		40.000.000		152.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	3.040.000.000	1	40.000.000	1	152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.229.620.000		1.229.620.000		1.218.825.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.229.620.000	3	1.229.620.000	3	1.218.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.720.000		7.720.000		6.925.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.720.000	12	7.720.000	12	6.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				375.000.000		375.000.000		365.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	375.000.000	12	375.000.000	12	365.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.900.000		846.900.000		846.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	846.900.000	12	846.900.000	12	846.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					973.221.000		973.221.000		972.849.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	30	973.221.000	30	973.221.000	211	972.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.500.000		49.500.000		49.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	49.500.000	2	49.500.000	3	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				202.600.000		202.600.000		202.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	100	202.600.000	100	202.600.000	100	202.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				525.421.000		525.421.000		525.421.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	525.421.000	1	525.421.000	1	525.421.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.500.000		125.500.000		125.128.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	125.500.000	1	125.500.000	94	125.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.200.000		40.200.000		40.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	40.200.000	1	40.200.000	1	40.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								**1.561.944.000**		**1.381.944.000**		**1.202.459.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.05	1.561.944.000	3.05	3	3.07	1.202.459.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.561.944.000		1.381.944.000		1.202.459.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	0	1.561.944.000	0	1.381.944.000	100	1.202.459.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.561.944.000		1.381.944.000		1.202.459.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.561.944.000	100	1.381.944.000	100	1.202.459.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				742.545.000		639.245.000		562.245.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	742.545.000	4	639.245.000	4	562.245.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				819.399.000		742.699.000		640.214.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	8	819.399.000	8	742.699.000	8	640.214.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan									**31.983.395.000**		**29.225.395.000**		**28.685.097.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3.25		3.25		3.25		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB								**31.983.395.000**		**29.225.395.000**		**28.685.097.000**		
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	3.89	31.983.395.000	3.89	4	3.89	28.685.097.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						30.869.870.000		28.111.870.000		27.635.662.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.38	12.537.469.000	4.38	12.537.469.000	4.38	12.436.203.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					12.537.469.000		12.537.469.000		12.436.203.000		
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Orang	100	12.537.469.000	100	12.537.469.000	70	12.436.203.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.141.553.000		1.141.553.000		1.040.287.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	1.141.553.000	3	1.141.553.000	3	1.040.287.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				11.395.916.000		11.395.916.000		11.395.916.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat di BIKDK	Dokumen	1	11.395.916.000	2	11.395.916.000	2	11.395.916.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3.45	2.830.100.000	3.45	2.072.100.000	3.45	1.984.308.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.830.100.000		2.072.100.000		1.984.308.000		
						Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Orang	340	2.830.100.000	340	2.072.100.000	150	1.984.308.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.830.100.000		2.072.100.000		1.984.308.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	2.830.100.000	1	2.072.100.000	1	1.984.308.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
						Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2.25	5.170.141.000	2.25	5.198.099.000	2.25	5.087.881.000	Bidang Industri Agro	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					5.170.141.000		5.198.099.000		5.087.881.000		
						Jumlah Informasi Industri Agro	Dokumen	1	85.630.000	1	85.630.000	1	85.630.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				85.630.000		85.630.000		85.630.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	85.630.000	1	85.630.000	1	85.630.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	12	3.383.911.000	12	3.411.869.000	90	3.348.759.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.443.815.000		1.293.815.000		1.230.705.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	1.443.815.000	2	1.293.815.000	2	1.230.705.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.940.096.000		2.118.054.000		2.118.054.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1.940.096.000	1	2.118.054.000	3	2.118.054.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	
						Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih	Orang	200	1.700.600.000	200	1.700.600.000	250	1.653.492.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.700.600.000		1.700.600.000		1.653.492.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	1.700.600.000	2	1.700.600.000	4	1.653.492.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2.25	3.843.068.000	2.25	3.815.110.000	2.25	3.697.878.000	Bidang Industri Non Agro	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					3.843.068.000		3.815.110.000		3.697.878.000		
						Jumlah Informasi Industri Non Agro	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				40.000.000		40.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
						Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	9	2.966.838.000	9	2.938.880.000	405	2.872.896.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.318.480.000		1.318.480.000		1.252.496.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	1.318.480.000	2	1.318.480.000	3	1.252.496.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.648.358.000		1.620.400.000		1.620.400.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1.648.358.000	1	1.620.400.000	4	1.620.400.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih	Orang	100	836.230.000	100	836.230.000	160	774.982.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				836.230.000		836.230.000		774.982.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	836.230.000	3	836.230.000	1	774.982.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	6.489.092.000	85	4.489.092.000	85	4.429.392.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
		3.31.02.1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					6.489.092.000		4.489.092.000		4.429.392.000		
						Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki	Orang	2000	6.489.092.000	2000	4.489.092.000	1300	4.429.392.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6.489.092.000		4.489.092.000		4.429.392.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	6.489.092.000	4	4.489.092.000	4	4.429.392.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						290.000.000		290.000.000		272.000.000		
						Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	7	80.000.000	7	80.000.000	7	68.000.000	Bidang Industri Agro	
		3.31.03.1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					80.000.000		80.000.000		68.000.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	5	80.000.000	5	80.000.000	10	68.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.03.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				40.000.000		40.000.000		28.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	28.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	10	210.000.000	10	210.000.000	10	204.000.000	Bidang Industri Non Agro	
		3.31.03.1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					210.000.000		210.000.000		204.000.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Dokumen	50	210.000.000	50	210.000.000	50	204.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.03.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI,IPKI Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			185.000.000		185.000.000		179.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	2	185.000.000	2	185.000.000	1	179.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						823.525.000		823.525.000		777.435.000		
						Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1.62	507.525.000	1.62	507.525.000	1.62	476.163.000	Bidang Industri Agro	
		3.31.04.1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					507.525.000		507.525.000		476.163.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS	Unit	20	507.525.000	20	507.525.000	250	476.163.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0001			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				394.692.000		394.692.000		363.330.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	394.692.000	2	394.692.000	1	363.330.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0002			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	2	40.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				72.833.000		72.833.000		72.833.000		
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen	1	72.833.000	1	72.833.000	1	72.833.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	316.000.000	2	316.000.000	2	301.272.000	Bidang Industri Non Agro	
		3.31.04.1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					316.000.000		316.000.000		301.272.000		
						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS	Unit	28	316.000.000	28	316.000.000	300	301.272.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0001			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0002			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				25.000.000		25.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				241.000.000		241.000.000		221.272.000		
						Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen	1	241.000.000	1	241.000.000	1	221.272.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (Inf)									**1.980.961.000**		**1.980.961.000**		**1.869.039.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.51		4.51		4.51		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Terjaganya Inflasi Pangan Bergejolak								**1.980.961.000**		**1.980.961.000**		**1.869.039.000**		
						Inflasi pangan bergejolak	%	4	1.980.961.000	4	4	4	1.869.039.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						1.980.961.000		1.980.961.000		1.869.039.000		
						Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	10	1.980.961.000	10	1.980.961.000	10	1.869.039.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					76.665.000		76.665.000		76.665.000		
						Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya	Komoditi	10	76.665.000	10	76.665.000	10	76.665.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				76.665.000		76.665.000		76.665.000		
						Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor	Laporan	2	76.665.000	2	76.665.000	2	76.665.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					1.904.296.000		1.904.296.000		1.792.374.000		
						Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya	Unit	34	487.656.000	34	487.656.000	35	382.674.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.0001			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas				487.656.000		487.656.000		382.674.000		

					Kabupaten/Kota										
						Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	487.656.000	12	487.656.000	4	382.674.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
						Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Lokasi	35	1.416.640.000	35	1.416.640.000	16	1.409.700.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.0002			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.416.640.000		1.416.640.000		1.409.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabiliisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi	Laporan	4	1.416.640.000	4	1.416.640.000	4	1.409.700.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (PE)									**9.001.578.000**		**11.001.578.000**		**10.534.306.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4.51		4.51		4.51		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB								**9.001.578.000**		**11.001.578.000**		**10.534.306.000**		
						Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	4.82	9.001.578.000	4.82	5	4.82	10.534.306.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						117.640.000		117.640.000		117.640.000		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
		3.30.02.1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	%	3.5	50.000.000	3.5	50.000.000	3.4	50.000.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.02.1.04.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen penerbitan SKA	Dokumen	104000	50.000.000	104000	50.000.000	104000	50.000.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
						Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	67.640.000	10	67.640.000	10	67.640.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.02.1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					12.660.000		12.660.000		12.660.000		
						Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	Unit	2	12.660.000	2	12.660.000	2	12.660.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12.660.000		12.660.000		12.660.000		
						Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perozonan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Dokumen	2	12.660.000	2	12.660.000	2	12.660.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi					42.100.000		42.100.000		42.100.000		
						Jumlah fasilitasi perijinan berusaha bagi distributor bahan berbahaya	Unit	15	42.100.000	15	42.100.000	2	42.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.02.0001			Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				42.100.000		42.100.000		42.100.000		
						Jumlah dokumen hasil fasilitasi perizinan berusaha terintegrasi secara elesktronik	Dokumen	15	42.100.000	5	42.100.000	2	42.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar					12.880.000		12.880.000		12.880.000		
						Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi Bahan Berbahaya	Unit	1	12.880.000	1	12.880.000	1	12.880.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.02.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				12.880.000		12.880.000		12.880.000		
						Jumlah surat rekomendasi perdagangan besar/ Distribusi Bahan Berbahaya melalui OSS	Dokumen	1	12.880.000	1	12.880.000	1	12.880.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	0		0		0		Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		3.30.02.1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar											
						Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi	Orang	0		0		0		SEKSI TERTIB NIAGA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.30.02.1.03.0003			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya										
						Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	Laporan	0		0		0		SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						634.445.000		634.445.000		634.445.000		
						Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	10	634.445.000	10	634.445.000	10	634.445.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.03.1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					634.445.000		634.445.000		634.445.000		
						Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih	Orang	80	162.490.000	80	162.490.000	40	162.490.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.0002			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				162.490.000		162.490.000		162.490.000		
						Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	3	162.490.000	3	162.490.000	1	162.490.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
						Jumlah Persiapan dan Pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat DIstribusi Provinsi	Kegiatan	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.0001			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	0	80.000.000	0	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
						Realisasi transaksi dipasar lelang	Kali	13	391.955.000	13	391.955.000	13	391.955.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.03.1.01.0003			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				391.955.000		391.955.000		391.955.000		
						Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	Orang	410	391.955.000	360	391.955.000	360	391.955.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						335.444.000		335.444.000		321.992.000		
						Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	265.284.000	90	265.284.000	90	251.832.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					265.284.000		265.284.000		251.832.000		
						Jumlah kegiatan pengadaan pupuk dan pestisida yang diawasi	Kegiatan	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0002			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi				36.500.000		36.500.000		36.500.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi	Laporan	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diperiksa perizinannya	Orang	20	31.100.000	20	31.100.000	20	31.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				31.100.000		31.100.000		31.100.000		
						jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Laporan	6	31.100.000	6	31.100.000	1	31.100.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0005			Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi										
						Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi	Laporan	0		0		0		SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan	Orang	15	197.684.000	15	197.684.000	15	184.232.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.0003			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				197.684.000		197.684.000		184.232.000		
						Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	Laporan	1	197.684.000	1	197.684.000	1	184.232.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
						Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	30	70.160.000	30	70.160.000	30	70.160.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		3.30.04.1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					70.160.000		70.160.000		70.160.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi	Orang	80	70.160.000	80	70.160.000	50	70.160.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.04.1.03.0005			Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi				70.160.000		70.160.000		70.160.000		
						Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi	Laporan	0	70.160.000	0	70.160.000	1	70.160.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						2.980.978.000		2.980.978.000		2.860.322.000		
						Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	2	2.980.978.000	2	2.980.978.000	2	2.860.322.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
		3.30.05.1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					2.980.978.000		2.980.978.000		2.860.322.000		
						Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri	Dokumen	3	458.846.000	3	458.846.000	3	432.842.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
		3.30.05.1.01.0004			Peningkatan Citra Produk Ekspor				458.846.000		458.846.000		432.842.000		
						Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Komoditi	4	458.846.000	4	458.846.000	4	432.842.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
						Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor	Orang	1400	1.157.191.000	1400	1.157.191.000	1400	1.062.539.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.05.1.01.0002			Pameran Dagang Lokal				1.157.191.000		1.157.191.000		1.062.539.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Orang	60	1.157.191.000	60	1.157.191.000	80	1.062.539.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
						Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	2	1.364.941.000	2	1.364.941.000	2	1.364.941.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0001			Pameran Dagang Internasional/Nasional				1.185.621.000		1.185.621.000		1.185.621.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Orang	7	1.185.621.000	7	1.185.621.000	7	1.185.621.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0002			Pameran Dagang Lokal										
						Jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang lokal	Orang	0		0		0		SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.0003			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				179.320.000		179.320.000		179.320.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	Orang	107	179.320.000	107	179.320.000	107	179.320.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						3.482.628.000		3.482.628.000		3.203.088.000		
						Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1	1.642.266.000	1	1.642.266.000	1	1.483.026.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		3.30.06.1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					845.190.000		845.190.000		787.334.000		
						Jumlah Laporan Aduan Masyarakat	Laporan	10	421.170.000	10	421.170.000	10	363.314.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0002			Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen				46.835.000		46.835.000		46.835.000		
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang aktif	Kelompok	7	46.835.000	7	46.835.000	7	46.835.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				374.335.000		374.335.000		316.479.000		
						Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	Dokumen	10	374.335.000	10	374.335.000	8	316.479.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi	Orang	300	424.020.000	300	424.020.000	225	424.020.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.0001			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				424.020.000		424.020.000		424.020.000		
						Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	Kelompok	1	424.020.000	1	424.020.000	1	424.020.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					575.056.000		575.056.000		532.652.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Industri	Orang	50	575.056.000	50	575.056.000	72	532.652.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.0006			Pemantauan Mutu Produk				31.860.000		31.860.000		31.860.000		
						Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Komoditi	13	31.860.000	13	31.860.000	13	31.860.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				543.196.000		543.196.000		500.792.000		
						Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan	Sertifikat	4	543.196.000	2	543.196.000	2	500.792.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					222.020.000		222.020.000		163.040.000		
						Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang)	Unit	100	222.020.000	100	222.020.000	100	163.040.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.06.1.03.0003			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				222.020.000		222.020.000		163.040.000		
						Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan	6	222.020.000	6	222.020.000	1	163.040.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	636.450.000	10	636.450.000	10	557.058.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
		3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					636.450.000		636.450.000		557.058.000		
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	990	636.450.000	990	636.450.000	1555	557.058.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	990	100.000.000	990	100.000.000	1500	100.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				536.450.000		536.450.000		457.058.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	40	536.450.000	40	536.450.000	55	457.058.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0006			Pemantauan Mutu Produk										
						Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi							SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi										
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat							SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	5	1.203.912.000	5	1.203.912.000	5	1.163.004.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
		3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					1.203.912.000		1.203.912.000		1.163.004.000		
						Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	Kegiatan	2787	1.203.912.000	2787	1.203.912.000	2300	1.163.004.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				210.000.000		210.000.000		210.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	980	210.000.000	980	210.000.000	980	210.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				793.912.000		793.912.000		753.004.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	1600	793.912.000	1600	793.912.000	1300	753.004.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0006			Pemantauan Mutu Produk										
						Jumlah komoditi ekspor yang dipantau	Komoditi	0		0		0		SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						1.450.443.000		3.450.443.000		3.396.819.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	1.450.443.000	10	3.450.443.000	10	3.396.819.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.07.1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					801.770.000		801.770.000		750.346.000		
						Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	Orang	20	509.100.000	20	509.100.000	10	509.100.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				509.100.000		509.100.000		509.100.000		
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Unit	20	509.100.000	20	509.100.000	10	509.100.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
						Jumlah pengembangan sistem informasi perdagangan	Kegiatan	1	292.670.000	1	292.670.000	1	241.246.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				292.670.000		292.670.000		241.246.000		
						Jumlah data dan informasi Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Dokumen	1	292.670.000	1	292.670.000	2	241.246.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.07.1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					274.513.000		274.513.000		274.513.000		
						Jumlah Fasilitasi kemitraan	Dokumen	25	274.513.000	25	274.513.000	3	274.513.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.02.0002			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				274.513.000		274.513.000		274.513.000		
						Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi	Kelompok	260	274.513.000	260	274.513.000	104	274.513.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					374.160.000		2.374.160.000		2.371.960.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Orang	1150	374.160.000	1150	2.374.160.000	1150	2.371.960.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.03.0002			Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				62.900.000		62.900.000		62.900.000		
						Jumlah laporan Sosialisasi peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Laporan	1	62.900.000	1	62.900.000	1	62.900.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.03.0005			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				311.260.000		2.311.260.000		2.309.060.000		
						Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat	Laporan	2	311.260.000	2	2.311.260.000	2	2.309.060.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
JUMLAH									**104.634.273.000**		**96.740.993.000**		**95.519.912.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**2.400.194.000**		**2.400.194.000**		**2.600.194.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**2.400.194.000**		**2.400.194.000**		**2.600.194.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	2.400.194.000	90	90	90	2.600.194.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						2.400.194.000		2.400.194.000		2.600.194.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	616.360.000	85	616.360.000	85	616.360.000	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					616.360.000		616.360.000		616.360.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dokumen	2	346.560.000	2	346.560.000	2	346.560.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				346.560.000		346.560.000		346.560.000		
						Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	346.560.000	4	346.560.000	4	346.560.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	269.800.000	2	269.800.000	2	269.800.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				269.800.000		269.800.000		269.800.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	269.800.000	4	269.800.000	4	269.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	537.760.000	85	537.760.000	85	537.760.000	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					537.760.000		537.760.000		537.760.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	257.760.000	2	257.760.000	2	257.760.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				257.760.000		257.760.000		257.760.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4	257.760.000	4	257.760.000	4	257.760.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	280.000.000	2	280.000.000	2	280.000.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				280.000.000		280.000.000		280.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	280.000.000	4	280.000.000	4	280.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	1.246.074.000	87	1.246.074.000	87	1.446.074.000	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					1.246.074.000		1.246.074.000		1.446.074.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	180.880.000	2	180.880.000	2	180.880.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				180.880.000		180.880.000		180.880.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4	180.880.000	4	180.880.000	4	180.880.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	199.880.000	2	199.880.000	2	199.880.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				199.880.000		199.880.000		199.880.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4	199.880.000	4	199.880.000	4	199.880.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	2	865.314.000	2	865.314.000	2	1.065.314.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				865.314.000		865.314.000		1.065.314.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	2	600.000.000	2	600.000.000	2	800.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4	265.314.000	4	265.314.000	4	265.314.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**811.595.000**		**811.595.000**		**1.261.595.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**811.595.000**		**811.595.000**		**1.261.595.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	811.595.000	82	82	82	1.261.595.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						811.595.000		811.595.000		1.261.595.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	811.595.000	100	811.595.000	100	1.261.595.000	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					400.000.000		400.000.000		850.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	850.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400.000.000		400.000.000		850.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Orang	8000	400.000.000	8000	400.000.000	8000	850.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					411.595.000		411.595.000		411.595.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	%	100	411.595.000	100	411.595.000	100	411.595.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386.595.000		386.595.000		386.595.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	176.595.000	12	176.595.000	12	176.595.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**3.211.789.000**		**3.211.789.000**		**3.861.789.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO HUKUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**2.438.990.000**		**2.438.990.000**		**2.772.628.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**2.438.990.000**		**2.438.990.000**		**2.772.628.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	2.438.990.000	90	90	90	2.772.628.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.438.990.000		2.438.990.000		2.772.628.000		
						Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	680.000.000	96	680.000.000	96	745.000.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					680.000.000		680.000.000		745.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	680.000.000	12	680.000.000	12	745.000.000		
		4.01.05.1.02.0001			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				680.000.000		680.000.000		745.000.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	11	200.000.000	11	200.000.000	11	265.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	480.000.000	200	480.000.000	200	480.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	293.076.000	96	293.076.000	96	355.076.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					293.076.000		293.076.000		355.076.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	293.076.000	12	293.076.000	12	355.076.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				293.076.000		293.076.000		355.076.000		
						Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/ Kota	35	103.000.000	35	103.000.000	35	165.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	7	190.076.000	7	190.076.000	12	190.076.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	96	874.368.000	96	874.368.000	96	1.001.006.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					874.368.000		874.368.000		1.001.006.000		
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	430.118.000	12	430.118.000	12	486.756.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				430.118.000		430.118.000		486.756.000		
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	287.168.000	12	287.168.000	12	327.576.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	142.950.000	12	142.950.000	12	159.180.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	44.000.000	12	44.000.000	12	44.000.000		
		4.01.05.1.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				44.000.000		44.000.000		44.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	44.000.000	12	44.000.000	12	44.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	400.250.000	12	400.250.000	12	470.250.000		
		4.01.05.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				400.250.000		400.250.000		470.250.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	180.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Laporan	12	250.250.000	12	250.250.000	12	290.250.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	591.546.000	96	591.546.000	96	671.546.000	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					591.546.000		591.546.000		671.546.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	591.546.000	12	591.546.000	12	671.546.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				591.546.000		591.546.000		671.546.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	70	191.546.000	70	191.546.000	120	205.546.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	75	210.000.000	75	210.000.000	127	226.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	75	190.000.000	75	190.000.000	120	240.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**526.209.000**		**526.209.000**		**876.209.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**526.209.000**		**526.209.000**		**876.209.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	526.209.000	82	82	82	876.209.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						526.209.000		526.209.000		876.209.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	526.209.000	100	526.209.000	100	876.209.000	BIRO HUKUM	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					350.000.000		350.000.000		700.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	350.000.000	100	350.000.000	100	700.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				350.000.000		350.000.000		700.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	Orang	800	350.000.000	800	350.000.000	1650	700.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					176.209.000		176.209.000		176.209.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	176.209.000	100	176.209.000	100	176.209.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				166.000.000		166.000.000		166.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	166.000.000	12	166.000.000	12	166.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.209.000		10.209.000		10.209.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Laporan	12	10.209.000	12	10.209.000	12	10.209.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.965.199.000**		**2.965.199.000**		**3.648.837.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**1.685.000.000**		**1.685.000.000**		**1.850.000.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**1.685.000.000**		**1.685.000.000**		**1.850.000.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	1.685.000.000	80	80	80	1.850.000.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.685.000.000		1.685.000.000		1.850.000.000		
						Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98.7	415.000.000	98.7	415.000.000	98.7	450.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					415.000.000		415.000.000		450.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	195.000.000	4	195.000.000	4	230.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				195.000.000		195.000.000		230.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Laporan	12	195.000.000	12	195.000.000	12	230.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	220.000.000	4	220.000.000	4	220.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Laporan	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95.5	210.000.000	95.5	210.000.000	95.5	235.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					210.000.000		210.000.000		235.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	210.000.000	4	210.000.000	4	235.000.000		
		4.01.08.1.01.0002			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				210.000.000		210.000.000		235.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Laporan	8	210.000.000	8	210.000.000	8	235.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	85	467.000.000	85	467.000.000	85	502.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					467.000.000		467.000.000		502.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	120.000.000	4	120.000.000	4	135.000.000		
		4.01.08.1.02.0001			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				120.000.000		120.000.000		135.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	120.000.000	4	120.000.000	4	135.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	91	347.000.000	91	347.000.000	91	367.000.000		
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				347.000.000		347.000.000		367.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	347.000.000	12	347.000.000	12	367.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	490.000.000	85	490.000.000	85	550.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					490.000.000		490.000.000		550.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	207.225.000	8	207.225.000	8	262.725.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				207.225.000		207.225.000		262.725.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	8	207.225.000	8	207.225.000	8	262.725.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	207.775.000	8	207.775.000	8	242.275.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				207.775.000		207.775.000		242.275.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	207.775.000	8	207.775.000	8	242.275.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	75.000.000	8	75.000.000	8	45.000.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				75.000.000		75.000.000		45.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	75.000.000	8	75.000.000	8	45.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	%	100	103.000.000	100	103.000.000	100	113.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					103.000.000		103.000.000		113.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000	2	103.000.000	2	113.000.000		
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				103.000.000		103.000.000		113.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	103.000.000	2	103.000.000	2	113.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**627.104.000**		**627.104.000**		**712.104.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**437.104.000**		**437.104.000**		**507.104.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	437.104.000	82	82	82	507.104.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						437.104.000		437.104.000		507.104.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	437.104.000	100	437.104.000	100	507.104.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					437.104.000		437.104.000		507.104.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	437.104.000	100	437.104.000	100	507.104.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				362.104.000		362.104.000		432.104.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	24	362.104.000	24	362.104.000	24	432.104.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75.000.000		75.000.000		75.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	Laporan	16	75.000.000	16	75.000.000	16	75.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah								**190.000.000**		**190.000.000**		**205.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	190.000.000	3	3	3	205.000.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						190.000.000		190.000.000		205.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	190.000.000	90	190.000.000	90	205.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					190.000.000		190.000.000		205.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	190.000.000	100	190.000.000	100	205.000.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Dokumen	6	110.000.000	6	110.000.000	6	110.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000		80.000.000		95.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Laporan	8	80.000.000	8	80.000.000	8	95.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.312.104.000**		**2.312.104.000**		**2.562.104.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO PEREKONOMIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**2.512.448.000**		**2.512.448.000**		**2.512.448.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**2.512.448.000**		**2.512.448.000**		**2.512.448.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	2.512.448.000	90	90	90	2.512.448.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN						2.512.448.000		2.512.448.000		2.512.448.000		
						Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	81	300.000.000	81	300.000.000	81	300.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
		4.01.06.1.03.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	85	1.000.000.000	85	1.000.000.000	85	1.000.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000		
		4.01.06.1.03.0001			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				850.000.000		850.000.000		850.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	850.000.000	4	850.000.000	4	850.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
		4.01.06.1.03.0003			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	50.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
		4.01.06.1.03.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	83	462.448.000	83	462.448.000	83	462.448.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					462.448.000		462.448.000		462.448.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	220.000.000	4	220.000.000	4	220.000.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	Laporan	8	220.000.000	8	220.000.000	8	220.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	242.448.000	4	242.448.000	4	242.448.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				242.448.000		242.448.000		242.448.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	Laporan	8	242.448.000	8	242.448.000	8	242.448.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	78	700.000.000	78	700.000.000	78	700.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					700.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	315.000.000	4	315.000.000	4	315.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				315.000.000		315.000.000		315.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	Laporan	8	315.000.000	8	315.000.000	8	315.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	4	385.000.000	4	385.000.000	4	385.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				385.000.000		385.000.000		385.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	8	385.000.000	8	385.000.000	8	385.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**290.000.000**		**290.000.000**		**290.000.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**290.000.000**		**290.000.000**		**290.000.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	290.000.000	82	82	82	290.000.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						290.000.000		290.000.000		290.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					290.000.000		290.000.000		290.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	290.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.000.000		275.000.000		275.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	275.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.802.448.000**		**2.802.448.000**		**2.802.448.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**140.639.161.000**		**417.524.225.000**		**417.266.075.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**140.639.161.000**		**417.524.225.000**		**417.266.075.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	140.639.161.000	90	90	90	417.266.075.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						140.639.161.000		417.524.225.000		417.266.075.000		
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	81	750.000.000	81	750.000.000	81	750.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					750.000.000		750.000.000		750.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
		4.01.04.1.02.0002			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
		4.01.04.1.02.0001			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		
		4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	82	750.000.000	82	750.000.000	82	841.850.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					750.000.000		750.000.000		841.850.000		
						Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	4	225.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000		
		4.01.04.1.03.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				225.000.000		225.000.000		225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	8	225.000.000	8	225.000.000	8	225.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	4	300.000.000	4	300.000.000	4	391.850.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				300.000.000		300.000.000		391.850.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	8	300.000.000	8	300.000.000	8	391.850.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	Dokumen	4	225.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000		
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				225.000.000		225.000.000		225.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Dokumen	8	225.000.000	8	225.000.000	8	225.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	54	139.139.161.000	54	416.024.225.000	54	415.674.225.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					139.139.161.000		416.024.225.000		415.674.225.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	4	135.231.286.000	4	412.116.350.000	4	411.516.350.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				135.231.286.000		412.116.350.000		411.516.350.000		
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Unit	750	135.231.286.000	750	412.116.350.000	750	411.516.350.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4	3.907.875.000	4	3.907.875.000	4	4.157.875.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				3.907.875.000		3.907.875.000		4.157.875.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	1.712.600.000	1	1.712.600.000	1	1.998.965.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	8	2.195.275.000	8	2.195.275.000	8	2.158.910.000		OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**495.553.000**		**495.553.000**		**753.703.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**495.553.000**		**495.553.000**		**753.703.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	495.553.000	82	82	82	753.703.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						495.553.000		495.553.000		753.703.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	495.553.000	100	495.553.000	100	753.703.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					495.553.000		495.553.000		753.703.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	495.553.000	100	495.553.000	100	753.703.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		350.000.000		550.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	350.000.000	12	350.000.000	12	550.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				145.553.000		145.553.000		203.703.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	145.553.000	12	145.553.000	12	203.703.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**141.134.714.000**		**418.019.778.000**		**418.019.778.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO ORGANISASI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**1.710.656.000**		**1.710.656.000**		**1.710.656.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**1.710.656.000**		**1.710.656.000**		**1.710.656.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	1.710.656.000	80	80	80	1.710.656.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.710.656.000		1.710.656.000		1.710.656.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	14.29	170.000.000	14.29	170.000.000	14.29	161.579.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					170.000.000		170.000.000		161.579.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	4	170.000.000	4	170.000.000	4	161.579.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				170.000.000		170.000.000		161.579.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	170.000.000	4	170.000.000	4	161.579.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	85.71	150.470.000	85.71	150.470.000	85.71	150.470.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					150.470.000		150.470.000		150.470.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	4	150.470.000	4	150.470.000	4	150.470.000		
		4.01.02.1.01.0002			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				150.470.000		150.470.000		150.470.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	12	150.470.000	12	150.470.000	4	150.470.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	64.28	272.861.000	64.28	272.861.000	64.28	272.861.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					272.861.000		272.861.000		272.861.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	4	272.861.000	4	272.861.000	4	272.861.000		
		4.01.02.1.02.0002			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				272.861.000		272.861.000		272.861.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	4	272.861.000	4	272.861.000	4	272.861.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	50	314.520.000	50	314.520.000	50	314.520.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					314.520.000		314.520.000		314.520.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	4	314.520.000	4	314.520.000	4	314.520.000		
		4.01.02.1.02.0004			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				314.520.000		314.520.000		314.520.000		
						Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	12	314.520.000	12	314.520.000	4	314.520.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	88.1	179.500.000	88.1	179.500.000	88.1	179.500.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					179.500.000		179.500.000		179.500.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	4	179.500.000	4	179.500.000	4	179.500.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				179.500.000		179.500.000		179.500.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	4	179.500.000	4	179.500.000	4	179.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	60	95.785.000	60	95.785.000	60	104.206.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					95.785.000		95.785.000		104.206.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	4	95.785.000	4	95.785.000	4	104.206.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				95.785.000		95.785.000		104.206.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	12	95.785.000	12	95.785.000	4	104.206.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	66	214.000.000	66	214.000.000	66	214.000.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					214.000.000		214.000.000		214.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	4	214.000.000	4	214.000.000	4	214.000.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				214.000.000		214.000.000		214.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	12	153.680.000	12	153.680.000	4	160.026.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	Laporan	12	60.320.000	12	60.320.000	2	53.974.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	88.73	313.520.000	88.73	313.520.000	88.73	313.520.000	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					313.520.000		313.520.000		313.520.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	4	313.520.000	4	313.520.000	4	313.520.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				313.520.000		313.520.000		313.520.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	12	313.520.000	12	313.520.000	6	313.520.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**720.772.000**		**1.012.512.000**		**1.012.512.000**	**Sekretariat Daerah**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**720.772.000**		**1.012.512.000**		**1.012.512.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	720.772.000	82	82	82	1.012.512.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						720.772.000		1.012.512.000		1.012.512.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	720.772.000	100	1.012.512.000	100	1.012.512.000	BIRO ORGANISASI	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					184.115.000		475.855.000		475.855.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	184.115.000	100	475.855.000	100	475.855.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						291.740.000		291.740.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		1	291.740.000	1	291.740.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				141.115.000		141.115.000		141.115.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	141.115.000	4	141.115.000	4	141.115.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.000.000		43.000.000		43.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	12	43.000.000	12	43.000.000	12	43.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					536.657.000		536.657.000		536.657.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	536.657.000	100	536.657.000	100	536.657.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				476.657.000		476.657.000		479.003.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	230.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	246.657.000	12	246.657.000	12	249.003.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60.000.000		60.000.000		57.654.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	37.654.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.431.428.000**		**2.723.168.000**		**2.723.168.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO UMUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**201.056.947.000**		**204.516.947.000**		**198.629.096.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**201.056.947.000**		**204.516.947.000**		**198.629.096.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	201.056.947.000	82	82	82	198.629.096.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						201.056.947.000		204.516.947.000		198.629.096.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	4.355.000.000	100	4.655.000.000	100	5.505.000.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					210.000.000		210.000.000		210.000.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	Paket	4	130.000.000	4	130.000.000	8	160.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	Orang	4	40.000.000	4	40.000.000	8	50.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	Orang	4	10.000.000	4	10.000.000	0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					4.090.000.000		4.390.000.000		5.240.000.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	4.090.000.000	100	4.390.000.000	100	5.240.000.000		
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.950.000.000		2.950.000.000		3.600.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Paket	12	2.950.000.000	12	2.950.000.000	12	3.600.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.100.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		
						Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Paket	12	1.100.000.000	12	1.400.000.000	12	1.600.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	17.286.000.000	100	16.146.000.000	100	17.134.000.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					165.000.000		165.000.000		165.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				120.000.000		120.000.000		120.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					14.870.753.000		13.730.753.000		14.110.753.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	Laporan	12	14.870.753.000	12	13.730.753.000	12	14.110.753.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				300.000.000		300.000.000		330.000.000		
						Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	330.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				11.570.753.000		10.430.753.000		10.880.753.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	12	11.570.753.000	12	10.430.753.000	12	10.880.753.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				3.000.000.000		3.000.000.000		2.900.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	2.900.000.000		
		X.XX.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan					2.250.247.000		2.250.247.000		2.858.247.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	12	2.250.247.000	12	2.250.247.000	12	2.858.247.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				2.080.247.000		2.080.247.000		2.480.247.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Laporan	12	2.080.247.000	12	2.080.247.000	12	2.480.247.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				150.000.000		150.000.000		308.000.000		
						Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	308.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				20.000.000		20.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	70.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	179.415.947.000	100	183.715.947.000	100	175.990.096.000	BIRO UMUM	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					108.516.013.000		108.940.940.000		95.553.089.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	108.516.013.000	12	108.940.940.000	12	95.553.089.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				106.601.013.000		107.025.940.000		93.638.089.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	106.601.013.000	12	107.025.940.000	12	93.638.089.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.540.000.000		1.540.000.000		1.390.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.540.000.000	12	1.540.000.000	12	1.390.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000		300.000.000		400.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	400.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				75.000.000		75.000.000		125.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	125.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					742.000.000		742.000.000		792.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	742.000.000	12	742.000.000	12	792.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				442.000.000		442.000.000		442.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	442.000.000	12	442.000.000	12	442.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				300.000.000		300.000.000		350.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		20.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.418.996.000		8.218.996.000		9.375.996.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	7.418.996.000	100	8.218.996.000	100	9.375.996.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				352.437.000		352.437.000		402.437.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	352.437.000	12	352.437.000	12	402.437.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.718.000		500.718.000		580.718.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	500.718.000	12	500.718.000	12	580.718.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				425.000.000		425.000.000		425.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	425.000.000	12	425.000.000	12	425.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000		120.000.000		140.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	120.000.000	12	120.000.000	12	140.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.241.605.000		4.241.605.000		4.648.605.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	4.241.605.000	12	4.241.605.000	12	4.648.605.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.629.236.000		2.429.236.000		3.029.236.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	1.629.236.000	12	2.429.236.000	12	3.029.236.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.835.500.000		4.025.500.000		6.560.500.000		
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	3.835.500.000	2	4.025.500.000	2	6.560.500.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				810.500.000		810.500.000		1.510.500.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	2	810.500.000	2	810.500.000	2	1.510.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.025.000.000		3.215.000.000		5.050.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	50	3.025.000.000	50	3.215.000.000	50	5.050.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit								
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					24.231.213.000		24.381.213.000		24.771.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	24.231.213.000	12	24.381.213.000	12	24.771.213.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				631.213.000		631.213.000		781.213.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	631.213.000	12	631.213.000	12	781.213.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.600.000.000		16.750.000.000		16.990.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	16.100.000.000	12	16.250.000.000	12	16.490.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	226.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	300.000.000	2	300.000.000	2	273.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.658.908.000		7.858.908.000		9.378.908.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	6.658.908.000	833	7.858.908.000	833	9.378.908.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.775.000.000		1.975.000.000		2.325.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	182	1.775.000.000	182	1.975.000.000	182	2.325.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				87.500.000		87.500.000		87.500.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	30	87.500.000	30	87.500.000	30	87.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.400.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	300	1.400.000.000	300	1.400.000.000	300	1.500.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.833.908.000		3.833.908.000		4.833.908.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	17	2.833.908.000	17	3.833.908.000	17	4.833.908.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				312.500.000		312.500.000		382.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	300	312.500.000	300	312.500.000	300	382.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					27.993.317.000		29.528.390.000		29.528.390.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	27.993.317.000	100	29.528.390.000	100	29.528.390.000		
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				243.094.000		2.203.094.000		2.203.094.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	243.094.000	2	2.203.094.000	2	2.203.094.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				27.750.223.000		27.325.296.000		27.325.296.000		
						Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Orang	2	27.750.223.000	2	27.325.296.000	2	27.325.296.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**201.056.947.000**		**204.516.947.000**		**198.629.096.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**3.783.000.000**		**3.783.000.000**		**3.883.050.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**3.783.000.000**		**3.783.000.000**		**3.883.050.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	3.783.000.000	90	90	90	3.883.050.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.783.000.000		3.783.000.000		3.883.050.000		
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	980.000.000	95	980.000.000	95	980.000.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					980.000.000		980.000.000		980.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	980.000.000	8	980.000.000	8	980.000.000		
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				550.000.000		550.000.000		550.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	550.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.0002			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				230.000.000		230.000.000		230.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum	Dokumen	4	230.000.000	4	230.000.000	4	230.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.000			Fasilitasi Penataan Wilayah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.630.000.000	95	1.630.000.000	95	1.730.050.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.630.000.000		1.630.000.000		1.730.050.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000		
		4.01.03.1.02.0002			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				225.000.000		225.000.000		225.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	4	225.000.000	4	225.000.000	4	225.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	1.100.000.000	95	1.100.000.000	95	1.200.050.000		
		4.01.03.1.02.0001			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1.100.000.000		1.100.000.000		1.200.050.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	45	1.100.000.000	45	1.100.000.000	45	1.200.050.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	305.000.000	100	305.000.000	100	305.000.000		
		4.01.03.1.02.0003			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				305.000.000		305.000.000		305.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	305.000.000	37	305.000.000	37	305.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.173.000.000	95	1.173.000.000	95	1.173.000.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.173.000.000		1.173.000.000		1.173.000.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	605.000.000	95	605.000.000	95	605.000.000		
		4.01.03.1.03.0001			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				605.000.000		605.000.000		605.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	Dokumen	9	485.000.000	9	485.000.000	9	485.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	5	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	200.000.000	95	200.000.000	95	180.676.000		
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				200.000.000		200.000.000		180.676.000		
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	Dokumen	6	100.000.000	6	100.000.000	6	80.676.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	368.000.000	95	368.000.000	95	387.324.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				368.000.000		368.000.000		387.324.000		
						Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	153.000.000	4	153.000.000	4	172.324.000		OPD Provinsi
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	107.550.000	4	107.550.000	4	112.250.000		OPD Provinsi
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	107.450.000	100	107.450.000	100	102.750.000		OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**840.452.000**		**840.452.000**		**890.452.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**840.452.000**		**840.452.000**		**890.452.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	840.452.000	82	82	82	890.452.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						840.452.000		840.452.000		890.452.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	840.452.000	100	840.452.000	100	890.452.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					840.452.000		840.452.000		890.452.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	840.452.000	100	840.452.000	100	890.452.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				806.246.000		806.246.000		857.571.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	425.000.000	12	425.000.000	12	394.405.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	381.246.000	12	381.246.000	12	463.166.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				34.206.000		34.206.000		32.881.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	8.675.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Laporan	12	24.206.000	12	24.206.000	12	24.206.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**4.623.452.000**		**4.623.452.000**		**4.773.502.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									**2.505.000.000**		**2.505.000.000**		**2.605.000.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		36.1		36.1		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil								**2.505.000.000**		**2.505.000.000**		**2.605.000.000**		
						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	2.505.000.000	90	90	90	2.605.000.000	Sekretariat Daerah	
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						2.505.000.000		2.505.000.000		2.605.000.000		
						Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	90	1.355.000.000	90	1.355.000.000	90	1.455.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.355.000.000		1.355.000.000		1.455.000.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	1.355.000.000	4	1.355.000.000	4	1.455.000.000		
		4.01.07.1.01.0001			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				280.000.000		280.000.000		400.000.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	Laporan	4	180.000.000	4	180.000.000	4	213.200.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	186.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.0002			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				853.000.000		853.000.000		833.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	Laporan	12	700.000.000	12	700.000.000	12	680.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	153.000.000	4	153.000.000	4	153.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				222.000.000		222.000.000		222.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	222.000.000	4	222.000.000	4	222.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	81	506.000.000	81	506.000.000	81	506.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					506.000.000		506.000.000		506.000.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	506.000.000	4	506.000.000	4	506.000.000		
		4.01.07.1.03.0001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				157.000.000		157.000.000		157.000.000		
						Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	157.000.000	2	157.000.000	2	157.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0002			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				173.000.000		173.000.000		173.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	173.000.000	4	173.000.000	4	173.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0003			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				176.000.000		176.000.000		176.000.000		
						Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	176.000.000	4	176.000.000	4	176.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	80	644.000.000	80	644.000.000	80	644.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					644.000.000		644.000.000		644.000.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	4	644.000.000	4	644.000.000	4	644.000.000		
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				203.000.000		203.000.000		203.000.000		
						Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	4	203.000.000	4	203.000.000	4	203.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				315.000.000		315.000.000		315.000.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	315.000.000	2	315.000.000	2	315.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				126.000.000		126.000.000		126.000.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	126.000.000	4	126.000.000	4	126.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**261.800.000**		**261.800.000**		**261.800.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**261.800.000**		**261.800.000**		**261.800.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	261.800.000	82	82	82	261.800.000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						261.800.000		261.800.000		261.800.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	261.800.000	100	261.800.000	100	261.800.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.800.000		261.800.000		261.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	261.800.000	100	261.800.000	100	261.800.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				236.800.000		236.800.000		236.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	236.800.000	12	236.800.000	12	236.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**2.766.800.000**		**2.766.800.000**		**2.866.800.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**206.595.103.000**		**206.664.123.000**		**208.443.933.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70		70		70		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**38.038.533.000**		**38.107.553.000**		**40.041.648.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76	38.038.533.000	76	76	76	40.041.648.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						38.038.533.000		38.107.553.000		40.041.648.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	38.038.533.000	100	38.107.553.000	100	40.041.648.000	Bagian Umum	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.055.674.000		1.055.674.000		1.055.674.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.055.674.000	12	1.055.674.000	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.055.674.000		1.055.674.000		1.055.674.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.055.674.000	12	1.055.674.000	12	1.055.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					570.101.000		639.121.000		658.684.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	570.101.000	100	639.121.000	100	658.684.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						69.020.000		69.020.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			119	69.020.000	1	69.020.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				176.808.000		176.808.000		196.371.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	176.808.000	12	176.808.000	12	196.371.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				393.293.000		393.293.000		393.293.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	40	393.293.000	40	393.293.000	70	393.293.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan										
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		0		0		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.785.842.000		3.785.842.000		3.685.842.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	3.785.842.000	100	3.785.842.000	100	3.685.842.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				435.701.000		435.701.000		435.701.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8	435.701.000	8	435.701.000	12	435.701.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.879.000		133.879.000		133.879.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	133.879.000	2	133.879.000	12	133.879.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				480.500.000		480.500.000		480.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	480.500.000	12	480.500.000	12	480.500.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.600.000.000		1.600.000.000		1.450.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	1.600.000.000	12	1.600.000.000	12	1.450.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				980.400.000		980.400.000		980.400.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	980.400.000	12	980.400.000	12	980.400.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				155.362.000		155.362.000		205.362.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	155.362.000	4	155.362.000	4	205.362.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.026.130.000		4.026.130.000		5.051.717.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	991	4.026.130.000	991	4.026.130.000	289	5.051.717.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	6		0		0		SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel				494.226.000		494.226.000		585.726.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	154	494.226.000	154	494.226.000	7	585.726.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.180.972.000		1.180.972.000		1.650.459.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	700	1.180.972.000	700	1.180.972.000	172	1.650.459.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.350.932.000		2.350.932.000		2.815.532.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	131	2.350.932.000	131	2.350.932.000	110	2.815.532.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.217.015.000		19.217.015.000		19.467.015.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	19.217.015.000	48	19.217.015.000	48	19.467.015.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				198.457.000		198.457.000		198.457.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	198.457.000	12	198.457.000	12	198.457.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.900.000.000		2.900.000.000		3.100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	2.900.000.000	12	2.900.000.000	12	3.100.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				986.300.000		986.300.000		986.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	986.300.000	12	986.300.000	12	986.300.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.132.258.000		15.132.258.000		15.182.258.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	15.132.258.000	12	15.132.258.000	12	15.182.258.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.424.650.000		7.424.650.000		8.163.595.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1619	7.424.650.000	1619	7.424.650.000	164	8.163.595.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				502.800.000		502.800.000		609.611.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	10	502.800.000	10	502.800.000	10	609.611.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.171.286.000		3.171.286.000		2.963.440.000		
						Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	72	3.171.286.000	72	3.171.286.000	72	2.963.440.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				51.475.000		51.475.000		51.475.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	154	51.475.000	154	51.475.000	11	51.475.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.650.000.000		1.650.000.000		2.029.980.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	1.650.000.000	3	1.650.000.000	3	2.029.980.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.049.089.000		2.049.089.000		2.509.089.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1380	2.049.089.000	1380	2.049.089.000	68	2.509.089.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.959.121.000		1.959.121.000		1.959.121.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	1.959.121.000	100	1.959.121.000	100	1.959.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.15.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.393.000.000		1.393.000.000		1.393.000.000		
						Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Paket	5	1.393.000.000	5	1.393.000.000	5	1.393.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15.0003			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000		566.121.000		566.121.000		
						Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	120	566.121.000	120	566.121.000	120	566.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**168.556.570.000**		**168.556.570.000**		**168.402.285.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.75	168.556.570.000	2.75	3	2.75	168.402.285.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						168.556.570.000		168.556.570.000		168.402.285.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	168.556.570.000	100	168.556.570.000	100	168.402.285.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.112.567.000		1.112.567.000		1.172.567.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.112.567.000	100	1.112.567.000	100	1.172.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				812.567.000		812.567.000		812.567.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	812.567.000	6	812.567.000	6	812.567.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		360.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	300.000.000	20	300.000.000	20	360.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.097.128.000		20.097.128.000		19.882.843.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	20.097.128.000	24	20.097.128.000	24	19.882.843.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.092.128.000		19.092.128.000		18.817.843.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	124	19.092.128.000	124	19.092.128.000	124	18.817.843.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.005.000.000		1.005.000.000		1.065.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	24	1.005.000.000	24	1.005.000.000	24	1.065.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					147.346.875.000		147.346.875.000		147.346.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	147.346.875.000	100	147.346.875.000	100	147.346.875.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.15.0001			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				147.346.875.000		147.346.875.000		147.346.875.000		
						Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	120	147.346.875.000	120	147.346.875.000	120	147.346.875.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan									**390.574.350.000**		**390.574.350.000**		**406.941.475.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	90		90		90		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia								**194.977.771.000**		**194.977.771.000**		**245.498.991.000**		
						Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	75	194.977.771.000	75	75	75	245.498.991.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						194.977.771.000		194.977.771.000		245.498.991.000		
						Persentase layanan bagian humas	%	95	194.977.771.000	95	194.977.771.000	95	245.498.991.000	Bagian Humas	
		4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD					76.272.509.000		76.272.509.000		99.234.941.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	76.272.509.000	100	76.272.509.000	100	99.234.941.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.04.0004			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		
						jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Orang	42	1.900.000.000	42	1.900.000.000	42	1.900.000.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0005			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	400.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0006			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				10.849.896.000		10.849.896.000		11.174.896.000		
						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	Dokumen	7	10.849.896.000	7	10.849.896.000	7	11.174.896.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.0007			Penyusunan Program Kerja DPRD				63.122.613.000		63.122.613.000		85.760.045.000		
						Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	6	63.122.613.000	6	63.122.613.000	6	85.760.045.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah					118.705.262.000		118.705.262.000		146.264.050.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama	Dokumen	14	118.705.262.000	14	118.705.262.000	14	146.264.050.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	
		4.02.02.1.07.0002			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				118.705.262.000		118.705.262.000		146.264.050.000		
						jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	Dokumen	14	118.705.262.000	14	118.705.262.000	14	146.264.050.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik								**195.596.579.000**		**195.596.579.000**		**161.442.484.000**		
						Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	75	195.596.579.000	75	75	75	161.442.484.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						195.596.579.000		195.596.579.000		161.442.484.000		
						Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	195.596.579.000	95	195.596.579.000	95	161.442.484.000	Bagian Persidangan	
		4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					7.128.600.000		7.128.600.000		8.885.622.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA	Dokumen	21	7.128.600.000	21	7.128.600.000	21	8.885.622.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.01.0001			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				7.128.600.000		7.128.600.000		8.885.622.000		
						jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda	Dokumen	21	7.128.600.000	21	7.128.600.000	21	8.885.622.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran					1.618.590.000		1.618.590.000		3.011.090.000		
						Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	2	1.618.590.000	2	1.618.590.000	2	3.011.090.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.02.000			Pembahasan APBD				1.618.590.000		1.618.590.000		3.011.090.000		
						jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	2	1.618.590.000	2	1.618.590.000	2	3.011.090.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					15.229.190.000		15.229.190.000		15.730.248.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	15.229.190.000	100	15.229.190.000	100	15.730.248.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.0001			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2.385.912.000		2.385.912.000		2.445.139.000		
						jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	2.385.912.000	48	2.385.912.000	48	2.445.139.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0002			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2.385.912.000		2.385.912.000		2.385.912.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	2.385.912.000	48	2.385.912.000	48	2.385.912.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0003			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.385.912.000		2.385.912.000		2.438.803.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	2.385.912.000	48	2.385.912.000	48	2.438.803.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0004			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2.385.912.000		2.385.912.000		2.444.448.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	2.385.912.000	48	2.385.912.000	48	2.444.448.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0005			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2.385.912.000		2.385.912.000		2.316.316.000		
						Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	48	2.385.912.000	48	2.385.912.000	48	2.316.316.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0006			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				850.630.000		850.630.000		850.630.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	2	850.630.000	2	850.630.000	2	850.630.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.03.0007			Pengawasan Penggunaan Anggaran				2.449.000.000		2.449.000.000		2.849.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	31	2.449.000.000	31	2.449.000.000	31	2.849.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD					3.440.000.000		3.440.000.000		3.440.000.000		
						Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	6	3.440.000.000	6	3.440.000.000	6	3.440.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.04.0002			Pendalaman Tugas DPRD				3.440.000.000		3.440.000.000		3.440.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	3.440.000.000	6	3.440.000.000	6	3.440.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					70.956.205.000		70.956.205.000		51.597.740.000		
						Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	70.956.205.000	100	70.956.205.000	100	51.597.740.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.05.0001			Kunjungan Kerja dalam Daerah				30.763.680.000		30.763.680.000		24.704.280.000		
						Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	30.763.680.000	12	30.763.680.000	12	24.704.280.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0002			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				175.000.000		175.000.000		175.000.000		
						Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0003			Pelaksanaan Reses				40.017.525.000		40.017.525.000		26.718.460.000		
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	24	40.017.525.000	24	40.017.525.000	16	26.718.460.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					552.490.000		552.490.000		527.730.000		
						Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	552.490.000	1	552.490.000	1	527.730.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.06.0001			Penyusunan Kode Etik DPRD				552.490.000		552.490.000		527.730.000		
						Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	Dokumen	1	552.490.000	1	552.490.000	1	527.730.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.08		Fasilitasi Tugas DPRD					96.671.504.000		96.671.504.000		78.250.054.000		
						Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	37	96.671.504.000	37	96.671.504.000	37	78.250.054.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.08.0001			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				96.671.504.000		96.671.504.000		78.250.054.000		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	37	96.671.504.000	37	96.671.504.000	37	78.250.054.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**597.169.453.000**		**597.238.473.000**		**615.385.408.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**41.348.132.000**		**41.421.212.000**		**35.348.281.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70.1		70.1		72.5		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**40.771.679.000**		**40.844.759.000**		**34.771.828.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	40.771.679.000	84	84	84	34.771.828.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						40.771.679.000		40.844.759.000		34.771.828.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	40.771.679.000	100	40.844.759.000	100	34.771.828.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.838.610.000		28.838.610.000		22.405.179.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	28.838.610.000	12	28.838.610.000	12	22.405.179.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.282.570.000		28.282.570.000		21.849.139.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	137	28.282.570.000	137	28.282.570.000	119	21.849.139.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.040.000		350.040.000		308.700.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	350.040.000	12	350.040.000	12	308.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				121.000.000		121.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	121.000.000	12	121.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				35.000.000		35.000.000		47.340.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	35.000.000	12	35.000.000	12	47.340.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					260.900.000		260.900.000		280.900.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	260.900.000	2	260.900.000	2	280.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		200.000.000		195.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	195.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				60.900.000		60.900.000		85.900.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	60.900.000	1	60.900.000	1	85.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					412.000.000		485.080.000		523.830.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	412.000.000	100	485.080.000	100	523.830.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						73.080.000		73.080.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		1	73.080.000	1	73.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				190.000.000		190.000.000		190.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				117.000.000		117.000.000		155.750.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	130	117.000.000	130	117.000.000	130	155.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.701.169.000		2.701.169.000		3.149.725.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.701.169.000	100	2.701.169.000	100	3.149.725.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.000.000		125.000.000		116.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	125.000.000	1	125.000.000	1	116.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				77.000.000		77.000.000		77.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				106.000.000		106.000.000		96.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	106.000.000	1	106.000.000	1	96.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				40.000.000		40.000.000		52.000.000		
						Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	52.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				180.200.000		180.200.000		199.999.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	180.200.000	1	180.200.000	1	199.999.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				894.969.000		894.969.000		1.194.970.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	894.969.000	1	894.969.000	1	1.194.970.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				82.000.000		82.000.000		108.250.000		
						Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	82.000.000	1	82.000.000	1	108.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				906.000.000		906.000.000		1.015.506.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	906.000.000	1	906.000.000	1	1.015.506.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					790.000.000		790.000.000		769.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	44	790.000.000	44	790.000.000	44	769.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				225.000.000		225.000.000		204.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	12	225.000.000	12	225.000.000	12	204.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.000.000		215.000.000		215.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	215.000.000	10	215.000.000	10	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	28	350.000.000	28	350.000.000	28	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.420.000.000		4.420.000.000		4.254.694.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	4.420.000.000	4	4.420.000.000	4	4.254.694.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				47.000.000		47.000.000		29.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	47.000.000	1	47.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.340.000.000		1.340.000.000		1.260.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.340.000.000	1	1.340.000.000	1	1.260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.033.000.000		3.033.000.000		2.965.694.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	3.033.000.000	1	3.033.000.000	1	2.965.694.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.349.000.000		3.349.000.000		3.388.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1421	3.349.000.000	1421	3.349.000.000	1421	3.388.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.000.000		600.000.000		650.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	45	600.000.000	45	600.000.000	45	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	437	35.000.000	437	35.000.000	437	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		250.000.000		312.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	442	250.000.000	442	250.000.000	442	312.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				350.000.000		350.000.000		301.500.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	221	350.000.000	221	350.000.000	221	301.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				24.000.000		24.000.000		16.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	5	24.000.000	5	24.000.000	5	16.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.475.000.000		1.475.000.000		1.475.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	1.475.000.000	6	1.475.000.000	6	1.475.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				275.000.000		275.000.000		275.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	175	275.000.000	175	275.000.000	175	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				340.000.000		340.000.000		324.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv	Unit	92	340.000.000	92	340.000.000	92	324.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**576.453.000**		**576.453.000**		**576.453.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	%	2.91	576.453.000	2.91	3	2.91	576.453.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						576.453.000		576.453.000		576.453.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	576.453.000	100	576.453.000	100	576.453.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					576.453.000		576.453.000		576.453.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	576.453.000	100	576.453.000	100	576.453.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				276.453.000		276.453.000		276.453.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	276.453.000	6	276.453.000	6	276.453.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas									**12.467.000.000**		**12.467.000.000**		**12.777.200.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
						Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Terwujudnya keselerasan dokumen perencanaan								**2.807.000.000**		**2.807.000.000**		**3.002.200.000**		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	2.807.000.000	100	100	100	3.002.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						943.000.000		943.000.000		1.138.200.000		
						Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	%	100	943.000.000	100	943.000.000	100	1.138.200.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
		5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					943.000.000		943.000.000		1.138.200.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi	Dokumen	4	943.000.000	4	943.000.000	4	1.138.200.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				678.000.000		678.000.000		678.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	678.000.000	4	678.000.000	4	678.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.03.0004			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000		265.000.000		460.200.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi	Dokumen	70	265.000.000	70	265.000.000	70	460.200.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.864.000.000		1.864.000.000		1.864.000.000		
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	495.000.000	100	495.000.000	100	495.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					495.000.000		495.000.000		495.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan perhubungan	OPD	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Laporan	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				125.000.000		125.000.000		125.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	OPD	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH	Laporan	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH	OPD	3	220.000.000	3	220.000.000	3	220.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	490.000.000	100	490.000.000	100	490.000.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					490.000.000		490.000.000		490.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes	Laporan	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				140.000.000		140.000.000		140.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes	OPD	13	140.000.000	13	140.000.000	13	140.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos	Laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial	OPD	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS	Laporan	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				270.000.000		270.000.000		270.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual	OPD	5	270.000.000	5	270.000.000	5	270.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	879.000.000	100	879.000.000	100	879.000.000	Bidang Perekonomian	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					879.000.000		879.000.000		879.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker	Laporan	1	367.000.000	1	367.000.000	1	367.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				367.000.000		367.000.000		367.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	OPD	6	367.000.000	6	367.000.000	6	367.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI	Laporan	1	231.000.000	1	231.000.000	1	231.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				231.000.000		231.000.000		231.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	OPD	3	231.000.000	3	231.000.000	3	231.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut	Laporan	1	281.000.000	1	281.000.000	1	281.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				281.000.000		281.000.000		281.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut	OPD	4	281.000.000	4	281.000.000	4	281.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan								**9.660.000.000**		**9.660.000.000**		**9.775.000.000**		
						Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	9.660.000.000	100	100	100	9.775.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.871.000.000		4.871.000.000		4.871.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	4.871.000.000	100	4.871.000.000	100	4.871.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
		5.01.02.1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					4.130.000.000		4.130.000.000		4.130.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi	Dokumen	2	4.130.000.000	2	4.130.000.000	2	4.130.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0006			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				4.130.000.000		4.130.000.000		4.130.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	2	4.130.000.000	2	4.130.000.000	2	4.130.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.02.1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					741.000.000		741.000.000		741.000.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	741.000.000	1	741.000.000	1	741.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.02.0001			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				601.000.000		601.000.000		601.000.000		
						Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	4	601.000.000	4	601.000.000	2	601.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.02.0004			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				140.000.000		140.000.000		140.000.000		
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	Buku	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						4.789.000.000		4.789.000.000		4.904.000.000		
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	1.498.000.000	100	1.498.000.000	100	1.498.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		5.01.03.1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.498.000.000		1.498.000.000		1.498.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Dokumen	1	458.000.000	1	458.000.000	1	458.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				458.000.000		458.000.000		458.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	Laporan	4	458.000.000	4	458.000.000	4	458.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Dokumen	1	528.000.000	1	528.000.000	1	528.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				528.000.000		528.000.000		528.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	Laporan	4	528.000.000	4	528.000.000	4	528.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH	Dokumen	1	512.000.000	1	512.000.000	1	512.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				512.000.000		512.000.000		512.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH	Laporan	4	512.000.000	4	512.000.000	4	512.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	2.041.000.000	100	2.041.000.000	100	2.156.000.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
		5.01.03.1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					2.041.000.000		2.041.000.000		2.156.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos	Dokumen	1	744.000.000	1	744.000.000	1	744.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				744.000.000		744.000.000		744.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial	Laporan	4	744.000.000	4	744.000.000	4	744.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes	Dokumen	1	934.000.000	1	934.000.000	1	999.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				934.000.000		934.000.000		999.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes	Laporan	4	934.000.000	4	934.000.000	4	999.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS	Dokumen	1	363.000.000	1	363.000.000	1	413.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				363.000.000		363.000.000		413.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual	Laporan	4	363.000.000	4	363.000.000	4	413.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	Bidang Perekonomian	
		5.01.03.1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker	Dokumen	1	360.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				360.000.000		360.000.000		360.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	Laporan	4	360.000.000	4	360.000.000	4	360.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI	Dokumen	1	520.000.000	1	520.000.000	1	520.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.0004			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				520.000.000		520.000.000		520.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	Laporan	4	520.000.000	4	520.000.000	4	520.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut	Dokumen	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.0008			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				370.000.000		370.000.000		370.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut	Laporan	4	370.000.000	4	370.000.000	4	370.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**53.815.132.000**		**53.888.212.000**		**48.125.481.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**254.235.606.000**		**259.444.306.000**		**249.847.604.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75		75		80		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**253.730.606.000**		**258.939.306.000**		**249.210.604.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	253.730.606.000	90	90	90	249.210.604.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						253.730.606.000		258.939.306.000		249.210.604.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	95	192.941.222.000	95	198.149.922.000	95	187.441.060.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					162.389.407.000		160.429.407.000		147.563.290.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	162.389.407.000	4	160.429.407.000	4	147.563.290.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				161.396.207.000		159.436.207.000		146.570.090.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	605	161.396.207.000	605	159.436.207.000	605	146.570.090.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				705.640.000		705.640.000		683.620.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	705.640.000	4	705.640.000	4	683.620.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				287.560.000		287.560.000		309.580.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	287.560.000	4	287.560.000	4	309.580.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen							SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					400.000.000		400.000.000		397.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	397.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				400.000.000		400.000.000		397.500.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	400.000.000	4	400.000.000	4	397.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		480.600.000		660.600.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	100	480.600.000	100	660.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						330.600.000		330.600.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			0	330.600.000	1	330.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000		100.000.000		280.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					9.818.880.000		10.630.880.000		11.589.580.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	9.818.880.000	100	10.630.880.000	100	11.589.580.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				125.000.000		125.000.000		311.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	125.000.000	1	125.000.000	1	311.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000		1.012.000.000		1.103.200.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	300.000.000	1	1.012.000.000	1	1.103.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.018.880.000		8.118.880.000		8.100.380.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.018.880.000	1	8.118.880.000	1	8.100.380.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material										
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				450.000.000		450.000.000		699.984.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	450.000.000	4	450.000.000	4	699.984.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				900.000.000		900.000.000		1.350.016.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	900.000.000	4	900.000.000	4	1.350.016.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.257.000.000		7.178.100.000		8.111.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	3.257.000.000	1	7.178.100.000	1	8.111.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.250.000.000		3.060.000.000		3.040.000.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	2.250.000.000	1	3.060.000.000	1	3.040.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.007.000.000		4.118.100.000		5.071.100.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1.007.000.000	1	4.118.100.000	1	5.071.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.530.935.000		13.530.935.000		13.361.190.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	13.530.935.000	4	13.530.935.000	4	13.361.190.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.462.007.000		2.462.007.000		2.413.007.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	2.462.007.000	4	2.462.007.000	4	2.413.007.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.558.928.000		9.558.928.000		9.481.783.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	9.558.928.000	4	9.558.928.000	4	9.481.783.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.500.000.000		1.500.000.000		1.456.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.456.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.395.000.000		5.500.000.000		5.757.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	3.395.000.000	1	5.500.000.000	1	5.757.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.197.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.197.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				95.000.000		95.000.000		95.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						905.000.000		905.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit				905.000.000	1	905.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.500.000.000		2.700.000.000		2.760.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.500.000.000	1	2.700.000.000	1	2.760.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	95	1.446.679.000	95	1.446.679.000	95	1.475.569.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					278.092.000		278.092.000		297.719.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	100	278.092.000	100	278.092.000	100	297.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.270.000		5.270.000		5.270.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.270.000	1	5.270.000	1	5.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.540.000		43.540.000		43.440.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	43.540.000	1	43.540.000	1	43.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.600.000		15.600.000		27.400.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.600.000	1	15.600.000	1	27.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		9.000.000		7.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	9.000.000	4	9.000.000	4	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				96.114.000		96.114.000		96.114.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	96.114.000	1	96.114.000	1	96.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.753.000		14.753.000		14.753.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	14.753.000	4	14.753.000	4	14.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.315.000		91.315.000		100.442.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	91.315.000	4	91.315.000	4	100.442.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					784.900.000		784.900.000		780.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	4	784.900.000	4	784.900.000	4	780.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				152.400.000		152.400.000		148.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	152.400.000	4	152.400.000	4	148.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		4.500.000		3.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	4.500.000	4	4.500.000	4	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				626.000.000		626.000.000		626.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	626.000.000	4	626.000.000	4	626.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					331.187.000		331.187.000		344.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	331.187.000	1	331.187.000	1	344.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.850.000		14.850.000		16.150.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	14.850.000	1	14.850.000	1	16.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.587.000		159.587.000		162.300.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	159.587.000	1	159.587.000	1	162.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.750.000		35.750.000		39.350.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.750.000	1	35.750.000	1	39.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.000.000		24.000.000		30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	95	2.035.559.000	95	2.035.559.000	95	2.048.759.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.200.000		49.200.000		49.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	49.200.000	4	49.200.000	4	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				49.200.000		49.200.000		49.200.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	49.200.000	4	49.200.000	4	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.500.000		13.500.000		13.460.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	13.500.000	4	13.500.000	4	13.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.500.000		13.500.000		13.460.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.500.000	4	13.500.000	4	13.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.632.000		282.632.000		293.424.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas	%	100	282.632.000	100	282.632.000	100	293.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.480.000		18.480.000		23.499.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	18.480.000	1	18.480.000	1	23.499.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				131.797.000		131.797.000		137.570.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	131.797.000	1	131.797.000	1	137.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.655.000		11.655.000		11.655.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	11.655.000	4	11.655.000	4	11.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.500.000		88.500.000		88.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	88.500.000	4	88.500.000	4	88.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.353.767.000		1.353.767.000		1.276.285.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	4	1.353.767.000	4	1.353.767.000	4	1.276.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				314.001.000		314.001.000		240.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	314.001.000	4	314.001.000	4	240.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		27.000.000		26.645.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	27.000.000	4	27.000.000	4	26.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.009.766.000		1.009.766.000		1.005.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.009.766.000	4	1.009.766.000	4	1.005.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					336.460.000		336.460.000		416.390.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1	336.460.000	1	336.460.000	1	416.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		15.000.000		16.950.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				132.960.000		132.960.000		147.400.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	132.960.000	1	132.960.000	1	147.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.500.000		35.500.000		35.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.500.000	1	35.500.000	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.000.000		78.000.000		141.540.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	78.000.000	1	78.000.000	1	141.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	%	95	1.572.959.000	95	1.572.959.000	95	1.614.009.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.000.000		43.000.000		43.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	43.000.000	4	43.000.000	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.000.000		43.000.000		43.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	43.000.000	4	43.000.000	4	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		13.100.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	13.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		13.100.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	13.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					272.109.000		272.109.000		303.594.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang	%	100	272.109.000	100	272.109.000	100	303.594.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		9.700.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	7.500.000	1	7.500.000	1	9.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.200.000		28.200.000		29.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	28.200.000	1	28.200.000	1	29.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.100.000		21.100.000		22.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	21.100.000	1	21.100.000	1	22.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				102.694.000		102.694.000		102.694.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang	Paket	1	102.694.000	1	102.694.000	1	102.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.375.000		32.375.000		42.375.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	32.375.000	4	32.375.000	4	42.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.240.000		75.240.000		92.025.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	75.240.000	4	75.240.000	4	92.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					888.700.000		888.700.000		871.065.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	888.700.000	4	888.700.000	4	871.065.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		3.400.000		3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		216.000.000		196.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	216.000.000	4	216.000.000	4	196.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				669.300.000		669.300.000		671.225.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	4	669.300.000	4	669.300.000	4	671.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					364.150.000		364.150.000		383.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	364.150.000	1	364.150.000	1	383.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.500.000		52.500.000		50.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	52.500.000	1	52.500.000	1	50.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				145.900.000		145.900.000		167.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	145.900.000	1	145.900.000	1	167.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		48.000.000		48.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.750.000		75.750.000		75.750.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	75.750.000	1	75.750.000	1	75.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	%	95	1.682.777.000	95	1.682.777.000	95	1.731.782.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.821.000		257.821.000		262.876.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora	%	100	257.821.000	100	257.821.000	100	262.876.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		13.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.900.000		36.900.000		36.900.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	36.900.000	1	36.900.000	1	36.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.000.000		11.000.000		16.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				108.828.000		108.828.000		83.728.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakanUPPD Kabupaten Blora	Paket	1	108.828.000	1	108.828.000	1	83.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.960.000		15.960.000		22.710.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	15.960.000	4	15.960.000	4	22.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.133.000		70.133.000		87.038.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	70.133.000	4	70.133.000	4	87.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD kabupaten Blora	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.052.726.000		1.052.726.000		1.106.926.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	Laporan	4	1.052.726.000	4	1.052.726.000	4	1.106.926.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		3.200.000		3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	3.200.000	4	3.200.000	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.010.000		155.010.000		212.010.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	155.010.000	4	155.010.000	4	212.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	4.000.000	4	4.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				890.516.000		890.516.000		888.716.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	4	890.516.000	4	890.516.000	4	888.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					319.730.000		319.730.000		309.480.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora	Unit	1	319.730.000	1	319.730.000	1	309.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.400.000		14.400.000		18.700.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	14.400.000	1	14.400.000	1	18.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.630.000		99.630.000		129.130.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	99.630.000	1	99.630.000	1	129.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		42.200.000		49.900.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	42.200.000	1	42.200.000	1	49.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	120.000.000	1	120.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		25.500.000		33.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	25.500.000	1	25.500.000	1	33.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	95	1.534.126.000	95	1.534.126.000	95	1.604.226.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.250.000		44.250.000		44.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	44.250.000	4	44.250.000	4	44.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.250.000		44.250.000		44.250.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	44.250.000	4	44.250.000	4	44.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					278.726.000		278.726.000		315.884.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali	%	100	278.726.000	100	278.726.000	100	315.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.380.000		35.380.000		36.530.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.380.000	1	35.380.000	1	36.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.900.000		23.900.000		21.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	23.900.000	1	23.900.000	1	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.240.000		6.240.000		6.240.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.240.000	4	6.240.000	4	6.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				101.123.000		101.123.000		103.279.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	101.123.000	1	101.123.000	1	103.279.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.278.000		22.278.000		28.233.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.278.000	4	22.278.000	4	28.233.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.805.000		82.805.000		112.602.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.805.000	4	82.805.000	4	112.602.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					892.300.000		892.300.000		871.692.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	Laporan	4	892.300.000	4	892.300.000	4	871.692.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.800.000		199.800.000		180.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	199.800.000	4	199.800.000	4	180.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				689.500.000		689.500.000		688.932.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	689.500.000	4	689.500.000	4	688.932.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					318.850.000		318.850.000		372.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	1	318.850.000	1	318.850.000	1	372.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.900.000		24.900.000		33.815.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	24.900.000	1	24.900.000	1	33.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				154.850.000		154.850.000		196.350.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	154.850.000	1	154.850.000	1	196.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		48.000.000		49.600.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	48.000.000	1	48.000.000	1	49.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		2.000.000		860.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.000.000	1	2.000.000	1	860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.100.000		23.100.000		25.775.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	23.100.000	1	23.100.000	1	25.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	95	2.148.219.000	95	2.148.219.000	95	2.183.669.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen		42.500.000		42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.161.000		254.161.000		302.011.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes	%	100	254.161.000	100	254.161.000	100	302.011.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.500.000		31.500.000		31.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				11.250.000		11.250.000		11.250.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	11.250.000	4	11.250.000	4	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.765.000		97.765.000		97.765.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket	1	97.765.000	1	97.765.000	1	97.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.850.000		22.850.000		28.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	22.850.000	4	22.850.000	4	28.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.296.000		74.296.000		116.746.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	74.296.000	4	74.296.000	4	116.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.484.866.000		1.484.866.000		1.477.866.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.484.866.000	4	1.484.866.000	4	1.477.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				390.000.000		390.000.000		383.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	390.000.000	4	390.000.000	4	383.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes UPPD Kabupaten Brebes	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.091.866.000		1.091.866.000		1.091.866.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	4	1.091.866.000	4	1.091.866.000	4	1.091.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					356.692.000		356.692.000		351.292.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	356.692.000	1	356.692.000	1	351.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.212.000		17.212.000		20.062.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	17.212.000	1	17.212.000	1	20.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.400.000		120.400.000		114.150.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	120.400.000	1	120.400.000	1	114.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.580.000		87.580.000		60.080.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	87.580.000	1	87.580.000	1	60.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				9.500.000		9.500.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	9.500.000	1	9.500.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		110.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	95	2.051.032.000	95	2.051.032.000	95	2.113.699.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		14.650.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	14.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.000.000		14.650.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	14.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					311.362.000		311.362.000		355.589.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap	%	100	311.362.000	100	311.362.000	100	355.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		14.200.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	14.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.200.000		38.200.000		38.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	38.200.000	1	38.200.000	1	38.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.850.000		11.850.000		10.650.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.850.000	1	11.850.000	1	10.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		4.800.000		4.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.800.000	4	4.800.000	4	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				151.756.000		151.756.000		151.756.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	151.756.000	1	151.756.000	1	151.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.512.000		25.512.000		29.157.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.512.000	4	25.512.000	4	29.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.244.000		61.244.000		98.826.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	61.244.000	4	61.244.000	4	98.826.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.223.071.000		1.223.071.000		1.221.871.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	4	1.223.071.000	4	1.223.071.000	4	1.221.871.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				258.000.000		258.000.000		256.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	258.000.000	4	258.000.000	4	256.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				960.571.000		960.571.000		960.571.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	960.571.000	4	960.571.000	4	960.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					459.599.000		459.599.000		479.089.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	459.599.000	1	459.599.000	1	479.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.750.000		39.750.000		30.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	39.750.000	1	39.750.000	1	30.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				221.999.000		221.999.000		255.739.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	221.999.000	1	221.999.000	1	255.739.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.100.000		51.100.000		46.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	51.100.000	1	51.100.000	1	46.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.750.000		24.750.000		24.750.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	24.750.000	1	24.750.000	1	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	%	95	1.520.515.000	95	1.520.515.000	95	1.524.575.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					303.090.000		303.090.000		330.715.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak	%	100	303.090.000	100	303.090.000	100	330.715.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				49.850.000		49.850.000		49.850.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	49.850.000	1	49.850.000	1	49.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.600.000		27.600.000		27.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	27.600.000	1	27.600.000	1	27.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.800.000		10.800.000		10.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	10.800.000	4	10.800.000	4	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				115.312.000		115.312.000		126.237.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket	1	115.312.000	1	115.312.000	1	126.237.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.230.000		20.230.000		21.230.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	20.230.000	4	20.230.000	4	21.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.298.000		70.298.000		87.998.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	70.298.000	4	70.298.000	4	87.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					795.100.000		795.100.000		768.075.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	795.100.000	4	795.100.000	4	768.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.800.000		183.800.000		158.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	183.800.000	4	183.800.000	4	158.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				608.300.000		608.300.000		606.375.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	Laporan	4	608.300.000	4	608.300.000	4	606.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					374.825.000		374.825.000		378.285.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	374.825.000	1	374.825.000	1	378.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.375.000		27.375.000		27.375.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	27.375.000	1	27.375.000	1	27.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				166.850.000		166.850.000		166.910.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	166.850.000	1	166.850.000	1	166.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.100.000		43.100.000		48.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	43.100.000	1	43.100.000	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000				
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		27.500.000		29.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	95	1.529.563.000	95	1.529.563.000	95	1.557.263.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					289.095.000		289.095.000		332.618.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan	%	100	289.095.000	100	289.095.000	100	332.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.800.000		41.800.000		41.800.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	41.800.000	1	41.800.000	1	41.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.320.000		19.320.000		19.320.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	19.320.000	1	19.320.000	1	19.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.900.000		100.900.000		110.970.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket	1	100.900.000	1	100.900.000	1	110.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.625.000		24.625.000		32.125.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	24.625.000	4	24.625.000	4	32.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.450.000		88.450.000		119.403.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	88.450.000	4	88.450.000	4	119.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000				
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					907.618.000		907.618.000		860.195.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	907.618.000	4	907.618.000	4	860.195.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				233.400.000		233.400.000		231.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	233.400.000	4	233.400.000	4	231.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				672.718.000		672.718.000		627.295.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	4	672.718.000	4	672.718.000	4	627.295.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285.350.000		285.350.000		316.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	285.350.000	1	285.350.000	1	316.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.000.000		21.000.000		23.600.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	21.000.000	1	21.000.000	1	23.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.450.000		109.450.000		109.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	109.450.000	1	109.450.000	1	109.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.000.000		56.000.000		60.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	56.000.000	1	56.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		85.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		25.500.000		25.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.400.000		8.400.000		8.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	95	1.624.741.000	95	1.624.741.000	95	1.649.489.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		39.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		39.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	39.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.028.000		257.028.000		271.776.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara	%	100	257.028.000	100	257.028.000	100	271.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.154.000		6.154.000		6.154.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.154.000	1	6.154.000	1	6.154.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.505.000		35.505.000		43.425.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	35.505.000	1	35.505.000	1	43.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.633.000		11.633.000		11.633.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.633.000	1	11.633.000	1	11.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.920.000		5.920.000		5.920.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	5.920.000	4	5.920.000	4	5.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.196.000		97.196.000		97.196.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	97.196.000	1	97.196.000	1	97.196.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.900.000		17.900.000		19.980.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	17.900.000	4	17.900.000	4	19.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.720.000		82.720.000		87.468.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.720.000	4	82.720.000	4	87.468.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					995.843.000		995.843.000		995.843.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	4	995.843.000	4	995.843.000	4	995.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		2.400.000		2.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.400.000	4	2.400.000	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.943.000		300.943.000		300.943.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	300.943.000	4	300.943.000	4	300.943.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				692.500.000		692.500.000		692.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	692.500.000	4	692.500.000	4	692.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.370.000		329.370.000		342.370.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1	329.370.000	1	329.370.000	1	342.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.950.000		16.950.000		16.950.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	16.950.000	1	16.950.000	1	16.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.320.000		156.320.000		156.320.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	156.320.000	1	156.320.000	1	156.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.800.000		54.800.000		45.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	54.800.000	1	54.800.000	1	45.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				46.500.000		46.500.000		46.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	46.500.000	1	46.500.000	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.800.000		46.800.000		68.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	46.800.000	1	46.800.000	1	68.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	95	1.570.857.000	95	1.570.857.000	95	1.603.507.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		43.360.000		43.360.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	43.360.000	4	43.360.000	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		43.360.000		43.360.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	43.360.000	4	43.360.000	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					273.582.000		273.582.000		277.682.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar	%	100	273.582.000	100	273.582.000	100	277.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.100.000		5.100.000		5.100.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.610.000		32.610.000		30.960.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.610.000	1	32.610.000	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.750.000		11.750.000		11.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	11.750.000	1	11.750.000	1	11.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.730.000		100.730.000		100.730.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	100.730.000	1	100.730.000	1	100.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.580.000		20.580.000		20.550.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.580.000	4	20.580.000	4	20.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.212.000		99.212.000		104.992.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	99.212.000	4	99.212.000	4	104.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					945.065.000		945.065.000		943.865.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	4	945.065.000	4	945.065.000	4	943.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.990.000		3.990.000		3.990.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.990.000	4	3.990.000	4	3.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				172.500.000		172.500.000		171.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	172.500.000	4	172.500.000	4	171.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				768.575.000		768.575.000		768.575.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	768.575.000	4	768.575.000	4	768.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.850.000		308.850.000		338.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	308.850.000	1	308.850.000	1	338.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.900.000		143.900.000		172.150.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	143.900.000	1	143.900.000	1	172.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.700.000		39.700.000		48.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	39.700.000	1	39.700.000	1	48.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.350.000		88.350.000		80.850.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	88.350.000	1	88.350.000	1	80.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.900.000		29.900.000		29.900.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.900.000	1	29.900.000	1	29.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	95	1.385.857.000	95	1.385.857.000	95	1.423.914.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.450.000		42.450.000		42.450.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.450.000	4	42.450.000	4	42.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.450.000		42.450.000		42.450.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.450.000	4	42.450.000	4	42.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					227.369.000		227.369.000		223.407.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	227.369.000	100	227.369.000	100	223.407.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.490.000		6.490.000		8.990.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.490.000	1	6.490.000	1	8.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1		1				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.000.000		39.000.000		29.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	39.000.000	1	39.000.000	1	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.700.000		12.700.000		15.750.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.700.000	1	12.700.000	1	15.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.609.000		6.609.000		6.609.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.609.000	4	6.609.000	4	6.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				84.654.000		84.654.000		84.642.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	84.654.000	1	84.654.000	1	84.642.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.260.000		22.260.000		18.780.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.260.000	4	22.260.000	4	18.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.656.000		55.656.000		59.136.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	55.656.000	4	55.656.000	4	59.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					802.000.000		802.000.000		807.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	802.000.000	4	802.000.000	4	807.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		3.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	3.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				184.200.000		184.200.000		189.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	184.200.000	4	184.200.000	4	189.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				615.800.000		615.800.000		613.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	615.800.000	4	615.800.000	4	613.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					306.038.000		306.038.000		342.907.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	306.038.000	1	306.038.000	1	342.907.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				112.288.000		112.288.000		138.157.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	112.288.000	1	112.288.000	1	138.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.500.000		60.500.000		62.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara,Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	60.500.000	1	60.500.000	1	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		109.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	109.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		8.250.000		8.250.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.250.000	1	8.250.000	1	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	95	1.533.147.000	95	1.533.147.000	95	1.545.332.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					328.902.000		328.902.000		343.702.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal	%	100	328.902.000	100	328.902.000	100	343.702.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		6.500.000		6.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.300.000		25.300.000		25.300.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	25.300.000	1	25.300.000	1	25.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.100.000		15.100.000		15.100.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.100.000	1	15.100.000	1	15.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		7.500.000		3.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.500.000	4	7.500.000	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				149.350.000		149.350.000		149.350.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	149.350.000	1	149.350.000	1	149.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.900.000		25.900.000		25.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.900.000	4	25.900.000	4	25.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.252.000		74.252.000		93.252.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	74.252.000	4	74.252.000	4	93.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kendal	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					862.450.000		862.450.000		849.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	4	862.450.000	4	862.450.000	4	849.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.150.000		2.150.000		2.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.150.000	4	2.150.000	4	2.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				234.000.000		234.000.000		220.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	234.000.000	4	234.000.000	4	220.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				626.300.000		626.300.000		626.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	626.300.000	4	626.300.000	4	626.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					299.795.000		299.795.000		309.880.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal	Unit	1	299.795.000	1	299.795.000	1	309.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.270.000		26.270.000		30.770.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	26.270.000	1	26.270.000	1	30.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.775.000		97.775.000		103.760.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	97.775.000	1	97.775.000	1	103.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.750.000		54.750.000		57.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	54.750.000	1	54.750.000	1	57.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.000.000		78.000.000		87.300.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	78.000.000	1	78.000.000	1	87.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.000.000		43.000.000		30.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	43.000.000	1	43.000.000	1	30.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	95	2.357.813.000	95	2.357.813.000	95	2.382.993.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.014.000		45.014.000		42.300.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	45.014.000	4	45.014.000	4	42.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.014.000		45.014.000		42.300.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	45.014.000	4	45.014.000	4	42.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		9.833.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	9.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		9.833.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	9.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					288.790.000		288.790.000		358.178.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten	%	100	288.790.000	100	288.790.000	100	358.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.954.000		7.954.000		10.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.954.000	1	7.954.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.204.000		12.204.000		9.979.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.204.000	1	12.204.000	1	9.979.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				136.333.000		136.333.000		154.114.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	136.333.000	1	136.333.000	1	154.114.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.693.000		35.693.000		52.203.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	35.693.000	4	35.693.000	4	52.203.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.606.000		90.606.000		125.382.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	90.606.000	4	90.606.000	4	125.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Klaten	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.650.000.000		1.650.000.000		1.636.135.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	4	1.650.000.000	4	1.650.000.000	4	1.636.135.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		3.300.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.300.000	4	3.300.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				317.200.000		317.200.000		303.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	317.200.000	4	317.200.000	4	303.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.329.500.000		1.329.500.000		1.331.435.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.329.500.000	4	1.329.500.000	4	1.331.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					364.009.000		364.009.000		336.547.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten	Unit	1	364.009.000	1	364.009.000	1	336.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.250.000		29.250.000		23.750.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	29.250.000	1	29.250.000	1	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.759.000		143.759.000		150.509.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	143.759.000	1	143.759.000	1	150.509.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.500.000		100.500.000		78.505.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	100.500.000	1	100.500.000	1	78.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.900.000		7.900.000		1.400.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.900.000	1	7.900.000	1	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.000.000		34.000.000		40.703.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	34.000.000	1	34.000.000	1	40.703.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.600.000		33.600.000		31.680.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.600.000	1	33.600.000	1	31.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	95	1.458.374.000	95	1.458.374.000	95	1.482.674.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		38.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		38.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		6.700.000		6.682.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.700.000	4	6.700.000	4	6.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		6.700.000		6.682.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.700.000	4	6.700.000	4	6.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.724.000		250.724.000		274.875.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus	%	100	250.724.000	100	250.724.000	100	274.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.100.000		6.100.000		10.078.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	6.100.000	1	6.100.000	1	10.078.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		24.000.000		28.600.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	24.000.000	1	24.000.000	1	28.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.204.000		12.204.000		12.204.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	12.204.000	1	12.204.000	1	12.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.600.000		9.600.000		9.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	9.600.000	4	9.600.000	4	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				95.055.000		95.055.000		95.055.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus	Paket	1	95.055.000	1	95.055.000	1	95.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.550.000		18.550.000		22.525.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	18.550.000	4	18.550.000	4	22.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.965.000		83.965.000		95.563.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	83.965.000	4	83.965.000	4	95.563.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		1.250.000		1.250.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	1.250.000	4	1.250.000	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					836.600.000		836.600.000		827.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	836.600.000	4	836.600.000	4	827.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				226.800.000		226.800.000		217.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	226.800.000	4	226.800.000	4	217.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan		1.500.000		1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				606.300.000		606.300.000		606.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	4	606.300.000	4	606.300.000	4	606.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					321.850.000		321.850.000		335.517.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	321.850.000	1	321.850.000	1	335.517.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.750.000		12.750.000		12.565.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	12.750.000	1	12.750.000	1	12.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.300.000		109.300.000		124.302.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	109.300.000	1	109.300.000	1	124.302.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		39.800.000		39.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	39.800.000	1	39.800.000	1	39.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				103.000.000		103.000.000		103.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	103.000.000	1	103.000.000	1	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.000.000		37.000.000		35.850.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	37.000.000	1	37.000.000	1	35.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	95	1.714.081.000	95	1.714.081.000	95	1.740.861.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		8.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		8.400.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					273.599.000		273.599.000		296.179.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang	%	100	273.599.000	100	273.599.000	100	296.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.600.000		41.600.000		41.600.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.600.000	1	41.600.000	1	41.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.080.000		30.080.000		31.680.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	30.080.000	1	30.080.000	1	31.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		4.200.000		3.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.200.000	4	4.200.000	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				99.330.000		99.330.000		99.330.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	99.330.000	1	99.330.000	1	99.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.078.000		36.078.000		38.058.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	36.078.000	4	36.078.000	4	38.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.311.000		53.311.000		73.311.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	53.311.000	4	53.311.000	4	73.311.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.016.039.000		1.016.039.000		1.003.389.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	4	1.016.039.000	4	1.016.039.000	4	1.003.389.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				206.000.000		206.000.000		193.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	206.000.000	4	206.000.000	4	193.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				805.039.000		805.039.000		804.489.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	805.039.000	4	805.039.000	4	804.489.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.943.000		371.943.000		390.393.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	371.943.000	1	371.943.000	1	390.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.488.000		21.488.000		22.688.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	21.488.000	1	21.488.000	1	22.688.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.455.000		146.455.000		168.055.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	146.455.000	1	146.455.000	1	168.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		2.550.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.000.000		87.000.000		74.800.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	87.000.000	1	87.000.000	1	74.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		61.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	61.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		9.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	%	95	1.594.919.000	95	1.594.919.000	95	1.630.119.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					237.629.000		237.629.000		276.729.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati	%	100	237.629.000	100	237.629.000	100	276.729.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		4.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.200.000		41.200.000		47.200.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	41.200.000	1	41.200.000	1	47.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.300.000		4.300.000		6.300.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	4.300.000	1	4.300.000	1	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				92.992.000		92.992.000		92.992.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket	1	92.992.000	1	92.992.000	1	92.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.090.000		19.090.000		28.190.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	19.090.000	4	19.090.000	4	28.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.847.000		68.847.000		89.847.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	68.847.000	4	68.847.000	4	89.847.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					989.790.000		989.790.000		968.790.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	989.790.000	4	989.790.000	4	968.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.080.000		1.080.000		1.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	1.080.000	4	1.080.000	4	1.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				290.160.000		290.160.000		269.160.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	290.160.000	4	290.160.000	4	269.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				698.550.000		698.550.000		698.550.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	4	698.550.000	4	698.550.000	4	698.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.000.000		305.000.000		322.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	305.000.000	1	305.000.000	1	322.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pati	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				138.900.000		138.900.000		164.700.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	138.900.000	1	138.900.000	1	164.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				84.900.000		84.900.000		79.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	84.900.000	1	84.900.000	1	79.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		12.000.000		9.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.200.000		9.200.000		9.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	9.200.000	1	9.200.000	1	9.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	95	1.509.566.000	95	1.509.566.000	95	1.529.316.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.059.000		286.059.000		288.609.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan	%	100	286.059.000	100	286.059.000	100	288.609.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		6.500.000		6.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.380.000		51.380.000		51.380.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	51.380.000	1	51.380.000	1	51.380.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.500.000		19.500.000		19.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		5.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				113.804.000		113.804.000		113.804.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD KAbupaten Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket	1	113.804.000	1	113.804.000	1	113.804.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.125.000		22.125.000		22.125.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	22.125.000	4	22.125.000	4	22.125.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.250.000		64.250.000		69.800.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	64.250.000	4	64.250.000	4	69.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		2.500.000				
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	2.500.000	4	2.500.000				OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					827.425.000		827.425.000		827.025.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	827.425.000	4	827.425.000	4	827.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	1.200.000	4	1.200.000	4	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.200.000		189.200.000		188.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	189.200.000	4	189.200.000	4	188.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				635.025.000		635.025.000		635.025.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	4	635.025.000	4	635.025.000	4	635.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.582.000		338.582.000		356.182.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	338.582.000	1	338.582.000	1	356.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.182.000		24.182.000		24.182.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	24.182.000	1	24.182.000	1	24.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.900.000		127.900.000		135.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	127.900.000	1	127.900.000	1	135.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.500.000		56.500.000		56.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	56.500.000	1	56.500.000	1	56.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		90.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.000.000		39.000.000		39.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	39.000.000	1	39.000.000	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	95	1.617.429.000	95	1.617.429.000	95	1.642.429.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					271.366.000		271.366.000		313.216.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang	%	100	271.366.000	100	271.366.000	100	313.216.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.250.000		24.250.000		23.850.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	24.250.000	1	24.250.000	1	23.850.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.750.000		5.750.000		8.350.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	5.750.000	1	5.750.000	1	8.350.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				118.579.000		118.579.000		118.579.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket	1	118.579.000	1	118.579.000	1	118.579.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.650.000		13.650.000		18.150.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	13.650.000	4	13.650.000	4	18.150.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.437.000		87.437.000		122.587.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	87.437.000	4	87.437.000	4	122.587.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1		1		1			
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Paket								OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit								OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					879.925.000		879.925.000		877.025.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	879.925.000	4	879.925.000	4	877.025.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	900.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		180.000.000		193.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	180.000.000	4	180.000.000	4	193.700.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				696.425.000		696.425.000		680.425.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	4	696.425.000	4	696.425.000	4	680.425.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					413.638.000		413.638.000		399.688.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	413.638.000	1	413.638.000	1	399.688.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.438.000		20.438.000		19.938.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	20.438.000	1	20.438.000	1	19.938.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				179.200.000		179.200.000		180.250.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	179.200.000	1	179.200.000	1	180.250.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.500.000		44.500.000		43.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	44.500.000	1	44.500.000	1	43.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		12.000.000		19.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	19.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.500.000		39.500.000		19.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	39.500.000	1	39.500.000	1	19.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	95	1.444.650.000	95	1.444.650.000	95	1.458.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					276.084.000		276.084.000		331.554.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga	%	100	276.084.000	100	276.084.000	100	331.554.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.150.000		4.150.000		4.150.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	4.150.000	1	4.150.000	1	4.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.100.000		38.100.000		38.100.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	38.100.000	1	38.100.000	1	38.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		21.000.000		19.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	21.000.000	1	21.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				110.329.000		110.329.000		110.329.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket	1	110.329.000	1	110.329.000	1	110.329.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.920.000		24.920.000		24.920.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	24.920.000	4	24.920.000	4	24.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.720.000		70.720.000		130.055.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	70.720.000	4	70.720.000	4	130.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.865.000		1.865.000				
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	1.865.000	4	1.865.000			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					777.186.000		777.186.000		777.886.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	777.186.000	4	777.186.000	4	777.886.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		5.400.000		3.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	5.400.000	4	5.400.000	4	3.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.600.000		210.600.000		212.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	210.600.000	4	210.600.000	4	212.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				555.186.000		555.186.000		555.186.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	4	555.186.000	4	555.186.000	4	555.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					339.380.000		339.380.000		296.060.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	339.380.000	1	339.380.000	1	296.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.800.000		25.800.000		25.800.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	25.800.000	1	25.800.000	1	25.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.700.000		135.700.000		146.200.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	135.700.000	1	135.700.000	1	146.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.510.000		71.510.000		48.410.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	71.510.000	1	71.510.000	1	48.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.170.000		74.170.000		43.450.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	74.170.000	1	74.170.000	1	43.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.000.000		22.000.000		22.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	95	1.706.860.000	95	1.706.860.000	95	1.715.020.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		12.000.000		7.570.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	4	12.000.000	4	7.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		12.000.000		7.570.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	12.000.000	4	12.000.000	4	7.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.890.000		286.890.000		304.370.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	286.890.000	100	286.890.000	100	304.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		18.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				52.000.000		52.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	52.000.000	1	52.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.600.000		8.600.000		11.600.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	8.600.000	1	8.600.000	1	11.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.500.000		6.500.000		6.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				108.560.000		108.560.000		97.160.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	108.560.000	1	108.560.000	1	97.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.780.000		23.780.000		30.480.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	23.780.000	4	23.780.000	4	30.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.450.000		67.450.000		90.630.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	67.450.000	4	67.450.000	4	90.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.115.470.000		1.115.470.000		1.114.270.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.115.470.000	4	1.115.470.000	4	1.114.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.475.000		2.475.000		1.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.475.000	4	2.475.000	4	1.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.440.000		190.440.000		190.440.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	190.440.000	4	190.440.000	4	190.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4		4				SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				922.555.000		922.555.000		922.555.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	922.555.000	4	922.555.000	4	922.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					250.000.000		250.000.000		246.310.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	250.000.000	1	250.000.000	1	246.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.500.000		13.500.000		13.500.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.400.000		114.400.000		122.560.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	114.400.000	1	114.400.000	1	122.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.900.000		28.900.000		21.800.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	28.900.000	1	28.900.000	1	21.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.750.000		1.750.000		1.750.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.750.000	1	1.750.000	1	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.400.000		30.400.000		25.650.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.400.000	1	30.400.000	1	25.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		6.050.000		6.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	1	6.050.000	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	95	1.208.132.000	95	1.208.132.000	95	1.258.632.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.350.000		42.350.000		42.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	42.350.000	4	42.350.000	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.350.000		42.350.000		42.350.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.350.000	4	42.350.000	4	42.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					231.885.000		231.885.000		247.985.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang	%	100	231.885.000	100	231.885.000	100	247.985.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.560.000		6.560.000		6.560.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.560.000	1	6.560.000	1	6.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.280.000		32.280.000		32.280.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.280.000	1	32.280.000	1	32.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		4.800.000		4.800.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.800.000	4	4.800.000	4	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				74.360.000		74.360.000		74.360.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	74.360.000	1	74.360.000	1	74.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.460.000		19.460.000		19.460.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	19.460.000	4	19.460.000	4	19.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84.425.000		84.425.000		100.525.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	84.425.000	4	84.425.000	4	100.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					626.600.000		626.600.000		626.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	4	626.600.000	4	626.600.000	4	626.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.500.000		150.500.000		150.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	150.500.000	4	150.500.000	4	150.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				453.100.000		453.100.000		453.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	453.100.000	4	453.100.000	4	453.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					297.297.000		297.297.000		331.697.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	297.297.000	1	297.297.000	1	331.697.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.250.000		17.250.000		17.250.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	17.250.000	1	17.250.000	1	17.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.497.000		159.497.000		164.497.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	159.497.000	1	159.497.000	1	164.497.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.750.000		39.750.000		43.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	39.750.000	1	39.750.000	1	43.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		75.400.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		18.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.800.000		7.800.000		7.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.800.000	1	7.800.000	1	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	95	2.250.395.000	95	2.250.395.000	95	2.282.145.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.250.000		42.250.000		42.570.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	42.250.000	4	42.250.000	4	42.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.250.000		42.250.000		42.570.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.250.000	4	42.250.000	4	42.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					291.482.000		291.482.000		351.912.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang	%	100	291.482.000	100	291.482.000	100	351.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		18.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	18.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.350.000		41.350.000		45.678.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.350.000	1	41.350.000	1	45.678.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.875.000		20.875.000		27.026.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.875.000	1	20.875.000	1	27.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				750.000		750.000				
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	750.000	4	750.000	4		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				121.863.000		121.863.000		133.285.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	121.863.000	1	121.863.000	1	133.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.875.000		29.875.000		44.305.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	29.875.000	4	29.875.000	4	44.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.769.000		61.769.000		83.118.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	61.769.000	4	61.769.000	4	83.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.559.905.000		1.559.905.000		1.539.655.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	4	1.559.905.000	4	1.559.905.000	4	1.539.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				437.000.000		437.000.000		417.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	437.000.000	4	437.000.000	4	417.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.104.905.000		1.104.905.000		1.104.905.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.104.905.000	4	1.104.905.000	4	1.104.905.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					356.758.000		356.758.000		348.008.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang	Unit	1	356.758.000	1	356.758.000	1	348.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.038.000		32.038.000		32.038.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	32.038.000	1	32.038.000	1	32.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				193.220.000		193.220.000		199.970.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	193.220.000	1	193.220.000	1	199.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.500.000		57.500.000		62.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	57.500.000	1	57.500.000	1	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		24.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000				
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	95	1.350.268.000	95	1.350.268.000	95	1.355.918.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.720.000		42.720.000		42.360.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	42.720.000	4	42.720.000	4	42.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.720.000		42.720.000		42.360.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.720.000	4	42.720.000	4	42.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					260.233.000		260.233.000		262.333.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen	%	100	260.233.000	100	260.233.000	100	262.333.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.360.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.750.000		32.750.000		32.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	32.750.000	1	32.750.000	1	32.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.840.000		6.840.000		4.330.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	6.840.000	1	6.840.000	1	4.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.400.000		6.400.000		6.400.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.400.000	4	6.400.000	4	6.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				91.888.000		91.888.000		91.888.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	91.888.000	1	91.888.000	1	91.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				34.475.000		34.475.000		34.475.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	34.475.000	4	34.475.000	4	34.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.880.000		81.880.000		86.130.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	81.880.000	4	81.880.000	4	86.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					748.725.000		748.725.000		751.635.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	4	748.725.000	4	748.725.000	4	751.635.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		3.500.000		3.010.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.500.000	4	3.500.000	4	3.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.400.000		186.400.000		189.920.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	186.400.000	4	186.400.000	4	189.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				558.825.000		558.825.000		558.705.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	558.825.000	4	558.825.000	4	558.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.590.000		298.590.000		299.590.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1	298.590.000	1	298.590.000	1	299.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.167.000		36.167.000		36.457.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	36.167.000	1	36.167.000	1	36.457.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				119.693.000		119.693.000		119.403.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	119.693.000	1	119.693.000	1	119.403.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.570.000		34.570.000		35.070.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	34.570.000	1	34.570.000	1	35.070.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.000.000		68.000.000		68.500.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	68.000.000	1	68.000.000	1	68.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.460.000		29.460.000		29.460.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	29.460.000	1	29.460.000	1	29.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		7.700.000		7.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	7.700.000	1	7.700.000	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	95	1.598.935.000	95	1.598.935.000	95	1.647.920.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.050.000		42.050.000		42.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.050.000	4	42.050.000	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.050.000		42.050.000		42.050.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	42.050.000	4	42.050.000	4	42.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					269.820.000		269.820.000		301.773.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	100	269.820.000	100	269.820.000	100	301.773.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.570.000		8.570.000		8.570.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	8.570.000	1	8.570.000	1	8.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.975.000		41.975.000		41.975.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	41.975.000	1	41.975.000	1	41.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.020.000		18.020.000		17.270.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	18.020.000	1	18.020.000	1	17.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		9.000.000		7.980.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	9.000.000	4	9.000.000	4	7.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.867.000		109.867.000		109.867.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket	1	109.867.000	1	109.867.000	1	109.867.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.950.000		19.950.000		24.900.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	19.950.000	4	19.950.000	4	24.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.438.000		62.438.000		91.211.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	62.438.000	4	62.438.000	4	91.211.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					960.200.000		960.200.000		968.347.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	960.200.000	4	960.200.000	4	968.347.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		3.400.000		3.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.400.000		200.400.000		215.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	200.400.000	4	200.400.000	4	215.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		90.000.000		86.647.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	90.000.000	4	90.000.000	4	86.647.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				666.400.000		666.400.000		662.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	4	666.400.000	4	666.400.000	4	662.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.865.000		326.865.000		335.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	326.865.000	1	326.865.000	1	335.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				34.875.000		34.875.000		36.950.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	34.875.000	1	34.875.000	1	36.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.450.000		91.450.000		94.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	91.450.000	1	91.450.000	1	94.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.715.000		78.715.000		63.375.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	78.715.000	1	78.715.000	1	63.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.325.000		6.325.000		5.325.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	6.325.000	1	6.325.000	1	5.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.500.000		27.500.000		27.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	95	1.551.760.000	95	1.551.760.000	95	1.584.310.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					249.985.000		249.985.000		269.465.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal	%	100	249.985.000	100	249.985.000	100	269.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.700.000		29.700.000		29.700.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	29.700.000	1	29.700.000	1	29.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				97.017.000		97.017.000		97.017.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal	Paket	1	97.017.000	1	97.017.000	1	97.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.075.000		11.075.000		11.075.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	11.075.000	4	11.075.000	4	11.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.593.000		83.593.000		103.073.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	83.593.000	4	83.593.000	4	103.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					868.100.000		868.100.000		879.620.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	868.100.000	4	868.100.000	4	879.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.200.000		157.200.000		168.720.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	157.200.000	4	157.200.000	4	168.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				706.900.000		706.900.000		706.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	4	706.900.000	4	706.900.000	4	706.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.175.000		371.175.000		382.725.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	371.175.000	1	371.175.000	1	382.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.325.000		32.325.000		32.325.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	32.325.000	1	32.325.000	1	32.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.900.000		156.900.000		168.450.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	156.900.000	1	156.900.000	1	168.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.750.000		44.750.000		44.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	44.750.000	1	44.750.000	1	44.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.500.000		29.500.000		29.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	29.500.000	1	29.500.000	1	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		7.700.000		7.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	7.700.000	1	7.700.000	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	95	1.494.041.000	95	1.494.041.000	95	1.496.581.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		35.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.434.000		283.434.000		292.984.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung	%	100	283.434.000	100	283.434.000	100	292.984.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.640.000		3.640.000				
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		3.640.000		3.640.000	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				57.424.000		57.424.000		57.424.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	57.424.000	1	57.424.000	1	57.424.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.050.000		15.050.000		25.050.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.050.000	1	15.050.000	1	25.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				88.254.000		88.254.000		88.254.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	88.254.000	1	88.254.000	1	88.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.410.000		25.410.000		27.250.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	25.410.000	4	25.410.000	4	27.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.156.000		82.156.000		83.506.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	82.156.000	4	82.156.000	4	83.506.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					894.882.000		894.882.000		885.882.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	4	894.882.000	4	894.882.000	4	885.882.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.410.000		3.410.000		3.410.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.410.000	4	3.410.000	4	3.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168.600.000		168.600.000		159.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	168.600.000	4	168.600.000	4	159.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				722.872.000		722.872.000		722.872.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	722.872.000	4	722.872.000	4	722.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					273.225.000		273.225.000		282.715.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1	273.225.000	1	273.225.000	1	282.715.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.275.000		16.275.000		16.275.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	16.275.000	1	16.275.000	1	16.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.100.000		107.100.000		117.090.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	107.100.000	1	107.100.000	1	117.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.000.000		33.000.000		35.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	33.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.550.000		2.550.000		2.550.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.550.000	1	2.550.000	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				84.300.000		84.300.000		84.300.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	84.300.000	1	84.300.000	1	84.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.000.000		22.000.000		19.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	1	22.000.000	1	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	95	2.101.317.000	95	2.101.317.000	95	2.130.447.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.350.000		42.350.000		42.325.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	42.350.000	4	42.350.000	4	42.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.350.000		42.350.000		42.325.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.350.000	4	42.350.000	4	42.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.122.000		282.122.000		298.529.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri	%	100	282.122.000	100	282.122.000	100	298.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.000.000		42.000.000		42.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				114.932.000		114.932.000		113.299.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	114.932.000	1	114.932.000	1	113.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.390.000		19.390.000		22.200.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	19.390.000	4	19.390.000	4	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.200.000		75.200.000		90.430.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	75.200.000	4	75.200.000	4	90.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.394.850.000		1.394.850.000		1.398.223.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	4	1.394.850.000	4	1.394.850.000	4	1.398.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.250.000		3.250.000		2.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	3.250.000	4	3.250.000	4	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				318.000.000		318.000.000		323.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	318.000.000	4	318.000.000	4	323.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.073.600.000		1.073.600.000		1.072.223.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	1.073.600.000	4	1.073.600.000	4	1.072.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.995.000		381.995.000		391.370.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1	381.995.000	1	381.995.000	1	391.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.000.000		24.000.000		25.370.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	24.000.000	1	24.000.000	1	25.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.995.000		152.995.000		145.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	152.995.000	1	152.995.000	1	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.000.000		63.000.000		79.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	63.000.000	1	63.000.000	1	79.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	95	1.371.159.000	95	1.371.159.000	95	1.398.699.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.600.000		42.600.000		42.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	42.600.000	4	42.600.000	4	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.600.000		42.600.000		42.600.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.600.000	4	42.600.000	4	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		12.000.000		6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	12.000.000	4	12.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		12.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		12.000.000		12.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					295.019.000		295.019.000		326.359.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo	%	100	295.019.000	100	295.019.000	100	326.359.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.500.000		41.500.000		41.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	41.500.000	1	41.500.000	1	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.794.000		19.794.000		24.794.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	19.794.000	1	19.794.000	1	24.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				100.950.000		100.950.000		110.749.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	100.950.000	1	100.950.000	1	110.749.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.575.000		22.575.000		24.435.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	22.575.000	4	22.575.000	4	24.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.200.000		93.200.000		107.881.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	93.200.000	4	93.200.000	4	107.881.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					699.040.000		699.040.000		687.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	4	699.040.000	4	699.040.000	4	687.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		150.000.000		138.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	138.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		3.000.000		3.000.000	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				541.040.000		541.040.000		541.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	541.040.000	4	541.040.000	4	541.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.500.000		322.500.000		336.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1	322.500.000	1	322.500.000	1	336.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.500.000		22.500.000		25.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	22.500.000	1	22.500.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		118.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	118.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		55.000.000		48.100.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	48.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang	%	95	1.159.538.000	95	1.159.538.000	95	1.164.538.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		6.000.000		5.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		6.000.000		5.700.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.321.000		282.321.000		283.301.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang	%	100	282.321.000	100	282.321.000	100	283.301.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.500.000		24.500.000		24.500.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	1	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.884.000		18.884.000		18.884.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	18.884.000	1	18.884.000	1	18.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.300.000		3.300.000		3.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.300.000	4	3.300.000	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.142.000		109.142.000		109.147.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	109.142.000	1	109.142.000	1	109.147.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.435.000		36.435.000		36.435.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	36.435.000	4	36.435.000	4	36.435.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.060.000		85.060.000		86.035.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	85.060.000	4	85.060.000	4	86.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Magelang	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					626.185.000		626.185.000		625.510.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	Laporan	4	626.185.000	4	626.185.000	4	625.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		1.700.000		1.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	1.700.000	4	1.700.000	4	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				158.610.000		158.610.000		158.210.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	158.610.000	4	158.610.000	4	158.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				465.875.000		465.875.000		465.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	465.875.000	4	465.875.000	4	465.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.532.000		202.532.000		207.527.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang	Unit	1	202.532.000	1	202.532.000	1	207.527.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.192.000		19.192.000		19.192.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	19.192.000	1	19.192.000	1	19.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.340.000		90.340.000		95.335.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	90.340.000	1	90.340.000	1	95.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.150.000		28.150.000		28.150.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	28.150.000	1	28.150.000	1	28.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.800.000		13.800.000		13.800.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	13.800.000	1	13.800.000	1	13.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		6.050.000		6.050.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	1	6.050.000	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	%	95	1.425.630.000	95	1.425.630.000	95	1.439.630.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		32.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		32.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.081.000		220.081.000		234.581.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan	%	100	220.081.000	100	220.081.000	100	234.581.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.175.000		26.175.000		26.175.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	26.175.000	1	26.175.000	1	26.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				102.953.000		102.953.000		102.953.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket	1	102.953.000	1	102.953.000	1	102.953.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.800.000		9.800.000		9.800.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	9.800.000	4	9.800.000	4	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54.403.000		54.403.000		70.153.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	54.403.000	4	54.403.000	4	70.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		1.250.000				
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.250.000	4	1.250.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Pekalongan UPPD Kota Pekalongan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					866.959.000		866.959.000		863.959.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	866.959.000	4	866.959.000	4	863.959.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				197.400.000		197.400.000		194.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	197.400.000	4	197.400.000	4	194.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				667.059.000		667.059.000		667.059.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	4	667.059.000	4	667.059.000	4	667.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.090.000		286.090.000		299.090.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	286.090.000	1	286.090.000	1	299.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.190.000		21.190.000		21.190.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	21.190.000	1	21.190.000	1	21.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				161.000.000		161.000.000		166.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	161.000.000	1	161.000.000	1	166.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.200.000		42.200.000		50.200.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	42.200.000	1	42.200.000	1	50.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.700.000		20.700.000		20.700.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	20.700.000	1	20.700.000	1	20.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	%	95	1.284.719.000	95	1.284.719.000	95	1.303.439.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.550.000		42.550.000		42.550.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	42.550.000	4	42.550.000	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.550.000		42.550.000		42.550.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.550.000	4	42.550.000	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.044.000		294.044.000		319.944.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga	%		294.044.000		294.044.000		319.944.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.000.000		72.000.000		72.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.000.000		29.000.000		29.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				87.017.000		87.017.000		87.017.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	87.017.000	1	87.017.000	1	87.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.527.000		20.527.000		29.137.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	20.527.000	4	20.527.000	4	29.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.900.000		68.900.000		86.190.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	68.900.000	4	68.900.000	4	86.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Salatiga	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					612.150.000		612.150.000		590.970.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	Laporan	4	612.150.000	4	612.150.000	4	590.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.200.000		145.200.000		124.020.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	145.200.000	4	145.200.000	4	124.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				464.950.000		464.950.000		464.950.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	464.950.000	4	464.950.000	4	464.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.975.000		335.975.000		349.975.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga	Unit	1	335.975.000	1	335.975.000	1	349.975.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.625.000		20.625.000		23.625.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	20.625.000	1	20.625.000	1	23.625.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.100.000		113.100.000		124.100.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	113.100.000	1	113.100.000	1	124.100.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1		1					OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.750.000		52.750.000		52.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	52.750.000	1	52.750.000	1	52.750.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.000.000		98.000.000		98.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	98.000.000	1	98.000.000	1	98.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.500.000		33.500.000		33.500.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.500.000	1	33.500.000	1	33.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I	%	95	2.086.245.000	95	2.086.245.000	95	2.126.845.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.800.000		43.800.000		43.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	43.800.000	4	43.800.000	4	43.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.800.000		43.800.000		43.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	43.800.000	4	43.800.000	4	43.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1	Dokumen	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.500.000		5.500.000		5.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					269.258.000		269.258.000		283.118.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1	%	100	269.258.000	100	269.258.000	100	283.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		6.500.000		8.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.500.000	1	6.500.000	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.025.000		22.025.000		26.525.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	22.025.000	1	22.025.000	1	26.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.500.000		24.500.000		25.500.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				128.384.000		128.384.000		134.284.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	128.384.000	1	128.384.000	1	134.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.300.000		16.300.000		19.500.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	16.300.000	4	16.300.000	4	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.949.000		67.949.000		65.209.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	67.949.000	4	67.949.000	4	65.209.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang 1	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.531.700.000		1.531.700.000		1.549.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	Laporan	4	1.531.700.000	4	1.531.700.000	4	1.549.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				321.100.000		321.100.000		351.700.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	321.100.000	4	321.100.000	4	351.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.000.000		280.000.000		267.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	280.000.000	4	280.000.000	4	267.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				928.600.000		928.600.000		928.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	928.600.000	4	928.600.000	4	928.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.987.000		235.987.000		245.127.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1	Unit	1	235.987.000	1	235.987.000	1	245.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.110.000		102.110.000		107.750.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	102.110.000	1	102.110.000	1	107.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.700.000		38.700.000		34.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	38.700.000	1	38.700.000	1	34.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.500.000		7.500.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.077.000		33.077.000		33.227.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	33.077.000	1	33.077.000	1	33.227.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.600.000		54.600.000		64.450.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	54.600.000	1	54.600.000	1	64.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	%	95	1.654.551.000	95	1.654.551.000	95	1.666.544.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		24.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		24.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4		4		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					309.939.000		309.939.000		322.332.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II	%	100	309.939.000	100	309.939.000	100	322.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.500.000		46.500.000		46.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	46.500.000	1	46.500.000	1	46.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.340.000		38.340.000		38.340.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	38.340.000	1	38.340.000	1	38.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		7.500.000		7.500.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				109.874.000		109.874.000		109.887.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	109.874.000	1	109.874.000	1	109.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.240.000		30.240.000		40.620.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	30.240.000	4	30.240.000	4	40.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.485.000		62.485.000		62.485.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	62.485.000	4	62.485.000	4	62.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang II	Unit	1		1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.010.400.000		1.010.400.000		1.001.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	Laporan	4	1.010.400.000	4	1.010.400.000	4	1.001.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				338.800.000		338.800.000		330.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	338.800.000	4	338.800.000	4	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.100.000		14.100.000		14.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	14.100.000	4	14.100.000	4	14.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				655.500.000		655.500.000		655.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	655.500.000	4	655.500.000	4	655.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.712.000		291.712.000		318.112.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II	Unit	1	291.712.000	1	291.712.000	1	318.112.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.312.000		25.312.000		25.312.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	25.312.000	1	25.312.000	1	25.312.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.800.000		95.800.000		105.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	95.800.000	1	95.800.000	1	105.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.750.000		57.750.000		60.750.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	57.750.000	1	57.750.000	1	60.750.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		73.400.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	73.400.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.850.000		30.850.000		30.850.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.850.000	1	30.850.000	1	30.850.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		12.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	%	95	1.946.701.000	95	1.946.701.000	95	1.956.701.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					290.526.000		290.526.000		317.753.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III	%	100	290.526.000	100	290.526.000	100	317.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.100.000		54.100.000		54.093.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	54.100.000	1	54.100.000	1	54.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.300.000		15.300.000		23.800.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.300.000	1	15.300.000	1	23.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				112.876.000		112.876.000		112.876.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	112.876.000	1	112.876.000	1	112.876.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.850.000		24.850.000		31.600.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	4	24.850.000	4	24.850.000	4	31.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.400.000		64.400.000		76.384.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	64.400.000	4	64.400.000	4	76.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Semarang III	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.226.030.000		1.226.030.000		1.198.806.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	Laporan	4	1.226.030.000	4	1.226.030.000	4	1.198.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				398.580.000		398.580.000		373.896.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	398.580.000	4	398.580.000	4	373.896.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000		32.000.000		16.360.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	32.000.000	4	32.000.000	4	16.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				793.450.000		793.450.000		806.550.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	793.450.000	4	793.450.000	4	806.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.645.000		387.645.000		397.642.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III	Unit	1	387.645.000	1	387.645.000	1	397.642.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.375.000		18.375.000		18.376.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	18.375.000	1	18.375.000	1	18.376.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.050.000		91.050.000		101.046.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	91.050.000	1	91.050.000	1	101.046.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit								OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.000.000		87.000.000		87.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	87.000.000	1	87.000.000	1	87.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				124.820.000		124.820.000		124.820.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	124.820.000	1	124.820.000	1	124.820.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.400.000		48.400.000		48.400.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	48.400.000	1	48.400.000	1	48.400.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	%	95	1.631.446.000	95	1.631.446.000	95	1.640.446.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4		4		4		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					268.238.000		268.238.000		268.238.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta	%	100	268.238.000	100	268.238.000	100	268.238.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.350.000		10.350.000		10.350.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	10.350.000	1	10.350.000	1	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.150.000		1.150.000		1.150.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	1.150.000	1	1.150.000	1	1.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.950.000		12.950.000		12.950.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	12.950.000	1	12.950.000	1	12.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.300.000		6.300.000		6.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	6.300.000	4	6.300.000	4	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				138.890.000		138.890.000		138.890.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket	1	138.890.000	1	138.890.000	1	138.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.565.000		26.565.000		27.765.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	26.565.000	4	26.565.000	4	27.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.833.000		70.833.000		70.833.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	70.833.000	4	70.833.000	4	70.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.200.000		1.200.000				
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.200.000	4	1.200.000			SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.041.725.000		1.041.725.000		1.040.875.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.041.725.000	4	1.041.725.000	4	1.040.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		1.700.000		850.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	1.700.000	4	1.700.000	4	850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				290.000.000		290.000.000		290.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	290.000.000	4	290.000.000	4	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.025.000		750.025.000		750.025.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	Laporan	4	750.025.000	4	750.025.000	4	750.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					278.983.000		278.983.000		288.833.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta	Unit	1	278.983.000	1	278.983.000	1	288.833.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.613.000		13.613.000		13.613.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	13.613.000	1	13.613.000	1	13.613.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.300.000		96.300.000		111.750.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta	Unit	1	96.300.000	1	96.300.000	1	111.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.550.000		52.550.000		52.550.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit	1	52.550.000	1	52.550.000	1	52.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.520.000		47.520.000		41.920.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	47.520.000	1	47.520.000	1	41.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		9.000.000		9.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	Unit	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal	%	95	1.634.824.000	95	1.634.824.000	95	1.659.544.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		42.500.000		42.500.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	42.500.000	4	42.500.000	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		16.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	16.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		16.400.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	16.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.774.000		286.774.000		307.544.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal	%	100	286.774.000	100	286.774.000	100	307.544.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				74.000.000		74.000.000		74.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	74.000.000	1	74.000.000	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		11.900.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	11.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		7.000.000		5.875.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	7.000.000	4	7.000.000	4	5.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				86.742.000		86.742.000		86.742.000		
						Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal	Paket	1	86.742.000	1	86.742.000	1	86.742.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.650.000		17.650.000		25.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal	Laporan	4	17.650.000	4	17.650.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.382.000		78.382.000		96.027.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Laporan	4	78.382.000	4	78.382.000	4	96.027.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kota Tegal	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan UPPD Kota Tegal	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan UPPD Kota Tegal	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.045.600.000		1.045.600.000		1.074.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	Laporan	4	1.045.600.000	4	1.045.600.000	4	1.074.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.600.000		295.600.000		325.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	295.600.000	4	295.600.000	4	325.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				745.000.000		745.000.000		745.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	Laporan	4	745.000.000	4	745.000.000	4	745.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					239.950.000		239.950.000		218.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal	Unit	1	239.950.000	1	239.950.000	1	218.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.250.000		11.250.000		11.100.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal	Unit	1	11.250.000	1	11.250.000	1	11.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.700.000		78.700.000		75.900.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal	Unit	1	78.700.000	1	78.700.000	1	75.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		60.000.000		55.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	1	55.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		55.000.000		51.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	20.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**505.000.000**		**505.000.000**		**637.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka		505.000.000			3.72	637.000.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						505.000.000		505.000.000		637.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	505.000.000	90	505.000.000	90	637.000.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					505.000.000		505.000.000		637.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	505.000.000	100	505.000.000	100	637.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				245.000.000		245.000.000		377.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	245.000.000	4	245.000.000	4	377.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				260.000.000		260.000.000		260.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	260.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
Tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah									**32.644.010.000**		**43.212.548.000**		**45.353.093.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	
						Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah	%	9.54		9.54		12.01		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah								**19.877.336.000**		**21.628.416.000**		**23.237.552.000**		
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	13.09	19.877.336.000	13.09	13	14.73	23.237.552.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	9.5		9.5		8.9		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Semarang	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.000			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	9.5		9.5		8.9		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.850.000		164.950.000		164.950.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	209805150	175.850.000	209805150	164.950.000	208669959	164.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.850.000		164.950.000		164.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	175.850.000	4	164.950.000	4	164.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						19.877.336.000		21.628.416.000		23.237.552.000		
						Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					800.000.000		800.000.000		800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB	Laporan	37	290.000.000	37	290.000.000	37	290.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0012			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				290.000.000		290.000.000		290.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	37	290.000.000	37	290.000.000	37	290.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain	Laporan	37	250.000.000	37	250.000.000	37	250.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				250.000.000		250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah	Laporan	37	250.000.000	37	250.000.000	37	250.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya	Laporan	37	260.000.000	37	260.000.000	37	260.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				260.000.000		260.000.000		260.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	37	260.000.000	37	260.000.000	37	260.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	OPD Provinsi
						Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	9.741.439.000	100	10.721.339.000	100	11.668.819.000	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.741.439.000		10.721.339.000		11.668.819.000		
						Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun	Dokumen	4	300.209.000	4	300.209.000	4	300.209.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0009			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				300.209.000		300.209.000		300.209.000		
						Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4	300.209.000	4	300.209.000	4	300.209.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan	Dokumen	1	310.000.000	1	310.000.000	1	485.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				310.000.000		310.000.000		485.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	310.000.000	1	310.000.000	1	485.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	9.131.230.000	4	10.111.130.000	4	10.883.610.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		5.02.04.1.01.0014			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				9.131.230.000		10.111.130.000		10.883.610.000		
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	9.131.230.000	4	10.111.130.000	4	10.883.610.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	21.49	62.515.000	21.49	62.515.000	9.96	42.825.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					62.515.000		62.515.000		42.825.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	56502827	62.515.000	56502827	62.515.000	51140375	42.825.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				62.515.000		62.515.000		42.825.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	62.515.000	4	62.515.000	4	42.825.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	19.52	14.500.000	19.52	14.500.000	14.17	12.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.500.000		14.500.000		12.850.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	129061431	14.500.000	129061431	14.500.000	123282978	12.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14.500.000		14.500.000		12.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	14.500.000	4	14.500.000	4	12.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	15.23	19.800.000	15.23	19.800.000	7.86	19.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.800.000		19.800.000		19.800.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	66010309	19.800.000	66010309	19.800.000	61787243	19.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19.800.000		19.800.000		19.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	19.800.000	4	19.800.000	4	19.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	19.93	4.500.000	19.93	4.500.000	12.22	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		4.500.000		3.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora	Ribu Rupiah	53287860	4.500.000	53287860	4.500.000	49863564	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		4.500.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	4.500.000	4	4.500.000	4	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	19.89	10.850.000	19.89	10.850.000	11.73	12.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.850.000		10.850.000		12.350.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	86027843	10.850.000	86027843	10.850.000	80176714	12.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10.850.000		10.850.000		12.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	10.850.000	4	10.850.000	4	12.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	20.1	8.060.000	20.1	8.060.000	34.4	8.060.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.060.000		8.060.000		8.060.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	122881749	8.060.000	122881749	8.060.000	137520691	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8.060.000		8.060.000		8.060.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	8.060.000	4	8.060.000	4	8.060.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	16.42	20.600.000	16.42	20.600.000	16.63	22.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.600.000		20.600.000		22.200.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	131099982	20.600.000	131099982	20.600.000	131339187	22.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.600.000		20.600.000		22.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	20.600.000	4	20.600.000	4	22.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	20.8	5.625.000	20.8	5.625.000	13.29	5.625.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.625.000		5.625.000		5.625.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	133862327	5.625.000	133862327	5.625.000	125541769	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5.625.000		5.625.000		5.625.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.625.000	4	5.625.000	4	5.625.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	20.87	3.600.000	20.87	3.600.000	17.2	900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		900.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	106514734	3.600.000	106514734	3.600.000	103285740	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	14.71	2.250.000	14.71	2.250.000	7.6	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		2.250.000		2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	11216149	2.250.000	11216149	2.250.000	105222126	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		2.250.000		2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	2.250.000	4	2.250.000	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21.98	1.300.000	21.98	1.300.000	1.22	1.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.300.000		1.300.000		1.300.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	100913477	1.300.000	100913477	1.300.000	83744895	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.300.000		1.300.000		1.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.300.000	4	1.300.000	4	1.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	20.82	47.080.000	20.82	47.080.000	17.84	32.080.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					47.080.000		47.080.000		32.080.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	70996348	47.080.000	70996348	47.080.000	69241805	32.080.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				47.080.000		47.080.000		32.080.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	47.080.000	4	47.080.000	4	32.080.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	18.31	4.050.000	18.31	4.050.000	19.82	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		4.050.000		4.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	98162438	4.050.000	98162438	4.050.000	99419006	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.050.000		4.050.000		4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	4.050.000	4	4.050.000	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	18.99	4.826.000	18.99	4.826.000	8.66	4.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.826.000		4.826.000		4.800.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	127166021	4.826.000	127166021	4.826.000	116120455	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.826.000		4.826.000		4.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	4.826.000	4	4.826.000	4	4.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	18.96	3.150.000	18.96	3.150.000	7.6	3.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.150.000		3.150.000		3.150.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	108150990	3.150.000	108150990	3.150.000	97815959	3.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.150.000		3.150.000		3.150.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	3.150.000	4	3.150.000	4	3.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	19.55	32.500.000	19.55	32.500.000	15.28	28.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.500.000		32.500.000		28.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	91707989	32.500.000	91707989	32.500.000	88435242	28.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				32.500.000		32.500.000		28.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	32.500.000	4	32.500.000	4	28.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	15.79	4.800.000	15.79	4.800.000	11.81	7.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.800.000		4.800.000		7.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	128176158	4.800.000	128176158	4.800.000	123773814	7.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.800.000		4.800.000		7.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	4.800.000	4	4.800.000	4	7.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	19.62	7.650.000	19.62	7.650.000	9.99	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.650.000		7.650.000		4.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	73163777	7.650.000	73163777	7.650.000	67276325	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7.650.000		7.650.000		4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	7.650.000	4	7.650.000	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11.83	2.250.000	11.83	2.250.000	18.9	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		2.250.000		2.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	86837242	2.250.000	86837242	2.250.000	92329613	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		2.250.000		2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	2.250.000	4	2.250.000	4	2.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	28.72	4.050.000	28.72	4.050.000	4.03	4.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		4.050.000		4.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	66103862	4.050.000	66103862	4.050.000	53442594	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.050.000		4.050.000		4.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	4.050.000	4	4.050.000	4	4.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	23.68	14.500.000	23.68	14.500.000	17.3	14.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.500.000		14.500.000		14.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	52021712	14.500.000	52021712	14.500.000	49338356	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14.500.000		14.500.000		14.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten PUrworejo	Dokumen	4	14.500.000	4	14.500.000	4	14.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	18.71	31.000.000	18.71	31.000.000	16.86	31.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					31.000.000		31.000.000		31.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	533687340	31.000.000	533687340	31.000.000	52537819	31.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				31.000.000		31.000.000		31.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	31.000.000	4	31.000.000	4	31.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	23.93	9.750.000	23.93	9.750.000	10.26	9.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.750.000		9.750.000		9.750.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	119287834	9.750.000	119287834	9.750.000	106122729	9.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.750.000		9.750.000		9.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	9.750.000	4	9.750.000	4	9.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	26.51	3.000.000	26.51	3.000.000	0.7	750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		3.000.000		750.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	101649001	3.000.000	101649001	3.000.000	80906926	750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.000.000		3.000.000		750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	3.000.000	4	3.000.000	4	750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	25.8	11.340.000	25.8	11.340.000	8.73	11.340.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.340.000		11.340.000		11.340.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	121506495	11.340.000	121506495	11.340.000	105018639	11.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.340.000		11.340.000		11.340.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	11.340.000	4	11.340.000	4	11.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	14.12	9.225.000	14.12	9.225.000	29.02	9.225.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.225.000		9.225.000		9.225.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	104767005	9.225.000	104767005	9.225.000	118437884	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9.225.000		9.225.000		9.225.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.225.000	4	9.225.000	4	9.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	23.36	1.575.000	23.36	1.575.000	12.14	1.575.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.575.000		1.575.000		1.575.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	47675810	1.575.000	47675810	1.575.000	43339810	1.575.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.575.000		1.575.000		1.575.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	1.575.000	4	1.575.000	4	1.575.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20.9	25.850.000	20.9	25.850.000	18.7	21.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.850.000		25.850.000		21.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	57707065	25.850.000	57707065	25.850.000	56660353	21.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				25.850.000		25.850.000		21.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	25.850.000	4	25.850.000	4	21.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	22.39	1.350.000	22.39	1.350.000	0.38	1.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		1.350.000		1.350.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	52034940	1.350.000	52034940	1.350.000	42678635	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.350.000		1.350.000		1.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	1.350.000	4	1.350.000	4	1.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	16.85	1.500.000	16.85	24.000.000	0.85	600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		24.000.000		600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	20760133	1.500.000	20760133	24.000.000	17916296	600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.500.000		24.000.000		600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	1.500.000	4	24.000.000	4	600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	28.17	4.500.000	28.17	4.500.000	1.1	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	45171795	4.500.000	45171795	4.500.000	35630800	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	23.51	4.500.000	23.51	4.500.000	17.05	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	33464776	4.500.000	33464776	4.500.000	31716322	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	18.18	2.250.000	18.18	32.250.000	31.3	32.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		32.250.000		32.250.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	197889485	2.250.000	197889485	32.250.000	219849958	32.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.250.000		32.250.000		32.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	2.250.000	4	32.250.000	4	32.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	18.66	2.500.000	18.66	2.500.000	13.06	2.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	171455875	2.500.000	171455875	2.500.000	163369926	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2.500.000		2.500.000		2.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	15.09	3.600.000	15.09	3.600.000	4.45	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	154291741	3.600.000	154291741	3.600.000	140020226	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	19.79	20.000.000	19.79	20.000.000	14.49	20.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	130852551	20.000.000	130852551	20.000.000	125068439	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	12.2	11.250.000	12.2	11.250.000	32.33	10.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.250.000		11.250.000		10.050.000		
						Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	34106385	11.250.000	34106385	11.250.000	40223314	10.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11.250.000		11.250.000		10.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	11.250.000	4	11.250.000	4	10.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	45.72	95.350.000	45.72	101.150.000	42.89	97.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					95.350.000		101.150.000		97.750.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	116276950	95.350.000	116276950	101.150.000	114019200	97.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				95.350.000		101.150.000		97.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara	Dokumen	4	95.350.000	4	101.150.000	4	97.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	25.25	144.250.000	25.25	162.300.000	24.04	173.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					144.250.000		162.300.000		173.950.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	272205112	144.250.000	272205112	162.300.000	269560284	173.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				144.250.000		162.300.000		173.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	144.250.000	4	162.300.000	4	173.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	38.33	142.800.000	38.33	131.900.000	38.05	131.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					142.800.000		131.900.000		131.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	114938906	142.800.000	114938906	131.900.000	114700711	131.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				142.800.000		131.900.000		131.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	142.800.000	4	131.900.000	4	131.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	13.4	122.030.000	13.4	129.150.000	14.75	137.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					122.030.000		129.150.000		137.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	104635239	122.030.000	104635239	129.150.000	105877450	137.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				122.030.000		129.150.000		137.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	122.030.000	4	129.150.000	4	137.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	23.05	84.000.000	23.05	85.900.000	24.03	64.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					84.000.000		85.900.000		64.300.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	182016973	84.000.000	182016973	85.900.000	183468099	64.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				84.000.000		85.900.000		64.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	84.000.000	4	85.900.000	4	64.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	44	109.900.000	44	110.500.000	45.7	113.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					109.900.000		110.500.000		113.800.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	185332523	109.900.000	185332523	110.500.000	187515522	113.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				109.900.000		110.500.000		113.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	109.900.000	4	110.500.000	4	113.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	23.27	111.000.000	23.27	119.000.000	23.1	119.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					111.000.000		119.000.000		119.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	262679537	111.000.000	262679537	119.000.000	262318675	119.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				111.000.000		119.000.000		119.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	111.000.000	4	119.000.000	4	119.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	23.16	230.800.000	23.16	226.300.000	22.16	222.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					230.800.000		226.300.000		222.300.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	196403321	230.800.000	196403321	226.300.000	194823414	222.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				230.800.000		226.300.000		222.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	230.800.000	4	226.300.000	4	222.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	22.34	87.320.000	22.34	87.620.000	23.9	91.720.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					87.320.000		87.620.000		91.720.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	183203586	87.320.000	183203586	87.620.000	185542275	91.720.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				87.320.000		87.620.000		91.720.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	87.320.000	4	87.620.000	4	91.720.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	22.63	176.125.000	22.63	155.775.000	23.11	156.225.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					176.125.000		155.775.000		156.225.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	205027570	176.125.000	205027570	155.775.000	205836917	156.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				176.125.000		155.775.000		156.225.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	176.125.000	4	155.775.000	4	156.225.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	30.62	130.100.000	30.62	134.000.000	35.56	122.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					130.100.000		134.000.000		122.450.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	200314126	130.100.000	200314126	134.000.000	207891512	122.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				130.100.000		134.000.000		122.450.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	130.100.000	4	134.000.000	4	122.450.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	25.05	149.750.000	25.05	132.900.000	28.97	132.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					149.750.000		132.900.000		132.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	149348619	149.750.000	149348619	132.900.000	154029856	132.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				149.750.000		132.900.000		132.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	149.750.000	4	132.900.000	4	132.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	32.43	182.535.000	32.43	178.935.000	34.49	178.735.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					182.535.000		178.935.000		178.735.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	167855813	182.535.000	167855813	178.935.000	170472603	178.735.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				182.535.000		178.935.000		178.735.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	182.535.000	4	178.935.000	4	178.735.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	24.85	168.650.000	24.85	180.050.000	27.08	173.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					168.650.000		180.050.000		173.250.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	253334739	168.650.000	253334739	180.050.000	257851177	173.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				168.650.000		180.050.000		173.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	168.650.000	4	180.050.000	4	173.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	12.4	116.950.000	12.4	123.650.000	18.05	116.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					116.950.000		123.650.000		116.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kusus	Ribu Rupiah	194131847	116.950.000	194131847	123.650.000	203890620	116.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				116.950.000		123.650.000		116.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	116.950.000	4	123.650.000	4	116.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	34.47	118.400.000	34.47	129.000.000	41.84	144.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					118.400.000		129.000.000		144.850.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	181757673	118.400.000	181757673	129.000.000	191727520	144.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				118.400.000		129.000.000		144.850.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	118.400.000	4	129.000.000	4	144.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	16.61	114.000.000	16.61	118.650.000	20.83	115.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					114.000.000		118.650.000		115.950.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	246391747	114.000.000	246391747	118.650.000	255317600	115.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				114.000.000		118.650.000		115.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	114.000.000	4	118.650.000	4	115.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	30.76	192.750.000	30.76	212.750.000	29.39	187.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					192.750.000		212.750.000		187.750.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	168929535	192.750.000	168929535	212.750.000	167164052	187.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				192.750.000		212.750.000		187.750.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	192.750.000	4	212.750.000	4	187.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	14.57	148.100.000	14.57	152.400.000	12.93	139.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					148.100.000		152.400.000		139.050.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	119316596	148.100.000	119316596	152.400.000	117613987	139.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				148.100.000		152.400.000		139.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	148.100.000	4	152.400.000	4	139.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	4.96	141.950.000	4.96	122.700.000	10.1	122.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					141.950.000		122.700.000		122.700.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	99185663	141.950.000	99185663	122.700.000	104045831	122.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				141.950.000		122.700.000		122.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	141.950.000	4	122.700.000	4	122.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	11.59	211.700.000	11.59	211.700.000	13.13	168.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					211.700.000		211.700.000		168.700.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	92824390	211.700.000	92824390	211.700.000	94101523	168.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				211.700.000		211.700.000		168.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	211.700.000	4	211.700.000	4	168.700.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	9.5	175.850.000	9.5	164.950.000	8.9	164.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan UPPD Kabupaten Semarang	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	9.5	175.850.000	9.5	164.950.000	8.9	164.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.850.000		164.950.000		164.950.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	209805150	175.850.000	209805150	164.950.000	208669959	164.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.850.000		164.950.000		164.950.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	175.850.000	4	164.950.000	4	164.950.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	19.63	192.640.000	19.63	211.790.000	21.95	200.890.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					192.640.000		211.790.000		200.890.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	197902569	192.640.000	197902569	211.790.000	201743928	200.890.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				192.640.000		211.790.000		200.890.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	192.640.000	4	211.790.000	4	200.890.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	23	118.000.000	23	128.650.000	25.83	117.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					118.000.000		128.650.000		117.250.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	217640859	118.000.000	217640859	128.650.000	222650243	117.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				118.000.000		128.650.000		117.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	118.000.000	4	128.650.000	4	117.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	66.86	92.950.000	66.86	113.550.000	65.74	101.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					92.950.000		113.550.000		101.250.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	195245988	92.950.000	195245988	113.550.000	193928529	101.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				92.950.000		113.550.000		101.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	92.950.000	4	113.550.000	4	101.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	32.03	98.075.000	32.03	103.025.000	37	110.475.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					98.075.000		103.025.000		110.475.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	102205992	98.075.000	102205992	103.025.000	106059532	110.475.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				98.075.000		103.025.000		110.475.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	98.075.000	4	103.025.000	4	110.475.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	11.97	97.900.000	11.97	111.700.000	15.71	95.650.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					97.900.000		111.700.000		95.650.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	137434953	97.900.000	137434953	111.700.000	142036392	95.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				97.900.000		111.700.000		95.650.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	97.900.000	4	111.700.000	4	95.650.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	24.01	142.050.000	24.01	147.550.000	26.59	150.550.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					142.050.000		147.550.000		150.550.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	103637332	142.050.000	103637332	147.550.000	105790015	150.550.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				142.050.000		147.550.000		150.550.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	142.050.000	4	147.550.000	4	150.550.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-53.02	175.900.000	-53.02	170.500.000	-50.13	193.900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					175.900.000		170.500.000		193.900.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	48307208	175.900.000	48307208	170.500.000	51272954	193.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				175.900.000		170.500.000		193.900.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	175.900.000	4	170.500.000	4	193.900.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-25.14	160.969.000	-25.14	145.969.000	-25.87	145.969.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					160.969.000		145.969.000		145.969.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	70618341	160.969.000	70618341	145.969.000	69922578	145.969.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				160.969.000		145.969.000		145.969.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	160.969.000	4	145.969.000	4	145.969.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	2.24	79.050.000	2.24	102.000.000	4.16	95.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					79.050.000		102.000.000		95.000.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	67295135	79.050.000	67295135	102.000.000	68558918	95.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				79.050.000		102.000.000		95.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	79.050.000	4	102.000.000	4	95.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%	24.91	168.650.000	24.91	177.050.000	27.35	177.050.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					168.650.000		177.050.000		177.050.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	353504285	168.650.000	353504285	177.050.000	360398907	177.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				168.650.000		177.050.000		177.050.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	168.650.000	4	177.050.000	4	177.050.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	6.61	255.840.000	6.61	248.350.000	7.11	248.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					255.840.000		248.350.000		248.350.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	296929774	255.840.000	296929774	248.350.000	298320372	248.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				255.840.000		248.350.000		248.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	255.840.000	4	248.350.000	4	248.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	21.98	199.700.000	21.98	203.400.000	23.97	203.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					199.700.000		203.400.000		203.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	266732572	199.700.000	266732572	203.400.000	271089712	203.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				199.700.000		203.400.000		203.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	199.700.000	4	203.400.000	4	203.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	3.8	177.800.000	3.8	176.400.000	4.89	176.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					177.800.000		176.400.000		176.400.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	262535338	177.800.000	262535338	176.400.000	265279349	176.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				177.800.000		176.400.000		176.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	177.800.000	4	176.400.000	4	176.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-25.92	163.594.000	-25.92	149.094.000	-25.1	146.594.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					163.594.000		149.094.000		146.594.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	66440861	163.594.000	66440861	149.094.000	67175707	146.594.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				163.594.000		149.094.000		146.594.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	163.594.000	4	149.094.000	4	146.594.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	41.78	110.200.000	41.78	111.000.000	41.39	135.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					110.200.000		111.000.000		135.250.000		
						Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	125329754	110.200.000	125329754	111.000.000	124981868	135.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				110.200.000		111.000.000		135.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	110.200.000	4	111.000.000	4	135.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	72	3.526.623.000	72	4.161.623.000	72	4.992.995.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.526.623.000		4.161.623.000		4.992.995.000		
						Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB	Dokumen	1	1.141.638.000	1	1.276.638.000	1	1.924.010.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				1.141.638.000		1.276.638.000		1.924.010.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1.141.638.000	1	1.276.638.000	1	1.924.010.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana	Laporan	2	1.140.206.000	2	1.640.206.000	2	1.824.206.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.140.206.000		1.640.206.000		1.824.206.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	1.140.206.000	2	1.640.206.000	2	1.824.206.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB	Laporan	1	1.094.779.000	1	1.094.779.000	1	1.094.779.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.094.779.000		1.094.779.000		1.094.779.000		
						Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak	Dokumen	12	1.094.779.000	12	1.094.779.000	12	1.094.779.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
						Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.0011			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi
	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain								**12.766.674.000**		**21.584.132.000**		**22.115.541.000**		
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-7.67	12.766.674.000	-7.67	-8	-1.19	22.115.541.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						12.766.674.000		21.584.132.000		22.115.541.000		
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	20.31	208.200.000	20.31	515.600.000	16.5	523.745.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					208.200.000		515.600.000		523.745.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	14340	208.200.000	14340	515.600.000	18400	523.745.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				208.200.000		515.600.000		523.745.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	208.200.000	4	515.600.000	4	523.745.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	20.26	301.341.000	20.26	784.041.000	17.5	811.591.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					301.341.000		784.041.000		811.591.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	29260	301.341.000	29260	784.041.000	36850	811.591.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				301.341.000		784.041.000		811.591.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	301.341.000	4	784.041.000	4	811.591.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	20.24	218.140.000	20.24	429.840.000	16.97	405.540.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					218.140.000		429.840.000		405.540.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Unit	14890	218.140.000	14890	429.840.000	18480	405.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				218.140.000		429.840.000		405.540.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	218.140.000	4	429.840.000	4	405.540.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	20.31	337.130.000	20.31	608.630.000	17.11	618.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					337.130.000		608.630.000		618.400.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	Unit	11660	337.130.000	11660	608.630.000	14700	618.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.001			Penagihan Pajak Daerah				337.130.000		608.630.000		618.400.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	337.130.000	4	608.630.000	4	618.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	20.48	274.140.000	20.48	340.740.000	17.13	348.852.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					274.140.000		340.740.000		348.852.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	16900	274.140.000	16900	340.740.000	22210	348.852.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				274.140.000		340.740.000		348.852.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	274.140.000	4	340.740.000	4	348.852.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	20.83	423.744.000	20.83	687.044.000	17.56	698.840.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					423.744.000		687.044.000		698.840.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Unit	28620	423.744.000	28620	687.044.000	36480	698.840.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				423.744.000		687.044.000		698.840.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	423.744.000	4	687.044.000	4	698.840.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	20.24	327.639.000	20.24	789.739.000	17.17	762.212.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					327.639.000		789.739.000		762.212.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	29710	327.639.000	29710	789.739.000	37210	762.212.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				327.639.000		789.739.000		762.212.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	327.639.000	4	789.739.000	4	762.212.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	19.8	269.340.000	19.8	719.290.000	17.32	724.380.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					269.340.000		719.290.000		724.380.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Unit	21.68	269.340.000	21.68	719.290.000	28370	724.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				269.340.000		719.290.000		724.380.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	269.340.000	4	719.290.000	4	724.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	19.94	354.005.000	19.94	749.405.000	17.66	749.705.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					354.005.000		749.405.000		749.705.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	21860	354.005.000	21860	749.405.000	28380	749.705.000		
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				354.005.000		749.405.000		749.705.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	354.005.000	4	749.405.000	4	749.705.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	10.98	371.190.000	10.98	558.890.000	16.61	558.440.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					371.190.000		558.890.000		558.440.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Unit	23470	371.190.000	23470	558.890.000	28960	558.440.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				371.190.000		558.890.000		558.440.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	371.190.000	4	558.890.000	4	558.440.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21.21	333.140.000	21.21	500.340.000	17.39	512.340.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					333.140.000		500.340.000		512.340.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	16670	333.140.000	16670	500.340.000	21930	512.340.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				333.140.000		500.340.000		512.340.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	333.140.000	4	500.340.000	4	512.340.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	20.99	322.420.000	20.99	605.020.000	17.45	614.260.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					322.420.000		605.020.000		614.260.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	17830	322.420.000	17830	605.020.000	22510	614.260.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				322.420.000		605.020.000		614.260.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	322.420.000	4	605.020.000	4	614.260.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	20.75	298.650.000	20.75	597.900.000	17.61	606.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					298.650.000		597.900.000		606.700.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Unit	19.86	298.650.000	19.86	597.900.000	25400	606.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				298.650.000		597.900.000		606.700.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	298.650.000	4	597.900.000	4	606.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	20.93	361.760.000	20.93	446.960.000	17.13	453.620.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					361.760.000		446.960.000		453.620.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Unit	24860	361.760.000	24860	446.960.000	32570	453.620.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				361.760.000		446.960.000		453.620.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	361.760.000	4	446.960.000	4	453.620.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	20.31	274.540.000	20.31	453.840.000	17.32	462.698.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					274.540.000		453.840.000		462.698.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Unit	15390	274.540.000	15390	453.840.000	19990	462.698.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				274.540.000		453.840.000		462.698.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	274.540.000	4	453.840.000	4	462.698.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	22.12	315.650.000	22.12	625.050.000	16.93	611.020.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					315.650.000		625.050.000		611.020.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Unit	16410	315.650.000	16410	625.050.000	21190	611.020.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				315.650.000		625.050.000		611.020.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	315.650.000	4	625.050.000	4	611.020.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	19.45	329.460.000	19.45	711.660.000	16.49	727.212.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					329.460.000		711.660.000		727.212.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Unit	19990	329.460.000	19990	711.660.000	26000	727.212.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				329.460.000		711.660.000		727.212.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	329.460.000	4	711.660.000	4	727.212.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	20.16	279.800.000	20.16	346.300.000	18.04	328.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					279.800.000		346.300.000		328.300.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	16580	279.800.000	16580	346.300.000	20850	328.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				279.800.000		346.300.000		328.300.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	279.800.000	4	346.300.000	4	328.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	20.84	381.800.000	20.84	587.700.000	17.18	599.920.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					381.800.000		587.700.000		599.920.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	22960	381.800.000	22960	587.700.000	29570	599.920.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				381.800.000		587.700.000		599.920.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	381.800.000	4	587.700.000	4	599.920.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	20.9	384.860.000	20.9	663.460.000	16.79	675.342.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					384.860.000		663.460.000		675.342.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	15610	384.860.000	15610	663.460.000	20300	675.342.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				384.860.000		663.460.000		675.342.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	384.860.000	4	663.460.000	4	675.342.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	22.01	168.158.000	22.01	475.158.000	17.86	481.158.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					168.158.000		475.158.000		481.158.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	9830	168.158.000	9830	475.158.000	12900	481.158.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				168.158.000		475.158.000		481.158.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	168.158.000	4	475.158.000	4	481.158.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	19.33	217.130.000	19.33	493.030.000	17	493.030.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					217.130.000		493.030.000		493.030.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Unit	9440	217.130.000	9440	493.030.000	12130	493.030.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				217.130.000		493.030.000		493.030.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	217.130.000	4	493.030.000	4	493.030.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	19.97	353.990.000	19.97	448.640.000	16.83	456.745.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					353.990.000		448.640.000		456.745.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Unit	19.38	353.990.000	19.38	448.640.000	24920	456.745.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				353.990.000		448.640.000		456.745.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	353.990.000	4	448.640.000	4	456.745.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	19.89	359.690.000	19.89	531.890.000	18.06	553.122.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					359.690.000		531.890.000		553.122.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Unit	18470	359.690.000	18470	531.890.000	23860	553.122.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				359.690.000		531.890.000		553.122.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	359.690.000	4	531.890.000	4	553.122.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	20.94	204.300.000	20.94	477.000.000	17.53	486.480.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					204.300.000		477.000.000		486.480.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	17660	204.300.000	17660	477.000.000	23020	486.480.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				204.300.000		477.000.000		486.480.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	204.300.000	4	477.000.000	4	486.480.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	20.57	451.663.000	20.57	635.563.000	17.65	645.163.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					451.663.000		635.563.000		645.163.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Unit	26530	451.663.000	26530	635.563.000	33440	645.163.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				451.663.000		635.563.000		645.163.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	451.663.000	4	635.563.000	4	645.163.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	21.35	221.530.000	21.35	367.730.000	17.6	378.570.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					221.530.000		367.730.000		378.570.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	9480	221.530.000	9480	367.730.000	12040	378.570.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				221.530.000		367.730.000		378.570.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	221.530.000	4	367.730.000	4	378.570.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20.4	347.030.000	20.4	380.230.000	17	395.280.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					347.030.000		380.230.000		395.280.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	13820	347.030.000	13820	380.230.000	18000	395.280.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				347.030.000		380.230.000		395.280.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	347.030.000	4	380.230.000	4	395.280.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	20.95	183.450.000	20.95	336.450.000	17.7	342.690.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					183.450.000		336.450.000		342.690.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	9950	183.450.000	9950	336.450.000	12800	342.690.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				183.450.000		336.450.000		342.690.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	183.450.000	4	336.450.000	4	342.690.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	21.76	313.200.000	21.76	289.500.000	17.98	305.642.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					313.200.000		289.500.000		305.642.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Unit	3420	313.200.000	3420	289.500.000	4340	305.642.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				313.200.000		289.500.000		305.642.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	313.200.000	4	289.500.000	4	305.642.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	20.29	122.510.000	20.29	177.620.000	18.02	183.860.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					122.510.000		177.620.000		183.860.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Unit	7270	122.510.000	7270	177.620.000	9200	183.860.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				122.510.000		177.620.000		183.860.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	122.510.000	4	177.620.000	4	183.860.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	-25.36	106.600.000	-25.36	102.400.000	17.44	104.680.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					106.600.000		102.400.000		104.680.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Unit	4.76	106.600.000	4.76	102.400.000	6100	104.680.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				106.600.000		102.400.000		104.680.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	106.600.000	4	102.400.000	4	104.680.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	20.87	277.620.000	20.87	503.120.000	18.26	509.120.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					277.620.000		503.120.000		509.120.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1	Unit	24.31	277.620.000	24.31	503.120.000	29500	509.120.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				277.620.000		503.120.000		509.120.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	277.620.000	4	503.120.000	4	509.120.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	20.09	321.148.000	20.09	436.848.000	17.39	441.840.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					321.148.000		436.848.000		441.840.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Unit	17.99	321.148.000	17.99	436.848.000	23260	441.840.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				321.148.000		436.848.000		441.840.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	321.148.000	4	436.848.000	4	441.840.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	20.2	185.750.000	20.2	311.250.000	17.27	311.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					185.750.000		311.250.000		311.250.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Unit	16.15	185.750.000	16.15	311.250.000	20900	311.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				185.750.000		311.250.000		311.250.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	185.750.000	4	311.250.000	4	311.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	20.21	397.010.000	20.21	558.710.000	18.23	572.710.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					397.010.000		558.710.000		572.710.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Unit	17470	397.010.000	17470	558.710.000	22590	572.710.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				397.010.000		558.710.000		572.710.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	397.010.000	4	558.710.000	4	572.710.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	20.49	164.736.000	20.49	217.336.000	18.07	224.116.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					164.736.000		217.336.000		224.116.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Unit	7430	164.736.000	7430	217.336.000	9310	224.116.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				164.736.000		217.336.000		224.116.000		
						Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	164.736.000	4	217.336.000	4	224.116.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	13.44	6.525.000	13.44	6.525.000	6.85	4.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.525.000		6.525.000		4.200.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	4236000	6.525.000	4236000	6.525.000	3990000	4.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.525.000		6.525.000		4.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	6.525.000	4	6.525.000	4	4.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	13.75	41.500.000	13.75	41.500.000	12.29	17.475.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					41.500.000		41.500.000		17.475.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	937000	41.500.000	937000	41.500.000	925000	17.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				41.500.000		41.500.000		17.475.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	41.500.000	4	41.500.000	4	17.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	13.44	33.750.000	13.44	33.750.000	23.25	37.125.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					33.750.000		33.750.000		37.125.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	428000	33.750.000	428000	33.750.000	465000	37.125.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				33.750.000		33.750.000		37.125.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	33.750.000	4	33.750.000	4	37.125.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	12.4	3.600.000	12.4	3.600.000	31.9	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	98000	3.600.000	98000	3.600.000	115000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	13.03	9.000.000	13.03	9.000.000	34.16	300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.000.000		9.000.000		300.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	198000	9.000.000	198000	9.000.000	235000	300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.000.000		9.000.000		300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	9.000.000	4	9.000.000	4	300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	12.88	1.800.000	12.88	1.800.000	32.04	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	265000	1.800.000	265000	1.800.000	310000	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	1.800.000	4	1.800.000	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	11.83	3.600.000	11.83	3.600.000	3.69	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	4287000	3.600.000	4287000	3.600.000	3975000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	10.78	5.325.000	10.78	5.325.000	21.31	5.325.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.325.000		5.325.000		5.325.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	242000	5.325.000	242000	5.325.000	265000	5.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.325.000		5.325.000		5.325.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	5.325.000	4	5.325.000	4	5.325.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	13.12	3.600.000	13.12	3.600.000	27.45	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		5.400.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	1145000	3.600.000	1145000	3.600.000	1290000	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		5.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	19	1.500.000	19	1.500.000	10.98	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	14000	1.500.000	14000	1.500.000	14000	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9.35	1.725.000	9.35	1.725.000	17.17	1.725.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.725.000		1.725.000		1.725.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	448000	1.725.000	448000	1.725.000	480000	1.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.725.000		1.725.000		1.725.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.725.000	4	1.725.000	4	1.725.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	13.41	4.125.000	13.41	4.125.000	25.16	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.125.000		4.125.000		1.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	888000	4.125.000	888000	4.125.000	980000	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.125.000		4.125.000		1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	4.125.000	4	4.125.000	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	12.95	16.350.000	12.95	16.350.000	30.85	12.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.350.000		16.350.000		12.350.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	82000	16.350.000	82000	16.350.000	95000	12.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				16.350.000		16.350.000		12.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	16.350.000	4	16.350.000	4	12.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	13.42	4.664.000	13.42	4.664.000	11.44	6.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.664.000		4.664.000		6.150.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	631000	4.664.000	631000	4.664.000	620000	6.150.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.664.000		4.664.000		6.150.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	4.664.000	4	4.664.000	4	6.150.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	7.24	3.600.000	7.24	3.600.000	-36.92	600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	8500	3.600.000	8500	3.600.000	5000	600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	13.59	8.550.000	13.59	8.550.000	30.31	6.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.550.000		8.550.000		6.300.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	863000	8.550.000	863000	8.550.000	990000	6.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				8.550.000		8.550.000		6.300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	8.550.000	4	8.550.000	4	6.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	13.58	3.600.000	13.58	3.600.000	13.58	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	95000	3.600.000	95000	3.600.000	95000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	13.51	20.700.000	13.51	20.700.000	14.1	20.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.700.000		20.700.000		20.700.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	388000	20.700.000	388000	20.700.000	390000	20.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				20.700.000		20.700.000		20.700.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	20.700.000	4	20.700.000	4	20.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11.27	2.250.000	11.27	2.250.000	15.18	2.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		2.250.000		2.250.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	256000	2.250.000	256000	2.250.000	265000	2.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.250.000		2.250.000		2.250.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	2.250.000	4	2.250.000	4	2.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	13.77	17.100.000	13.77	17.100.000	23.21	17.110.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.100.000		17.100.000		17.110.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	494000	17.100.000	494000	17.100.000	535000	17.110.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				17.100.000		17.100.000		17.110.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	17.100.000	4	17.100.000	4	17.110.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	12.21	1.800.000	12.21	1.800.000	10.44	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	127000	1.800.000	127000	1.800.000	125000	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	1.800.000	4	1.800.000	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	12.45	10.815.000	12.45	10.815.000	23.69	10.815.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.815.000		10.815.000		10.815.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	100000	10.815.000	100000	10.815.000	110000	10.815.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				10.815.000		10.815.000		10.815.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	10.815.000	4	10.815.000	4	10.815.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	13.7	7.200.000	13.7	7.200.000	19.61	7.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	1616000	7.200.000	1616000	7.200.000	1700000	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.200.000		7.200.000		7.200.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	8.21	1.800.000	8.21	1.800.000	-36.35	1.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	8500	1.800.000	8500	1.800.000	5000	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		1.800.000		1.800.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	1.800.000	4	1.800.000	4	1.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	1.76	4.500.000	1.76	4.500.000	-7.17	4.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	285000	4.500.000	285000	4.500.000	260000	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.500.000		4.500.000		4.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	13.27	5.025.000	13.27	5.025.000	27.22	2.025.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.025.000		5.025.000		2.025.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	414000	5.025.000	414000	5.025.000	465000	2.025.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.025.000		5.025.000		2.025.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	5.025.000	4	5.025.000	4	2.025.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	13.59	12.450.000	13.59	12.450.000	30.52	9.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.450.000		12.450.000		9.450.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	322000	12.450.000	322000	12.450.000	370000	9.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				12.450.000		12.450.000		9.450.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	12.450.000	4	12.450.000	4	9.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	%	12.75	4.200.000	12.75	4.200.000	45.71	2.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.200.000		4.200.000		2.100.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	366000	4.200.000	366000	4.200.000	473000	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.200.000		4.200.000		2.100.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	4.200.000	4	4.200.000	4	2.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13.38	25.000.000	13.38	25.000.000	21.41	18.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.000.000		25.000.000		18.000.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	663000	25.000.000	663000	25.000.000	710000	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				25.000.000		25.000.000		18.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	25.000.000	4	25.000.000	4	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	9.11	9.166.000	9.11	9.166.000	9.11	9.166.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.166.000		9.166.000		9.166.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	120000	9.166.000	120000	9.166.000	120000	9.166.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.166.000		9.166.000		9.166.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	9.166.000	4	9.166.000	4	9.166.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	6.69	3.600.000	6.69	3.600.000	4.64	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	52000	3.600.000	52000	3.600.000	51000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	12.53	1.500.000	12.53	1.500.000	13.4	1.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	645000	1.500.000	645000	1.500.000	650000	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	12.2	3.600.000	12.2	3.600.000	36.13	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	408000	3.600.000	408000	3.600.000	495000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		3.600.000		3.600.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	3.600.000	4	3.600.000	4	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	%	6.58	300.000	6.58	300.000	10.6	300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					300.000		300.000		300.000		
						Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	53000	300.000	53000	300.000	55000	300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				300.000		300.000		300.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	300.000	4	300.000	4	300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	-7.67	1.498.000.000	-7.67	1.498.000.000	-1.19	1.658.500.000	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.498.000.000		1.498.000.000		1.658.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah	Dokumen	4	550.000.000	4	550.000.000	4	610.500.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				550.000.000		550.000.000		610.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	550.000.000	4	550.000.000	4	610.500.000	SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana	Laporan	4	468.000.000	4	468.000.000	4	468.000.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				468.000.000		468.000.000		468.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	468.000.000	4	468.000.000	4	468.000.000	SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain	Laporan	4	480.000.000	4	480.000.000	4	580.000.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	
		5.02.04.1.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				480.000.000		480.000.000		580.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	480.000.000	4	480.000.000	4	580.000.000	SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-25.11	3.300.000	-25.11	24.327.000	6.97	28.884.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.300.000		24.327.000		28.884.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	61558	3.300.000	61558	24.327.000	87928	28.884.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.300.000		24.327.000		28.884.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	4	3.300.000	4	24.327.000	4	28.884.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	-25.89	4.650.000	-25.89	44.236.000	4.69	63.693.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.650.000		44.236.000		63.693.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	158620	4.650.000	158620	44.236.000	224072	63.693.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.650.000		44.236.000		63.693.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	4.650.000	4	44.236.000	4	63.693.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	-23.43	33.750.000	-23.43	52.782.000	9.37	63.930.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					33.750.000		52.782.000		63.930.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	51779	33.750.000	51779	52.782.000	73960	63.930.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				33.750.000		52.782.000		63.930.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	4	33.750.000	4	52.782.000	4	63.930.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	-18.49	6.750.000	-18.49	27.450.000	16.43	32.270.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.750.000		27.450.000		32.270.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	83368	6.750.000	83368	27.450.000	119083	32.270.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.750.000		27.450.000		32.270.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	4	6.750.000	4	27.450.000	4	32.270.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	-25.7	2.000.000	-25.7	30.200.000	6.13	30.311.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.000.000		30.200.000		30.311.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	72200	2.000.000	72200	30.200.000	103130	30.311.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.000.000		30.200.000		30.311.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	4	2.000.000	4	30.200.000	4	30.311.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	-22.26	3.000.000	-22.26	41.619.000	8.61	72.147.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		41.619.000		72.147.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	95532	3.000.000	95532	41.619.000	133458	72.147.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.000.000		41.619.000		72.147.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	4	3.000.000	4	41.619.000	4	72.147.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	-13.57	3.600.000	-13.57	46.440.000	23.45	47.401.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		46.440.000		47.401.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	106928	3.600.000	106928	46.440.000	152735	47.401.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		46.440.000		47.401.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	4	3.600.000	4	46.440.000	4	47.401.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	-24.27	2.175.000	-24.27	22.955.000	8.17	25.355.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.175.000		22.955.000		25.355.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	63966	2.175.000	63966	22.955.000	91369	25.355.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.175.000		22.955.000		25.355.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	4	2.175.000	4	22.955.000	4	25.355.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	-20.94	3.600.000	-20.94	45.432.000	12.93	52.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		45.432.000		52.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	112969	3.600.000	112969	45.432.000	161364	52.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		45.432.000		52.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	4	3.600.000	4	45.432.000	4	52.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-22.19	1.500.000	-22.19	52.405.000	-38.28	27.657.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		52.405.000		27.657.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	191065	1.500.000	191065	52.405.000	151559	27.657.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		52.405.000		27.657.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	4	1.500.000	4	52.405.000	4	27.657.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-16.8	1.500.000	-16.8	24.381.000	18.84	27.213.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		24.381.000		27.213.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	64288	1.500.000	64288	24.381.000	91827	27.213.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		24.381.000		27.213.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	4	1.500.000	4	24.381.000	4	27.213.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	-18.63	1.800.000	-18.63	37.800.000	16.23	53.118.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		37.800.000		53.118.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	90430	1.800.000	90430	37.800.000	129169	53.118.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		37.800.000		53.118.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	4	1.800.000	4	37.800.000	4	53.118.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	-25.77	4.050.000	-25.77	24.222.000	4.75	34.979.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.050.000		24.222.000		34.979.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	57952	4.050.000	57952	24.222.000	81779	34.979.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.050.000		24.222.000		34.979.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	4	4.050.000	4	24.222.000	4	34.979.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	-24.67	2.100.000	-24.67	51.540.000	7.6	51.055.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.100.000		51.540.000		51.055.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	124288	2.100.000	124288	51.540.000	177532	51.055.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.100.000		51.540.000		51.055.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	4	2.100.000	4	51.540.000	4	51.055.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	-21.23	6.060.000	-21.23	33.180.000	12.52	35.417.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.060.000		33.180.000		35.417.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	86951	6.060.000	86951	33.180.000	124200	35.417.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				6.060.000		33.180.000		35.417.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	4	6.060.000	4	33.180.000	4	35.417.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	-25.13	1.800.000	-25.13	43.050.000	6.19	64.589.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		43.050.000		64.589.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	148336	1.800.000	148336	43.050.000	210382	64.589.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.800.000		43.050.000		64.589.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	4	1.800.000	4	43.050.000	4	64.589.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	-18.76	5.400.000	-18.76	30.594.000	16.04	32.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		30.594.000		32.400.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	89338	5.400.000	89338	30.594.000	127609	32.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				5.400.000		30.594.000		32.400.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	4	5.400.000	4	30.594.000	4	32.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-20.86	17.850.000	-20.86	38.902.000	13.78	36.211.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.850.000		38.902.000		36.211.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	53951	17.850.000	53951	38.902.000	77563	36.211.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				17.850.000		38.902.000		36.211.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	4	17.850.000	4	38.902.000	4	36.211.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	-17.02	1.500.000	-17.02	30.603.000	9.48	35.570.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		30.603.000		35.570.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	91716	1.500.000	91716	30.603.000	121007	35.570.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		30.603.000		35.570.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	4	1.500.000	4	30.603.000	4	35.570.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	-15.51	2.100.000	-15.51	26.584.000	6.97	30.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.100.000		26.584.000		30.100.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	61558	2.100.000	61558	26.584.000	89068	30.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				2.100.000		26.584.000		30.100.000		
						Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	4	2.100.000	4	26.584.000	4	30.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	-12.81	7.200.000	-12.81	27.444.000	24.54	46.541.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.200.000		27.444.000		46.541.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	58332	7.200.000	58332	27.444.000	83320	46.541.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				7.200.000		27.444.000		46.541.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	4	7.200.000	4	27.444.000	4	46.541.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	-15.14	4.350.000	-15.14	26.850.000	21.22	27.921.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.350.000		26.850.000		27.921.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	65971	4.350.000	65971	26.850.000	94233	27.921.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.350.000		26.850.000		27.921.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	4	4.350.000	4	26.850.000	4	27.921.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	-20.16	750.000	-20.16	33.598.000	14.05	38.385.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					750.000		33.598.000		38.385.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	111885	750.000	111885	33.598.000	159815	38.385.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				750.000		33.598.000		38.385.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	4	750.000	4	33.598.000	4	38.385.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	-25.1	1.500.000	-25.1	23.835.000	6.99	24.348.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		23.835.000		24.348.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	50463	1.500.000	50463	23.835.000	72080	24.348.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.500.000		23.835.000		24.348.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	4	1.500.000	4	23.835.000	4	24.348.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-25.99	4.500.000	-25.99	37.444.000	5.72	37.444.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		37.444.000		37.444.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	79354	4.500.000	79354	37.444.000	113348	37.444.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.500.000		37.444.000		37.444.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	4	4.500.000	4	37.444.000	4	37.444.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	-25.7	9.300.000	-25.7	31.897.000	6.13	42.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.300.000		31.897.000		42.350.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	60204	9.300.000	60204	31.897.000	85995	42.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				9.300.000		31.897.000		42.350.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	4	9.300.000	4	31.897.000	4	42.350.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	-20.87	1.155.000	-20.87	21.263.000	13.03	31.685.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.155.000		21.263.000		31.685.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	62278	1.155.000	62278	21.263.000	88957	31.685.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.155.000		21.263.000		31.685.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	4	1.155.000	4	21.263.000	4	31.685.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-20.99	1.200.000	-20.99	28.337.000	13.22	41.157.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.200.000		28.337.000		41.157.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	109465	1.200.000	109465	28.337.000	156859	41.157.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.200.000		28.337.000		41.157.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	4	1.200.000	4	28.337.000	4	41.157.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-24.77	11.500.000	-24.77	33.359.000	0.74	32.111.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.500.000		33.359.000		32.111.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	78128	11.500.000	78128	33.359.000	104617	32.111.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				11.500.000		33.359.000		32.111.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	4	11.500.000	4	33.359.000	4	32.111.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	-13.62	1.350.000	-13.62	14.306.000	21.75	17.473.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		14.306.000		17.473.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	53019	1.350.000	53019	14.306.000	74732	17.473.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.350.000		14.306.000		17.473.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang	Dokumen	4	1.350.000	4	14.306.000	4	17.473.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	-16.7	39.000.000	-16.7	25.068.000	18.98	17.068.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					39.000.000		25.068.000		17.068.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	51552	39.000.000	51552	25.068.000	73637	17.068.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				39.000.000		25.068.000		17.068.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	4	39.000.000	4	25.068.000	4	17.068.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	20.52	3.600.000	20.52	25.253.000	5.18	25.253.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		25.253.000		25.253.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	51912	3.600.000	51912	25.253.000	73150	25.253.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		25.253.000		25.253.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	4	3.600.000	4	25.253.000	4	25.253.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	-21.85	3.600.000	-21.85	86.337.000	10.07	118.430.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		86.337.000		118.430.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1	Ribu Rupiah	252349	3.600.000	252349	86.337.000	355453	118.430.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				3.600.000		86.337.000		118.430.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	4	3.600.000	4	86.337.000	4	118.430.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	-17.94	4.650.000	-17.94	50.308.000	16.23	52.816.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.650.000		50.308.000		52.816.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	168076	4.650.000	168076	50.308.000	238079	52.816.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.650.000		50.308.000		52.816.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	4	4.650.000	4	50.308.000	4	52.816.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	-17.96	1.200.000	-17.96	66.611.000	16.04	66.611.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.200.000		66.611.000		66.611.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	214290	1.200.000	214290	66.611.000	303090	66.611.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				1.200.000		66.611.000		66.611.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	4	1.200.000	4	66.611.000	4	66.611.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	-22.24	14.550.000	-22.24	64.109.000	11.07	64.109.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.550.000		64.109.000		64.109.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	135689	14.550.000	135689	64.109.000	193818	64.109.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				14.550.000		64.109.000		64.109.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	4	14.550.000	4	64.109.000	4	64.109.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi
						Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	19.25	4.500.000	19.25	13.667.000	73.21	22.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
		5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		13.667.000		22.000.000		
						Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	207242	4.500.000	207242	13.667.000	301023	22.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				4.500.000		13.667.000		22.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal	Dokumen	4	4.500.000	4	13.667.000	4	22.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
JUMLAH									**286.879.616.000**		**302.656.854.000**		**295.200.697.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**43.102.872.000**		**43.276.532.000**		**40.971.186.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	76		76		76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**42.802.877.000**		**42.976.537.000**		**40.778.223.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	42.802.877.000	81	81	81	40.778.223.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						42.802.877.000		42.976.537.000		40.778.223.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	4.950.591.000	100	4.950.591.000	100	8.481.391.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					700.000.000		700.000.000		700.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	35000	400.000.000	35000	400.000.000	35000	400.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.950.000		49.950.000		49.950.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	49.950.000	1	49.950.000	1	49.950.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.050.000		150.050.000		150.050.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	150.050.000	1	150.050.000	1	150.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.231.949.000		2.231.949.000		3.131.949.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.231.949.000	1	2.231.949.000	1	3.131.949.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		1.200.000		1.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.066.000		189.066.000		1.089.066.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	189.066.000	1	189.066.000	1	1.089.066.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.041.683.000		2.041.683.000		2.041.683.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.041.683.000	1	2.041.683.000	1	2.041.683.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.018.642.000		2.018.642.000		4.649.442.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	730	2.018.642.000	730	2.018.642.000	730	4.649.442.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.000.000		130.000.000		130.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	130.000.000	15	130.000.000	15	130.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.000			Pemeliharaan Mebel				70.000.000		70.000.000		70.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	350	70.000.000	350	70.000.000	350	70.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				630.442.000		630.442.000		1.026.242.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	350	630.442.000	350	630.442.000	350	1.026.242.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.188.200.000		1.188.200.000		3.423.200.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.188.200.000	15	1.188.200.000	15	3.423.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	37.852.286.000	100	38.025.946.000	100	32.296.832.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.618.710.000		32.618.710.000		25.909.596.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	32.618.710.000	1	32.618.710.000	1	25.909.596.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.407.029.000		29.407.029.000		22.667.915.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	320	29.407.029.000	320	29.407.029.000	320	22.667.915.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.082.601.000		3.082.601.000		3.082.601.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	3.082.601.000	1	3.082.601.000	1	3.082.601.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				40.000.000		40.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				89.080.000		89.080.000		119.080.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	89.080.000	4	89.080.000	4	119.080.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							73.660.000		123.660.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		100	73.660.000	100	123.660.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						73.660.000		73.660.000		
						Jumlah paket pakaiaan dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket			127	73.660.000	127	73.660.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								50.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0		0		0	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.560.000.000		1.560.000.000		1.810.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.810.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000.000		500.000.000		350.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	500.000.000	6	500.000.000	6	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		75.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	100.000.000	3	100.000.000	3	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		200.000.000		299.995.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	299.995.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				510.000.000		510.000.000		785.005.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	510.000.000	1	510.000.000	1	785.005.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									316.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	521		521		521	316.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								316.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0	316.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.161.220.000		2.161.220.000		2.583.320.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.161.220.000	4	2.161.220.000	4	2.583.320.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				394.400.000		394.400.000		794.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	394.400.000	1	394.400.000	1	794.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				101.000.000		101.000.000		109.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	101.000.000	1	101.000.000	1	109.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.655.820.000		1.655.820.000		1.669.820.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.655.820.000	1	1.655.820.000	1	1.669.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.512.356.000		1.612.356.000		1.554.256.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	326	1.512.356.000	326	1.612.356.000	326	1.554.256.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				517.356.000		517.356.000		1.017.356.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	66	517.356.000	66	517.356.000	66	1.017.356.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.000.000		108.000.000		258.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	108.000.000	200	108.000.000	200	258.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				887.000.000		987.000.000		278.900.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	887.000.000	10	987.000.000	10	278.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**299.995.000**		**299.995.000**		**192.963.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.6	299.995.000	2.6	3	2.6	192.963.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						299.995.000		299.995.000		192.963.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	299.995.000	100	299.995.000	100	192.963.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					299.995.000		299.995.000		192.963.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	299.995.000	100	299.995.000	100	192.963.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				149.200.000		149.200.000		92.378.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	149.200.000	8	149.200.000	8	92.378.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.795.000		150.795.000		100.585.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	150.795.000	1	150.795.000	1	100.585.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah									**10.146.505.350.000**		**10.002.087.074.000**		**10.226.462.956.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97.75		97.75		97.75		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan								**10.146.505.350.000**		**10.002.087.074.000**		**10.226.462.956.000**		
						Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	10.139.779.949.000	100	100	100	10.219.093.578.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						10.139.779.949.000		9.995.361.673.000		10.219.093.578.000		
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	10.129.884.699.000	100	9.980.566.423.000	100	10.204.080.196.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					10.129.884.699.000		9.980.566.423.000		10.204.080.196.000		
						Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Dokumen	1	10.129.884.699.000	1	9.980.566.423.000	1	10.204.080.196.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.999.250.131.000		3.048.072.612.000		3.047.747.612.000		
						Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	1	2.999.250.131.000	1	3.048.072.612.000	1	3.047.747.612.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				25.000.000.000		25.158.773.000		25.158.773.000		
						Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1	25.000.000.000	1	25.158.773.000	1	25.158.773.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				7.105.634.568.000		6.907.335.038.000		7.131.173.811.000		
						Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	Dokumen	1	7.105.634.568.000	1	6.907.335.038.000	1	7.131.173.811.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	710.450.000	100	5.710.450.000	100	5.928.582.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					710.450.000		5.710.450.000		5.928.582.000		
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	105	710.450.000	105	5.710.450.000	105	5.928.582.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		5.02.02.1.02.0002			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				102.000.000		102.000.000		226.668.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	102.000.000	35	102.000.000	35	226.668.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0003			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		218.900.000		180.430.000		
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	35	218.900.000	35	180.430.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran				218.900.000		218.900.000		158.740.000		

					Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
						Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	35	218.900.000	35	158.740.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0005			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				59.050.000		5.059.050.000		5.195.564.000		
						Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	59.050.000	1	5.059.050.000	1	5.195.564.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.0012			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				111.600.000		111.600.000		167.180.000		
						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	111.600.000	1	111.600.000	1	167.180.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	9.184.800.000	100	9.084.800.000	100	9.084.800.000	Bidang Anggaran	
		5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					9.184.800.000		9.084.800.000		9.084.800.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	4.884.670.000	8	4.784.670.000	8	4.784.670.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4.724.670.000		4.624.670.000		4.624.670.000		
						Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Dokumen	2	4.724.670.000	2	4.624.670.000	2	4.624.670.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dokumen	8	2.787.389.000	8	2.787.389.000	8	2.787.389.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	160.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2.627.389.000		2.627.389.000		2.627.389.000		
						Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Dokumen	2	2.627.389.000	2	2.627.389.000	2	2.627.389.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	Dokumen	35	1.512.741.000	35	1.512.741.000	35	1.512.741.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1.512.741.000		1.512.741.000		1.512.741.000		
						Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	35	1.512.741.000	35	1.512.741.000	35	1.512.741.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	3.925.303.000	100	100	100	4.379.280.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						3.925.303.000		3.925.303.000		4.379.280.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	3.925.303.000	100	3.925.303.000	100	4.379.280.000	Bidang Akuntansi	
		5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					3.925.303.000		3.925.303.000		4.379.280.000		
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Dokumen	1	983.373.000	1	983.373.000	1	1.385.676.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				400.000.000		400.000.000		418.927.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Laporan	1	400.000.000	1	400.000.000	1	418.927.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				583.373.000		583.373.000		966.749.000		
						Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	583.373.000	41	583.373.000	41	966.749.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Dokumen	1	568.350.000	1	568.350.000	1	670.624.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				348.350.000		348.350.000		450.624.000		
						Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	348.350.000	1	348.350.000	1	450.624.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Dokumen	1	2.373.580.000	1	2.373.580.000	1	2.322.980.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				573.580.000		573.580.000		573.580.000		
						Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	573.580.000	1	573.580.000	1	573.580.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.800.000.000		1.800.000.000		1.749.400.000		
						Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.749.400.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi APBD	%	93.25	2.800.098.000	93.25	93	93.25	2.990.098.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						2.800.098.000		2.800.098.000		2.990.098.000		
						Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	2.800.098.000	100	2.800.098.000	100	2.990.098.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.270.792.000		2.270.792.000		2.390.792.000		
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	2	747.310.000	2	747.310.000	2	747.310.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.03.0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				747.310.000		747.310.000		747.310.000		
						Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	43	747.310.000	43	747.310.000	43	747.310.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0010			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										
						Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0		0		0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	Dokumen	1	763.271.000	1	763.271.000	1	883.271.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				763.271.000		763.271.000		883.271.000		
						Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	763.271.000	4	763.271.000	4	883.271.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0011			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
						Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0		0		0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Dokumen	1	760.211.000	1	760.211.000	1	760.211.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.03.0001			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
						Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				760.211.000		760.211.000		760.211.000		
						Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	49	760.211.000	49	760.211.000	49	760.211.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					529.306.000		529.306.000		599.306.000		
						Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Dokumen	2	529.306.000	2	529.306.000	2	599.306.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				529.306.000		529.306.000		599.306.000		
						Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	529.306.000	1	529.306.000	1	599.306.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06.0003			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi										
						Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0		0		0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah									**6.114.433.000**		**6.114.433.000**		**6.314.433.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	84.02		84.02		84.02		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan								**6.114.433.000**		**6.114.433.000**		**6.314.433.000**		
						Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	6.114.433.000	100	100	100	6.314.433.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						6.114.433.000		6.114.433.000		6.314.433.000		
						Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	1.854.994.000	100	1.854.994.000	100	2.054.994.000	Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.854.994.000		1.854.994.000		2.054.994.000		
						Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Angka	70.76	1.704.994.000	70.76	1.704.994.000	70.76	1.904.994.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah				1.704.994.000		1.704.994.000		1.904.994.000		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1.704.994.000	1	1.704.994.000	1	1.904.994.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0009			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	41	150.000.000	41	150.000.000	41	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
						Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	84.02	1.456.439.000	84.02	1.456.439.000	84.02	1.456.439.000	Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.456.439.000		1.456.439.000		1.456.439.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Dokumen	1	1.456.439.000	1	1.456.439.000	1	1.456.439.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah				567.790.000		567.790.000		567.790.000		
						Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	41	567.790.000	41	567.790.000	41	567.790.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0011			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
						Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	0		0		0		SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				488.649.000		488.649.000		488.649.000		
						Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	84	488.649.000	84	488.649.000	84	488.649.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	%	100	2.803.000.000	100	2.803.000.000	100	2.803.000.000	Bidang Aset Daerah	
		5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.803.000.000		2.803.000.000		2.803.000.000		
						Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	2.803.000.000	100	2.803.000.000	100	2.803.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				724.000.000		724.000.000		724.000.000		
						Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	724.000.000	2	724.000.000	2	724.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0004			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				414.000.000		414.000.000		414.000.000		
						Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	414.000.000	1	414.000.000	1	414.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.03.1.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah				220.000.000		220.000.000		220.000.000		
						Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1.445.000.000		1.445.000.000		1.445.000.000		
						Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	1.445.000.000	3	1.445.000.000	3	1.445.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**10.195.722.655.000**		**10.051.478.039.000**		**10.273.748.575.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**61.923.644.000**		**31.007.164.000**		**31.200.587.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80		80		80		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								**61.523.644.000**		**30.607.164.000**		**30.755.587.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	61.523.644.000	91	91	91	30.755.587.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						61.523.644.000		30.607.164.000		30.755.587.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	91	61.468.644.000	91	30.552.164.000	91	30.700.587.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.504.644.000		25.504.644.000		25.609.769.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	26.504.644.000	12	25.504.644.000	12	25.609.769.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.937.994.000		23.937.994.000		24.344.600.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	24.937.994.000	150	23.937.994.000	150	24.344.600.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.471.650.000		1.471.650.000		1.150.169.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	1.471.650.000	12	1.471.650.000	12	1.150.169.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		60.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	7	50.000.000	7	50.000.000	7	60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		25.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	35.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	12		12		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		147.609.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	147.609.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		150.000.000		147.609.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	147.609.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		30.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		20.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.240.000.000		323.520.000		323.520.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	30.240.000.000	100	323.520.000	100	323.520.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				30.000.000.000		83.520.000		83.520.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	30.000.000.000	2	83.520.000	2	83.520.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.534.000.000		1.534.000.000		1.577.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.534.000.000	100	1.534.000.000	100	1.577.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		150.000.000		160.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	150.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				14.000.000		14.000.000		14.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				180.000.000		180.000.000		215.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		600.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				140.000.000		140.000.000		138.400.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	140.000.000	12	140.000.000	12	138.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					320.000.000		320.000.000		297.659.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	320.000.000	5	320.000.000	5	297.659.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1		1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	4		4		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	3		3		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				150.000.000		150.000.000		143.734.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	143.734.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				170.000.000		170.000.000		153.925.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	6	170.000.000	6	170.000.000	6	153.925.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; ACEH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.730.000.000		1.730.000.000		1.719.630.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.730.000.000	12	1.730.000.000	12	1.719.630.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		720.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	700.000.000	12	700.000.000	12	720.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				900.000.000		900.000.000		869.630.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	900.000.000	12	900.000.000	12	869.630.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					970.000.000		970.000.000		995.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	970.000.000	27	970.000.000	27	995.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	27		27		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				225.000.000		225.000.000		225.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	225.000.000	27	225.000.000	27	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		500.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; ACEH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				220.000.000		220.000.000		245.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	220.000.000	12	220.000.000	12	245.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit							SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	89.5	55.000.000	89.5	55.000.000	89.5	55.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		55.000.000		55.000.000	100	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12		12		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000		55.000.000		55.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**400.000.000**		**400.000.000**		**445.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	400.000.000	3	3	3	445.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						400.000.000		400.000.000		445.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	3	400.000.000	3	400.000.000	3	445.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400.000.000		400.000.000		445.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	445.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				210.000.000		210.000.000		235.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	18	210.000.000	18	210.000.000	18	235.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				190.000.000		190.000.000		210.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	23	190.000.000	23	190.000.000	23	210.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN									**13.243.893.000**		**13.243.893.000**		**13.400.374.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Indeks Sistem Merit	Angka	0.86		0.86		0.86		Badan Kepegawaian Daerah	
	Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel								**9.755.000.000**		**9.755.000.000**		**9.740.000.000**		
						Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja	Angka	355.5	9.755.000.000	355.5	356	355.5	9.740.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						9.755.000.000		9.755.000.000		9.740.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	4.010.000.000	100	4.010.000.000	100	4.100.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
		5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN					650.000.000		650.000.000		740.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	%	100	650.000.000	100	650.000.000	100	740.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Promosi ASN				650.000.000		650.000.000		740.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan	Orang	149	650.000.000	149	650.000.000	149	740.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN					3.050.000.000		3.050.000.000		3.050.000.000		
						Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan	%	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				2.650.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan	Orang	2000	200.000.000	2000	200.000.000	2000	200.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan	Orang	66	2.450.000.000	66	2.450.000.000	66	2.450.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0013			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				350.000.000		350.000.000		350.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	1000	25.000.000	1000	25.000.000	1000	25.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan	Dokumen	1800	325.000.000	1800	325.000.000	1800	325.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					310.000.000		310.000.000		310.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				310.000.000		310.000.000		310.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya	Orang	40000	310.000.000	40000	310.000.000	40000	310.000.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	140.000.000	100	140.000.000	100	175.000.000	Bidang Mutasi	
		5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN					140.000.000		140.000.000		175.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%		140.000.000		140.000.000	100	175.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.02.0001			Pengelolaan Mutasi ASN				140.000.000		140.000.000		175.000.000		
						Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi	Dokumen	350	140.000.000	350	140.000.000	350	175.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	5.605.000.000	100	5.605.000.000	100	5.465.000.000	Bidang Mutasi	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					5.605.000.000		5.605.000.000		5.465.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	5.605.000.000	100	5.605.000.000	100	5.465.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
		5.03.02.1.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				130.000.000		130.000.000		130.000.000		
						Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan	Dokumen	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5.475.000.000		5.475.000.000		5.335.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah	Orang	400	2.075.000.000	400	2.075.000.000	400	2.075.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Kegiatan	1	3.400.000.000	1	3.400.000.000	1	3.260.000.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi								**3.488.893.000**		**3.488.893.000**		**3.660.374.000**		
						Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi	Angka	75.5	3.488.893.000	75.5	76	75.5	3.660.374.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.488.893.000		3.488.893.000		3.660.374.000		
						Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	315.000.000	100	315.000.000	100	355.000.000	Bidang Mutasi	
		5.03.02.1.02		Mutasi dan Promosi ASN					315.000.000		315.000.000		355.000.000		
						Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	%		315.000.000		315.000.000	100	355.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				315.000.000		315.000.000		355.000.000		
						Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1000	315.000.000	1000	315.000.000	1000	355.000.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	677.893.000	100	677.893.000	100	677.893.000	Bidang Informasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					677.893.000		677.893.000		677.893.000		
						Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	30	677.893.000	30	677.893.000	30	677.893.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				400.000.000		400.000.000		400.000.000		
						Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	%	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian				277.893.000		277.893.000		277.893.000		
						Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola	Dokumen	150000	224.023.000	50000	224.023.000	50000	224.023.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola	Dokumen	16900	53.870.000	16900	53.870.000	16900	53.870.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	1.001.000.000	100	1.001.000.000	100	1.001.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN					1.001.000.000		1.001.000.000		1.001.000.000		
						Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	%		1.001.000.000		1.001.000.000	100	1.001.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				1.001.000.000		1.001.000.000		1.001.000.000		
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	300	591.000.000	300	591.000.000	300	591.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	Orang	400	180.000.000	400	180.000.000	400	180.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya	Orang	15000	230.000.000	15000	230.000.000	15000	230.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	280.000.000	100	280.000.000	100	315.000.000	Bidang Mutasi	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					280.000.000		280.000.000		315.000.000		
						persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	280.000.000	100	280.000.000	100	315.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				280.000.000		280.000.000		315.000.000		
						Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	2200	280.000.000	2200	280.000.000	2200	315.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	1.215.000.000	100	1.215.000.000	100	1.311.481.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
		5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					310.000.000		310.000.000		327.000.000		
						Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	310.000.000	100	310.000.000	100	327.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				310.000.000		310.000.000		327.000.000		
						Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN	Orang	300	200.000.000	300	200.000.000	300	220.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi	%	100	110.000.000	100	110.000.000	100	107.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					905.000.000		905.000.000		984.481.000		
						Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	%	100	905.000.000	100	905.000.000	100	984.481.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
		5.03.02.1.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				325.000.000		325.000.000		360.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan	Orang	300	325.000.000	300	325.000.000	300	360.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				90.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa	Orang	2000	90.000.000	2000	90.000.000	2000	90.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN				190.000.000		190.000.000		210.000.000		
						Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin	Orang	550	190.000.000	550	190.000.000	550	210.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				300.000.000		300.000.000		324.481.000		
						Persentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	324.481.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**75.167.537.000**		**44.251.057.000**		**44.600.961.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN									**19.589.676.000**		**19.589.676.000**		**20.970.755.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Indeks Kompetensi ASN	Angka	3.07		3.07		3.07		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN								**19.133.320.000**		**19.133.320.000**		**20.514.399.000**		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	8.67	19.133.320.000	8.67	9	8.67	20.514.399.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						19.133.320.000		19.133.320.000		20.514.399.000		
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3.5	327.501.000	3.5	327.501.000	3.5	327.501.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					29.726.000		29.726.000		29.726.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	29.726.000	3	29.726.000	3	29.726.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			4.844.000		4.844.000		4.844.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	4.844.000	1	4.844.000	1	4.844.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.0004			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			24.882.000		24.882.000		24.882.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	18	4.327.000	18	4.327.000	18	4.327.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	15	20.555.000	15	20.555.000	15	20.555.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					297.775.000		297.775.000		297.775.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	297.775.000	3	297.775.000	3	297.775.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				59.550.000		59.550.000		59.550.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	10	59.550.000	10	59.550.000	10	59.550.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			238.225.000		238.225.000		238.225.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	13	41.631.000	13	41.631.000	13	74.131.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	38.739.000	1	38.739.000	1	48.739.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	1	95.307.000	1	95.307.000	1	48.497.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	24	62.548.000	24	62.548.000	24	66.858.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	2.706.079.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.350.000.000		1.350.000.000		2.706.079.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1140	1.350.000.000	1140	1.350.000.000	1140	2.706.079.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.350.000.000		1.350.000.000		2.706.079.000		
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	430	474.584.000	430	474.584.000	4646	1.830.663.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	390	503.159.000	390	503.159.000	447	503.159.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	400	372.257.000	400	372.257.000	400	372.257.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	15.926.520.000	100	15.926.520.000	100	15.951.520.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					15.926.520.000		15.926.520.000		15.951.520.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	2310	15.926.520.000	2310	15.926.520.000	2310	15.951.520.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				15.926.520.000		15.926.520.000		15.951.520.000		
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	60	199.700.000	60	199.700.000	168	224.700.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	200	2.530.248.000	200	2.530.248.000	200	2.501.658.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	230	2.292.580.000	230	2.292.580.000	230	2.282.584.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120	2.104.945.000	120	2.104.945.000	120	2.162.331.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	1745	8.799.047.000	1745	8.799.047.000	1745	8.780.247.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	1.265.000.000	100	1.265.000.000	100	1.265.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					1.265.000.000		1.265.000.000		1.265.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	2910	1.265.000.000	2910	1.265.000.000	2910	1.265.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	
		5.04.02.1.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1.265.000.000		1.265.000.000		1.265.000.000		
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	920	429.818.000	920	429.818.000	23120	426.518.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	850	423.000.000	850	423.000.000	7269.9999	418.700.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	1140	412.182.000	1140	412.182.000	20220	419.782.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	85	264.299.000	85	264.299.000	85	264.299.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					189.603.000		189.603.000		164.603.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	189.603.000	3	189.603.000	3	164.603.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.01.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				42.833.000		42.833.000		41.125.000		
						Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi	Dokumen	2	41.333.000	2	41.333.000	2	39.625.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				146.770.000		146.770.000		123.478.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	20	146.770.000	20	146.770.000	20	123.478.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					74.696.000		74.696.000		99.696.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	3	74.696.000	3	74.696.000	3	99.696.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional				70.547.000		70.547.000		95.547.000		
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	20.049.000	2	20.049.000	2	20.049.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	24	48.998.000	24	48.998.000	24	73.998.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				4.149.000		4.149.000		4.149.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	4.149.000	1	4.149.000	1	4.149.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN								**456.356.000**		**456.356.000**		**456.356.000**		
						Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	456.356.000	100	100	100	456.356.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						456.356.000		456.356.000		456.356.000		
						Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	456.356.000	100	456.356.000	100	456.356.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
		5.04.02.1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					456.356.000		456.356.000		456.356.000		
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	456.356.000	2	456.356.000	2	456.356.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	
		5.04.02.1.02.0002			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				37.655.000		37.655.000		34.350.000		
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	1	15.570.000	1	15.570.000	1	13.095.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	2	22.085.000	2	22.085.000	2	21.255.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.04.02.1.02.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				418.701.000		418.701.000		422.006.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	300	418.701.000	300	418.701.000	300	422.006.000	SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH									**47.233.724.000**		**47.318.404.000**		**44.399.114.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	72		72		72		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**46.908.724.000**		**46.993.404.000**		**44.034.114.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	46.908.724.000	80	80	80	44.034.114.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						46.908.724.000		46.993.404.000		44.034.114.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	46.908.724.000	100	46.993.404.000	100	44.034.114.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.253.755.000		32.253.755.000		28.247.425.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	32.253.755.000	6	32.253.755.000	6	28.247.425.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.235.266.000		29.235.266.000		26.676.015.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	29.235.266.000	12	29.235.266.000	12	26.676.015.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.798.479.000		2.798.479.000		1.338.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	2.798.479.000	1	2.798.479.000	1	1.338.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				56.863.000		56.863.000		61.863.000		
						Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	56.863.000	1	56.863.000	1	61.863.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				78.868.000		78.868.000		83.868.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	Laporan	1	78.868.000	1	78.868.000	1	83.868.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				53.194.000		53.194.000		56.194.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	53.194.000	1	53.194.000	1	56.194.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				31.085.000		31.085.000		31.085.000		
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	31.085.000	1	31.085.000	1	31.085.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					234.000.000		234.000.000		234.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	234.000.000	1	234.000.000	1	234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				234.000.000		234.000.000		234.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	234.000.000	2	234.000.000	2	234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					79.990.000		79.990.000		141.990.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	79.990.000	1	79.990.000	1	141.990.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				79.990.000		79.990.000		141.990.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	1	79.990.000	1	79.990.000	1	141.990.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					230.400.000		315.080.000		336.120.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	230.400.000	100	315.080.000	100	336.120.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						84.680.000		84.680.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1		146	84.680.000	1	84.680.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				49.000.000		49.000.000		49.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	10	49.000.000	10	49.000.000	1	49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				181.400.000		181.400.000		202.440.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	181.400.000	30	181.400.000	30	202.440.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.996.289.000		1.996.289.000		2.205.539.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.996.289.000	100	1.996.289.000	100	2.205.539.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				173.093.000		173.093.000		173.093.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	173.093.000	1	173.093.000	1	173.093.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				188.196.000		188.196.000		188.196.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	188.196.000	1	188.196.000	1	188.196.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				374.165.000		374.165.000		384.165.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	374.165.000	1	374.165.000	1	384.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				305.060.000		305.060.000		305.060.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	305.060.000	1	305.060.000	1	305.060.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				76.200.000		76.200.000		76.200.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	76.200.000	1	76.200.000	1	76.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		36.000.000		36.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		100.000.000		135.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.070.000		275.070.000		405.070.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Bulan	12	275.070.000	12	275.070.000	12	405.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.505.000		8.505.000		8.505.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Bulan	12	8.505.000	12	8.505.000	12	8.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				460.000.000		460.000.000		494.250.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	6	460.000.000	6	460.000.000	4	494.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					723.000.000		723.000.000		1.177.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	1	723.000.000	1	723.000.000	1	1.177.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				588.000.000		588.000.000		1.056.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	66	588.000.000	66	588.000.000	14	1.056.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		106.600.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	31	120.000.000	31	120.000.000	14	106.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.647.440.000		9.647.440.000		9.432.170.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.647.440.000	1	9.647.440.000	1	9.432.170.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000		4.800.000		4.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.800.000	12	4.800.000	12	4.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.428.890.000		2.428.890.000		2.529.120.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	2.428.890.000	12	2.428.890.000	12	2.529.120.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.213.750.000		7.213.750.000		6.898.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	7.213.750.000	12	7.213.750.000	12	6.898.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.743.850.000		1.743.850.000		2.259.270.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	1.743.850.000	1	1.743.850.000	1	2.259.270.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.600.000		149.600.000		118.850.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bulan	12	149.600.000	12	149.600.000	12	118.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		30.000.000		23.500.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	23.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.140.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				564.250.000		564.250.000		976.920.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bulan	12	564.250.000	12	564.250.000	12	976.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah								**325.000.000**		**325.000.000**		**365.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	325.000.000	3	3	3	365.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						325.000.000		325.000.000		365.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	325.000.000	100	325.000.000	100	365.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					325.000.000		325.000.000		365.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	325.000.000	100	325.000.000	100	365.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				135.000.000		135.000.000		135.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	135.000.000	10	135.000.000	10	135.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				190.000.000		190.000.000		230.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	190.000.000	21	190.000.000	21	230.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									**66.823.400.000**		**66.908.080.000**		**65.369.869.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung									**17.558.662.000**		**19.969.982.000**		**19.302.684.000**	**Badan Penghubung**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	71.5		71.5		71.5		Badan Penghubung	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**17.483.662.000**		**19.871.934.000**		**19.204.636.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	17.483.662.000	85	85	85	19.204.636.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.483.662.000		19.871.934.000		19.204.636.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	17.483.662.000	100	19.871.934.000	100	19.204.636.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.483.504.000		9.493.504.000		9.107.106.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.483.504.000	12	9.493.504.000	12	9.107.106.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.435.724.000		9.435.724.000		9.049.326.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	55	9.435.724.000	55	9.435.724.000	52	9.049.326.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.780.000		37.780.000		37.780.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	37.780.000	12	37.780.000	12	37.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					191.580.000		251.580.000		251.580.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	191.580.000	1	251.580.000	1	251.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				191.580.000		251.580.000		251.580.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	35	191.580.000	35	251.580.000	35	251.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000		156.096.000		156.096.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	80.000.000	100	156.096.000	100	156.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						31.320.000		31.320.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			0	31.320.000	0	31.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						44.776.000		44.776.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50		50	44.776.000	50	44.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	55	80.000.000	55	80.000.000	55	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; JAWA BARAT
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.572.178.000		1.857.013.000		1.829.173.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.572.178.000	100	1.857.013.000	100	1.829.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		50.941.000		50.941.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	25.000.000	12	50.941.000	12	50.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.860.000		92.500.000		92.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	71.860.000	12	92.500.000	12	92.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				154.372.000		204.372.000		204.272.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	154.372.000	12	204.372.000	12	204.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		21.000.000		22.640.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	21.000.000	12	21.000.000	12	22.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				18.000.000		27.300.000		27.300.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	18.000.000	1	27.300.000	1	27.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				581.946.000		610.900.000		534.920.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	581.946.000	12	610.900.000	12	534.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		850.000.000		896.600.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	700.000.000	12	850.000.000	12	896.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					127.650.000		688.750.000		591.275.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	199	127.650.000	199	688.750.000	199	591.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				127.650.000		688.750.000		591.275.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	36	127.650.000	36	688.750.000	42	591.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.834.600.000		5.164.271.000		4.956.086.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	4.834.600.000	12	5.164.271.000	12	4.956.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.000.000		35.000.000		22.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	24.000.000	12	35.000.000	12	22.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				812.900.000		950.000.000		787.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	812.900.000	12	950.000.000	12	787.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.300.000		168.971.000		136.206.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	89.300.000	12	168.971.000	12	136.206.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.908.400.000		4.010.300.000		4.010.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3.908.400.000	12	4.010.300.000	12	4.010.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.194.150.000		2.260.720.000		2.313.320.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	1.194.150.000	4	2.260.720.000	4	2.313.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				675.000.000		862.900.000		950.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	34	675.000.000	34	862.900.000	34	950.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.150.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	11.150.000	5	35.000.000	5	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				224.000.000		224.000.000		292.500.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16	224.000.000	16	224.000.000	16	292.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		90.000.000		90.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	8	50.000.000	8	90.000.000	8	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				234.000.000		1.048.820.000		945.820.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	234.000.000	4	1.048.820.000	4	945.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung								**75.000.000**		**98.048.000**		**98.048.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	75.000.000	3	3	3	98.048.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						75.000.000		98.048.000		98.048.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	75.000.000	100	98.048.000	100	98.048.000	Badan Penghubung	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000		98.048.000		98.048.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	75.000.000	100	98.048.000	100	98.048.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000		55.938.000		55.938.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	40.000.000	9	55.938.000	9	55.938.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		42.110.000		42.110.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	21	35.000.000	21	42.110.000	23	42.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung									**2.772.186.000**		**2.892.186.000**		**2.962.186.000**	**Badan Penghubung**	
						Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85		85		85		Badan Penghubung	
	Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								**2.772.186.000**		**2.892.186.000**		**2.962.186.000**		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	85	2.772.186.000	85	85	85	2.962.186.000	Badan Penghubung	
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						2.772.186.000		2.892.186.000		2.962.186.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	2.772.186.000	100	2.892.186.000	100	2.962.186.000	Badan Penghubung	
		5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					2.772.186.000		2.892.186.000		2.962.186.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	%	100	485.000.000	100	605.000.000	100	605.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				485.000.000		605.000.000		605.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	235.000.000	35	355.000.000	35	355.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/Kota	35	250.000.000	35	250.000.000	35	250.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	%	100	2.207.186.000	100	2.207.186.000	100	2.277.186.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	
		5.07.02.1.01.0001			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				2.207.186.000		2.207.186.000		2.277.186.000		
						Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi	Laporan	12	175.000.000	12	175.000.000	12	245.000.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung	Orang	3684	2.032.186.000	3684	2.032.186.000	3684	2.032.186.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
						Persentase Terpenuhinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah	%	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	
		5.07.02.1.01.0003			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				80.000.000		80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah	Kegiatan	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
JUMLAH									**20.330.848.000**		**22.862.168.000**		**22.264.870.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**29.717.953.000**		**30.947.553.000**		**30.113.815.000**	**INSPEKTORAT**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	76		76		76		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**29.612.953.000**		**30.842.553.000**		**30.008.815.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83.6	29.612.953.000	83.6	84	83.6	30.008.815.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.612.953.000		30.842.553.000		30.008.815.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	29.612.953.000	100	30.842.553.000	100	30.008.815.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.955.557.000		23.955.557.000		23.228.038.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	23.955.557.000	1	23.955.557.000	1	23.228.038.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.955.557.000		23.955.557.000		23.228.038.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	138	23.955.557.000	138	23.955.557.000	138	23.228.038.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.500.000		200.500.000		200.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	1	200.500.000	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.500.000		200.500.000		200.500.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.500.000	1	200.500.000	1	200.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					618.290.000		696.590.000		667.454.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	618.290.000	100	696.590.000	100	667.454.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						78.300.000		78.300.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		0	78.300.000	0	78.300.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40.000.000		40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				578.290.000		578.290.000		549.154.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	578.290.000	50	578.290.000	50	549.154.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan										
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					533.933.000		586.006.000		628.306.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	533.933.000	100	586.006.000	100	628.306.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				195.000.000		195.000.000		219.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	195.000.000	1	195.000.000	1	219.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				327.033.000		379.106.000		396.606.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	327.033.000	1	379.106.000	1	396.606.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.900.000		6.900.000		7.700.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.900.000	1	6.900.000	1	7.700.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					187.900.000		1.097.900.000		1.097.521.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	187.900.000	3	1.097.900.000	3	1.097.521.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						910.000.000		869.121.000		
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		2	910.000.000	2	869.121.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0003			Pengadaan Alat Besar										
						Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0004			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disedikan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel										
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.900.000		89.900.000		131.500.000		
						umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	89.900.000	2	89.900.000	2	131.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				98.000.000		98.000.000		96.900.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	98.000.000	1	98.000.000	1	96.900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.732.020.000		2.732.020.000		2.600.276.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.732.020.000	4	2.732.020.000	4	2.600.276.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				230.000.000		230.000.000		232.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	230.000.000	1	230.000.000	1	232.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				667.600.000		667.600.000		644.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	667.600.000	1	667.600.000	1	644.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		40.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.200.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.804.420.000		1.804.420.000		1.684.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.804.420.000	1	1.804.420.000	1	1.684.076.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.384.753.000		1.573.980.000		1.586.720.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	70	1.384.753.000	70	1.573.980.000	70	1.586.720.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.800.000		45.065.000		28.560.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	11	39.800.000	11	45.065.000	11	28.560.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				369.038.000		553.000.000		584.505.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	23	369.038.000	23	553.000.000	23	584.505.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
						Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000		120.000.000		122.270.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	120.000.000	10	120.000.000	10	122.270.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				80.000.000		80.000.000		77.100.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	77.100.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				605.915.000		605.915.000		605.915.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	605.915.000	1	605.915.000	1	605.915.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		148.370.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	148.370.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0		0		0		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**105.000.000**		**105.000.000**		**105.000.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	105.000.000	3	3	3	105.000.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		105.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000		45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi									**8.839.949.000**		**9.348.649.000**		**9.413.989.000**	**INSPEKTORAT**	
						Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3		3		3		INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah								**2.766.222.000**		**3.274.922.000**		**3.340.262.000**		
						Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	2.766.222.000	3	3	3	3.340.262.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.766.222.000		3.274.922.000		3.340.262.000		
						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3	%	10.2	1.686.745.000	10.2	2.195.445.000	10.2	2.247.831.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi					1.686.745.000		2.195.445.000		2.247.831.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	4	1.686.745.000	4	2.195.445.000	4	2.247.831.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.0003			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.686.745.000		2.195.445.000		2.247.831.000		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	1.686.745.000	4	2.195.445.000	4	2.247.831.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	10.2	1.079.477.000	10.2	1.079.477.000	20.41	1.092.431.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					198.940.000		198.940.000		122.117.000		
						Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan	1	198.940.000	1	198.940.000	1	122.117.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.0001			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				198.940.000		198.940.000		122.117.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	198.940.000	1	198.940.000	1	122.117.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi					880.537.000		880.537.000		970.314.000		
						Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan	5	880.537.000	5	880.537.000	5	970.314.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.0002			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				880.537.000		880.537.000		970.314.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	49	880.537.000	49	880.537.000	49	970.314.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal								**6.073.727.000**		**6.073.727.000**		**6.073.727.000**		
						Level Kapabilitas APIP	Level	3	6.073.727.000	3	3	3	6.073.727.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						6.073.727.000		6.073.727.000		6.073.727.000		
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	83	579.243.000	83	579.243.000	83	579.243.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					579.243.000		579.243.000		579.243.000		
						Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	Dokumen	2	579.243.000	2	579.243.000	2	579.243.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.0007			Monitoring dan Pemeriksaan BPK PemeriksaanAPIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil				579.243.000		579.243.000		579.243.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	70	579.243.000	70	579.243.000	70	579.243.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	85	1.474.400.000	85	1.474.400.000	85	1.474.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.474.400.000		1.474.400.000		1.474.400.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	1.474.400.000	100	1.474.400.000	100	1.474.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0002			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.126.400.000		1.126.400.000		1.126.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	42	1.126.400.000	42	1.126.400.000	42	1.126.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.000			Reviu Laporan Keuangan				348.000.000		348.000.000		348.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	20	348.000.000	20	348.000.000	20	348.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	85	1.279.300.000	85	1.279.300.000	85	1.279.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.279.300.000		1.279.300.000		1.279.300.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	1.279.300.000	100	1.279.300.000	100	1.279.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.0001			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.02.0002			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1.079.300.000		1.079.300.000		1.079.300.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20	1.079.300.000	20	1.079.300.000	20	1.079.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	85	1.420.914.000	85	1.420.914.000	85	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.420.914.000		1.420.914.000		1.420.914.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	1.420.914.000	100	1.420.914.000	100	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6.01.02.1.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.420.914.000		1.420.914.000		1.420.914.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	1.420.914.000	50	1.420.914.000	50	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	85	1.319.870.000	85	1.319.870.000	85	1.319.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.319.870.000		1.319.870.000		1.319.870.000		
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	1.319.870.000	100	1.319.870.000	100	1.319.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0003			Reviu Laporan Kinerja				484.250.000		484.250.000		484.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	60	484.250.000	60	484.250.000	60	484.250.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.0005			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				835.620.000		835.620.000		835.620.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	835.620.000	30	835.620.000	30	835.620.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**38.557.902.000**		**40.296.202.000**		**39.527.804.000**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik									**1.241.501.156.000**		**821.655.555.000**		**833.299.519.000**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.745		2.745		2.745		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa								**80.045.776.000**		**85.080.775.000**		**85.630.775.000**		
						Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.89	80.045.776.000	2.89	3	2.89	85.630.775.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2.168.341.000		2.168.341.000		2.168.341.000		
						Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3	2.168.341.000	3	2.168.341.000	3	2.168.341.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
		8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.168.341.000		2.168.341.000		2.168.341.000		
						Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	80	73.854.000	80	73.854.000	80	73.854.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				73.854.000		73.854.000		73.854.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	73.854.000	50	73.854.000	50	73.854.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
						Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme	%	80	2.094.487.000	80	2.094.487.000	80	2.094.487.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				2.041.395.000		2.041.395.000		2.041.395.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1050	2.041.395.000	1050	2.041.395.000	1050	2.041.395.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.02.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				53.092.000		53.092.000		53.092.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	53.092.000	4	53.092.000	4	53.092.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						76.846.013.000		81.881.012.000		82.431.012.000		
						Indeks kinerja ormas	Nilai	75.34	76.846.013.000	75.34	81.881.012.000	75.34	82.431.012.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
		8.01.04.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					76.846.013.000		81.881.012.000		82.431.012.000		
						Skor variabel program dan kegiatan ormas	Skor	36.23	75.771.865.000	36.23	80.806.864.000	36.23	81.356.864.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				75.771.865.000		80.806.864.000		81.356.864.000		
						Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	35	75.771.865.000	35	80.806.864.000	35	81.356.864.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Skor variabel sumber daya ormas	Skor	39.11	1.074.148.000	39.11	1.074.148.000	39.11	1.074.148.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.04.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				925.498.000		925.498.000		925.498.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1200	925.498.000	1200	925.498.000	1200	925.498.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		8.01.04.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				148.650.000		148.650.000		148.650.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	320	148.650.000	320	148.650.000	320	148.650.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						1.031.422.000		1.031.422.000		1.031.422.000		
						Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3	910.364.000	3	910.364.000	3	872.812.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
		8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					910.364.000		910.364.000		872.812.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	85	910.364.000	85	910.364.000	85	872.812.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				910.364.000		910.364.000		872.812.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1210	910.364.000	1210	910.364.000	1210	872.812.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Indeks toleransi	%	74.1	121.058.000	74.1	121.058.000	74.1	158.610.000	Bidang Ketahanan Bangsa	
		8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					121.058.000		121.058.000		158.610.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	85	121.058.000	85	121.058.000	85	158.610.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
		8.01.05.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				70.090.000		70.090.000		59.642.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100	70.090.000	100	70.090.000	100	59.642.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> DEMAK
		8.01.05.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50.968.000		50.968.000		98.968.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	50.968.000	12	50.968.000	12	98.968.000	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; JAWA TENGAH --> CILACAP
	Meningkatnya Stabillitas Politik								**1.161.455.380.000**		**736.574.780.000**		**747.668.744.000**		
						Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.6	1.161.455.380.000	2.6	3	2.6	747.668.744.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.022.991.617.000		628.861.017.000		630.239.808.000		
						IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	75	1.022.991.617.000	75	628.861.017.000	75	630.239.808.000	Bidang Politik Dalam Negri	
		8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.022.991.617.000		628.861.017.000		630.239.808.000		
						Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik	%	89	1.616.822.000	89	1.616.822.000	89	1.616.822.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.616.822.000		1.616.822.000		1.616.822.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1680	1.616.822.000	1680	1.616.822.000	1680	1.616.822.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	%	89	1.020.823.144.000	89	626.692.544.000	89	628.071.335.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
		8.01.03.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.020.823.144.000		626.692.544.000		628.071.335.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4	1.020.823.144.000	4	626.692.544.000	4	628.071.335.000	SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK	
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	%	89	551.651.000	89	551.651.000	89	551.651.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			187.620.000		187.620.000		187.620.000		
						Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	4	187.620.000	4	187.620.000	4	187.620.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.03.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			364.031.000		364.031.000		364.031.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	180	364.031.000	180	364.031.000	180	364.031.000	SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						138.463.763.000		107.713.763.000		117.428.936.000		
						Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	73	138.463.763.000	73	107.713.763.000	73	117.428.936.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
		8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					138.463.763.000		107.713.763.000		117.428.936.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	%	72	761.090.000	72	761.090.000	72	761.090.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			761.090.000		761.090.000		761.090.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1000	761.090.000	1000	761.090.000	1000	761.090.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penanganan konflik sosial	%	100	137.702.673.000	100	106.952.673.000	100	116.667.846.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
		8.01.06.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			910.259.000		910.259.000		930.259.000		
						Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Orang	360	910.259.000	360	910.259.000	360	930.259.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

						Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
		8.01.06.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				135.313.614.000		104.563.614.000		114.258.787.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	5	135.313.614.000	5	104.563.614.000	5	114.258.787.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		8.01.06.1.01.0006			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.478.800.000		1.478.800.000		1.478.800.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Laporan	3	1.478.800.000	3	1.478.800.000	3	1.478.800.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									**18.842.748.000**		**18.872.908.000**		**18.551.844.000**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	74		74		74		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**16.093.778.000**		**16.123.938.000**		**15.802.874.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	16.093.778.000	88	88	88	15.802.874.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.093.778.000		16.123.938.000		15.802.874.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	16.093.778.000	100	16.123.938.000	100	15.802.874.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.061.779.000		10.061.779.000		9.737.315.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	10.061.779.000	12	10.061.779.000	12	9.737.315.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.826.659.000		9.826.659.000		9.505.595.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	54	9.826.659.000	54	9.826.659.000	54	9.505.595.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				222.120.000		222.120.000		218.720.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	222.120.000	12	222.120.000	12	218.720.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		80.000.000		78.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	80.000.000	12	80.000.000	12	78.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		80.000.000		78.600.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	4	78.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					320.500.000		350.660.000		343.660.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	320.500.000	100	350.660.000	100	343.660.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						30.160.000		30.160.000		
						Jumlah paket pakain dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			52	30.160.000	52	30.160.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	80	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				230.500.000		230.500.000		223.500.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	280	230.500.000	280	230.500.000	280	223.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.496.806.000		1.496.806.000		1.478.951.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.496.806.000	100	1.496.806.000	100	1.478.951.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		15.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		180.000.000		180.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.650.000		55.650.000		66.395.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	55.650.000	12	55.650.000	12	66.395.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				721.156.000		721.156.000		727.556.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	24	721.156.000	24	721.156.000	24	727.556.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					886.000.000		886.000.000		886.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	41	886.000.000	41	886.000.000	41	886.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				801.000.000		801.000.000		801.000.000		
						Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	27	801.000.000	27	801.000.000	27	801.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	9	35.000.000	9	35.000.000	9	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.430.693.000		2.430.693.000		2.469.998.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	2.430.693.000	84	2.430.693.000	84	2.469.998.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.000.000		450.000.000		450.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	450.000.000	36	450.000.000	36	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.973.693.000		1.973.693.000		2.012.998.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	1.973.693.000	36	1.973.693.000	36	2.012.998.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					818.000.000		818.000.000		808.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	352	818.000.000	352	818.000.000	352	808.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				225.000.000		225.000.000		215.350.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	21	225.000.000	21	225.000.000	21	215.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		3.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	110.000.000	80	110.000.000	80	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				410.000.000		410.000.000		410.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	410.000.000	1	410.000.000	1	410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah								**2.748.970.000**		**2.748.970.000**		**2.748.970.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.5	2.748.970.000	3.5	4	3.5	2.748.970.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.748.970.000		2.748.970.000		2.748.970.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	2.748.970.000	100	2.748.970.000	100	2.748.970.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.748.970.000		2.748.970.000		2.748.970.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	2.748.970.000	100	2.748.970.000	100	2.748.970.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.081.440.000		1.081.440.000		1.031.440.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16	1.081.440.000	16	1.081.440.000	16	1.031.440.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.667.530.000		1.667.530.000		1.717.530.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	20	1.667.530.000	20	1.667.530.000	20	1.717.530.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
JUMLAH									**1.260.343.904.000**		**840.528.463.000**		**851.851.363.000**		

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal, 22 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									**20.631.203.000**		**20.656.143.000**		**14.907.094.000**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	70.1		70.1		70.1		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**20.201.203.000**		**20.226.143.000**		**14.498.974.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	20.201.203.000	84	84	84	14.498.974.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.201.203.000		20.226.143.000		14.498.974.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	84	20.201.203.000	84	20.226.143.000	84	14.498.974.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.508.730.000		15.508.730.000		9.835.792.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	19	15.508.730.000	19	15.508.730.000	19	9.835.792.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.065.170.000		15.065.170.000		9.392.232.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	45	15.065.170.000	45	15.065.170.000	45	9.392.232.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				223.560.000		223.560.000		223.560.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	223.560.000	12	223.560.000	12	223.560.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				110.000.000		110.000.000		110.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					155.388.000		155.388.000		114.179.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	155.388.000	2	155.388.000	2	114.179.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				135.000.000		135.000.000		93.791.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	135.000.000	1	135.000.000	1	93.791.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.388.000		20.388.000		20.388.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	20.388.000	1	20.388.000	1	20.388.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					375.000.000		399.940.000		382.940.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	375.000.000	100	399.940.000	100	382.940.000		
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						24.940.000		24.940.000		
						Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0		43	24.940.000	43	24.940.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				300.000.000		300.000.000		305.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	305.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		28.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	30	28.000.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.103.019.000		1.103.019.000		1.126.251.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.103.019.000	100	1.103.019.000	100	1.126.251.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		25.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.000.000		53.000.000		53.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	53.000.000	1	53.000.000	1	53.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.019.000		13.019.000		9.251.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	13.019.000	1	13.019.000	1	9.251.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				113.000.000		113.000.000		129.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	113.000.000	1	113.000.000	1	129.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				64.000.000		64.000.000		64.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	64.000.000	1	64.000.000	1	64.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.000.000		85.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	85.000.000	1	85.000.000	1	50.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		657.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	600.000.000	1	600.000.000	1	657.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		94.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	94.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					327.000.000		327.000.000		351.920.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	36	327.000.000	36	327.000.000	36	351.920.000		
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		25.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	6	25.000.000	6	25.000.000	7	50.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				252.000.000		252.000.000		251.920.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1	252.000.000	1	252.000.000	1	251.920.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.601.266.000		1.601.266.000		1.553.397.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.601.266.000	1	1.601.266.000	1	1.553.397.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		7.500.000		4.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.500.000	1	7.500.000	1	4.500.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				567.000.000		567.000.000		567.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	567.000.000	1	567.000.000	1	567.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				230.000.000		230.000.000		220.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	230.000.000	1	230.000.000	1	220.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				796.766.000		796.766.000		761.897.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	796.766.000	1	796.766.000	1	761.897.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.130.800.000		1.130.800.000		1.134.495.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1.172	1.130.800.000	1.172	1.130.800.000	1.172	1.134.495.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				391.800.000		391.800.000		391.800.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	391.800.000	11	391.800.000	11	391.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				12.000.000		12.000.000		8.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	54	12.000.000	54	12.000.000	54	8.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				67.000.000		67.000.000		67.000.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	65	67.000.000	65	67.000.000	65	67.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				325.000.000		325.000.000		238.280.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	325.000.000	2	325.000.000	2	238.280.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				85.000.000		85.000.000		85.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	39	85.000.000	39	85.000.000	39	85.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		294.415.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	2	200.000.000	2	294.415.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								**430.000.000**		**430.000.000**		**408.120.000**		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.91	430.000.000	2.91	3	2.91	408.120.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						430.000.000		430.000.000		408.120.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	2.91	430.000.000	2.91	430.000.000	2.91	408.120.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					430.000.000		430.000.000		408.120.000		
						Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	430.000.000	100	430.000.000	100	408.120.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		238.120.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	250.000.000	6	250.000.000	6	238.120.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.000.000		180.000.000		170.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	170.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah									**5.050.000.000**		**5.050.000.000**		**5.050.000.000**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	
						Indeks Inovasi Daerah	Angka	72.5		72.5		72.5		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah								**5.050.000.000**		**5.050.000.000**		**5.050.000.000**		
						Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan	%	100	5.050.000.000	100	100	100	5.050.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						5.050.000.000		5.050.000.000		5.050.000.000		
						Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	
		5.05.02.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					492.329.000		492.329.000		492.329.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi	Dokumen	1	492.329.000	1	492.329.000	1	492.329.000		
		5.05.02.1.01.0012			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				36.750.000		36.750.000		36.750.000		
						Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	36.750.000	1	36.750.000	1	36.750.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0014			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				455.579.000		455.579.000		455.579.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	455.579.000	1	455.579.000	1	455.579.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					1.007.671.000		1.007.671.000		1.007.671.000		
						Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi	Dokumen	1	1.007.671.000	1	1.007.671.000	1	1.007.671.000		
		5.05.02.1.04.0003			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif										
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04.0004			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				741.069.000		741.069.000		741.069.000		
						Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan	Laporan	1	741.069.000	1	741.069.000	1	741.069.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04.0005			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				266.602.000		266.602.000		266.602.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	Laporan	1	266.602.000	1	266.602.000	1	266.602.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Bidang SDM IPTEk dan Infrastruktur Riset dan Inovasi	
		5.05.02.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur	Dokumen	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
		5.05.02.1.01.0003			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				505.807.000		505.807.000		505.807.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	505.807.000	1	505.807.000	1	505.807.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0004			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				494.193.000		494.193.000		494.193.000		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	494.193.000	1	494.193.000	1	494.193.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	1.250.000.000	Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi	
		5.05.02.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	0		0		0			
		5.05.02.1.01.0001			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah										
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					204.400.000		204.400.000		204.400.000		
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	1	204.400.000	1	204.400.000	1	204.400.000		
		5.05.02.1.02.0001			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				204.400.000		204.400.000		204.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	Dokumen	1	204.400.000	1	204.400.000	1	204.400.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					568.800.000		568.800.000		568.800.000		
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	1	568.800.000	1	568.800.000	1	568.800.000		
		5.05.02.1.03.0002			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				204.400.000		204.400.000		204.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1	204.400.000	1	204.400.000	1	204.400.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0003			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah										
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0004			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				204.400.000		204.400.000		204.400.000		
						Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas	Dokumen	1	204.400.000	1	204.400.000	1	204.400.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0005			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan										
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0006			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral										
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	0		0		0			OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.03.0007			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				160.000.000		160.000.000		160.000.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					476.800.000		476.800.000		476.800.000		
						Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Dokumen	1	476.800.000	1	476.800.000	1	476.800.000		
		5.05.02.1.04.0002			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				476.800.000		476.800.000		476.800.000		
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen	1	476.800.000	1	476.800.000	1	476.800.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
						Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi	
		5.05.02.1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					800.000.000		800.000.000		775.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	1	800.000.000	1	800.000.000	1	775.000.000		
		5.05.02.1.01.0002			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				475.000.000		475.000.000		475.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								RKPD		APBD		P-RKPD			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.01.0013			Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				325.000.000		325.000.000		300.000.000		
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan	Dokumen	1	325.000.000	1	325.000.000	1	300.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
		5.05.02.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					500.000.000		500.000.000		525.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	1	525.000.000		
		5.05.02.1.04.0001			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				500.000.000		500.000.000		525.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	1	525.000.000		OPD Provinsi; JAWA TENGAH
JUMLAH									**25.681.203.000**		**25.706.143.000**		**19.957.094.000**		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 22 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024